

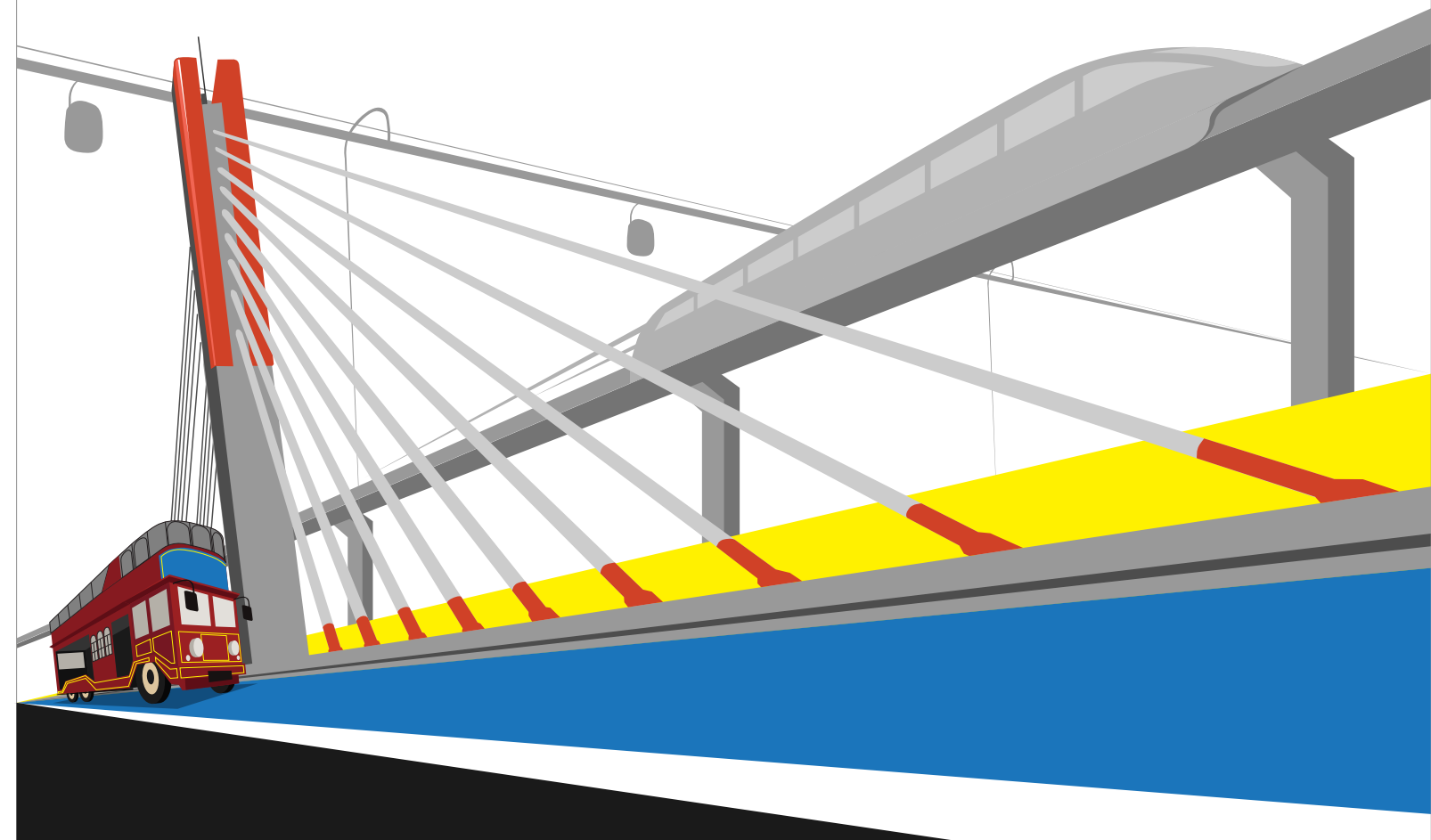
Peraturan Daerah Kota Bandung
No. 03 Tahun 2014

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)



Kota Bandung Tahun 2013–2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)



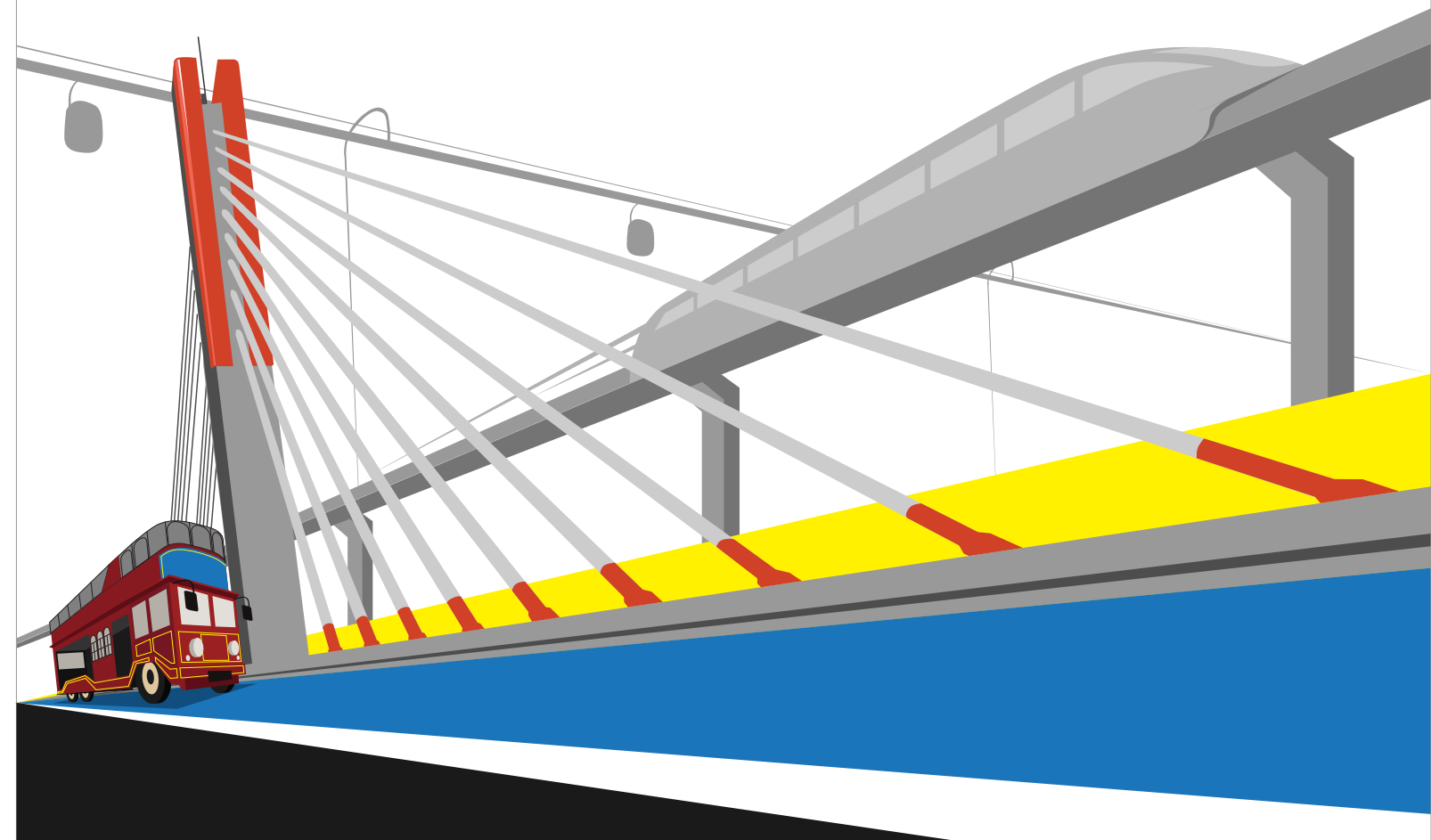
Peraturan Daerah Kota Bandung
No. 03 Tahun 2014

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)



Kota Bandung Tahun 2013–2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)





PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 03 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretarian DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

9. Rencana ...

10. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
13. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana pembangunan jangka panjang nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
17. Rencana kerja pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
19. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

20. Kebijakan ...

20. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
22. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
24. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
25. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
26. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

27. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
28. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
29. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
30. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
31. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
32. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
33. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
34. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
35. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

36. Bersifat ...

36. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
37. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
38. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
39. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
40. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
41. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
42. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
43. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
44. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan;
45. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.

46. Delegasi ...

46. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi;
47. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan;
48. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah;
49. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
50. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
51. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah dan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
52. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

53.Visi ...

53. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
54. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2013-2018

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2013-2018 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
 - a. visi dan misi Kepala Daerah terpilih; dan; dan
 - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Tahun 2013-2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2013-2018

Pasal 3

- (1) Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2013-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA DAERAH
 - BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
 - BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
 - BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB ...

BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH

PELAKSANAAN

BAB XI : PENUTUP

- (2) RPJMD Tahun 2013-2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2013-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUSI

Pasal 5

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. terjadi ...

- c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - (3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Kepala Daerah wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 dan RPJMD 2013-2018 sebelum RPJMD periode berikutnya tersusun.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.
- (4) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Mei 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD

YOSSI IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT:
(47/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610625 198603 1 008



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar	xii
Daftar Grafik	xiv
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3. Hubungan Antar Dokumen	10
1.4. Maksud dan Tujuan.....	16
1.1.1. Maksud	16
1.1.2. Tujuan	17
1.5. Sistematika Penulisan.....	17
2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	20
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	20
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	20
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	25
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana.....	28
2.1.4. Demografi.....	31
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	36
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	36
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	48
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	54
2.3. Aspek Pelayanan Umum	58
2.3.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib.....	58
2.3.1.1. Pendidikan	61
2.3.1.2. Kesehatan	63
2.3.1.3. Pekerjaan Umum	66
2.3.1.4. Perumahan	69

2.3.1.5.	Penataan Ruang	70
2.3.1.6.	Perencanaan Pembangunan.....	71
2.3.1.7.	Perhubungan	72
2.3.1.8.	Lingkungan Hidup.....	74
2.3.1.9.	Pertanahan	80
2.3.1.10.	Kependudukan dan Catatan Sipil.....	81
2.3.1.11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	81
2.3.1.12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	82
2.3.1.13.	Sosial.....	82
2.3.1.14.	Ketenagakerjaan	84
2.3.1.15.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah...	86
2.3.1.16.	Penanaman Modal	87
2.3.1.17.	Kebudayaan	87
2.3.1.18.	Kepemudaan dan Olahraga.....	89
2.3.1.19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	89
2.3.1.20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	90
2.3.1.21.	Ketahanan Pangan	92
2.3.1.22.	Pemberdayaan Masyarakat	94
2.3.1.23.	Statistik.....	95
2.3.1.24.	Kearsipan.....	95
2.3.1.25.	Komunikasi dan Informatika	95
2.3.1.26.	Perpustakaan.....	96
2.3.2.	Fokus Layanan Urusan Pilihan	97
2.3.2.1.	Pertanian.....	97
2.3.2.2.	Pariwisata	98
2.3.2.3.	Kelautan dan Perikanan.....	99
2.3.2.4.	Perdagangan	100
2.3.2.5.	Perindustrian	101
2.3.2.6.	Ketransmigrasian	103
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah.....	104
2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	104
2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	105
2.4.3.	Fokus Iklim Berinvestasi.....	106
2.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia.....	112

2.5.	Perkembangan IPM Kota Bandung.....	113
2.5.1.	Perkembangan Komponen IPM di Kota Bandung	116
2.5.1.1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	116
2.5.1.2.	Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).....	117
2.5.1.3.	Paritas Daya Beli (<i>Purchasing Power Parity</i> /PPP).....	118
2.5.2.	IPM Tingkat Kecamatan di Kota Bandung.....	119
2.5.3.	Disparitas IPM Kabupaten/Kota (Lintas Daerah)	120
3.	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	125
3.1.	Kinerja Keuangan Tahun 2009-2013	123
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	123
3.1.1.1.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	126
3.1.1.2.	Target dan Realisasi Belanja Daerah .	139
3.1.1.3.	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah	146
3.1.2.	Neraca Daerah.....	148
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2009-2013...	153
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	156
3.2.2	Analisis Pembiayaan	158
3.3.	Kerangka Pendanaan	161
3.3.1.	Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	161
3.3.2.	Proyeksi Data.....	163
3.3.3.	Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	167
3.3.4.	Kebijakan Alokasi Anggaran	169
4.	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	175
4.1.	Permasalahan Pembangunan	173
4.1.1.	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah.....	173
4.1.2.	Capaian Misi 1 RPJPD Tahap II (2009-2013)....	176
4.1.3.	Capaian Misi 2 RPJPD Tahap II (2009-2013)....	179
4.1.4.	Capaian Misi 3 RPJPD Tahap II (2009-2013)....	182
4.1.5.	Capaian Misi 4 RPJPD Tahap II (2009-2013)....	184
4.1.6.	Capaian Misi 5 RPJPD Tahap II (2009-2013)....	189

4.1.7.	Capaian Misi 6 RPJPD Tahap II (2009-2013)....	192
4.1.8.	Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib/Pilihan).	194
4.2	Isu Strategis	207
4.2.1.	Kajian Kebijakan Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Internasional.....	208
4.2.2.	Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya	215
4.2.3.	Kebijakan Pembangunan Daerah	215
4.2.4.	Penetapan Isu Strategis	216
5.	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	246
5.1.	Arahan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025.....	243
5.2.	Visi dan Misi RPJMD Kota Bandung 2013-2018	253
5.3.	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018.....	258
5.4.	Pembangunan Kawasan Teknopolis Gedebage	288
5.5.	Indikator, Kolaborasi, dan Inovasi.....	291
5.6.	Janji Walikota dan Wakil Walikota.....	296
6.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	301
6.1.	Strategi dan Arah Kebijakan.....	301
7.	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	330
8.	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS	370
9.	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	451
10.	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.....	464
10.1.	Pedoman Transisi.....	464
10.2.	Kaidah Pelaksanaan.....	465
11.	PENUTUP.....	467

Daftar Tabel

Tabel 2-1	Temperatur Rata-rata di Kota Bandung Tahun 2007-2012	22
Tabel 2-2	Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya.....	26
Tabel 2-3	Kebijakan Ruang Kota Bandung	28
Tabel 2-4	Kejadian Bencana di Kota Bandung Periode 2008-2012....	29
Tabel 2-5	Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2012 serta Rata-rata Pertumbuhannya dari Tahun 2008	33
Tabel 2-6	Penduduk 10 Tahun ke Atas dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kota Bandung Tahun 2008-2012.....	36
Tabel 2-7	Kontribusi Kegiatan Ekonomi Kota Bandung dan Sekitarnya terhadap Ekonomi Jawa Barat Tahun 2012	38
Tabel 2-8	Perkembangan Indikator PDRB dan LPE Kota Bandung Tahun 2008-2012.....	38
Tabel 2-9	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) tahun 2008 - 2012.....	39
Tabel 2-10	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012	41
Tabel 2-11	Jumlah Rumah Tangga dan Individu Miskin di Kota Bandung Tahun 2011	47
Tabel 2-12	Perkembangan APM Kota Bandung Tahun 2009-2012.....	49
Tabel 2-13	Perkembangan APK Kota Bandung Tahun 2009-2012	50
Tabel 2-14	Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Kota Bandung Tahun 2008-2012 (Penduduk 10 Tahun ke Atas)	50

Tabel 2-15	Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kota Bandung Tahun 2012.....	53
Tabel 2-16	Rekapitulasi Potensi Seni Budaya di Kota Bandung Tahun 2009	55
Tabel 2-17	Jenis Sanggar Seni dan Lingkung Seni di Kota Bandung ..	55
Tabel 2-18	Perkembangan Prasarana Olah raga Kota Bandung Tahun 2008-2012	57
Tabel 2-19	Hasil Kinerja Fokus Layanan Urusan Wajib Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2008-2013	58
Tabel 2-20	Kondisi Pelayanan Air Bersih Kota Bandung Tahun 2009.	69
Tabel 2-21	Kebutuhan air bersih Kota Bandung.....	76
Tabel 2-22	Pemenuhan Air Bersih oleh PDAM	77
Tabel 2-23	Kapasitas Produksi PDAM Tirtawening Kota Bandung	77
Tabel 2-24	Jumlah Tanah Bersertifikat di Kota Bandung periode 2008-2010	80
Tabel 2-25	Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Bandung PadaTahun 2011	83
Tabel 2-26	Hasil Kinerja Urusan Kebudayaan dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2008-2012	89
Tabel 2-27	Hasil Kinerja Fokus Layanan Urusan Pilihan Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2008-2013	97
Tabel 2-28	Jenis Industri Kreatif di Kota Bandung	102
Tabel 2-29	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bandung Periode 2007-2010 (Rp Milyar)....	104
Tabel 2-30	Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non-Makanan terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Bandung Periode 2007-2010.....	105
Tabel 2-31	Standar Waktu Pelayanan Perizinan	108
Tabel 2-32	Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	110
Tabel 2-33	Perincian Pendapatan Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI).....	111
Tabel 2-34	Rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Bandung Periode 2008-2012	112
Tabel 2-35	Rasio Ketergantungan di Kota Bandung Periode 2007-2011	113
Tabel 2-36	Perkembangan IPM dan Komponennyadi Kota Bandung Tahun 2006-2013*.....	116

Tabel 2-37	Pengelompokan Kecamatan Menurut Capaian IPM di Kota Bandung Tahun 2012*.....	119
Tabel 2-38	Peringkat IPM Kota Bandung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota secara Nasional.....	121
Tabel 2-39	Sepuluh Kabupaten/Kota dengan Capaian Tertinggi dan Terendah Tahun 2011.....	122
Tabel 3-1	Perubahan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 s.d. 2013)*	125
Tabel 3-2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	126
Tabel 3-3	Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	127
Tabel 3-4	Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	128
Tabel 3-5	Komposisi Pendapatan Kab/Kota di Indonesia dan Kota Bandung Tahun 2010-2012	128
Tabel 3-6	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	129
Tabel 3-7	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	129
Tabel 3-8	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	130
Tabel 3-9	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	131
Tabel 3-10	Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	131
Tabel 3-11	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	132
Tabel 3-12	Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	132
Tabel 3-13	Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	133
Tabel 3-14	Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	134
Tabel 3-15	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	134
Tabel 3-16	Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	135

Tabel 3-17	Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	135
Tabel 3-18	Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	136
Tabel 3-19	Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Prov/Kab/Kota/Lainnya Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	136
Tabel 3-20	Target dan Realisasi Lain-lain Penerimaan Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	137
Tabel 3-21	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2008-2013.....	137
Tabel 3-22	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	139
Tabel 3-23	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	140
Tabel 3-24	Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	141
Tabel 3-25	Target dan Realisasi Belanja Subsidi Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	141
Tabel 3-26	Target dan Realisasi Belanja Hibah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	141
Tabel 3-27	Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	142
Tabel 3-28	Target dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008-2013	143
Tabel 3-29	Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	143
Tabel 3-30	Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	144
Tabel 3-31	Target dan Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	144
Tabel 3-32	Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	145
Tabel 3-33	Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	145
Tabel 3-34	Struktur Pembelanjaan Kabupaten/Kota lain di Indonesia dan Kota Bandung Tahun 2010-2012 (%)	146
Tabel 3-35	Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	147
Tabel 3-36	Rincian Estimasi dan Realisasi SiLPA Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013	147

Tabel 3-37	Rincian Target dan Realisasi Pencairan Dana Cadangan Kota Bandung Anggaran 2008-2012	147
Tabel 3-38	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Bandung ..	149
Tabel 3-39	Analisis Rasio Keuangan Kota Bandung.....	152
Tabel 3-40	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bandung.....	157
Tabel 3-41	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	157
Tabel 3-42	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2010 s/d 2013.....	158
Tabel 3-43	Defisit Riil Anggaran Kota Bandung (Milyar Rp)	158
Tabel 3-44	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bandung (Milyar Rp)	159
Tabel 3-45	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Bandung	159
Tabel 3-46	Penutup Defisit Riil Anggaran	160
Tabel 3-47	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama ..	161
Tabel 3-48	Tingkat Pertumbuhan Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Bandung.....	162
Tabel 3-49	Proyeksi Pendapatan Daerah (Milyar Rp).....	163
Tabel 3-50	Proyeksi Pendapatan Daerah setelah disesuaikan dengan APBD Tahun 2014 (Milyar Rp)	164
Tabel 3-51	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama setelah disesuaikan dengan APBD 2014 (dalam juta Rp.)	166
Tabel 3-52	Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bandung setelah disesuaikan dengan APBD 2014 (Milyar Rp).....	168
Tabel 3-53	Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis Prioritas Tahun Anggaran 2014-2018 setelah disesuaikan dengan APBD 2014 (dalam juta rupiah)	171
Tabel 3-54	Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 Setelah Disesuaikan dengan APBD 2014 (Milyar Rp)	172
Tabel 4-1	Status Capaian Indikator RPJPD Kota Bandung 2005-2025 Tahap II (2009-2013) hingga Tahun 2012	175
Tabel 4-2	Capaian Misi 1 RPJPD Kota Bandung “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Religius” Tahap II (2009-2013)	177
Tabel 4-3	Capaian Misi 2 RPJPD Kota Bandung “Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing” Tahap II (2009-2013)	181

Tabel 4-4	Capaian Misi 3 RPJPD Kota Bandung “Mengembangkan Kehidupan Sosial Budaya Kota yang Kreatif, Berkesadaran Tinggi serta Berhati Nurani” Tahap II (2009-2013).....	183
Tabel 4-5	Capaian Misi 4 RPJPD Kota Bandung “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kota” Tahap II (2009-2013) .	186
Tabel 4-6	Capaian Misi 5 RPJPD Kota Bandung “Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan” Tahap II (2009-2013)	190
Tabel 4-7	Capaian Misi 6 RPJPD Kota Bandung “Mengembangkan Sistem Pembiayaan Kota Terpadu (Melalui Pembiayaan Pembangunan yang Melibatkan Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat)” Tahap II (2009-2013)	193
Tabel 4-8	Identifikasi Isu Strategis/Kebijakan RPJMD Kabupaten/ Kota Lain	215
Tabel 4-9	Keselarasan Isu Strategis Pada RPJPD Kota Bandung dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018	217
Tabel 5-1	Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah	256
Tabel 5-2	Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Bandung dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018	257
Tabel 5-3	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung di Misi 1	261
Tabel 5-4	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung di Misi 2	269
Tabel 5-5	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung di Misi 3	275
Tabel 5-6	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung di Misi 4	282
Tabel 5-7	Rencana Pengembangan Teknopolis Gedebage.....	290
Tabel 5-8	Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	297
Tabel 6-1	Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 1	306
Tabel 6-2	Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 2	311
Tabel 6-3	Strategi dan Arah Kebijakan Di Misi 3	317
Tabel 6-4	Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 4	326
Tabel 7-1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Bandung di Misi 1	338
Tabel 7-2	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Bandung di Misi 2	345
Tabel 7-3	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Bandung di Misi 3	350
Tabel 7-4	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Bandung di Misi 4	362
Tabel 8-1	Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan	373
Tabel 9-1	Perkembangan IPM dan Komponennya di Kota Bandung Tahun 2006-2013	451

Tabel 9-2 Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bandung
Tahun 2014-2018 454

Tabel 9-3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota
Bandung 455



Daftar Gambar

Gambar 1-1	Proses Penyusunan RPJMD Kota Bandung.....	5
Gambar 1-2	Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah.....	11
Gambar 1-3	Tahapan Pembangunan	12
Gambar 1-4	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	13
Gambar 1-5	Bagan Alir Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah	14
Gambar 1-6	Hubungan antara RPJMD Kota Bandung dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	15
Gambar 2-1	Peta Orientasi Kota Bandung	21
Gambar 2-2	Kondisi Ruas Jalan yang Rusak di Kota Bandung.....	66
Gambar 2-3	Banjir di Ruas Jalan di Jembatan Pasopati.....	68
Gambar 2-4	Kemacetan di Salah Satu Ruas Jalan Kota Bandung	73
Gambar 2-5	Pemandangan Tumpukan Sampah di Jln. Tamansari Bandung.....	76
Gambar 2-6	Kondisi di sekitar Sungai Cikapundung yang digunakan untuk Wisata Air.....	79
Gambar 2-7	Hilir Sungai Cikapundung di Jalan Tamansari (22 Oktober 2012)	80
Gambar 2-8	Anak Jalanan dan Pengemis di Salah Satu Sudut Jalan Kota Bandung	83
Gambar 2-9	Kondisi PKL di Kawasan Zona Merah Alun-alun Kota Bandung	101
Gambar 2-10	Tujuan Pembangunan Daerah	114
Gambar 4-1	Jalur Sepeda di Kota Bandung.....	223
Gambar 5-1	Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah	258
Gambar 5-2	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	259
Gambar 5-3	Membangun Kolaborasi.....	295

Gambar 5-4 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih 300

Gambar 6-1 Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional.....302

Gambar 8-1 Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD.....372

Daftar Grafik

Grafik 2-1	Struktur Penggunaan Lahan di Kota Bandung Tahun 2011	25
Grafik 2-2	Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Bandung Tahun 2007–2012 dan Proyeksi Tahun 2013–2018.....	32
Grafik 2-3	Persentase Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2012	33
Grafik 2-4	Persentase Struktur Umur Penduduk di Kota Bandung Tahun 2012	35
Grafik 2-5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2008–2012 dan Perbandingannya dengan Tingkat Jawa Barat dan Nasional (%).....	37
Grafik 2-6	Kecenderungan Pertambahan PDRB (Harga Konstan) Kota Bandung Tahun 2013-2018	39
Grafik 2-7	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Kota Bandung Atas Dasar Harga Konstan (Hk) tahun 2008 - 2012	40
Grafik 2-8	Struktur Ekonomi Kota Bandung Tahun 2008-2012 (Atas Dasar Harga Berlaku)	42
Grafik 2-9	Kecenderungan Sektor Kontribusi Terbesar Ekonomi Kota Bandung (Atas Dasar Harga Berlaku).....	43
Grafik 2-10	Perkembangan dan Kecenderungan Inflasi di Kota Bandung	43
Grafik 2-11	Inflasi Tahunan Kota Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Periode 2008-2013.....	44
Grafik 2-12	Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kota Bandung Periode 2008-2012	45

Grafik 2-13	Perbandingan Pendapatan Perkapita (PDRB Per Kapita Harga Konstan) Kota Bandung, Jawa Barat dan Tingkat Nasional Periode 2008-2012	45
Grafik 2-14	Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Bandung Tahun 2008-2012	48
Grafik 2-15	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2008-2012	49
Grafik 2-16	Perkembangan dan Proyeksi Angka Harapan Hidup Kota Bandung	51
Grafik 2-17	Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Bandung Tahun 2009-2013	52
Grafik 2-18	Perkembangan dan Trend Rasio Penduduk yang Bekerja ..	52
Grafik 2-19	Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kota Bandung Tahun 2011	53
Grafik 2-20	Jumlah Lingkung Seni dan Forum Komunitas Seni Budaya Tahun 2006-2012	55
Grafik 2-21	Perkembangan Kreator Seni Budaya Tahun 2006-2012	56
Grafik 2-22	Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Kota Bandung Tahun Periode 2006-2013 ..	62
Grafik 2-23	Perkembangan Jumlah Posyandu Kota Bandung periode 2007-2013	63
Grafik 2-24	Perkembangan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung periode 2006-2013	71
Grafik 2-25	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung periode 2008-2012	85
Grafik 2-26	Realisasi Investasi Tahun 2008 s.d 2013	87
Grafik 2-27	Perkembangan Gangguan Umum Kamtibmas di Kota Bandung Tahun 2008-2011	107
Grafik 2-28	Banyaknya Gangguan Umum Kamtibmas Menurut Jenis Kejadian di Kota Bandung Tahun 2011	108
Grafik 2-29	Jenis dan Jumlah Pengaduan Tahun 2012	110
Grafik 2-30	Perkembangan IPM Kota Bandung Periode 2008-2013	114
Grafik 2-31	Perkembangan IPM Kota Bandung tahun 2006-2013 dan Trend Hingga 2018	115
Grafik 2-32	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bandung, Tahun 2010-2013 (dalam tahun)	116
Grafik 2-33	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bandung Tahun 2008-2013 (dalam Tahun)	117
Grafik 2-34	Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Bandung Tahun 2010-2013 (dalam %)	117

Grafik 2-35	Perkembangan Paritas Daya Beli Kota Bandung, Tahun 2010-2013* (dalam ribu rupiah).....	118
Grafik 2-36	Perbandingan IPM di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011..	120
Grafik 2-37	Trend Perkembangan IPM di Kota Bandung, Kota Bekasi dan Kota Depok Periode 2004-2011	121
Grafik 3-1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2012	126
Grafik 3-2	Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2012	127
Grafik 3-3	Komposisi Pendapatan Kab/Kota di Indonesia dan Kota Bandung Tahun 2010-2012	128
Grafik 3-4	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Bandung.....	130
Grafik 3-5	Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2012	133
Grafik 3-6	Target dan Realisasi Lain-Lain Penerimaan Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2012	137
Grafik 3-7	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2012	140
Grafik 3-8	Target dan Realisasi Belanja Hibah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2012	142
Grafik 3-9	Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2012	144
Grafik 3-10	Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2012	145
Grafik 3-11	Struktur Pembelanjaan Kabupaten/Kota lain di Indonesia dan Kota Bandung Tahun 2010-2012 (%)	146
Grafik 3-12	Proyeksi Pendapatan Daerah (Milyar Rp).....	164
Grafik 3-13	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama (Milyar Rp)	167
Grafik 3-14	Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bandung (Milyar Rp)	168
Grafik 4-1	Status Capaian Indikator RPJPD Kota Bandung 2005-2025 Tahap II (2009-2013) hingga Tahun 2012	175
Grafik 5-1	Indeks Kenyamanan Kota Bandung	293

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dengan telah terpilih dan dilantiknya Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung masa bakti periode 2013-2018, pada tanggal 16 September 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-6529 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bandung Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.32-6530 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bandung Provinsi Jawa Barat, maka melekat kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya berdasarkan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Salah satu indikasi perencanaan yang baik adalah mengacu atau berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan pedoman dan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah, selain itu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), juga mengamanatkan pemerintahan daerah provinsi, Kabupaten/Kota untuk menyusun perencanaan pembangunan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sebagai pelaksanaan amanat tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan RPJPD Kota Bandung 2005-2025 di dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008. Salah satu substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah menetapkan Visi Daerah: Mewujudkan Kota Bandung Sebagai Kota Bermartabat 2025, yang terdiri atas 6 Misi yang

didalamnya memuat indikator dan target capaian. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu: Tahap I (2003-2008), Tahap II (2009-2013), Tahap III (2014-2018), Tahap IV (2019-2023), dan Tahap V (2024-2025).

Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan, maka RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kota Bandung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2013-2018 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu, RKPD sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018.

RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu RPJMD yang disusun ini juga telah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

Penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan tahun pertama perencanaan 2014, merupakan Tahap III (ketiga) RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya; disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah.

Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD;

2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

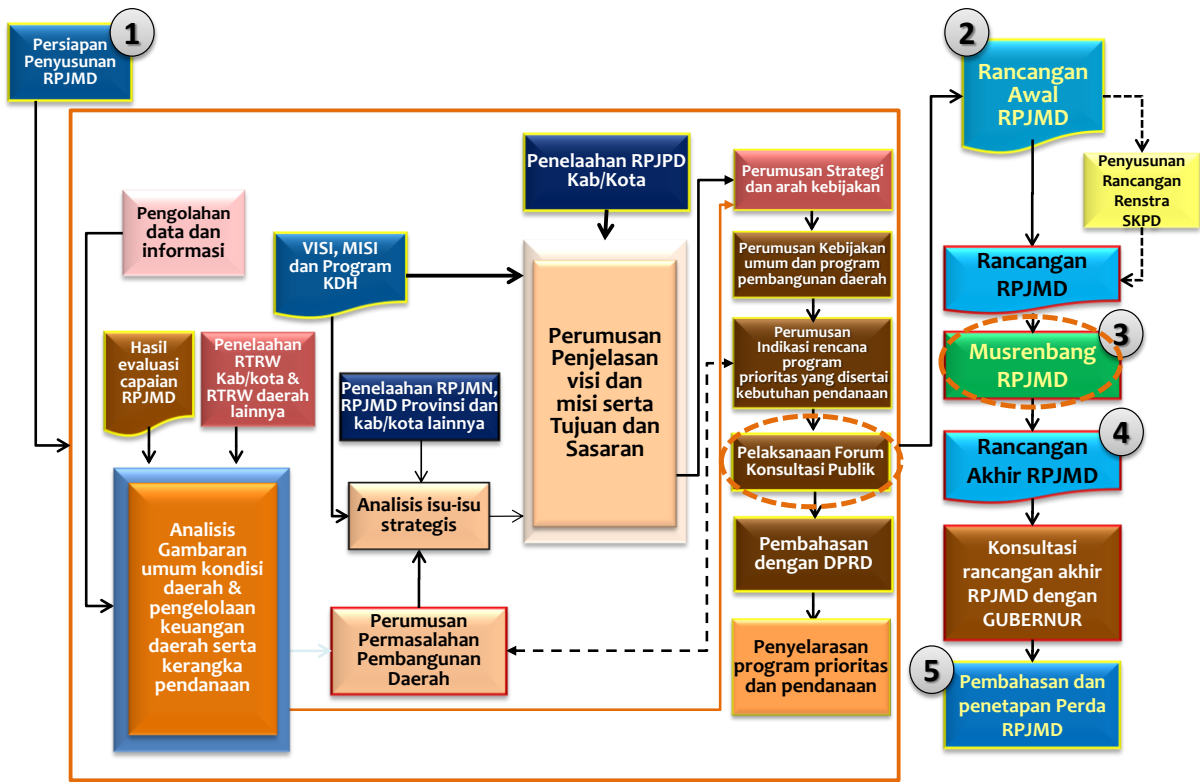
Pendekatan-pendekatan tersebut secara utuh diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dan telah dilaksanakan secara konsisten. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas telah dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik. Terakhir, Pendekatan Politis dilakukan melalui pembahasan di DPRD Kota Bandung, yang mengacu pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu: Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota kepada DPRD Kabupaten/Kota untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.

Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, disampaikan pada tanggal 27 Januari 2014, atau lebih cepat dari ketentuan yang diamanatkan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Proses penting lainnya dalam penyusunan RPJMD Kota Bandung ini adalah pemahaman awal posisi Kota Bandung yang unik atau berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Keunikan ini muncul dari faktor karakteristik geografis serta sejarahnya. Penyusunan RPJMD Kota

Bandung Tahun 2013-2018 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjangkaran aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1-1
Proses Penyusunan RPJMD Kota Bandung



Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu:

1. RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD);

4. RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan alatatau instrument pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda;
5. RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 (lima) tahun;
6. RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Provinsi;
7. RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
26. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK.07/2010 tentang Penyelarasan RPJM Daerah dengan RPJM Nasional 2010-2014;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 tanggal 10 Desember 2013 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
34. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
35. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07 jo. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 05);
36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
37. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18).

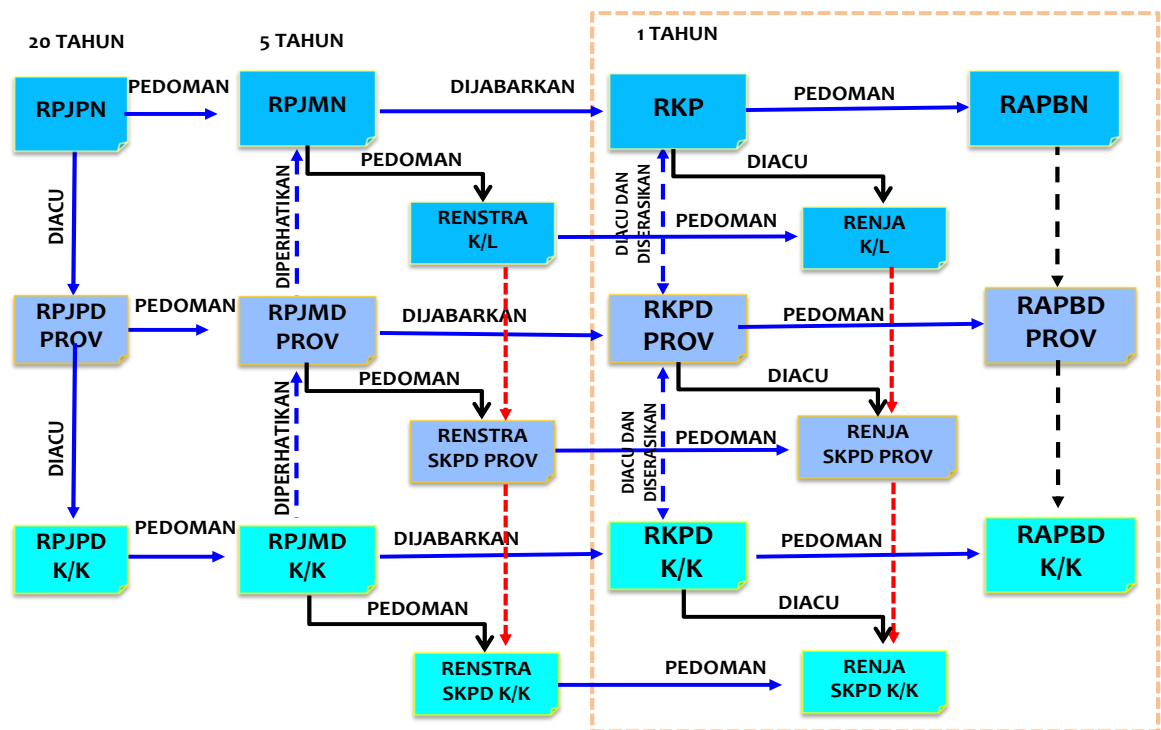
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2010-2014, serta RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018. Agar RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah,

antarwaktu, antarruang, dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 1-2
Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah



Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

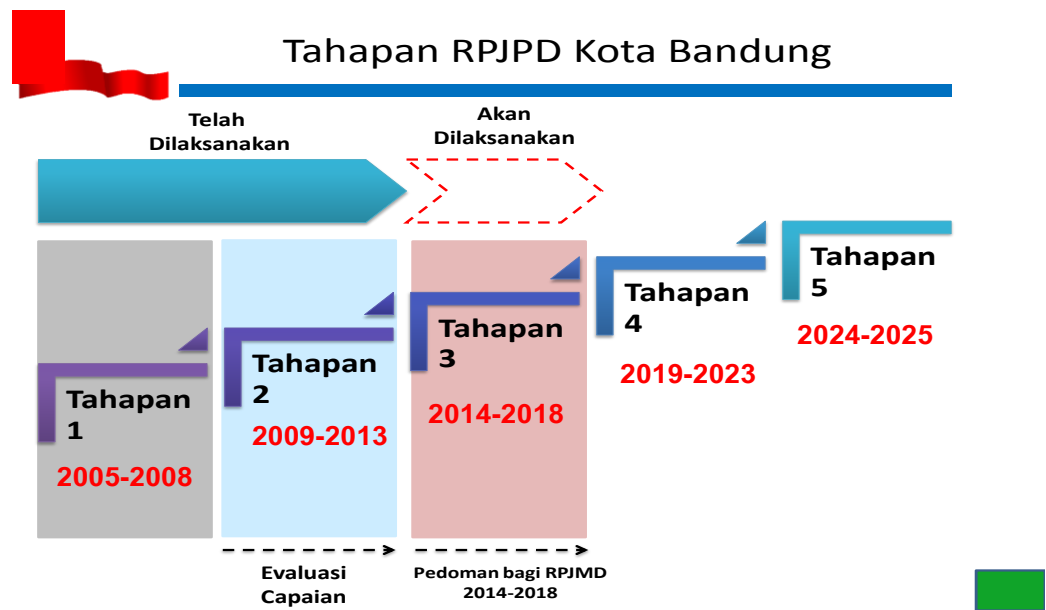
1. RPJMD Kota Bandung dengan RPJPD Kota Bandung

RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung periode 2013-2018. Dengan kata lain dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan. Suatu program

pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Gambar 1-3
Tahapan Pembangunan



2. RPJMD Kota Bandung dengan Renstra SKPD

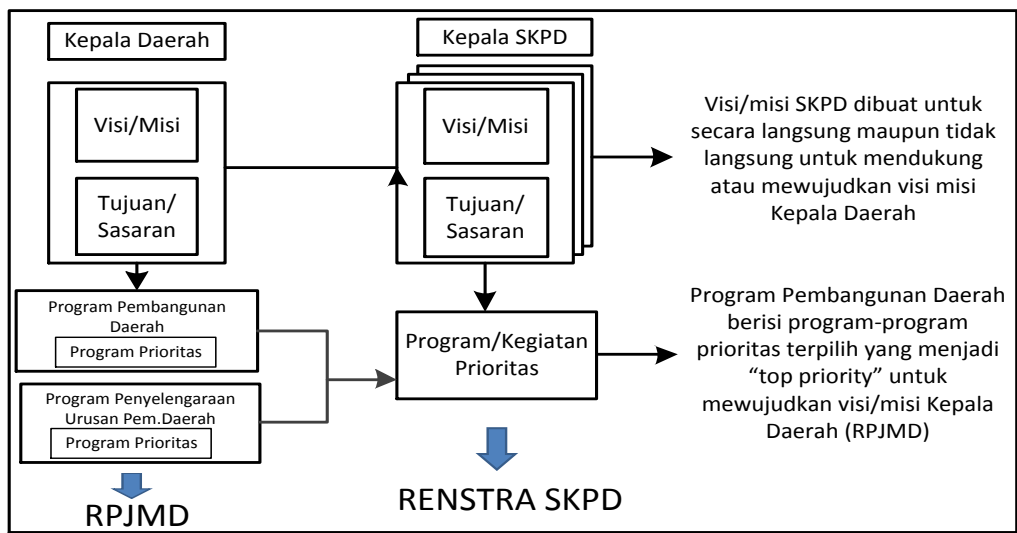
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 85 Ayat (2), Renstra SKPD disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program

yang ditetapkan dalam RPJMD. Visi SKPD merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.

Perumusan rancangan Renstra SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD tersebut bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Gambar 1-4
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



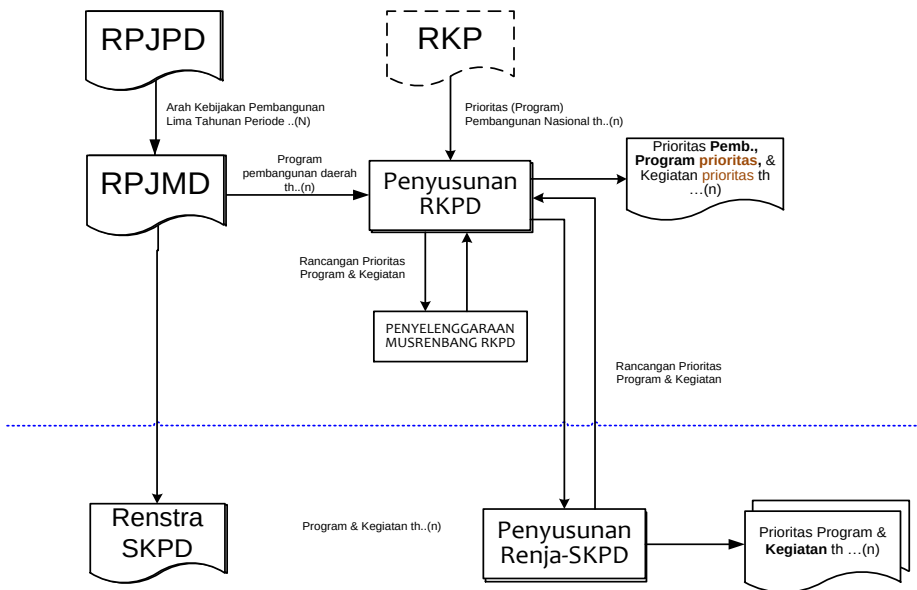
3. RPJMD Kota Bandung dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Bandung yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota

Bandung yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kota Bandung, RPJMD Provinsi Jawa Barat, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

Gambar 1-5
Bagan Alir Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah



Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

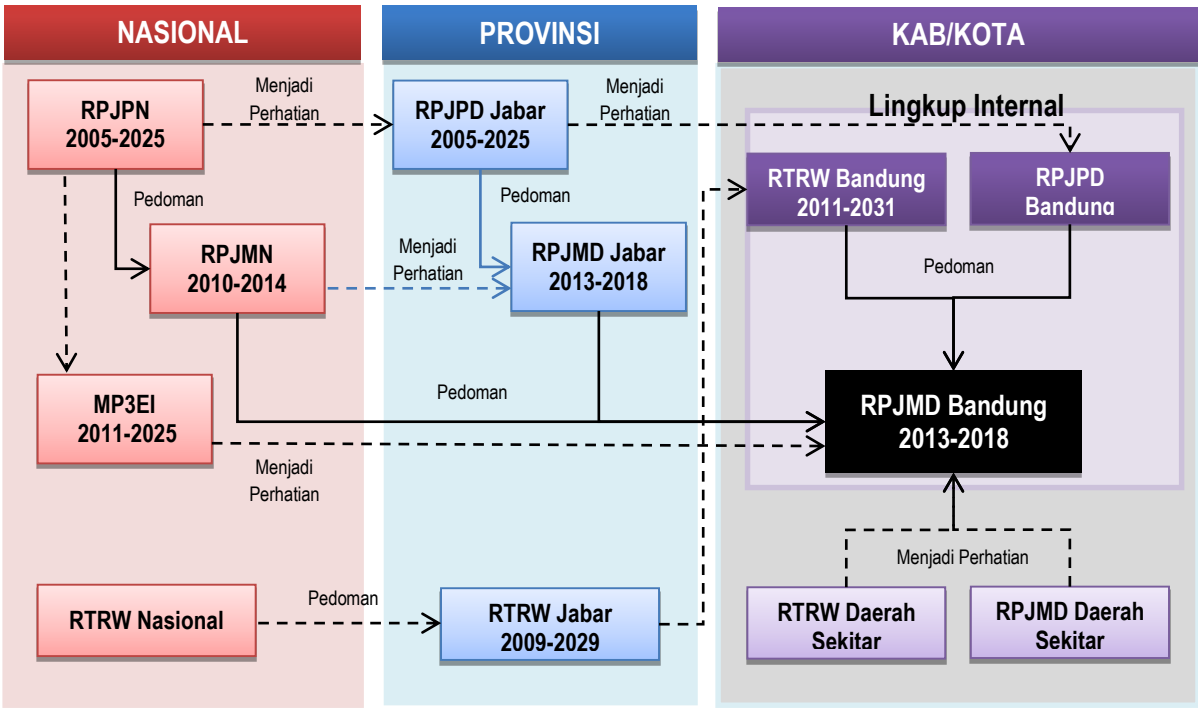
4. RPJMD Kota Bandung dengan Perencanaan Lainnya

Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 juga perlu ditelaah baik dokumen pada level nasional, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten/Kota di sekitar Kota Bandung, yaitu:

1. Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung;
5. Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD wilayah sekitar Kota Bandung seperti Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang, terkait dengan Bandung Metropolitan Area;
6. Dokumen terkait lainnya (yang bersifat perencanaan sektoral).

Skema hubungan antara RPJMD Kota Bandung 2013-2018 dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam Gambar berikut ini.

Gambar 1-6
Hubungan antara RPJMD Kota Bandung
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Penyusunan RPJMD Kota Bandung berpedoman pada RTRW Kota Bandung yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun

2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.1.1. Maksud

RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Bandung sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan Walikota terpilih masa bakti 2013-2018,

sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.1.2. Tujuan

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) kedepan. Sebagai pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam menyusun Renstra SKPD periode 2013-2018;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan Visi dan Misi Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2013-2018, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD tahun 2013-2018, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2014-2018.
5. Menetapkan indikator kinerja SKPD dan Indikator kinerja Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Bandung periode 2013-2018.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari 11 (sebelas) bab, sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kota Bandung.

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Bandung secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya adalah: (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.

BAB 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB 4 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Bandung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai kebijakan keuangan daerah Kota Bandung dalam jangka menengah.

BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan.

BAB 8 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam Bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD.

BAB 9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Dalam bab ini ditetapkan dan dijelaskan mengenai indikator kinerja daerah Kota Bandung dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab terakhir ini memuat pedoman transisi implementasi RPJMD dari periode sebelum dan sesudahnya, serta dan kaidah pelaksanaannya.

BAB 11 PENUTUP



RPJMD

BAB 2

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kota Bandung terletak pada posisi 107°36' Bujur Timur dan 6°55' Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Bandung adalah 16.729,65 Ha. Perhitungan luasan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Secara administratif, Kota Bandung berbatasan dengan beberapa daerah Kabupaten/Kota lainnya, yaitu:

1. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;
2. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
3. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan
4. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

Gambar 2-1
Peta Orientasi Kota Bandung



Secara morfologi regional, Kota Bandung terletak di bagian tengah “Cekungan Bandung”, yang mempunyai dimensi luas 233.000 Ha. Secara administratif, cekungan ini terletak di lima daerah administrasi Kabupaten/Kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan 5 Kecamatan yang termasuk Kabupaten Sumedang.

B. Kondisi Topografi

Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 m di atas permukaan laut (dpl). Titik tertinggi berada di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 m dpl, dan titik terendah berada di sebelah Selatan dengan ketinggian 675 m dpl. Wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan membentuk Kota Bandung menjadi semacam cekungan (*Bandung Basin*).

C. Kondisi Geologi

Keadaan geologis di Kota Bandung dan sekitarnya terdiri atas lapisan aluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di wilayah bagian Utara umumnya jenis tanah andosol, sedangkan di bagian Selatan serta Timur terdiri atas jenis aluvial kelabu dengan bahan endapan liat. Di bagian tengah dan Barat tersebar jenis tanah andosol. Secara geologis Kota Bandung berada di Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh Gunung Berapi yang masih aktif dan berada di antara tiga daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i) sumber

gempa bumi Sukabumi-Padalarang-Bandung, (ii) sumber gempa bumi Bogor-Puncak-Cianjur, serta (iii) sumber gempa bumi Garut-Tasikmalaya-Ciamis. Daerah-daerah ini aktif di sepanjang sesar-sesar yang ada, sehingga menimbulkan gempa tektonik yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Selain itu Kota Bandung yang berpenduduk banyak dan padat serta kerapatan bangunan yang tinggi juga berisiko tinggi pada berbagai bencana.

D. Kondisi Klimatologi

Iklim Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan di sekitarnya. Namun beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan suhu, serta musim hujan yang lebih lama dari biasanya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, musim hujan dirasakan lebih lama terjadi di Kota Bandung.

Secara alamiah, Kota Bandung tergolong daerah yang cukup sejuk. Selama tahun 2012 tercatat suhu tertinggi di Kota Bandung mencapai 30,9°C yang terjadi pada bulan September. Suhu terendah di Kota Bandung pada tahun 2012 adalah 17,4°C yaitu pada bulan Juli. Kondisi temperatur rata-rata Kota Bandung dari tahun 2007-2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2-1
Temperatur Rata-rata di Kota Bandung
Tahun 2007-2012

Tahun	Temperatur (°C)		
	Rata-rata	Maksimum	Minimum
2007	23,5	28,9	19,4
2008	23,1	28,6	19,4
2009	23,4	28,9	19,5
2010	23,3	28,4	20,0
2011	23,4	29,2	19,7
2012	23,4	29,3	9,5

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tahun 2012

Semakin sedikitnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta meningkatnya pencemaran udara karena aktivitas penduduk berkontribusi dalam meningkatkan iklim mikro di Kota Bandung. Aktivitas pencemar yang tergolong besar adalah dari pertumbuhan jumlah kendaraan. Selain pertumbuhan jumlah kendaraan, keberadaan jalan Tol Cipularang turut meningkatkan jumlah kendaraan menuju Kota Bandung. Hasil penelitian Departemen Teknik Lingkungan ITB,

menunjukkan bahwa keberadaan tol Cipularang telah berimplikasi terhadap kualitas udara di Kota Bandung. Di titik masuk Kota Bandung seperti gerbang tol Pasteur dan jembatan Cikapayang, kandungan CO rata-rata pada hari Jumat dan Sabtu meningkat sekitar 38% (di hari normal sekitar 1.800 kg/hari menjadi 2.500 kg/hari pada Jumat dan Sabtu), sedangkan NO_x meningkat 59% dan HC meningkat 50%. Meningkatnya pencemaran udara di Kota Bandung juga dipengaruhi oleh tidak terawatnya mesin kendaraan. Data BPLH Kota Bandung menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji emisi gas buang kendaraan bermotor, lebih dari 60% kendaraan berbahan bakar solar tidak memenuhi baku mutu emisi, sementara untuk yang berbahan bakar bensin berfluktuasi dari sekitar 10% hingga 52%.

E. Kondisi Hidrologi

Wilayah Kota Bandung dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 km, yaitu Sungai Cikapundung, Sungai Cipamokolan, Sungai Cidurian, Sungai Cicadas, Sungai Cinambo, Sungai Ciwastra, Sungai Citepus, Sungai Cibedung, Sungai Curug Dog-dog, Sungai Cibaduyut, Sungai Cikahiyangan, Sungai Cibuntu, Sungai Cigondewah, Sungai Cibeureum, dan Sungai Cinanjur. Sungai-sungai tersebut selain dipergunakan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan, juga oleh sebagian kecil penduduk masih dipergunakan untuk keperluan MCK.

Kota Bandung juga termasuk dalam wilayah Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Citarum bagian hulu. Secara Nasional, DPS ini sangat penting karena merupakan pemasok utama waduk Saguling dan Cirata yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, pertanian, dan lainnya.

Saat ini kondisi sebagian besar sungai di Kota Bandung telah mengalami pencemaran. Regulasi yang tidak tegas terhadap pengelolaan limbah pabrik menjadi salah satu penyebab tercemarnya sungai yang ada. Selain itu, penurunan kualitas sungai disebabkan oleh pembuangan air kotor oleh warga. Sungai Cikapundung merupakan salah satu sungai penting yang membelah Kota Bandung dan saat ini telah banyak kehilangan fungsi ekologisnya.

F. Penggunaan Lahan

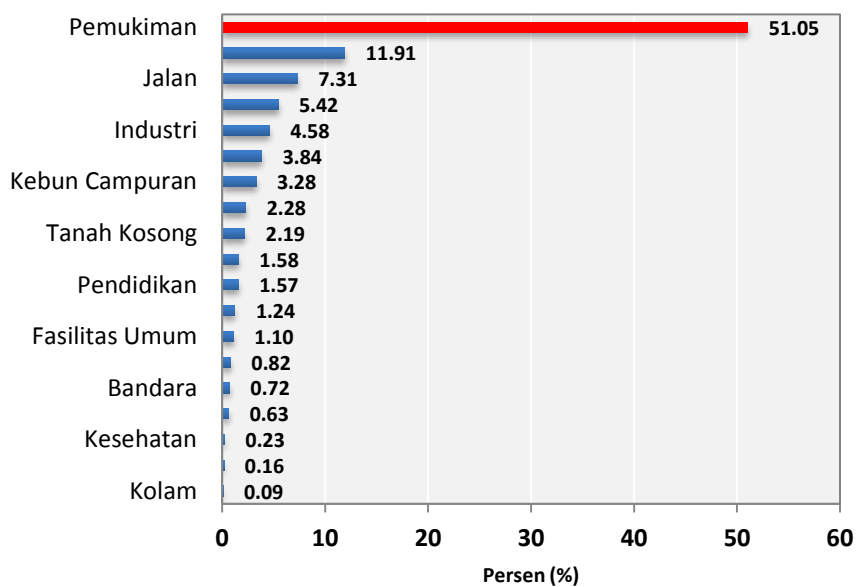
1. **Kawasan lindung** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kota Bandung terdiri atas:

- Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- Kawasan perlindungan setempat;
- Kawasan RTH;
- Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
- Kawasan Eks Industri;
- Kawasan rawan bencana;
- Kawasan lindung lainnya.

2. **Kawasan budidaya** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Bandung terdiri atas:

- Kawasan permukiman;
- Kawasan pertanian;
- Kawasan perdagangan dan jasa;
- Kawasan industri;
- Kawasan perkantoran.

Secara lengkap, struktur penggunaan lahan di Kota Bandung dapat dilihat dalam grafik berikut.



Sumber : BPS Kota Bandung, BDA Tahun 2012

Grafik 2-1
Struktur Penggunaan Lahan di Kota Bandung Tahun 2011

Sampai saat ini, perambahan kawasan terbangun (konversi lahan terbangun) semakin meluas ke daerah yang bukan peruntukannya, baik secara natural ataupun terencana. Semakin tinggi jumlah penduduk, disertai dengan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal menjadi salah satu penyebab konversi lahan. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya kerusakan lingkungan, terutama di bagian Utara dan Selatan. Kawasan Bandung Utara (KBU) yang utamanya sebagai kawasan lindung, saat ini telah banyak mengalami konversi lahan yang tidak sesuai peruntukannya.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung, memiliki kebijakan utama pembentukan struktur tata ruang, sebagai berikut:

- Mengembangkan 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) yaitu Inti Pusat

Kota yang berada di Alun-alun untuk wilayah Bandung Barat dan Gedebage untuk wilayah Bandung Timur.

- b. Membagi wilayah kota menjadi 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), masing masing dilayani oleh satu pusat sekunder, terdiri dari pusat sekunder Setrasari, melayani WP Bojonegara; pusat sekunder Sadang Serang, melayani WP Cibeunying; Pusat Sekunder Kopo Kencana, melayani WP Tegalega; Pusat Sekunder Turangga, melayani WP Karees; Pusat Sekunder Arcamanik, melayani WP Ujungberung; dan Pusat Sekunder Margasari melayani WP Gedebage. Beberapa pengembangan kawasan budidaya Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 2-2
Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
1	Kawasan Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi: Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir, Bandung Kulon, Bojongloa Kidul, Regol, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Astanaanyar, Lengkong, Sumur Bandung, Buah Batu, Batununggal, Kiaracondong, Antapani, dan Cibeunying Kidul
		Perumahan Kepadatan Sedang: Kecamatan Bandung Wetan, Bandung Kidul, Cibeunying Kaler, Mandalajati, Arcamanik, Rancasari, dan Cibiru
		Perumahan Kepadatan Rendah: Kecamatan Cidadap, Ujung Berung, Gedebage, Cinambo, dan Panyileukan
		Pengembangan secara vertikal diperkenankan pada kawasan perumahan kepadatan sedang sampai tinggi
2	Kawasan Perdagangan Dan Jasa	Pembatasan pembangunan pada kawasan perumahan kepadatan rendah di Kawasan Bandung Utara.
		Kawasan Jasa: - Pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan ke wilayah Bandung Timur - Pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan di SPK wilayah Bandung Timur, SPK Sadang Serang, dan sisi jalan arteri primer dan arteri sekunder sesuai dengan peruntukannya
		Pasar Tradisional: - Peningkatan Pasar Induk Gedebage yang terpadu dengan pengembangan PPK Gedebage - Pembangunan kembali kawasan Pasar Andir, Pasar Kiaracondong, Pasar Ciroyom, dan pasar lainnya. - Pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya dan relokasi pasar Lingkungan Kelurahan/Kecamatan

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
		Pengaturan kegiatan perdagangan grosir di Jalan Sukarno-Hatta.
		Pusat Perbelanjaan: - Pengendalian pusat belanja di Wilayah Bandung Barat - Pengembangan pusat belanja ke Wilayah Bandung Timur - Pengendalian perkembangan pusat belanja dan pertokoan yang cenderung linier sepanjang jalan arteri dan kolektor
3	Kawasan Perkantoran	- Mempertahankan perkantoran pemerintah berskala Nasional, Provinsi dan Kota pada lokasi yang sudah berkembang - Mengembangkan perkantoran pemerintahan baru di PPK Gedebage
4	Kawasan Industri dan Pergudangan	Kawasan Industri Ringan dan Pergudangan: - Mempertahankan industri kecil yang ada di lingkungan perumahan - Mengembangkan industri kecil dan menengah ke Kecamatan Ujung Berung, Cibiru, dan Gedebage - Kawasan pergudangan diarahkan ke pinggiran kota yang ditunjang oleh akses yang memadai akan dikembangkan ke lokasi yang memiliki akses jalan arteri primer dan/atau akses peti kemas Gedebage Industri Rumah Tangga : - Penetapan dan pengembangan industri rumah tangga - Pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industri rumah tangga - Revitalisasi bangunan tua/bersejarah menjadi bagian dari industri rumah tangga
5	Kawasan Wisata Buatan	- Mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah - Pembangunan obyek wisata di Wilayah Bandung Timur - Mempertahankan obyek wisata pendidikan dan wisata budaya kota - Pembangunan sarana konferensi ke arah Wilayah Bandung Timur - Pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan dan perumahan
6	Kawasan Pertanian	Mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan melalui intensifikasi lahan pertanian di Kecamatan Mandalajati, Ujung Berung dan Cibiru.

Sumber : RTRW Kota Bandung 2011-2031

Kebijakan ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Perda No.18 Tahun 2011), adalah sebagai berikut:

Tabel 2-3
Kebijakan Ruang Kota Bandung

Aspek	Penjelasan
Kebijakan struktur tata ruang	• Mengembangkan dua PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur; • Membagi daerah menjadi delapan SWK, masing-masing dilayani oleh satu SPK; • Mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata; • Menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan • Menyeraskan sebaran fungsi kegiatan primer dan sekunder dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.
Arahan pengembangan pemanfaatan ruang	• Mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian Timur; • Mengendalikan bagian Barat daerah yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi; dan • Membatasi pembangunan di Bandung bagian Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya.
Kebijakan pendukung struktur tata ruang	• Menyempurnakan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana (jaringan) transportasi yang ada untuk mendukung perkembangan pusat primer dan sekunder; • Mengembangkan jalan alternatif dengan memprioritaskan jalan tembus yang sudah direncanakan; dan • Meningkatkan akses melalui pengembangan jalan bebas hambatan dalam kota, pembangunan jalan lingkaran Utara dan/atau akses Utara Selatan di Bandung Timur.

Sumber: RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Secara geologis Kota Bandung berada di Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh gunung berapi yang masih aktif dan berada di antara tiga daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i) sumber gempa bumi Sukabumi-Padalarang-Bandung, (ii) sumber gempa bumi Bogor-Puncak-Cianjur, serta (iii) sumber gempa bumi Garut-Tasikmalaya-Ciamis. Daerah-daerah ini aktif di sepanjang sesar-sesar yang ada, sehingga menimbulkan gempa tektonik yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Selain itu, Kota Bandung yang berpenduduk banyak dan padat serta kerapatan bangunan yang mencapai 73,5% merupakan kawasan terbangun berisiko tinggi pada berbagai bencana.

Ahli geografi dari kelompok cekungan Bandung menyebutkan ancaman bencana geologis bagi Kota Bandung sangat besar karena dikelilingi

patahan (sesar/fault) dari 3 penjuru, setiap sesar menyimpan potensi kegempaan. Di Utara patahan Lembang, di Barat patahan Cimandiri dan di Selatan patahan dengan jalur Baleendah dan Ciparay hingga Tanjungsari. Selain itu dasar Cekungan Bandung memiliki tingkat sedimentasi yang tinggi akan memberikan efek yang lebih besar apabila terkena rambat gelombang gempa. Sedimentasi tertinggi terdapat di Kawasan Cibiru, Gedebage, Soekarno-Hatta, dan Tol Purbaleunyi. Kejadian bencana Kota Bandung periode 2008-2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 2-4
Kejadian Bencana di Kota Bandung Periode 2008-2012

Tahun	Kejadian Bencana	Lokasi Kejadian	Keterangan
2008	Bencana Banjir	N/A	3 kali
	Bencana Angin Puting Beliung	N/A	1 kali
2009	Gempa Bumi	18 Kecamatan dan 40 Kelurahan	mengakibatkan 82 bangunan rumah penduduk rusak ringan, 39 rusak sedang, 52 rusak berat dan 10 orang luka-luka
			Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan terdapat 9 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta yang rusak, yaitu 2 (dua) SD, 3 (tiga) SMP, 4 (Empat) SMA dan 3 (tiga) SMK
2010	Bencana Banjir	Kecamatan Arcamanik, Cibeunying Kidul, Cibiru, Mandalajati, Cidadap, Bandung Wetan, Astanaanyar, Bojongloa Kaler, dan Ujungberung.	Bencana banjir tersebut telah mengakibatkan 292 rumah rusak ringan, 229 rumah rusak sedang, dan 59 rumah rusak berat
	Kebakaran	Kecamatan Mandalajati, Panyileukan, Ujungberung, Cibiru, Arcamanik, Cibeunying Kidul, Sumur Bandung, Cicendo, Cidadap, Bandung Wetan, Astanaanyar, dan Bojongloa Kaler	Bencana kebakaran tersebut telah mengakibatkan 715 bangunan toko/kios dan rumah terbakar. Kebakaran tersebut disebabkan oleh konsleting arus listrik dan meledaknya tabung gas 3 kg, diantaranya di Pasar Gedebage, Kelurahan Arjuna, Pasar Ujung Berung, dan di Jalan Veteran
2011	Banjir	Kecamatan Panyileukan, Arcamanik. Sukasari, Ujungberung.	mengakibatkan kerusakan pada 2.495 rumah

Tahun	Kejadian Bencana	Lokasi Kejadian	Keterangan
	Bencana tanah longsor	Kecamatan Cidadap, Kecamatan Batununggal dan Kecamatan Bojongloa Kidul	mengakibatkan 1 orang korban jiwa
	Bencana Puting Beliung	Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Buahbatu, Kecamatan Cidadap dan Kecamatan Rancasari	
2012	Banjir	Kel. Cipadung dan Kel. Cipadung Kidul (Kecamatan Panyileukan)	Terendam 33 Rumah Terendam 836 Rumah
	Banjir	Kel. Maleer Kecamatan Batununggal	Korban sebanyak 7 RW (23 Rt), 510 unit rumah, 700 KK
	Tanah Longsor	Kel. Cipadung Jln. Desa Cipadung RT. 06/13 Kec. Cibiru	Kerugian 1 rumah dan 1 mini market
	Tanah Longsor	1. Kel. Hegarmanah; 2. Kel. Ciumbuleuit; 3. Kel. Hegarmanah; Kecamatan Cidadap	1. Kerugian roboh benteng tanah dan dinding tembok kamar; 2. Robohnya benteng; - 1 rumah; 3. Ambruknya benteng dan Rumah
	Tanah Longsor	1. Kel. Pajajaran; 2. Kel. Arjuna; 3. Kel. Sukaraja; Kecamatan Cicendo	1. Robohnya kirmir Kali Citepus; Robohnya kirmir TPU Sirna Raga 2. Kirmir Kali Citepus yang sudah retak di RW. 08; 3. Terjadi banjir akibat penyempitan saluran air
	Tanah Longsor	Kel. Kebon Jeruk, Kec. Andir	Kerugian 6 rumah longsor; - Kirmir amblas volume 191 m
	Tanah Longsor	1. Kel. Cibadak; 2. Kel. Nyengseret;	1. Robohnya dinding 2 rumah, 3 KK, 10 jiwa;
	Tanah Longsor	Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati	Dua rumah terseret arus sungai
	Tanah Longsor	Kel. Cipadung Kulon, Kec. Panyileukan	Korban meninggal - Akibat tertimpa tanah longsor di Kp. Cagak Kel. Cisurupan Kec. Cibiru
	Tanah Longsor	Kel. Cibangkong Kec. Batununggal	

Sumber : LKPJ AMJ Kota Bandung

A. Wilayah Rawan Bencana Alam

Beberapa wilayah rawan bencana alam di Kota Bandung yang teridentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Kawasan yang sering Terjadi Banjir, terutama daerah-daerah yang dilewati oleh 5 aliran sungai yaitu aliran sungai Cipaku, Cikapundung, Cibeunying, Cipamokolan, dan Cipadung.

2. Daerah Rawan Gempa Bumi: Bandung Kulon, Bandung Wetan, Batununggal, Bojongloa Kaler, Cicendo, Cinambo, Coblong, Kiaracondong, Lengkong, Regol, Sukajadi, Sukasari, dan Sumur Bandung.
3. Daerah Rawan Longsor: Cibiru, Mandalajati, Ujungberung, Cibeunying Kaler, Cidadap, dan Coblong.

B. Bencana yang Timbul Akibat Kesalahan Manusia

Untuk bencana yang timbul akibat kesalahan manusia, teridentifikasi sebagai berikut:

1. Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (karena jalan rusak)
2. Daerah Rawan Kebakaran: Kecamatan Babakan Ciparay dan Cicendo merupakan Kecamatan dengan jumlah kejadian yang terbanyak, kemudian disusul Kecamatan Astanaanyar, Bandung Kidul, Bandung Wetan, Sukajadi, Bandung Kulon, Batununggal, Bojongloa Kaler, Cibeunying Kidul, dan Cibiru.

2.1.4. Demografi

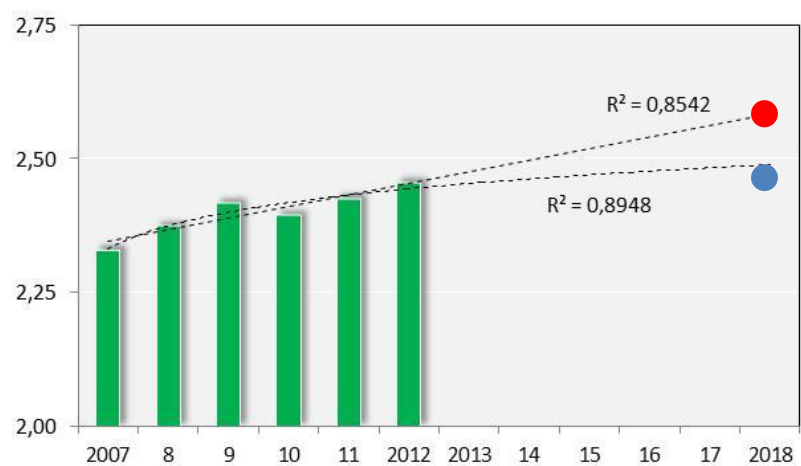
Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Penduduk Kota Bandung tahun 2012 sebanyak 2.455.517 jiwa (*BPS Kota Bandung*). Dari tahun 2007-2012 rata-rata pertumbuhan penduduk adalah 1,06%, artinya tingkat pertumbuhan tersebut relatif menurun bila dibandingkan rata-rata tahun 2003-2008 sebesar 1,1%. Tahun 2010, jumlah penduduk sedikit berkurang untuk kemudian meningkat lagi¹. Dengan luas wilayah sekitar 16.730 ha, maka kepadatan penduduk

¹ Jumlah penduduk di tahun 2010 berdasarkan Sensus Penduduk, sedangkan jumlah penduduk di 2007-2009 merupakan estimasi BPS Kota Bandung. Perbedaan perhitungan penduduk ini yang menyebabkan data penduduk di tahun 2010 lebih kecil bila dibandingkan dengan 2009.

Kota Bandung tahun 2008 adalah 142 jiwa/ha meningkat menjadi 147 jiwa/ha tahun 2012. Dengan pertumbuhan linier, maka diperkirakan penduduk Kota Bandung tahun 2018 mencapai 2,6 juta jiwa, sedangkan dengan pola proyeksi non-linier (relatif lebih valid), menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat, sehingga tahun 2018 diperkirakan berjumlah 2,5 juta jiwa.

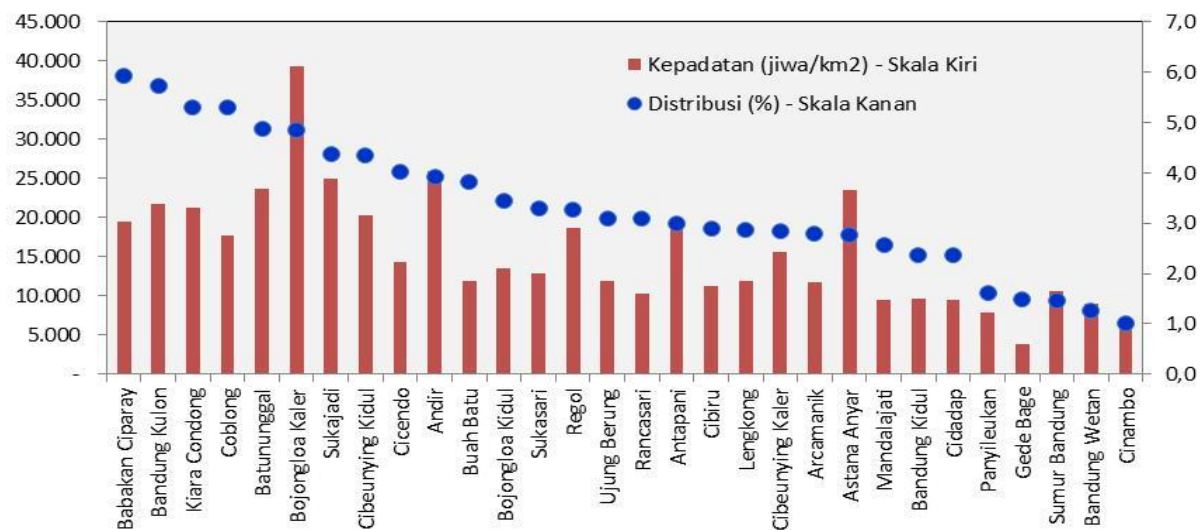
Proyeksi melambatnya pertumbuhan jumlah penduduk di atas, tidak serta merta mengurangi beban daya dukung wilayah Kota Bandung. Sebagai pusat kegiatan penting, maka di sekitar Kota Bandung berkembang daerah-daerah *hinterland* di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, wilayah Kabupaten Sumedang bagian Barat, serta Kota Cimahi yang dihuni oleh penduduk yang berjumlah besar pula, yaitu sekitar 6 jutaan. Pertumbuhan kegiatan komersial di Kota Bandung yang mendorong meningkatkan harga properti, menyebabkan lokasi-lokasi perumahan bergeser keluar kota Bandung. Keluarga-keluarga muda akan cenderung tinggal di luar kota untuk menyesuaikan daya beli terhadap rumah. Karena itulah jumlah penduduk di Kota Bandung cenderung tumbuh lambat dan bahkan pernah berkurang.



Grafik 2-2
Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Bandung
Tahun 2007–2012 dan Proyeksi Tahun 2013–2018

Sebaran penduduk di Kota Bandung terbesar adalah di Kecamatan Babakan Ciparay, yaitu hampir 6% dari seluruh penduduk Kota Bandung, diikuti oleh Kecamatan Bandung Kulon, Kiaracondong, Coblong, Batununggal, dan Bojongloa Kaler. Jumlah penduduk paling

sedikit ada di Kecamatan Cinambo, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Gedebage, dan Panyileukan. Kepadatan penduduk terbesar ada di Kecamatan Bojongloa Kaler dengan tingkat kepadatan mencapai 39.282 jiwa/km², kemudian Andir dan Astanaanyar. Kepadatan penduduk terkecil adalah di Gedebage, Cinambo, dan Panyileukan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Grafik 2-3
Persentase Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2012

Secara umum tahun 2012, distribusi penduduk dan tingkat kepadatannya semakin merata di Kota Bandung bila dibandingkan dengan tahun 2008, terlihat dari koefisien variasi yang semakin kecil. Di beberapa kecamatan distribusinya meningkat dan ada pula yang menurun, demikian pula dengan kepadatan penduduk. Secara rinci mengenai persentase distribusi penduduk dan kepadatan penduduk tahun 2012 dibandingkan tahun 2008, pada tabel berikut ini.

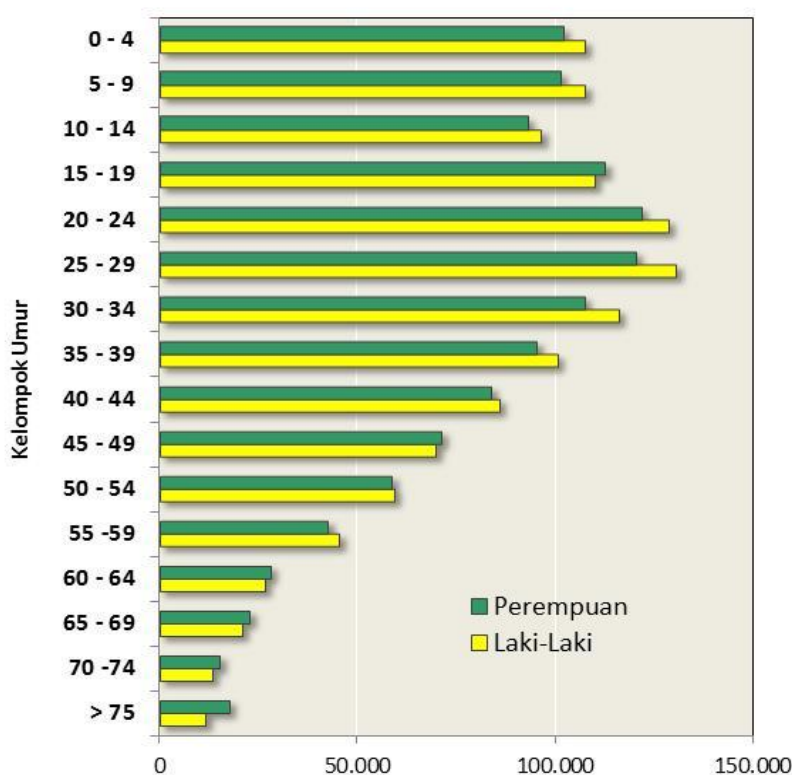
Tabel 2-5
Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2012 serta Rata-rata Pertumbuhannya dari Tahun 2008

No	Kecamatan	Distribusi (%)	Pertumbuhan (%)	Kepadatan (jiwa/km2)	Pertumbuhan (%)
1	Bandung Kulon	5,73	0,2	21.793	3,5
2	Babakan Ciparay	5,92	5,7	19.518	9,7
3	Bojongloa Kaler	4,85	-2,9	39.282	0,0
4	Bojongloa Kidul	3,45	2,5	13.528	6,1
5	Astana Anyar	2,77	-3,4	23.544	-0,5
6	Regol	3,28	-4,1	18.729	-1,4

No	Kecamatan	Distribusi (%)	Pertumbuhan (%)	Kepadatan (jiwa/km2)	Pertumbuhan (%)
7	Lengkong	2,87	-3,1	11.927	-0,2
8	Bandung Kidul	2,37	0,1	9.617	3,5
9	Buah Batu	3,83	-2,9	11.856	0,0
10	Rancasari	3,10	-0,2	10.370	3,0
11	Gede Bage	1,49	1,3	3.826	4,8
12	Cibiru	2,90	1,6	11.264	5,1
13	Panyileukan	1,62	0,8	7.801	4,2
14	Ujung Berung	3,10	2,7	11.878	6,3
15	Cinambo	1,02	-1,4	6.778	1,7
16	Arcamanik	2,79	1,5	11.673	5,0
17	Antapani	3,00	2,5	19.422	6,2
18	Mandalajati	2,56	-0,4	9.423	2,8
19	Kiara Condong	5,31	-2,4	21.317	0,5
20	Batununggal	4,87	-3,3	23.766	-0,4
21	Sumur Bandung	1,47	-4,7	10.635	-2,1
22	Andir	3,93	-4,6	25.993	-2,0
23	Cicendo	4,02	-3,6	14.374	-0,8
24	Bandung Wetan	1,25	-3,3	9.076	-0,4
25	Cibeunying Kidul	4,34	-3,5	20.299	-0,7
26	Cibeunying Kaler	2,86	-2,2	15.580	0,8
27	Coblong	5,30	-1,9	17.690	1,1
28	Sukajadi	4,36	-1,2	24.915	1,9
29	Sukasari	3,30	-1,5	12.914	1,6
30	Cidadap	2,36	-0,9	9.492	2,3
		100,00		14.676	3,3
	Koefisien Variasi	40,3 % -> 39,3%		51,4% -> 46,7%	

Sumber: BPS Kota Bandung, diolah

Selanjutnya penduduk Kota Bandung dapat dianalisis menurut struktur umurnya, sebagai informasi yang sangat penting karena berkaitan dengan risiko dan kebutuhan pelayanan yang berbeda-beda pada setiap kelompok.



Grafik 2-4
Persentase Struktur Umur Penduduk di Kota Bandung Tahun 2012

Jika dilihat dari struktur usia penduduk Kota Bandung, yang tergolong menonjol adalah usia pendidikan tinggi (20-24 tahun) atau awal usia kerja, artinya jumlah masyarakat usia produktif relatif besar yang merupakan modal dasar bagi pembangunan. Jumlah balita yang awalnya menurun, dalam sepuluh tahun terakhir cenderung meningkat. Artinya penduduk yang akan mendapat pendidikan dasar dan menengah dalam 5-10 tahun mendatang akan meningkat sehingga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah harus dipersiapkan.

Struktur penduduk dilihat dari aspek kualitas tingkat pendidikan, selama periode 2008-2012 menunjukkan peningkatan. Komposisi penduduk usia di atas 10 tahun yang tidak mempunyai ijazah SD mengalami penurunan dari 11,5% tahun 2008, menjadi 9,4% tahun 2012. Sedangkan, penduduk usia di atas 10 tahun yang memiliki ijazah tertinggi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SLTA/ sederajat, dan Perguruan Tinggi mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat mengalami kemajuan. Selain

itu, kondisi ini juga mengindikasikan masyarakat Kota Bandung mengalami peningkatan kesadaran (*awereness*) akan arti penting pendidikan bagi peningkatan kualitas kehidupan.

Tabel 2-6
Penduduk 10 Tahun ke Atas dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki
di Kota Bandung Tahun 2008-2012

No	PENDIDIKAN	2008		2009		2010		2011		2012	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	Tidak/Belum tamat SD	230.183	11,5	205.315	10,3	200.982	10,2	174.292	8,7	192.141	9,4
2	SD / MI / Sederajat	445.107	22,2	450.159	22,6	440.466	22,3	502.426	25,0	482.763	23,7
3	SLTP / MTs / Sederajat	403.328	20,1	350.277	17,6	406.584	20,6	393.689	19,6	409.741	20,1
4	SMU / MA / Sederajat	648.114	32,3	715.124	35,9	636.827	32,3	655.857	32,6	661.857	32,5
5	Perguruan Tinggi	277.925	13,9	271.887	13,6	287.997	14,6	282.591	14,1	292.142	14,3
	JUMLAH	2.004.657	100	1.992.762	100	1.972.856	100	2.008.855	100	2.038.644	100

Sumber : BPS Kota Bandung (LKPJ AMJ Kota Bandung)

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan.

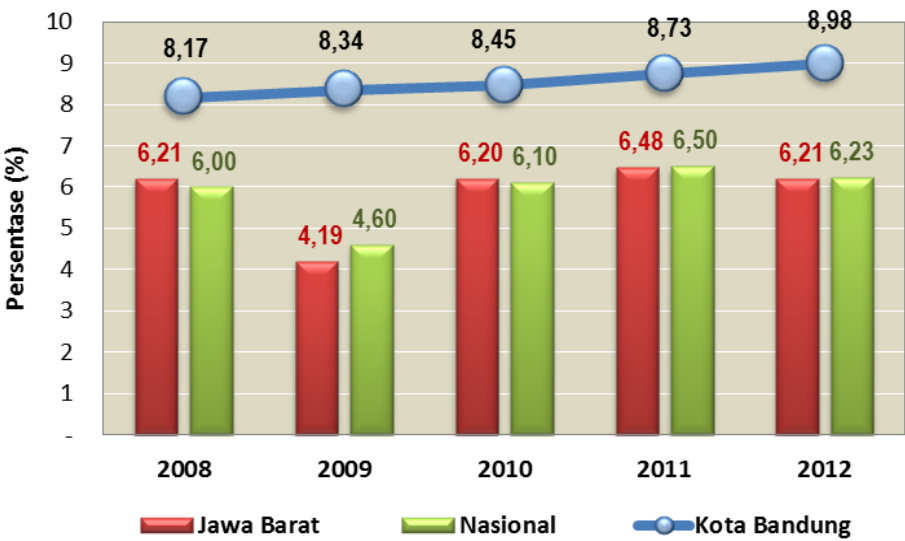
A. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain: (1) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; (2) Untuk mengetahui struktur perekonomian; (3) Untuk mengetahui besarnya PDRB per

kapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan; (4) Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

1) Pertumbuhan Ekonomi

Kota Bandung memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Barat. Periode tahun 2007-2011 kontribusi ekonomi Kota Bandung di Jawa Barat mencapai rata-rata 11,6%. Dalam lingkup Bandung Raya, kontribusi aktivitas ekonominya menjadi sekitar 23% dari ekonomi Jawa Barat. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung juga tergolong tinggi, atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan bahkan Nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dari periode tahun 2008-2012 rata-rata sebesar 8,53%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,8% dan Provinsi Jawa Barat sebesar 5,86% .



Sumber : BPS (diolah)

Grafik 2-5
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2008–2012 dan Perbandingannya dengan Tingkat Jawa Barat dan Nasional (%)

Tingkat pertumbuhan yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa Kota Bandung adalah salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting di Jawa Barat maupun di Indonesia. Secara terinci kontribusi kegiatan ekonomi Kota Bandung dan sekitarnya terhadap Ekonomi Jawa Barat dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2-7
Kontribusi Kegiatan Ekonomi Kota Bandung dan Sekitarnya
terhadap Ekonomi Jawa Barat Tahun 2012

No	Kabupaten/Kota	Persentase (%)
1	Kab. Bandung	7,0
3	Kab. Bandung Barat	2,7
4	Kota Bandung	11,74
5	Kota Cimahi	2,0

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

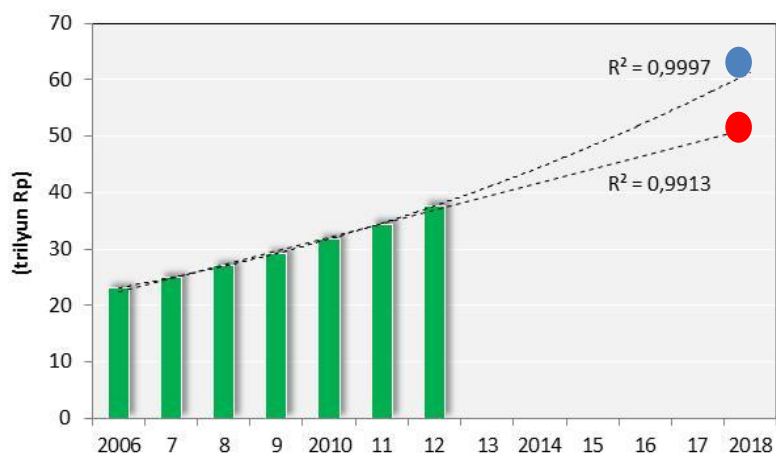
Data tersebut mengindikasikan bahwa Kota Bandung merupakan kota penting bagi aktivitas ekonomi di Jawa Barat maupun Nasional. Sebagai pusat pertumbuhan dengan tumpuan pada aktivitas perdagangan dan industri pengolahan, maka Kota Bandung juga menjadi salah satu tujuan migrasi tenaga kerja yang cukup besar. Peran lainnya adalah Kota Bandung sebagai salah satu kota pendidikan terpenting di Indonesia, telah menyatu dengan kehidupan ekonomi, sehingga tingkat pertumbuhan ekonominya tergolong sangat tinggi.

Tabel 2-8
Perkembangan Indikator PDRB dan LPE Kota Bandung
Tahun 2008–2012

Indikator	2008	2009	2010	2011*	2012**
LPE Kota Bandung (%)	8,17	8,34	8,45	8,73	8,98
LPE Nasional (%)	5,5	4,6	6,1	6,59	6,23
PDRB (jt Rp) (hargaberlaku)	60.444.487	70.281.163	82.002.176	97.451.902	111.121.551
PDRB (jt Rp) (harga konstan 2000)	26.978.909	29.228.272	31.697.282	34.415.522	37.558.320

Sumber: BPS Kota Bandung (Diolah)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa PDRB Kota Bandung dari tahun 2008 ke 2012 menunjukkan kenaikan yang tinggi atau menunjukkan peningkatan pertumbuhan kegiatan ekonomi. Kecenderungan aktivitas ekonomi Kota Bandung pada beberapa tahun ke depan cenderung positif mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan.



Grafik 2-6
Kecenderungan Pertambahan PDRB (Harga Konstan)
Kota Bandung Tahun 2013-2018

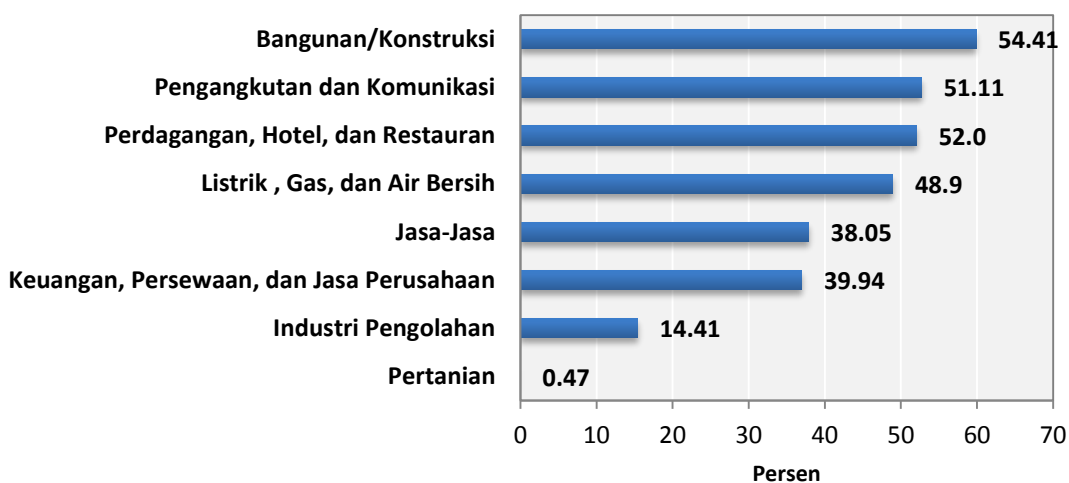
Diketahui bahwa pertumbuhan tertinggi kontribusi sektoral dari tahun 2008 hingga 2012 ditempati oleh sektor bangunan/konstruksi, yaitu mencapai 54,41%. Kemudian di posisi kedua dan ketiga ialah sektor perdagangan, hotel, dan restoran (52,0%) serta pengangkutan dan komunikasi (51,11%)

Tabel 2-9
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Kota Bandung
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
tahun 2008 - 2012

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan (%)	
		Hb	Hk
1	Pertanian	46,77	0,47
2	Pertambangan	-	-
3	Industri Pengolahan	61,19	14,41
4	Listrik , Gas, dan Air Bersih	91,32	48,9
5	Bangunan/Konstruksi	107,40	54,41
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	91,09	52,0
7	Pengangkutan dan Komunikasi	95,36	51,11
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	90,44	39,94
9	Jasa-Jasa	84,46	38,05
PDRB		83,84	39,21

Sumber : BPS Kota Bandung

Sektor industri pengolahan selama tahun 2008 hingga 2012 mengalami pertumbuhan yang relatif kecil, yaitu hanya sebesar 14,41%. Sedangkan sektor pertanian selama lima tahun ini hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,47%.



Grafik 2-7
Pertumbuhan Kontribusi Sektor Kota Bandung
Atas Dasar Harga Konstan (Hk) tahun 2008 - 2012

Relatif minimnya pertumbuhan sektor industri pengolahan disebabkan dari faktor internal dan eksternal industri pengolahan itu sendiri. Semakin ketatnya persaingan, mengakibatkan industri lokal menjadi marginal. Adanya kesepakatan perdagangan bebas *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA) juga memberikan tekanan pada tingkat daya saing industri lokal.

Hal yang perlu diwaspadai dan dipersiapkan lebih lanjut ialah diberlakukannya *ASEAN Economic Community* (AEC) tahun 2015. Dengan adanya kesepakatan AEC, maka akan diberlakukannya *free trade* (pasar bebas) diantara negara-negara ASEAN, sehingga baik barang, jasa, investasi, serta tenaga kerja bisa bebas masuk ke seluruh negara-negara ASEAN. Dampak makin kompleks dan berkembangnya aktivitas sektor sekunder dan tersier Kota Bandung telah menekan aktivitas sektor pertanian. Lahan pertanian semakin menipis dan digantikan oleh sektor lain yang dianggap lebih menguntungkan. Hal inilah yang mengakibatkan sektor pertanian sama sekali tidak mengalami pertumbuhan selama lima tahun terakhir.

2) Struktur Ekonomi

Dalam struktur ekonomi Kota Bandung, antara tahun 2008-2012, kontribusi terbesar berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, yaitu mencapai rata-rata 40,9% (berdasarkan harga berlaku). Kedua

adalah sektor industri pengolahan sebesar 24,1%. Secara umum sektor ekonomi Kota Bandung adalah berasal dari sektor tersier atau lebih banyak diberikan oleh sektor jasa. Uraian terperinci nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Kota Bandung selama tahun 2008-2012, baik atas dasar harga berlaku dan konstan dituangkan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2-10
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bandung
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012

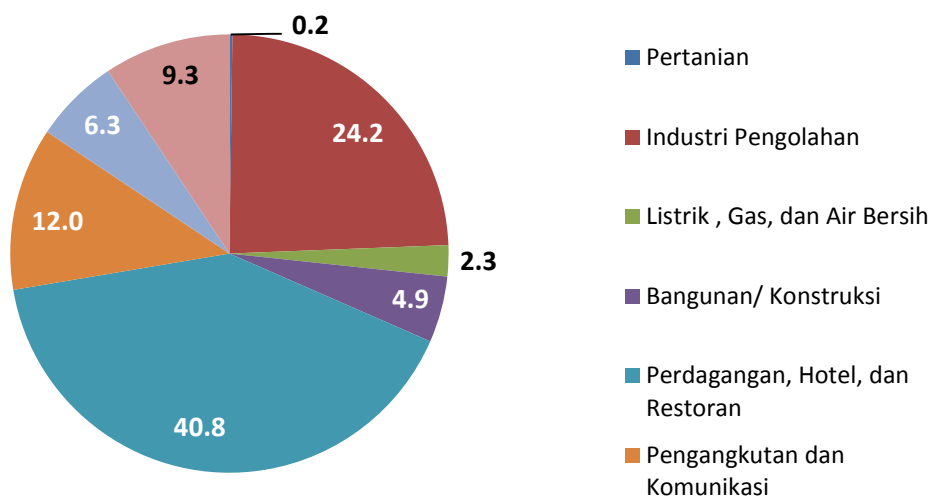
No	Lapangan Usaha	2008		2009		2010		2011		2012	
		(Milyar)	%	(Milyar)	%	(Milyar)	%	(Milyar)	%	(Milyar)	%
1	Pertanian	156	0,26	168	0,24	162	0,2	193	0,2	229	0,2
2	Pertambangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	15.549	25,72	17.208	24,49	19.991	24,38	22.482	23,51	25.063	22,55
4	Listrik , Gas, dan Air Bersih	1.363	2,26	1.617	2,3	1.893	2,31	2.202	2,3	2.608	2,35
5	Bangunan/Konstruksi	2.604	4,31	3.224	4,59	3.827	4,67	4.425	4,63	5.401	4,86
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	24.232	40,09	28.781	40,95	33.302	40,61	39.436	41,25	46.304	41,67
7	Pengangkutan dan Komunikasi	7.092	11,73	8.272	11,77	9.814	11,97	11.841	12,38	13.854	12,47
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	3.877	6,41	4.402	6,26	5.111	6,23	6.095	6,37	7.383	6,64
9	Jasa-Jasa	5.572	9,22	6.609	9,4	7.904	9,64	8.939	9,35	10.279	9,25
Total		60.444	100	70.281	100	82.002	100	95.613	100	110.670	100

Sumber : BPS Kota Bandung

Berdasarkan harga berlaku, tahun 2008, sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi sebesar 40,09% terhadap perekonomian Kota Bandung dan mengalami peningkatan menjadi 41,67% tahun 2012. Kontribusi sektor terbesar kedua tahun 2008 adalah sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 25,72% terhadap perekonomian Kota Bandung. Perkembangan kontribusi sektor ini mengalami penurunan tahun 2012, yaitu menjadi sebesar 22,55%. Sedangkan kontribusi sektor terbesar ketiga disumbangkan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi yang tahun 2012 mencapai 12,47%

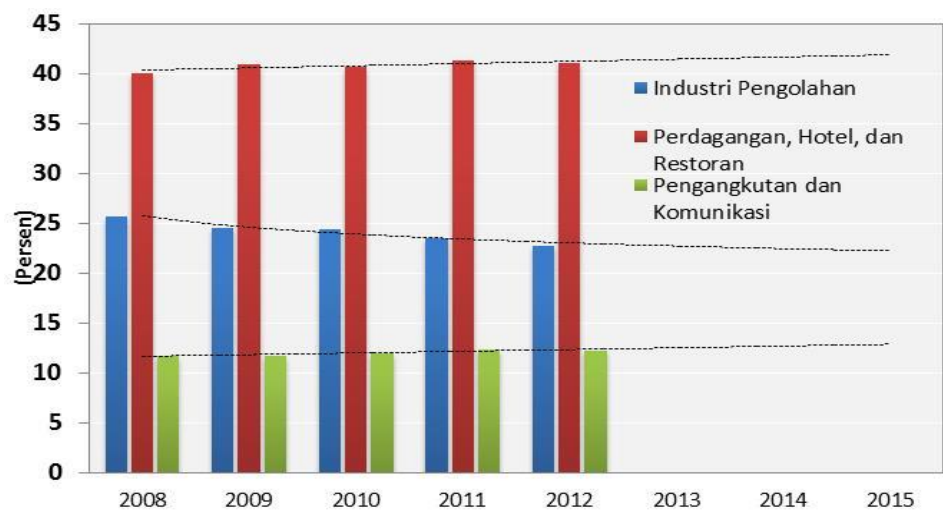
Perekonomian Kota Bandung secara signifikan ditopang oleh sektor ekonomi kreatif, beserta sektor-sektor pendukung lainnya. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa tahun 2007 kontribusi sektor kreatif terhadap PDRB sudah mencapai 14,46%, serta diprediksi akan terus

meningkat dan menjadi salah satu lokomotif kemajuan ekonomi Kota Bandung.



Grafik 2-8
Struktur Ekonomi Kota Bandung Tahun 2008-2012
(Atas Dasar Harga Berlaku)

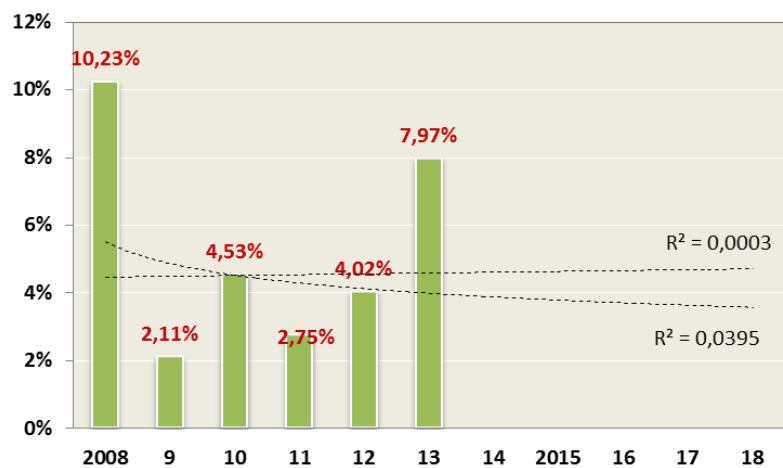
Berdasarkan perkembangan data PDRB Kota Bandung, tahun 2008–2012, terlihat bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terus meningkat tetapi pertumbuhannya cenderung menurun, sehingga kontribusinya juga semakin menurun. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran, selain mengalami pertumbuhan, kontribusinya pada ekonomi Kota Bandung juga terus meningkat. Hal ini sesuai dengan fungsi Kota Bandung sebagai kota kolektif dan distributif. Sektor pengangkutan dan komunikasi yang umumnya berkaitan dengan kegiatan ekonomi riil dengan demikian juga mengalami pertumbuhan dan kontribusinya pada ekonomi Kota Bandung juga mengalami peningkatan.



Grafik 2-9
Kecenderungan Sektor Kontribusi Terbesar Ekonomi Kota Bandung
(Atas Dasar Harga Berlaku)

B. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.

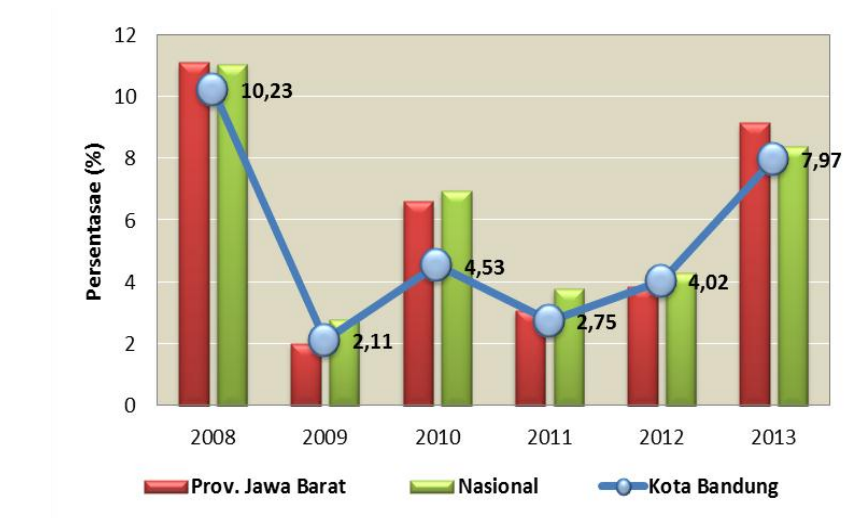


Grafik 2-10
Perkembangan dan Kecenderungan Inflasi di Kota Bandung

Tingkat laju inflasi di Kota Bandung setelah tahun 2008 cenderung menurun seiring kecenderungan penurunan inflasi Nasional. Inflasi tahun 2008 mencapai 10,23% dan inflasi terendah di Kota Bandung terjadi tahun 2009 dan 2011, yaitu sekitar 2,11%. Tahun 2012, inflasi

Kota Bandung mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu mencapai 4,02%.

Kenaikan harga-harga yang relatif tinggi terulang kembali di tahun 2013, dimana terdapat kenaikan harga BBM, sehingga tingkat inflasi menjadi cukup tinggi. Dibandingkan dengan historikal ketika terjadi kenaikan BBM yang menyebabkan inflasi mencapai 2 (dua) digit, tekanan inflasi 2013 secara tahunan berhasil ditekan di level 1 (satu) digit.

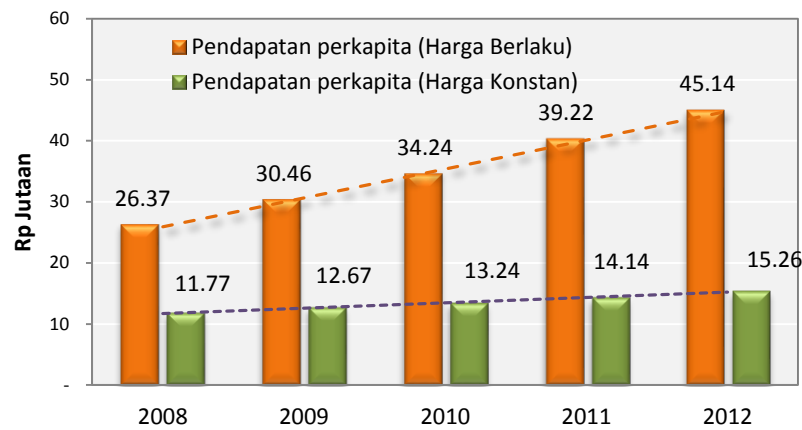


Sumber : BPS & Bank Indonesia (diolah)

Grafik 2-11
Inflasi Tahunan Kota Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Periode 2008-2013

C. PDRB Per Kapita

Pendapatan per kapita penduduk Kota Bandung atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan menjadi Rp. 45 juta tahun 2012, yang sebelumnya tahun 2008 sebesar Rp. 26,4 juta, atau hampir naik 2 kali lipat. Rata-rata peningkatan per tahun mencapai 15,4% per tahun. Peningkatan tersebut cukup menjadi dasar untuk memprediksikan bahwa lima tahun ke depan PDRB cenderung terus naik.



Grafik 2-12
Perkembangan Pendapatan Per Kapita
Kota Bandung Periode 2008-2012

Sedangkan untuk pendapatan per kapita riil (harga konstan) tahun 2008 berada di level Rp. 11,8 juta dan mengalami peningkatan menjadi Rp. 15,3 juta tahun 2012. Pertumbuhan riil pendapatan per kapita tersebut adalah sebesar 6,88% per tahun. Pertumbuhan pendapatan perkapita relatif lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah karena pertumbuhan penduduk Kota Bandung yang tinggi pula.



Grafik 2-13
Perbandingan Pendapatan Perkapita (PDRB Per Kapita Harga Konstan)
Kota Bandung, Jawa Barat dan Tingkat Nasional Periode 2008-2012

Jika dibandingkan dengan tingkat Nasional, pendapatan per kapita (atas dasar harga konstan) Kota Bandung berada di atas level Provinsi dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bandung relatif lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat Nasional. Tahun 2008 pendapatan perkapita Nasional (atas dasar

harga konstan) berada di level Rp. 9,11 juta/orang dan meningkat tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 10,17 juta/orang.

D. Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio

Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara diperoleh pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan antara lain melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan. Korea Selatan sebagai contoh sukses, tetap konsisten melakukan dua hal tersebut. Sebaliknya Brazil mengalami kegagalan karena memiliki distribusi pendapatan yang timpang dan alokasi belanja publik yang kurang memadai untuk pendidikan dan kesehatan (*UNDP, BPS, Bappenas, 2004*).

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pada variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi Uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, *Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI*, 1995) :

- $GR < 0.4$: dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- $0.4 < GR < 0.5$: dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)
- $GR > 0.5$: dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Gini Rasio Kota Bandung tahun 2010 sebesar 0,19, sedangkan tahun 2011 naik menjadi 0,28. Kenaikan juga terjadi tahun 2012 menjadi sebesar 0,35; sekalipun selama tiga tahun terakhir terus mengalami kenaikan, tetapi Kota Bandung termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah (*BPS Kota Bandung*).

E. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kota Bandung tahun 2008 mencapai 379.255 jiwa (15,97%). Namun tahun 2012 tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi sebanyak 360.578 jiwa (9,09%) (*LKPJ AMJ Kota Bandung*). Jumlah penduduk miskin dan jumlah individu miskin berdasarkan sebaran per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-11
Jumlah Rumah Tangga dan Individu Miskin di Kota Bandung Tahun 2011

Nama Kecamatan	Jumlah	
	Rumah Tangga	Individu
Bandung Kulon	5,407	21,616
Babakan Ciparay	6,018	24,277
Bojongloa Kaler	6,975	27,577
Bojongloa Kidul	3,702	14,507
Astanaanyar	2,264	8,972
Regol	2,592	9,467
Lengkong	1,342	5,559
Bandung Kidul	2,014	7,812
Buahbatu	2,627	9,879
Rancasari	1,062	4,273
Gedebage	668	2,444
Cibiru	3,030	11,810
Panyileukan	719	2,822
Ujung Berung	3,845	14,196
Cinambo	696	2,695
Arcamanik	1,580	6,354
Antapani	1,090	4,266
Mandalajati	2,427	9,308
Kiaracondong	5,193	18,735
Batununggal	4,469	16,712
Sumur Bandung	780	2,692
Andir	3,799	14,089
Cicendo	2,946	10,985
Bandung Wetan	624	2,198
Cibeunying Kidul	2,844	10,608
Cibeunying Kaler	1,456	5,630
Coblong	3,276	12,586
Sukajadi	3,263	11,938
Sukasari	1,519	5,787
Cidadap	1,346	5,145
Total	79,573	304,939

Sumber: PPLS 2011

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

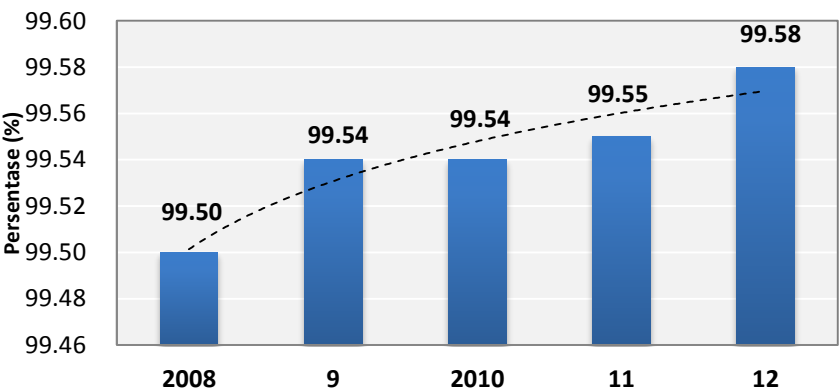
Kualitas kehidupan manusia secara individu atau masyarakat secara kelompok tidak hanya didasarkan pada tingkat ekonomi melainkan juga kesehatan dan pendidikan. Dalam subbab ini akan diuraikan analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial yang dilakukan terhadap indikator yang relevan.

A. Aspek Pendidikan

Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek pendidikan selama lima tahun terakhir dari 2008 sampai dengan 2012.

1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Selama periode 2008-2012, capaian angka melek huruf cukup mengalami peningkatan. AMH tahun 2012 sebesar 99,58%, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2008 yang berada di tingkat 99,50%.

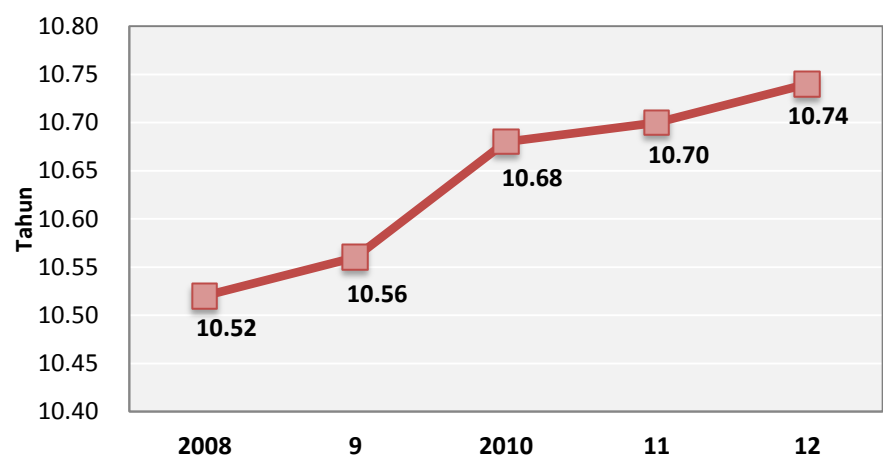


Grafik 2-14
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Bandung Tahun 2008-2012

Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dari tahun ke tahun cenderung tidak terlalu besar, hal ini disebabkan karena capaian kinerja sudah mendekati 100%. Walaupun demikian, tahun 2012 masih ada masyarakat Kota Bandung yang buta huruf (0,42%). Hal ini sebagai akibat adanya penduduk lanjut usia yang masih belum bisa membaca dan menulis, namun tidak dapat ditingkatkan lagi karena faktor usia.

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Selain angka melek huruf, indikator rata-rata lama sekolah (RLS) juga mempengaruhi nilai IPM. Hingga tahun 2012, RLS mencapai 10,74 tahun. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Banyak faktor yang jadi penyebab dari ketidak tercapaiannya RLS 12 tahun, antara lain persepsi masyarakat tentang pendidikan, yang dianggap belum menjanjikan, serta mahalnya biaya pendidikan menjadi kendala selanjutnya.



Grafik 2-15
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Kota Bandung Tahun 2008-2012

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Tabel 2-12
Perkembangan APM Kota Bandung Tahun 2009-2012

No	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI/Paket A	124,13 %	123,13 %	123,13 %	123,13 %
2	SMP/MTs/Paket B	103,5 %	100 %	100 %	100 %
3	SMA/SMK/MA/Paket C	84,49 %	83,39 %	85,79 %	88,19 %

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2013

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTS telah mencapai target 100% untuk Kota Bandung tahun 2012. Hanya saja, untuk jenjang pendidikan SMA/MA/MK kondisi APM yang ada masih di bawah 100% yaitu sebesar

88,19%. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan program yang mampu mendorong keberlanjutan pendidikan dari tingkat menengah ke tingkat atas.

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Berikut ini diuraikan gambaran mengenai perkembangan APK Kota Bandung selama periode 2009-2012.

Tabel 2-13
Perkembangan APK Kota Bandung Tahun 2009-2012

No	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI	127,13	131,05	131,05	131,05
2	SMP/MTs	116,16	116,16	116,16	116,16
3	SMA/SMK/MA (khusus Kota Bandung)	98,8	98,84	98,88	98,92

Sumber: LKPJ AMJ Kota Bandung

5. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Selama periode 2008-2012, perkembangan APT tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Tabel 2-14
Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)
Kota Bandung Tahun 2008-2012 (Penduduk 10 Tahun ke Atas)

No	APT	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD / MI / Sederajat	22,2%	22,6%	22,3%	25,0%	23,7%
2	SLTP / MTs / Sederajat	20,1%	17,6%	20,6%	19,6%	20,1%
3	SMU / MA / Sederajat	32,3%	35,9%	32,3%	32,6%	32,5%
4	Perguruan Tinggi	13,9%	13,6%	14,6%	14,1%	14,3%

Sumber: BPS Kota Bandung dan LKPJ AMJ Kota Bandung (diolah)

B. Aspek Kesehatan

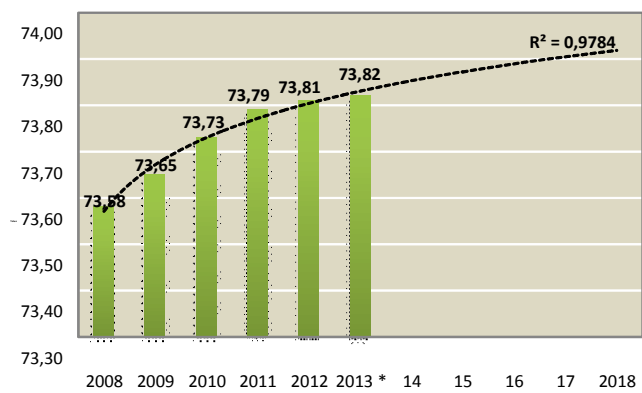
Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek kesehatan selama lima tahun terakhir.

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi di Kota Bandung tahun 2008 ialah sebesar 34 per 1000 kelahiran hidup. Tahun 2012 angka kematian bayi mengalami penurunan menjadi 29,3 per 1000 kelahiran hidup.

2. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada 2008 sebesar 73,39 dan tahun 2013 menjadi 73,82. Hal ini berarti menunjukkan penambahan sebesar 0,42 poin atau terjadi peningkatan sebesar 0,99%. Gambaran mengenai perkembangan angka harapan hidup dapat dilihat seperti pada grafik berikut ini.

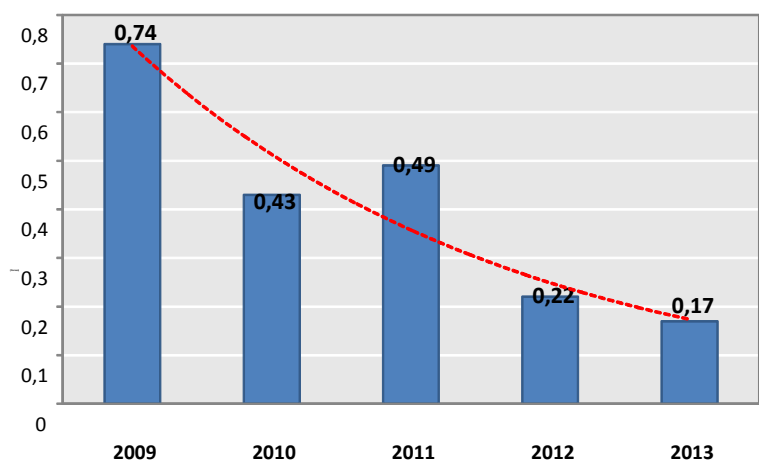


Sumber : BPS dan LKPJ AMJ Kota Bandung (diolah)

Grafik 2-16
Perkembangan dan Proyeksi Angka Harapan Hidup Kota Bandung

3. Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk di Kota Bandung selama periode 2009-2013 sudah berada di bawah target yang ditetapkan menurut standar WHO (<1%). Tahun 2009 balita dengan gizi buruk mencapai 0,74%, dan tahun 2012 menurun menjadi sebesar 0.22% serta tahun 2013 sebesar 0.17%.

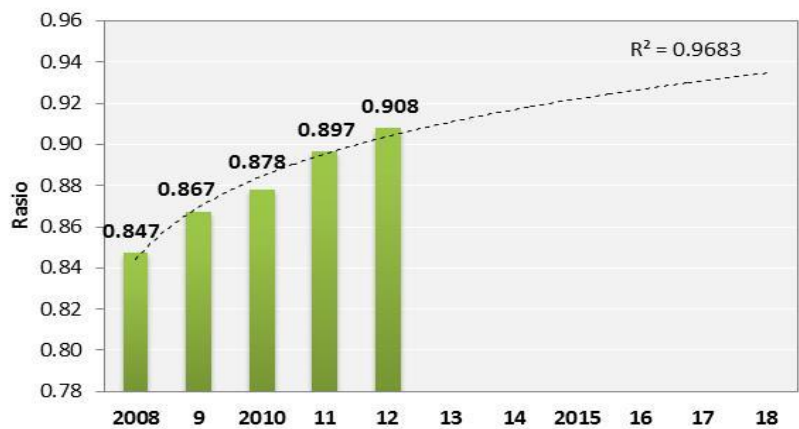


Sumber : LKPJ AMJ Kota Bandung

Grafik 2-17
Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Bandung Tahun 2009-2013

C. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang Bekerja)

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tahun 2008 berada di tingkat 0,847, sedangkan tahun 2012 menjadi sebesar 0,908. Dengan kata lain terdapat 90,8% dari angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja, sedangkan sisanya sebesar 9,17% masih mencari kerja atau pengangguran.



Sumber : BPS dan LKPJ AMJ Kota Bandung (diolah)

Grafik 2-18
Perkembangan dan Trend Rasio Penduduk yang Bekerja

Meningkatnya aktivitas perekonomian pada beberapa sektor perekonomian, menjadi faktor pendorong utama (*driving forces*) dalam

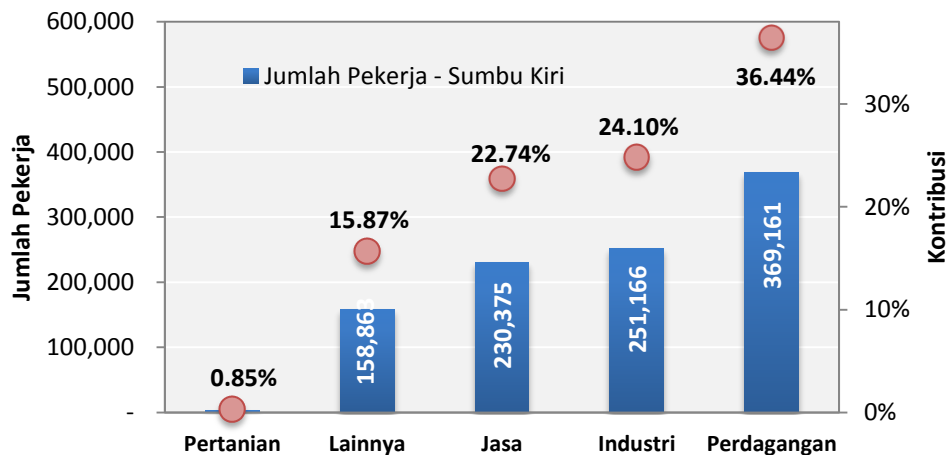
penyerapan tenaga kerja. Tahun 2012, sektor perdagangan memberikan lapangan kerja terbesar bagi masyarakat Kota Bandung, yaitu mencapai 387.828 orang atau memberi kontribusi sebesar 36,44% dari total lapangan kerja yang ada. Sektor industri juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Bandung, pada Tahun 2012, kontribusi sektor ini menyerap 24,09% dari total lapangan kerja yang ada. Sektor jasa yang semakin menggeliat memberikan kontribusi sebesar 22,74%, berbeda sedikit dengan tingkat penyerapan di sektor industri.

Tabel 2-15
Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha Utama di Kota Bandung Tahun 2012

No	Lapangan Usaha Utama	Orang	Kontribusi
1	Pertanian	9.012	0,85%
2	Pertambangan	1.954	0,18%
3	Industri	256.452	24,10%
4	Listrik Gas, Air	3.953	0,37%
5	Bangunan	41.904	3,94%
6	Perdagangan	387.828	36,44%
7	Perhubungan	63.222	5,94%
8	Bank & Keuangan	57.818	5,43%
9	Jasa	242.024	22,74%
TOTAL		1.064.167	100,00%

Sumber: BPS, Perencanaan Tenaga Kerja Kota Bandung 2012-2017

Sektor pertambangan merupakan sektor terkecil dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Bandung dan hanya memberikan kontribusi sebesar 0,18% dari total lapangan kerja yang ada.



Sumber: BPS, Bandung Dalam Angka 2011

Grafik 2-19
Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha Utama di Kota Bandung Tahun 2011

Walaupun capaian kesempatan kerja telah cukup baik, namun tidak dapat disangkal bahwa tingkat pengangguran yang ada masih cukup banyak. Tahun 2012 tingkat pengangguran di Kota Bandung mencapai 9,17%. Nilai ini lebih besar bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Nasional pada Agustus 2012 yang hanya mencapai 6,14% (*BPS Pusat*). Masih cukup tingginya angka pengangguran ini diantaranya karena meningkatnya warga luar yang datang ke Bandung tanpa memiliki keterampilan khusus. Selain itu tingkat persaingan yang tinggi dan cukup terbatasnya ketersediaan lapangan kerja baru juga memberikan kontribusi akan tingkat pengangguran yang ada.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

A. Kebudayaan

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kota Bandung selama ini telah dikenal sebagai salah satu Kota Seni Budaya. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul di kalangan masyarakat, Pemerintah Kota Bandung, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini terbukti dengan dicanangkannya Kota Bandung sebagai Kota Tujuan Wisata dan Kota Seni Budaya tahun 2008.

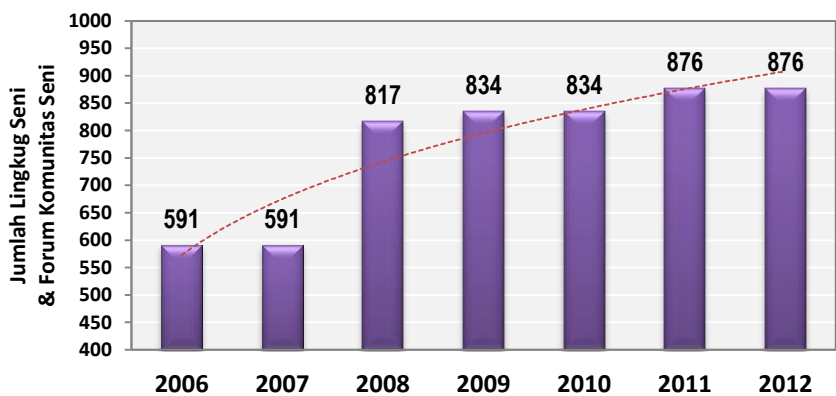
Diketahui bahwa hasil rekapitulasi tahun 2009 untuk potensi seni budaya di Kota Bandung berjumlah 274. Uraian secara lebih detail mengenai potensi seni budaya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2-16
Rekapitulasi Potensi Seni Budaya di Kota Bandung Tahun 2009

No	Gedung Seni Dan Budaya	JUMLAH
1	Lembaga Pendidikan Seni	13
2	Galeri	27
3	Gedung Pertunjukan	13
4	Museum	7
5	Gedung Bersejarah	13
6	Benda Cagar Budaya / Bangunan Lama	201
JUMLAH		274

Ket.: Data tahun 2011 tidak tersedia
Sumber: BPS, Bandung Dalam Angka 2011

Jumlah Lingkung Seni dan Forum Komunitas Seni Budaya tahun 2012 sebanyak 876 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 jumlah lingkup seni dan forum komunitas seni budaya di Kota Bandung cenderung mengalami peningkatan.



Sumber : LKPJ Kota Bandung 2012

Grafik 2-20
Jumlah Lingkung Seni dan Forum Komunitas Seni Budaya
Tahun 2006–2012

Jenis sanggar seni dan lingkung seni yang ada di Kota Bandung juga cukup beragam. Uraian detail terkait jenis sanggar seni dan lingkungan seni dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

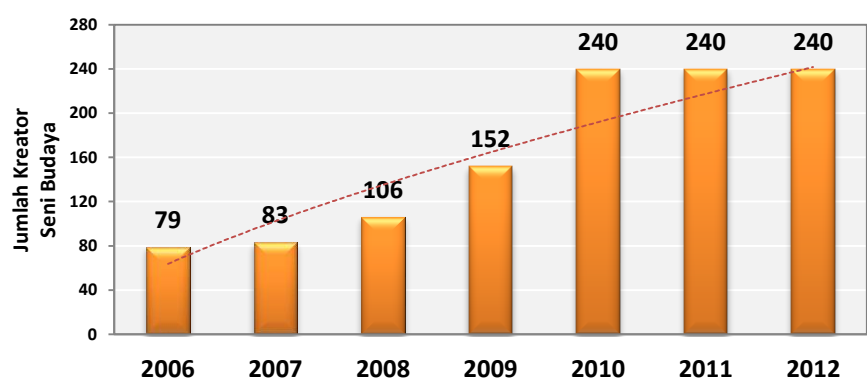
Tabel 2-17
Jenis Sanggar Seni dan Lingkung Seni di Kota Bandung

No	SANGGAR DAN LINGKUNG SENI
1	Lingkung Seni Kampus
2	Lingkung Seni Masyarakat Umum
3	Tembang Sunda Cianjuran
4	Degung
5	Kacapian
6	Wayang Golek
7	C a l u n g

No	SANGGAR DAN LINGKUNG SENI
8	T e a t e r
9	Tari Klasik
10	A n g k l u n g
11	R e o g
12	Kuda Lumping
13	Kuda Renggong
14	Celempungan
15	Seni Terebang
16	Seni Pantun
17	Pencak Silat
18	Barongsay
19	Benjang
20	Reak
21	Komunitas Sastra Sunda

Sumber: BPS, Bandung Dalam Angka 2011

Jumlah kreator seni budaya di Kota Bandung cenderung mengalami peningkatan, sebagai bentuk apresiasi terhadap para tokoh dan seniman yang menghidupkan budaya, setiap tahunnya diberikan Anugerah Budaya.



Sumber : LKPJ Kota Bandung 2012

Grafik 2-21
Perkembangan Kreator Seni Budaya Tahun 2006-2012

Namun hingga kini, Kota Bandung masih memerlukan sarana dan prasarana seni dan budaya yang lebih representatif. Selain itu, apresiasi generasi muda terhadap seni dan budaya daerah dirasa masih relatif minim. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kondisi ini adalah melalui penancangan pembangunan kawasan sentra seni budaya kreatif berwawasan lingkungan hidup seluas 10 hektar di Jalan Ciporeat, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Cibiru. Sentra seni tersebut akan menjadi wadah berkesenian para seniman dan warga Kota Bandung. Inovasi dan kreativitas seni budaya warga Kota Bandung harus terus

dikembangkan dan kewajiban Pemerintah Kota Bandung adalah memfasilitasi proses kreatif tersebut.

Kawasan ini juga diharapkan menjadi ruang ekspresi para seniman dan budayawan, serta di lokasi tersebut pengunjung dapat melihat tempat latihan seni, pembuatan angklung, calung, wayang, serta melihat pentas seni. Sentra seni dirasakan kebutuhannya untuk mengembangkan budaya kreatif warga Kota Bandung.

B. Olah raga

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Perkembangan jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk dan Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta) per 10.000 penduduk selama periode 2008-2012 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2-18
Perkembangan Prasarana Olah raga Kota Bandung
Tahun 2008-2012

No	Capaian Pembangunan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Gelanggang / Balai Remaja (selain milik swasta)	0,012 %	0,00012 %	1,26 %	0,0001 %	0,01 %
2	Lapangan olahraga .	0,01%	0,00%	0,06 %	0,069 %	0,04 %

Sumber: LPPD AMJ Kota Bandung

Dari data terakhir tahun 2011, terdapat 38 cabang olahraga dan 661 atlet di Kota Bandung. Selain itu juga terdapat 200 pelatih olahraga yang berada di Kota Bandung. Sebagai upaya penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat juga telah berdiri Stadion Gelora Bandung Lautan Api (BLA) yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2009 dan telah menelan biaya sekitar Rp. 545 milyar. Stadion ini dilengkapi *track* atletik bertaraf internasional, serta dapat menampung sedikitnya 38 ribu penonton.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib

Aspek pelayanan urusan wajib Pemerintah Kota Bandung dalam kurun waktu tahun 2008 hingga 2013 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2-19
Hasil Kinerja Fokus Layanan Urusan Wajib
Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2008-2013

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pendidikan						
1	Pendidikan dasar						
	- Rasio terhadap murid SD/MI		47,2	47,5	48,3	n.a	n.a
	- Rasio terhadap murid SMP/MTs		n.a	61,6	64,2	n.a	n.a
2	Pendidikan menengah						
	Rasio terhadap murid SMA/MA/ SMK		n.a	82,7	84,5	n.a	n.a
3	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) ²⁾		99,97%	99,99%	99,55%	99,55%	99,62%
4	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ²⁾		25%	35%	45%	45%	55%
5	Angka Putus Sekolah						
	- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI ³⁾	0,02%	0,01%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%
	- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs ³⁾	0,10%	0,08%	0,06%	0,04%	0,02%	0,02%
	- Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA ³⁾	0,50%	0,40%	0,30%	0,20%	0,10%	0,05%
6	Angka Kelulusan						
	- Angka Kelulusan (AL) SD/MI ²⁾	99,98%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs ²⁾	99,90%	99,97%	99,98%	99,98%	99,98%	100%
	- Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA ²⁾	99,00%	99,20%	99,40%	99,40%	99,40%	99,8%
7	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ MI ke SMP/MTs ²⁾	113,75%	113,75%	113,75%	113,38%	113,38%	113,38%
8	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA ²⁾	102,16 %	102,16 %	102,16%	102,16 %	102,16 %	102,16 %
9	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV ²⁾	36,6 %	85%	85%	90%	90%	90%
2	Kesehatan						
1	Jumlah posyandu (unit) ³⁾	1.896	1.903	1.938	1.945	1.959	1.959
2	Rasio puskesmas per satuan penduduk ¹⁾	0,0299	0,0296	0,0301	0.0904	0.089	0.089
3	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani ²⁾	100%	85,07%	99,61%	99,31%	100%	100%
4	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan ²⁾	89,97%	84,75%	95,57%	94,67%	103,70%	103,70%
5	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) ²⁾	83,20%	100%	100%	100%	105,60%	100%
6	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan ²⁾	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA ²⁾	100%	100%	80%	100%	100%	100%
8	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD ²⁾	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin ²⁾	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Cakupan kunjungan bayi ²⁾	90%	87,56	98,20%	93,29%	92,04%	92,04%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
3	Pekerjaan Umum						
1	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik ²⁾	46,27%	46,27%	49,22%	57,68%	64,15%	68,96%
2	Rumah Tangga Bersanitasi ²⁾	58%	58%	80,96%	50%	70,99 %	70,99 %
3	Kawasan Kumuh ²⁾	18%	18%	17,32%	21,14%	Na	na
4	Pembangunan PJU	-	-	8%	47%	150,4%	221,3%
4	Perumahan						
1	Rumah tangga pengguna airbersih ²⁾	71,69%	71,69%	65%	69,23 %	69,23 %	
2	Rumah Tangga Pengguna Listrik (Jumlah RT) ¹⁾	n.a	526.214	560.06	584.99	n.a	
3	Rumah layak huni ²⁾	72.67%	69.30%	69.30%	69.60%	70.69%	
5	Perencanaan Pembangunan						
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd	115,90%	86,27 %	86,27%	100%	100%	100%
6	Perhubungan						
1	Load factor (jumlah penumpang/ kapasitas angkutan penumpang*100)	32,26%	33,64%	48,42 %	49,84%	52,21%	
2	Jumlah Arus penumpang angkutan umum	4.227.894	4.358.569	5.885.569	5.834.592	6.156.085	
3	Rasio Ijin Trayek	5.647/ Pddk	5657/ Pddk	5657/ Pddk	5657/ Pddk	5657/ Pddk	5657/ Pddk
4	Lama pengujian kelayakan angkutan umum	50 Menit	50 Menit	50 Menit	50 Menit	50 Menit	50 Menit
5	Tingkat kepemilikan/ kelulusan KIR angkutan umum ³⁾	99,42%	99,27%	99,11%	99,08%	98,94%	95 %
6	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rp.60 rb	Rp.60 rb	Rp.60 rb	Rp.60 rb	Rp.60 rb	Rp.60 rb
7	Jumlah orang melalui terminal	4.227.894	4.358.749	5.885.569	5.834.592	6.156.085	
8	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (jumlah rambu) ³⁾	n.a	500	500	510	625	
7	Lingkungan Hidup						
1	Penanganan sampah ¹⁾	23%	67%	70%	73%	85%	74%
2	Cakupan pelayanan air minum ²⁾	64,00%	66,00%	67,00%	72,00%	72,43%	70%
3	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk ²⁾	77%	76%	76%	77%	76%	74%
4	Penegakan hukum lingkungan ²⁾	69,23 %	100%	100%	100%	100%	100%
8	Pertanahan						
1	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	0%	0%	0%	0%	0%	100%
2	Penyelesaian Ijin Lokasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Kependudukan dan Catatan Sipil						
1	Kepemilikan KTP	89,90%	94,23%	100%	96,75%	96,75%	
2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	59,11 %	91,62 %	90,96 %	66,70%	60%	
3	Database kependudukan skala Kota Bandung	75%	n.a	n.a	n.a	95%	
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Belum	Belum	Belum	Sudah	Sudah	
10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Partisipasi angkatan kerja perempuan	40,47%	40,47%	52,1%	54%	43,47%	38,00%
11	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						
1	Cakupan peserta KB aktif	79,96 %	81,27 %	72,15%	73.01%	73.01%	

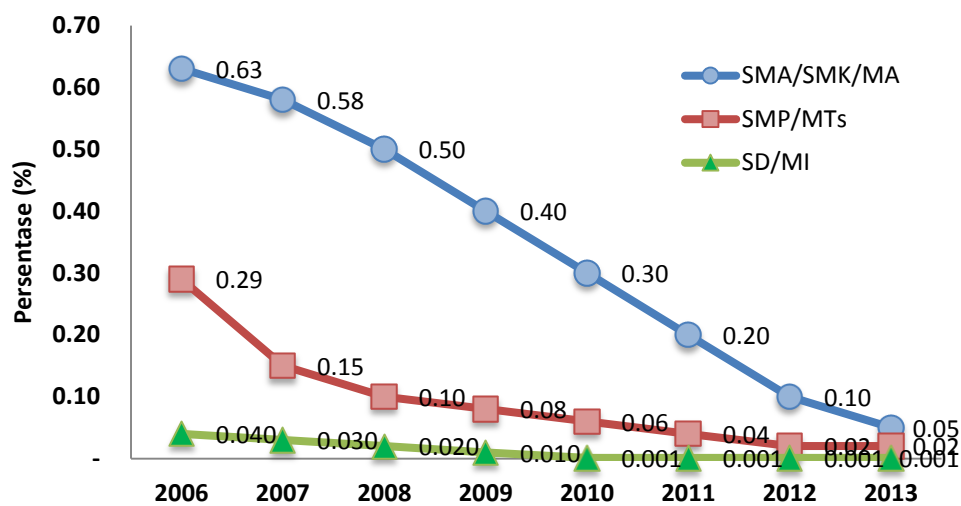
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
12	Sosial						
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	60 buah	60 buah	60 buah	60 buah	60 buah	60 buah
13	Ketenagakerjaan						
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja ¹⁾	60,06%	60,71%	60,73%	61,40%	63,14%	63,55%
2	Pencari kerja yang ditempatkan ²⁾	11,20%	8,64%	9,44 %	39,24%	45,77%	14.05%
3	Tingkat pengangguran terbuka ³⁾	15,27%	13,28%	12,17%	10,34%	9,17%	10,98%
4	Tingkat keselamatan dan perlindungan tenaga kerja ³⁾	82,99%	84,15%	85,47%	87,00%	86,32%	87,38%
5	Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI) ³⁾	84,43%	87,00%	91,30%	62,16%	67,78%	61,32%
14	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
1	Koperasi aktif	75,93%	76,18 %	76,47 %	77,44%	78,09%	78,66%
2	Jumlah Usaha Kecil Mikro dan Menengah Binaan	2800	4121	4221	4425	4531	4581
15	Penanaman Modal						
1	Nilai Investasi Lokal Total (Non PMA dan PMDN) (Triliun Rp)	3,601	1,916	2,413	4,050	1,805	1,708
16	Kebudayaan						
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	na	na	na	486 kali	154 kali	87 pagelaran
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5 Buah	26 Buah	26 Buah	26 Buah	26 Buah	NA
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	na	na	na	15,54%	15,54%	NA
17	Kepemudaan dan Olahraga						
1	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	0,012 %	0,00012%	1,26 %	0,0001 %	0,01 %	NA
2	Lapangan olahraga	0,01%	0,00%	0,06%	0,069%	0,04%	NA
18	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP ²⁾	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
2	Kegiatan pembinaan politik daerah ²⁾	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan
19	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1	Pertumbuhan Ekonomi	8,17%	8,34%	8,45%	8,73%	8,98%	NA
2	Kemiskinan	15,97%	n.a	n.a	n.a	9,09%	NA
3	Penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah (%)	100%	80,77%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Kejadian Kebakaran	141	121	101	124	137	131
5	Pengadaan kantor Kecamatan dan Kelurahan (jumlah kantor)	163	164	166	168	176	181
6	Sistem Informasi Manajemen Pemda	5 Buah	5 Buah	6 buah	2 buah	2 buah	NA
7	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	NA
20	Ketahanan Pangan						
1	Regulasi ketahanan pangan ²⁾	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan pangan utama ²⁾	184.046,32	22.327,57	NA	NA	5859.2	NA
21	Pemberdayaan Masyarakat						
1	PKK aktif	100%	72%	86%	86%	100%	100%
2	Posyandu Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Statistik						
1	Buku "Kota dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB Kota"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
23	Kearsipan						
1	Penerapan penyelenggaraan arsip secara baku	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	NA
2	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Tidak ada	1 keg.	1 keg.	1keg.	2 keg.	1 keg.
24	Komunikasi dan Informatika						
1	Web site milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Pameran/expo	3 Kali	Tidak Ada	1 kali	2 kali	1 kali	NA
25	Perpustakaan						
1	Pengunjung perpustakaan	0,47%	0,02%	0,03%	0,07%	0,20%	NA
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	39,20%	33,30%	85,5 %	33,20%	33,3%	NA

2.3.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia dalam pembangunan. Berikut ini diuraikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja di urusan pendidikan Kota Bandung. Pada tingkat pendidikan dasar, perkembangan rasio guru/murid di tingkat SD/MI dan SMP/MTs Kota Bandung mengalami peningkatan selama periode 2009-2011. Jika tahun 2009 rasio guru/murid SD/MI ada di tingkat 47,2, maka tahun 2011 meningkat menjadi 48,3. Sedangkan untuk rasio guru/murid di tingkat SMP/MTs tahun 2011 mencapai 64,2, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 61,6. Dari rasio tersebut diketahui bahwa kecukupan guru untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Bandung mengalami peningkatan, demikian juga rasio guru/murid di tingkat SMA/MA/SMK Kota Bandung.

Penduduk Kota Bandung yang berusia di atas 15 tahun dan tidak buta aksara tahun 2009 mencapai 99,97%, kemudian mengalami peningkatan menjadi 99,99% tahun 2010. Namun tahun 2012 mengalami penurunan menjadi sebesar 99,55%. Pada level pendidikan pra sekolah, perkembangan angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Bandung selama periode 2009-2012 mengalami kenaikan, tahun 2009 angka partisipasi PAUD sebesar 25%, maka tahun 2012 telah menjadi 45%.



Grafik 2-22
Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan
SMA/SMK/MA Kota Bandung Tahun Periode 2006-2013

Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI dalam rentang waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jika tahun 2006 APS SD/MI berada di posisi 0,04%, maka tahun 2012 menjadi hanya sebesar 0,001% atau dapat dikatakan hampir tidak ada APS di tingkat SD/MI.

Angka Putus Sekolah SMP/MTs juga mengalami penurunan yang berarti selama periode 2006-2012. Jika tahun 2006, tingkat APS SMP/MTs Kota Bandung ada di tingkat 0,29%, maka tahun 2012 mengalami penurunan hanya menjadi 0,02%. Selama periode 2006-2012, Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA di Kota Bandung juga mengalami tren penurunan, tahun 2006, tingkat APS SMA/SMK/MA Kota Bandung ada di tingkat 0,63%, maka tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 0,10%.

Terkait dengan angka kelulusan (AL), diketahui bahwa angka kelulusan SD/MI di Kota Bandung dari mulai tahun 2009 hingga 2012 telah mencapai 100%. Untuk angka kelulusan (AL) SMP/MTs diketahui bahwa tahun 2008 sudah mencapai 99,90% dan mengalami peningkatan menjadi 99,98% di tahun 2012.

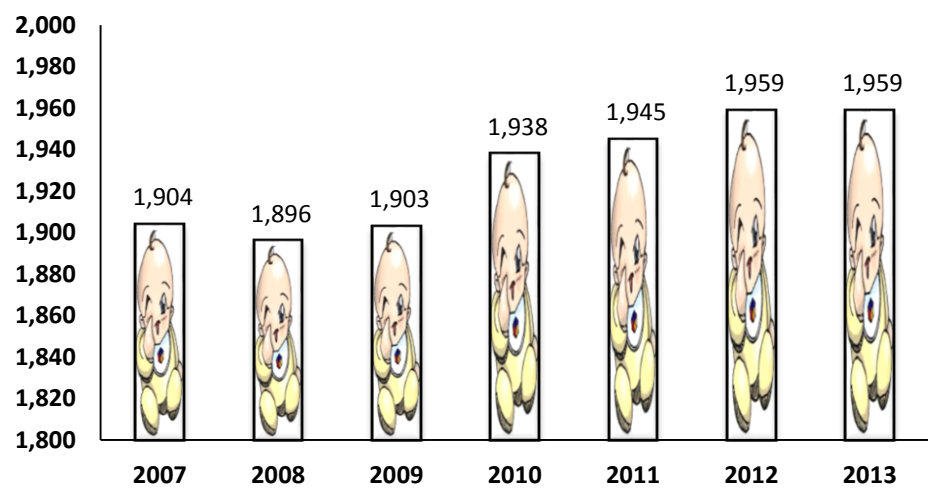
Di tingkat sekolah menengah, angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Kota Bandung tahun 2008 sudah mencapai 99,00% dan mengalami peningkatan menjadi 99,40% tahun 2012. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat 0,60% murid SMA/SMK/MA yang tidak lulus tahun 2012.

Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs di Kota Bandung selama periode 2008-2012 berada di atas 100%. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kota Bandung selama periode 2008-2012 juga telah di atas 100%. Tahun 2012, AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sudah mencapai 102,16%,

Dalam aspek kualitas pengajar, tingkat guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Bandung selama periode 2008-2012 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jika tahun 2008 baru mencapai 36,6% guru yang memenuhi kualifikasi ini, maka tahun 2012 sudah mencapai 90%.

2.3.1.2. Kesehatan

Jumlah posyandu tahun 2007 sebanyak 1.904 posyandu dan tahun 2013 menjadi 1.959 posyandu, terjadi penambahan 55 unit posyandu atau terdapat meningkat sebesar 2,9% unit posyandu. Rasio ideal 1 unit posyandu untuk melayani balita adalah antara 75–100 balita. Apabila 1 unit Posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka dilakukan pemekaran unit Posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit Posyandu.



Sumber: LKPJ AMJ Kota Bandung

Grafik 2-23
Perkembangan Jumlah Posyandu Kota Bandung periode 2007-2013

Ketersediaan Puskesmas bagi masyarakat dari periode 2008 ke tahun 2012 mengalami kenaikan. Rasio Puskesmas per satuan penduduk di

Kota Bandung tahun 2010, 1 puskesmas melayani 33.219 orang penduduk.

Jumlah rumah sakit di Kota Bandung selama periode 2008-2012 mengalami kenaikan. Jika tahun 2008 tercatat terdapat 10 rumah sakit, maka tahun 2012 telah mencapai 30 rumah sakit. Perbedaan yang cukup tinggi, diindikasikan bahwa tahun 2008 belum semua rumah sakit tercatat.

Untuk perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Bandung selama periode 2008-2013 mengalami fluktuasi. Dalam hal ini, komplikasi kebidanan yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Tahun 2008 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sudah mencapai 100%, namun mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 85,07% tahun 2009. Tahun 2013 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Bandung sudah kembali mencapai 100%.

Perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Bandung mengalami perbaikan setiap tahunnya. Jika tahun 2009 cakupannya baru mencapai 84,75%, maka tahun 2013 sudah mencapai 93,58%.

Perkembangan cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Bandung selama periode 2009-2013 telah mencapai 100%. Tahun 2013 bahkan cakupan Desa/Kelurahan UCI telah mencapai 100%. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana >80% dari jumlah bayi yang ada di Desa/Kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Untuk kinerja cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kota Bandung sudah mencapai tingkat yang optimal, dimana dari periode 2008 hingga 2013 sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kasus balita gizi buruk sudah tertangani seluruhnya.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA serta Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Bandung juga sudah optimal. Selama periode 2008-2013 cakupan penemuan dan penanganan penderita kedua jenis penyakit tersebut sudah mencapai 100%.

Kinerja cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin selama 3 tahun terakhir (2011-2013) sudah mencapai 100%. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat miskin telah mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

Perkembangan cakupan kunjungan bayi selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Cakupan kunjungan bayi tahun 2008 telah mencapai 90%, tetapi turun tahun 2009 menjadi sebesar 87,56%. Tahun 2010 cakupan kunjungan bayi naik tajam menjadi 98,20%, dan tahun 2013 mengalami penurunan lagi, menjadi hanya 94,72%.

Untuk cakupan puskesmas di Kota Bandung selama periode 2008-2010 sudah di atas 100%. Ini berarti bahwa jumlah puskesmas di suatu Kecamatan ada yang lebih dari 1 puskesmas. Cakupan puskesmas di tahun 2010 mencapai 243,3%.

Terkait capaian indikator SPM di urusan kesehatan, diketahui bahwa tahun 2013 sudah banyak yang tercapai, bahkan melebihi dari target yang telah ditentukan. Hanya terdapat beberapa indikator kinerja saja yang capaiannya masih di bawah target. Ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Kota Bandung sudah cukup baik. Dari total 24 indikator SPM Bidang Kesehatan, sebanyak 21 indikator (87,5%) sudah tercapai (bahkan beberapa indikator melebihi target) dan hanya sebanyak 3 indikator (12,5%) saja yang belum mencapai target. Indikator SPM yang belum tercapai diantaranya cakupan peserta KB aktif, cakupan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia, cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus ditangani sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum

Ketersediaan infratraktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Berikut ini diuraikan hasil kinerja Urusan Pekerjaan Umum selama periode 2008-2012.

Sekalipun proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Bandung cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, tetapi masih berada pada tingkatan yang belum memadai guna mendukung pergerakan orang dan barang. Jika tahun 2009 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 49,22%, tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi sebesar 68,96%. Ini berarti hampir 1/3 panjang jaringan jalan di Kota Bandung dalam kondisi rusak (sedang atau berat).



Gambar 2-2
Kondisi Ruas Jalan yang Rusak di Kota Bandung

Tahun 2012, dari 1.160,8 kilometer jalan di Kota Bandung, sekitar 31,04% dalam kondisi rusak atau sepanjang 383 kilometer. Dari panjang jalan rusak tersebut target tahun 2013 akan dilakukan perbaikan sepanjang 190 kilometer atau sekitar 15%, ditambah dengan kegiatan pemeliharaan dengan target sebesar 410.000 m².

Untuk aspek tempat tinggal, diketahui bahwa rumah tinggal yang bersanitasi di Kota Bandung mengalami perkembangan selama periode 2008-2012. Tahun 2008, rumah tinggal bersanitasi berada di tingkat

58% dari total rumah tinggal yang ada. Kemudian tahun 2012, tingkat capaiannya sudah mencapai 70,99%. Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi (1) Fasilitas air bersih (2) Pembuangan tinja (3) Pembuangan air limbah (4) Pembuangan sampah. Walaupun terjadi peningkatan kinerja, namun hal ini menunjukkan bahwa sebagian pembangunan rumah tinggal di Kota Bandung masih belum memenuhi aspek dasar yang dibutuhkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui bantuan penyediaan MCK dan *septic tank* komunal terutama di kawasan kampung yang kumuh.

Berdasarkan data Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, dari 1561 RW, sebanyak 194 diantaranya termasuk ke dalam daerah pemukiman kumuh. Dari 194 RW tersebut, 29 RW termasuk dalam kategori kumuh tinggi, 88 RW kumuh sedang dan 77 kumuh rendah. Daerah kumuh tinggi, yaitu Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astanaanyar, Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan, Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung, dan Kelurahan Situsaur Kecamatan Bojongloa Kidul.

Karakteristik daerah kumuh tinggi yaitu daerah pemukiman yang ketersediaan air bersihnya kurang dari 30 %, sistem drainase buruk, kondisi jalan lingkungan rusak parah lebih dari 70%, kepadatan penduduk lebih dari 100 unit rumah perhektar, tidak memiliki jarak antar bangunan dan perkembangan bangunan tinggi.

Meluasnya kawasan kumuh berkorelasi dengan meningkatnya kepadatan penduduk yang tahun 2008 saja telah mencapai angka 156 jiwa/hektar. Dengan angka pertumbuhan penduduk 1,59% per tahun diprediksi pada kepadatan penduduk tahun 2025 akan mencapai 300 jiwa/hektar.

Dalam hal pengelolaan air limbah di Kota Bandung diolah hanya dengan menggunakan satu buah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang terletak di Bojongsoang, dengan kapasitas 400.000 jiwa, atau hanya melayani lebih kurang 15% dari penduduk Kota Bandung. IPAL

Bojongsoang melayani sistem terpusat Bandung Timur serta Tengah/Selatan, sedangkan untuk wilayah Barat dan Utara belum tersedia sistem pelayanan. Sampai dengan tahun 2012 di sebagian besar wilayah, saluran air kotor masih bercampur dengan saluran drainase (sistem campuran) dalam bentuk saluran terbuka. Saluran tertutup untuk limbah domestik maupun non-domestik masih sangat terbatas.

Berkenaan dengan drainase, secara umum sistem drainase di Kota Bandung terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu drainase makro dan drainase mikro. Saluran pembuangan makro adalah saluran pembuangan yang secara alami sudah ada di Kota Bandung, yang terdiri dari 15 sungai sepanjang 265,05 km. Saluran pembuangan mikro adalah saluran yang sengaja dibuat mengikuti pola jaringan jalan. Namun, sekitar 30% ruas jalan belum memiliki saluran drainase sehingga beberapa daerah menjadi rawan banjir dan genangan.



Gambar 2-3
Banjir di Ruas Jalan di Jembatan Pasopati

Penyebab terjadinya daerah rawan banjir adalah karena tertutupnya *street inlet* oleh beberapa aktivitas sehingga air hujan tidak bisa masuk ke dalam saluran drainase, adanya pendangkalan di beberapa bagian saluran, konstruksi drainase yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta pengalihfungsian lahan dari kondisi alami menjadi lahan dengan fungsi komersil seperti pertokoan, mall, jalan, perumahan, dan lain-lain sehingga tutupan lahan pun berubah yang meningkatkan debit limpasan.

Potensi kerusakan jalan di Bandung jauh lebih besar pada saat kondisi basah dibandingkan pada kondisi kering. Hal ini disebabkan air sering tidak tertampung dan menggenangi banyak segmen jalan, baik saluran pinggir jalan maupun saluran-lauran pembuangan lainnya.

2.3.1.4. Perumahan

Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Perkembangan cakupan rumah tangga pengguna air bersih di Kota Bandung relatif stagnan, karena kenaikan jumlah Kepala keluarga (KK) yang membutuhkan bertambah, maka bertambah pula rumah tangga pengguna air bersih yang harus dilayani. Tahun 2008 rumah tangga pengguna air bersih sudah mencapai 71,69%, namun tahun 2012 karena penambahan jumlah KK yang harus dilayani, mengalami penurunan menjadi 69,23%.

Tabel 2-20
Kondisi Pelayanan Air Bersih Kota Bandung Tahun 2009

No	Keterangan	Satuan	Kondisi Tahun 2009
1	Kapasitas Produksi Air Bersih		
	- Mata Air	l/dt	123
	- Air Tanah	l/dt	111,63
	- Air Permukaan	l/dt	2.472,65
	Total		2.706,88
2	Pelayanan Air Bersih		
	Sambungan pelanggan	Unit	147.000
	Penduduk terlayani	jiwa	1.520.953

Sumber: PDAM Kota Bandung

Akses air bersih bagi masyarakat Kota Bandung hingga kini masih belum dapat memenuhi standar kelayakan secara sepenuhnya dan potensial terancam oleh padatnya permukiman dan perubahan fisik lingkungan.

Dalam hal penggunaan listrik, jumlah rumah tangga pengguna listrik PLN selama periode 2009-2011 di Kota Bandung mengalami peningkatan. Jika tahun 2009 jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN berjumlah 526.214 rumah tangga, maka tahun 2011 jumlah

meningkat menjadi sebesar 584.990 rumah tangga atau tumbuh sebesar 11,2%.

Terkait dengan capaian SPM urusan perumahan, bahwa cakupan ketersediaan rumah layak huni Kota Bandung tahun 2012 baru mencapai 581.894 unit rumah dari target sebesar 648.730 unit. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan rumah layak huni masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama MBR. Di sisi lain berkurangnya luasan permukiman kumuh di Kota Bandung tahun 2012 baru mencapai 2.494,5 m² dari target sebesar 11.641 m². Ini menunjukkan bahwa masih sangat banyak kawasan kumuh yang perlu ditangani.

2.3.1.5. Penataan Ruang

Pola ruang dan struktur ruang Kota Bandung memerlukan pembenahan secara matang dan menyeluruh agar mampu mendukung perkembangan kehidupan masyarakat. Kota merupakan tempat untuk hidup (*to live*), bekerja (*to work*), dan bermain (*to play*), sehingga kelancaran mobilitas warga dan ketersediaan sarana prasarana pendukung yang berkualitas baik merupakan syarat utama.

Kegiatan penataan ruang yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian, salah satunya memfokuskan pada ketersediaan dokumen bidang penataan ruang yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum. Indikator tersedianya dokumen perencanaan sesuai Undang-undang Penataan Ruang, dari target tersusunnya Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), tahun 2012 belum terealisasi.

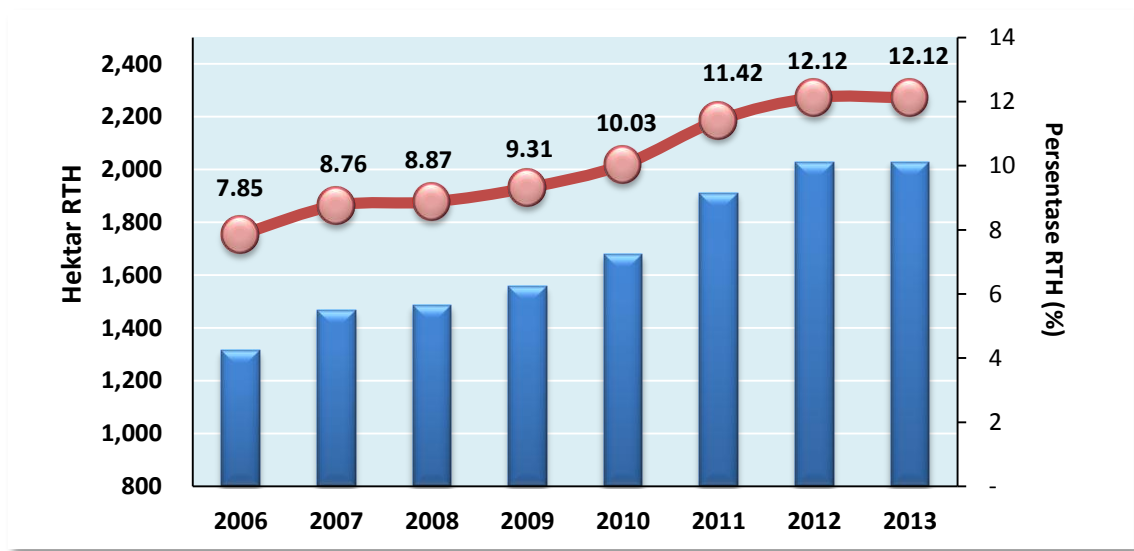
Dalam hal pemanfaatan ruang, berdasarkan indikator pemanfaatan ruang yang tertib, dari target sebesar 95,00% dapat terealisasi sesuai target. Dokumen perencanaan tata ruang yang telah tersedia berupa Perda RTRW dan Dokumen Materi Teknis RDTR dan Peraturan Zonasi, hanya tinggal menunggu proses pengesahan menjadi Peraturan Daerah.

Dalam konteks pengendalian, berdasarkan indikator pengendalian pemanfaatan ruang yang tertib, dari target sebesar 95,00% dapat terealisasi sebesar 56,72%. Kelebihan posisi Kota Bandung yang terletak

pada dataran tinggi, iklim yang relatif bersahabat, dan pilihan bagi kegiatan “*work, live, & leisure*” saat ini semakin menurun dan tidak mendapatkan solusi layak dalam mempertahankannya.

Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota juga tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau kota. Ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung selama periode 2008-2012 cenderung mengalami peningkatan. Jika tahun 2008 persentase RTH berada di tingkat 8,87%, kemudian tahun 2012 hanya menjadi 12,12%.

Perkembangan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung dilihat dari luasan (hektar) dan persentase RTH dari keseluruhan lahan yang ada dapat dilihat dalam Grafik berikut ini.



Sumber : LKPJ AMJ Kota Bandung

Grafik 2-24
Perkembangan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Kota Bandung periode 2006-2013

2.3.1.6. Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung telah disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025, sehingga menjadikan periode 2008-2012 telah tersusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat diacu dan terlegitimasi. RPJMD Kota Bandung juga sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013. Namun di tengah proses pelaksanaannya, RPJMD Kota Bandung 2009-2013 perlu dilakukan penyempurnaan dan penyelarasan (revisi) lebih lanjut, terkait konsep dan substansi yang telah termaktub. Revisi RPJMD Kota Bandung ini telah disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang RPJMD Kota Bandung 2009 - 2013.

Selama periode 2008-2012 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwal). Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Kota Bandung dalam dua tahun terakhir (2011-2012) juga sudah terakomodasi secara optimal. Dengan kata lain, seluruh program yang ada di RPJMD sudah diimplemetasikan lebih lanjut di dalam RKPD.

2.3.1.7. Perhubungan

Penyelenggaraan pelayanan perhubungan kota merupakan aspek strategis yang berdampak lintas sektoral. Persentase jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat di Kota Bandung tahun 2012 mencapai 6,03% atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang hanya 4,24%.

Berdasarkan hasil identifikasi Dinas Perhubungan, kondisi kemacetan jalan dipengaruhi oleh 32 (tiga puluh dua) aspek sebagai berikut: (1) Panjang jalan/lebar jalan; (2) Kondisi jalan; (3) Jumlah kendaraan pribadi; (4) Persimpangan yang terlalu dekat; (5) Sekolah; (6) Pasar Tumpah/PKL; (7) Pangkalan liar; (8) Parkir; (9) Kendaraan jemputan anak sekolah; (10) Angkot; (11) Kesadaran masyarakat; (12) Displin pengemudi; (13) Kendaraan dari luar Kota Bandung; (14) Becak melawan arus; (15) Shelter; (16) *Traffic light*; (17) Perumahan; (18) Perubahan Fungsi bangunan; (19) Banjir; (20) Marka jalan dan rambu lalu lintas; (21) SDM petugas; (22) Dana; (23) Anak jalanan; (24) Jaringan jalan; (25) Perbaikan jalan/galian kabel/perbaikan; (26) Perlintasan kereta api; (27) Pusat perbelanjaan/Mall; (28) Bongkar muat; (29) Penerangan jalan

umum; (30) Gerakan pejalan kaki; (31) Pool/Agen Bus; (32) Luas terminal.

Arus kendaraan yang masuk ke Kota Bandung, terutama pada akhir pekan (*weekend*) juga memberikan pengaruh yang signifikan pada kemacetan, terutama banyak wisatawan yang berkunjung ke kawasan niaga, kuliner dan pariwisata. Sejak dibukanya Tol Cipularang, arus kendaraan masuk dan keluar di Kota Bandung meningkat drastis.



Gambar 2-4
Kemacetan di Salah Satu Ruas Jalan Kota Bandung

Jika belum terdapat transportasi massal yang representatif, maka dipastikan volume kendaraan akan terus meningkat. Hal menjadi masalah karena pertambahan volume kendaraan tidak mampu diimbangi penambahan jalan. Alternatif yang telah diusahakan dengan membangun jalan layang di beberapa titik, seperti Cimindi, Kiaracondong, dan Pasupati. Pembangunan jalan layang (*fly over*) atau bahkan jalan bawah tanah (*underpass*) untuk dapat mengurangi kemacetan. Selain itu ke depan perlu dikembangkan lebih lanjut konsep SAUM potensial seperti monorel, *tram*, atau *cable car*, dan lain sebagainya.

Konsep pengembangan moda transportasi *Mass Rapid Transit* (MRT) dengan jenis monorel sudah diinsiasi oleh Pemerintah Kota Bandung tahun 2012. ditandai dengan penandatanganan joint operation antara Vice President China National Machinery Imp. Exp. Corporation (CMC) dengan Presiden Direktur Panghegar.

Dalam moda transportasi udara, Kota Bandung telah memiliki Bandara Husein Sastranegara. Namun kondisi saat ini sudah kurang layak karena daya tampungnya tidak sebanding dengan pertumbuhan penumpang. Tahun 2012 pertumbuhan penumpang di Bandara Husein Sastranegara mencapai 97,5% atau 1,8 juta penumpang setahun, terdiri dari 1,2 juta penumpang domestik, dan 600.000 penumpang internasional. Daya tampung terminal hanya 903 penumpang per hari, dengan luas lahan 3.000 meter persegi.

Terkait dengan kepemilikan/kelulusan KIR angkutan umum, diketahui bahwa tahun 2012 telah mencapai 95%. Data sebelum tahun 2012 belum teridentifikasi secara jelas. Peningkatan kepemilikan/kelulusan KIR perlu tetap dipertahankan, salah satunya dapat melalui kampanye emisi bersih untuk kendaraan bermotor.

Selama periode 2009-2012, di Kota Bandung juga sudah dilakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 2.135 rambu. Jika periode tahun 2009-2010 tiap tahunnya terpasang sebanyak 500 rambu, maka tahun 2012 terpasang sebanyak 625 rambu.

2.3.1.8. Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Pengendalian pencemaran lingkungan diprioritaskan pada pengelolaan sampah padat perkotaan, perbaikan akses terhadap sumber air bersih dan pengelolaan air limbah. Perlindungan kawasan konservasi dan memulihkan kembali kawasan-kawasan yang berfungsi lindung.

Persoalan pengelolaan sampah di Kota Bandung, harus mendapat perhatian khusus. Jumlah sampah yang terangkut lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 23% tahun 2008 meningkat menjadi 85% tahun 2012, yang berarti 15% sampah yang belum terangkut, diperkirakan 15% sampah yang tidak terangkut ini dikelola oleh masyarakat sendiri atau dibuang ke sungai, lahan kosong atau di pinggir jalan. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per

satuan penduduk di Kota Bandung selama periode 2008-2012 relatif stagnan di angka sekitar 76%-77% TPS/satuan penduduk. Ini menunjukkan bahwa daya tampung TPS (m^3) mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Pemerintah Kota Bandung bersama Kelompok Masyarakat Peduli Sampah mendorong masyarakat untuk mengelola sampah dengan sistem 3-R (*reduce, reuse, recycle*). Sekitar 9% atau sekitar 135 ton/hari timbunan sampah telah dikelola dengan sistem 3-R di 5 lokasi TPS-3R milik PD. Kebersihan dan 7% atau sekitar 105 ton/hari timbunan sampah dikelola dengan sistem 3-R secara mandiri oleh masyarakat. Pengelolaan sampah anorganik dengan sistem 3-R telah berkembang dan dilembagakan kedalam bentuk lembaga ekonomi berbasis masyarakat yang disebut Bank Sampah. Hingga saat ini telah berdiri 70 Bank Sampah yang tersebar di 70 RW dari 1561 RW yang ada di Kota Bandung. Bank Sampah sebagai alternatif praktek 3-R dalam pengelolaan sampah harus didorong perkembangannya mengingat kemampuan mereduksi sampahnya yang mencapai 60% dari timbunan sampah skala rumah tangga dan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diperoleh masyarakat dari praktek ini.

Pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir masih menjadi alternatif utama pengelolaan sampah Kota Bandung, TPA yang dimiliki Kota Bandung (TPA Jelekong, TPA Pasir Impun, TPA Cicabe) sudah habis usia pakainya dan dialihfungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau; terkecuali lahan pasca TPA Jelekong saat ini digunakan sebagai lahan pengomposan. Mengingat TPA Sarimukti akan berakhir usia pakainya tahun 2015, pemerintah berupaya mendorong alternatif pengelolaan sampah melalui pembangunan Teknologi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan yang akan direncanakan dapat mengolah sampah kota Bandung sebesar 700 m^3 /hari.



Gambar 2-5
Pemandangan Tumpukan Sampah di Jln. Tamansari Bandung

Cakupan pelayanan air minum di Kota Bandung mengalami peningkatan selama periode 2008-2012. Jika tahun 2008 cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat mencapai 64% saja, maka cakupan ini tahun 2012 telah mencapai 72,43%. Kebutuhan air bersih Kota Bandung semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan kota. Permasalahan penyediaan air bersih di Kota Bandung saat ini tidak saja hanya mencakup kuantitas tetapi juga kualitas dan kontinuitas. Saat ini penyediaan air bersih salah satunya diselenggarakan oleh PDAM, tetapi kapasitasnya belum bisa mencukupi seluruh kebutuhan warga kota Bandung.

Tabel 2-21
Kebutuhan air bersih Kota Bandung

No	Tahun	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Jumlah Kebutuhan Air Bersih (liter atau m ³)
1.	2009	483.457	362.592.905
2.	2010	564.923	423.692.431
3.	2011	507.446	380.585.670
4.	2012	564.928	423.696.481 *)

*) kebutuhan air berdasarkan standar PU
Sumber: PDAM Kota Bandung Tahun 2012

Jumlah Rumah Tangga yang dilayani kebutuhan air bersih oleh PDAM Kota Bandung tidak mengalami peningkatan setiap tahun mengingat Kota Bandung mengalami keterbatasan sumber air baku. Sehingga sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 belum ada penambahan kapasitas jaringan.

Tabel 2-22
Pemenuhan Air Bersih oleh PDAM

No	Tahun	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Jumlah KK yang tersambung dengan PDAM (KK)
1.	2009	483.457	121.094
2.	2010	564.923	131.094
3.	2011	507.446	141.094
4.	2012	564.928	141.094

Sumber: Bappeda dan PDAM Kota Bandung Tahun 2012

Hanya 25% rumah tangga di Kota Bandung yang mendapat pelayanan air bersih dari PDAM Kota Bandung. Selebihnya sekitar 75% rumah tangga memiliki fasilitas air minum milik sendiri, menggunakan air sumur dangkal dan dalam untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya. Kapasitas produksi dari sumber air baku yang diolah oleh PDAM Tirtawening Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 2-23
Kapasitas Produksi PDAM Tirtawening Kota Bandung

A	Air Permukaan	Kapasitas Terpasang	Debit Produksi
	IPA Badaksinga	1800 l/detik	1.690 l/detik
	IPA Dago Pakar	600 l/detik	552 l/detik
	MP Dago Pakar	40 l/detik	39 l/detik
	MP Cibeureum	40 l/detik	36 l/detik
	MP Cipanjaluh	15 l/detik	17 l/detik
	MP Cirateun	0 l/detik	- l/detik
	JUMLAH	2.500 l/detik	2.335 l/detik
B	AIR TANAH/SUMUR BOR	221 l/detik	98 l/detik
C	MATA AIR	216 l/detik	107,00 l/detik
	T O T A L	2.937 l/detik	2.509 l/detik

Sumber : PDAM Tirtawening

Kendala utama PDAM Kota Bandung dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat diantaranya adalah keterbatasan sumber air baku. Saat ini sumber air baku yang digunakan oleh PDAM Kota Bandung terdiri atas air permukaan dan air tanah yang berlokasi di dalam Wilayah Kota Bandung dan di luar Wilayah Kota Bandung.

Terbatasnya kemampuan PDAM Kota Bandung memenuhi kebutuhan air bersih Kota Bandung, memberikan tekanan yang cukup besar terhadap pengambilan air tanah baik air tanah dangkal maupun air tanah dalam. Hingga bulan Agustus Tahun 2013 tercatat terdapat 887

titik pengambilan air tanah dalam oleh kegiatan/usaha, dengan debit pengambilan air tanah sebesar 1.074.351 m³/bulan, tekanan pengambilan air tanah dalam diperkirakan akan meningkat cepat seiring dengan meningkatkan aktivitas pembangunan perumahan vertikal dan perhotelan serta sarana wisata lainnya di Kota Bandung. Diperkirakan debit pengambilan air tanah dalam lebih dari angka tercatat di atas, dengan masih banyaknya sumur-sumur bor ilegal. Penurunan kuantitas air tanah dipercepat dengan pengambilan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat.

Keterbatasan cakupan layanan PDAM disebabkan karena ketersediaan air baku yang terbatas dapat diantisipasi dengan mengadopsi teknologi pengolahan air sungai dengan filterisasi. Penerapan teknologi pengolahan air sungai yang maju sudah menjadi kebutuhan wajib karena kualitas air sungai di Kota Bandung sebagian besar telah tercemar. Selain itu, diperlukan pembangunan *ground reservoir* umum, terutama di lokasi rawan sumber air bersih.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai di Kota Bandung tahun 2008, sekitar 48 sungai yang ada di Kota Bandung hampir seluruhnya telah tercemar limbah. Adapun komposisi sumber pencemarannya, 70% limbah rumah tangga dan 30% limbah industri seperti tekstil, hotel, restoran, dan rumah sakit. Dari 48 sungai tersebut, 6 di antaranya masuk kategori pencemaran berat. Keenam sungai itu adalah Cikiley, Ciparungpung, Citepus, Cikapundung Kolot, Cikapundung Hilir, dan Cidurian.

Kandungan senyawa organik pada beberapa sungai di Kota Bandung cukup tinggi mulai dari hulu, tengah sampai hilir didasarkan pada nilai parameter BOD dan COD, MBAS, DO dan E. Coli yang terukur di 40 titik pemantauan, yaitu di S. Cikapundung, S. Ciparumpung, S. Cikapundung Kolot, S. Cicadas, S. Citepus, S. Cibuntu, S. Cidurian, S. Cikendal, S. Cipamokolan, S. Cisaranteun, S. Cipanjal, S. Cinambo, dan S. Cihalarang. Demikian juga dengan Kandungan unsur logam yaitu Mangan (Mn), Tembaga (Cu), Pb (timbal), Merkuri (Hg), Chromium (Cr) berada di atas baku mutu.

Sepanjang tahun 2012, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan pengangkatan sedimen sebesar 1.880 meter kubik, pembersihan rumput sebanyak 18.500 meter kubik, dan pengangkutan sampah sebanyak 150 meter kubik di sepanjang Sungai Cikapundung, serta penanaman ribuan pohon. Jumlah personel yang dilibatkan sedikitnya 2.050 orang, yang terdiri dari berbagai unsur seperti TNI, Polri, karyawan Pemerintah Kota Bandung, dan masyarakat umum. Perbaikan kualitas sungai dan sempadannya dapat memunculkan peluang menjadi taman kota dan wisata air, bahkan kegiatan seni, budaya, pendidikan dan ekonomi yang dapat digerakan.



Gambar 2-6
Kondisi di sekitar Sungai Cikapundung
yang digunakan untuk Wisata Air

Terjadinya pencemaran lingkungan berpengaruh terhadap air tanah dangkal. Berdasarkan pemeriksaan Dinas Kesehatan Kota Bandung, setengah dari sumur gali dan sumur pompa di Kota Bandung tidak memenuhi syarat sebagai air bersih. Di daerah pemukiman hampir semua air yang berasal dari sumur gali dan sumur pasak sudah tercemar bakteri coli tinja dengan konsentrasi sudah mencapai 2400 JPT/100 ml, dari analisis sampel yang diambil dari 52 Kelurahan, secara bakteriologi hanya 37% yang memenuhi syarat.

Perkembangan dalam penegakan hukum lingkungan di Kota Bandung dari tahun 2009 hingga 2012 telah mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran hukum terkait lingkungan sudah ditindaklanjuti dan telah diselesaikan oleh Pemerintah Daerah. Sekalipun capaian kinerja penegakan lingkungan hidup telah sesuai

target, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan masih terus terjadi dan berdampak luas terhadap kelangsungan ekosistem baik di tanah mapun di sungai.



Gambar 2-7
Hilir Sungai Cikapundung di Jalan Tamansari (22 Oktober 2012)

2.3.1.9. Pertanahan

Penatagunaan tanah merupakan salah satu urusan yang penting untuk ditangani, terutama dengan terbatasnya ketersediaan tanah di wilayah kota. Penyelesaian izin lokasi di Kota Bandung selama periode 2008-2012 telah mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa seluruh permohonan izin lokasi diselesaikan secara keseluruhan. Dengan adanya lembaga Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) diharapkan proses perizinan di Kota Bandung dapat dilakukan secara optimal. Perkembangan jumlah tanah bersertifikat di Kota Bandung selama periode 2008-2010 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2-24
Jumlah Tanah Bersertifikat di Kota Bandung
periode 2008-2010

No	Tanah Bersertifikat	Satuan	Tahun		
			2008	2009	2010
1.	Jumlah tanah yang bersertipikat	bidang	487.615	503.437	526.254
2.	Hak Milik	bidang	399.018	413.631	428.491
3.	Hak Guna Bangunan	bidang	77.482	79.614	84.339
4.	Hak Guna Usaha	bidang	-	-	-
5.	Hak Pakai	bidang	2.224	2.229	2.325
6.	Girik	bidang	-	-	-

Sumber : BPN Kota Bandung

2.3.1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Dengan jumlah penduduk sebanyak 2,45 juta, maka penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting untuk dapat dikelola secara baik. Tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Bandung pada tahun 2008 baru mencapai 89,9%, kemudian mengalami kenaikan tahun 2010 mencapai 100%. Data terakhir tahun 2012 tingkat kepemilikan KTP mengalami penurunan menjadi 96,75%. Dalam hal penerapan KTP Nasional berbasis NIK, khusus untuk Kota Bandung baru mulai terlaksana tahun 2011.

Sedangkan untuk kepemilikan akta kelahiran di Kota Bandung tahun 2009 telah mencapai 91,62%, namun tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup signifikan hanya menjadi 60%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak bayi yang lahir tanpa disertai akta kelahiran.

Ketersediaan database kependudukan skala Kota Bandung tahun 2008 masih mencapai 75%, kemudian mengalami peningkatan menjadi 95% di tahun 2009. Kota Bandung saat ini telah menerapkan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) yang merupakan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi komunikasi secara *online*.

2.3.1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam konteks ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita pada umumnya dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan. Jika dilihat perkembangannya, partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Bandung cukup mengalami fluktuasi. Jika pada tahun 2008 tingkat partisipasi berada di posisi 40,47%, maka tahun 2009-2010 sudah di atas 50%. Namun periode tahun 2011-2012 mengalami penurunan yang cukup besar menjadi sebesar 43,47%.

Dalam perkembangan kota yang semakin kompleks saat ini, diketahui bahwa sarana bermain anak agar dapat menjadi media tumbuh kembang secara layak masih dirasakan sangat minim. Ini karena lahan yang terbatas dan belum adanya perhatian serius. Di sisi lain, eksploitasi

anak yang ditunjukkan dengan masih banyaknya anak jalanan juga perlu ditangani segera.

Terkait dengan capaian indikator SPM di bidang layanan terpadu perempuan dan anak diketahui bahwa kinerja selama periode 2009-2013 sudah cukup optimal. Ini diindikasikan dengan adanya usaha nyata berupa tindak lanjut penanganan dari pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang disertai dengan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

2.3.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Keluarga merupakan penopang dasar perkembangan individu dalam masyarakat. Semua aspek kehidupan berawal dari keluarga. Unggul dan kuatnya individu dalam masyarakat pada awal selalu ditopang oleh institusi keluarga yang baik. Keluarga yang bahagia dan sejahtera akan membentuk masyarakat Kota Bandung yang saling asih, bergotong dan terdorong untuk maju.

Jika dilihat perkembangannya, cakupan peserta KB aktif di Kota Bandung cenderung mengalami penurunan. Jika tahun 2008, cakupan peserta KB aktif mencapai 79,96%, maka tahun 2012 hanya sebesar 73,01%. Cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penurunan dari cakupan peserta KB aktif ini perlu menjadi salah satu perhatian, terutama terkait dengan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk alami Kota Bandung.

2.3.1.13. Sosial

Ketersediaan sarana sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan merupakan salah satu pelayanan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi hingga tahun 2012 berjumlah 60 buah. Peningkatan sarana sosial di Kota Bandung juga coba ditingkatkan melalui proses pembangunan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di

Rancacili Kecamatan Rancasari, Gedebage Bandung. Puskesmas yang akan dibangun di Kota Bandung ini merupakan puskesmas yang pertama di Jawa Barat bahkan di Indonesia. Melalui pembangunan Puskesmas ini, maka diharapkan dapat memadukan penanganan berbagai aspek sosial serta dapat membantu masyarakat yang termarjinalkan. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Bandung telah membebaskan lahan sekitar 6 hektar, dari kebutuhan 7,1 Ha.



Gambar 2-8
Anak Jalanan dan Pengemis di
Salah Satu Sudut Jalan Kota Bandung

Kota Bandung sebagai kota metropolitan juga tidak terlepas dari masalah kesejahteraan sosial. Banyaknya anak jalanan, gelandangan, pengemis dapat ditemui secara mudah di beberapa ruas jalan di Kota Bandung. Tercatat tahun 2011 sedikitnya terdapat 948 gelandangan, 4.162 pengemis, dan 4.861 anak jalanan.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga kini terus diupayakan dengan berbagai cara, salah satunya pendampingan serta pemberian pekerjaan bagi orang-orang yang bekerja di jalan agar menjadi produktif. Jenis dan jumlah masalah kesejahteraan sosial di Kota Bandung dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 2-25
Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Bandung PadaTahun 2011

No	Jenis Masalah	Satuan	Jumlah
1	Gelandangan	orang	948
2	Pengemis	orang	4.162
3	Wanita Tuna Susila	orang	549
4	Bekas Narapidana	orang	364
5	Anak jalanan	orang	4.861

No	Jenis Masalah	Satuan	Jumlah
6	Anak nakal korban Narkotika	orang	363
7	Penyandang cacat	orang	3.999
8	Fakir miskin	KK	97.586
9	Lanjut usia terlantar	orang	3.254
10	Lansia yang menjadi korban tindak kekerasan	orang	49
11	Keluarga berumah tidak layak huni	KK	7.589
12	Anak terlantar	orang	7.550
13	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau perlakuan salah	orang	42
14	Anak nakal	orang	299
15	Balita terlantar	orang	705
16	Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis	orang	1.806
17	Keluarga bermasalah sosial psikologis	orang	2.967
18	Wanita rawan sosial ekonomi	orang	8.923
19	Wanita yang menjadi korban tindak kekerasan	orang	394
20	Korban akibat bencana alam & musibah lainnya	orang	551
21	Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana	orang	4.149
22	Eksodan	orang	-
23	Komunitas adat terpencil	orang	-
24	Pekerja migran	orang	13
25	Penderita HIV / AIDS	orang	1.268

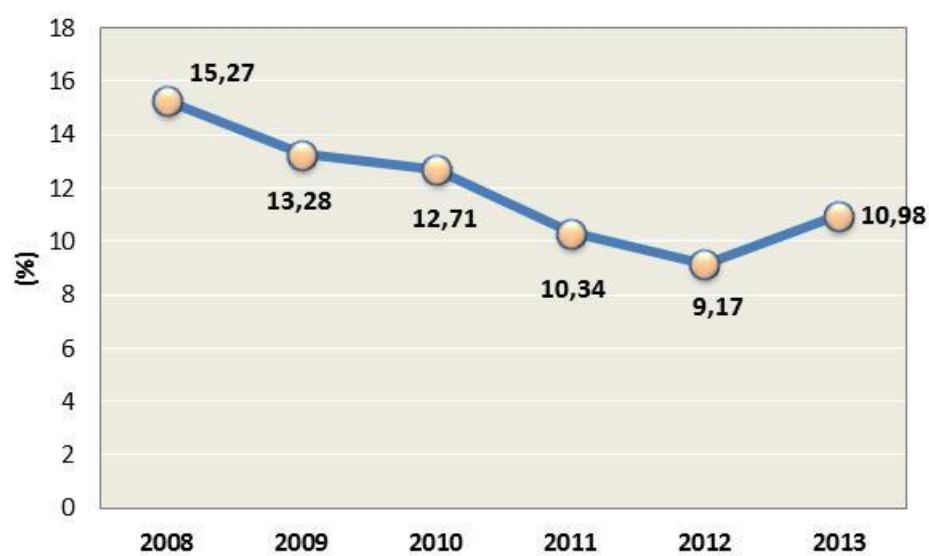
Sumber : BPS, Kota Bandung Dalam Angka, 2012

2.3.1.14. Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan memiliki aspek multidimensi dan lintas sektoral sehingga peranannya menjadi salah satu aspek yang strategis dalam pembangunan daerah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Bandung selama periode 2008-2012 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja Kota Bandung yang terlibat dalam kegiatan produktif. Jika tahun 2008 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 60,06%, maka tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 63,14%.

Tingkat pencari kerja yang ditempatkan di Kota Bandung selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Jika tahun 2008 hanya 11,20% saja pencari kerja yang ditempatkan, maka tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 45,77%. Hal ini menunjukkan fasilitasi dan system penyusunan informasi data penempatan oleh Dinas Tenaga Kerja mengalami perbaikan dan memiliki kontribusi positif pada penurunan angka pengangguran yang ada di Kota Bandung.

Tingkat pengangguran terbuka Kota Bandung dari waktu ke waktu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika tahun 2008 tingkat pengangguran terbuka sebesar 15,27%, tahun 2012 telah berkurang secara signifikan menjadi 9,17%. Meningkatnya aktivitas perekonomian pada beberapa sektor perekonomian Kota Bandung, menjadi faktor pendorong (*driving forces*) dalam penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, terutama pada sektor sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Selain itu, penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan juga masih tinggi.



Grafik 2-25
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung
periode 2008-2012

Walaupun demikian, tingkat pengangguran Kota Bandung hingga tahun 2012 masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat (9,08%) dan tingkat Nasional (6,14%). Tahun 2013 tingkat pengangguran juga mengalami kenaikan menjadi 10,98%. Kondisi ini perlu penanganan yang lebih intensif lagi di masa yang akan datang. Upaya pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan kreativitas bagi para pencari kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja secara kontinyu dan konsisten harus dilakukan dalam upaya peningkatan daya saing tenaga kerja sesuai kompetensinya.

Tahun 2008 perusahaan di Kota Bandung yang telah menerapkan norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) mencapai 82,99%, kemudian tahun 2012 meningkat menjadi 86,32%. Penerapan K3 ini harus terus

didorong lebih lanjut hingga seluruh perusahaan menerapkannya, sebagai salah satu upaya menurunkan tingkat kecelakaan kerja di tempat kerja.

Perselisihan hubungan industrial (PHI) tahun 2008 yang diselesaikan melalui bipartit sebanyak 84,43%, dan tahun 2012 hanya mencapai 67,78%, disebabkan karena bobot permasalahan kasus yang masuk lebih berat dibanding dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi, kalau dilihat dari jumlah kasus yang masuk ada penurunan, dari 123 kasus yang masuk tahun 2008, tahun 2012 hanya 90 kasus. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan secara bipartit antara perusahaan dan pekerja atau melalui mediasi yang dilakukan oleh fungsional mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

2.3.1.15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan UKM sudah terbukti bertahan terhadap gejolak eksternal. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Anggota koperasi yang terdata di Kota Bandung sampai saat ini sekitar 567.000 anggota dengan aset yang dimiliki sekitar Rp 5,9 triliun, serta SHU sekitar Rp. 882 milyar, yang mampu menampung tenaga kerja sekitar 3.207 orang. Jumlah Koperasi tahun 2012 mencapai 2.620 koperasi. Secara umum jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan meskipun jumlahnya relatif kecil, jika tahun 2008 koperasi aktif yang ada di Kota Bandung mencapai 75,93%, maka tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 78,66%.

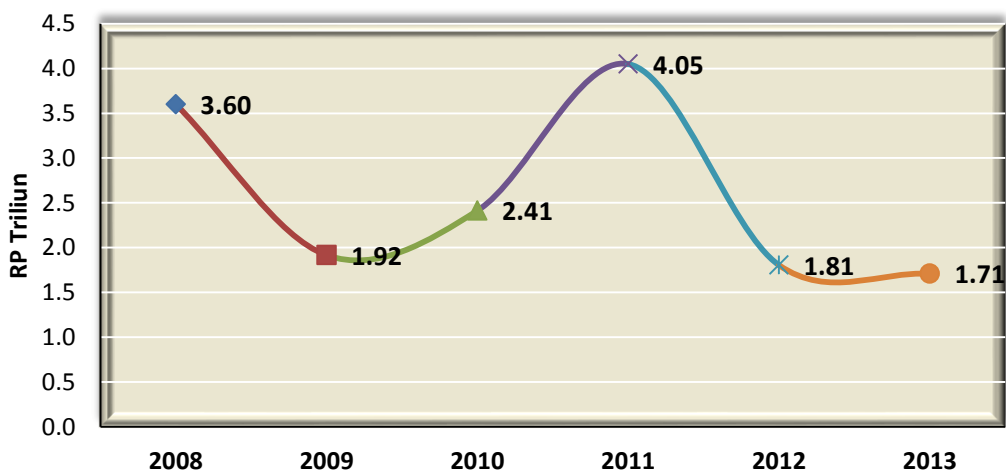
Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung terus tumbuh dari sebanyak 2.800 unit usaha tahun 2008 menjadi 4.581 unit usaha tahun 2013. Dengan melihat manfaat, kontribusi serta sifatnya yang “*easy entrance*” UMKM harus dibantu dan difasilitasi oleh berbagai

stakeholders, seperti pemerintah, perbankan, Lembaga Keuangan Mikro/koperasi, serta pelaku usaha besar sehingga potensi yang besar yang dimiliki UMKM dapat terus dikembangkan.

2.3.1.16. Penanaman Modal

Jumlah nilai investasi lokal (Non-PMDN/PMA) di Kota Bandung tahun 2008 mencapai Rp. 3,601 triliun dan tahun 2009 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 1,916 triliun. Tahun 2010 nilai investasi mengalami kenaikan yang tinggi, seiring membaiknya kondisi ekonomi Nasional dan global, yaitu sebesar Rp. 2,413 triliun. Tahun 2011 nilai investasi mencapai Rp. 4,059 triliun dan tahun 2013 terjadi penurunan, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai kejenuhan dan penurunan pada pelaku investasi di Kota Bandung.

Secara umum, dari tahun 2008 hingga 2012 nilai realisasi PMDN di Kota Bandung mengalami fluktuasi, tahun 2009 realisasi investasi lokal Non PMA/PMDN mengalami penurunan, yaitu mencapai -46,79%. Kenaikan tertinggi nilai realisasi investasi lokal Non PMA/PMDN di Kota Bandung terjadi di tahun 2011, yaitu mencapai 67,84%.



Grafik 2-26
Realisasi Investasi Tahun 2008 s.d 2013

2.3.1.17. Kebudayaan

Kota Bandung sebagai kota seni dan budaya dikenal luas di tingkat Nasional bahkan mancanegara. Sebagai wahana untuk melestarikan seni dan budaya yang ada di masyarakat, Kota Bandung setiap tahunnya

menyelenggarakan festival seni dan budaya bagi warga dan wisatawan serta pemeliharaan benda, situs, dan cagar budaya.

Pagelaran Seni dan Budaya tahun 2013 sebanyak 22 pagelaran yang dilaksanakan oleh Disbudpar. Khusus untuk pagelaran seni budaya di Padepokan Seni Mayang Sunda terlaksana 36 pagelaran. Secara keseluruhan penyelenggaraan pagelaran seni budaya dimaksud, diantaranya: Bandung Festival, Festival Kaulinan Barudak, Festival Pasanggrahan/Hajat Lembur, Pasanggiri Reog dan Calung, Festival Kampung Kreatif, Tayuban-Pendopo, Drama Basa Sunda-Rumentang Siang, Gelar Pencak Silat-LS. Sadaya, Pentas Seni Manglayang, Launching Pasanggrahan, Aneka Seni Paguron Pasir Impun, Pagelaran Drama-CCL, Aneka Tari-Braga Market, Pagelaran Tari-Pendopo, Gelar Tari Jaipong-Padepokan Seni, Fashion Weekend- Plaza Balaikota, Kecapi Suling, dan Karinding *Welcome Dinner Design Action*.

Kota Bandung membutuhkan sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kondisi ini adalah melalui pencaanangan pembangunan kawasan sentra seni budaya kreatif berwawasan lingkungan hidup seluas 10 hektar di Ciporeat, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Cibiru.

Bangunan-bangunan tua khususnya yang berlanggam arsitektur *art deco* merupakan potensi luar biasa yang dimiliki Kota Bandung namun saat ini satu demi satu bangunan tua yang menjadi aset berharga dari kota ini hilang karena rusak dan tak terawat bahkan sebagian diantaranya telah hilang. Hal tersebut disebabkan pemeliharaan aset budaya masih sangat minim yang ditunjukkan masih rendahnya upaya pelestarian benda, situs serta kawasan cagar budaya yang hanya mencapai 15,4% tahun 2011 dan 2012. Pemeliharaan aset budaya merupakan salah satu upaya yang harus segera ditangani. Hal ini penting untuk tetap melestarikan dan memanfaatkan sebagai potensi pariwisata dan daya saing kota.

2.3.1.18. Kepemudaan dan Olah raga

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh pihak Pemerintah Kota Bandung. Perkembangan jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) per satuan penduduk di Kota Bandung dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2-26
Hasil Kinerja Urusan Kebudayaan dan Olahraga
Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2008-2012

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2008	2009	2010	2011	2012
Kepemudaan dan Olahraga						
1	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	0,012%	0,00012%	1,26%	0,0001%	0,01%
2	Lapangan olahraga	0,01%	0,00%	0,06%	0,069%	0,04%

Sumber : LPPD AMJ Kota Bandung

Kebutuhan akan sarana kepemudaan, seperti balai karang taruna hingga saat ini dirasakan masih belum optimal. Oleh karena itu, bantuan dalam penyediaan balai karang taruna masih ditingkatkan. Dalam penyediaan sarana olahraga, diketahui bahwa perkembangan jumlah lapangan olahraga per satuan penduduk di Kota Bandung selama periode 2008-2012 cukup mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2008 lapangan olahraga per satuan penduduk hanya sebesar 0,01%, maka tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 0,04%. Lapangan olah raga per satuan penduduk dalam hal ini ialah jumlah lapangan olahraga di tingkat kota tiap 1000 penduduk.

2.3.1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Penyelenggaraan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, khususnya dalam pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dilakukan melalui 1 kegiatan pembinaan setiap tahunnya. Sedangkan dalam pembinaan politik daerah di Kota Bandung, selama periode 2008-2013 tiap tahunnya terdapat 1 atau 2 kegiatan pembinaan. Kerjasama antara pemeluk agama dalam pembangunan kota yang saat ini telah berjalan, perlu untuk lebih ditingkatkan terutama melalui forum rutin diskusi lintas agama.

2.3.1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ialah melalui penegakan Perda yang telah disusun. Penegakan Perda di Kota Bandung selama ini sudah cukup optimal dilakukan. Selama periode 2010-2013 penegakan Perda sudah mencapai 100%. Besarnya luas wilayah dan objek yang perlu diawasi, kemungkinan masih terdapat pelanggaran perda yang belum terpantau dan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Dalam upaya mengatasi bencana kebakaran, Pemkot Kota Bandung juga mengupayakan beberapa cara, baik upaya preventif ataupun penanganan segera apabila terjadi kebakaran. Kejadian kebakaran di Kota Bandung selama periode 2008-2010 mengalami penurunan. Dari 141 kebakaran tahun 2008 menjadi hanya 101 kebakaran tahun 2010. Namun selama periode 2011-2013 kejadian kebakaran kembali mengalami peningkatan, dimana terakhir tahun 2013 terdapat 131 kali kejadian kebakaran.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Pemerintah Kota Bandung juga berusaha menyediakan sarana prasarana yang memadai. Oleh karena itu, selama periode 2008-2013, Pemerintah Kota Bandung melakukan pengadaan kantor Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 181 kantor.

Dalam pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*e-Government*) telah diaplikasikan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui *Bandung Integrated Resources Management System* (BIRMS) yaitu sistem pengelolaan daerah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang diawali dari Proses Perencanaan Pembangunan Daerah, Pelaksanaan Anggaran dan Pengawasan Anggaran serta Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Di Kota Bandung, ketersediaan indeks kepuasan layanan masyarakat selama periode 2010-2012 selalu ada setiap tahunnya. Hanya tahun 2009 saja yang tidak tersedia indeks kepuasan layanan masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik hingga saat ini masih belum cukup optimal dan perlu peningkatan lebih lanjut.

Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Kota Bandung telah mengupayakan dengan beberapa hal. Salah satunya ialah disusunnya *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kota Bandung. Kota Bandung menjadi salah satu kota yang lebih awal merintis menerapkan *Electronic Procurement* dalam proses pelelangan sejak tahun 2007. Tahun 2011 dalam konteks *e-Government*, dirintis tata kelola perencanaan dan penganggaran kota Bandung telah terintegrasi berbasis IT, atau dikenal sebagai *Bandung Integrated Resources Management System* (BIRMS). Tahun 2007-2008 Kota Bandung juga melakukan restrukturisasi birokrasi melalui penguatan fungsi badan pelayanan perijinan terpadu, juga dilakukan penerapan ISO di seluruh SKPD Kota Bandung secara bertahap, dan tahun 2013 diharapkan seluruhnya akan bersertifikat ISO. Ini semua dilakukan untuk dapat meningkatkan kepuasan layanan kepada masyarakat.

Tata kelola keuangan daerah Kota Bandung masih menyisakan kendala. Hal ini diindikasikan oleh Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang masih ada di level Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2012 (*LHP No. 22.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 Tanggal 24 Mei 2012*). Salah satu kendala Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah terkait pengelolaan aset. Untuk itu diperlukan organisasi yang dapat mengelola aset secara optimal.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kota Bandung masih belum optimal. Alokasi belanja pegawai yang masih cukup tinggi, mengakibatkan manfaat untuk belanja langsung bagi masyarakat masih terbatas.

Tingkat kepuasan publik juga dirasakan belum optimal. Masalah ini diindikasikan masih banyaknya keluhan masyarakat tentang beberapa jenis pelayanan umum. Misalnya saja terkait mahal biaya pendidikan di Kota Bandung. Penyelenggaraan pendidikan di beberapa tempat masih mengikuti mekanisme pasar. Selain itu, masih dijumpai beberapa keluhan, seperti dalam hal pengangkutan sampah, penyediaan air bersih, penyediaan layanan kesehatan, dan pengelolaan jalan kota.

Bertambahnya titik-titik reklame bahkan di kawasan hunian juga menjadi salah satu keluhan yang dirasakan masyarakat banyak.

Selain itu, kendala yang sangat penting untuk segera diatasi adalah meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih dan bebas KKN, serta mencapai pelayanan prima pada masyarakat. Adanya beberapa kasus oknum PNS Kota Bandung yang terlihat dalam kasus korupsi masih mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah belum sepenuhnya bebas dari KKN.

Dalam menjalankan perannya melayani masyarakat, maka Pemerintah Kota harus membuka akses informasi pelayanan, misalnya informasi pada anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, RTRW dan RDTRK, layanan KTP, KK dan surat-surat keterangan lainnya.

Tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menjadi sorotan utama masyarakat Kota Bandung yang berakibat pada hilangnya semangat juang para pengelolanya, hilangnya harapan dan kepercayaan masyarakat kota, hilangnya kepercayaan para pelaku usaha dan investor dan lambatnya roda pembangunan. Dengan adanya kemudahan akses, kemudian diimbangi dengan integritas jajaran pengelola pemerintahan kota, maka dipastikan akan menghasilkan percepatan pembangunan Kota Bandung.

Potensi penguat proses pembangunan kota terdapat pula di masyarakat, maka masyarakat secara terstruktur dan terencana harus dilibatkan dalam proses dan pengawasan pembangunan Kota Bandung, termasuk dalam upaya tindak pencegahan korupsi. Salah satu media komunikasi partisipasi masyarakat adalah layanan interaksi *on-line*. Masukan dan partisipasi masyarakat harus dipastikan masuk dan ditanggapi, serta aduan permasalahan harus sampai dan dicarikan solusinya.

2.3.1.21. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu

wilayah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Pemerintah Kota Bandung telah melakukan berbagai upaya di bidang ketahanan pangan diantaranya telah menyusun (1) *Master Plan* Ketahanan Pangan Kota Bandung, (2) Perwal No. 376 Tahun 2011 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal, (3) Perwal No. 251 Tahun 2011 tentang Juknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan, (4) Kepwal 521/Kep.561/Dispertapa 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung periode tahun 2011-2015, (5) Perwal tentang penerima hibah (Bawaku Pangan) Kota Bandung Tahun 2012, (6) Kepwal tentang Pagu Raskin Kota Bandung (2012) dan (7) Kepwal Tentang Tim Koordinasi Raskin Kota Bandung (2012).

Ketersediaan pangan di Kota Bandung masih tergantung dari daerah di luar Kota Bandung (96,61%), hanya 3,39% berasal dari produksi sendiri. Untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Bandung, sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Kota telah membebaskan 32,8 Ha lahan sebagai lahan sawah abadi dari target yang dicanangkan sekitar 100 Ha. Selain sebagai salah satu upaya ketahanan pangan, sawah abadi juga diperuntukan bagi perluasan ruang terbuka hijau.

Penyediaan pangan di Kota Bandung hingga saat ini masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya: (i) keterbatasan lahan, (ii) anomali iklim dan (iii) bencana banjir.

Dalam upaya penyediaan pangan secara mandiri dan keberlanjutan, diperlukan adanya terobosan program melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami tanaman produktif (*Urban Farming* atau Kawasan Rumah Pangan Lestari), intensifikasi lahan, menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Selain itu juga yang harus menjadi perhatian adalah mengenai pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan terpenuhinya cadangan pangan di kota Bandung.

2.3.1.22. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Lembaga yang memiliki peran didalam pemberdayaan masyarakat adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Rukun Warga (RW); yang dikenal sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).

LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat pelestarian dan pengembangan, hasil-hasil pembangunan secara partisipatif,
- e. penumbuhkembang dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat;
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

2.3.1.23. Statistik

Buku Kota Bandung Dalam Angka selama periode 2008-2013 selalu tersedianya setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kota Bandung dan dapat digunakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kota Bandung selama periode 2008-2013 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kota Bandung.

2.3.1.24. Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Perkembangan penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kota Bandung tahun 2012 sudah mencapai 38,45%.

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengelola kearsipan yang handal dan profesional perlu ditingkatkan agar arsip dapat dijamin keselamatannya, baik secara fisik ataupun informasinya. Selama periode 2008-2013 terdapat 2 (dua) kegiatan dalam peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kota Bandung.

2.3.1.25. Komunikasi dan Informatika

Penerapan teknologi informasi melalui media *online* dalam hal ini *website* telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik Pemerintah Daerah Kota Bandung telah tersedia selama ini, yaitu <http://www.bandung.go.id>, yang memuat ragam informasi terkait Kota Bandung dapat secara mudah diakses oleh siapapun.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan Kota Bandung menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terbukanya akses informasi

pelayanan kepada masyarakat baik mengenai anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, RTRW dan RDTRK, layanan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan lainnya menjadi sebuah keharusan. Adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan integritas jajaran pengelola Pemkot diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan Kota Bandung dan meningkatnya kepercayaan publik kepada birokrasi.

Kebutuhan akan kemudahan akses internet bagi masyarakat luas di Kota Bandung sudah dirasa cukup besar. Dalam mewujudkan Kota Bandung sebagai *Cyber City*, hal ini telah dimulai pembangunan jaringan internet yang akan menjangkau seluruh wilayah Kota Bandung. Fasilitas hotspot (wi-fi) gratis direncanakan menjangkau 1.561 Rukun Warga (RW) dan 9.691 Rukun Tetangga (RT). Program yang diberi nama RW-Net tersebut diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung bekerjasama dengan PT. Telkom.

Kegiatan promosi melalui pameran/expo merupakan media yang cukup efektif dalam memperkenalkan produk/jasa tertentu. Perkembangan pelaksanaan pameran/expo yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selama periode 2010-2012 dilakukan minimal 1 (satu) kali, sedangkan tahun 2013 tidak dilaksanakan pameran/ekspo.

2.3.1.26. Perpustakaan

Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun di Kota Bandung dibandingkan dengan jumlah orang yang harus dilayani masih relatif minim. Tahun 2008 hanya terdapat 0,47% pengunjung perpustakaan dan tahun 2012 baru mencapai 0,20%.

Hingga saat ini, peran perpustakaan dirasa masih kurang dalam rangka menarik minat baca masyarakat agar mau membaca diperpustakaan. Selain itu, ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai dan letak perpustakaan yang masih relatif jauh dengan tempat tinggal masyarakat juga menjadi salah satu penyebab minimnya pengunjung

perpustakaan. Di sisi lain, makin mudahnya akses internet juga menjadi salah satu penyebab makin minimnya pengunjung perpustakaan.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Fokus layanan urusan pilihan Pemerintah Daerah Kota Bandung sepanjang tahun 2008 hingga 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-27
Hasil Kinerja Fokus Layanan Urusan Pilihan
Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2008-2013

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian						
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	NA	NA	NA	6,1 Ton/Ha	6,202 Ton/Ha	6,295 Ton/Ha
2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	0,34 %	0,24%	NA	0,19%	0,20%	N/A
2	Pariwisata						
1	Kunjungan wisata (orang)	2.746.076	3.096.869	3.928.157	4.076.072	3.513.705	3.726.447
3	Kelautan dan Perikanan						
1	Produksi perikanan	111,19%	208,09%	111,19%	109%	103,91%	103,00%
2	Konsumsi ikan	100,64%	105,84%	100,64%	100%	102,64%	107,53%
4	Perdagangan						
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	37,59%	40,98%	41,76%	40,64%	41,02%	NA
2	Ekspor Bersih Perdagangan (\$ juta)	695,4	512,2	625,3	653,6	669,2	601,5
3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha non formal (unit usaha)	64.231	N/A	N/A	N/A	71.204	71.744
5	Perindustrian						
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	28,14 %	24,49 %	23,30 %	24,70%	22,72%	NA
2	Pertumbuhan Industri	22,18 %	10,67 %	2,09%	2,13%	0,72 %	48,93% (1.321)
6	Ketransmigrasian						
1	Tingkat Kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Lokasi Transmigrasi	33,30%	40%	40%	66,6%	50%	33,33%
2	Jumlah Penempatan Transmigran	10 KK	25 KK	18 KK	10 KK		

2.3.2.1. Pertanian

Walaupun Kota Bandung bukan merupakan daerah pertanian, namun masih terdapat beberapa kawasan yang memiliki lahan pertanian yang cukup dominan. Di bagian Timur masih merupakan daerah pertanian dan beberapa kawasan memiliki lahan pertanian yang cukup luas.

Produktivitas padi Kota Bandung tahun 2011 mencapai 61,07kw/ha dan mengalami kenaikan menjadi 62,95kw/ha sampai dengan tahun 2013. Produktivitas Palawija tahun 2011 sebanyak 70,94 kw/ha dan mengalami peningkatan menjadi 72,20 kw/ha sampai dengan tahun 2013. Produktivitas hortikultura tahun 2011 mencapai sebanyak 112,07 kw/ha dan mengalami kenaikan menjadi 116,40 kw/ha sampai dengan tahun 2013. Produktivitas tanaman hias tahun 2011 sebanyak 145.000 pot/tahun dan mengalami kenaikan menjadi sebanyak 185.000 pot/tahun sampai dengan tahun 2013.

Produktivitas peternakan sapi dan domba direncanakan peningkatan populasinya di Kota Bandung, untuk sapi, dari target sebanyak 431 ekor tahun 2013 terealisasi sebanyak 1.307 ekor dan populasi domba, dari target 23.507 ekor tahun 2013 terealisasi 26.901 ekor.

Kontribusi sektor pertanian di Kota Bandung terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Jika tahun 2008 kontribusi sektor pertanian mencapai 0,34% dari total PDRB, maka tahun 2012 kontribusinya hanya mencapai 0,20%. Penurunan kontribusi sektor pertanian ini salah satunya diakibatkan semakin minimnya lahan pertanian di Kota Bandung. Konversi lahan pertanian menjadi lahan untuk niaga, industri dan perumahan semakin tahun semakin meningkat.

2.3.2.2. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Kota Bandung dan menyumbangkan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian Kota Bandung. Pengembangan sektor pariwisata dapat diarahkan menjadi *Bandung MICE City*. Selain itu, terobosan dalam ketersediaan sarana prasarana pendukung pariwisata menjadi salah satu perhatian penting untuk meningkatkan kunjungan wisata, diantaranya dapat melalui bus/tram wisata, sepeda wisata serta pengadaan festival dan destinasi wisata baru, agar Kota Bandung tetap atraktif dan didukung dengan media promosi yang efektif.

Kota Bandung merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Provinsi Jawa Barat, Nasional, bahkan Internasional. Perkembangan pariwisata Kota Bandung ditopang oleh ketersediaan dan variasi produk wisata perkotaan dalam bentuk berbagai fitur kota, baik elemen primer maupun sekunder seperti: pengetahuan, sejarah, budaya, *heritage*, kuliner, belanja dan lain-lain.

Saat ini Kota Bandung didominasi oleh kegiatan wisata belanja, khususnya dengan perkembangan *factory outlet* yang marak. Sejalan dengan fungsi Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat dan kota jasa, produk pariwisata MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*), serta wisata berbasis pendidikan (*knowledge-based tourism*) juga menjadi unggulan utama kawasan wisata ini. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung selama periode 2008-2011 meningkat tajam. Lonjakan terbesar ada di periode 2009-2010. Jika tahun 2009 jumlah wisatawan yang tercatat sebanyak 3.096.869 wisatawan, tahun 2010 meningkat menjadi 3.928.157 atau tumbuh sebesar 26,8%. Kenaikan jumlah wisatawan juga terjadi tahun 2011, namun mengalami penurunan tahun 2012 menjadi sebanyak 3.513.705 wisatawan. Sedangkan tahun 2013 jumlah wisatawan sebesar 3.726.447 wisatawan, atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Walaupun Kota Bandung sudah menjadi destinasi wisata unggulan, namun terdapat beberapa permasalahan yang dirasakan mengganggu bagi wisatawan sehingga mengurangi kepuasan kunjungan di Kota Bandung, diantaranya kemacetan, ketertiban pengendara kendaraan bermotor, pedagang kaki lima, kebersihan, kondisi jalan yang berlubang dan pengemis.

2.3.2.3. Kelautan dan Perikanan

Jumlah produksi perikanan tahun 2009, mencapai 208,09% atau lebih dari dua kali lipat dari yang ditargetkan. Tahun 2013 produksi perikanan mencapai 103,00% dari target yang telah ditetapkan. Tingkat konsumsi ikan di Kota Bandung juga setiap tahunnya melebihi dari target yang telah ditetapkan. Tahun 2013 tingkat konsumsi ikan di Kota Bandung mencapai 107,53%.

2.3.2.4. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor unggulan Kota Bandung dan terus menunjukkan trend perkembangan yang pesat. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Bandung. Jika tahun 2008 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mencapai 37,59%, tahun 2012 kontribusinya meningkat menjadi 41,02%.

Ekspor bersih perdagangan Kota Bandung pada tahun 2008 mencapai \$ 695,4 juta dan tahun 2009 mengalami penurunan menjadi sebesar \$512,2 juta. Akan tetapi, tahun 2010 hingga 2012, ekspor bersih perdagangan Kota Bandung mengalami kenaikan setiap tahunnya dan pada tahun 2013 mencapai US\$ 601.533.755,00 atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal selama periode 2008-2012 mengalami peningkatan. Jika tahun 2008 cakupannya baru mencapai 64.231 unit usaha, data terakhir tahun 2013 cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal telah mencapai 71.744 unit usaha.

Perkembangan kelompok pedagang/usaha informal (PKL) di Kota Bandung hingga saat ini menjadi polemik tersendiri. Di satu sisi, aktivitas para PKL yang umumnya menggunakan sejumlah area fasilitas umum, sering mengganggu kepentingan umum dan menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas. Namun di sisi lain, PKL juga adalah para pelaku UKM yang perlu diberdayakan. Kebutuhan fasilitasi, penataan dan pembinaan PKL menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, diharapkan keberadaan PKL dapat disinergikan dan diharmoniskan dengan pengembangan kota. Berdasarkan data Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan, jumlah PKL di mencapai 20.326 PKL yang tersebar di 30 Kecamatan.



Gambar 2-9
Kondisi PKL di Kawasan Zona Merah Alun-alun Kota Bandung

Sektor perdagangan Kota Bandung juga di topang oleh keberadaan pasar tradisional. Saat ini, pasar tradisional terdesak oleh hypermarket, supermarket dan toserba pada skala retail. Menjamurnya pasar modern tersebut telah menyebabkan omzet pedagang tradisional menurun. Kerugian yang terus menerus dapat menyebabkan ribuan pedagang gulung tikar. Sebagian upaya untuk memperbaiki infrastruktur pasar tradisional yang ada justru berujung pada biaya sewa lapak yang tidak terjangkau. Akhirnya sebagian pedagang terpaksa gulung tikar dan sisanya beralih menjadi PKL. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pasar dengan konsep baru, yaitu pembangunan pasar modern tematik, namun sekaligus tradisional. Dengan konsep ini diharapkan eksistensi pasar dapat lebih meningkat dan bisa menyaingi toko penjualan modern. Keberadaan pasar tradisional perlu juga direvitalisasi agar menjadi sarana ekonomi warga yang nyaman, bersih dan tidak mengganggu lalu lintas. Penataan berbagai jenis usaha ritel kecil-menengah-besar harus mampu menjadi sumber ekonomi masyarakat, namun di sisi lain keberadaannya jangan sampai kontraproduktif dengan kehidupan dan kenyamanan warga masyarakat.

2.3.2.5. Perindustrian

Perkembangan kontribusi sektor industri Kota Bandung cenderung mengalami penurunan selama periode 2008-2012. Jika tahun 2008 sektor industri bisa memberikan kontribusi sebesar 28,14% terhadap perekonomian Kota Bandung, maka tahun 2012 kontribusi turun

menjadi sebesar 22,72%. Relatif lebih tingginya pertumbuhan sektor (i) konstruksi/bangunan, (ii) perdagangan, hotel, dan restoran, serta (iii) perhubungan dan komunikasi mengakibatkan kontribusi sektor industri mengalami penurunan.

Selain itu, dengan semakin tingginya tingkat persaingan sektor industri pengolahan, baik secara Nasional ataupun global, juga mempengaruhi kinerja industri pengolahan lokal Kota Bandung, khususnya yang berorientasi ekspor. Adanya penandatanganan kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) juga memberikan tekanan pada tingkat daya saing industri lokal. Makin meningkatnya serbuan produk-produk yang berasal dari China memberikan tekanan yang cukup signifikan atas kinerja industri pengolahan Kota Bandung.

Pertumbuhan industri Kota Bandung mengalami trend penurunan yang cukup signifikan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, semakin tingginya tingkat persaingan di sektor industri dan makin terbukanya pasar secara global/regional mengakibatkan pertumbuhan industri Kota Bandung mengalami trend penurunan. Jika tahun 2008 pertumbuhan industri mencapai 22,18%, maka tahun 2012 pertumbuhannya turun secara signifikan menjadi hanya sebesar 0,72%. Akan tetapi, tahun 2013 meningkat sangat signifikan menjadi sebesar 48,31%.

Perkembangan industri yang positif ditunjukkan oleh perkembangan industri kreatif, dengan dukungan sumber daya manusia dan keberagaman budaya lokal, ke depan industri ini diprediksi akan semakin berkembang. Kota Bandung memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi kota kreatif. Setidaknya, terdapat 15 sektor industri kreatif yang secara umum marak di Kota Bandung dan sekitarnya.

Tabel 2-28
Jenis Industri Kreatif di Kota Bandung

Jenis Industri Kreatif	
1. Periklanan	9. Musik
2. Arsitektur	10. Seni Pertunjukan
3. Benda Seni	11. Penerbitan dan Percetakan
4. Kerajinan	12. Layanan Komputer dan Piranti Lunak

Jenis Industri Kreatif	
5. Desain	13. Televisi dan Radio
6. Fesyen	14. Riset dan Pengembangan
7. Video, Film& Fotografi	15. Kuliner
8. Permainan Interaktif	

Dari 15 jenis jenis industri kreatif tersebut, yang paling menonjol di Kota Bandung adalah (i) desain, (ii) kerajinan tangan/kriya, (iii) arsitektur, (iv) musik, (v) seni pertunjukan, dan (vi) riset dan perkembangan.

Dengan potensi tersebut Kota Bandung paling siap untuk menjadi kota percontohan berbasis industri kreatif di Indonesia dengan sebutan **Bandung Creative City**. Tahun 2008, *British Council* pernah menetapkan Kota Bandung sebagai proyek percontohan dalam pengembangan industri kreatif di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Perekonomian Kota Bandung secara signifikan berkontribusi oleh sektor ekonomi kreatif beserta sektor-sektor pendukung lainnya. Tahun 2007 kontribusi sektor kreatif terhadap PDRB sudah mencapai 14,46%, serta diprediksi akan terus meningkat dan menjadi salah satu lokomotif kemajuan ekonomi Kota Bandung.

2.3.2.6. Ketransmigrasian

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran. Jumlah penempatan transmigrasi menjadi indikator hasil kinerja urusan.

Tingkat kesepakatan dengan pemerintah daerah lokasi transmigrasi, selain lokasi sudah ditentukan oleh Pusat, namun tergantung juga pada kemampuan negosiasi pada saat penjajagan lokasi transmigrasi dilakukan, apabila terjadi kesepakatan antara pemerintah Kota Bandung dan pemerintah daerah lokasi transmigrasi maka dilakukan penandatangan MoU kesepakatan bersama. Penempatan transmigrasi setiap tahun terjadi peningkatan dari tahun 2008 sejumlah 10 Kepala Keluarga, tahun 2012 menjadi 20 Kepala Keluarga. Tingkat kesepakatan dengan pemerintah daerah lokasi transmigrasi tahun 2013 sebesar 33,33% (1 kesepakatan dengan pemda lokasi transmigrasi/3 lokasi

penjajagan lokasi transmigrasi). Tahun 2013 transmigran yang diberangkatkan sebanyak 3 KK atau 10 jiwa ke Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan dan memperbanyak koordinasi dengan daerah penempatan transmigrasi.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Komponen tertinggi penyumbang PDRB menurut penggunaan tahun 2010 adalah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sekitar 60,64% terhadap total PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa ditinjau dari sisi pengeluaran, perekonomian Kota Bandung sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga. Tahun 2010 pengeluaran konsumsi rumah tangga (atas dasar harga berlaku) di Kota Bandung mencapai Rp. 49.723,87 milyar yang meningkat sekitar 15,27% dari tahun sebelumnya.

Tabel 2-29
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Bandung Periode 2007-2010 (Rp Milyar)

Kelompok Pengeluaran	Tahun			
	2007	2008	2009	2010
Konsumsi Rumah Tangga	31.490,62	37.168,63	43.136,26	49.723,87
• Makanan	13.163,17	15.600,57	18.081,11	20.813,14
• Non Makanan	18.327,45	21.568,05	25.055,14	28.910,73
Produk Domestik Regional Bruto	50.552,18	60.444,49	70.281,16	82.002,18

Sumber : BPS Kota Bandung, PDRB Menurut Penggunaan Kota Bandung Tahun 2007-2010

Secara total pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian di Kota Bandung.

B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan

Sejak tahun 2007 konsumsi non-makanan memiliki proporsi yang lebih besar daripada konsumsi makanan. Tahun 2007 konsumsi makanan mencapai Rp. 13.163,17 milyar dan meningkat menjadi Rp. 20.813,14

milyar tahun 2010 (atas dasar harga berlaku). Adapun konsumsi non-makanan mencapai Rp. 18.327,45 milyar tahun 2007 dan meningkat menjadi Rp. 28.910,73 milyar tahun 2010 (atas dasar harga berlaku). Kontribusi Pengeluaran Makanan (atas dasar harga berlaku) berada di kisaran 58%, sedangkan sisanya sebanyak 42% dialokasikan untuk pengeluaran non makanan.

Tabel 2-30
Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non-Makanan terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Bandung Periode 2007-2010

Kelompok Pengeluaran	Tahun			
	2007	2008	2009	2010
Atas Dasar Harga Berlaku				
- Makanan	41,8%	42,0%	41,9%	41,9%
- Non Makanan	58,2%	58,0%	58,1%	58,1%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Atas Dasar Harga Konstan				
- Makanan	44,2%	43,3%	42,6%	41,9%
- Non Makanan	55,8%	56,7%	57,4%	58,1%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Sumber : BPS Kota Bandung, PDRB Menurut Penggunaan Kota Bandung Tahun 2007-2010 (diolah)

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

A. Luas Wilayah terkena banjir

Berkaitan dengan penanganan lokasi banjir dan genangan air, tahun 2013 di Kota Bandung masih terdapat 48 lokasi banjir yang belum teratasi. Menurut Otto Soemarwoto (2002), koefisien air larian di Kota Bandung tahun 1960-an kira-kira 40% dan Bandung Utara 25%. Sekarang di daerah kota diperkirakan 75% dan di Kawasan Bandung Utara 60%. Tingginya air larian menyebabkan menurunnya air yang meresap ke dalam tanah, sehingga di musim kemarau mengalami kekeringan dan di musim hujan menimbulkan banjir. Luas area yang terkena banjir di Kota Bandung di setiap tempat bervariasi antara 0,5 Ha sampai 25 Ha. Total Luas lahan terkena banjir tahun 2013 mencapai 24 Ha dengan frekuensi/lama genangan antara 6-18 hari pertahun. Rusaknya fungsi resapan di Kota Bandung dan daerah sekitarnya, khususnya di wilayah Kawasan Bandung Utara dapat terlihat dari indikasi tingginya selisih debit maksimum dengan debit minimum sungai-sungai yang ada atau melintas Kota Bandung.

Topografi Kota Bandung, serta perkembangannya secara horizontal dan vertikal sangat membutuhkan perencanaan dan penerapan teknologi drainase yang baik. Dalam membangun dan merevitalisasi drainase kota, akan banyak implikasi kebaikan yang akan diperoleh. Banjir cileuncang yang merugikan masyarakat dapat direduksi bahkan bisa diarahkan menjadi asupan bagi air tanah dengan teknik biopori dan sumur resapan.

B. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Di Kota Bandung terdapat 472 Restoran dan 14 Bar yang tersebar di beberapa kawasan dengan beragam variasi masakan dan minuman. Keberagaman kuliner yang dimiliki Kota Bandung merupakan salah satu potensi terbesar untuk menarik wisatawan serta daya tarik dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia.

C. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Terdapat 89 hotel berbintang dan 190 hotel Melati di Kota Bandung, ditambah dengan ratusan penginapan/losmen/Guest House yang tersebar di Kota Bandung mendorong datangnya berbagai kelas turis domestik maupun asing dapat menyesuaikan kebutuhan akomodasi mereka dengan dana yang mereka miliki.

D. Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

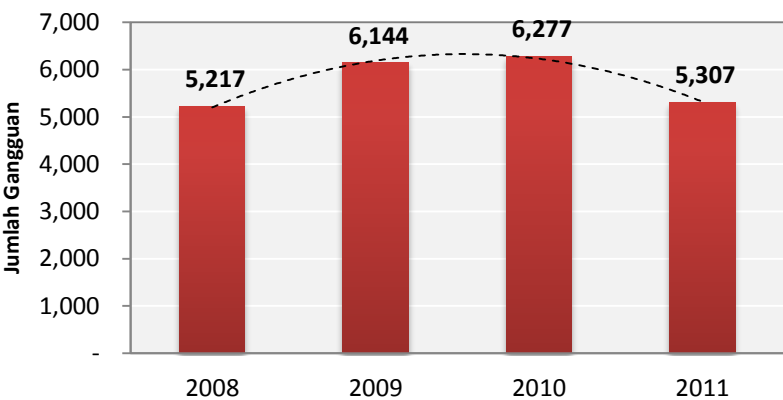
Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, dari 639.366 rumah tangga di Kota Bandung, sebanyak 637.882 rumah tangga/99,41% telah menggunakan listrik PLN. Sementara sisanya 1.484 rumah tangga/0,23% menggunakan listrik non-PLN ataupun tidak/bukan menggunakan listrik sama sekali untuk penerangan tempat tinggal mereka.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

A. Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan

stabilitas daerah. Iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada.



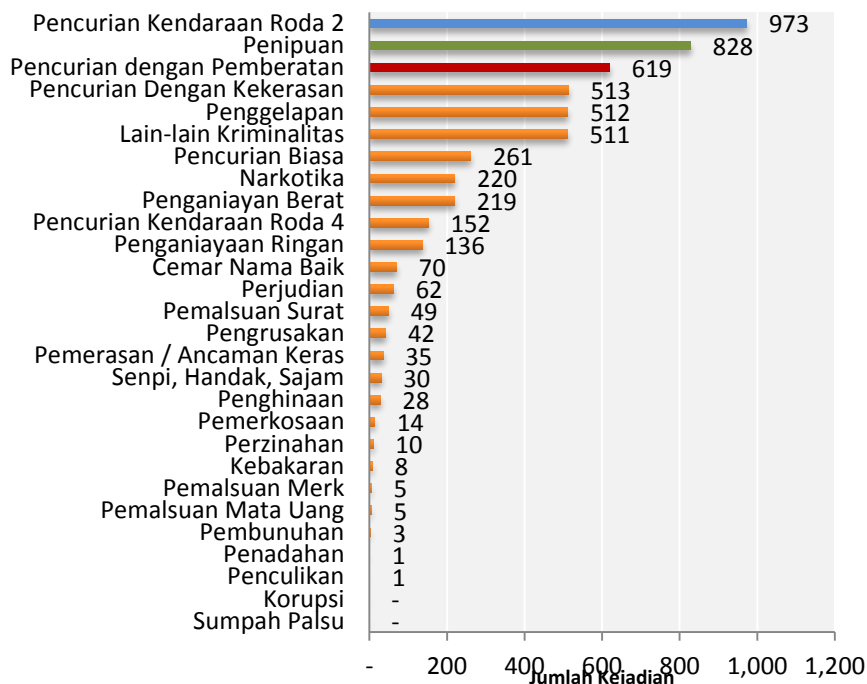
Sumber : BPS Kota Bandung (Polwiltabes Bandung)

Grafik 2-27
Perkembangan Gangguan Umum Kamtibmas di Kota Bandung
Tahun 2008-2011

Seperti halnya kota-kota besar lain di Indonesia, Kota Bandung mempunyai angka kriminalitas relatif masih tinggi. Jumlah gangguan kamtibmas di Kota Bandung selama tahun 2008-2010 cukup tinggi, kemudian mengalami penurunan tahun 2011. Jika tahun 2010 jumlah gangguan kamtibmas mencapai 6.277 kejadian, maka tahun 2011 berkurang menjadi 5.307 kejadian.

Pencurian kendaraan roda 2 merupakan jenis kriminalitas yang paling tinggi terjadi di Kota Bandung. Tahun 2011, pencurian kendaraan roda 2 mencapai 973 kejadian. Penipuan juga banyak terjadi antara lain tercatat 828 kejadian penipuan terjadi tahun 2011. Pencurian dengan kekerasan juga termasuk jenis kriminalitas yang terjadi di Kota Bandung. Salah satu sebab tingginya kriminalitas adalah cukup tingginya tingkat pengangguran di Kota Bandung.

Respon warga terhadap kriminalitas ini diantisipasi dengan penjagaan keamanan mandiri secara spontan dalam bentuk penutupan akses ke kawasan permukiman (terutama dari golongan mampu) yang sekaligus menimbulkan kesan eksklusivisme; selain kegiatan simkamling sebagai wujud penjagaan keamanan komunitas.



Grafik 2-28
Banyaknya Gangguan Umum Kamtibmas Menurut Jenis Kejadian
di Kota Bandung Tahun 2011

B. Lama Proses Perijinan

Proses perijinan usaha telah menjadi isu utama dalam peningkatan iklim investasi di Indonesia secara umum. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha terkait perzinan, Pemerintah Kota Bandung telah mengambil suatu kebijakan membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1171 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) telah diatur standar waktu pelayanan perijinan yang dikelola oleh BPPT yang ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2-31
Standar Waktu Pelayanan Perizinan

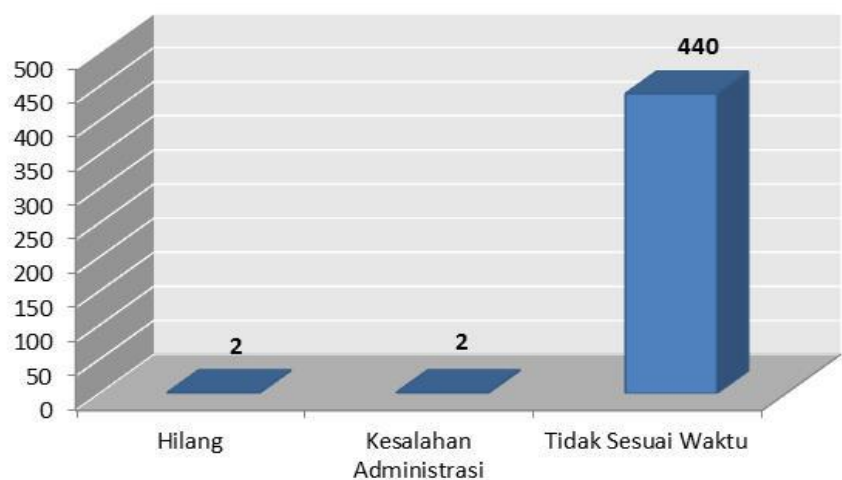
No.	Jenis Izin	Standar Waktu
1	Izin Gangguan (IG/HO)	12 Hari Kerja
2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	10 Hari Kerja
3	Tanda Daftar Gudang (TDG)	10 Hari Kerja
4	Tanda Daftar Industri (TDI)	10 Hari Kerja
5	Izin Usaha Perdagangan (IUP/SIUP)	10 Hari Kerja
6	Izin Usaha Industri (IUI)	10 Hari Kerja
7	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	12 Hari Kerja

No.	Jenis Izin	Standar Waktu
8	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	14-55 Hari Kerja
9	Izin Lokasi	14 Hari Kerja
10	Izin Penggalian Ruang Milik Jalan (RUMIJA)	10 Hari Kerja
11	Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan	12 Hari Kerja
12	Izin Penggunaan Trotoar dan Saluran	10 Hari Kerja
13	Izin Pematangan Lahan/Tanah	10 Hari Kerja
14	Izin Pembuatan Jalan Masuk di Dalam Kompleks Perumahan, Pertokoan dan yang sejenisnya	12 Hari Kerja
15	Izin Pemanfaatan Titik Tiang Pancang Reklame, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Sejenisnya	15 Hari Kerja
16	Izin Penyelenggaraan Reklame	12 Hari Kerja
17	Izin Trayek	12 Hari Kerja
18	Izin Pengelolaan Tempat Parkir (IPTP)	12 Hari Kerja
19	Izin Usaha Angkutan (IUA)	12 Hari Kerja
20	Izin Jasa Titipan Barang	12 Hari Kerja
21	Izin Pembuangan Air limbah ke Sungai	10 Hari Kerja
22	Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah	14 Hari Kerja
23	Izin Pengambilan Air Permukaan	10 Hari Kerja
24	Izin Pelaksanaan Konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai/saluran	10 Hari Kerja
25	Izin Pemanfaatan Bekas Sungai	10 Hari Kerja
26	Izin Konstruksi pada ruang Sungai	10 Hari Kerja
27	Izin Pemanfaatan bantaran dan sempadan Sungai	10 Hari Kerja

Sumber: Peraturan Walikota Bandung Nomor 1171 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP)

Dari 27 (dua puluh tujuh) jenis ijin yang dikelola oleh BPPT, ijin yang secara langsung terkait dengan iklim investasi adalah Ijin Gangguan (IG/HO), Ijin Usaha Perdagangan (IUP/SIUP) serta Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang seluruhnya menjadi kewenangan BPPT.

Hingga kini kinerja pelayanan, terutama terkait lama proses perizinan masih membutuhkan perbaikan lebih lanjut. Hal ini terlihat dengan banyaknya jumlah keluhan yang menyebut bahwa pelayanan yang ada tidak tepat waktu. Tahun 2012, terdapat 440 keluhan mengenai ketidaktepatan waktu proses perizinan, namun demikian kinerja pelayanan perijinan terpadu satu pintu senantiasa diperbaiki secara berkelanjutan melalui penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terutama yang terkait perijinan usaha.



Sumber : BPPT Kota Bandung (Evaluasi Kinerja BPPT Tahun 2012)

Grafik 2-29
Jenis dan Jumlah Pengaduan Tahun 2012

C. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Jenis Pajak Daerah yang direncanakan menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung meliputi: (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Parkir; (7) Pajak Bea Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan (8) Pajak Air Bawah Tanah dan (9) Pajak Bumi dan Bangunan. Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2013 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.194.102.447.016,00 (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-32
Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2013 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2012
1	Pajak Hotel	177.490.303.830,00
2	Pajak Restoran dan Rumah Makan	118.700.322.856,00
3	Pajak Hiburan	37.767.188.531,00
4	Pajak Reklame	17.603.910.300,00
5	Pajak Penerangan Jalan	135.297.036.036,00
6	Pajak Parkir	7.796.908.376,00
7	BPHTB	415.761.410.854,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	280.119.269.023,00
9	Pajak Air Bawah Tanah	3.566.097.210,00
	Jumlah	1.194.102.447.016,00

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2013

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan komponen terbesar dalam pendapatan pajak daerah Kota Bandung.

BPHTB yang semula merupakan Pajak Pusat, telah beralih menjadi Pajak Daerah sejak 1 Januari 2011 sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga menjadi salah satu komponen potensial pendapatan daerah. Pengalihan BPHTB ke dalam kas daerah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi Pemerintah Kota untuk membiayai pembangunan daerahnya. Begitu juga halnya dengan Pajak Air Bawah Tanah yang semula merupakan Pajak Provinsi telah beralih menjadi Pajak Daerah sejak Februari 2011.

Jenis Retribusi Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung meliputi: (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; (3) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil; (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (7) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (8) Retribusi Terminal; (9) Retribusi Rumah Potong Hewan; (10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; (11) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (12) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian; (13) Retribusi Ijin Trayek. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2012 dapat direalisasikan sebesar Rp. 78.072.725.073,00 (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Adapun perincian pendapatan dari Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-33
Perincian Pendapatan Retribusi Daerah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2012	
		Realisasi Pendapatan	SKPD
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	15.653.104.900,00	Dinkes, RSUD, RSKGM, RSKIA, DistanKP
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	786.500,00	Diskamtam
3	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	11.750.000,00	Disdukcapil
4	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	3.222.669.500,00	Diskamtam
5	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.903.047.000,00	Dishub & UPP
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.406.274.500,00	Dishub, UPP
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	409.772.300,00	Dinas PP Kebakaran
8	Retribusi Bidang Perhubungan	1.863.859.000,00	Dishub & UPP
9	Retribusi Rumah Potong Hewan	833.214.750,00	Distan KP
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	58.590.000,00	Diskamtam
11	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	48.582.056.268,00	BPPT

No	Uraian	Tahun Anggaran 2012	
		Realisasi Pendapatan	SKPD
12	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	1.105.125.355,00	BPPT
13	Retribusi Izin Trayek	22.475.000,00	Dishub, BPPT
	Jumlah	78.072.725.073,00	

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2013

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

A. Rasio lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM yang ada. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2008-2012 cukup berfluktuasi. Tahun 2012 rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Bandung mencapai 755,63. Artinya, terdapat 756 orang lulusan S1/S2/S3 dari 10.000 penduduk Kota Bandung.

Tabel 2-34
Rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Bandung Periode 2008-2012

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012*
D4/S1	164.499	143.572	157.859	179.344	172.649
S2/S3	13.263	15.258	13.091	12.099	12.897
Jumlah Penduduk	2.374.198	2.369.054	2.394.873	2.424.957	2.455.517
Rasio lulusan S1/S2/S3	748,72	670,44	713,82	789,47	755,63

Ket : * Angka sangat sementara
 Sumber : BPS Kota Bandung & LKPJ AMJ Kota Bandung (diolah)

B. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan Kota Bandung tahun 2008 relatif meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2007. Jika tahun 2007 rasio ketergantungan hanya sebesar 38,78%, maka tahun 2008 meningkat menjadi 41,98%. Sampai dengan tahun 2011, rasio ketergantungan ini cenderung mengalami sedikit penurunan, menjadi 41,41%. Dengan kata lain, setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kota Bandung mempunyai tanggungan sebanyak 41 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2-35
Rasio Ketergantungan di Kota Bandung Periode 2007-2011

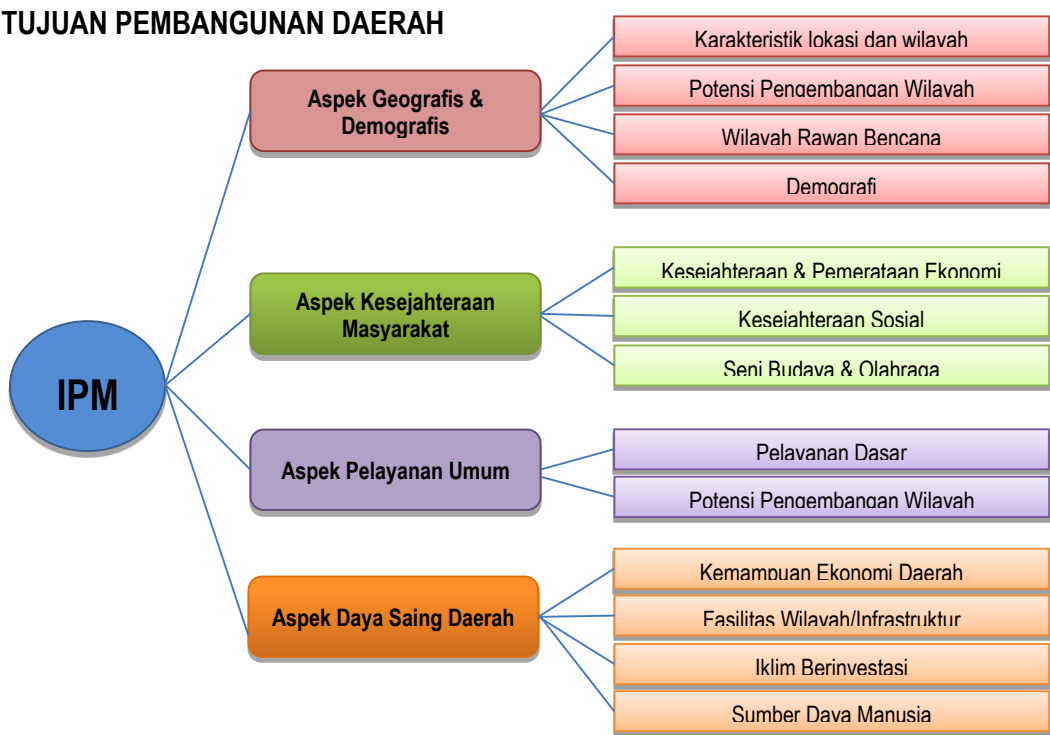
No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	564.298	595.625	606.441	599.861	607.955
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	86.745	106.328	108.256	103.110	102.156
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	651.043	701.953	714.697	702.971	710.111
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	1.678.888	1.672.245	1.702.590	1.691.902	1.714.846
5.	Rasio ketergantungan (3)/(4) (%)	38,78	41,98	41,98	41,55	41,41

Sumber : BPS Kota Bandung (diolah)

Jika dibandingkan dengan tingkat Nasional, rasio ketergantungan di Kota Bandung memiliki nilai lebih kecil, dimana secara Nasional tahun 2010 mencapai 51,31%. Kondisi ini membuka kesempatan bagi Kota Bandung untuk dapat menciptakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

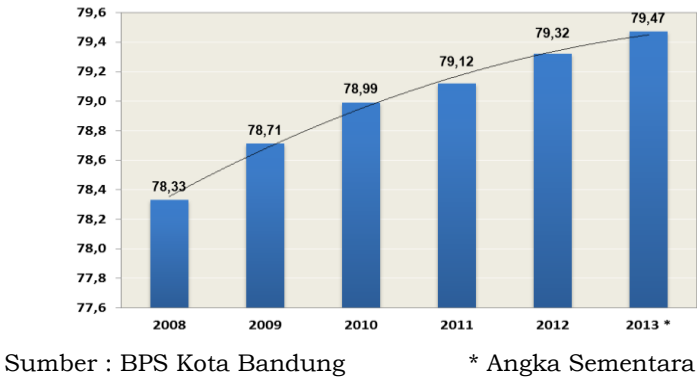
2.5. Perkembangan IPM Kota Bandung

Aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah seluruhnya diarahkan untuk mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan melakukan pengelolaan yang lebih sistematis dan terarah agar dapat sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang ada, serta dikelola dalam kerangka keharmonisan lingkungan (*environmental friendly*). Seluruh aspek tersebut bersinergi dalam mewujudkan peningkatan IPM sebagai tujuan penyelenggaraan pembangunan daerah.



Gambar 2-10
Tujuan Pembangunan Daerah

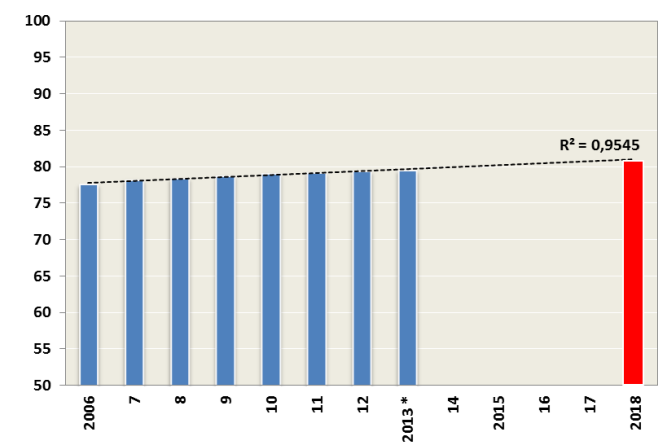
Perkembangan indikator makro selama kurun waktu tahap kedua RPJPD (2009-2013), merupakan cermin kinerja pembangunan Kota Bandung, yang juga mengindikasikan sejauh mana dampak pembangunan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga Kota Bandung. Indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur pencapaian kemajuan pembangunan sosial maupun ekonomi. Secara umum pembangunan manusia di Kota Bandung selama kurun waktu 2008-2013 terus mengalami peningkatan. Tahun 2008, IPM Kota Bandung adalah sebesar 78,33 dan secara perlahan naik mencapai 79,47 tahun 2013.



Grafik 2-30
Perkembangan IPM Kota Bandung Periode 2008-2013

Dengan nilai IPM sebesar 79,47, maka Kota Bandung termasuk dalam klasifikasi menengah ke atas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan cukup berhasil meningkatkan kualitas hidup yang diukur dari indikator kesejahteraan rakyat yang meliputi (i) indikator kesehatan, (ii) indikator pendidikan, serta (iii) daya beli masyarakat yang meningkat.

Dengan menggunakan data hasil survei BPS Kota Bandung yang memperkirakan tahun 2013 IPM Kota Bandung akan mencapai angka 79,47 maka tahun 2016 IPM Kota Bandung diperkirakan sudah bisa mencapai 80, atau termasuk batas bawah wilayah yang berpenduduk umumnya makmur.



Sumber : BPS Kota Bandung (diolah)

Grafik 2-31
Perkembangan IPM Kota Bandung tahun 2006-2013
dan Trend Hingga 2018

Komponen IPM tertinggi adalah Indeks Pendidikan, diikuti oleh Indeks Kesehatan dan yang terakhir adalah Indeks Daya Beli, ini menunjukkan bahwa dari ketiga komponen IPM, akselerasi peningkatan Indeks Daya Beli menjadi pekerjaan rumah agar dapat mengungkit naik nilai IPM, mengingat dua komponen lainnya telah mencapai angka yang sulit untuk ditingkatkan. Pertumbuhan indeks daya beli berada pada tingkat 0,57% per tahun, diikuti pertumbuhan indeks kesehatan sebesar 0,38%, dan yang paling rendah pertumbuhannya adalah indeks pendidikan yang tumbuh sebesar 0.19%.

Tabel 2-36
Perkembangan IPM dan Komponennya di Kota Bandung
Tahun 2006-2013*

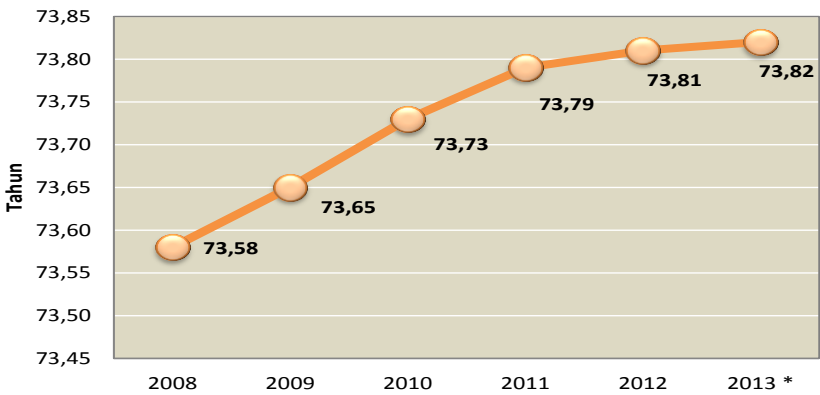
Tahun	IPM	Indeks Pendidikan	Indeks Kesehatan	Indeks Daya Beli
2006	77,51	89,26	79,28	63,99
2007	78,09	89,56	80,65	64,04
2008	78,33	89,71	80,97	64,27
2009	78,71	89,83	81,08	65,22
2010	78,99	90,09	81,22	65,66
2011	79,12	90,14	81,32	65,9
2012	79,32	90,25	81,35	66,35
2013*	79,47	90,44	81,38	66,59
Pertumbuhan	0,36%	0,19%	0,38%	0,57%

Sumber: BPS Kota Bandung

2.5.1. Perkembangan Komponen IPM di Kota Bandung

2.5.1.1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Aspek kesehatan merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka harapan hidup menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Tren perkembangan angka harapan hidup di Kota Bandung selama kurun waktu tahun 2008 hingga 2013 dapat dilihat pada gambar berikut ini: (AHH 2013 LKPJ Dinkes sebesar 73.82)



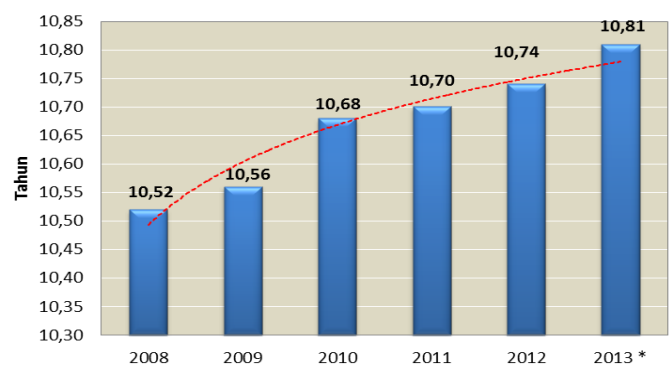
Sumber : BPS Kota Bandung (diolah) * Angka Sementara

Grafik 2-32
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bandung,
Tahun 2010-2013 (dalam tahun)

Gambar dapat dijelaskan bahwa selama periode 2008-2013 Angka Harapan Hidup di Kota Bandung selalu meningkat. Tahun 2013, Angka Harapan Hidup penduduk Kota Bandung adalah sebesar 73,82. Jika dibandingkan dengan tahun 2011-2013, angka tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut berarti bahwa dari tahun 2008 sampai tahun 2013, rata-rata penduduk Kota Bandung dapat bertahan hidup, yaitu sampai usia 73-74 tahun.

2.5.1.2. Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan dalam IPM adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

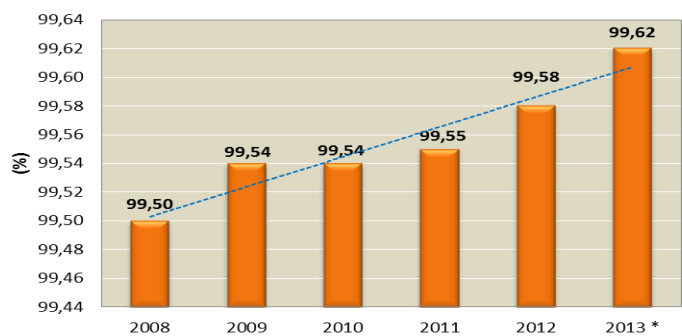


Sumber : BPS Kota Bandung (diolah)

* Angka Sementara

Grafik 2-33
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bandung
Tahun 2008-2013 (dalam Tahun)

Indikator lain untuk melihat tingkat pendidikan adalah angka melek huruf (AMH). Grafik di bawah menunjukkan perkembangan kemampuan baca tulis penduduk Kota Bandung yang berusia 15 tahun ke atas.



Sumber : BPS Kota Bandung (diolah)

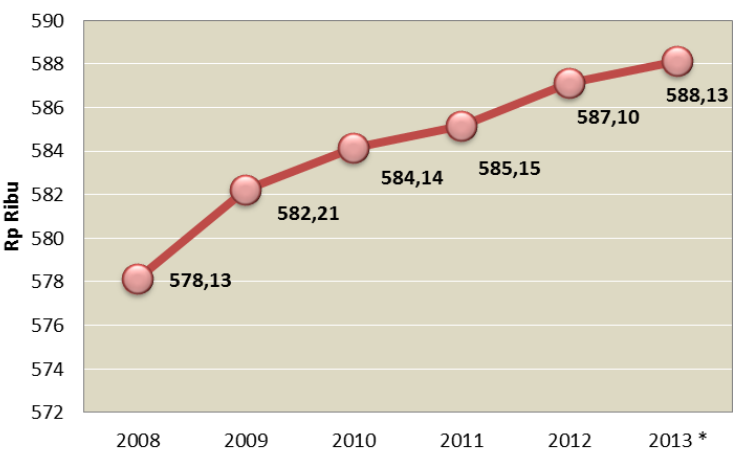
* Angka Sementara

Grafik 2-34
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Bandung
Tahun 2010-2013 (dalam %)

Selama periode 2008-2013, AMH penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Bandung menunjukkan perkembangan yang lambat karena telah hampir mencapai 100%. Tahun 2013, AMH di Kota Bandung hanya mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu menjadi 99,62 persen. AMH sebesar 99,62 persen mempunyai arti bahwa ada sekitar 99,62 persen penduduk Kota Bandung yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf latin dan lainnya, sedangkan sisanya sebesar 0,38 persen penduduk Kota Bandung masih buta huruf. Masih adanya penduduk yang buta huruf di Kota Bandung salah satunya diperkirakan akibat adanya penduduk lanjut usia yang masih belum bisa membaca dan menulis, namun tidak dapat diperbaiki karena faktor usia.

2.5.1.3. Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity/PPP*)

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Paritas daya beli merupakan ukuran ekonomi yang telah distandarkan dengan tujuan agar dapat membandingkan kualitas serta kemampuan daya beli antar daerah. Tren perkembangan paritas daya beli dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kota Bandung (diolah)

* Angka Sementara

Grafik 2-35
Perkembangan Paritas Daya Beli Kota Bandung,
Tahun 2010-2013* (dalam ribu rupiah)

Kemampuan daya beli masyarakat terus mengalami peningkatan. Tahun 2008, PPP Kota Bandung sebesar Rp 578,13 ribu, kemudian meningkat menjadi Rp 588,13 ribu tahun 2012. Laju perkembangan paritas daya

beli dari kurun waktu 2008-2013 mengalami fluktuasi yang disebabkan karena kondisi ekonomi makro, baik Nasional maupun regional.

2.5.2. IPM Tingkat Kecamatan di Kota Bandung

Secara umum IPM di Kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bandung seluruhnya sudah di atas 75, sehingga sesuai dengan kategori UNDP. Pencapaian angka IPM Kecamatan di Kota Bandung pada tahun 2012 masuk ke dalam strata menengah atas ($60 \leq \text{IPM} < 80$) dan strata atas ($\text{IPM} \geq 80$). Penyajian angka IPM Kecamatan di Kota Bandung tahun 2012 dilakukan ke dalam 3 (tiga) kelompok interval. Pengelompokan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

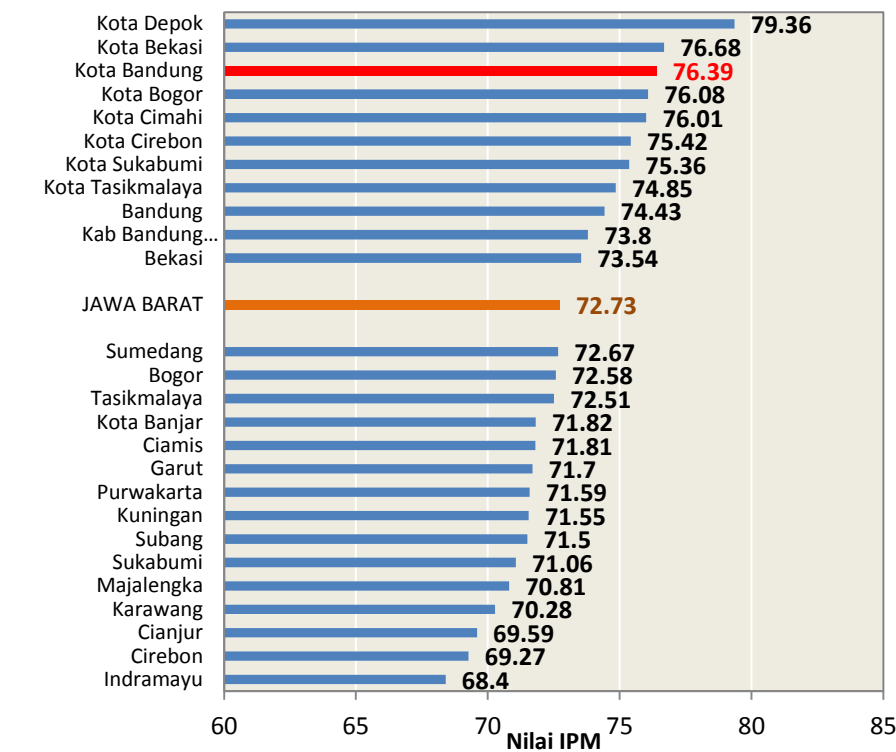
Tabel 2-37
Pengelompokan Kecamatan Menurut Capaian IPM
di Kota Bandung Tahun 2012*

Nama Kecamatan	Kelompok	Interval IPM
Lengkong Sukasari Bandung Wetan Coblong Panyileukan Sukajadi Antapani Cibiru Cibeunying Kaler Batununggal	Kelompok Atas	79,41 - 80,67
Rancasari Sumur Bandung Buah Batu Astana Anyar Gede Bage Mandalajati Regol Andir Cibeunying Kidul	Kelompok Menengah	78,95 - 79,40
Cicendo Cinambo Ujung Berung Cidadap Bojongloa Kidul Bandung Kulon Bandung Kidul Bojongloa Kaler Babakan Ciparay Kiara Condong Arcamanik	Kelompok Bawah	78,47 – 78,94
K o t a B a n d u n g		79,32

* Angka Sangat Sementara
Sumber : Bappeda dan BPS Kota Bandung, Survei Penyusunan IPM 2012

2.5.3. Disparitas IPM Kabupaten/Kota (Lintas Daerah)

IPM sebagai indikator makro pembangunan selain memiliki makna yang positif untuk mengukur seberapa besar kinerja pembangunan daerah, juga memiliki makna penting untuk melihat disparitas wilayah. Penelaahan komparatif atas disparitas dapat dilihat dengan perbandingan antar Kabupaten/Kota di Jawa Barat , maupun dengan Kabupaten/Kota secara Nasional. Untuk melakukan komparasi tersebut, maka data IPM yang digunakan tidak dapat menggunakan data yang bersumber dari BPS Kota Bandung, akan tetapi menggunakan data BPS Pusat. Data IPM ini tertuang dalam *Laporan Pembangunan Manusia Indonesia* yang secara khusus dipublikasi oleh BPS Pusat. Jika dilakukan komparasi dengan tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Barat, perkembangan IPM Kota Bandung relatif lebih baik.

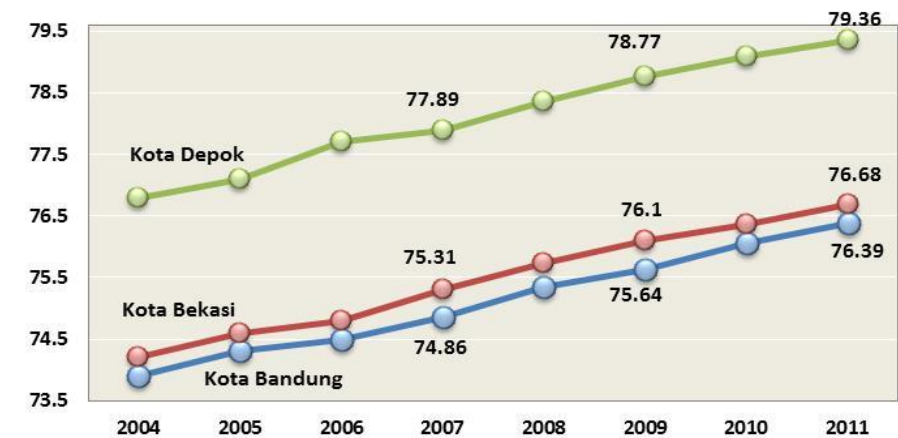


Sumber : BPS Pusat

Grafik 2-36
Perbandingan IPM di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011

Kendati telah menunjukkan kinerja yang positif, namun IPM masih harus ditingkatkan, karena jika dibandingkan dengan capaian IPM kabupaten/ kota di dalam lingkup Provinsi Jawa Barat capaian IPM Kota Bandung

masih berada di bawah Kota Depok dan Kota Bekasi². Mengingat Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi, seharusnya Bandung menjadi kota terdepan dalam berbagai bidang.



Sumber : BPS Pusat

Grafik 2-37
Trend Perkembangan IPM di Kota Bandung, Kota Bekasi dan Kota Depok Periode 2004-2011

Secara Nasional, capaian indikator makro IPM Kota Bandung yang menunjukkan kenaikan tersebut pada dasarnya berjalan dalam kecepatan yang relatif rendah, sehingga terjadi penurunan yang cukup signifikan atas peringkat IPM Kota Bandung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya.

Tabel 2-38
Peringkat IPM Kota Bandung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota secara Nasional

Tahun	Peringkat Nasional	Keterangan
2002	14	Naik (Lebih Baik)
2003	20	Turun (Lebih Buruk)
2004	24	Turun (Lebih Buruk)
2005	43	Turun (Lebih Buruk)
2006	49	Turun (Lebih Buruk)
2010	58	Turun (Lebih Buruk)
2011	60	Turun (Lebih Buruk)

Sumber : BPS Pusat (diolah)

Tampak peringkat IPM Kota Bandung terus mengalami penurunan dari tahun 2002 hingga 2011 ini. Artinya kualitas manusia dan daya saing Kota Bandung cenderung mengalami pelambatan bila dibandingkan dengan daerah lainnya.

²Dalam hal ini terdapat perbedaan nilai IPM antara data yang dikeluarkan oleh BPS Kota Bandung dan BPS Pusat. Untuk tujuan perbandingan/komparasi antar kabupaten/kota yang sesuai, maka nilai IPM yang digunakan bersumber dari BPS Pusat.

Tabel 2-39
Sepuluh Kabupaten/Kota dengan Capaian Tertinggi dan Terendah
Tahun 2011

Indikator Komponen	10 Kab/Kota dengan nilai TERTINGGI	10 Kab/Kota dengan nilai TERENDAH
Angka Harapan Hidup	Enrekang, Sleman, Kota Pare-Pare, Tabanan, Kulon Progo, Tana Toraja, Luwu, Bantaeng, Kota Makasar, Kota Jakarta Selatan	Sumbawa, Lombok Utara, Dompu, Lombok Barat, Lombok Timur, Probolinggo, Sumbawa Barat, Lombok Tengah, Sambas, Balangan
Angka Melek Huruf	Murung Raya, Kota Bukittinggi, Kota Manado, Kota Pekan Baru, Kota Tomohon, Tapanuli Selatan, Kota Jayapura, Minahasa Selatan, Kep. Siau Tagulandang Biaro Minahasa Utara	Intan Jaya, Deiyai, Nduga, Asmat, Mappi, Puncak, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Boven Digoel, Tolikara
Rata-Rata Lama Sekolah	Kota Banda Aceh, Kota Yogyakarta, Kota Kendari, Kota Pekan Baru, Kota Ambon, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Kupang, Kota Jayapura, Kota Bengkulu	Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Yalimo, Deiyai, Nduga, Puncak, Yahukimo, Mamberamo Tengah, Tolikara, Boven Digoel,
Pengeluaran per Kapita	Kota Tual, Kota Sungai Penuh, Kota Balikpapan, Kota Surabaya, Kota Dumai, Kota Baru, Kota Pasuruan, Kota Surakarta, Kota Bukittinggi, Klungkung	Tambraw, Sabu Raijua, Raja Ampat, Lanny jaya, Yalimo, Puncak, Mamberamo Tengah, Dogiyai, Nduga, Pulau Morotai,
IPM	Kota Yogyakarta, Kota Jakarta Selatan, Kota Depok, Kota Jakarta Timur, Kota Makasar, Kota Jakarta Barat , Kota Ambon, Kota Balikpapan, Sleman, Kota Palangka Raya	Nduga, Intan Jaya, Yalimo, Deiyai, Mamberamo Tengah, Puncak, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Yakuhimo, Dogiyai

Sumber : BPS Pusat (diolah)

Kota Bandung tidak termasuk dalam 10 besar IPM tertinggi

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan

3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2009-2013

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Periode kinerja keuangan Kota Bandung disajikan untuk periode tahun 2009-2013, namun untuk penyajian datanya diuraikan mulai tahun 2008 sebagai data dasar atau kondisi eksisting periode tahun 2009-2013, serta untuk memenuhi teknis penghitungan rata-rata pertumbuhan. Data kinerja keuangan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 diperoleh dari Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2012. Data kinerja keuangan tahun 2013 disajikan adalah data yang belum diaudit, dan diperoleh dari Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Struktur APBD Kota Bandung terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Secara umum komponen APBD terdiri dari:

A. Komponen Pendapatan:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, BPHTB (mulai tahun 2010) dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

B. Komponen Belanja:

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

C. Komponen Pembiayaan:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Ringkasan perubahan APBD Kota Bandung berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3-1
Perubahan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 s.d. 2013)*

U R A I A N		2008	2009	2010	2011	2012	2013)*
PENDAPATAN		1,962,781,413,439.00	2,286,657,833,357.08	2,493,858,908,628.31	3,051,131,745,545.23	3,609,909,735,354.63	4,349,877,954,232.15
PENDAPATAN ASLI DAERAH		338,376,369,006.00	369,137,442,213.08	416,030,066,849.00	719,988,881,243.00	933,920,994,572.00	1,407,759,106,133.00
1	Pendapatan Pajak Daerah	213,160,908,731.00	255,506,475,774.08	291,800,000,000.00	546,000,000,000.00	727,000,000,000.00	1,063,000,000,000.00
2	Hasil Retribusi Daerah	91,691,795,275.00	81,758,868,505.00	91,810,119,947.00	73,090,784,230.00	71,174,028,328.00	100,816,228,425.00
3	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4,150,000,000.00	7,250,658,109.00	8,837,421,402.00	10,264,067,395.00	10,269,067,395.00	19,157,551,445.00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29,373,665,000.00	24,621,439,825.00	23,582,525,500.00	90,629,029,618.00	125,477,898,849.00	224,785,326,263.00
DANA PERIMBANGAN		1,290,695,605,184.00	1,370,520,000,489.00	1,571,976,506,631.00	1,429,761,007,742.00	1,794,296,154,447.00	1,818,170,049,810.00
1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak	317,013,175,184.00	335,664,569,489.00	511,413,619,031.00	365,041,419,742.00	433,567,652,447.00	264,916,487,810.00
2	Dana Alokasi Umum	965,516,430,000.00	989,245,660,000.00	997,018,087,600.00	1,005,642,188,000.00	1,323,681,042,000.00	1,485,941,032,000.00
3	Dana Alokasi Khusus	8,166,000,000.00	45,609,771,000.00	63,544,800,000.00	59,077,400,000.00	37,047,460,000.00	67,312,530,000.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		38,745,128,899.00	547,000,390,655.00	505,852,335,148.31	899,243,555,338.00	881,692,586,335.63	1,123,948,798,289.15
1	Pendapatan Hibah				7,500,000,000.00		
2	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	294,851,310,350.00	332,454,466,058.00	325,158,587,706.31	435,068,841,722.23	456,196,733,815.63	619,645,039,488.15
3	Dana Penyesuaian Otonomi Khusus			54,987,734,942.00	363,373,782,338.00	293,695,361,000.00	417,049,325,236.00
4	Bantuan Keuagandari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		214,545,924,597.00	125,706,012,500.00	163,529,832,500.00	131,800,491,520.00	87,254,433,565.00
BELANJA		2,260,409,191,308.58	2,498,896,793,515.08	2,855,133,555,022.31	3,312,196,925,814.23	3,864,669,570,886.63	4,755,244,946,717.15
BELANJA TIDAK LANGSUNG		1,370,808,728,432.58	1,391,773,886,383.08	1,653,598,765,229.00	1,919,949,172,763.64	2,167,730,394,921.30	2,366,195,473,316.15
BELANJA LANGSUNG		889,600,462,876.00	1,107,122,907,132.00	1,201,534,789,793.31	1,392,247,753,050.59	1,696,939,175,965.33	2,389,049,473,401.00
SURPLUS(DEFISIT)		-297,627,777,869.58	-212,238,960,158.00	-361,274,646,394.00	-261,065,180,269.00	-254,759,835,532.00	(405,366,992,485.00)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		315,856,408,627.45	276,159,742,488.00	374,969,409,630.00	278,945,180,269.00	293,759,835,532.00	432,448,611,338.00
1	Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya	298,356,408,627.45	258,659,742,488.00	372,469,409,630.00	276,445,180,269.00	293,759,835,532.00	432,448,611,338.00
2	Penerimaan kembali pinjaman	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00		
3	Penerimaan kembali investasi	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00		-		
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		18,228,630,757.87	63,920,782,330.00	13,694,763,236.00	17,880,000,000.00	39,000,000,000.00	27,081,618,853.00
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13,000,000,000.00	62,000,000,000.00	10,000,000,000.00	12,500,000,000.00	31,000,000,000.00	26,000,000,000.00
2	Pembayaran Pokok Utang'	5,228,630,757.87	1,920,782,330.00	3,694,763,236.00	5,380,000,000.00	8,000,000,000.00	1,081,618,853.00
Pembiayaan Netto		297,627,777,869.58	212,238,960,158.00	361,274,646,394.00	261,065,180,269.00	254,759,835,532.00	405,366,992,485.00

Sumber : DPKAD Kota Bandung

)* Laporan Realisasi APBD T.A 2013 (unaudited)

Penjelasan selengkapnya mengenai setiap komponen Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dapat dilihat pada uraian berikut ini.

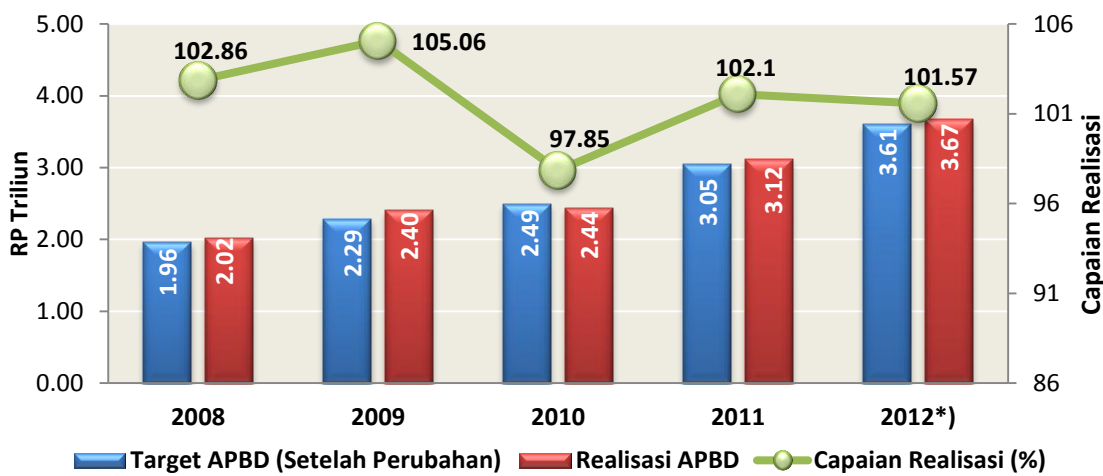
3.1.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kota Bandung dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2008 sampai dengan 2013 (Tabel 3.2).

Tabel 3-2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	1,962,781,413,439.00	2,018,841,349,189.30	102.86	56,059,935,750.30
2009	2,286,657,833,357.08	2,402,466,979,725.00	105.06	115,809,146,367.92
2010	2,493,858,908,628.31	2,440,160,360,714.00	97.85	(53,698,547,914.31)
2011	3,051,131,745,545.23	3,115,296,523,905.00	102.1	64,164,778,359.77
2012	3,609,909,735,354.63	3,666,693,409,600.00	101.57	56,783,674,245.37
2013)*	4,349,877,954,232.15	4,332,088,948,211.00	99.59	(17,789,006,021.15)
Rata-rata	2,959,036,265,092.73	2,995,924,595,224.05		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012
*) Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited)



Grafik 3-1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2008-2012

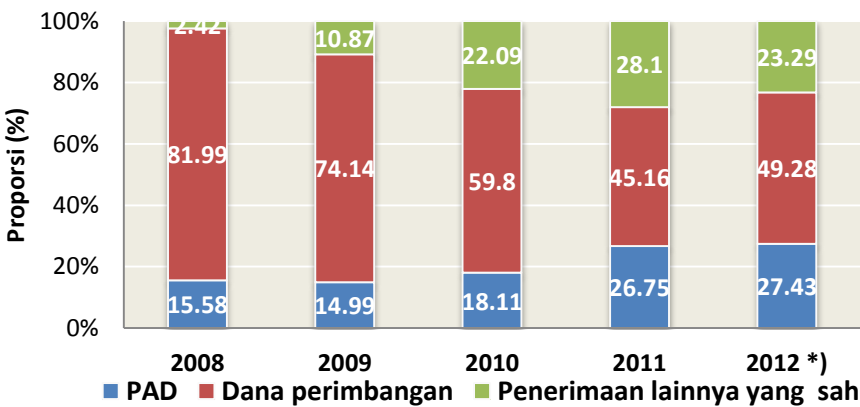
Selama periode Tahun Anggaran 2008-2013, rata-rata target Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.959.036.265.092,73 dengan realisasi sebesar Rp. 2.995.924.595.224,05. Berdasarkan pencermatan terhadap realisasi pendapatan daerah, proporsi komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kota Bandung selama Tahun Anggaran 2008-2013 ditunjukkan pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4.

Tabel 3-3
Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap
Total Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013

Jenis Penerimaan	Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013)*
PAD	15.58	14.99	18.11	26.75	27.43	33.30
Dana perimbangan	81.99	74.14	59.80	45.16	49.28	41.06
Penerimaan lainnya yang sah	2.42	10.87	22.09	28.10	23.29	25.63
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012
 *) berdasarkan Laporan Realisasi APBD TA. 2013(unaudited) dan sudah termasuk Dana BOS Pusat

Dari tabel di atas terlihat bahwa proporsi PAD cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kontribusi PAD Kota Bandung yang sebesar 27,43% tahun 2012 relatif lebih baik jika dibandingkan dengan rerata kontribusi PAD Kabupaten/Kota secara Nasional yang hanya berada di kisaran 8,4% tahun 2012³.



Grafik 3-2
Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total
Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2012

Hal ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan daerah⁴ Kota Bandung (ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan) lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Kabupaten/Kota lain secara nasional. Dengan semakin besar kontribusi PAD atas pendapatan daerah, maka kemandirian daerah semakin besar.

³Laporan “Deskripsi dan Analisis APBD 2012”, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
⁴Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Semakin tinggi ketergantungan suatu daerah, semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dalam hal ini semakin besar angka rasio PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil.

Tabel 3-4
Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap
Total Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013

Jenis Penerimaan	Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013)*
PAD	314.627.155.412	360.152.627.690	441.863.068.294	833.254.175.288	1.005.583.424.429	1,442,775,239,758
Dana perimbangan	1.360.460.067.955	1.448.863.491.100	1.459.244.804.313	1.406.734.260.136	1.807.075.186.302	1,778,972,208,159
Penerimaan lainnya yang sah	343.754.125.822	593.450.860.935	539.052.488.107	875.308.088.481	854.034.798.869	1,110,341,500,294
Total	1.723.990.038.839	2.070.104.651.778	2.097.628.393.207	2.331.553.167.924	2.944.131.987.241	4.332.088.948.211

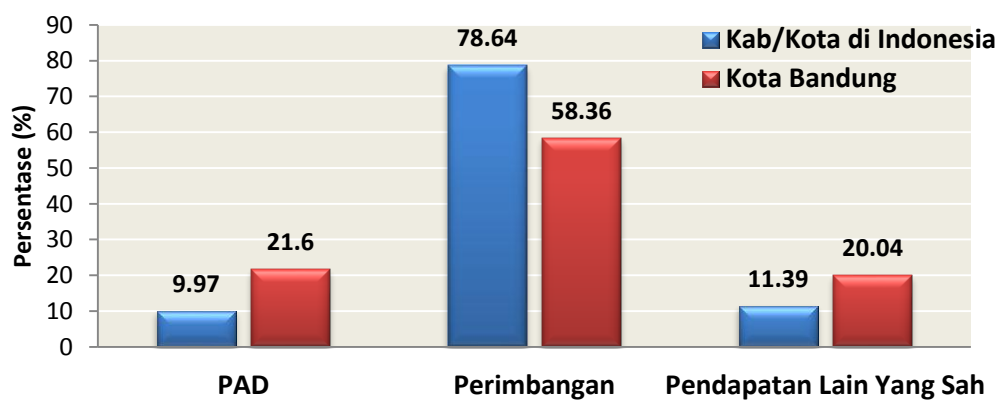
Sumber :Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012
 *) berdasarkan Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited) dan sudah termasuk Dana BOS Pusat

Tabel 3-5
Komposisi Pendapatan Kab/Kota di Indonesia dan Kota Bandung
Tahun 2010-2012

Wilayah	PAD	Perimbangan	Pendapatan Lain Yang Sah
Kab/Kota di Indonesia	9.97	78.64	11.39
Kota Bandung	21.60	58.36	20.04

Sumber: Kemenkeu (diolah)

Struktur pendapatan Pemerintah Kota Bandung pada dasarnya menunjukkan tingkatan yang lebih baik dari pada kebanyakan kabupaten dan kota di Indonesia. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan pada seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia rata-rata hanya 9.97 persen dari tahun 2010-2012, namun kontribusi PAD Kota Bandung jauh melebihi angka tersebut. Begitu pula dengan sumber pendapatan lain-lain yang sah, juga jauh lebih tinggi. Artinya, struktur keuangannya relatif lebih kuat atau relatif tidak tergantung dari dana perimbangan bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Indonesia.



Grafik 3-3
Komposisi Pendapatan Kab/Kota di Indonesia dan Kota Bandung
Tahun 2010-2012

Secara terperinci, target dan realisasi pendapatan daerah periode Tahun Anggaran 2008-2013 tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selama periode Tahun Anggaran 2008-2013, rata-rata target tahunan sebesar Rp. 697.535.476.669,35 realisasinya melampaui target yang ditetapkan, yaitu tercapai sebesar Rp. 733.042.615.145,17; seperti dijelaskan pada Tabel 3.6.

Tabel 3-6
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	338,376,369,006.00	314,627,155,412.00	92.98	(23,749,213,594.00)
2009	369,137,442,213.08	360,152,627,690.00	97.57	(8,984,814,523.08)
2010	416,030,066,849.00	441,863,068,294.00	106.21	25,833,001,445.00
2011	719,988,881,243.00	833,254,175,288.00	115.73	113,265,294,045.00
2012	933,920,994,572.00	1,005,583,424,429.00	107.67	71,662,429,857.00
2013)*	1,407,759,106,133.00	1,442,775,239,758.00	102.49	35,016,133,625.00
Rata-rata	697,535,476,669.35	733,042,615,145.17		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012
)*Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited)

Realisasi pajak daerah selama periode Tahun Anggaran 2008-2013 melampaui dari target yang telah ditentukan, dimana dari total target pajak daerah sebesar Rp. 516,077,897,417.51, terealisasi sebesar Rp. 574,718,661,942.17; disajikan pada Tabel 3.7

Tabel 3-7
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	213,160,908,731.00	214,433,400,986.00	100.6	1,272,492,255.00
2009	255,506,475,774.08	250,338,673,104.00	97.98	(5,167,802,670.08)
2010	291,800,000,000.00	301,781,987,749.00	103.42	9,981,987,749.00
2011	546,000,000,000.00	667,106,811,687.00	122.18	121,106,811,687.00
2012	727,000,000,000.00	820,563,651,111.00	112.87	93,563,651,111.00
2013)*	1,063,000,000,000.00	1,194,087,447,016.00	112.33	131,087,447,016.00
Rata-rata	516,077,897,417.51	574,718,661,942.17		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012
)* Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).



Grafik 3-38
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Bandung

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota kepada kepentingan orang pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Selama periode Tahun Anggaran 2008-2013, rata-rata target retribusi daerah sebesar Rp. 85.056.970.785,00 dan realisasinya belum mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 82.347.361.711,55; disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3-8
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/Berkurang
2008	91,691,795,275.00	72,857,118,264.30	79.46	(18,834,677,010.70)
2009	81,758,868,505.00	68,912,741,347.00	84.29	(12,846,127,158.00)
2010	91,810,119,947.00	86,471,546,547.00	94.19	(5,338,573,400.00)
2011	73,090,784,230.00	71,684,532,455.00	98.08	(1,406,251,775.00)
2012	71,174,028,328.00	78,649,880,372.00	110.50	7,475,852,044.00
2013)*	100,816,228,425.00	115,508,351,284.00	114.57	14,692,122,859.00
Rata-rata	85,056,970,785.00	82,347,361,711.55		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008s.d. 2012
)* Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari bagian laba perusahaan milik daerah. Selama periode Tahun Anggaran 2008-2013, rata-rata target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 9.988.960.957,67 realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 9.516.722.721,00; disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3-9
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	4,150,000,000.00	5,447,893,079.00	131.27	1,297,893,079.00
2009	7,250,658,109.00	7,136,408,109.00	98.42	(114,250,000.00)
2010	8,837,421,402.00	15,298,096,935.00	173.11	6,460,675,533.00
2011	10,269,067,395.00	10,328,428,076.00	100.58	59,360,681.00
2012	10,269,067,395.00	7,227,067,446.00	70.38	(3,041,999,949.00)
2013)*	19,157,551,445.00	11,662,442,681.00	60.88	(7,495,108,764.00)
Rata-rata	9,988,960,957.67	9,516,722,721.00		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012
)* Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).

Penerimaan Lain-lain PAD yang sah utamanya bersumber dari: (a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; (b) Jasa Giro; (c) Pendapatan Bunga; (d) Tuntutan Ganti Rugi (TGR); (e) Komisi, (f) Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah; (g) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; (h) Pendapatan Denda Pajak; (i) Pendapatan Denda Retribusi; (j) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan; (k) Pendapatan dari Pengembalian; (l) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; (m) Pendapatan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; (n) Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan; dan (o) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selama periode Tahun Anggaran 2008-2013, rata-rata target Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. 86.411.647.175,83 sedangkan realisasinya mencapai Rp. 66.459.868.770,50; disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3-10
Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	29,373,665,000.00	21,888,743,083.00	74.52	(7,484,921,917)
2009	24,621,439,825.00	33,764,805,130.00	137.14	9,143,365,305
2010	23,582,525,500.00	38,311,437,063.00	162.46	14,728,911,563
2011	90,629,029,618.00	84,134,403,070.00	92.83	(6,494,626,548)
2012	125,477,896,849.00	99,142,825,500.00	79.01	(26,335,071,349)
2013)*	224,785,326,263.00	121,516,998,777.00	54.06	(103,268,327,486)
Rata-rata	86,411,647,175.83	66,459,868,770.50		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012
 *) Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum dan (c) Dana Alokasi Khusus. Secara keseluruhan, rata-rata target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan selama periode Tahun Anggaran 2008-2013 sebesar Rp. 1.545.903.220.717,17. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang setiap tahun diterbitkan, rata-rata Dana Perimbangan yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.543.558.336.327,50; disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3-11
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Bandung
Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	1,290,695,605,184.00	1,360,460,067,955.00	105.41	69,764,462,771.00
2009	1,370,520,000,489.00	1,448,863,491,100.00	105.72	78,343,490,611.00
2010	1,571,976,506,631.00	1,459,244,804,313.00	92.83	(112,731,702,318.00)
2011	1,429,761,007,742.00	1,406,734,260,136.00	98.39	(23,026,747,606.00)
2012	1,794,296,154,447.00	1,807,075,186,302.00	100.71	12,779,031,855.00
2013)*	1,818,170,049,810.00	1,778,972,208,159.00	97.84	(39,197,841,651.00)
Rata-rata	1,545,903,220,717.17	1,543,558,336,327.50		

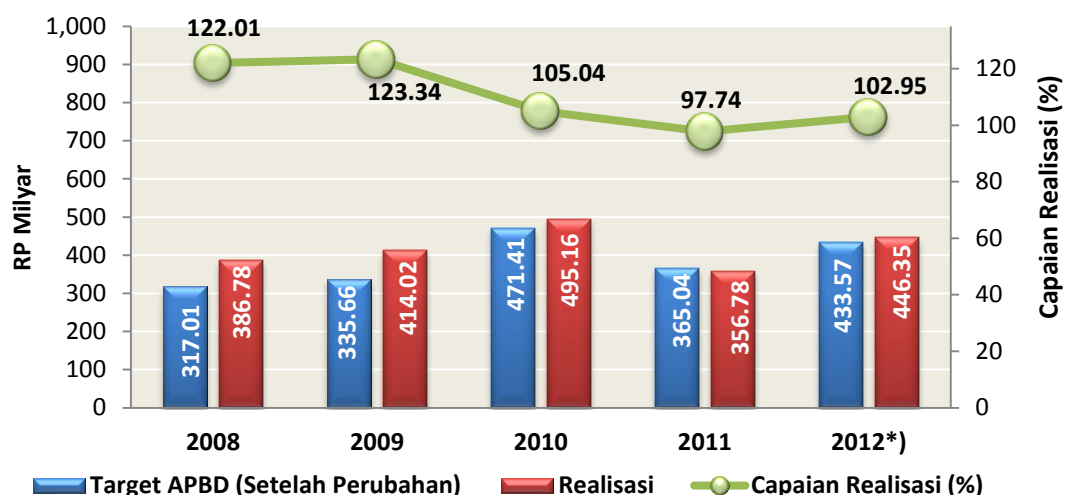
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012
*) Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).

Secara keseluruhan, rata-rata target penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak selama periode Tahun Anggaran 2008-2013 adalah sebesar Rp. 364.602.820.617,17 sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp. 387.467.094.027,50; disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3-12
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	317,013,175,184.00	386,775,501,155.00	122.01	69,762,325,971.00
2009	335,664,569,489.00	414,020,100,100.00	123.34	78,355,530,611.00
2010	471,413,619,031.00	495,157,460,313.00	105.04	23,743,841,282.00
2011	365,041,419,742.00	356,784,172,136.00	97.74	(8,257,247,606.00)
2012	433,567,652,447.00	446,346,684,302.00	102.95	12,779,031,855.00
2013)*	264,916,487,810.00	225,718,646,159.00	85.20	(39,197,841,651.00)
Rata-rata	364,602,820,617.17	387,467,094,027.50		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012
*) Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).



Grafik 3-4
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2012

Rata-rata penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum selama periode Tahun Anggaran 2008-2013 adalah sebesar Rp. 1.127.840.739.933,33 sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp. 1.113.764.713.800,00; disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3-13
Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	965,516,430,000.00	965,518,566,800.00	100.00	2,136,800.00
2009	989,245,660,000.00	989,233,620,000.00	100.00	(12,040,000.00)
2010	997,018,087,600.00	912,571,834,000.00	91.53	(84,446,253,600.00)
2011	1,005,642,188,000.00	1,005,642,188,000.00	100.00	-
2012	1,323,681,042,000.00	1,323,681,042,000.00	100.00	-
2013)*	1,485,941,032,000.00	1,485,941,032,000.00	100.00	-
Rata-rata	1,127,840,739,933.33	1,113,764,713,800.00		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012

*) Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).

Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dimulai tahun 2008, dengan rata-rata target dan realisasi penerimaan selama periode Tahun Anggaran 2008-2013 adalah sebesar Rp. 46.792.993.500,00 dan Rp. 42.326.528.500,00; disajikan pada Tabel 3.14

Tabel 3-14
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus
Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	8,166,000,000.00	8,166,000,000.00	100.00	-
2009	45,609,771,000.00	45,609,771,000.00	100.00	-
2010	63,544,800,000.00	51,515,510,000.00	81.07	(12,029,290,000.00)
2011	59,077,400,000.00	44,307,900,000.00	75.00	(14,769,500,000.00)
2012	37,047,460,000.00	37,047,460,000.00	100.00	-
2013)*	67,312,530,000.00	67,312,530,000.00	100.00	-
Rata-rata	46,792,993,500.00	42,326,528,500.00		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012

*) Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).

Realisasi Dana Alokasi Khusus tahun 2010 dan 2011 hanya mencapai 81.07% dan 75.00% karena tahun 2010 Anggaran Dana Alokasi Khusus untuk sektor Kesehatan, infrastruktur jalan, dan Keluarga Berencana tidak direalisasikan semua. Sedangkan tahun 2011 penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus yang tidak direalisasikan semua adalah sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, keluarga berencana, dan transportasi.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas: (a) Pendapatan Hibah, (b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (c) Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya, (d) Dana Transfer Pusat, (e) Dana Insentif Daerah (DID), dan (f) Lain-lain Penerimaan. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara akumulasi tidak terlampaui. Selama periode Tahun Anggaran 2008-2013, ditargetkan rata-rata sebesar Rp. 611.447.598.050,86 dengan realisasi sebesar Rp. 306.648.579.727,33 (Tabel 3.15).

Tabel 3-15
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah
Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	38,745,128,899.00	48,902,815,472.00	126.22	10,157,686,573.00
2009	2,145,545,924,597.00	261,088,532,988.00	12.17	(1,884,457,391,609.00)
2010	125,706,012,500.00	196,520,520,600.00	156.33	70,814,508,100.00
2011	102,939,232,500.00	91,564,732,500.00	88.95	(11,374,500,000.00)
2012	131,800,491,520.00	131,473,376,510.00	99.75	(327,115,010.00)
2013)*	1,123,948,798,289.15	1,110,341,500,294.00	98.79	(13,607,297,995.15)
Rata-rata	611,447,598,050.86	306,648,579,727.33		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012

*) Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (un-audited).

Selama periode Tahun Anggaran 2008-2013, target lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah sebesar Rp. 7.500.000.000,00 tahun 2011 sedangkan realisasinya Rp. 160.091.178.600,00. Penerimaan tersebut berasal dari tiga tahun anggaran (2009 hingga 2011), disajikan pada Tabel 3.16. Sumber pendapatan hibah tersebut berasal dari Pemerintah.

Tabel 3-16
Target dan Realisasi Pendapatan Hibah
Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	-	-	-	-
2009	-	37,511,925,000.00	-	37,511,925,000.00
2010	-	115,079,253,600.00		115,079,253,600.00
2011	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	100.00	-
2012	-	-	-	-
2013)*	-	-	-	-

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012
 *) Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).

Selama periode Tahun Anggaran 2008-2013, target lain-lain pendapatan yang sah bersumber dari dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp. 1.129.106.203.516,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.103.931.033.952,00, disajikan pada Tabel 3.17.

Tabel 3-17
Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008		-	-	
2009	-	-	-	-
2010	54,987,734,942.00	20,714,516,473.00	37.67	(34,273,218,469.00)
2011	363,373,782,338.00	364,397,875,479.00	100.28	1,024,093,141.00
2012	293,695,361,000.00	293,695,361,000.00	100.00	-
2013)*	417,049,325,236.00	425,123,281,000.00	101.94	8,073,955,764.00
Jumlah	1,129,106,203,516.00	1,103,931,033,952.00		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012
)* Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).

Target lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari dana bagi hasil pajak provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya rata-rata periode Tahun Anggaran 2008-2013, dari target sebesar Rp. 410.562.496.523,39 realisasinya mencapai Rp. 401.223.210.544,33 (tabel 3.18).

Tabel 3-18
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	294,851,310,350.00	294,851,310,350.00	100.00	-
2009	332,454,466,058.00	332,362,327,947.00	99.97	(92,138,111.00)
2010	325,158,587,706.31	321,817,451,034.00	98.97	(3,341,136,672.31)
2011	435,068,841,722.23	419,345,480,502.00	96.39	(15,723,361,220.23)
2012	456,196,733,815.63	428,866,061,359.00	94.01	(27,330,672,456.63)
2013)*	619,645,039,488.15	610,096,632,074.00	98.46	(9,548,407,414.15)
Rata-rata	410,562,496,523.39	401,223,210,544.33		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012
 *) Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).

Target lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota/lainnya rata-rata periode Tahun Anggaran 2008-2013, dari target Rp. 109.124.349.110,67 sedangkan realisasinya mencapai Rp. 99.279.595.203,00 (tabel 3.19).

Tabel 3-19
Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Prov/Kab/Kota/Lainnya Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	-	-	0	-
2009	214,545,924,579.00	223,576,607,988.00	104.21	9,030,683,409.00
2010	125,706,012,500.00	81,441,267,000.00	64.79	(44,264,745,500.00)
2011	95,439,232,500.00	84,064,732,500.00	88.08	(11,374,500,000.00)
2012	131,800,491,520.00	131,473,376,510.00	99.75	(327,115,010.00)
2013)*	87,254,433,565.00	75,121,587,220.00	86.09	(12,132,846,345.00)
Rata-rata	109,124,349,110.67	99,279,595,203.00		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012
)* Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).

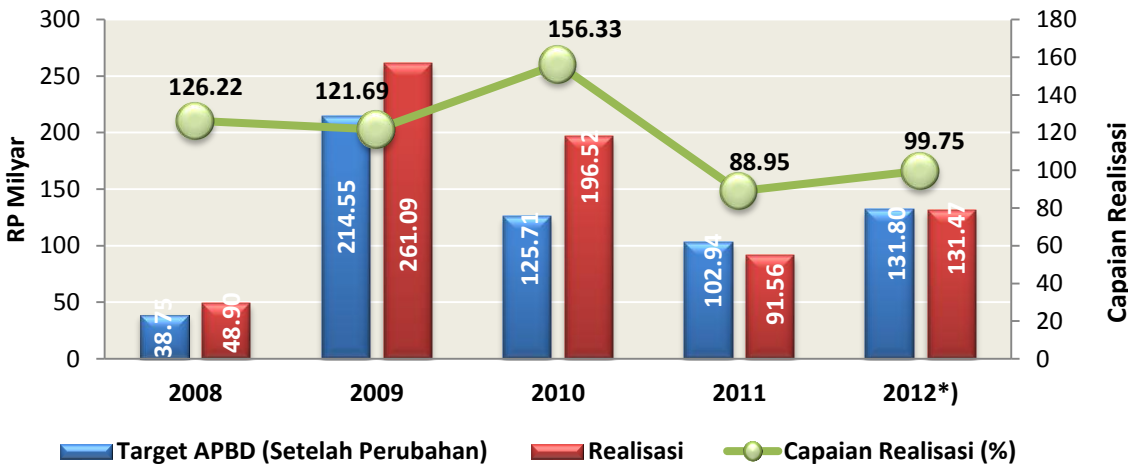
Target lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari lain-lain penerimaan rata-rata selama periode Tahun Anggaran 2008-2013, sebesar Rp. 109.124.349.110,67 sedangkan realisasinya mencapai Rp. 99.279.595.203,00 (tabel 3.20).

Tabel 3-20
Target dan Realisasi Lain-lain Penerimaan
Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	38,745,128,899.00	48,902,815,472.00	126.22	10,157,686,573.00
2009	214,545,924,597.00	261,088,532,988.00	121.69	46,542,608,391.00
2010	125,706,012,500.00	196,520,520,600.00	156.33	70,814,508,100.00
2011	102,939,232,500.00	91,564,732,500.00	88.95	(11,374,500,000.00)
2012	131,800,491,520.00	131,473,376,510.00	99.75	(327,115,010.00)
2013)*	87,254,433,565.00	75,121,587,220.00	86.09	(12,132,846,345.00)
Rata-rata	109,124,349,110.67	99,279,595,203.00		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012
)* Laporan Realisasi APBD TA. 2013(unaudited).

Grafik 3-6
Target dan Realisasi Lain-Lain Penerimaan
Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2012



Tabel 3-21
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Bandung Tahun 2008–2013

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013)*	Rata-rata pertumbuhan
1	Pendapatan	2,018.84	2,402.47	2,440.16	3,115.30	3,666.69	4,332.09	16.82
1.1	Pendapatan Asli Daerah	314.63	360.15	441.86	833.25	1,005.58	1,442.78	37.98
1.1.1	Pajak Daerah	214.43	250.34	301.78	667.11	820.56	1,194.09	45.37
1.1.2	Retribusi Daerah	72.86	68.91	86.47	71.69	78.65	155.08	21.97
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan	5.45	7.14	15.30	10.33	7.23	11.66	28.84
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	21.89	33.77	38.31	84.13	99.14	121.52	45.55
1.2	Dana Perimbangan	1,360.46	1,448.86	1,459.25	1,406.73	1,807.08	1,778.97	6.10
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	386.78	414.02	495.16	356.78	446.35	2,257.19	85.90
1.2.2	Dana Alokasi Umum	965.52	989.23	912.57	1,005.64	1,323.68	1,485.94	9.76
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	8.17	45.61	51.52	44.31	37.05	67.31	104.56

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013)*	Rata-rata pertumbuhan
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	343.75	593.45	539.05	875.31	854.03	1,110.34	30.69
1.3.1	Hibah		37.51	115.08	7.50			4.43
1.3.2	Dana darurat							
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	294.85	332.36	321.82	419.35	428.87	610.10	84.38
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus			20.72	364.40	293.70	425.12	561.48
1.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	48.90	223.58	81.44	84.07	131.47	751.22	164.92

Sumber : Data sudah diolah, DPKAD dan Bappeda Kota Bandung.
)* Laporan Realisasi APBD T.A 2013 (unaudited).

Rata-rata pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota Bandung tahun 2008-2013 sebesar 16,8 persen. Dana perimbangan, meskipun kontribusinya besar, tetapi rata-rata pertumbuhan pertahun adalah yang paling kecil, yaitu 6,1 persen. PAD Kota Bandung mulai tahun 2011 naik cukup tinggi. Penyebabnya bukan pola normal pertumbuhan PAD, tetapi adanya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Bawah Tanah yang kemudian masuk sebagai PAD Pemerintah Kota Bandung. Bila PAD dihitung dengan tambahan tersebut, maka rata-rata optimistis yang diperoleh dari pertumbuhan PAD tahun 2008-2013 sangat tinggi, yaitu 37.98 persen per tahun. Namun, bila pertumbuhan PAD sesungguhnya (tanpa tambahan BPHTB dan pajak ABT), dihitung, akan diperoleh angka rata-rata pertumbuhannya 17.7%.

Kontribusi terbesar PAD Kota Bandung bersumber dari pajak daerah, yaitu rata-rata 45.4 persen tahun 2008-2013. Sumber PAD lainnya adalah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 28.8 persendan dari retribusi daerah yang memberikan kontribusi sekitar 21.97 persen.

Struktur pendapatan ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan sangat banyak yang berasal dari pemerintah (APBN), atau secara umum APBD Kota Bandung masih belum mandiri. Namun demikian, sebagaimana sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, berdasarkan rata-rata kontribusi PAD seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, maka kontribusi PAD Kota Bandung terhadap APBD-nya tergolong tinggi. Artinya banyak sekali daerah lain yang jauh tidak mandiri dari

sisi sumber pendapatan. Salah satu kelemahan dari struktur pendapatan seperti ini adalah relatif tingginya ketidakpastian pendapatan dalam rangka perencanaan anggaran. Selain itu aliran dana perimbangan juga tidak sepenuhnya dalam kendali Pemerintah Kota Bandung, sehingga mungkin terjadi keterlambatan proses pencairan dan lain sebagainya. Sebaliknya bila sumber pendapatan terbesar berasal dari PAD, maka proyeksi pendapatan akan lebih dapat diprediksi dengan baik, sehingga mempermudah perencanaan program dan kegiatan.

3.1.1.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

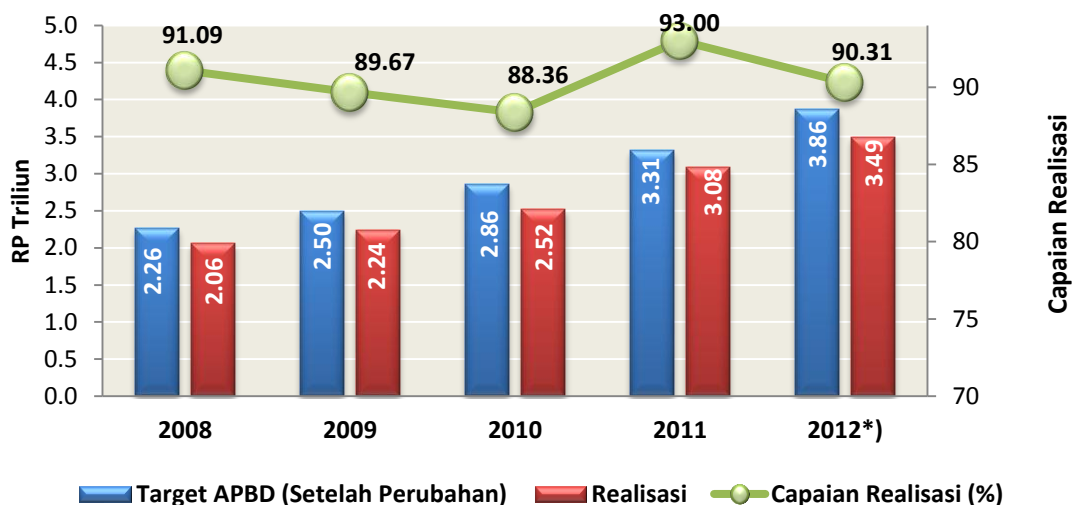
Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2008-2013, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selama periode Tahun Anggaran 2008-2013, dari rata-rata target belanja daerah sebesar Rp. 3.257.748.497.210,66 terealisasi sebesar Rp. 2.903.365.627.690,09; secara lebih rinci disajikan pada Tabel 3.22.

Tabel 3-22
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2008	2,260,409,191,308.58	2,058,920,582,037.55	91.09	(201,488,609,271.03)
2009	2,498,896,793,515.08	2,240,739,995,151.00	89.67	(258,156,798,364.08)
2010	2,855,133,555,022.31	2,522,680,816,553.00	88.36	(332,452,738,469.31)
2011	3,312,196,925,814.23	3,080,347,679,003.00	93.00	(231,849,246,811.23)
2012	3,864,609,570,886.63	3,490,035,513,075.00	90.31	(374,574,057,811.63)
2013)*	4,755,244,946,717.15	4,027,469,180,321.00	84.70	(727,775,766,396.15)
Rata-rata	3,257,748,497,210.66	2,903,365,627,690.09		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012
 *) Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).



Grafik 3-7
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2008-2012

Belanja daerah terbagi ke dalam dua kelompok belanja yaitu: (a) Belanja Tidak Langsung (BTL) dan (b) Belanja Langsung (BL).

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri atas: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, dan (f) Belanja Tidak Terduga. Selama periode Tahun Anggaran 2008-2013 terealisasi rata-rata sebesar Rp. 1.811.676.070.174,29 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.736.497.705.951,50 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.23.

Tabel 3-23
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Bandung
Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2008	1,370,808,728,432.58	1,343,588,341,137.00	98.01	(27,220,387,295.58)
2009	1,391,773,886,383.08	1,360,170,658,221.00	97.73	(31,603,228,162.08)
2010	1,653,598,765,229.00	1,629,163,528,011.00	98.52	(24,435,237,218.00)
2011	1,919,949,172,763.64	1,863,118,078,887.00	97.04	(56,831,093,876.64)
2012*)	2,167,730,394,921.30	2,106,950,224,766.00	97.20	(60,780,170,155.30)
2013 **)	2,366,195,473,316.15	2,115,995,404,687.00	89.43	(250,200,068,629.15)
Rata-rata	1,811,676,070,174.29	1,736,497,705,951.50		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012
 *) Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).

Target Belanja Pegawai Kota Bandung selama periode Tahun Anggaran 2008-2013 rata-rata sebesar Rp. 1.500.449.026.764,37 dengan realisasi sebesar Rp. 1.434.463.254.575,00; sebagaimana disajikan pada Tabel 3.24.

Tabel 3-24
Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Bandung
Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2008	1,066,497,068,111.58	1,041,338,897,551.00	97.64	(25,158,170,560.58)
2009	1,236,629,718,973.55	1,178,899,694,036.00	95.33	(57,730,024,937.55)
2010	1,366,453,235,354.41	1,329,586,834,892.00	97.30	(36,866,400,462.41)
2011	1,577,168,366,032.64	1,521,208,137,857.00	96.45	(55,960,228,175.64)
2012	1,797,076,131,238.92	1,744,687,794,230.00	97.08	(52,388,337,008.92)
2013)*	1,958,869,640,875.15	1,791,058,168,884.00	91.43	(167,811,471,991.15)
Rata-rata	1,500,449,026,764.37	1,434,463,254,575.00		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012
 *) Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).

Target Belanja Subsidi, selama periode Tahun Anggaran 2008-2013 rata-rata terealisasi Rp. 59.217.052.916,67 dari target sebesar Rp. 59.217.052.916,67; seperti disajikan pada Tabel 3.25.

Tabel 3-25
Target dan Realisasi Belanja Subsidi Kota Bandung
Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2008	50,495,000,000.00	50,495,000,000.00	100	-
2009	44,125,500,000.00	44,125,500,000.00	100	-
2010	45,125,500,000.00	45,125,500,000.00	100	-
2011	57,625,500,000.00	57,625,500,000.00	100	-
2012	62,055,500,000.00	62,055,500,000.00	100	-
2013)*	95,875,317,500.00	95,875,317,500.00	100	
Rata-rata	59,217,052,916.67	59,217,052,916.67		

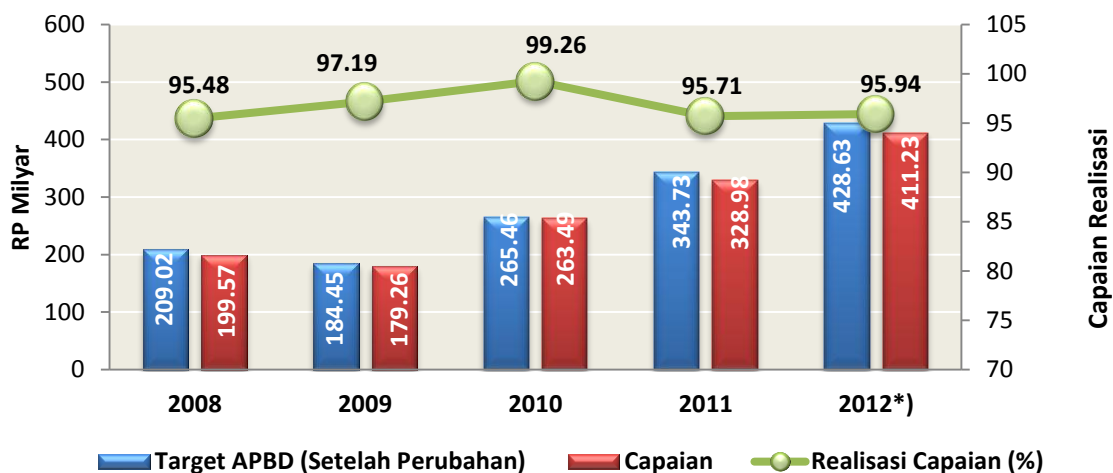
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012
 *) Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).

Rata-rata target Belanja Hibah selama periode Tahun Anggaran 2008-2013 adalah sebesar Rp. 285.302.107.431,00 dengan realisasi sebesar Rp. 265.029.655.440,33 (tabel 3.26).

Tabel 3-26
Target dan Realisasi Belanja Hibah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2008	209,023,734,391.00	199,572,928,863.00	95.48	(9,450,805,528.00)
2009	184,447,728,500.00	179,256,645,174.00	97.19	(5,191,083,326.00)
2010	265,459,489,100.00	263,490,455,297.00	99.26	(1,969,033,803.00)
2011	343,734,080,000.00	328,978,667,923.00	95.71	(14,755,412,077.00)
2012	428,630,606,304.00	411,234,958,796.00	95.94	(17,395,647,508.00)
2013)*	280,517,006,291.00	207,644,276,589.00	74.02	(72,872,729,702.00)
Rata-rata	285,302,107,431.00	265,029,655,440.33		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012
 *) Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).



Grafik 3-8
Target dan Realisasi Belanja Hibah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2008-2012

Selama periode Tahun Anggaran 2008-2013, Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp. 261.511.772.840,00 dari target sebesar Rp. 257.905.973.689,00. Tahun Anggaran 2012, target dan realisasinya mengalami penurunan yang cukup signifikan disebabkan berlakunya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 3-27
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Bandung
Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2008	104,641,686,960.00	103,051,747,400.00	98.48	(1,589,939,560.00)
2009			-	-
2010	80,218,272,441.00	79,607,119,939.00	99.24	(611,152,502.00)
2011	55,108,227,559.00	54,911,523,750.00	99.64	(196,703,809.00)
2012	468,585,880.00	383,850,600.00	81.92	(84,735,280.00)
2013)*	21,075,000,000.00	19,951,732,000.00	94.67	(1,123,268,000.00)
Jumlah	261,511,772,840.00	257,905,973,689.00		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012

*) Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).

Target Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota selama periode Tahun Anggaran 2008-2013 Rp. 8.078.544.882,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.461.380.642,00, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.28.

Tabel 3-28
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2008			0.00	-
2009	5,635,000,000.00	4,019,250,000.00	71.33	(1,615,750,000.00)
2010			0.00	-
2011	814,272,441.00	814,040,764.00	99.97	(231,677.00)
2012	814,272,441.00	814,044,939.00	99.97	(227,502.00)
2013)*	815,000,000.00	814,044,939.00	99.88	(955,061.00)
jumlah	8,078,544,882.00	6,461,380,642.00		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012

*) Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).

Target Belanja Tidak Terduga (BTT) selama periode Tahun Anggaran 2008-2013 sebesar Rp. 29.203.507.035,91 dengan realisasi sebesar Rp. 6.652.373.259,00. Penganggaran belanja tidak terduga tidak dapat diprediksi dan diluar kendali pemerintah daerah. Belanja ini merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa, bersifat berjaga-jaga. Data selengkapnya disajikan Tabel di bawah ini.

Tabel 3-29
Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2008	6,701,901,550.00	-	-	(6,701,901,550.00)
2009	3,485,515,518.53	428,275,000.00	12.29	(3,057,240,518.53)
2010	2,820,054,870.00	2,349,725,300.00	83.32	(470,329,570.00)
2011	4,459,090,340.00	2,459,090,340.00	55.15	(2,000,000,000.00)
2012	2,693,436,107.38	763,417,844.00	28.34	(1,930,018,263.38)
2013)*	9,043,508,650.00	651,864,775.00	7.21	(8,391,643,875.00)
jumlah	29,203,507,035.91	6,652,373,259.00		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012

*) Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).

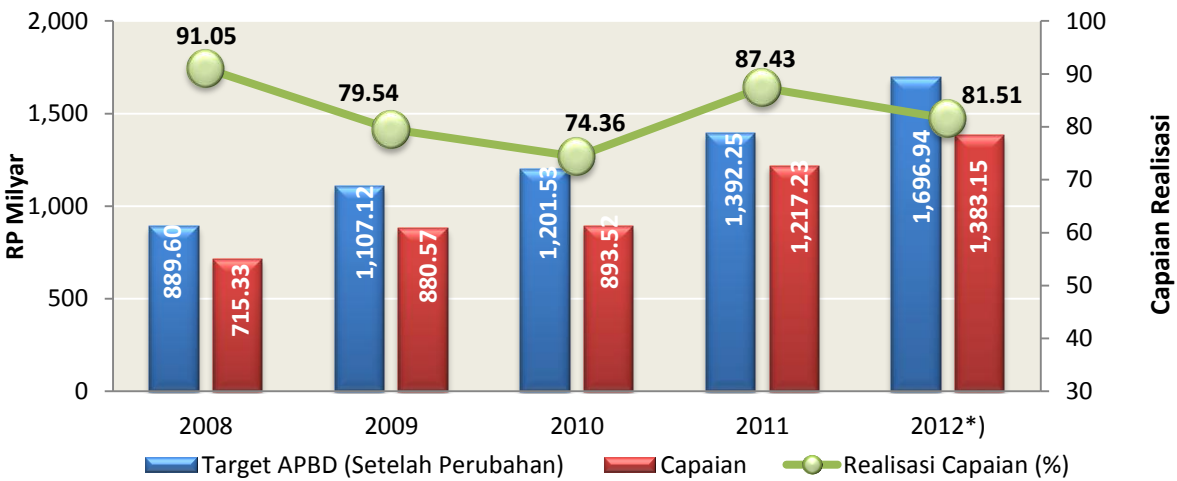
2. Belanja Langsung (BL)

Belanja Langsung terdiri dari: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, serta (c) Belanja Modal. Selama periode Tahun Anggaran 2008-2013, rata-rata realisasi Belanja Langsung secara akumulatif tidak mencapai target, yaitu sebesar Rp. 1.446.082.427.036,37 dari target yang telah ditentukan sebesar Rp. 1.166.878.647.069,26 (tabel 3.30).

Tabel 3-30
Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota Bandung
Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	889,600,462,876.00	715,332,240,900.55	80.41	(174,268,221,975.45)
2009	1,107,122,907,132.00	880,569,336,930.00	79.54	(226,553,570,202.00)
2010	1,201,534,789,793.31	893,517,288,542.00	74.36	(308,017,501,251.31)
2011	1,392,247,753,050.59	1,217,229,600,116.00	87.43	(175,018,152,934.59)
2012	1,696,939,175,965.33	1,383,149,640,293.00	81.51	(313,789,535,672.33)
2013)*	2,389,049,473,401.00	1,911,473,775,634.00	80.01	(477,575,697,767.00)
Rata-rata	1,446,082,427,036.37	1,166,878,647,069.26		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012
)* Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).



Grafik 3-9
Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota Bandung
Tahun Anggaran 2008-2012

Rata-rata target Belanja Pegawai pada Belanja Langsung selama periode Tahun Anggaran 2008-2013 sebesar Rp. 29.562.008.286,47 dengan realisasi sebesar Rp. 108.913.936.882,50, disajikan Tabel 3.31.

Tabel 3-31
Target dan Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung
Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	83,761,662,580.00	62,738,941,062.00	74.90	(21,022,721,518.00)
2009	160,625,476,609.00	124,378,142,618.00	77.43	(36,247,333,991.00)
2010	106,612,786,536.81	91,072,052,173.00	85.42	(15,540,734,363.81)
2011	118,960,363,609.00	102,878,881,747.00	86.48	(16,081,481,862.00)
2012	124,008,137,050.00	110,083,025,846.00	88.77	(13,925,111,204.00)
2013)*	183,403,623,334.00	162,332,577,849.00	88.51	(21,071,045,485.00)
Rata-rata	29,562,008,286.47	108,913,936,882.50		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012
)* Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).

Rata-rata target Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung selama periode Tahun Anggaran 2008-2013 sebesar Rp. 516.247.143.629,17 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 453.712.018.425,26; disajikan Tabel 3.32.

Tabel 3-32
Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kota Bandung
Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	371,126,564,614.00	307,432,477,465.55	82.84	(63,694,087,148.45)
2009	419,218,937,549.00	365,202,886,239.00	87.12	(54,016,051,310.00)
2010	445,215,390,739.00	396,745,753,526.00	89.11	(48,469,637,213.00)
2011	552,259,653,801.00	502,268,827,820.00	90.95	(49,990,825,981.00)
2012	533,184,303,248.00	466,326,408,024.00	87.46	(66,857,895,224.00)
2013)*	776,478,011,824.00	684,295,757,477.00	88.13	(92,182,254,347.00)
Rata-rata	516,247,143,629.17	453,712,018,425.26		

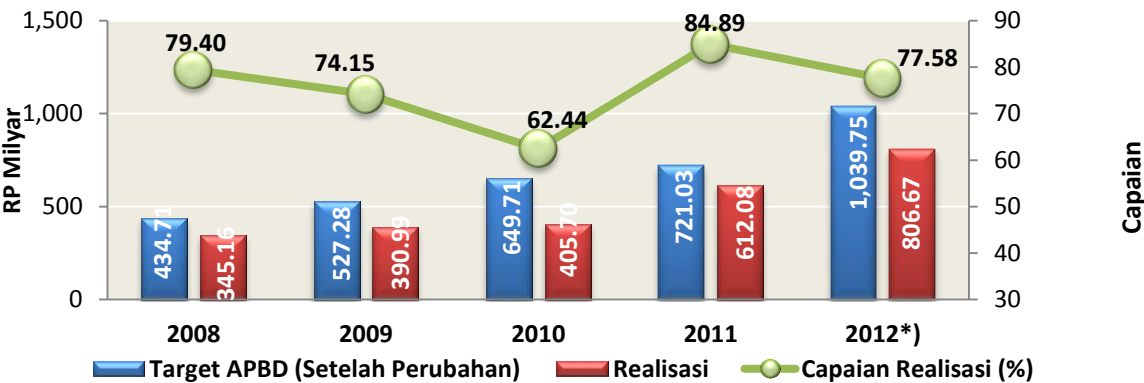
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008s.d. 2012
)* Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).

Rata-rata Belanja Modal pada Belanja Langsung, selama periode Tahun Anggaran 2008-2013 terealisasi Rp. 800.273.275.120,71 dari target sebesar Rp. 604.240.163.994,83 disajikan Tabel 3.33.

Tabel 3-33
Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Bandung T.A. 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	434,712,235,682.00	345,160,822,373.00	79.40	(89,551,413,309.00)
2009	527,278,492,974.00	390,988,308,073.00	74.15	(136,290,184,901.00)
2010	649,706,612,517.40	405,699,482,843.00	62.44	(244,007,129,674.40)
2011	721,027,735,640.59	612,081,890,549.00	84.89	(108,945,845,091.59)
2012	1,039,746,735,667.26	806,665,039,823.00	77.58	(233,081,695,844.26)
2013)*	1,429,167,838,243.00	1,064,845,440,308.00	74.51	(364,322,397,935.00)
Rata-rata	800,273,275,120.71	604,240,163,994.83		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012
*) Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).



Grafik 3-10
Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Bandung
Tahun Anggaran 2008-2012

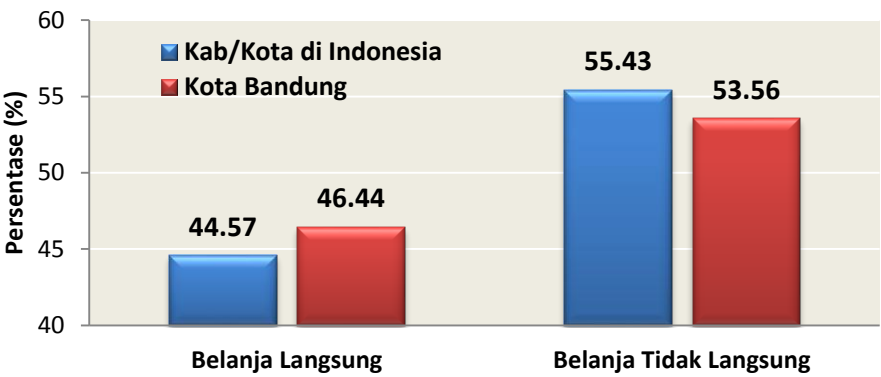
Bila struktur belanja Pemerintah Kota Bandung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Indonesia, menunjukkan bahwa Belanja Langsung (44,57%) umumnya lebih kecil dari pada Belanja Tidak Langsung (55,43%).

Tabel 3-34
Struktur Pembelanjaan Kabupaten/Kota lain di Indonesia dan Kota Bandung Tahun 2010-2012 (%)

Wilayah	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung
Kab/Kota di Indonesia	44,57	55,43
Kota Bandung	46,44	53,56

Sumber: Kementerian Keuangan (data diolah)

Dalam sudut pandang alokasi anggaran, kondisi Kota Bandung relatif lebih baik dibandingkan dengan angka nasional, karena persentase belanja langsungnya relatif lebih besar daripada rata-rata nasional.



Grafik 3-11
Struktur Pembelanjaan Kabupaten/Kota lain di Indonesia dan Kota Bandung Tahun 2010-2012 (%)

3.1.1.3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan antara lain berasal dari: (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), (b) koreksi (*contra post*), (c) Pencairan Dana Cadangan, (d) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (e) Penerimaan Pinjaman Daerah, (f) Penerimaan kembali pemberian pinjaman, (g) penerimaan piutang daerah. Selama periode Tahun Anggaran 2008-2013 terdiri dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), Koreksi (*contra post*), dan Pencairan Dana Cadangan. Rata-rata target penerimaan Pembiayaan selama periode Tahun Anggaran 2008-2013 sebesar Rp. 328.689.864.647,41

sedangkan realisasinya mencapai Rp. 327.213.219.574,41 seperti disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 3-35
Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	315,856,408,627.45	313,356,408,627.45	99.2085	(2,500,000,000.00)
2009	276,159,742,488.00	274,655,659,156.00	99.45536	(1,504,083,332.00)
2010	374,969,409,630.00	372,498,672,418.00	99.34108	(2,470,737,212.00)
2011	278,945,180,269.00	276,560,130,375.00	99.14498	(2,385,049,894.00)
2012	293,759,835,532.00	293,759,835,532.00	100	-
2013)*	432,448,611,338.00	432,448,611,338.00	100	-
Rata-rata	328,689,864,647.41	327,213,219,574.41		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012
 *) Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).

Realisasi SiLPA, selama periode Tahun Anggaran 2008-2013 Rp. 2.343.957.883.723,20 disajikan pada Tabel 3.36.

Tabel 3-36
Rincian Estimasi dan Realisasi SiLPA Kota Bandung T.A. 2008-2013

Tahun Anggaran	Estimasi Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	-	258,659,742,488.20	-	258,659,742,488.20
2009	-	372,498,672,418.00	-	372,498,672,418.00
2010	-	276,445,180,269.00	-	276,445,180,269.00
2011	-	293,759,835,532.00	-	293,759,835,532.00
2012	-	432,448,611,338.00	-	432,448,611,338.00
2013)*		710,145,841,678.00		710,145,841,678.00
Jumlah		2,343,957,883,723.20		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012
 *) Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).

Target dan realisasi Pencairan Dana Cadangan hanya terdapat pada Tahun Anggaran 2008, yaitu sebesar Rp. 15.000.000.000,00 disajikan pada tabel 3.37.

Tabel 3-37
Rincian Target dan Realisasi Pencairan Dana Cadangan
Kota Bandung Anggaran 2008-2012

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2008	15.000.000.000	15.000.000.000		
2009				
2010				
2011				
2012				
2013)*				
Jumlah	15.000.000.000	15.000.000.000		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2012
)* Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kota Bandung tahun 2008-2013 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3-38
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Bandung

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013)*	Rata-rata pertumbuhan
1	Aset							
1.1	Aset lancar							
1.1.1	kas	259,738,042,197.00	372,610,444,949.00	276,658,254,033.00	294,307,063,342.00	434,110,879,489.00	711,659,388,688.00	27.10
1.1.2	investasi jangka pendek	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	piutang	21,095,603,346.00	21,609,141,206.44	22,563,726,571.44	25,821,674,865.44	26,062,343,766.44	120,533,136,067.84	76.94
1.1.4	piutang lainnya	10,423,362,485.00	34,541,616,665.00	29,288,454,860.00	36,443,488,161.00	39,122,138,160.00	51,699,854,125.00	56.02
1.1.5	persediaan	35,952,758,426.00	37,035,938,522.64	46,715,334,851.61	43,957,995,142.56	41,288,993,356.66	39,579,295,188.20	2.61
1.1.6	biaya dibayar dimuka	-	-	-	1,581,079,956.50	922,443,016.30	1,061,735,920.50	(5.31)
	jumlah aset lancar	327,209,766,454.00	465,797,141,343.08	375,225,770,316.05	402,111,301,467.50	541,506,797,788.40	924,533,409,989.54	27.09
1.2	investasi jangka panjang							-
1.2.1	investasi non permanen	-	-	-	345,813,510.00	366,863,510.00	368,630,160.00	1.31
1.2.2	investasi permanen	143,545,668,351.00	941,157,205,661.81	1,117,196,253,372.00	1,135,854,512,913.50	828,377,528,273.50	831,432,473,331.94	109.86
	jumlah investasi jangka panjang	143,545,668,351.00	941,157,205,661.81	1,117,196,253,372.00	1,136,200,326,423.50	828,744,391,783.50	831,801,103,491.94	109.87
1.3	aset tetap							-
1.3.1	tanah	15,137,741,943,541.00	15,233,323,546,311.00	15,340,861,335,631.00	15,087,000,175,761.00	15,299,334,186,386.00	15,375,587,131,286.00	0.32
1.3.2	peralatan dan mesin	330,943,873,833.00	375,706,619,479.00	439,482,484,381.00	524,905,269,938.90	643,051,764,438.90	825,029,062,298.90	20.15
1.3.3	gedung dan bangunan	1,198,480,881,160.00	1,377,976,932,908.00	1,374,001,072,835.00	1,454,719,530,057.00	1,566,044,947,323.00	1,692,797,330,256.00	7.26
1.3.4	jalan,jaringan dan instalansi	1,282,083,222,729.00	1,351,381,455,166.00	1,478,017,950,402.00	1,637,904,033,306.00	1,775,804,838,181.89	2,109,914,456,788.89	10.57
1.3.5	aset tetap lainnya	19,212,166,739.00	24,174,295,584.00	31,616,493,919.00	53,229,662,506.00	58,650,532,323.00	63,182,301,948.00	28.58
1.3.6	konstruksi dalam pengerjaan	16,550,684,463.00	12,782,978,106.00	135,427,681,403.00	270,139,797,886.00	481,950,858,855.00	811,945,942,448.00	236.60
1.3.7	akumulasi penyusutan	-	-	-	-	-	-	-
	jumlah aset tetap	17,985,012,772,465.00	18,375,345,827,554.00	18,799,407,018,571.00	19,027,898,469,454.90	19,824,837,127,507.80	20,878,456,225,025.80	3.04
1.4	dana cadangan							-
1.4.1	dana cadangan	-	-	-	-	-	-	-
	jumlah dana cadangan	-	-	-	-	-	-	-
1.5	aset lainnya							-
1.5.1	tagihan piutang penjualan angsuran	303,840,490.00	710,772,578.00	450,743,428.00	408,844,428.00	384,844,428.00	384,844,428.00	16.44
1.5.2	tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	491,028,888.00	671,128,888.00	671,128,888.00	671,128,888.00	671,128,888.00	127,920,000.00	(8.85)
1.5.3	kemitraan dengan pihak ketiga	233,470,129,000.00	-	-	384,685,700,000.00	384,685,700,000.00	384,685,700,000.00	(20.00)
1.5.4	aset tidak berwujud	-	-	-	471,321,832.00	662,539,732.00	1,957,545,890.00	47.21
1.5.5	aset lain-lain	2,786,752,348.00	5,286,752,348.00	5,286,752,348.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	7.40
1.5.6	aset rusak berat/ proses penghapusan	-	-	-	7,498,407,466.10	12,001,291,461.10	14,394,227,511.10	16.00
	jumlah aset lainnya	237,051,750,726.00	6,668,653,814.00	6,408,624,664.00	396,235,402,614.10	400,905,504,509.10	404,050,237,829.10	1,196.74
	jumlah aset	18,692,819,957,996.00	19,788,968,828,372.90	20,298,237,666,923.10	20,962,445,499,960.00	21,595,993,821,588.80	23,038,840,976,336.40	4.28
2	kewajiban							-
2.1	kewajiban jangka pendek							-
2.1.1	utang perhitungan pihak ketiga	114,950,106.00	25,785,650.00	31,386,462.00	22,375,876.00	3,483,504,218.00	1,455,429,224.00	3,065.07

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013)*	Rata-rata pertumbuhan
2.1.2	utang bunga	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	utang pajak	-	-	-	-	782,500.00	-	(20.00)
2.1.4	bagian lancar utang jangka panjang	545,314,683.00	493,698,243.00	-	-	-	-	(21.89)
2.1.5	pendapatan diterima dimuka	-	-	-	10,250,459,278.00	13,541,452,816.00	15,658,631,071.33	9.55
2.1.6	utang jangka pendek lainnya	15,596,394,927.76	18,617,505,422.00	5,249,139,745.00	24,899,553,020.00	10,190,485,569.00	37,394,923,141.00	105.96
	jumlah kewajiban jangka pendek	16,256,659,716.76	19,136,989,315.00	5,280,526,207.00	35,172,388,174.00	27,216,225,103.00	54,508,983,436.33	117.81
2.2	kewajiban jangka panjang							-
2.2.1	utang dalam negeri	421,287,033.00	-	-	-	-	-	(20.00)
2.2.2	utang luar negeri	-	-	-	-	-	-	-
	jumlah kewajiban jangka panjang	421,287,033.00	-	-	-	-	-	(20.00)
	jumlah kewajiban	16,677,946,749.76	19,136,989,315.00	5,280,526,207.00	35,172,388,174.00	27,216,225,103.00	54,508,983,436.33	117.22
3	ekuitas dana							-
3.1	ekuitas dana lancer							-
3.1.1	sisa lebih pembayaran anggaran (SILPA)	259,570,311,416.00	372,535,731,502.00	276,560,130,375.00	293,759,835,532.00	432,459,148,638.00	710,203,959,464.00	27.08
3.1.2	cadangan untuk piutang	31,518,965,831.00	56,150,757,871.44	51,852,181,431.44	62,265,163,026.44	65,184,481,926.44	172,242,382,792.84	51.90
3.1.3	cadangan untuk persediaan	35,952,758,426.00	37,035,938,522.64	46,715,334,851.61	43,957,995,142.56	41,288,993,356.66	39,569,902,588.20	2.60
3.1.4	dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	(16,141,709,610.76)	(19,111,203,665.00)	(5,249,139,745.00)	(34,899,492,630.00)	(25,785,244,423.00)	(53,053,554,212.33)	118.07
3.1.5	pendapatan yang ditangguhkan	52,780,675.00	48,927,797.00	66,737,196.00	274,332,266.00	220,750,171.00	0.00	44.13
3.1.6	selisih kasda	-	-	-	-	-	0.00	-
3.1.7	cadangan untuk biaya dibayar dimuka	-	-	-	1,581,079,956.50	922,443,016.30	1,061,735,920.50	(5.31)
	jumlah ekuitas dana lancer	310,953,106,737.24	446,660,152,028.08	369,945,244,109.05	366,938,913,293.50	514,290,572,685.40	870,024,426,553.21	27.00
3.2	ekuitas dana investasi							-
3.2.1	diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	143,545,668,351.00	941,157,205,661.81	1,117,196,253,372.00	1,136,200,326,423.50	828,744,391,783.50	831,801,103,491.94	109.87
3.2.2	diinvestasikan dalam aset tetap	17,985,012,772,465.00	18,375,345,827,554.00	18,799,407,018,571.00	19,027,898,469,454.90	19,824,837,127,507.80	20,878,456,225,025.80	3.04
3.2.3	diinvestasikan dalam aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan)	237,051,750,726.00	6,668,653,814.00	6,408,624,664.00	396,235,402,614.10	400,905,504,509.10	404,050,237,829.10	1,196.74
3.2.4	dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang	(421,287,033.00)	-	-	-	-	-	(20.00)
	Jumlah ekuitas dana investasi	18,365,188,904,509.00	19,323,171,687,029.80	19,923,011,896,607.00	20,560,334,198,492.50	21,054,487,023,800.40	22,114,307,566,346.80	3.79
3.3	ekuitas dana cadangan							-
3.3.1	diinvestasikan dalam dana cadangan	-	-	-	-	-	-	-
	jumlah ekuitas dana cadangan	-	-	-	-	-	-	-
	jumlah ekuitas dana	18,676,142,011,246.20	19,769,831,839,057.90	20,292,957,140,716.10	20,927,273,111,786.00	21,568,777,596,485.80	22,984,331,992,900.00	4.23
	jumlah kewajiban dan ekuitas dana	18,692,819,957,996.00	19,788,968,828,372.90	20,298,237,666,923.10	20,962,445,499,960.00	21,595,993,821,588.80	23,038,840,976,336.40	4.28

Sumber: data diolah, DPKAD dan Bappeda Kota Bandung.

)* Laporan Neraca Pemerintah Kota Bandung T.A 2013 (unaudited)

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya. Tahun 2013, Kota Bandung memiliki aset senilai Rp. 23 Trilyun, dengan tingkat pertumbuhan 4.28 persen per tahun. Jumlah aset terbesar berupa aset tetap, jumlah tahun 2013 mencapai Rp. 20.9 Trilyun dan rata-rata tumbuh 3.04 persen per tahun. Aset tetap ini meliputi 91.7 persen dari seluruh aset Pemerintah Kota Bandung.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung tahun 2013 adalah sebesar Rp. 54.5 Milyar. Dari tahun 2008 hingga 2013, jumlah kewajiban relatif fluktuatif, yaitu terendah tahun 2010 dan tertinggi tahun 2013. Karena itu nilai pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kota Bandung tahun 2013 mencapai Rp. 22,98 Trilyun, dan mengalami pertumbuhan dari 2008-2013 dengan rata-rata 4,23 persen.

Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui perhitungan

rasio. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas.

Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Bandung dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kota Bandung mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun demikian, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin menurun. Nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam melunasi kewajibannya.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Kota Bandung menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kota Bandung setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Tabel 3-39
Analisis Rasio Keuangan Kota Bandung

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013
		%	%	%	%
1	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	7,105.8	1,143.3	1,989.7	1,696.11
2	Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	6,221.2	1,018.3	1,837.9	1,623.50
3	Rasio total hutang terhadap total asset	0.03	0.17	0.13	0.24

Sumber: data diolah, DPKAD dan Bappeda Kota Bandung.

Current ratio dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kota Bandung adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset juga sangat kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut

menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Bandung relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan melakukan peminjaman dana untuk pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang. Hal ini merupakan peluang baik yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelayanan kepada publik. Diantara penyebab dari kapabilitas keuangan tersebut adalah karena Kota Bandung termasuk Pemerintah Daerah yang mampu mengumpulkan PAD dalam jumlah yang sangat besar di Indonesia.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2009-2013

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Namun dalam penyusunan data yang digunakan terkait dengan APBD Tahun 2009-2012 adalah data APBD yang sudah diaudit oleh BPK, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD. Sedangkan untuk APBD Tahun 2013 belum diaudit oleh BPK, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau dua bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK.

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2009-2013 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Selama Periode Tahun Anggaran 2009-2013, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; dan (3) peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan menerapkan sistem pembayaran pajak secara *on-line* dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
2. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
3. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Teknis dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
6. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2009-2013 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2009-2013 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain:

1. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan social;
2. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan;
3. Anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan KUKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur;
4. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
5. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*) dan pemenuhan program/kegiatan yang berorientasi kepada standar pelayanan minimal (SPM);

6. Pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Bandung yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;
7. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
 - c) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - d) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 - e) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Struktur APBD selain terdapat komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi: (a) penerimaan pembiayaan, dan (b) pengeluaran pembiayaan.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi pengeluaran yang digunakan untuk belanja aparatur cenderung menurun. Tahun 2010, proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran mencapai 56.93 persen, turun menjadi 52.56 persen

tahun 2011, dan turun lagi menjadi 52.41 persen tahun 2012 (tabel 3.40). Kondisi ini sepintas memperlihatkan bahwa APBD Kota Bandung masih belum memberikan pelayanan yang optimal bagi publik karena sebagian besar APBD Kota Bandung digunakan untuk belanja pegawai. Perlu dipahami bahwa belanja pegawai sebagian besar untuk belanja aparatur bidang pendidikan dan kesehatan.

Tabel 3-40
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan
Aparatur Kota Bandung

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur(Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	2010	1,443,829,301,949.00	2,536,213,852,863.00	56.93
2	2011	1,628,324,492,524.00	3,098,096,818,748.00	52.56
3	2012	1,848,859,761,724.00	3,528,004,633,794.00	52.41
4	2013)*	2,133,756,249,524.00	4,054,391,717,871.00	52.63

Sumber : APBD, data diolah, DPKAD dan Bappeda Kota Bandung.
)* Laporan Realisasi APBD T.A 2013 (unaudited)

Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada data tersebut diatas diperoleh dari perhitungan tabel Realisasi belanja pemenuhan aparatur di bawah ini:

Tabel 3-41
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013)*
A.	Belanja Tidak Langsung	1,238,514,782,719.00	1,414,247,757,170.00	1,618,425,421,258.00	1,786,507,981,640.00
1	Belanja Gaji dan tunjangan	1,041,433,073,067.00	1,241,391,631,592.00	1,429,561,900,939.00	1,540,680,933,757.00
2	Belanja Tambahan Penghasilan	162,547,134,889.00	136,775,787,787.00	162,581,463,589.00	201,552,244,940.00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4,380,000,000.00	4,773,120,000.00	4,773,120,000.00	4,716,000,000.00
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah	30,154,574,763.00	31,307,217,791.00	21,508,936,730.00	39,558,802,943.00
B.	Belanja Langsung	205,314,519,230.00	214,076,735,354.00	230,434,340,466.00	347,248,267,884.00
1	Belanja Honorarium PNS	64,601,740,755.00	55,695,442,082.00	63,802,963,116.00	68,997,809,039.00
2	Belanja uang Lembur	5,728,767,500.00	6,853,839,955.00	8,416,523,125.00	10,327,361,523.00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2,284,744,500.00	814,100,000.00	2,106,392,520.00	1,578,843,040.00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	9,967,939,700.00	12,488,301,900.00	18,568,948,550.00	23,107,859,058.00
5	Belanja premi asuransi kesehatan	1,602,442,005.00	1,510,520,950.00	964,178,210.00	1,219,581,900.00
6	Belanja makan dan minum pegawai	2,357,195,224.00	4,163,153,044.00	2,138,666,616.00	63,095,991,316.00
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	3,684,047,512.00	4,458,195,165.00	4,889,610,829.00	6,518,448,850.00
8	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2,493,157,515.00	3,134,646,560.00	4,988,101,383.00	7,105,115,995.00
9	Belanja perjalanan dinas	39,187,909,124.00	62,572,649,839.00	48,083,597,226.00	61,802,681,097.00
10	Belanja perjalanan pindah tugas	-	-	-	300,000.00
11	Belanja pemulangan pegawai	-	-	-	-
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan perlengkapan dll)	73,406,575,395.00	62,385,885,859.00	76,475,358,891.00	103,494,276,066.00
	TOTAL	1,443,829,301,949.00	1,628,324,492,524.00	1,848,859,761,724.00	2,133,756,249,524.00

Sumber : APBD, data diolah, DPKAD dan Bappeda Kota Bandung.
)* Laporan Realisasi APBD T.A 2013 (unaudited)

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tabel 3-42
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun 2010 s/d 2013

No	Tahun Anggaran	Pendapatan	Belanja
		Realisasi	Realisasi
1	2010	2,440,160,360,714.00	2,522,680,816,553.00
2	2011	3,115,296,523,905.00	3,080,347,679,003.00
3	2012	3,666,693,409,600.00	3,490,035,513,075.00
4	2013)*	4,332,088,948,211.00	4,027,469,180,321.00
	JUMLAH	15,956,706,222,155.00	15,361,273,144,103.00

Sumber : APBD, data diolah, DPKAD dan Bappeda Kota Bandung.
)* Laporan Realisasi APBD T.A 2013 (unaudited)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah realisasi pendapatan dari tahun 2010 sampai dengan 2013 terus meningkat,walaupun dengan belanja yang mengalami peningkatan juga. Sebagai catatan tahun 2010 realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan. Untuk mengetahui defisit riil Kota Bandung dapat dilihat Tabel 3.43.

Tabel 3-43
Defisit Riil Anggaran Kota Bandung (Milyar Rp)

No.	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013)* (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah Dikurangi Realisasi:	2,440,2	3,115,3	3,666,7	4,332,1
2.	Belanja Daerah	2,522,7	3,080,3	3,490,0	4,027,5
3.	PengeluaranPembiayaan Daerah	13,5	17,7	37,9	26,9
	Defisit Riil	(96,1)	17,2	138,7	277,7

Sumber : APBD, data diolah, DPKAD dan Bappeda Kota Bandung.
)* Laporan Realisasi APBD T.A 2013 (unaudited)

Berdasarkan tabel 3.43 ini selama kurun waktu 2010-2013, APBD Kota Bandung mengalami surplus artinya realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah, masing-masing sebesar Rp.17.199.705.157,00; Rp.138.699.313.106,00, dan Rp. 277.697.230.340,00. Namun demikian, tahun 2010 mengalami defisit, yang artinya realisasi pendapatan daerah kurang dari realisasi belanja daerah yakni sebesar Rp. 96.053.492.149,00.

Selanjutnya untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu.

Tabel 3-44
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bandung (Milyar Rp)

No.	Uraian	Proporsi dari defisit riil			
		2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013)* (Rp)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	372,498,672,418.00	276,560,130,375.00	293,759,835,532.00	432,448,611,338.00
2.	Pencairan Dana cadangan	0.00	0.00	0.00	1.00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	15,298,096,935.00	10,328,428,076.00	7,227,067,446.00	58,318,200.00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : APBD, data diolah, DPKAD dan Bappeda Kota Bandung.
)* Laporan Realisasi APBD T.A 2013 (unaudited)

Tabel 3-45
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Bandung

No.	Uraian	(2010)		(2011)		(2012)		(2013))*	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
	Jumlah SILPA	372,5		276,7		293,8		432,5	
a	Pelampauan Penerimaan PAD	25,8		113,3		71,6		35,0	
b	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(112,7)		(23,0)		12,7		39,2	
c	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	70,8		(11,4)		0.33		13,6	
d	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	332,5		231,9		374,6		727,8	
e	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	5,3		35,2		27,2		1,5	
f	Kegiatan lanjutan								

Sumber : APBD, data diolah, DPKAD dan Bappeda Kota Bandung.
)* Laporan Realisasi APBD T.A 2013 (unaudited)

Tabel 3-46
Penutup Defisit Riil Anggaran

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013)*
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	2,440,160,360,714.00	3,115,296,523,905.00	3,666,703,946,900.00	4,332,088,948,211.00
	Dikurangi Realisasi:				
2.	Belanja Daerah	2,522,680,816,553.00	3,080,347,679,003.00	3,490,035,513,075.00	4,027,469,180,321.00
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	13,533,036,310.00	17,749,139,745.00	37,969,120,719.00	26,922,537,550.00
A.	Defisit Riil	(96,053,492,149.00)	17,199,705,157.00	138,699,313,106.00	277,697,230,340.00
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:				
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	372,498,672,418.00	276,560,130,375.00	293,759,835,532.00	432,448,611,338.00
5.	Penerimaan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	372,498,672,418.00	276,560,130,375.00	293,759,835,532.00	432,448,611,338.00
A-B	Sisa Lebih pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	(468,552,164,567.00)	259,360,425,218.00	155,060,522,426.00	710,145,841,678.00

Sumber : Data sudah diolah, DPKAD dan Bappeda Kota Bandung.
)* Laporan Realisasi APBD T.A 2013 (Unaudited)

Dari tabel 3.46 terlihat bahwa periode tahun 2010-2013 Pemerintah Kota Bandung mempunyai surplus riil yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar. Sementara pengeluaran pembiayaan lebih kecil, sehingga pada tahun tersebut surplus riilnya mencapai Rp. 276.445.180.269,00; Rp. 293.759.835.532,00; dan Rp. 432.59.148.638,00. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Bandung cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung.

SILPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berkaitan dengan keberadaan SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif. Bermakna positif Jika SILPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi *overtarget* dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SILPA bermakna

negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah.

SILPA yang terdapat pada APBD Kota Bandung sebagian besar berasal dari tertundanya belanja langsung program dan Kegiatan. Hasil evaluasi terhadap SILPA tersebut diharapkan untuk rencana kedepan jumlah SILPA Kota Bandung dapat diperkecil.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Tabel 3-47
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

		2010	2011	2012	2013)*	Rata-rata pertumbuhan
A.	Belanja tidak langsung	1238514.78	1414247.76	1618425.42	1786507.98	13.00
1	Belanja gaji dan tunjangan	1041433.07	1241391.63	1429561.90	1540680.93	14.04
2	Belanja tambahan penghasilan	162547.13	136775.79	162581.46	201552.24	8.99
3	Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	4380.00	4773.12	4773.12	4716.00	2.59
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	30154.57	31307.22	21508.94	39558.80	18.81
B.	Belanja Langsung	537607.43	763772.74	960624.02	1247911.47	32.58
1	Belanja Honorarium PNS	64601.74	55695.44	63802.96	68997.81	2.97
2	Belanja uang lembur	5728.77	6853.84	8416.52	10327.36	21.71
3	Belanja beasiswa Pendidikan PNS	2284.74	814.10	2106.39	1578.84	23.11
4	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9967.94	12488.30	18568.95	23107.86	32.81
5	Belanja premi asuransi kesehatan	1602.44	1510.52	964.18	583.07	-27.14
6	Belanja makan dan minum pegawai	2357.20	4163.15	2138.67	3044.84	23.45
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	3684.05	4458.20	4889.61	6518.45	21.33

		2010	2011	2012	2013)*	Rata-rata pertumbuhan
8	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2493.16	3134.65	4988.10	7105.12	42.43
9	Belanja perjalanan dinas	39187.91	62572.65	48083.60	61802.68	21.68
10	Belanja perjalanan pindah tugas				0.00	
11	Belanja pemulangan pegawai				0.00	
12	Belanja Modal (kantor, mobil Dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	405699.48	612081.89	806665.04	1064845.44	38.22
	TOTAL	3552244.41	4356041.00	5158098.88	6068838.90	

Sumber: Data diolah, DPKAD dan Bappeda Kota Bandung.
)* Laporan Realisasi APBD T.A 2013 (unaudited).

Tabel 3-48
Tingkat Pertumbuhan Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Bandung

NO	URAIAN	Data Dasar Tahun 2013)* (Milyar Rp.)	Rata-rata pertumbuhan
A.	Belanja tidak langsung	1,584.96	
1	Belanja gaji dan tunjangan	1,540.68	14.04
2	Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	4.72	2.59
3	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	39.56	18.81
4	Belanja Bunga	0.00	0.00
5	Belanja Bagi Hasil	0.00	0.00
B.	Belanja Langsung	81.34	
1	Belanja Honorarium PNS khusus guru dan tenaga medis		
2	Belanja beasiswa Pendidikan PNS	1.58	23.11
3	Belanja Jasa Kantor (Khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	66,54	23.30
4	Belanja Sewa Gedung Kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	5,77	9.53
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	7.45	16.82
7	Pembiayaan Pengeluaran	0.92	
8	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00
9	Pembayaran pokok utang	0.92	-1.81
10	Total Belanja Wajib Dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	1,667,22	

Sumber: Data diolah, DPKAD dan Bappeda Kota Bandung.
)* Laporan Realisasi APBD T.A 2013 (unaudited)

Pertumbuhan belanja periodik prioritas utama untuk belanja tidak langsung Kota Bandung berasal dari belanja gaji dan tunjangan, Belanja Penerimaan Anggota dan pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH, dan belanja pemungutan pajak daerah masing masing mencapai 14.04 persen, 2.59 persen dan 18.81 persen. Sedangkan untuk belanja langsung pertumbuhan paling tinggi berasal dari belanja Belanja Jasa Kantor (Khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya), yaitu sebesar 23.30 persen.

3.3.2. Proyeksi Data

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah, karena akan berkaitan dengan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik. Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun kebelakang.

Adapun proyeksi untuk lima tahun kedepan, meliputi: proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Proyeksi pendapatan

Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan selama lima tahun. Proyeksi pendapatan ini mengacu pada rata-rata pertumbuhan pendapatan dari tahun 2008 sampai dengan 2013. Berdasarkan penghitungan, proyeksi pendapatan untuk tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp. 4,002 Trilyun, dan meningkat menjadi Rp. 4,675 Trilyun pada tahun 2015. Diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2013-2018, pendapatan akan menjadi Rp. 7,466 Trilyun. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Perimbangan.

Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3-49
Proyeksi Pendapatan Daerah (Milyar Rp)

URAIAN PENDAPATAN	PROYEKSI				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH	4,002	4,675	5,460	6,384	7,466
PAD	1253	1502	1784	2123	2523
Pajak Daerah	1,065	1,278	1,533	1,840	2,208
Retribusi Daerah	79	89	99	109	119
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9	10	12	14	16
Lain-lain pendapatan yang sah	100	125	140	160	180

Dana Perimbangan	2049	2333	2656	2971	3464
Dana Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak	319	374	469	540	610
DAU	1670	1890	2110	2340	2750
DAK	60	69	79	91	104
Lain-lain pendapatan yang sah	700	840	1020	1290	1479
Dana bagi hasil pajak provinsi (PKB, BBNKB, Pajak bahan bakar)	400	460	540	690	750
Dana penyesuaian otonomi khusus	300	380	480	600	729

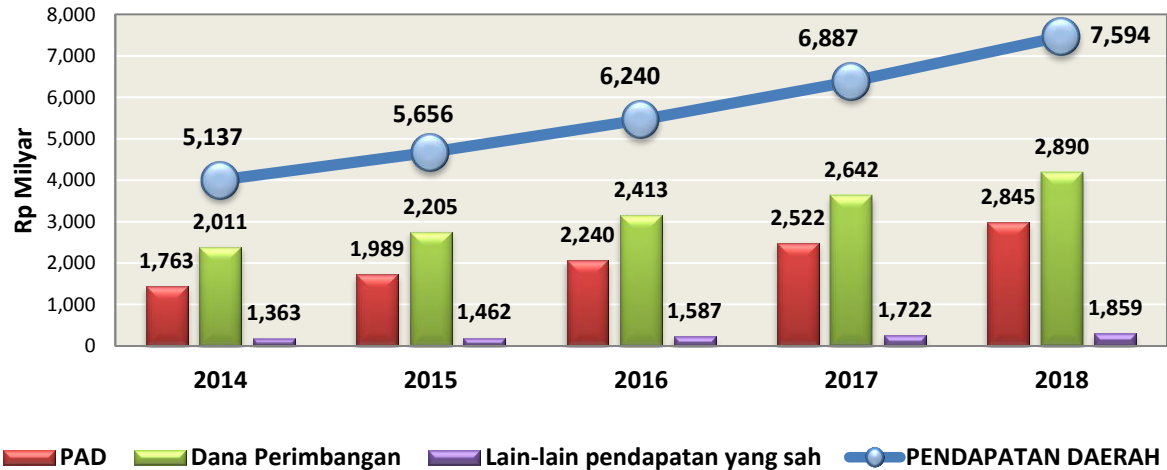
Sumber : APBD, data diolah, DPKAD dan Bappeda Kota Bandung.

Setelah dilakukan penyesuaian dengan APBD 2014 dan dimasukkannya bantuan provinsi, proyeksi pendapatan untuk tahun 2014 menjadi Rp. 5,137 Trilyun, dan meningkat tahun 2015 sebesar Rp. 5,656 Trilyun. Diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2013-2018, pendapatan akan menjadi Rp. 7,594 Trilyun. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Perimbangan.

Tabel 3-50
Proyeksi Pendapatan Daerah setelah disesuaikan dengan APBD
Tahun 2014 (Milyar Rp)

URAIAN PENDAPATAN	PROYEKSI					Rata-rata pertumbuhan
	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	
PENDAPATAN DAERAH	5.137	5.656	6.240	6.887	7.594	10,27
PAD	1.763	1.989	2.240	2.522	2.845	12,71
Pajak Daerah	1.400	1.613	1.850	2.118	2.426	15,32
Retribusi Daerah	138	140	142	144	146	1,42
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19	20	21	22	23	4,89
Lain-lain pendapatan yang sah	206	216	227	238	250	5,00
Dana Perimbangan	2011	2205	2413	2642	2890	9,49
Dana Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak	276	309	346	388	434	12,00
DAU	1672	1821	1983	2159	2352	8,90
DAK	63	75	84	95	104	13,40
Lain-lain pendapatan yang sah	1363	1462	1587	1722	1859	8,07
Hibah	15					
Dana bagi hasil pajak provinsi (PKB, BBNKB, Pajak bahan bakar)	621	696	779	872	977	12,00
Banprov	310	329	348	367	375	4,89
Dana penyesuaian otonomi khusus	417	438	460	483	507	5,00

Sumber : APBD, data diolah, DPKAD dan Bappeda Kota Bandung.



Grafik 3-12
Proyeksi Pendapatan Daerah (Milyar Rp)

2) Proyeksi belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama

Proyeksi Belanja dan pengeluaran **wajib mengikat serta prioritas utama** tahun 2014-2018 diproyeksikan cenderung meningkat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3-51
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama
setelah disesuaikan dengan APBD 2014 (dalam juta Rp.)

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp) 2013	Tingkat pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				2014	2015	2016	2017	2018
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Belanja Tidak Langsung			1,882,930.56	2,169,853.31	2,386,838.64	2,625,522.51	2,888,074.76
1	Belanja gaji dan tunjangan	1,540,680.93	11.13	1,820,962.38	2,091,881.71	2,298,720.20	2,525,960.40	2,775,385.26
2	Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	4,716.00	10.02	6,044.44	6,650.80	7,310.71	8,035.71	8,855.45
3	Insentif pemungutan pajak daerah	39,558.80	16.89	55,923.75	71,320.80	80,807.73	91,526.40	103,834.05
B	Belanja Langsung			116,476.77	117,641.55	118,817.95	120,006.14	121,206.20
1	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1,578.84	19.99	2,243.50	2,696.61	3,230.77	3,876.85	4,650.66
2	Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	66,544.44	0.50	114,233.27	114,944.94	115,587.18	116,129.29	116,555.54
C	Pembiayaan Pengeluaran			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1	Pembentukan dana cadangan			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	Total Belanja Wajib Dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama			2,009,407.34	2,297,494.86	2,515,656.59	2,755,528.65	3,019,280.96

Sumber : APBD, data diolah, DPKAD dan Bappeda Kota Bandung.

Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat, serta prioritas utama diproyeksikan mengalami peningkatan dari Rp. 2.009 Milyar tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 3.019 Milyar tahun 2018. Belanja tidak langsung sangat dominan dalam total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat, serta prioritas utama.



Grafik 3-13
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran
wajib, mengikat serta prioritas utama (Milyar Rp)

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk kurun waktu 5 tahun mendatang, kapasitas kemampuan keuangan daerah Kota Bandung diharapkan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah meningkat dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah. Berdasarkan data dalam kurun waktu dari tahun 2008 sampai dengan 2013 daya serap anggaran, pada belanja langsung rata-rata hanya mampu menyerap 80.54% anggaran. Hal ini tidak dapat dikatakan seutuhnya dari efisiensi, yaitu sebesar 19.46% Beberapa data diantaranya adalah sebagai berikut:

- pada jenis belanja pegawai daya serap 83.59%
- pada jenis belanja barang dan jasa 87.60%
- pada belanja modal 75.50%

Berdasarkan data tersebut di atas SILPA akan terjadi dan diskenariokan sebesar 6% pada setiap tahunnya. Akan tetapi, apabila SILPA pada akhir tahun terealisasi di atas 6%, selisih tersebut akan diprioritaskan pada dana cadangan, penyertaan modal, penambahan program dan

kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, serta belanja peningkatan jaminan sosial. Perkiraan kapasitas kemampuan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya selengkapnya secara indikatif tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 3-52
Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bandung
setelah disesuaikan dengan APBD 2014 (Milyar Rp)

No.	Uraian	Proyeksi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pendapatan	5.137	5.656	6.240	6.887	7.594
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran*	427	339	374	413	456
	Total Kapasitas Kemampuan Keuangan daerah	5564	5995	6614	7300	8050

Sumber : APBD, data diolah, DPKAD dan Bappeda Kota Bandung.



Grafik 3-14
Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk
Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bandung (Milyar Rp)

3.3.4. Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama.

Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan:

- a. program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2013-2018, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah yang harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
- b. program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung seperti: dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, hibah, bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Alokasi Belanja subsidi selama lima tahun untuk membiayai subsidi harga beli gas 3 kg. Penerima manfaatnya adalah keluarga yang termasuk kategori miskin

sebanyak 79.573 KK berdasarkan data dari PPLS 2011 yang dikeluarkan oleh TNP2K.

Berkaitan dengan hal tersebut Alokasi dan Kerangka pendanaan berdasarkan Prioritas tersaji dalam tabel 3.53 dan 3.54 sebagai berikut:

Tabel 3-53
Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis Prioritas Tahun Anggaran 2014-2018
setelah disesuaikan dengan APBD 2014 (dalam juta rupiah)

Jenis Dana	ALOKASI									
	2014		2015		2016		2017		2018	
	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
Prioritas I	38,05	1.999.407,33	38,32	2.297.494,86	38,03	2.515.656,59	37,75	2.755.528,65	37,51	3.019.280,96
Belanja Tidak Langsung	35,84	1.882.930,56	36,19	2.169.853,31	36,09	2.386.838,64	35,96	2.625.522,51	35,88	2.888.074,76
Belanja Langsung	2,22	116.476,77	1,96	117.641,55	1,80	118.817,95	1,64	120.006,14	1,51	121.206,20
Pengeluaran Pembiayaan	-		0,17	10.000,00	0,15	10.000,00	0,14	10.000,00	0,12	10.000,00
Prioritas II	49,37	2.904.155,06	50,48	3.026.495,14	50,89	3.366.373,41	51,22	3.739.321,35	51,39	4.136.989,04
Prioritas III	12,58	660.837,61	11,20	671.370,00	11,07	732.370,00	11,03	805.370,00	11,10	893.370,00
Belanja Tambahan Penghasilan	4,87	255.956,05	5,12	307.000,00	5,56	368.000,00	6,04	441.000,00	6,57	529.000,00
Belanja Subsidi)*	1,87	98.000,00	1,72	102.870,00	1,56	102.870,00	1,41	102.870,00	1,28	102.870,00
Belanja Hibah	3,71	195.020,57	2,50	150.000,00	2,27	150.000,00	2,05	150.000,00	1,86	150.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1,91	100.546,00	1,50	90.000,00	1,36	90.000,00	1,23	90.000,00	1,12	90.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,02	815	0,02	1.000,00	0,02	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	1.000,00
Belanja Tidak Terduga	0,20	10.500,00	0,34	20.500,00	0,31	20.500,00	0,28	20.500,00	0,25	20.500,00
Total	100,00	5.564.400,00	100,00	5.995.360,00	100,00	6.614.400,00	100,00	7.300.220,00	100,00	8.049.640,00

Sumber : APBD, data diolah, DPKAD dan Bappeda Kota Bandung.

)* sumber data subsidi gas dari PPLS 2011 (79.573KK)

Tabel 3-54

Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 Setelah Disesuaikan dengan APBD 2014 (Milyar Rp)

No.	Uraian	Proyeksi					Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
A.	KAPASITAS KEMAMPUAN KEUDA	5.564,40	5.995,36	6.614,40	7.300,22	8.049,64	11,27
	PENDAPATAN	5.137,00	5.656,00	6.240,00	6.887,00	7.594,00	12,03
	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	427,40	339,36	374,40	413,22	455,64	2,59
B.	BELANJA	5.254,40	5.985,36	6.604,40	7.290,22	8.039,64	11,23
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.543,77	2.841,22	3.119,21	3.430,89	3.781,44	10,42
	PRIORITAS I	1.882,93	2.169,85	2.386,84	2.625,52	2.888,07	11,50
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.820,96	2.091,88	2.298,73	2.525,96	2.775,38	11,13
	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH dan WKDH	6,04	6,65	7,31	8,04	8,85	10,00
	Isentif pemungutan pajak dan retribusi daerah	55,92	71,32	80,80	91,52	103,84	16,89
	PRIORITAS III	660,84	671,37	732,37	805,37	893,37	7,89
	Belanja Tambahan Penghasilan	255,96	307,00	368,00	441,00	529,00	19,90
	Belanja Subsidi	98,00	102,87	102,87	102,87	102,87	-
	Belanja Hibah	195,02	150,00	150,00	150,00	150,00	-
	Belanja Bantuan Sosial	100,55	90,00	90,00	90,00	90,00	-
	Belanja Bantuan Keuangan	0,82	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Belanja Tidak Terduga	10,50	20,50	20,50	20,50	20,50	-
	BELANJA LANGSUNG	2.710,63	3.144,14	3.485,19	3.859,33	4.258,20	11,98
	PRIORITAS I	116,48	117,64	118,82	120,01	121,21	1,00
	Belanja Bea Siswa PNS	2,24	2,69	3,23	3,88	4,65	20,00
	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	114,23	114,95	115,59	116,13	116,56	0,51
	Belanja Sewa Gedung Kantor						
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor						
	PRIORITAS II	2.904,16	3.026,50	3.366,37	3.739,32	4.136,99	12,40
	PROGRAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN LAINNYA						
C.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		10,00	10,00	10,00	10,00	-
	PRIORITAS I		10,00	10,00	10,00	10,00	-
	Pembayaran Pokok Utang						
	Penyertaan Modal						
	Dana Cadangan		10,00	10,00	10,00	10,00	-
	SURPLUS/(DEFISIT) = A-(B+C)	0,00	-	-	-	-	-
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Penerimaan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	SILPA						

Sumber : APBD, data diolah, DPKAD dan Bappeda Kota Bandung

Analisis Isu-isu Strategis

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari SKPD.

4.1.1. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu

sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah;

1. Cakupan masalah yang luas;
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif;
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

RPJPD Kota Bandung 2005-2025 telah mengamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Bandung setiap 5 (lima) tahunan. RPJPD secara teknis telah menetapkan indikator berikut target yang harus dipenuhi pada setiap periode/tahapan. Dengan adanya indikator dan target yang ditetapkan tersebut, maka menjadi sangat penting untuk mengetahui kondisi capaian sebagai data dasar bagi perencanaan menengah tahun 2014-2018.

Untuk dapat melaksanakan amanat RPJPD Kota Bandung dan melihat tingkat capaian pembangunan, khususnya Tahap II periode 2009-2013, maka dalam bagian ini akan diuraikan kinerja pembangunan berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan RPJPD Kota Bandung. Disebutkan dalam RPJPD Kota Bandung bahwa Visi Daerah Kota Bandung pada tahun 2025 adalah: “Kota Bandung Bermartabat” (*Bandung Dignified City*). Untuk mencapai Visi jangka panjang tersebut, maka disusun Misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan religius
- Misi 2 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing
- Misi 3 : Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi serta berhati nurani
- Misi 4 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota
- Misi 5 : Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan

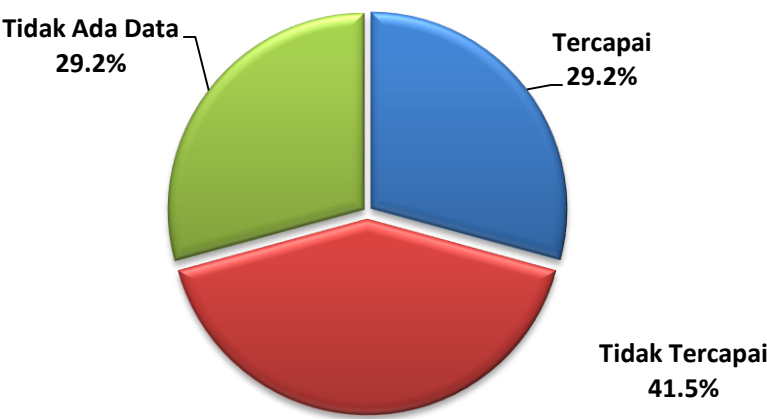
Misi 6 : Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembiayaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat)

Tiap-tiap misi tersebut diuraikan lebih lanjut ke dalam sasaran dengan indikator dan target tertentu. Rekapitulasi dari status capaian dari Misi tersebut hingga tahun 2012 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4-1
Status Capaian Indikator RPJPD Kota Bandung 2005-2025
Tahap II (2009-2013) hingga Tahun 2012

No	Misi	Capaian Target RPJPD Tahap II (2009-2013)		
		Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Ada Data
1.	Misi 1: “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Religius”	8	8	2
2.	Misi 2: “Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing”	5	3	2
3.	Misi 3 “Mengembangkan Kehidupan Sosial Budaya Kota yang Kreatif”	2	0	2
4.	Misi 4: “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kota”	1	11	4
5.	Misi 5: “Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan”	2	0	8
6.	Misi 6: “Mengembangkan Sistem Pembiayaan Kota Terpadu (Melalui Pembiayaan Pembangunan yang Melibatkan Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat)”	1	5	1
TOTAL (65 indikator)		19	27	19
%		29,2%	41,5%	29,2%

Sumber : RPJPD, LKPJ AMJ, LPPD, BPS Kota Bandung (olahan)



Grafik 4-1
Status Capaian Indikator RPJPD Kota Bandung 2005-2025
Tahap II (2009-2013) hingga Tahun 2012

4.1.2. Capaian Misi 1 RPJPD Tahap II (2009-2013)

Capaian Kinerja Misi “*Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Religius*” ditandai dengan telah tercapainya sebanyak 8 indikator, yang tidak tercapai sebanyak 8 indikator dan 2 indikator tidak ada datanya. Beberapa indikator-indikator kinerja pembangunan Tahap II (2009-2013) yang tidak tercapai, sebagai berikut:

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator makro pembangunan dapat direalisasikan tahun 2012 sebesar 79,32 point dari target sebesar 81,07 point (data BPS Kota Bandung). Sebagai bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), beberapa indeks komposit dan indeks utama juga tidak dapat memenuhi target: Indeks pendidikan, Indeks kesehatan, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan angka harapan hidup,

Jumlah penduduk (maksimal) yang dimaksudkan sebagai pengendalian penduduk juga tidak dapat memenuhi target ditetapkan. Dengan angka pertumbuhan penduduk pada kurun waktu tahun 2008-2013 rata-rata meningkat pada setiap tahunnya dan dengan kondisi terakhir tahun 2012 pertumbuhan penduduk sebesar 1,26%, target maksimal jumlah penduduk tahun 2013 sebesar 2.619.366 tidak dapat dipenuhi. Jumlah penduduk sampai dengan tahun 2012 sebanyak 2.455.517 orang. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga berencana dan manajemen penduduk di masa datang harus lebih dioptimalkan.

Dengan demikian, permasalahan pembangunan yang dihadapi pada misi 1 yang menjadi tugas Tahap III (2014-2018):

1. Belum optimalnya pencapaian IPM berikut indeks kompositnya.
2. Belum optimalnya pengendalian kependudukan.
3. Belum optimalnya pelayanan dasar kesehatan bagi Ibu yang melahirkan.

Berikut ini diuraikan capaian Misi 1 RPJPD Kota Bandung “*Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Religius*” Tahap II (2009-2013) sebagai berikut:

Tabel 4-2
Capaian Misi 1 RPJPD Kota Bandung “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Religius”
Tahap II (2009-2013)

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap II (Tahun 2009- 2013)	Realisasi s.d. Tahun 2012	Capaian Target RPJPD Tahap II (2009-2013)		
								Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Ada Data
1	Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	IPM	-	77,42	82,66	81,07	79,32		√	
		Jumlah penduduk (maksimal)	jiwa	Pertumbuhan penduduk 1,59%	Pertumbuhan penduduk < 0,50%	2.619.366	2.455.517	√		
		Angka fertilitas	-	2,06	1,80	1,91	1,92		√	
2	Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, kreatif dan kompetitif	Indeks pendidikan	poin	89,06	94,04	92,78	90,25		√	
		Rata-rata lama sekolah	tahun	10,34	12,38	11,85	10,74		√	
		Sertifikasi guru	%	< 25,00	100,00	50,00	80%	√		
		Lembaga pendidikan di Kota Bandung yang telah menerapkan SPM	%	25,00	100,00	50,00	80%	√		
		Angka melek huruf	%	99,26	99,80	99,67	99,58		√	
3	Terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani	Indeks kesehatan	poin	79,27	82,16	81,55	81,35		√	
		Angka harapan hidup	tahun	72,56	75,00	74,00	73,81		√	
		Fasilitas kesehatan yang telah memenuhi SPM	%	70,00	100,00	80,00	100%	√		
		Angka kematian bayi	/1.000 kelahiran hidup	35,66	26,00	31,00	29,33	√		
		Jumlah kematian ibu melahirkan	orang/tahun	14	10	12	24		√	
		Pemaparan zoonosis di wilayah Kota Bandung	% di wilayah Kota	Terjadinya kasus positif flu burung di 3 kelurahan	< 5,00	< 12,00	3 kasus yaitu penyakit flu burung (AI) di 3 Kelurahan	√		
4	Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia	Tingkat pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing	-	Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing	Rendahnya tingkat pelanggaran terhadap norma-norma agama	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing	N/A			√

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap II (Tahun 2009-2013)	Realisasi s.d. Tahun 2012	Capaian Target RPJPD Tahap II (2009-2013)		
								Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Ada Data
		Tingkat Kerukunan umat beragama meliputi Kerukunan antar umat beragama, Kerukunan Inter Umat Beragama, Kerukunan Antara umat beragama dengan Pemerintah	-	Belum optimalnya sikap toleransi dan kerukunan umat beragama	Terpeliharanya sikap toleransi dan kerukunan umat beragama	Meningkatnya sikap toleransi dan kerukunan umat beragama	N/A			√
5	Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan Gender	Tingkat pemahaman peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan	-	Masih rendahnya peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan	Terwujudnya peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan	Meningkatnya pemahaman peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender: thn 2009: 69,08 dan thn 2011: 69,65 (sumber : KemenPP & PA) BPS Kota Bandung (2012) 1. Perempuan sebagai Tenaga Kerja = 66%; 2. Perempuan dalam Angkatan Kerja = 38%; 3. Pekerja Perempuan Non Pertanian = 38%	√ (indikator tidak dispesifikan tertentu, sehingga ketika mengalami peningkatan , maka tercapai sesuai target)		
		Tingkat hak-hak perlindungan perempuan dan anak	-	Masih rendahnya hak-hak perlindungan perempuan dan anak	Terlindunginya hak-hak perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya hak-hak perlindungan perempuan dan anak	1. Peningkatan dan Pendidikan Pelatihan Manajemen bagi Usaha Perempuan = 80%; 2. Cakupan Kelurahan Layak Anak = 60 Kelurahan; 3. Meningkatnya Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan PUG dan Anak = 30 GFP.	√ (indikator tidak dispesifikan tertentu, sehingga ketika mengalami peningkata n, maka tercapai sesuai target)		
CAPAIAN								8	8	2

Sumber : RPJPD, LKPJ AMJ, BPS Kota Bandung (diolah)

4.1.3. Capaian Misi 2 RPJPD Tahap II (2009-2013)

Misi 2 RPJPD Tahap II mengamanatkan mengenai "Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing", dan untuk mewujudkan Misi 2 diukur dengan beberapa indikator yang memiliki target yang telah ditetapkan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung sampai dengan tahun 2012 mencapai 9,40% (merupakan angka sementara dari BPS). Capaian indikator mengalami peningkatan yang cukup berarti dari kondisi eksisting tahun 2008 yang hanya sebesar 8,29%. Target dari capaian indikator ini telah terlampaui. Tingkat inflasi pada kurun waktu 2008-2012 mengalami fluktuasi. Sampai dengan Tahun 2012 tingkat inflasi mencapai 4,02% atau masih sesuai target dari yaitu dibawah 10%. Besaran inflasi dipengaruhi oleh stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok. Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan signifikan selama kurun waktu tahun 2008-2012. Tahun 2012 tingkat pengangguran terbuka mencapai 9,17% dan telah melebihi target Tahap II (2009-2013) sebesar 15%. Tingkat kesempatan kerja juga telah mencapai target tahun 2012 sebesar 90,83%.

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung telah melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana tahun 2012 untuk wisatawan nusantara sebesar 3.354.857 orang dan wisatawan mancanegara mencapai 158.848 orang.

Kaitan mewujudkan kerjasama dengan daerah lain, dengan indikator capaian tingkat perwujudan Kota Bandung sebagai pusat kegiatan pemasaran ekonomi di priangan timur dicapai melalui kontribusi sektor perdagangan dari tahun 2008. Sejak ditetapkan sebagai *pilot project* di Yokohama Jepang bulan Juli 2007, perkembangan kreativitas masyarakat terutama industri kreatif terus meningkat sehingga diharapkan Kota Bandung akan menjadi pusat pertumbuhan sektor jasa. Industri kreatif yang berkembang di Kota Bandung meliputi seni/*art*, *craft*, *design*, *fashion*, musik, seni pertunjukan, penerbitan, riset dan pengembangan, kuliner serta *software*.

Beberapa indikator yang belum tercapai targetnya tahun 2012 diantaranya PDRB riil/kapita, indeks daya beli, dan nilai investasi berskala nasional. Diharapkan capaian indikator ini dapat ditingkatkan tahun 2013 dan mencapai target. Dengan demikian, permasalahan pembangunan yang dihadapi pada misi 2 yang menjadi tugas pada Tahap III (2014-2018):

1. Masih rendahnya PDRB per kapita;
2. Belum optimalnya indeks daya beli;
3. Masih rendahnya investasi berskala nasional.

Berikut ini diuraikan capaian Misi 2 RPJPD Kota Bandung “*Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing*” Tahap II (2009-2013) sebagai berikut:

Tabel 4-3
Capaian Misi 2 RPJPD Kota Bandung “Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing”
Tahap II (2009-2013)

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap II (Tahun 2009-2013)	Realisasi s.d. Tahun 2012	Capaian Target RPJPD Tahap II (2009-2013)		
								Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Ada Data
1	Terwujudnya perekonomian kota yang tangguh, berdaya saing serta sehat dan berkeadilan	Laju pertumbuhan ekonomi	%	7,53	> 11,00	9,33	9,40	√		
		Tingkat pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	%	13,34 (kategori sedang)	> 17,00 (kategori rendah)	≥ 15,00 (kategori sedang)	N/A			√
		PDRB riil/kapita	Rp/thn	9.410.386	≥ 25.000.000	≥ 16.000.000	15.353.978		√	
		Indeks daya beli	poin	63,93	71,77	68,88	66,35		√	
		Tingkat inflasi umum	%	19,56	< 10,00	< 10,00	4,02	√		
		Tingkat pengangguran terbuka	%	16,25	≤ 10,00 dan di bawah rata-rata TPT Nasional dan TPT Provinsi Jabar	15,00	9,17	√		
		Kesempatan kerja	%	84,32 (ket : total angkatan kerja masih menggunakan kriteria penduduk berusia 10 tahun keatas)	≥ 95,00	≥ 89,00	90,83	√		
		Nilai investasi berskala nasional	Rp	3.658.612.953.405	> 5.487.919.430.107 (meningkat > 50% dari 2005)	4.390.335.544.086 (meningkat 20% dari 2005)	3.362.168.672.173		√	
2	Terwujudnya Pariwisata yang berdaya saing	Jumlah wisatawan	orang	Wisnus : 1.928.850 Wisman : 91.350	Wisnus : ≥ 2.893.275 Wisman: ≥ 137.025 (meningkat ≥ 50% dari 2005)	Wisnus : 2.411.063 Wisman: 114.188 (meningkat 25% dari 2005)	Wisnus : 3.354.857 Wisman : 158.848	√		
3	Terwujudnya Kerjasama dan koordinasi yang menguntungkan dengan wilayah pemerintah Daerah lainnya	Sinergitas kegiatan ekonomi antar wilayah	-	Kerjasama antar daerah belum terealisasi secara optimal	Terwujudnya Kota Bandung sebagai pusat kegiatan pemasaran ekonomi di Priangan Timur	Teridentifikasinya peluang kerjasama ekonomi antar wilayah	N/A			√
CAPAIAN								5	3	2

Sumber : RPJPD, LKPJ AMJ, BPS Kota Bandung (diolah)

4.1.4. Capaian Misi 3 RPJPD Tahap II (2009-2013)

Tingkat perwujudan pusat-pusat kebudayaan sebagai sarana pelestarian pembangunan budaya, ditandai dengan meningkatnya fungsi pusat-pusat kebudayaan, kesadaran masyarakat dan komunitas seni budaya dalam rangka pelestarian seni budaya secara profesional dan berkesinambungan, antara lain diwujudkan daerah budaya di kawasan Ujungberung

Tingkat perwujudan sinergitas pelestarian budaya lokal antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat semakin meningkat selama kurun waktu tahun 2008-2013. Hal ini diketahui dengan meningkatnya hubungan pemerintah dengan pelaku budaya dalam perlindungan dan pelestarian budaya, ditandai oleh banyaknya event-event kebudayaan (pameran, pagelaran seni, dan lain-lain).

Beberapa indikator lainnya tidak dapat diuraikan secara jelas karena jenis indikator yang digunakan di RPJPD bersifat kualitatif.

Berikut ini diuraikan capaian Misi 3 RPJPD Kota Bandung *“Mengembangkan Kehidupan Sosial Budaya Kota yang Kreatif”, Berkesadaran Tinggi serta Berhati Nurani*” Tahap II (2009-2013) sebagai berikut:

Tabel 4-4
Capaian Misi 3 RPJPD Kota Bandung “Mengembangkan Kehidupan Sosial Budaya Kota yang Kreatif, Berkesadaran Tinggi serta Berhati Nurani” Tahap II (2009-2013)

No	Sasaran	Indikator	Sat	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap II (Tahun 2009-2013)	Realisasi s.d. Tahun 2012	Ketercapaian Target RPJPD Tahap II (2009-2013)		
								Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Ada Data
1	Terwujudnya peningkatan mutu kerjasama di antara semua pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Bandung	akses informasi tentang pembangunan	-	Terbatasnya aksesibilitas warga terhadap informasi pembangunan; Belum tersedianya mekanisme peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi; Belum tersedianya modal sosial yang memfasilitasi antar perkumpulan warga dengan pemerintah kota	Terlibatnya masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan proses Pembangunan	Memperluas akses informasi tentang pembangunan melalui berbagai media	N/A			√
		Tingkat kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik	-	Rendahnya tingkat kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Terlaksananya rasa kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik	N/A			√
2	Terwujudnya multikulturalis me dalam lingkungan Sunda yang inklusif	Pengembangan pusat – pusat kebudayaan	-	Terbatasnya pusat-pusat kebudayaan	Terwujudnya pusat-pusat kebudayaan sebagai sarana pelestarian pembangunan budaya sunda	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan komunitas seni budaya dalam rangka pelestarian seni budaya secara profesional dan berkesinambungan	Pembangunan obyek wisata agro dan seni budaya pada lahan seluas 6 Ha di Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung.	√ (indikator tidak dispesifikan tertentu, sehingga ketika mengalami peningkatan, maka tercapai sesuai target)		
		Sinergitas pelestarian budaya lokal Sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat	-	Kurangnya sinergitas pelestarian budaya lokal sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat	Terwujudnya sinergitas pelestarian budaya lokal sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat	Meningkatnya hubungan pemerintah dengan pelaku budaya dalam perlindungan dan pelestarian budaya	Pagelaran seni dan budaya : Thn 2008 = 1.054, Thn 2012 = 2.588 Jumlah Lingkung Seni dan Forum Komunitas Seni Budaya : Thn 2008 = 817, Thn 2012 = 876 Jumlah Kreator Seni Budaya : Thn 2008 = 106, Thn 2012 = 240	√ (indikator tidak dispesifikan tertentu, sehingga ketika mengalami peningkatan, maka tercapai sesuai target)		
CAPAIAN								2	0	2

Sumber : RPJPD, LKPJ AMJ, BPS Kota Bandung (diolah)

4.1.5. Capaian Misi 4 RPJPD Tahap II (2009-2013)

Cakupan sistem penanganan air limbah yang terpadu dengan IPAL yang terdesentralisasi pada kurun waktu 2008-2013 meningkat signifikan, yaitu mencapai 61,90% tahun 2012 dan telah melebihi dari target tahun 2013 yang hanya sebesar 50%.

Kapasitas air baku terpasang pada Tahun 2012 mencapai 3.215 L/det dan kapasitas produksi sebesar 2.250L/det. Capaian target indikator tingkat ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan privat yang efektif menunjang fungsi hidrologi (dalam bentuk taman, hutan kota, sempadan sungai, kawasan konversi dan RTH lainnya) sampai dengan tahun 2012 sebesar 12,12% dari luas wilayah Kota Bandung. Target tahun 2012 sebesar 16% masih menyisakan target capaian sebesar 3,88%.

Sasaran “Mewujudkan pengelolaan limbah padat yang efektif dan bernilai ekonomi”, capaian indikator tingkat pengelolaan sampah dari kondisi eksisting tahun 2008 sebesar 63,12% mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2012 sebesar 85%, terdiri atas: 16% dengan 3-R dan 69% diangkut ke TPA (0% melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan & ekonomis)

Sasaran “Menyediakan ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan”, capaian indikator tingkat pengembangan pusat primer Gedebage sampai dengan tahun 2012 sebesar 20%.

Indikator tingkat pengendalian pemanfaatan ruang dan penggunaan bangunan realisasi sampai dengan 2012 melalui tertibnya pelayanan perizinan mencapai 75%. Jalan berkondisi baik tahun 2012 baru mencapai 68,96% dan dibutuhkan kerja keras agar 100% jalan berkondisi baik.

Selain itu masih terdapat beberapa capaian indikator yang membutuhkan akselerasi agar dapat sesuai target. Beberapa indikator lainnya tidak dapat diuraikan secara jelas karena jenis indikator yang digunakan di RPJPD bersifat kualitatif.

Berikut ini diuraikan capaian Misi 4 RPJPD Kota Bandung “*Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kota*” Tahap II (2009-2013) sebagai berikut:

Tabel 4-5
Capaian Misi 4 RPJPD Kota Bandung “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kota” Tahap II (2009-2013)

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap II (Tahun 2009-2013)	Realisasi s.d. Tahun 2012	Ketercapaian Target RPJPD Tahap II (2009-2013)		
								Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Ada Data
1	Terwujudnya kualitas udara dan air memenuhi baku mutu	Lokasi sampel yang telah memenuhi BM kualitas udara	%	Kandungan SO ₂ dan NO _x di beberapa lokasi sampling melebihi baku mutu, sedangkan kandungan HC di semua lokasi sampling melebihi baku mutu (dari 15 lokasi sampling)	75,00	25,00	N/A			√
2	Terjamin dan tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam)	Sungai dan anak sungai di Kota Bandung yang telah memenuhi baku mutu untuk parameter BOD dan COD	%	Kandungan BOD dan COD di seluruh sungai di Kota Bandung melebihi baku mutu	20,00	11,00	8,4 (data tahun 2011)		√	
		Kapasitas produksi air bersih dari sumber air baku	liter/detik	± 3.750	± 6.500	± 5.100	±2.250		√	
		Ruang terbuka hijau (RTH) kota yang efektif menunjang fungsi hidroorologi (dalam bentuk taman, hutan kota, sempadan sungai, kawasan konservasi dan RTH lainnya)	%	± 5,72% (1.084,41 ha)	≥ 30,00% (20% RTH publik dan 10% RTH privat)	16,00	12,12		√	
3	Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi	Reduksi dan Peningkatan pemanfaatan kembali limbah padat	-	80% sampah dapat dikelola, terdiri atas: 5% dengan 3R, dan 75% diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA) (jumlah timbulan sampah 6.860 m ³ /hari)	90% sampah dapat dikelola, terdiri atas: 40% dengan 3R, dan 50% diangkut ke TPA (30% diantaranya melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan & ekonomis, dan 20% landfill)	90% sampah dapat dikelola, terdiri atas: 20% dengan 3R, dan 70% diangkut ke TPA (40% diantaranya melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan & ekonomis, dan 30% landfill)	85% sampah dapat dikelola, terdiri atas: 16% dengan 3R dan 69% diangkut ke TPA (0% melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan & ekonomis)		√	
4	Tersedianya Ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	Terbentuk struktur ruang kota	-	Terdapat 1 pusat primer (Alun-alun) dan 5 pusat wilayah pengembangan (WP)	Terbentuknya 2 pusat primer (Alun-alun dan Gedebage) dan 6 wilayah pengembangan	Minimum 30% Kawasan Pusat Primer Gedebage terbangun dan semua pusat WP berfungsi efektif	20% Kawasan Pusat Primer Gedebage terbangun		√	

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap II (Tahun 2009-2013)	Realisasi s.d. Tahun 2012	Ketercapaian Target RPJPD Tahap II (2009-2013)		
								Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Ada Data
		Pengendalian pemanfaatan ruang	-	45% bangunan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB)	Tertibnya pemanfaatan ruang dan penggunaan bangunan	Tertibnya pelayanan perizinan	tertibnya pelayanan perizinan: 75%		√	
5	Tersedianya Sistem transportasi yang selamat, efisien, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan	Pengembangan (sistem) prasarana transportasi yang mendukung struktur ruang kota	-	Luas jalan 2,32% dari luas wilayah kota, dan 72,10% berkondisi baik	Luas jalan minimum 5% dari luas wilayah kota (Kepmenkim-praswil No.534/KPTS/M/2001), dan 100% berkondisi baik	Luas jalan minimum 3% dari luas wilayah kota, dan 100% berkondisi baik	Jalan berkondisi baik : 68,96% (sumber LPPD)		√	
		Indeks aksesibilitas	km/km ² area	5,575 (indeks mobilitas 0,435 km/1.000 penduduk)	≥ 10	≥ 5	N/A			√
		Terwujudnya prasarana SAUM sesuai dengan rencana induk transportasi umum kota	%	Pelayanan angkutan umum massal belum optimal	100,00	25,00	1. Beroperasinya 2 (dua) koridor SAUM di Kota Bandung 2. Terbangun 20 (dua puluh) shelter bus			√ (estimasi capaian belum jelas)
		Teratasinya aspek-aspek penyebab kemacetan (dari 32 aspek)	aspek	Teridentifikasinya aspek-aspek penyebab kemacetan	32	5	1 aspek (terwujudnya kecepatan rata-rata tempuh kendaraan 23 Km/Jam)		√	
6	Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar teknis / standar pelayanan minimal	Penduduk kota yang dilayani air bersih dengan pengaliran kontinu 24 jam	%	53,00	90,00 (standar pengaliran air 120 liter/orang/hari)	75,00 (rata-rata pengaliran air 120 liter/orang/hari)	72,43		√	
		Berfungsinya TPA sampah yang berkelanjutan dengan sistem pengolahan yang ekonomis	%	Belum tersedianya TPA sampah yang berkelanjutan dengan sistem pengolahan yang ekonomis	100,00	75,00	Belum berfungsi (PLTSa)		√	
		Penataan sistem drainase Kota yang tertata	-	Sistem drainase telah berubah karena perubahan guna lahan, penyempitan saluran, perubahan alur, dan banyaknya bangunan di atas sungai	Tertatanya sistem drainase kota yang baik dari hulu sampai hilir	Jaringan drainase primer kota terbentuk; Integrasi per wilayah pelayanan drainase kota; 50% sistem drainase kota terpadu	33,30% (4 DAS dari 12 DAS) DAS Citepus, Cidurian, Cipamokolan, Cinambo		√	
		Kawasan kota yang terlayani oleh sistem	%	Belum terintegrasinya sistem air limbah kota dengan IPAL yang memadai	100,00 (IPAL terdesentralisasi)	50,00	61,90%	√		

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap II (Tahun 2009-2013)	Realisasi s.d. Tahun 2012	Ketercapaian Target RPJPD Tahap II (2009-2013)		
								Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Ada Data
		penanganan air limbah yang terpadu dengan IPAL								
7	Terwujudnya mitigasi Bencana yang handal	Peningkatan pengelolaan bencana	-	Fungsi organisasi yang menangani kebencanaan belum berjalan secara optimal	Terkendalinya bencana di Kota Bandung	Meningkatnya fungsi organisasi yang menangani kebencanaan	N/A			√
CAPAIAN								1	11	4

Sumber : RPJPD, LKPJ AMJ, BPS Kota Bandung (diolah)

4.1.6. Capaian Misi 5 RPJPD Tahap II (2009-2013)

Tingkat perwujudan perencanaan sesuai dengan aspirasi masyarakat, bersifat antisipatif, aplikatif, akuntabel berdasarkan basis data yang akurat, serta tingkat akomodasi program RKPD ke dalam APBD, kedua indikator tersebut tercapai tiap tahunnya pada kurun waktu 2008-2013 ditandai dengan terbangunnya pola perencanaan dan pengelolaan data yang berdasarkan pada basis data yang akurat, diukur dari tingkat akomodasi usulan Musrenbang Kota dan Reses DPRD dalam RKPD. Dari target tingkat akomodasi usulan Musrenbang sebesar $\geq 30\%$, dapat terealisasi sebesar 34,42%.

Tingkat perwujudan *Good Government* dan *Clean Governance*, ditandai dengan dilaksanakannya agenda reformasi birokrasi melalui pembaharuan birokrasi terhadap pelayanan publik

Tingkat perwujudan stabilitas keamanan daerah, telah dapat ditingkatkan dengan terbangunnya ketertiban dan keamanan yang dilaksanakan melalui beberapa program yang diantaranya: (a) Program peningkatan kemananan dan kenyamanan lingkungan, (b) Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, (c) Program penegakkan ketentraman dan ketertiban umum, serta program lainnya yang mendukung yang didalam pelaksanaannya tidak terdapat kendala yang berarti.

Dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dari SKPD, telah terdapat Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk 41 SKPD (Tahun 2011) dan Sertifikasi SMM ISO 9001:2008: 16 SKPD (Kecamatan & Puskesmas) tahun 2012.

Beberapa indikator lainnya tidak dapat diuraikan secara jelas karena jenis indikator yang digunakan di RPJPD bersifat kualitatif.

Berikut ini diuraikan capaian Misi 5 RPJPD Kota Bandung “*Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan*” Tahap II (2009-2013) sebagai berikut:

Tabel 4-6
Capaian Misi 5 RPJPD Kota Bandung “Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan”
Tahap II (2009-2013)

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap II (Tahun 2009-2013)	Realisasi s.d. Tahun 2012	Ketercapaian Target RPJPD Tahap II (2009-2013)		
								Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Ada Data
1	Terwujudnya Peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif, akuntabel dan berdasarkan data base	Tingkat kualitas aparatur perencana dan pengelola data		Perencanaan yang ada belum sepenuhnya aspiratif, antisipatif, aplikatif, akuntabel dan berbasis data yang akurat; Belum tersedia database secara optimal yang dapat mengakses dan diakses oleh instansi terkait	Terwujudnya perencanaan sesuai dengan aspirasi masyarakat, bersifat antisipatif, aplikatif, akuntabel berdasarkan basis data yang akurat	Terbangunnya pola perencanaan dan pengelolaan data	Telah terbangunnya pola perencanaan dan pengelolaan data yang berdasarkan pada basis data yang akurat diukur dari tingkat akomodasi usulan Musrenbang Kota dan Reses DPRD dalam RKPD. Dari target tingkat akomodasi usulan Musrenbang sebesar ≥30%, dapat terealisasi sebesar 34,42%	√		
2	Terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar hukum dan HAM	Tingkat kualitas produk hukum yang Produktif dan Implementatif		Peraturan yang ada belum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat	Produk hukum daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparat dalam penetapan produk hukum yang sinergi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	N/A			√
		Tingkat kualitas penegakan hukum dan HAM secara objektif dan merata		Tingkat kesadaran hukum dan HAM aparat dan masyarakat rendah; Masih ada aparat yang melanggar hukum dan HAM serta KKN	Rendahnya pelanggaran masyarakat dan aparat terhadap hukum dan HAM sehingga dapat mendukung ketertiban dan keamanan, serta rendahnya praktek KKN di lingkungan birokrasi	Terwujudnya penegakan hukum dan HAM sehingga dapat mendukung ketertiban dan keamanan, serta semakin berkurangnya praktek KKN di lingkungan birokrasi	N/A			√
3	Tersedianya Prasarana dan sarana aparatur pemerintah kota yang berkualitas	Tingkat ketersediaan sarana prasarana yang memadai		Belum optimalnya kuantitas, kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana kerja aparatur pemerintah kota	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	N/A			√
4	Tersedianya Aparatur yang profesional	Tingkat ketersediaan Aparatur yang profesional		Aparatur belum profesional; Penempatan pegawai banyak yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya; Kecerdasan intelektual dan	Terwujudnya aparatur yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan	Tersedianya SDM aparatur yang bertanggung jawab, tepat fungsi, tepat posisi sesuai peraturan perundangan yang berlaku	N/A			√

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap II (Tahun 2009-2013)	Realisasi s.d. Tahun 2012	Ketercapaian Target RPJPD Tahap II (2009-2013)		
								Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Ada Data
				emosional pegawai belum seimbang dengan kecerdasan spiritualnya; Pola insentif dan penggajian belum didasarkan pada kinerja dan beban kerja	masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual					
5	Terwujudnya Organisasi pemerintah daerah yang dapat meningkatkan kinerja aparatur	Tingkat optimalisasi kelembagaan pemerintah yang berprinsip kecil, efektif, efisien (KEE)		Organisasi dan pengorganisasian belum mencerminkan tuntutan reformasi birokrasi	Terwujudnya <i>good government</i> dan <i>clean governance</i>	Terlaksananya reformasi birokrasi	N/A			√
6	Terwujudnya Kemampuan teknis dan administratif aparatur pengawasan yang profesional	Tingkat Pengawasan		Pola pengawasan yang ada belum optimal	Rendahnya tingkat pelanggaran teknis dan administratif aparatur	Tersosialisasinya kebijakan tentang pengawasan	N/A			√
7	Terwujudnya Pelayanan publik yang prima	Jumlah SKPD yang bersertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2000		Baru 1 SKPD yang bersertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001	Seluruh SKPD bersertifikat SMM ISO 9001, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat = A	Meningkatnya jumlah SKPD yang bersertifikat SMM ISO 9001	Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 untuk 41 SKPD (Thn 2011) Sertifikasi SMM ISO 9001:2008 : 16 SKPD (Kecamatan & puskesmas) Thn 2012	√		
8	Terwujudnya Kehidupan masyarakat yang demokratis	Tingkat pendidikan politik masyarakat		Perilaku masyarakat dalam berpolitik masih banyak melanggar nilai-nilai demokrasi dan etika politik	Terwujudnya masyarakat yang demokratis	Meningkatnya pemahaman tentang pendidikan politik dan perilaku	N/A			√
9	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban serta terciptanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan stabilitas keamanan daerah	Tingkat ketertiban dan keamanan		Peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan lingkungan belum memadai; Satpol PP dan PPNS belum bekerja efektif	Terwujudnya stabilitas keamanan daerah	Terbangunnya ketertiban dan keamanan	N/A			√
CAPAIAN								2	0	8

Sumber : RPJPD, LKPJ AMJ, BPS Kota Bandung (diolah)

4.1.7. Capaian Misi 6 RPJPD Tahap II (2009-2013)

Rata-rata peningkatan pendapatan daerah selama periode 2009-2012 mencapai 16,5% dan telah melebihi target yang telah ditentukan.

Walaupun begitu, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, diantaranya:

- Pengembangan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional
- Pengembangan sistem insentif terhadap swasta
- Pengembangan sistem pembiayaan dengan kemitraan pemerintah dan swasta
- Pengembangan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional
- Penyediaan insentif dan fasilitasi untuk keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan serta pemanfaatan dan pemeliharaan barang dan jasa publik

Berikut ini diuraikan capaian Misi 6 RPJPD Kota Bandung *“Mengembangkan Sistem Pembiayaan Kota Terpadu (Melalui Pembiayaan Pembangunan yang Melibatkan Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat)”* Tahap II (2009-2013) sebagai berikut:

Tabel 4-7
Capaian Misi 6 RPJPD Kota Bandung “Mengembangkan Sistem Pembiayaan Kota Terpadu (Melalui Pembiayaan Pembangunan yang Melibatkan Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat)” Tahap II (2009-2013)

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap II (Tahun 2009-2013)	Realisasi s.d. Tahun 2012	Capaian Target RPJPD Tahap II (2009-2013)		
								Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Ada Data
1	Terwujudnya anggaran pemerintah yang optimal	Peningkatan Pendapatan Daerah	%	Rata-rata pendapatan daerah 10,71%	Meningkatnya rata-rata pendapatan daerah 20% dengan basis data yang akurat	Rata-rata peningkatan pendapatan daerah 13%	Rata-rata peningkatan pendapatan daerah 16,5%	√		
		Sinergitas APBN, APBD Propinsi & APBD Kota		Alokasi APBN, APBD Provinsi Jabar, dan APBD Kota Bandung masih tidak saling terkait	Pemanfaatan dan alokasi APBN dan APBD Provinsi Jabar dengan APBD Kota Bandung terintegrasi dengan baik, saling melengkapi	APBN, APBD Provinsi Jabar dan APBD Kota Bandung saling melengkapi	N/A			√
		Pengembangan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional		Belum siap menggunakan instrumen pembiayaan seperti obligasi daerah, road fund, dll	Penggunaan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional, terutama obligasi daerah menjadi sumber pembiayaan yang signifikan	Obligasi daerah dan road fund	Belum terdapat obligasi daerah & road fund		√	
2	Terwujudnya masyarakat dan sektor swasta berperan besar dalam pembiayaan pembangunan kota	Pengembangan sistem insentif terhadap swasta		Insentif masih sangat terbatas, hanya hak memasang iklan dan kemudahan administrasi	Sistem insentif fiskal/keuangan (pengurangan pajak dan retribusi daerah, dll) sudah melembaga	Terumuskannya kerjasama instrumen insentif fiskal antar tingkat pemerintahan	Belum terumuskan		√	
		Pengembangan sistem pembiayaan dengan kemitraan pemerintah dan swasta		Kemitraan pemerintah dan swasta dalam pembiayaan pembangunan belum melembaga	Meningkatnya kontribusi perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap PAD	Terbentuknya perusahaan patungan untuk beberapa layanan jasa umum dan barang publik	Belum terbentuk		√	
		Pengembangan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional		Kontribusi pembiayaan non konvensional berbasis masyarakat belum optimal	Penggunaan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional berbasis masyarakat sebagai sumber pembiayaan signifikan	Terbangunnya instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional berbasis masyarakat	Belum terbangun instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional		√	
		Penyediaan insentif dan fasilitasi untuk keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan serta pemanfaatan dan pemeliharaan barang dan jasa publik		Masih sangat terbatas, hanya fasilitasi dengan penyertaan bahan/alat yang tersedia di pemerintah	Terwujudnya insentif fiskal ke masyarakat	Beberapa insentif fiskal untuk masyarakat dalam pembangunan, pelaksanaan dan pemeliharaan barang dan jasa diterapkan	Belum terdapat insentif		√	
CAPAIAN								1	5	1

Sumber : RPJPD, LKPJ AMJ, BPS Kota Bandung (diolah)

4.1.8. Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib/Pilihan).

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan atau terkait dengan sasaran pokok (RPJPD) dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dalam suatu periode. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat.

Analisis permasalahan pembangunan seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, yang secara umum telah diuraikan pada Bab 2, yaitu mengidentifikasi permasalahan pada tiap urusan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap urusan. Adapun rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Urusan Lingkungan Hidup (Kelompok Fisik dan Lingkungan)

- Konversi lahan produktif ke lahan terbangun mengakibatkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama;
- Luas lahan terbangun dalam bentuk pertumbuhan permukiman baru di Kota Bandung semakin meningkat dan mengurangi luasan sawah dan ruang terbuka hijau;
- Peningkatan suhu udara dan penurunan kualitas udara ambien;
- Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak;
- Ketersediaan dan kualitas air tanah menurun, termasuk ketersediaan air bersih. Bahkan di beberapa wilayah pengembangan, kualitas air tidak layak untuk minum, mandi, dan cuci. Namun karena desakan kebutuhan, pada lokasi-lokasi tersebut tetap dibangun permukiman;
- Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk;

- Sungai-sungai di Kota Bandung juga banyak yang tercemar. Beberapa sungai belum memenuhi baku mutu parameter COD/BOD dan menjadi pembuangan sampah;
- Rawan bencana alam karena terletak dalam Patahan Lembang;
- Peningkatan risiko bencana kebakaran yang disebabkan karena kepadatan pertumbuhan permukiman;
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri;
- Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, dan persampahan;
- Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau (RTH).

2. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera (Kelompok Kependudukan).

- Semakin meningkatnya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia;
- Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Bandung diantaranya adalah karena migrasi masuk penduduk. Kota Bandung termasuk wilayah yang padat penduduknya di Indonesia, setelah DKI Jakarta.
- Berdasarkan kecenderungan sepuluh tahun terakhir, maka pada masa 5-10 tahun mendatang, proporsi penduduk umur muda meningkat pesat. Permasalahan ini dapat menjadi beban pembangunan, bahkan bila kecenderungan tersebut tidak dapat dikendalikan, dikhawatirkan jumlahnya akan terus meningkat, sehingga tidak dapat ditopang oleh daya dukung lingkungan.
- Penduduk miskin juga menjadi persoalan yang berat, karena jumlah absolut penduduk miskin yang cukup besar dan umumnya berasal dari keluarga miskin dan cenderung sulit terlepas dari kondisi tersebut.

3. Urusan Pendidikan.

a. Akses

- Tantangan di masa 5-10 tahun ke depan adalah jumlah anak usia pendidikan dasar menengah akan meningkat. Namun demikian data dan informasi anak-anak usia wajib belajar yang tidak sekolah belum terjaring dengan baik;
- Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum berjalan mantap dan sesuai harapan;
- Pergerakan anak bersekolah yang lintas wilayah, sehingga beban pelayanan pendidikan tidak seimbang;
- Belum meratanya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian mulia, yang memberikan bekal untuk siap bekerja sesuai kebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja, system yang berorientasi pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, maupun sistem pendidikan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan.

b. Peluang

- Lokasi sarana pendidikan yang semakin jauh dengan permukiman, khususnya permukiman baru;
- Pendidikan berbasis teknologi informasi dan Pendidikan berbasis kearifan local yang berwawasan global masih kurang.

c. Mutu

- Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya;
- Konten pembelajaran belum relevan, kontekstual, dan memiliki makna sosial yang sesuai dengan kekhasan persoalan sosial dan budaya masing-masing daerah;
- Rendahnya kepekaan terhadap warisan budaya daerah nenek moyang sebagai bagian dari perekat budaya nasional;

- Rendahnya kompetensi tenaga pendidik yang masih di bawah standar;
- Rendahnya pemanfaatan IT;
- Pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan masih perlu ditingkatkan mutunya;
- Masih ada pelayanan lembaga pendidikan yang belum sesuai dengan standar nasional;
- Kemampuan siswa Bandung sebagai bagian dari siswa Indonesia dalam skala internasional masih rendah dalam hal bernalar, analisa kritis, dan kreativitas hanya mampu berpikir dalam level analisa tingkat rendah dengan cara menghafal.

d. Tata Kelola

- Belum optimalnya tata kelola sekolah menyangkut alokasi DAK untuk ruang kelas baru, dana BOS, DSP/SSP;
- Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran lembaga pendidikan masih rendah;
- Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;
- Nasib sekolah pinggiran yang masih minim sarana dan prasarana;
- Inkonsistensi dan ketertutupan dalam Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- Pelaksanaan MBS belum sepenuhnya sesuai dengan Permendiknas No.19 Tahun 2007;
- Biaya pendidikan sekolah menengah masih membebani orang tua peserta didik;
- Atmosfir yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagi proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan wawasan keilmuan belum tercipta;
- Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan ketenagakerjaan belum optimal;
- Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal belum dikembangkan dengan baik;

- Operasionalisasi sekolah mengalami permasalahan akibat tingginya jumlah siswa, termasuk yang berasal dari luar Kota Bandung, sehingga masih banyak kekurangan ruang kelas baru pada pendidikan dasar;



Layanan pendidikan yang lebih luas dan cerdas

4. **Urusan Kesehatan.**

- Meningkatnya prevalensi terjadinya penyakit yang disebabkan karena kepadatan penduduk tinggi dan tekanan masalah lingkungan, sebagai akibat dari [1] sanitasi dan udara yang kotor [2] varians penyakit baru yang menyebar [3] penyakit akibat penyalahgunaan obat. Selain itu penyakit-penyakit degeneratif akibat situasi kondisi perkotaan dan pola hidup juga akan cenderung membesar;
- Sistem layanan kesehatan masih menanggung beban lebih besar dibandingkan dengan kapasitasnya, termasuk mekanisme pengelolaannya;
- Kesadaran masyarakat untuk persalinan oleh tenaga medis kesehatan belum optimal yang menyebabkan target penurunan jumlah kematian ibu melahirkan belum tercapai;
- Angka fertilitas belum tercapai;
- Angka harapan hidup belum tercapai;
- Kapasitas pelayanan Puskesmas belum optimal;
- Penyebaran penyakit-penyakit endemi yang cepat dan mudah mengalami mutasi yang dapat mempengaruhi secara tiba-tiba terhadap tingkat kesehatan penduduk Kota Bandung. Dampak dinamika nasional diantaranya adalah [1] persoalan penyakit endemi yang perlu penanganan bersifat nasional, sehingga

kebijakan strategis nasional dapat mempengaruhi kualitas kesehatan di Kota Bandung [2] dukungan logistik obat dan peralatan kesehatan nasional dan kinerja layanan kesehatan di Kota Bandung;

- Belum optimalnya sinergitas pelayanan kesehatan antara pemerintah dengan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;



Layanan kesehatan luas dan beragam

5. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, dan Ketenagakerjaan (Kelompok Bidang Ekonomi)

- Perkembangan sektor informal pedagang kaki lima di Kota Bandung yang cepat dan cenderung tidak terkendali, sehingga menimbulkan eksternalitas negatif bagi kegiatan lainnya. Pelakunya banyak juga yang berasal dari luar Kota Bandung;
- Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi dengan perkembangan lapangan kerja yang terbatas, diantaranya adalah karena keterbatasan keterampilan dan kecakapan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan sektor ekonomi yang membutuhkannya;
- Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi;
- Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi;
- Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang;

- Permasalahan pasar tradisional terdesak keberadaan pasar modern, karena semakin banyaknya izin yang diberikan kepada swasta untuk membangun hypermarket, supermarket dan toserba pada skala retail menurunkan daya saing pasar tradisional;
- Sentra-sentra kegiatan ekonomi yang sudah terbentuk umumnya belum mendapat dukungan optimal dari pemerintah. Lebih jauh lagi pada kelompok penduduk miskin terjadi kerawanan bahan pokok akibat kenaikan harga;
- Target PDRB riil/kapita belum tercapai;
- Belum optimalnya daya beli masyarakat sebagai salah satu komponen IPM;
- Permasalahan kemiskinan Jawa Barat dapat berimbas meningkatnya urbanisasi di Kota Bandung;
- Distribusi dan *supply* kebutuhan pangan dari regional Jawa Barat dapat mempengaruhi ketersediaannya di Kota Bandung;
- Belum optimalnya pengembangan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional;
- Belum optimalnya pengembangan sistem pembiayaan dengan kemitraan pemerintah dan swasta;
- Belum optimalnya pengembangan sistem insentif terhadap swasta;



Bandung Kota Kreatif sebagai potensi ekonomi yang besar.

6. Urusan Sosial, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga, Ketahanan Pangan, dan Komunikasi dan Informatika (Kelompok Sosial Budaya).

- Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang;
- Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal;
- Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif;
- Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih belum optimal;
- Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia, didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas, serta dengan mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial belum berjalan seperti yang diharapkan;
- Pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi bagi anak dan remaja;
- Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal;
- Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;
- Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang;
- Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan baik;
- Fasilitasi, sarana dan prasarana fisik dan non fisik bagi pengembangan riset/penelitian baik ilmu dasar maupun terapan sesuai dengan perkembangan teknologi global guna mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi dan daya saing daerah masih belum optimal;
- Akses dan link kerjasama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar *stakeholders* masih kurang;
- Pemanfaatan Iptek dan TI di masyarakat masih kurang;

- Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;
- Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;
- Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya untuk kepentingan diplomasi budaya sehingga meningkatkan citra diri, harkat dan martabat bangsa dalam pergaulan dunia;
- Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa;
- Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan masih kurang;
- Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat;
- Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang;
- Permasalahan keamanan pangan terutama yang dikonsumsi anak sekolah;
- Pembangunan jaringan internet yang belum menjangkau seluruh wilayah Kota Bandung;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan publik belum optimal;



Persoalan PMKS terjadi di beberapa tempat dan cenderung menetap

7. Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perhubungan, Pertanahan (Kelompok Infrastruktur dan Tata Ruang)

- Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar hampir seluruh wilayah;
- Kondisi jaringan pedestrian yang kurang memadai dan tempat parkir yang tidak tersedia secara layak;
- Kawasan Pusat Primer Gedebage belum terbangun optimal;
- Ruang terbuka hijau masih sangat kurang;
- Keterbatasan luasan dan sebaran ruang publik juga terjadi di Kota Bandung;
- Kawasan kumuh masih luas di Kota Bandung dan rasio bangunan ber-IMB masing belum maksimal. Banyak lahan yang belum bersertifikat dan potensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari;
- Penataan hunian rumah susun dan permukiman yang layak dengan akses sanitasi yang memadai belum terbangun secara optimal;
- Kondisi drainase yang tidak selaras dengan tata ruang dan prasarana lainnya telah menimbulkan dampak negatif pada sarana jalan dan menyebabkan banjir;
- Sampah masih belum dapat tertangani secara optimal dan timbulan cenderung bertambah. Pengelolaan akhir sampah

belum optimal dan belum mengembangkan sistem partisipatif untuk prinsip 3-R;

- Akses air bersih masih belum dapat memenuhi standar kelayakan dan potensial terancam oleh padatnya permukiman dan perubahan fisik lingkungan. Belum terlayannya kota secara memadai untuk penanganan air limbah terpadu dengan IPAL;
- Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan;
- Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non-pertanian yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan;
- Kurang optimalnya perencanaan perkembangan wilayah pada kawasan tumbuh cepat seperti kawasan perkotaan;
- Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik;
- Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu yang mendukung mobilitas penduduk dan barang belum optimal;
- Pelayanan infrastruktur pendukung bandar udara bertaraf internasional belum optimal;
- Tingginya polusi udara akibat rendahnya pengendalian lalu lintas jalan di perkotaan;
- Besarnya volume pergerakan penduduk dari/ke arah Kota Bandung dan pusat kota setiap pagi hari dan arah sebaliknya di sore hari menyebabkan inefisiensi individu dan masyarakat secara keseluruhan;
- Tingkat kemacetan di beberapa titik maupun kemacetan pada hari tertentu semakin tinggi. Prasarana jalan yang kurang mendukung pergerakan penduduk, karena kapasitas (jalan sempit) yang semakin terbatas dan kondisi jalan yang kurang mendukung;
- Sarana transportasi yang kurang mendukung pergerakan penduduk dari sisi kuantitas, jalur dan kenyamanan;
- Fasilitas transportasi publik yang belum memadai, sarana transportasi yang ada kurang mendukung pergerakan penduduk dari sisi kuantitas, jalur dan kenyamanan.



Infrastruktur jalan masih perlu ditingkatkan



Persoalan drainase yang berimbas pada banjir di beberapa tempat.



Persoalan Kemacetan di Kota Bandung semakin meluas



Banjir terjadi di banyak tempat bila terjadi hujan



Persoalan sampah yang belum tertangani dengan baik



Kawasan Kumuh semakin meluas seiring pertumbuhan penduduk.

8. **Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Perencanaan Pembangunan, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan (Kelompok Pemerintahan).**

- Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi

permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal;

- Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov) belum optimal;
- Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata;
- Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang;
- Pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal;
- Penegakan supremasi hukum masih lemah;
- Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal;
- Kerjasama dengan pihak luar negeri dengan implementasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat masih kurang;
- Kualitas dan kuantitas jejaring kerjasama dengan daerah lain, swasta baik di dalam negeri maupun luar negeri belum optimal;
- Kapasitas aparatur pemerintah belum optimal berdasarkan tingkat kompetensi, kemampuan teknis dan mekanisme birokrasi dalam manajemen pembangunan dan pengelolaan keuangan pemerintah Kota Bandung relatif masih rendah;
- Sistem remunerasi berbasis kinerja yang masih belum terimplementasi dengan baik;
- Kelurahan dan kecamatan belum berperan optimal dalam pelayanan dan pelaksanaan pembangunan skala lingkungan atau di tingkat masyarakat;
- Transparansi pengelolaan pemerintahan belum memadai;
- Pelayanan publik masih memerlukan perbaikan di semua lini;
- Sumber pembiayaan pembangunan relatif belum bervariasi;
- Koordinasi, sinergitas, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam kerjasama antara pemerintahan pada kawasan Metropolitan Bandung pun belum optimal, kerjasama yang dilakukan masih terbata terutama dengan kabupaten/kota yang berbatasan, seperti tempat pembuangan sampah yang atau permasalahan sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air bersih yang masih harus disuplai dari luar Kota Bandung.

4.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah:

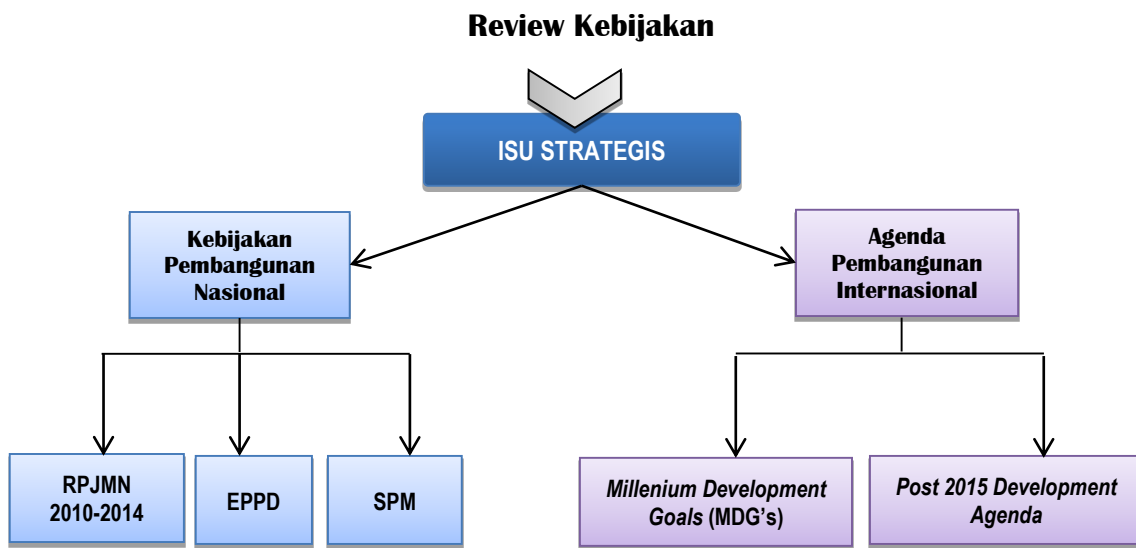
1. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kota Bandung;
2. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah lainnya yang mempengaruhi Kota Bandung;
3. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri atas:
 - RPJPD Kota Bandung 2005-2025;
 - Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana, dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang;
 - Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

Isu strategis yang patut diangkat dalam RPJMD ini ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini:

1. Kriteria-1: Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Kriteria-2: Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Kriteria-3: Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Kriteria-4: Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kriteria-5: Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Kriteria-6: Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

4.2.1. Kajian Kebijakan Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Internasional

Penentuan isu strategis didahului dengan *review* terhadap kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan internasional yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan Kota Bandung. Hasil *review* akan melengkapi draft isu strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi Kota Bandung. Review atas kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan internasional dapat dilihat dalam skema di bawah ini:



1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014

Pemerintah telah menetapkan RPJMN 2010-2014 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada RPJPN 2005-2025. Dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode yang lalu dan mencermati tantangan ke depan, RPJMN menetapkan Visi Indonesia 2014, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 3 misi, dimana misi pertama (melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera) dan misi ketiga (memperkuat dimensi keadilan di semua bidang) bersinggungan dengan permasalahan riil di Kota Bandung.

Perwujudan visi dan misi RPJMN 2010-2014 dilakukan melalui 5 agenda pembangunan, agenda I (pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat) dan agenda V (pembangunan yang inklusif dan berkeadilan) dapat dipahami sebagai turunan dari misi pertama dan ketiga yang telah dijelaskan sebelumnya. Agenda-agenda ini dilengkapi dengan sasaran, yaitu indikator pencapaian pada akhir pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Sasaran pembangunan kesejahteraan rakyat misalnya, ditetapkan target untuk indikator “Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas” tahun 2014 adalah 8,25.

Visi dan misi diturunkan ke level operasional dengan cara menetapkan 11 prioritas nasional untuk lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Mayoritas sumber daya akan dialokasikan untuk mengerjakan 11 prioritas nasional yang terdiri atas:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi;
11. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik;

Setiap program, terdapat substansi inti yang berisi aspek-aspek pada sebuah program yang dilengkapi dengan target yang terukur. Substansi inti ini hendaknya menjadi target bersama yang harus dikejar oleh seluruh daerah, tidak terkecuali oleh Kota Bandung, sebagai bentuk kontribusi dalam mewujudkan Visi Indonesia 2014.

2. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada daerah yang baru dibentuk. Evaluasi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. EPPD meliputi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB).

EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Didalamnya terdapat arahan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengimplementasikan "Sistem Pengukuran Kinerja Mandiri" (*self assessment*) sebagaimana amanat Pasal 32 hingga 40 PP 6/2008. Untuk dapat melakukan hal tersebut Tim Nasional EPPD menyusun indikator kinerja kunci untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah dan pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan. Berdasarkan hasil kajian dan analisis, tim penilai dapat melakukan evaluasi tahap akhir dengan membandingkan tingkat capaian kinerja masing-masing SKPD dengan:

- a. target kinerja yang direncanakan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja SKPD;
- b. target kinerja yang direncanakan sebagaimana termuat dalam RKPD;
- c. realisasi kinerja SKPD tahun sebelumnya; dan
- d. seluruh realisasi kinerja SKPD

Dalam kaitannya dengan isu strategis Kota Bandung, aspek-aspek pembangunan yang terdapat dalam Indikator Kinerja Kunci dapat dipandang sebagai aspek strategis yang harus diprioritaskan penanganannya. Tim perumus dapat melakukan identifikasi permasalahan aspek-aspek pembangunan pada Indikator Kinerja Kunci agar dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dengan aspek tersebut.

3. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Dalam pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut SPM merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), diamanatkan bahwa SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi pemerintahan daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD.

Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Sampai dengan pertengahan tahun 2013, telah diterbitkan 15 (lima belas) SPM oleh kementerian/lembaga, yaitu SPM:

- 1) Bidang Kesehatan di kabupaten/kota;
- 2) Bidang Lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- 3) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota;
- 4) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota;
- 5) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 7) Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
- 8) Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

- 9) Bidang Pekerjaan Umum;
- 10) Bidang Ketenagakerjaan;
- 11) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kab/Kota;
- 12) Bidang Komunikasi dan Informasi;
- 13) Bidang Kesenian;
- 14) Bidang Penanaman Modal;
- 15) Bidang Perhubungan Daerah.

4. *Millenium Development Goals (MDG's)*

Salah satu agenda pembangunan dunia yang dapat menjadi referensi bagi perumusan isu strategis RPJMD Kota Bandung adalah komitmen *Millenium Development Goals* (MDGs) yang ditetapkan pada United Nation Summit tahun 1990 oleh PBB. Dengan telah diadopsinya komitmen MDG's oleh Indonesia, merupakan keharusan bagi seluruh daerah di Indonesia untuk menggunakan target yang dicanangkan dalam MDG's sebagai referensi dalam penetapan target pembangunan daerah.

Konsep MDGs berawal dari adanya pemikiran bahwa beberapa hal yang menjadikan masyarakat menjadi tetap rentan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, ditetapkan delapan tujuan beserta target-targetnya yang diharapkan mampu membantu masyarakat keluar dari persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Konsep MDGs pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak, baik untuk manusia dan lingkungan hidup, bagi laki-laki dan perempuan, bagi orangtua dan anak-anak, serta bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Adapun kedelapan tujuan pembangunan milenium terdiri atas:

1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan;
2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal;
3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Memperbaiki kesehatan maternal;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya;
7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup; dan
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan

Dalam kaitannya dengan penyusunan isu strategis Kota Bandung, sebagian atau seluruh aspek MDGs dapat dipilih sebagai aspek yang diberi perhatian besar dalam pembangunan Kota Bandung 5 (lima) tahun mendatang. Hal ini dapat diawali dengan menjadikan isu MDGs sebagai isu strategis RPJMD Kota Bandung, dengan catatan telah dilakukan kajian mengenai relevansi antara relevansi antara isu MDG dengan permasalahan riil di lapangan.

5. *Post 2015 Development Agenda*

Seiring dengan semakin dekatnya tahun berakhirnya MDGs, yaitu 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio+20 Summit, 192 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas nasional.

Pada tanggal 30 Mei 2013, *High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda* mengeluarkan “*A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development*,” sebuah laporan yang menetapkan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari muka bumi tahun 2030, dan mewujudkan janji pembangunan berkelanjutan. Laporan ini mengajak seluruh warga dunia untuk bekerjasama dalam sebuah kemitraan global baru (*New Global Partnership*) yang menawarkan harapan dan peran bagi setiap orang.

Dalam laporan tersebut, *High Level Panel* yang salah satu ketuanya adalah Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mendorong tujuan pembangunan pasca 2015 untuk melakukan 5 (lima) pergeseran transformasi utama, yaitu:

- a. Tidak meninggalkan siapapun di belakang

Setelah tahun 2015 dunia harus bergerak dari mengurangi kemiskinan ke mengakhiri kemiskinan ekstrim, dalam segala bentuknya. Dunia perlu memastikan bahwa tidak ada satu orangpun-apapun etnis, gender, geografi, disabilitas, ras dan status lainnya yang tidak mendapatkan kesempatan ekonomi dasar dan hak asasi.

b. Menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai inti

Dunia harus mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dari keberlanjutan. Dunia harus bertindak sekarang untuk mengurangi laju perubahan iklim dan degradasi lingkungan, yang menimbulkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi manusia.

c. Transformasi ekonomi untuk penyediaan pekerjaan dan pembangunan yang inklusif

Transformasi ekonomi yang mendalam dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim dan meningkatkan mata pencaharian, dengan memanfaatkan inovasi, teknologi dan potensi bisnis. Semakin beragam kegiatan ekonomi, dan dengan kesempatan yang sama bagi semua orang, akan mewujudkan inklusi sosial, terutama bagi generasi muda, dan mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

d. Membangun perdamaian dan kelembagaan yang efektif, terbuka dan akuntabel bagi semua

Kebebasan dari konflik dan kekerasan adalah hak manusia yang paling mendasar, dan merupakan fondasi paling penting dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Pada waktu yang bersamaan, masyarakat di seluruh dunia berharap pemerintah bersikap jujur, akuntabel dan responsif terhadap permintaan mereka. Dunia mendesak sebuah pergeseran fundamental-yang menempatkan perdamaian dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai elemen inti kesejahteraan, bukan sebuah pilihan ekstra.

e. Membina kemitraan global baru

Semangat kebersamaan, kerjasama dan akuntabilitas antar pihak harus menyokong agenda pembangunan pasca 2015. Kemitraan dilandaskan pada pemahaman bersama akan perikemanusiaan, berbasis pada pengertian dan manfaat antarpihak. Hal tersebut

harus berada di tengah-tengah masyarakat, termasuk mereka yang terdampak oleh kemiskinan dan terpinggirkan, perempuan, remaja, lansia, penyandang cacat dan penduduk lokal. Kemitraan tersebut harus melibatkan organisasi masyarakat, institusi multilateral, pemerintah daerah dan pusat, komunitas sains dan akademis, pelaku bisnis dan filantropi.

4.2.2. Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam, maka perencanaan pembangunan Kota Bandung meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD masing-masing kabupaten/kota.

Tabel 4-8
Identifikasi Isu Strategis/Kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota Lain

Kota Cimahi	KETERKAITAN	Kabupaten Bandung Barat	KETERKAITAN
Masih Tingginya Pertumbuhan penduduk	Tingginya pertumbuhan penduduk dikawasan sekitar Kota Bandung akan memberi peluang lebih besar berpindahnya warga Kota Cimahi ke Kota Bandung	Belum ada penataan ruang kawasan pengembangan sehingga kepastian hukum susah diwujudkan, akibatnya pengaruh <i>urban sprawl</i> yang memicu alih fungsi lahan cukup besar dan keterkaitan dengan kota metropolitan mengakibatkan terjadinya <i>backwash</i> untuk sumber daya hutan dan bahan galian C;	Penataan ruang yang beririsan terutama yang menyangkut kawasan Bandung Utara
Masih Rendahnya daya beli masyarakat, dan Tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Kota Bandung sebagai pull factor dapat menjadi tujuan bagi para pencari kerja dan penduduk miskin yang bekerja tanpa keahlian	Masih banyaknya pengangguran dan Kemiskinan	Kota Bandung sebagai pull factor dapat menjadi tujuan bagi para pencari kerja dan penduduk miskin yang bekerja tanpa keahlian
Belum Optimalnya layanan infrastruktur kota dan sinergitas antar wilayah	Rendahnya layanan infrastruktur wilayah sekitar akan member tekanan terhadap layanan infrasruktur di Kota Bandung	Belum meratanya ketersediaan dan kualitas sarana prasarana transportasi, jaringan irigasi, pendidikan, energi, dan kesehatan;	Ketergantungan antar wilayah terhadap sumberdaya yang ada menyebabkan adanya keharusan melakukan kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya tsb.
Belum optimalnya daya dukung dan daya tampung kota serta pengendalian pemanfaatan ruang kota	Penataan ruang yang beririsan terutama yang menyangkut kawasan Bandung Utara	Kurang didorongnya pengembangan industri berbasis sumber daya lokal yang menyerap tenaga kerja lokal, berwawasan lingkungan, dan memperhatikan keadilan pertumbuhan ekonomi antar wilayah	Keseimbangan pertumbuhan ekonomi diperlukan sebagai arah kebijakan investasi bersama kawasan

Sumber: RPJMD Kota Cimahi dan KBB diolah

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005-2025;

2. Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang;
3. Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

4.2.4. Penetapan Isu Strategis

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kota Bandung dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kota Bandung. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RPJMD Kota Bandung 2013-2018 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan isu strategis yang tepat akan menghindarkan pemerintah daerah dari melakukan apa yang disebut sebagai *error* tipe 3, yaitu merumuskan kebijakan yang salah didefinisikan. Input tahap ini akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran pada bab selanjutnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi 9 (sembilan) isu strategis Kota Bandung, sebagai berikut;

1. Lingkungan Hidup;
2. Infrastruktur;
3. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Keluarga;
5. Penanggulangan Kemiskinan, Permasalahan Sosial dan Pengangguran;
6. Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kesehatan;
8. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
9. Iklim Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tabel 4-9
Keselarasan Isu Strategis Pada RPJPD Kota Bandung
dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018

RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025	RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018
- Lahan yang tersedia terbatas - Menurunnya kualitas udara - Semakin kritisnya ketersediaan dan kualitas air tanah dan air permukaan - Penurunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup
- Peningkatan luas dan lamanya banjir - Tidak selarasnya sebaran fungsi kegiatan dengan fungsi jalan - Belum berkembangnya Gedebage sebagai Pusat Primer ke dua dan belum berfungsinya Pusat sekunder kota - Ketidaksiapan infrastruktur dan keterbatasan lahan di lokasi wisata - Banyak ruang publik belum terancang dengan baik - Pertumbuhan penduduk belum dapat diimbangi oleh penyediaan permukiman layak huni - ketidakseimbangan antara penyediaan infrastruktur dan utilitas kota dengan dinamika aktivitas kota sehingga tingkat pelayanan menjadi tidak optimal - Ketidakmerataan dan masih terpusat penyebaran penduduk di kawasan sekitar pusat kota	Infrastruktur
Belum optimalnya sistem informasi interaktif di antara pemerintah dan warga kota mengenai upaya pembangunan kota; belum ada kebijakan mengenai mekanisme partisipasi warga dalam pembangunan	Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Modal sosial yang bersifat mediasi belum optimal - Belum ada identitas bersama warga Kota Bandung yang dapat mempersatukan penduduk asli dan pendatang	Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Keluarga
- Pertumbuhan penduduk belum dapat diimbangi oleh penyediaan lapangan kerja yang memadai - Meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis, pelacuran, narkoba, gangguan keamanan - Peningkatan kualitas SDM belum dapat diikuti oleh penyediaan lapangan kerja yang sesuai sehingga menimbulkan pengangguran terdidik - Peningkatan kualitas SDM belum dapat diikuti oleh kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja (wiraswasta)	Penanggulangan Kemiskinan, Permasalahan Sosial dan Pengangguran,
- Belum semua penduduk, terutama pada kelompok miskin, mampu menjangkau pelayanan pendidikan tingkat menengah ke atas - Belum optimalnya penghargaan terhadap kebudayaan daerah, warisan budaya Kota Bandung, potensi kreativitas pemuda, dan kerjasama antar kelompok sosial budaya	Pendidikan dan Kebudayaan
Belum semua penduduk dapat terjangkau oleh pelayanan kesehatan yang memadai, terutama golongan penduduk miskin.	Kesehatan
- Keterbatasan SDM, hambatan birokrasi, keterbatasan biaya pembangunan merupakan kendala yang harus segera disikapi dan diantisipasi - Belum optimalnya kerjasama antar kota - Belum optimalnya pelayanan publik yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
- Potensi ekonomi di sektor pariwisata belum ditangani secara maksimal - Belum maksimalnya penanganan Koperasi, UKM dan sektor informal	Iklim Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berbagai isu strategis dimaksud merupakan tantangan yang perlu diantisipasi juga potensi sumberdaya yang perlu dikembangkan untuk keberhasilan pencapaian cita-cita pembangunan.

1. Lingkungan Hidup

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks Pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (*Brundtland Report* dari PBB, 1987). Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah.

Tingginya tingkat kegiatan di Kota Bandung mengakibatkan antara lain bertambahnya luas lahan terbangun dan produksi polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung kota pada lokasi-lokasi yang masih memungkinkan.

Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau kota. Sekalipun luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung selama periode 2008-2012 cenderung meningkat, tetapi masih jauh dari target Nasional sebesar 30% dari luas kota secara keseluruhan. Tahun 2008 persentase RTH berada pada tingkat 8,87%, kemudian tahun 2012 hanya menjadi 12,12%.

Upaya pemenuhan kebutuhan RTH sampai saat ini dilakukan dengan membangun taman Rukun Tetangga, taman Rukun Warga, taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota, jalur hijau, permakaman, penghijauan sempadan sungai, dan penghijauan sempadan rel kereta api yang tersebar merata di tiap-tiap unit lingkungan permukiman.

Peningkatan RTH ke depan dapat dilakukan melalui beberapa langkah operasional diantaranya melalui (i) penyediaan satu taman satu komunitas/kampung, (ii) penanaman satu rumah satu pohon, (iii) kampanye pagar hijau, (iv) inisiasi pengembangan jalan yang berbunga dan berpohon buah-buahan (*urban trees*), (v) inisiasi

kebijakan/peraturan mengenai gedung yang berwawasan lingkungan (*green building*), (vi) pengembangan pertanian di perkotaan (*urban farming*), (vii) perluasan Bandung *green & clean*, (viii) penghargaan untuk individu yang peduli lingkungan, dan lain sebagainya.

Dalam mempertahankan RTH, hutan kota juga perlu terus dipertahankan. Kawasan Lebak Siliwangi yang berfungsi sebagai hutan kota dan sering dimanfaatkan oleh para budayawan dan seniman untuk mencari inspirasi dan berkarya juga perlu dilestarikan dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai Pusat Ekologi Kota yang tidak hanya berfungsi sebagai RTH, juga sebagai pusat edukasi lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Permasalahan lingkungan yang menjadi perhatian di Kota Bandung adalah masalah sampah. Produksi sampah Kota Bandung semakin hari semakin meningkat. Tahun 2011, produksi sampah per harinya sudah mencapai 1.500 m³. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana persampahan perlu didukung secara optimal.

Pengelolaan sampah dengan model *open dumping* harus ditinggalkan karena dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa sistem pengolahan sampah *open dumping* tidak ramah lingkungan serta rentan terhadap bencana longsor, sehingga perlu dilakukan pengembangan sistem dalam melakukan pengolahan sampah.

Dalam rangka pengelolaan sampah juga terus didorong untuk mewujudkan pengelolaan sampah dengan pola 3-R (*reduce, reuse, dan recycle*). Cakupan lokasi percontohan pola 3-R terus meningkat dan mencapai sekitar 16% dari lokasi kelurahan di Kota Bandung. Untuk pengelolaan sampah perkotaan relatif meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, dimana cakupan pelayanan pengangkutan sampah tahun 2012 berkisar 69 %.

Permasalahan sampah di Kota Bandung menyeruak lagi di awal 2013 dimana sampah menumpuk di beberapa tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di Kota Bandung, bahkan beberapa diantaranya menumpuk di tepi jalan karena rusaknya alat berat yang dipergunakan

di tempat pembuangan sampah akhir (TPA) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Akibatnya, selama hampir dua minggu, sampah di kota Bandung tidak dapat diangkut ke TPA.

Permasalahan sampah perlu ditangani sesegera mungkin karena TPA Sarimukti akan habis masa pakainya tahun 2015. Gerakan seperti pengembangan bank sampah di lingkungan masyarakat perlu lebih diintensifkan lagi. Optimalisasi 3-R di lingkungan keluarga juga perlu lebih ditingkatkan, sehingga dapat dihasilkan sampah yang sangat sedikit (*zero waste home*). Penggunaan plastik harus diminimalisasi, selain itu dapat dikembangkan suatu produk hasil dari daur ulang sampah (*recycle*) skala lingkungan yang bernilai ekonomis. Pola *waste to energy* skala kota yang telah diinisiasi juga dapat diterapkan dalam lingkup yang lebih kecil lagi, seperti di tingkat RW.

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di tingkat kota juga menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan. Sarana truk sampah, motor sampah, dan sarana lainnya perlu disediakan secara layak. Penyediaan TPS yang inovatif akan menjadi salah satu perhatian agar tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya.

Pengakuan melalui penghargaan dari individu yang berjasa dalam menggalakan kebersihan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, disamping pelaksanaan kampanye di media cetak/digital.

2. Infrastruktur

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah. Termasuk dalam penyediaan infrastruktur adalah jalan, jembatan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan lain-lain. Kondisi Infrastruktur jalan raya di Kota Bandung tahun 2013, dari 1.236 kilometer jalan yang ada di Kota Bandung, sekitar 31,04% dalam kondisi

rusak atau sepanjang 383 kilometer. Namun dari panjang jalan rusak tersebut baru bisa diperbaiki 190 kilometer atau sekitar 15%.

Secara umum, permasalahan kerusakan jalan disebabkan oleh dua hal, pertama repitisi atau pengulangan beban, kedua karena adanya air yang menggenangi permukaan jalan, yang menyebabkan longgarnya ikatan aspal dengan bahan lain, tipikal kerusakan karena pengaruh air adalah lubang. Sekali lubang terbentuk maka air akan tertampung di dalamnya sehingga dalam hitungan minggu lubang yang semua kecil dapat membesar dengan cepat. Itulah sebabnya kerusakan jalan sering dikatakan bersifat eksponensial. Artinya bahwa memperbaiki jalan harus dilaksanakan secara simultan dengan perbaikan drainase.

Jalan yang rusak semakin meningkat, terutama bila masuk musim penghujan karena air meresap ke badan jalan. Ini terutama disebabkan minimnya daya dukung sistem drainase yang ada. Dengan banyaknya jalan yang rusak dan berlubang membuat volume kendaraan di sejumlah titik di Kota Bandung semakin macet. Kondisi jalan rusak telah menjadi salah satu persoalan utama di Kota Bandung yang selama ini dan sangat banyak dikeluhkan oleh masyarakat pengguna jalan. Perlu dilakukan penelitian terkait daya tahan kekuatan dan kualitas jalan agar tercipta optimalisasi mobilitas publik, serta penghematan anggaran. Perkerasan jalan dalam hal ini dapat dilakukan dengan teknologi resapan yang memadai. Diharapkan kualitas jalan kota mampu bertahan hingga 3 (tiga) tahun.

Upaya peningkatan aksesibilitas jalan juga dilakukan dengan pelebaran jalan-jalan utama sekaligus pedestrianisasi. Kondisi trotoar Kota Bandung masih menunjukkan kondisi kurang kenyamanan dan keamanannya, terutama pemakaian yang menyimpang dari fungsi sesungguhnya, pembangunan dan perawatannya yang asal-asalan, gangguan karena masalah bongkar-pasang listrik, dan telepon. Kondisi seperti ini apabila tidak dilakukan penanganan yang tepat akan mengganggu kelancaran aktivitas warga kota yang pada gilirannya dapat menjadi masalah ekonomi maupun sosial yang meluas.

Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dapat dilakukan melalui beberapa strategi kebijakan diantaranya: pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas dan umur pakai panjang, pembersihan trotoar dari PKL, perkerasan jalan dengan teknologi resapan, Perbaikan saluran gorong-gorong secara komprehensif untuk jaringan kabel, drainase dan lain-lain. Buruknya kualitas infrastruktur berimbas pada permasalahan yang dirasakan semakin besar belakangan ini yaitu kemacetan lalu lintas yang menghambat aktivitas keseharian masyarakat serta menyebabkan kerugian materi akibat penggunaan bahan bakar yang tidak optimal, belum lagi permasalahan polusi sampai dengan gangguan kejiwaan yang merusak kesehatan masyarakat.

Salah satu solusi yang saat ini tengah dijajaki adalah dengan menyediakan transportasi massal yang representatif, serta pembangunan jalan layang di beberapa titik, seperti Cimindi, Kiaracondong, dan Pasupati. Pembangunan jalan layang (*flyover*) atau bahkan jalan bawah tanah (*underpass*) ke depan masih tetap diperlukan untuk dapat mengurangi kemacetan. Selain itu, perlu dikembangkan lebih lanjut konsep SAUM potensial seperti monorel, *tram*, atau *cable car*, dan lain sebagainya. Konsep pengembangan moda transportasi *Mass Rapid Transit* (MRT) dengan jenis monorel sudah diinsiasi oleh Pemerintah Kota Bandung tahun 2012. Hal ini ditandai dengan penandatanganan joint operation antara Vice President China National Machinery Imp. Exp. Corporation (CMC) dengan Presiden Direktur Panghegar. Pembangunan tahap I direncanakan di sepanjang bantaran Sungai Cikapundung.

Berkembangnya penggunaan sepeda ke tempat kerja (*bike to work*) juga merupakan salah satu upaya yang harus terus dikembangkan dalam mengatasi persoalan kemacetan dan juga peningkatan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup yang terjadi saat ini. Dukungan pembuatan jalur sepeda dan perawatannya di Kota Bandung merupakan langkah nyata dalam merealisasikan penggunaan moda transportasi yang ramah lingkungan. Komunitas pesepeda harus lebih diapresiasi atas upaya positif mereka dalam mempromosikan hal ini.



Gambar 4-1
Jalur Sepeda di Kota Bandung

Pengembangan sepeda sebagai moda transportasi perlu terus digalakkan ke depan, diantaranya melalui pendekatan (i) bersepeda ke tempat kerja (*Bike to Work*), (ii) bersepeda ke sekolah (*Bike To School*), (iii) bersepeda ke tempat makan siang (*Bike to Lunch*), (iv) *bike to sharing*, (v) inisiasi pengembangan hari tertentu untuk bersepeda, dan sebagainya. Pengembangan *shuttle* untuk sepeda kota '*City Bike Shuttle*' juga perlu lebih ditingkatkan lagi ke depan.

Penegakan aturan bagi para pengendara kendaraan harus lebih ditingkatkan. Pembinaan bagi para supir angkot agar tidak ugal-ugalan perlu dimulai secara tegas. Pengawasan bagi para supir angkot dapat dilakukan dengan melakukan pendataan dan penyediaan identitas bagi seluruh supir. Penegakan hukum bagi para pengendara yang parkir sembarangan dapat menggunakan mekanisme "gembok parkir" dan denda bagi pelanggar parkir yang saat ini telah dilakukan.

Dukungan dalam mengurangi masalah transportasi diantaranya dapat dilakukan dengan penyediaan fasilitas parkir yang memadai dan menggunakan teknologi maju agar dapat meminimalisasi kebutuhan ruang, terutama di pusat perkotaan. Selain itu, diperlukan terobosan aturan terkait angkutan umum, kendaraan pribadi dan perpajakan yang dapat menguraikan permasalahan transportasi. Ini karena hingga saat ini belum ada aturan yang secara komprehensif mengatur aspek-aspek tersebut. Kampanye tentang tertib lalu lintas bagi masyarakat luas harus

segera diimplementasikan dan juga perlu dikembangkan insentif melalui skema penghargaan bagi individu/institusi yang berpartisipasi mengurangi kemacetan. Rekayasa pengaturan lalu lintas yang saat ini masih belum optimal perlu segera direalisasikan. Konsep penataan lalu lintas 'jalan satu arah' diantara dapat dijadikan opsi penting. Selain itu, dalam mengantisipasi arus masuk kendaraan dari luar Kota Bandung, seperti kebijakan *4 in 1* di Jalan Djunjungan (Pasteur) dapat dikembangkan lebih lanjut.

Buruknya Infrastruktur juga membawa konsekuensi terhadap terjadinya permasalahan banjir yang sampai saat ini masih belum dapat diselesaikan. Tahun 2011 masih terdapat 10 lokasi banjir yang belum teratasi. Menurut Otto Soemarwoto (2002), koefisien air larian di Kota Bandung pada tahun 1960-an kira-kira 40% dan Bandung Utara 25%. Sekarang di daerah kota diperkirakan 75% dan di Kawasan Bandung Utara 60%. Tingginya air larian menyebabkan menurunnya air yang meresap ke dalam tanah, sehingga di musim kemarau mengalami kekeringan. Sebaliknya tingginya air larian tersebut menimbulkan banjir di musim hujan. Luas area yang terkena banjir di Kota Bandung di setiap tempat bervariasi antara 0,5 Ha sampai 25 Ha. Total Luas lahan terkena banjir tahun 2006 mencapai 296 Ha dengan frekuensi/lama genangan antara 6-18 hari pertahun. Rusaknya fungsi resapan di Kota Bandung dan daerah sekitarnya, khususnya di wilayah Kawasan Bandung Utara dapat terlihat dari indikasi tingginya selisih debit maksimum dengan debit minimum sungai-sungai yang ada atau melintas Kota Bandung. Berdasarkan data dari Dinas Pengairan Kota Bandung 2006, terlihat bahwa sebagian besar debit maksimum sungai yang melintas di Kota Bandung lebih dari 20 m³, sementara debit minimumnya kurang dari 1 m³.

Topografi Kota Bandung, serta perkembangannya secara horizontal dan vertikal membutuhkan perencanaan dan penerapan teknologi drainase yang baik, merevitalisasi drainase kota akan banyak implikasi kebaikan, bukanhanya banjir cileuncang yang dapat direduksi bahkan bisa diarahkan menjadi asupan bagi air tanah dengan teknik biopori dan sumur resapan. Secara umum sistem drainase di Kota Bandung terbagi

menjadi 2 (dua) bagian, yaitu drainase makro dan drainase mikro. Saluran pembuangan makro adalah saluran pembuangan yang secara alami sudah ada di Kota Bandung, yang terdiri dari 15 sungai sepanjang 265,05 km. Saluran pembuangan mikro adalah saluran yang sengaja dibuat mengikuti pola jaringan jalan. Namun demikian, sekitar 30% ruas jalan belum memiliki saluran drainase sehingga beberapa daerah menjadi rawan banjir dan genangan. Kondisi saluran mikro inipun di beberapa tempat terputus (tidak berhubungan dengan saluran di bagian hilirnya). Secara keseluruhan sistem drainase di Kota Bandung masih belum terencana dengan optimal. Selain drainase, penyebab terjadinya daerah rawan banjir adalah karena tertutupnya *street inlet* oleh beberapa aktivitas sehingga air hujan tidak bisa masuk ke dalam saluran drainase, adanya pendangkalan di beberapa bagian saluran, konstruksi drainase yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta alih fungsi lahan dari kondisi alami menjadi lahan dengan fungsi komersil seperti pertokoan, mall, jalan, perumahan, dan lain-lain sehingga tutupan lahan pun berubah yang meningkatkan debit limpasan.

Potensi kerusakan jalan di Bandung jauh lebih besar pada saat kondisi basah dibandingkan pada kondisi kering. Inilah permasalahannya jalan di kota Bandung yang banyak rusak. Air hujan sering tidak terakomodasi dan menggenangi banyak segmen jalan. Saluran air tersebut sebenarnya merupakan bagian dari jalan. Tapi untuk kota, biasanya saluran pinggir jalan juga menjadi saluran perumahan dan saluran pembuangan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memisahkan antara saluran drainase jalan dan saluran pembuangan air kotor pemukiman. Untuk desain pembangunan drainase jalan atau perbaikan drainase jalan perlu memperhatikan kondisi tata guna lahan di sekitarnya. Konsekuensinya jika melakukan perbaikan drainase jalan di kawasan padat, perlu dipertimbangkan untuk membuat yang lebih dalam, termasuk sistem *inlet*-nya untuk mereduksi aliran sampah ikut masuk ke dalam drainase. Selain itu, diperlukan juga terobosan yang dapat menghasilkan drainase yang multifungsi.

Berdasarkan data dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, dari 1561 RW, sebanyak 194 diantaranya termasuk ke dalam daerah pemukiman kumuh. Dijelaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, disebutkan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Dari 194 RW tersebut, 29 RW termasuk dalam kategori kumuh tinggi, 88 RW kumuh sedang dan 77 kumuh rendah. Yang termasuk dalam daerah kumuh tinggi yaitu Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astanaanyar, Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan, Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung, dan Kelurahan Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul. Karakteristik daerah kumuh tinggi yaitu daerah pemukiman yang ketersediaan air bersihnya kurang dari 30 %, sistem drainase buruk, kondisi jalan lingkungan rusak parah lebih dari 70%, kepadatan penduduk lebih dari 100 unit rumah per hektar, tidak memiliki jarak antar bangunan dan perkembangan bangunan tinggi. Meluasnya kawasan kumuh berkorelasi dengan meningkatnya kepadatan penduduk yang tahun 2008 saja telah mencapai angka 156 jiwa/hektar. Dengan angka pertumbuhan penduduk 1,59% pertahun diprediksi pada kepadatan penduduk tahun 2025 akan mencapai 300 jiwa/hektar.

Lingkungan permukiman yang termasuk dalam kawasan kumuh di Kota Bandung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika tahun 2008 tercatat hanya 18% saja kawasan kumuh yang ada, maka tahun 2012 tercatat bahwa 69,59% kawasan permukiman yang ada di Kota Bandung termasuk ke dalam kawasan kumuh. Hal ini perlu menjadi perhatian penting dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kota Bandung ke depan. Dengan semakin besarnya penduduk yang ada dan keterbatasan daya tampung lahan yang ada, maka jika tidak ada penataan perumahan dan kawasan permukiman yang komprehensif dapat dipastikan kawasan kumuh akan semakin

meningkat di masa mendatang. Rumah susun sebagai salah satu solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan kawasan kumuh hingga saat ini belum dikelola secara optimal. Permasalahan aspek legalitas serta profesionalisme pengelolaan menjadi kendala yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Bandung. Selain itu, perbaikan kawasan kumuh juga dapat dilakukan dengan bantuan/fasilitasi perbaikan rumah (bedah rumah) terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Prinsip utama dalam perbaikan kawasan kumuh yang perlu ditekankan ialah membangun tanpa harus menggusur pemilik rumah.

3. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi dapat dipahami sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran informasi. Teknologi informasi dewasa ini menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan organisasi. Penerapan teknologi informasi pada organisasi pemerintah secara umum bertujuan untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, Electronic Government merupakan proses transformasi pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar dapat mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Seluruh lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal melalui e-government. Berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tersebut, setiap gubernur dan bupati/walikota diharuskan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional.

Dalam pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (e-Government), Pemerintah Kota Bandung telah menjalankannya melalui Bandung Integrated Resources Management System (BIRMS) yaitu sistem pengelolaan daerah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang diawali dari Proses Perencanaan Pembangunan Daerah, Pelaksanaan Anggaran dan Pengawasan Anggaran serta Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Upaya lain yang telah dilaksanakan adalah program RW-Net, yaitu program pendekatan layanan kepada masyarakat berupa penambahan fungsi pemberdayaan potensi bisnis di 1561 lokasi RW di Kota Bandung. Aplikasi *on-line* pada program RW-Net telah memuat dua layanan yakni layanan pembayaran dan layanan pelaporan guna melengkapi data kependudukan pemerintahan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi hingga saat ini dirasa masih belum optimal. Hal ini disebabkan belum adanya kesiapan aparatur dan masyarakat dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Upaya memperluas pelayanan publik berbasis teknologi informasi direncanakan dengan memanfaatkan media-media yang tersebar seperti melalui Masjid-Net, penyediaan Taman Wifi, penerapan aplikasi LAPOR (Citizen Reporting), membudayakan sosial media di SKPD, penerapan kartu parkir prabayar, pajak online, penyediaan tablet di sekolah serta kegiatan yang berkaitan dengan perwujudan Bandung *smart city*.

4. Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Keluarga

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Berdasarkan pemahaman mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat, upaya pemerintah untuk mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Kota Bandung memerlukan penguatan agar potensi masyarakat yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan kota. LPM, PKK, RW, dan Karang Taruna sebagai institusi lembaga kemasyarakatan belum berperan

optimal dalam pemberdayaan masyarakat serta dalam penyelenggaraan pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya.

Role Position LPM, PKK, RW, dan Karang Taruna sebagai garda terdepan pemberdayaan masyarakat layak dirumuskan secara lebih rinci mengingat posisinya yang dituntut untuk mampu mewarnai gerak langkah pembangunan di tingkat Kelurahan. Di samping itu, baik LPM, PKK, RW maupun Karang Taruna memiliki intensitas yang tinggi dalam berinteraksi dengan masyarakat di wilayahnya, hal ini tentu dapat menjadi modal utama di wilayahnya masing-masing.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat akan sangat ditentukan oleh keluarga sebagai unit sosial terkecil pembentuk institusi masyarakat, ketahanan keluarga menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat serta upaya mereduksi permasalahan sosial. Oleh karena itu, negara seharusnya bertanggung jawab dan berpihak kepada ketahanan keluarga yaitu dengan menyediakan lingkungan dan sarana yang nyaman.

Pemberdayaan keluarga merupakan hal yang penting dalam membangun ketahanan keluarga. Pemerintah saat ini lebih banyak melakukan pemberdayaan keluarga dari sisi ekonomi, namun konsep pendampingan perlu dielaborasi kembali dengan mengutamakan “*local wisdom*” dan cara pandang kewirausahaan guna memperkecil ketergantungan terhadap pihak luar. Kesepahaman cara pandang tentang hasil dan upaya sebaiknya lebih diperdalam sehingga keluarga sebagai elemen pembentuk masyarakat dapat menghargai nilai-nilai perjuangan dan kesatuan. Memperjuangkan harkat hidupnya, dan bersatu dalam melakukan proses perjuangan sebagaimana dimaksud. Dalam hal ini, kemandirian ekonomi keluarga memiliki peran sangat strategis dalam membentuk ketahanan sebuah keluarga.

Poin lain dalam ketahanan keluarga adalah memberdayakan keluarga dalam hal pengambilan keputusan. Setiap anggota keluarga seharusnya terakses dengan informasi dan pengetahuan sehingga dapat mengambil keputusan dengan sebaik baiknya.

5. Penanggulangan Kemiskinan, Permasalahan Sosial, dan Pengangguran

Kecenderungan kemiskinan di Kota Bandung mempunyai empat dimensi pokok, yaitu: kurangnya kesempatan, rendahnya kemampuan, kurangnya jaminan, dan ketidakberdayaan. Mengacu pada batasan kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) maka berdasarkan hasil sensus yang dilakukan tahun 2008 tercatat sebanyak 82.432 Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau 11,66% dari jumlah total Kepala Keluarga di kota Bandung.

Angka kemiskinan kota Bandung tahun 2008 tersebut apabila ditelusuri lebih mendalam terhadap 30 Kecamatan, maka diperoleh persentase terbesar keluarga miskin berada di Kecamatan Mandalajati (46,29%). Namun demikian, apabila dicermati lebih lanjut pada pendekatan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) terbanyak, maka Kecamatan Bojongloa Kaler dan diikuti oleh Kecamatan Kiaracondong serta Kecamatan Batununggal merupakan jumlah RTS terbanyak.

Berdasarkan kategori persentase dan jumlah keluarga miskin per kecamatan di Kota Bandung, dapat diklasifikasi menjadi empat karakteristik kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan yang jumlah keluarga miskin dan persentase terhadap seluruh keluarga di kecamatan tersebut tergolong tinggi;
2. Kecamatan yang jumlah keluarga miskin banyak, namun persentase terhadap seluruh keluarga di kecamatan tersebut tergolong kecil;
3. Kecamatan yang jumlah keluarga miskin tergolong sedikit namun persentase terhadap seluruh keluarga di kecamatan tersebut tergolong tinggi;
4. Kecamatan yang jumlah keluarga miskin dan persentase terhadap seluruh keluarga di kecamatan tersebut tergolong kecil.

Fokus penting untuk program penanggulangan kemiskinan terutama adalah kategori-1, yaitu kecamatan yang jumlah keluarga miskin dan persentase terhadap seluruh keluarga di kecamatan tersebut tergolong tinggi.

Sebaran penduduk miskin terbanyak adalah di Kecamatan Bojongloa Kaler, Batununggal, Kiaracondong, Cibeunying Kidul, Babakan Ciparay, Coblong, Bojongloa Kidul, Bandung Kulon, dan Cicendo. Seluruh kecamatan tersebut meliputi 50% jumlah penduduk miskin di Kota Bandung. Kecamatan-kecamatan yang terberat mengalami kemiskinan, yaitu jumlah penduduk miskin tergolong banyak dan proporsi terhadap penduduknya tinggi adalah di Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Lengkong, Ujungberung, Mandalajati, Kiaracondong, Batununggal, Cicendo, Cibeunying Kidul, Coblong, dan Andir.

Pada umumnya kondisi ekonomi dan pendidikan orang tua keluarga miskin terlahir dari keluarga miskin sebelumnya. Tingkat pendidikan keluarga miskin juga tidak berbeda dengan tingkat pendidikan orangtua mereka. Keluarga miskin cenderung tidak mampu menyekolahkan anggota keluarganya pada jenjang yang lebih tinggi. Kemiskinan secara alamiah menyebabkan keturunannya terhambat pada berbagai akses kehidupan. Kepala keluarga miskin umumnya tingkat pendidikannya rendah, demikian juga dengan anak-anak mereka. Artinya keluarga miskin sekarang ini juga berpeluang untuk melahirkan keluarga miskin berikutnya, bila tidak ada perubahan mendasar yang mengubah kehidupannya. Keluarga miskin tersebut umumnya terlahir, tumbuh, berkembang, bersekolah, bermain dan bahkan berumah tangga tangga pada lingkungan yang sama hingga sekarang ini yang kondisinya tidak lebih baik. Keluarga miskin umumnya sedikit memiliki aset ekonomi produktif.

Salah satu permasalahan sosial ekonomi yang cukup pelik dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung adalah keberadaan para pedagang sektor informal/Pedagang Kaki Lima (PKL) yang hingga saat ini masih menjadi polemik tersendiri. Di satu sisi, aktivitas para PKL yang umumnya menggunakan sejumlah area fasilitas umum, sering mengganggu kepentingan umum dan menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas. PKL juga adalah para pelaku UKM yang perlu diberdayakan, difasilitasi, ditata, dan dibina agar menjadi faktor pendorong pemberdayaan kota. Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, diharapkan keberadaan PKL dapat disinergikan dan diharmoniskan dengan pengembangan kota. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dinas KUKM dan Perindag), jumlah PKL di Kota Bandung mencapai 20.326 orang yang tersebar di 30 kecamatan. Para PKL tersebut akan ditata dalam zona merah, kuning, dan hijau yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandung.

Sektor informal (PKL), menyediakan lapangan kerja dan barang bagi begitu banyak orang. PKL memiliki peran ekonomi penting bagi kelangsungan ekonomi masyarakat. Bila dikelola dan ditata (waktu dan lokasi/zonasi berdagang) dengan baik dan penegakan hukum yang tegas, lokasi berdagang PKL bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi Kota Bandung, bila yang dijual merupakan barang-barang yang khas. Belum dapat tertatanya PKL di Kota Bandung salah satunya karena belum adanya inventarisasi individu dan kelompok PKL secara menyeluruh dan mendetail. Selain itu, belum terdapat wadah/forum resmi dari gabungan seluruh PKL Kota Bandung. Untuk itu ke depan diperlukan forum PKL yang dapat menjadi wadah organisasi resmi. Melalui wadah organisasi ini, maka pembinaan dan penataan PKL menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Selain itu, pengembangan (i) kampanye tertib PKL, (ii) kartu PKL, (iii) kredit PKL dapat diinisiasi melalui mekanisme forum PKL tersebut. Bantuan/ fasilitasi dalam hal desain jongko/lapak PKL agar lebih menarik dan berdaya jual juga dapat dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, potensi penerimaan pendapatan yang sah dari PKL juga perlu di atur, misalnya dalam bentuk retribusi/pajak sesuai dengan batas-batas aturan yang berlaku.

Perdagangan, baik formal maupun informal menjadi daya tarik pendatang untuk berkegiatan dan berkunjung ke Kota Bandung. Sektor ini merupakan sektor yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan dan dikendalikan agar tidak menjadi kontraproduktif di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan semacam *blue print* atau *roadmap* yang komprehensif untuk sektor-sektor ini.

6. Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menjadi objek dan subjek pembangunan. Dari hasil penelitian terungkap bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokusnya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan agar setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan. Secara umum, indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Bandung telah memenuhi target pencapaian, tetapi ada beberapa indikator yang mempengaruhi indeks pendidikan tahun 2012 belum mencapai target tahap II RPJP, yaitu: Rata-rata lama sekolah yang memiliki target 11,85 tahun hanya mencapai 10,77 tahun; dan Angka Melek Huruf yang memiliki target 99,67%, capaian kinerjanya adalah 99,58%. Untuk itu, akses layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan capaian target indeks pendidikan. Permasalahan yang menyangkut aksesibilitas pendidikan bagi setiap lapisan masyarakat adalah dengan diberlakukannya klaster sekolah per wilayah. Tujuan awal pengklasteran adalah untuk memberikan kemudahan akses bagi siswa di suatu wilayah dengan pelayanan cakupan pendidikan dari sekolah yang tersedia di wilayah tersebut. Dalam perjalanannya, klaster tersebut menunjukkan adanya perbedaan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang ada di suatu sekolah, serta menunjukkan adanya perbedaan tingkat layanan dalam pendidikan.

Adanya pengklasteran sekolah yang memiliki tingkatan 1 hingga 3, serta ketimpangan kualitas sekolah pada klaster yang berbeda menyebabkan adanya penumpukan minat siswa di suatu sekolah pada saat PSB (Penerimaan Siswa Baru). Akibat adanya penumpukan minat masuk tersebut maka penerapan sistem *passing grade* seperti persyaratan mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa pengklasteran telah menutup akses bagi kelompok siswa yang membutuhkan peningkatan kualitas

pendidikannya namun tidak mampu mengakses akibat adanya persaingan dalam sistem yang belum terevaluasi objektivitasnya. Untuk itu diperlukan upaya dalam mengurangi ketimpangan kualitas sekolah antar klaster dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, memberlakukan standar manajemen yang sama, serta menjalankan rotasi dan mutasi guru/ kepala sekolah secara berkala sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat. Di samping itu, dengan adanya rotasi dan mutasi secara berkala diharapkan akan terjadi transfer informasi manajemen sekolah yang dibutuhkan dalam rangka mengurangi disparitas kualitas pendidikan sekolah di Kota Bandung. Diharapkan dengan berkurangnya ketimpangan kualitas pendidikan antar klaster sekolah, maka para siswa dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dalam setiap klasternya.

Selain akses layanan pendidikan yang belum merata dan berkeadilan, rendahnya mutu pelayanan pendidikan, belum optimalnya tata kelola lembaga pelayanan pendidikan juga rendahnya kualitas materi dan metode pembelajaran, masih menjadi persoalan penting untuk pencapaian target urusan pendidikan.

7. Kesehatan

Faktor kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting mengingat bahwa pada pelaksanaannya upaya penanganan kesehatan disamping upaya kuratif berupa pengobatan setelah masyarakat terkena penyakit, ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit.

Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Upaya

peningkatan kualitas kesehatan lingkungan menjadi penting mengingat bahwa beberapa penyakit yang berjangkit luas pada warga masyarakat berawal dari rendahnya kualitas kesehatan lingkungan. Untuk itu diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita.

Disamping upaya promotif dan preventif tersebut di atas, upaya penting lain yang menjadi lini terdepan dalam isu kesehatan adalah upaya kuratif dan rehabilitatif, yaitu pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan. Bentuk pelayanan kuratif tersedia melalui pelayanan Balai Pengobatan, Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), Klinik Kesehatan, dan Rumah sakit.

Ketersediaan Puskesmas di Kota Bandung pada periode 2008–2010 tercatat bahwa rasio Puskesmas per satuan penduduk di Kota Bandung sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,0301. Rasio puskesmas per satuan penduduk dalam hal ini adalah jumlah puskesmas per 1.000 penduduk. Tahun 2010, di Kota Bandung satu unit Puskesmas melayani 33.219 orang penduduk. Untuk cakupan Puskesmas di Kota Bandung selama periode 2008-2010 sudah di atas 100%. Artinya, jumlah puskesmas di suatu kecamatan ada yang lebih dari satu puskesmas. Cakupan puskesmas tahun 2010 mencapai 243,3%.

Di sisi lain, jumlah rumah sakit di Kota Bandung selama periode 2008-2011 mengalami kenaikan cukup signifikan, jika tahun 2008 tercatat terdapat 10 rumah sakit, maka pada tahun 2011 telah mencapai 30 rumah sakit. Perbedaan yang cukup tinggi, diindikasikan bahwa tahun 2008 belum semua rumah sakit tercatat. Kenaikan jumlah rumah sakit ini mengakibatkan rasio rumah sakit per satuan penduduk mengalami peningkatan, walaupun secara paralel jumlah penduduk Kota Bandung

juga mengalami pertumbuhan. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk. Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Bandung tahun 2010 mencapai 0,0124, artinya satu rumah sakit dapat melayani sebanyak 80.832 penduduk. Namun perkembangan jumlah rumah sakit yang ada di Kota Bandung tidak serta merta akan selalu meningkatkan akses kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung memiliki kewajiban dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin terutama untuk masalah kegawatdaruratan.

Permasalahan lain yang mengemuka adalah ketidaktercapaian indeks kesehatan pada RPJPD tahap kedua yang menunjukkan bahwa jumlah kematian ibu melahirkan melebihi target perkiraan hingga 200%, hal tersebut menunjukkan adanya kegawatdaruratan yang harus ditangani secara serius oleh Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan hasil kajian, direkomendasikan bahwa diperlukan adanya peningkatan kapasitas Puskesmas bagi masyarakat di wilayah-wilayah perbatasan Kota Bandung agar dapat melayani masyarakat untuk 24 jam. Puskesmas yang direkomendasikan untuk ditingkatkan kapasitasnya baik dari segi peralatan medis, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta ketersediaan ruang perawatan adalah Puskesmas yang berada di Kecamatan Rancasari (Gedebage), Kecamatan Bandung Kidul, dan Kecamatan Cibiru. Dengan tersedianya layanan puskesmas 24 jam, akan memberikan kemudahan daya jangkau masyarakat, terutama warga miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan di saat gawat darurat.

8. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri atas tiga elemen utama. *Pertama*, reformasi keuangan daerah yaitu sebuah mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tenggat waktu serta target yang tepat. *Kedua*, reformasi sumber daya aparatur daerah yaitu sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan sebuah

program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia. *Ketiga*, reformasi pelayanan publik; yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang tepat dan profil aparat yang tepat, maka pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu terupdate dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang diinginkan.

Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Kota Bandung telah mengupayakan dengan beberapa hal. Salah satunya dengan menyusun *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kota Bandung Tahun 2010-2014. Selain menyusun roadmap Kota Bandung termasuk Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan Penilaian Mandiri Penerapan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui PMPRB on-line oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Dalam penerapan *electronic government* Kota Bandung menjadi salah satu kota yang lebih awal merintis dengan menerapkan *Electronic Procurement* dalam proses pelelangan sejak tahun 2007. Sejak tahun 2011 dirintis juga tata kelola perencanaan dan penganggaran kota bandung telah terintegrasi berbasis IT, atau dikenal sebagai *Bandung Integrated Resources Management System* (BIRMS). Tahun 2007-2008 Kota Bandung juga melakukan restrukturisasi birokrasi melalui penguatan fungsi badan pelayanan perijinan terpadu, serta penerapan ISO di seluruh SKPD Kota Bandung secara bertahap, dan pada tahun 2013 diharapkan seluruhnya akan bersertifikat ISO. Ini semua dilakukan untuk dapat meningkatkan kepuasan layanan kepada masyarakat.

Walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk perbaikan tata kelola pemerintah daerah, namun hal ini tetap menyisakan berbagai kendala. Terkait dengan transparansi anggaran, diketahui bahwa Kota Bandung termasuk daerah yang masih belum transparan, baik dalam proses pembahasan maupun penetapan APBD. Pada proses pembahasan APBD

Kota Bandung belum memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam prosesnya. Demikian juga setelah APBD ditetapkan, masyarakat tidak memiliki akses untuk mengetahui belanja dan pendapatan pemerintah. Disamping itu, Kota Bandung masih menyisakan pekerjaan rumah berkaitan dengan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang masih ada di level Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2012 (*Nomor Laporan BPK RI: LHP Nomor 22.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 Tanggal 24 Mei 2012*). Salah satu kendala terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ialah terkait pengelolaan aset.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kota Bandung masih belum optimal. Alokasi belanja pegawai yang masih cukup tinggi, mengakibatkan manfaat untuk belanja langsung bagi masyarakat masih terbatas. Tingkat kepuasan publik juga dirasakan belum optimal. Masalah ini diindikasikan masih banyaknya keluhan masyarakat tentang beberapa jenis pelayanan umum. Misalnya, terkait mahal biaya pendidikan di Kota Bandung, penyelenggaraan pendidikan di beberapa tempat masih mengikuti mekanisme pasar, dan lambannya pengurusan perijinan. Selain itu, masih dijumpai beberapa keluhan, seperti dalam hal pengangkutan sampah, penyediaan air bersih, penyediaan layanan kesehatan, dan pengelolaan jalan kota.

Selain itu, kendala yang sangat penting untuk segera diatasi adalah belum optimalnya peningkatan kapasitas dan integritas aparatur sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih dan bebas KKN, serta mencapai pelayanan prima pada masyarakat. Adanya beberapa kasus oknum PNS Kota Bandung yang terlihat dalam kasus korupsi masih mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah belum sepenuhnya bebas dari KKN sebagai komitmen Pemerintah Kota Bandung.

Untuk merealisasikan pelayanan publik yang ideal, dibutuhkan kerjasama yang terorganisasi dan efektif antar komponen di dalam jajaran pemerintah kota. Satu bagian adalah sama pentingnya

dibandingkan bagian lain, bahkan perlu ditumbuhkan perasaan bahwa bagiannya sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan layanan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, perlu dilakukan interaksi dan komunikasi intensif antara pemimpin dan warganya. Begitu pula antara pemimpin dan jajaran di bawahnya sehingga dapat dibuatkan evaluasi kinerja pemerintahan, serta dibuatkan ranking kinerja dan rangking pelayanan masyarakat. Hal-hal tersebut diharapkan pada gilirannya kelak dapat mendorong perbaikan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, adil dan efektif dengan tetap meningkatkan standar kualitas. Program yang intensif dan terarah sangat dibutuhkan agar berkualitas kinerja tinggi. Penghargaan secara adil perlu dilembagakan agar aparat terus termotivasi dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan yang integral dan mendidik, sebagai upaya menjadikan tata kelola pemerintahan kota yang bersih.

Sebagai pelayan, pemerintah kota harus lebih memudahkan akses informasi pelayanan kepada masyarakat, misalnya informasi transparansi anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, RTRW dan RDTR, layanan KTP, KK, dan surat-surat keterangan lainnya.

Permasalahan yang menjadi permasalahan laten adalah perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang menjadi sorotan utama masyarakat Kota Bandung. Ketidakefektifan dan tindak korupsi berakibat pada hilangnya semangat juang para pengelolanya, hilangnya harapan dan kepercayaan masyarakat kota, hilangnya kepercayaan para pelaku usaha dan investor dan lambatnya roda pembangunan. Kondisi tersebut akan teratasi dengan adanya kemudahan akses pengawasan masyarakat yang diimbangi dengan integritas jajaran pengelola pemerintahan kota.

9. Iklim Usaha, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Pertumbuhan industri di Kota Bandung mengalami trend penurunan yang cukup signifikan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, semakin tingginya tingkat persaingan di sektor industri dan makin terbukanya

pasar secara global/regional (hilangnya hambatan/proteksi perdagangan) mengakibatkan pertumbuhan industri Kota Bandung mengalami trend penurunan. Jika tahun 2008 pertumbuhan industri mencapai 22,18%, tahun 2012 pertumbuhannya mengalami penurunan yang signifikan menjadi hanya sebesar 0,72%.

Walaupun jika dilihat dari pertumbuhannya, sektor industri pengolahan cenderung mengalami penurunan, namun sektor ini di masa depan diharapkan dapat tetap memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan di Kota Bandung. Salah satu indikasi yang berkembang saat ini ialah dengan semakin menggeliatnya perkembangan industri kreatif yang ada. Dengan dukungan sumber daya manusia dan keberagaman budaya lokal, ke depan industri ini diprediksi akan semakin berkembang. Kombinasi kekuatan pengetahuan, teknologi, jasa, dan seni budaya yang dimiliki Kota Bandung menjadi ekonomi kreatif semakin berkembang. Kota Bandung memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi kota kreatif. Setidaknya, terdapat 14 sektor industri kreatif yang secara umum marak di Kota Bandung dan sekitarnya. Jenis industri kreatif yang paling menonjol di Kota Bandung adalah (i) desain, (ii) kerajinan tangan/kriya, (iii) arsitektur, (iv) musik, (v) seni pertunjukan, dan (vi) riset dan perkembangannya. Dibandingkan dengan kota-kota lain, khususnya Kota Yogyakarta (Jawa) dan Kota Denpasar (Bali), Bandung memiliki kelebihan dalam tumbuh dan beragamnya sektor industri kreatif ini.

Dengan potensi tersebut Kota Bandung paling siap untuk menjadi kota percontohan berbasis industri kreatif di Indonesia dengan sebutan ***Bandung Creative City***. *British Council* bahkan pernah menetapkan Kota Bandung sebagai proyek percontohan dalam pengembangan industri kreatif di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Ke depan diharapkan Kota Bandung tidak hanya menjadi salah satu kota kreatif di tingkat nasional, tapi bahkan di tingkat Asia. Industri kreatif perlu terus dikembangkan dan ditumbuhkan melalui penciptaan wirausaha yang mampu bersaing di skala internasional. Potensi kreatif lain Kota Bandung berasal dari karya intelektual warganya. Kehadiran puluhan perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi dengan reputasi

internasional tampaknya memiliki pengaruh dalam pengembangan karya menjadi industri kreatif.

Perekonomian Kota Bandung secara signifikan berkontribusi oleh sektor ekonomi kreatif beserta sektor-sektor pendukung lainnya. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa tahun 2007 kontribusi sektor kreatif terhadap PDRB sudah mencapai 14,46%, serta diprediksi akan terus meningkat dan menjadi salah satu lokomotif kemajuan ekonomi Kota Bandung. Meskipun telah terdapat penelitian dalam melihat kontribusi sektor kreatif, tetapi data berkaitan dengan pelaku ekonomi kreatif samapi saat ini masih kurang mendapatkan payung legalitas yang layak dalam data PDRB kota, sehingga perlu diciptakan lembaga khusus untuk menanganinya.

Pengembangan Dewan Kreatif (*creative council*) ke depan patut menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung. Akan tetapi, tampilan karakter dan kontribusi nyata yang dapat terlihat sebagai fakta umum yang diakui oleh banyak pihak tersebut belum secara optimal diberdayakan. Untuk itu, ke depan keterlibatan pemerintah Kota Bandung, baik secara finansial melalui anggaran, maupun secara peran fasilitator dan kontributor pendukung harus lebih ditingkatkan. Dukungan Pemerintah Kota Bandung dalam pengembangan ekonomi kreatif diantaranya dapat melalui (i) pembangunan pusat kreatif (*creative center*), (ii) pengembangan kawasan kreatif, (iii) pemberian penghargaan di bidang kreatif, (iv) dukungan riset & pengembangan bagi produk lokal Bandung yang memiliki kreasi unik, (v) kampanye lanjutan Bandung sebagai kota kreatif, (vi) pengadaan seminar kreatif, dan lain sebagainya.

Selain itu, Kota Bandung juga memiliki berbagai sentra industri dan perdagangan dengan berbagai komoditas yang menjadi fokus unggulannya. Dengan pembinaan, perencanaan, dan insentif yang baik, sentra-sentra ini diharapkan dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan Kota Bandung. Tahun 2012 telah terdapat 13 sentra industri yang telah dikembangkan di Kota Bandung. Pengembangan sentra industri dan perdagangan melalui

pengembangan konsep “*competitive district*” dengan fokus bidang tertentu harus lebih dikembangkan.

Kebutuhan untuk menuntaskan permasalahan ekonomi dengan mengedepankan pertumbuhan ekonomi kreatif menjadi penting, karena ekonomi kreatif lebih mengedepankan aspek nilai tambah ekonomi yang memberikan kesempatan luas kepada masyarakat dalam mencari jalan keluar dari keterbatasan sumberdaya modal dan barang.

Keberadaan beberapa perguruan tinggi di Kota Bandung, memberikan dampak signifikan pula terhadap kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan kepada para pelaku ekonomi kreatif untuk selalu berinovasi dalam menciptakan kreasi-kreasi baru yang dapat diterima oleh pasar. Sejauh ini, Kota Bandung didalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah telah menetapkan bahwa jenis industri yang dapat diterima adalah industri non-polutan. Dengan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan Kota Bandung, kegiatan ekonomi kreatif ini diyakini berkontribusi minimal dalam merusak lingkungan.

Selain ekonomi kreatif yang telah mengalami pertumbuhan luar biasa di Kota Bandung, *creative tourism* merupakan potensi kreatif lain yang juga memiliki peluang besar dikembangkan untuk memperkuat daya saing kawasan wisata di tanah air. Dalam konsep pariwisata kreatif, turis bukan hanya diajak menyaksikan hasil akhir dari sebuah pertunjukan tetapi juga mengikuti proses penciptaannya.



RPJMD

BAB 5

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

5.1. Arahan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025, disebutkan bahwa RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan tahap ketiga pembangunan jangka panjang daerah.

RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan dan sasaran pokok dalam persepektif pembangunan 20 tahun kedepan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas (*human welfare*).

RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008, telah mengamanatkan Visi Daerah, yaitu “KOTA BANDUNG BERMARTABAT” (*BANDUNG DIGNIFIED CITY*). Kata “Bermartabat” disini merupakan kata secara harfiah, yang mempunyai arti harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena ketakwaannya, kemakmuran, kebersihan, ketertiban, ketaatan, keamanan, dan berkeadilan. Jadi, kota bermartabat adalah kota yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan, dan harkat kemanusiaan.

Sebagaimana dinyatakan dalam RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025, bahwa kondisi relatif pencapaian visi tersebut pada tahun 2025 selayaknya secara normatif dapat diukur dari berbagai kriteria ‘bermartabat’ sebagai berikut:

- Kota Bandung menjadi kota yang masyarakatnya *bertakwa* pada Tuhan Yang Maha Esa

- Kota Bandung menjadi kota yang *termakmur* di Indonesia dengan masyarakatnya yang sejahtera secara ekonomi maupun sosial (*people prosperity*);
- Kota Bandung menjadi kota yang paling menonjol sisi *keadilan*-nya bagi semua golongan masyarakat kota dalam hal kesempatan pelaksanaan hak dan kewajibannya berkehidupan dan berpenghidupan;
- Kota Bandung menjadi kota *terbersih* di tingkat nasional;
- Kota Bandung menjadi kota percontohan atas *ketertiban* semua aspek kehidupan perkotaan di Indonesia;
- Kota Bandung menjadi kota percontohan atas *ketaatan* pemerintahan kota, masyarakat, dan swasta pengusahnya pada norma hukum, aturan, etika dan kepatutan budaya dan adat-istiadat perkotaan yang berlaku;
- Kota Bandung menjadi kota yang *teraman* bagi berbagai masyarakat yang tinggal maupun pengunjung untuk berbagai keperluannya.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan (2005-2025) sesuai dengan potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta didukung oleh semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh komponen kota, maka Misi yang akan dilaksanakan beserta arah pembangunan, strategi, dan indikator kinerja 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan religius;
2. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing;
3. Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi serta berhati nurani;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota;
5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan;
6. Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembiayaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat).

RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 merupakan pedoman bagi penyelenggara pemerintahan yang bersifat dinamis dan

berkesinambungan. RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013. RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 berada pada transisi tahapan lima tahunan ketiga (2014-2018).

Target kinerja yang diamanatkan pada periode tahun perencanaan 2014-2018, sebagaimana direncanakan dalam dokumen RPJPD adalah sebagai berikut:

Misi “*Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang handal dan Religius*” pada periode tahun perencanaan 2014-2018 diarahkan pada terwujudnya sumber daya manusia yang handal dan religius dengan sasaran:

1. Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui strategi:
 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan indikator capaian: IPM = 82,02 (berdasarkan data BPS Kota Bandung, bukan BPS Pusat);
 - Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui, dengan indikator jumlah penduduk tahun 2018 maksimal 2.835.223 Jiwa;
 - Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi dengan indikator capaian Angka Fertilitas Total (AFT) = 1,85.
2. Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, kreatif dan kompetitif, melalui strategi:
 - Meningkatkan kualitas dan akses penyelenggaraan Pendidikan, dengan indikator capaian: Indeks Pendidikan= 93,53;
 - Mengembangkan Pendidikan Wajib Belajar Menengah 12 Tahun yang Bermutu, dengan indikator capaian: angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) = 12,17 Tahun;
 - Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan, dengan indikator capaian: 75% telah mempunyai sertifikat mengajar:

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dalam Bidang Pendidikan, dengan indikator capaian: 75% lembaga pendidikan telah menerapkan SPM;
 - Meningkatkan Kualitas dan akses pendidikan non formal, dengan indikator capaian AMH = 99,73 %.
3. Terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui strategi:
- Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, mudah, merata dan terjangkau; meningkatkan kualitas lingkungan bersih melalui sanitasi dasar dan sanitasi umum; meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan; meningkatkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dengan indikator capaian: Indeks Kesehatan= 81,87; Angka Harapan Hidup = 74,45; 90% fasilitas kesehatan memenuhi SPM kesehatan; Angka Kematian Bayi = 29/1000 kelahiran hidup; menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan = 11 orang/tahun.
 - Meningkatkan pengawasan komoditas Produk-produk pertanian dengan indikator capaian: Pemaparan zoonosis Kurang dari 9% di wilayah kota Bandung.
4. Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, melalui strategi:
- Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dengan indikator capaian: Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing;
 - Meningkatkan Kerukunan umat beragama meliputi Kerukunan antar umat beragama, kerukunan antarumat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan Pemerintah, dengan indikator capaian: Terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan umat beragama.
5. Terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender, melalui strategi:
- Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dengan indikator capaian: Terwujudnya pemahaman peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan dan terwujudnya hak-hak perlindungan perempuan dan anak.

Misi “*Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing*” pada periode tahun perencanaan 2014-2018 diarahkan pada terwujudnya perekonomian kota berdaya saing serta sehat dan berkeadilan, dengan sasaran:

1. Terwujudnya perekonomian kota yang tangguh, berdaya saing serta sehat dan berkeadilan, melalui strategi;
 - Meningkatkan Pertumbuhan Riil dan Kontribusi Riil Sektor Perekonomian kota terutama dari *core sectors* (Jasa Wisata dan Perdagangan berbasis industri kreatif dan *IT*) dengan mempertahankan industri pengolahan yang ada, dengan indikator capaian: LPE 10,33%; Tingkat pemerataan pendapatan versi Bank Dunia minimal 16% (kategori sedang); PDRB Riil/kapita minimal Rp. 20 juta per tahun; Indeks daya beli 70,66;
 - Memperbaiki stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok, dengan indikator capaian: Tingkat inflasi umum satu digit;
 - Perluasan kesempatan lapangan kerja formal di sektor-sektor yang menjadi *core competency* kota, dengan indikator capaian: Tingkat Pengangguran Terbuka 13,5%; Kesempatan kerja Minimal 90%.
 - Memberikan Kemudahan Pelayanan Perijinan dan Kepastian Hukum bagi investor dan dunia usaha, dengan indikator capaian: Nilai Investasi berskala nasional meningkat 30%.
2. Terwujudnya pariwisata yang berdaya saing, melalui strategi;
 - Mengembangkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata, dengan indikator capaian: Meningkatnya jumlah wisatawan sebesar 35%.
3. Terwujudnya Kerjasama dan koordinasi yang menguntungkan dengan wilayah pemerintah daerah lainnya, melalui strategi;
 - Membentuk sinergitas kegiatan ekonomi antarwilayah; dengan indikator capaian: Tumbuhnya kegiatan ekonomi antar daerah.

Misi “*Mengembangkan Kehidupan Sosial Budaya Kota Yang Kreatif, Berkesadaran Tinggi Serta Berhati Nurani*” pada periode tahun

perencanaan 2014-2018 diarahkan pada terwujudnya kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi serta berhati nurani dengan sasaran:

1. Terwujudnya peningkatan mutu kerjasama di antara semua pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Bandung. melalui strategi;
 - Membuka akses seluas-luasnya bagi semua warga kota terhadap informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota, melalui berbagai sarana komunikasi massa yang tersedia; Mengatur mekanisme partisipasi warga dalam pembangunan kota; Mendorong terbentuknya fasilitator/mediator perkumpulan warga untuk berperan aktif memelihara kehidupan kota yang nyaman, bersahabat, kreatif, dengan indikator capaian: Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang tahapan proses pembangunan.
 - Meningkatkan kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik, dengan indikator capaian: Meningkatnya rasa kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik.
2. Terwujudnya multikulturalisme dalam lingkungan Sunda yang inklusif, melalui strategi;
 - Mengembangkan pusat-pusat kebudayaan, dengan indikator capaian: Terwadahnya heterogenitas budaya dalam lingkungan Budaya Sunda.
 - Meningkatnya sinergitas pelestarian budaya lokal Sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat, dengan indikator capaian: Optimalnya hubungan pemerintah dengan pelaku budaya dalam perlindungan dan pelestarian budaya.

Misi "*Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota*" pada periode tahun perencanaan 2014-2018 diarahkan pada terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup kota dengan sasaran:

1. Terwujudnya kualitas udara dan air memenuhi baku mutu, melalui strategi:
 - Mengendalikan pencemaran udara, dengan indikator capaian: Minimal 50% lokasi/sample telah memenuhi (Baku Mutu) BM.

- Mengendalikan pencemaran air, dengan indikator capaian: 17% sungai dan anak sungai yang ada di Kota Bandung untuk parameter BOD dan COD telah memenuhi baku mutu.
2. Terjamin dan tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam), melalui strategi;
- Mengembangkan sumber air baku untuk penyediaan air bersih, dengan indikator capaian: Pengembangan sumber air baku dengan kapasitas produksi sebesar ± 5.750 liter/detik.
 - Meningkatkan dan mengendalikan kawasan berfungsi lindung (berfungsi hidrologi), dengan indikator capaian: Ruang terbuka hijau publik yang efektif menunjang fungsi hidrologi sebanyak 23% (dalam bentuk taman, hutan kota, sempadan sungai, kawasan konservasi dan RTH lainnya).
3. Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi, melalui strategi;
- Mereduksi dan meningkatkan pemanfaatan kembali limbah padat (sampah), dengan indikator capaian: 90% sampah dapat dikelola (30% *reduce, reuse dan recycle*, 60% ke tempat pemrosesan akhir melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan dan ekonomis 35%, dan *landfill* 25%).
4. Tersedianya ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, melalui strategi:
- Membentuk struktur ruang kota, dengan indikator capaian: Minimum 60% kawasan Pusat Primer Gedebage terbangun dan semua pusat wilayah pengembangan berfungsi efektif.
 - Mengendalikan pemanfaatan ruang, dengan indikator capaian: Meningkatnya pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Tersedianya sistem transportasi yang selamat, efisien, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan, melalui strategi:
- Mengembangkan (sistem) prasarana transportasi yang mendukung struktur ruang kota, dengan indikator capaian: luas jalan min 4% dari wilayah kota dan 100% berondisi baik; Indeks aksesibilitas minimum 7 km/km² area.

- Mengembangkan SAUM (Sarana Angkutan Umum Masal) dan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, dengan indikator capaian: 50% dari rencana prasarana SAUM terbangun, sesuai dengan rencana induk transportasi umum kota;
 - Mengendalikan aspek aspek penyebab kemacetan, dengan indikator capaian: Teratasinya aspek aspek kemacetan sebanyak 10 aspek.
6. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar teknis/standar pelayanan minimal, melalui strategi:
- Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih, dengan indikator capaian: 85% penduduk dilayani air bersih dengan rata rata pengaliran air 120 liter/orang/hari dengan pengaliran kontinu 24 jam.
 - Menyediakan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang berkelanjutan, dengan indikator capaian: Tempat pemrosesan akhir sampah sudah berfungsi 100%.
 - Menyediakan sistem drainase Kota yang tertata, dengan indikator capaian: Jaringan drainase primer dan sekunder kota terpadu; integrasi perwilayah pelayanan drainase kota; 75% sistem drainase kota terpadu.
 - Menyediakan Sistem Penanganan Air Limbah dan IPAL kota, dengan indikator capaian: 75% kawasan kota terlayani oleh sistem penanganan air limbah yang terpadu dengan IPAL.
7. Terwujudnya mitigasi bencana yang handal, melalui strategi:
- Menumbuhkan dan meningkatkan pengelolaan bencana (gempa, longsor, banjir, gunung meletus, angin topan, kebakaran, dll.), dengan indikator capaian: Meningkatkan penanganan bencana.

Misi *"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan"* pada periode tahun perencanaan 2014-2018 diarahkan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dengan sasaran:

1. Terwujudnya Peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif, akuntabel dan berdasarkan database; melalui strategi:

- Meningkatkan kualitas aparatur perencana dan pengelola data, dengan indikator capaian: Meningkatnya perencanaan dan pengelolaan data.
2. Terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar hukum dan HAM, melalui strategi;
- Peningkatan kualitas produk hukum yang produktif dan implementatif, dengan indikator capaian: Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dan aparat dalam penetapan produk hukum yang sinergi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Peningkatan kualitas penegakan hukum dan HAM secara objektif dan merata; Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat dan aparatur terhadap hukum dan HAM, dengan indikator capaian: Semakin berkurangnya pelanggaran masyarakat dan aparatur terhadap hukum dan HAM sehingga dapat mendukung ketertiban dan keamanan, serta semakin berkurangnya praktek KKN di lingkungan birokrasi.
3. Tersedianya Prasarana dan sarana aparatur pemerintah kota yang berkualitas, melalui strategi;
- Mengintervarisi secara sistematis terhadap sarana dan prasarana yang ada, dengan indikator capaian: Tersedianya prasarana dan sarana aparatur dengan kuantitas yang memadai dengan kualitas baik.
4. Tersedianya Aparatur yang profesional, melalui strategi;
- Mengikuti pola Rekrutmen sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Menyesuaikan pola pembinaan, pendidikan dan pelatihan pegawai; Menyesuaikan pola insentif dan pengajian pegawai, dengan indikator capaian: Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual.
5. Terwujudnya Organisasi pemerintah daerah yang dapat meningkatkan kinerja aparatur, melalui strategi;
- Optimalisasi kelembagaan pemerintah yang berprinsip kecil, efektif, efisien (KEE), dengan indikator capaian: Terpenuhi 6

bidang reformasi (SDM, Kelembagaan, Regulasi, Investasi, Keuangan daerah dan *e-Governance*).

6. Terwujudnya Kemampuan teknis dan administratif aparatur pengawasan yang profesional, melalui strategi;
 - Menjadikan pengawasan sebagai prinsip dasar dan kebutuhan dasar dalam mencapai tujuan program pembangunan, dengan indikator capaian: Meningkatnya pengelolaan pengawasan.
7. Terwujudnya Pelayanan publik yang prima, melalui strategi;
 - Merubah motivasi dan pola pikir aparatur dalam memahami konsep pelayanan publik, dengan indikator capaian: Meningkatnya jumlah SKPD yang bersertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008.
8. Terwujudnya Kehidupan masyarakat yang demokratis, melalui strategi;
 - Melakukan pendidikan politik bagi semua lapisan masyarakat, dengan indikator capaian: Semakin meningkatnya pemahaman tentang pendidikan politik dan prilaku.
9. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban serta terciptanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan stabilitas keamanan daerah, melalui strategi;
 - Menjadikan ketertiban dan keamanan kebutuhan bersama yang harus ditangani bersama antara pemerintah dan masyarakat, dengan indikator capaian: meningkatnya ketertiban dan keamanan.

Misi "*Mengembangkan Sistem Pembiayaan Kota Terpadu*" pada periode 2014-2018 diarahkan pada terwujudnya sistem pembiayaan kota terpadu, dengan sasaran:

1. Terwujudnya anggaran pemerintah yang optimal, melalui strategi;
 - Meningkatkan Pendapatan Daerah, dengan indikator capaian: Rata-rata Peningkatan Pendapatan 17%.
 - Memperkuat sinergitas APBN, APBD provinsi & APBD kota (Fiskal antar pemerintahan), dengan indikator capaian: APBN, APBD provinsi & APBD kota terintegrasi sepenuhnya.

- Mengembangkan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional, dengan indikator capaian: Penggunaan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional mulai signifikan.
2. Terwujudnya masyarakat dan sektor swasta berperan besar dalam pembiayaan pembangunan kota, melalui strategi;
- Mengembangkan sistem insentif yang menarik dan fasilitasi untuk sektor swasta dalam pembiayaan penyediaan barang dan jasa publik, dengan indikator capaian: Berbagai insentif fiskal tersedia untuk fasilitasi sektor swasta.
 - Mengembangkan sistem pembiayaan dengan kemitraan pemerintah dan swasta, dengan indikator capaian: Berfungsinya perusahaan patungan untuk beberapa layanan jasa umum dan barang publik.
 - Mengembangkan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional, dengan indikator capaian: berfungsinya instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional berbasis masyarakat.
 - Menyediakan insentif dan fasilitasi untuk keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan serta pemanfaatan dan pemeliharaan barang dan jasa publik, dengan indikator capaian: berbagai insentif fiskal untuk masyarakat dalam pembangunan, pelaksanaan dan pemeliharaan barang dan jasa publik tersedia.
 - Menyediakan insentif dan fasilitasi untuk keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan serta pemanfaatan dan pemeliharaan barang dan jasa publik, dengan indikator capaian: Berbagai insentif fiskal untuk masyarakat dalam pembangunan, pelaksanaan dan pemeliharaan barang dan jasa publik tersedia.

5.2. Visi dan Misi RPJMD Kota Bandung 2013-2018

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan

Tahap III RPJPD Kota Bandung. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat bergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2013-2018, yaitu:

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

- Bandung** : meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang;
- Unggul** : menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung;
- Nyaman** : terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktivitas dan perilaku penghuninya;
- Sejahtera** : mengarahkan pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan

partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, agar dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Visi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 yaitu Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras dengan Visi Daerah yaitu “Kota Bandung Bermartabat”. Kriteria capaian Visi Daerah tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Tabel 5-40
Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi	Misi
TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA	Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
	Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.
	Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
	Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Misi Pertama: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Bermakna untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga Kota Bandung melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Misi Kedua: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Bandung yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan sistem modern berbasis IPTEK menuju tata kelola

pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Misi Ketiga: Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. Dimaksudkan untuk mewujudkan warga Kota Bandung yang sehat, cerdas, dan berbudaya yang bercirikan meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, serta terpeliharanya seni dan warisan budaya.

Misi Keempat: Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu.

Misi dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 berpedoman pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025, terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD. Apabila dalam RPJPD 2005-2025 sebagaimana dikemukakan di atas terdiri atas 6 Misi, maka pada RPJMD 2013-2018 dipertajam menjadi 4 Misi, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5-2
Keselarasan Misi RPJPD Kota Bandung dengan
RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018

MISI RPJMD 2013 - 2018	MISI RPJPD 2005 – 2025
Misi 1: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.	Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota
Misi 2: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.	Misi 5: Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.
Misi 3: Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.	Misi 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan religius
	Misi 3: Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif,

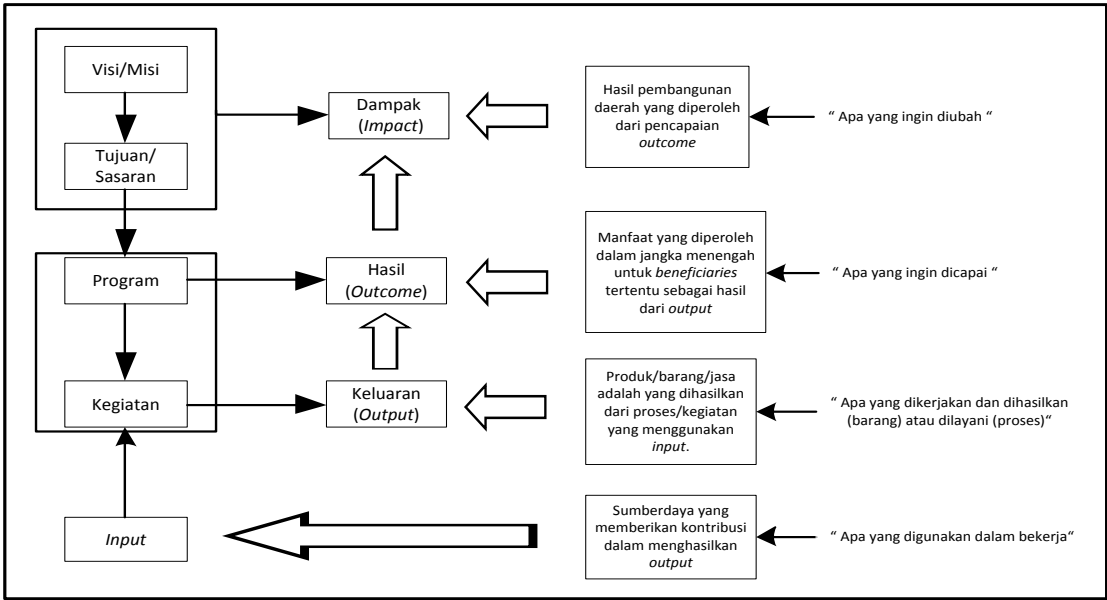
MISI RPJMD 2013 - 2018	MISI RPJPD 2005 – 2025
	berkesadaran tinggi serta berhati nurani
Misi 4: Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.	Misi 2: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing
	Misi 6: Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembiayaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat)

5.3. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Bandung 2013-2018 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5-1
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

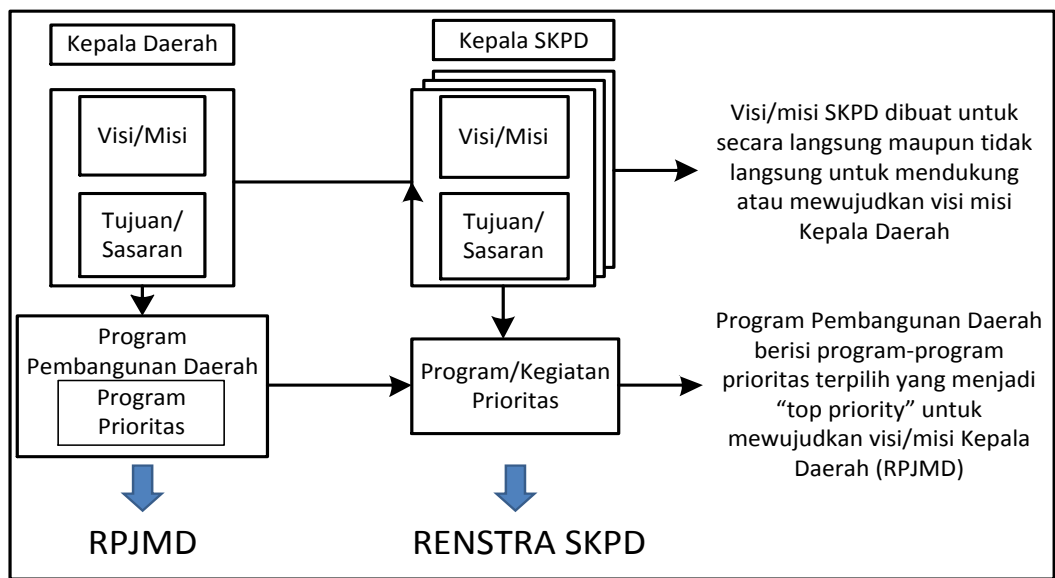


Dari gambar di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi walikota dan wakil walikota menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan SKPD dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 5-2
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi; melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Bandung, sebagai berikut:

- Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Bandung 2013-2018 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
- Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Tabel 5-3
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung di Misi 1

Misi 1: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN					Target Kinerja pada akhir RPJMD
					2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan 1: Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan										
1	Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	Persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang	Persentase	56,27	60	63	67	71	75	75
		Tingkat Keterbangan Infrastruktur PPK Gedebage	Persentase	20	30	40	45	50	60	60
Tujuan 2: Menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi										
2	Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata	Rasio Luas Jalan dalam Kondisi Baik	Persentase	72,36	75	85	100	100	100	100
		Indeks Aksesibilitas Jalan	Skala	7,41	7,42	7,44	7,45	7,47	7,48	7,48
3	Terwujudnya Bandung caang Baranang	Persentase Wilayah Kota Bandung terang pada malam hari	Persentase	47	55	65	100	100	100	100
4	Terselesaikannya Permasalahan banjir di Kota Bandung	Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	Persentase	60	70	80	100	100	100	100
		Titik banjir terselesaikan	Lokasi	14	32	50	68	68	68	68
5	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan	Luas kawasan permukiman kumuh	Persentase	11	10,76	10,5	10,27	10,03	9,79	9,79
		Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	9	11	14	16	19	21	21
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	NA	80	2.480	2.480	2.480	2.480	10.000
6	Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata	Tingkat Pengelolaan Sampah Kota	% Layanan	85	88	89	90	90	90	90
		1) Persentase pemrosesan sampah di Landfill (tingkat pengangkutan ke TPA)	Persentase	69	69	65	53	35	5	25
		2) Persentase Pengolahan dan Pengurangan Sampah di Sumber	Persentase	16	19	24	37	55	65	65

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN					Target Kinerja pada akhir RPJMD
					2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.a. Persentase sampah yang dikelola dengan sistem 3R	Persentase	16	18	20	22	25	30	30
		2.b. Persentase sampah yang dikelola dengan mengkonversi menjadi WTE	Persentase	0,1	1	4	15	30	35/45	35
		Tingkat pelayanan air limbah dengan sistem terpusat	Persentase	64	66	68	70	72	74	74
		Tingkat cakupan pelayanan air minum	Persentase	76	78	80	82	84	85	85
		Kapasitas Produksi air baku	liter/detik	2600	3000	4000	4500	5000	5750	5750
Tujuan 3: Mewujudkan system transportasi yang aman, nyaman, efisien, memadai, handal dan ramah										
7	Terwujudnya sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan	Persentase tersedianya fasilitas sarana dan prasarana SAUM sesuai dengan Rencana Induk Transportasi Kota	Persentase	17	23	29	35	42	50	50
		Persentase aspek penyebab kemacetan yang terkendali	Persentase	18,75	31	47	69	88	100	100
Tujuan 4: Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkelanjutan dan Penanggulangan bencana yang handal										
8	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan Tertanggulangnya bencana secara dini komprehensif	Tingkat kualitas udara perkotaan memenuhi baku mutu udara ambien	Persentase	25	30	35	40	45	50	50
		sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol.B (dari tercemar berat mjd tercemar ringan)	Persentase	6,25% (dari 16 sungai utama)	12,50	17	17	17	17	17
		Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca	Persentase	N/A	2	2	2	2	2	10
		Ruang terbuka hijau (RTH) kota yang efektif menunjang fungsi hidroorologi	Persentase	12,14	14	16	18	20	23	23
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persentase	NA	45,98	45,98	68,57	91,96	91,96	91,96
		Tingkat waktu tanggap (response time rate)	Menit	<22	<20	<18	<16	<15	<15	<15

Dalam Visi Walikota Bandung: Unggul, Nyaman dan Sejahtera, Misi 1 dijalankan untuk mewujudkan Bandung nyaman dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam rangka memberikan daya dukung lingkungan yang memadai bagi keberlangsungan aktivitas produktif masyarakat Kota Bandung. Prinsip tata ruang adalah integrasi dengan ekosistem. Kebijakan-kebijakan tentang tata ruang tidak dibenarkan bertabrakan dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan yang akan berakibat pada penurunan kualitas hidup masyarakat secara umum.

Keberadaan ruang terbuka hijau, kelestarian lingkungan, penanganan persampahan, penyediaan infrastruktur permukiman yang layak dan pengembangan sistem transportasi yang memadai merupakan komponen lengkap pembangunan infrastruktur kotamerupakan perwujudan dukungan pemerintah terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan, maka dilakukan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten yang merupakan komitmen Pemerintah Kota untuk mewujudkan penataan ruang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini direpresentasikan dengan indikator upaya penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dan pembangunan infrastruktur Pusat Pelayanan Kota (PPK) Gedebage. Terkait upaya penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang pada akhir periode RPJMD (tahun 2018) tingkat penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang adalah 75%. Alat kendali yang dipergunakan adalah instrumen perijinan dan pengenaan sanksi.

Pembangunan infrastruktur PPK Gedebage dalam rangka mendukung *Bandung Technopolis* antara lain, pembangunan Pusat Pemerintahan, Pusat Bisnis, Pusat IPTEK, Pemukiman, Stadion Olahraga (SUS), Infrastruktur Pengelola Sampah, Terminal terpadu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dll., sesuai dengan target RPJPD pada akhir periode RPJMD tahun 2018 adalah 60% dari perencanaan yang dituangkan dalam RDTR SubWilayah Kota (SWK) Gedebage. Tahapan pembangunan infrastruktur *Bandung Technopolis* di PPK Gedebage yang telah

dilakukan adalah penyusunan kajian kelayakan (*Feasibility Study*) tahun 2014, kemudian proses pengadaan lahan dan perencanaan teknis tahun 2015-2016. Diharapkan tahun 2017-2018 dapat dimulai pembangunan dan konstruksi fisiknya. (Pembangunan PPK akan dibahas pada Sub bab tersendiri).

Isu lain di Kota Bandung adalah banyaknya jalan yang rusak, ketersediaan sarana jalan yang sudah kurang selarasnya dengan sebaran fungsi kegiatan, keberadaan wilayah yang sering tergenang air hujan dan atau terkena banjir yang sangat merugikan, dalam rangka mewujudkan pelayanan optimal bagi aksesibilitas antar pusat dan sub-pusat kegiatan kota, meningkatkan mobilitas masyarakat kota, mewujudkan trotoar dan drainase jalan kota yang menunjang keawetan struktur perkerasan jalan, bahu jalan, bangunan perlengkapan jalan dan lingkungannya yang berfungsi baik, aksesibel, hijau dan estetis serta menjamin keselamatan pengguna jalan, dan dalam rangka mewujudkan sungai sebagai sistem drainase alami yang mampu mengakomodasi kebutuhan pengaliran air untuk mengalirkan air banjir, penggelontoran, dan fungsi lingkungan serta mewujudkan sistem drainase kota terpadu dengan konsep pemanenan air hujan (*Rainfall Harvesting*) yang meminimalkan potensi banjir; juga dalam rangka mewujudkan sungai sebagai bagian muka pembangunan kota (*River-front City Development*) serta bangunan pelengkap yang fungsional dan menunjang estetika kota; serta mewujudkan sistem penerangan jalan umum kota yang andal, merata, berkeadilan, hemat energi, berestetika serta ramah lingkungan dengan pengelolaan terpadu, maka diharapkan hal itu dapat direalisasikan melalui penyediaan infrastruktur, permukiman, dan sanitasi perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau, dan Manusiawi.

Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata diukur melalui naiknya persentase rasio luas jalan dalam kondisi baik dengan target 100% jalan tahun 2016 sudah berada dalam kondisi baik. Indikator yang lain adalah Peningkatan skala Indeks Aksesibilitas Jalan

dengan target kinerja 7,48 pada akhir periode RPJMD mengalami kenaikan sebesar 0,07 dari kondisi awal RPJMD sebesar 7,41.

Terwujudnya Bandung *caang baranang*, dengan indikator kinerja terwujudnya wilayah Kota Bandung terang di malam hari sebesar 100% ditargetkan sudah dapat diwujudkan tahun 2016;

Terselesaikannya permasalahan banjir dengan indikator kinerja tercapainya panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik sebesar 100% tahun 2016 dan terselesaikannya titik banjir sejumlah 68 titik di seluruh wilayah Kota Bandung tahun 2018;

Sasaran selanjutnya adalah meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan melalui berkurangnya persentase luas kawasan permukiman kumuh sebanyak 9,79% tahun 2018, pembangunan Rusunawa dengan target sebanyak 21 Rusun terbangun tahun 2018, kondisi awal Tahun 2013 adalah sebanyak 9 unit rusun milik Pemerintah Kota Bandung. Dalam pembangunan rumah susun layak huni, Pemerintah Kota Bandung bekerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi. Indikator lain adalah perbaikan rumah layak huni sebanyak 10.000 unit tahun 2018 yang dalam penganggarnya juga mensinergikan sumber pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

Penanganan masalah sampah menjadi titik krusial yang menjadi focus dalam mewujudkan infrastruktur sanitasi yang berkualitas dan merata. Pengolahan sampah dengan cara *landfill* diproyeksikan terus menurun dan digantikan dengan pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan konsep 3-R atau pengurangan sampah dari sumbernya.

Naiknya persentase tingkat pengelolaan sampah kota sebesar 90% tahun 2018, dengan 25% pengelolaan menggunakan *landfill* dan 65% sampah dikelola dengan melakukan pengurangan sampah dari sumbernya. Pengurangan sampah dari sumber ini dilakukan melalui dua cara yaitu dengan 3-R (*reuse, reduce, recycle*) yang ditargetkan akan mengurangi timbulan sampah sebanyak 30%, dan melakukan pengelolaan sampah menggunakan teknologi ramah lingkungan dengan target sampah terkelola sebesar 35%.

Naiknya persentase tingkat pelayanan air limbah dengan sistem terpusat sebesar 74% ditargetkan akan dicapai tahun 2018. Cakupan pelayanan air minum sebesar 85% ditargetkan untuk dicapai tahun 2018, dimana pada kondisi awal cakupan layanan baru mencapai 76%, ketercapaian target cakupan air minum sangat dipengaruhi oleh kapasitas produksi air baku sebesar 5.750 liter/detik pada akhir periode RPJMD.

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menjawab permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat seperti kemacetan, melalui pembangunan jalan dan jembatan, pengembangan SAUM serta menanggulangi aspek penyebab kemacetan yang diidentifikasi dalam RPJPD sebanyak 32 aspek yaitu: (1) Panjang jalan/lebar jalan; (2) Kondisi jalan; (3) Jumlah kendaraan pribadi; (4) Persimpangan yang terlalu dekat; (5) Sekolah; (6) Pasar Tumpah/PKL; (7) Pangkalan liar; (8) Parkir; (9) Kendaraan jemputan anak sekolah; (10) Angkot; (11) Kesadaran masyarakat; (12) Displin pengemudi; (13) Kendaraan dari luar Kota Bandung; (14) Becak melawan arus; (15) Shelter; (16) *Traffic light*; (17) Perumahan; (18) Perubahan Fungsi bangunan; (19) Banjir; (20) Marka jalan dan rambu lalu lintas; (21) SDM petugas; (22) Dana; (23) Anak jalanan; (24) Jaringan jalan; (25) Perbaikan jalan/galian kabel/perbaikan; (26) Perlintasan kereta api; (27) Pusat perbelanjaan/Mall; (28) Bongkar muat; (29) Penerangan jalan umum; (30) Gerakan pejalan kaki; (31) Pool/Agensi bus; (32) Luas terminal. Untuk mengendalikan seluruh permasalahan kemacetan, kewenangan dan tanggung jawabnya bukan hanya pada Dinas Perhubungan saja, melainkan merupakan kerja bersama antara beberapa SKPD seperti Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pendidikan, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, serta Dinas Koperasi UKM dan Perindag.

Tersedianya sarana angkutan umum yang aman dan nyaman menjadi cita-cita yang akan direalisasikan melalui perwujudan sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan dengan indikator: Meningkatnya persentase tersedianya fasilitas sarana dan prasarana SAUM sesuai dengan Rencana Induk Transportasi Kota sebesar 50 % tahun 2018; melalui Pengoperasian angkutan massal/bus line, beroperasinya Trans Metro Bandung (TMB); dikembangkannya

sistem angkutan massal berbasis rel: monorel yang direncanakan dibangun tahun 2013-2018 ada dua koridor, Rencana pembangunan *Cable Car* di Bandung Utara yang merupakan jalur penghubung Utara (Kota Wisata Lembang) dan jalur penghubung antar lokasi wisata Kota Bandung, serta jalur penghubung Kota Bandung-lokasi wisata Dago Pakar-Lembang.

Dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal digunakan beberapa indikator kinerja sasaran. Indikator tersebut antara lain tingkat kualitas udara dan sungai yang memenuhi baku mutu, penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), penyediaan RTH dan cakupan pelayanan kebakaran.

Pengendalian kualitas udara Kota Bandung yang memenuhi baku mutu udara ambien tahun 2018 adalah 50%. Hal ini dilakukan melalui upaya uji petik pengukuran emisi gas buang kendaraan bermotor, kegiatan penghijauan, sosialisasi kepada masyarakat dan pengalihan bahan bakar ke alternatif bahan bakar ramah lingkungan (*biofuel*).

Dalam mengendalikan tingkat pencemaran sungai, ditargetkan 17% dari 16 (enam belas) sungai utama memenuhi baku mutu dari tercemar berat menjadi tercemar ringan.

Upaya yang dilakukan melalui pengerukan sungai, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber pencemar dan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait.

Seiring dengan fenomena efek rumah kaca, menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global (*global warming*). Terkait dengan hal tersebut, penurunan emisi GRK merupakan salah satu indikator kinerja program dalam RPJMD Kota Bandung, dimana target penurunan GRK yang diharapkan adalah 10%. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah penghijauan, bangunan dan kendaraan ramah lingkungan, dan upaya sosialisasi kepada masyarakat.

Penyediaan RTH publik dan privat yang menjadi target pemerintah Kota tahun 2018 sebesar 23% akan dicapai, bukan saja melalui penambahan luasan mengingat Kota Bandung merupakan kawasan perkotaan dengan *high density* tetapi juga melalui pengembangan *roof garden*, *wall garden*,

urban farming, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 yang mengklasifikasikan RTH yang pengembangan kawasan pusat ekologi kota, penerbitan Peraturan Daerah tentang *green building* serta *zoning regulation*.

Dalam rangka mitigasi bencana secara dini dan komprehensif khususnya bencana kebakaran, adalah melalui peningkatan cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 91,96% dan tingkat waktu tanggap (*respon time rate*) kurang dari 15 menit tahun 2018. Upaya yang akan dilakukan adalah melalui penambahan pos wilayah ke setiap bagian wilayah Kota Bandung sehingga upaya penanggulangan terhadap bahaya kebakaran dapat ditingkatkan.

Tabel 5-4
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung di Misi 2

Misi 2: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja pada Awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN					Target Kinerja pada Akhir RPJMD
					2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan 1 : Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan.										
1.	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase	≥30	≥30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30
Tujuan 2 : Terlaksananya Reformasi birokrasi										
2.	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Katagori/ Nilai	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		SKPD yang mendapat temuan berindikasi tidak pidana korupsi yang material	Persentase	31	26	23	20	16	13	13
		SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang	Persentase	20	33	50	65	80	100	100
3.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Katagori	B	B	B	B	A	A	A
4.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kineja birokrasi	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	Presentase	70	73	76	79	82	85	85
		tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi	survey	NA	0	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik
		Nilai evaluasi AKIP Kota	Kategori	CC	CC	CC	B	B	A	A
		Nilai LPPD	Kategori/ nilai	Sangat baik = 3,0108	Sangat baik = 3,0550	Sangat baik = 3,0992	Sangat baik = 3,1434	Sangat baik = 3,1876	Sangat baik = 3,2320	Sangat baik = 3,2320
5.	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Cakupan wilayah untuk Pelayanan informasi pembangunan	Persentase	35	50	75	85	100	100	100
		Tingkat layanan interaksi pengaduan secara on-line	Persentase	75	100	100	100	100	100	100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja pada Awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN					Target Kinerja pada Akhir RPJMD
					2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan 3: Meningkatkan Kesadaran masyarakat dan aparat terhadap hukum dan HAM										
6	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis	Indeks demokrasi	Skala	N/A		66,50 – 67,00	-	-	68,50 – 69,00	68,50 – 69,00
7	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum	Persentase	55	57	-	-	-	58	58
8	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum	Cakupan penegakan Perda	Persentase	N/A	70	75	80	85	90	90

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan profil kinerja aparatur pemerintah yang kuat dan memiliki mental melayani, hal ini merupakan turunan dari konsep demokratisasi yang secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Konsekuensi logis dari fenomena di atas adalah: pemerintah berkewajiban untuk membangun sebuah kekuatan aparatur yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan aspiratif terhadap segala kondisi sosial yang muncul pada tiap-tiap wilayah. Menghadirkan tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani menjadi dasar bagi pencapaian misi Walikota Bandung yang lainnya, dengan aparat yang profesional, infrastruktur dan lingkungan yang nyaman, sosial kemasyarakatan yang madani, serta perekonomian kota yang mensejahterakan masyarakatnya akan dapat diwujudkan. Penghayatan terhadap masing-masing peran dan tanggung jawab sebagai aparat negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat mutlak dibutuhkan. Pengejawantahan dari peran tersebut adalah upaya yang sistematis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani. Kinerja aparatur pemerintah harus dapat diukur dengan parameter terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan diperlukan sebagai langkah membangun sebuah pemerintahan yang akuntabel.

Tujuan pertama berkaitan dengan meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan dengan sasaran Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan target sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2009 yaitu lebih dari 30% usulan masyarakat melalui Musrenbang diakomodasi dalam Perencanaan Pembangunan.

Tujuan kedua adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan target kinerja yang harus dicapai berdasarkan amanat dari

RPJPD Kota Bandung. Sasaran yang pertama adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2015 sesuai dengan agenda Walikota Bandung *road to WTP* 2015. Indikator kedua untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah SKPD yang mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material dengan target 13 persen tahun 2018, dimana kondisi awal RPJMD sebanyak 31 persen atau 20 SKPD mendapatkan temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material berdasarkan hasil pemeriksaan dari instansi pemeriksa. Indikator lainnya adalah Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang dengan target 100% tahun 2018 yang akan ditingkatkan secara bertahap dari posisi 20% pada awal periode RPJMD. Kondisi awal SPIP Kota Bandung sebagian besar berada pada level rintisan, atau level awal perkembangan SPIP. SPIP level berkembang ditandai dengan telah adanya rencana pengembangan sistem pengendalian intern untuk semua kegiatan pokok. Praktik pengendalian masih berfokus pada kegiatan pelaporan keuangan, sedang untuk kegiatan lainnya masih *sporadic* dan belum konsisten. Kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2013 sebanyak 80% berada pada level SPIP rintisan.

Sasaran kedua dari pelaksanaan Reformasi birokrasi adalah Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang ditandai dengan dicapainya penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kategori A tahun 2017, target ini diharapkan akan dapat dicapai dalam seluruh bentuk pelayanan kepada masyarakat termasuk pelayanan yang diberikan oleh aparat kewilayahan. Evaluasi terhadap IKM dilakukan melalui survey tahunan oleh lembaga independen terhadap semua jenis pelayanan yang diberikan.

Sasaran reformasi birokrasi yang ketiga adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi. Ketersediaan Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi merupakan sasaran yang menjadi kewenangan BKD sebagai *leading sector* nya, kondisi pencapaian target kesesuaian jabatan dengan kompetensi tahun 2013 adalah sebesar 70% yang akan dinaikan sampai dengan 85% tahun 2018, kesesuaian dapat dilihat dari latar belakang pendidikan ataupun keahlian, upaya yang dilakukan untuk menaikkan kesesuaian salah satunya melalui penyelenggaraan berbagai jenis Diklat.

Indikator lain yang diukur untuk menggambarkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi adalah tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi dengan melakukan survey untuk mengukur ketepatannya. Target yang ditetapkan adalah kategori baik mulai dari tahun 2015, pengukuran terhadap indikator ini baru dilakukan tahun 2014. Untuk mendapatkan struktur organisasi yang tepat terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap SOTK yang ada, hasil evaluasi dijadikan dasar untuk melakukan perubahan struktur menjadi lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Penambahan SOTK baru atau perubahan terhadap struktur yang ada dilakukan untuk mengakomodasikan kebutuhan perkembangan organisasi dalam rangka memenuhi target tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah juga ditandai dengan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang ditargetkan berada pada level “A” atau penilaian kinerja baik.

Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan merupakan sasaran selanjutnya dari

pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini ditandai dengan makin terbukanya aksesibilitas warga terhadap informasi pembangunan dengan meningkatkan cakupan wilayah untuk pelayanan informasi pembangunan. Kondisi cakupan pelayanan informasi tahun 2013 baru mencapai 30% wilayah Kota Bandung. Cakupan ini sangat erat kaitannya dengan penyediaan jaringan informasi yang tahun 2018 direncanakan sudah dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Bandung. Untuk mengukur peningkatan partisipasi dan pantauan publik terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dilakukan dengan melihat penerapan Layanan Interaksi Pengaduan Masyarakat secara On-Line (LAPOR) dengan target capaian 100% tahun 2015. Artinya, seluruh pengaduan yang masuk melalui aplikasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bandung.

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis menjadi sasaran selanjutnya; indikator yang digunakan adalah indeks demokrasi. Pengukuran indeks tersebut dilakukan setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Presiden, dan setelah penyelenggaraan Pemilu Legislatif. Target yang ingin dicapai tahun 2018 adalah 68,50-69,00.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu menjadi sasaran yang ditargetkan untuk dicapai, dimana pada akhir periode RPJMD sebesar 58% penduduk Kota Bandung yang memiliki hak pilih menggunakan haknya.

Cakupan Penegakan Perda merupakan indikator yang diukur untuk melihat kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum, dengan target 90% tahun 2018.

Tabel 5-5
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung di Misi 3

Misi 3: Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja pada Awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN					Target Kinerja pada Akhir RPJMD
					2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan 1: Mewujudkan Pendidikan yang merata, unggul, terjangkau dan terbuka.										
1	Mewujudkan sistem pendidikan nasional di Kota Bandung yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global	Indeks Pendidikan	Skala	90,20	90,77	91,45	92,08	92,71	93,34	93,34
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	Tahun	10,77	11,07	11,37	11,67	12	12	12
		Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persentas e	99,59	99,66	99,75	99,84	99,93	99,95	99,95
Tujuan 2: Peningkatan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan										
2	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau.	Persentase pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak, remaja dan ibu	Persentas e	75	80	85	87	90	95	95
		Persentase penyakit menular yang ditangani	Persentas e	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase pasien miskin yang dirujuk dan dilayani oleh PPK II	Persentas e	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase RS memenuhi Standar Pelayanan	Persentas e	50	60	65	70	75	80	80
3	Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan	Jumlah RW siaga aktif	Jumlah RW	597	778	959	1140	1321	1501	1501
		Persentase kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	Persentas e	4	7	14	20	27	35	35
		Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat	Persentas e	71,8	73,8	75,8	76,3	77,3	78,3	78,3
4	Terkendalinya kasus penyakit zoonosa	Kasus penyakit zoonosa	Kasus	1	8	8	8	8	8	8
Tujuan 3: Peningkatan kualitas Hidup Masyarakat										
5	Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan	Jumlah penduduk maksimal kota Bandung	Jiwa	2.475.094	2.502.808	2.530.122	2.557.636	2.585.150	2.612.664	2.612.664

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja pada Awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN					Target Kinerja pada Akhir RPJMD
					2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	daya dukung dan daya tampung lingkungan	angka fertilitas	Persentase	2,01	1,99	1,98	1,97	1,96	1,95	1,95
6	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	indeks pembangunan gender (IPG)	Skala	65,25	65,3	65,35	65,4	65,55	65,6	65,6
		Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measurement)	Skala	70	70,05	70,1	70,15	70,2	70,25	70,25
		Kota Layak Anak	Persentase	2	10	20	40	60	80	80
7	Meningkatnya penanggulangan PMKS	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terlayani	Persentase	17,84 (110.574 jiwa)	20	22	24	26	28	28
8	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan	Peran Serta Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Rupiah	173.678.70 9.134	150.000.00 0.000	165.000.000 .000	181.500.00 0.000	199.650.000 .000	219.615.000 .000	219.615.000 .000
		angka kemiskinan	Jiwa	304.939	301.890	298.871	295.882	292.923	289.994	289.994
		Tingkat Pelaksanaan Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan	Skala	NA	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Tujuan 4: Meningkatkan pelestarian seni budaya peran pemuda prestasi olah raga										
9	Meningkatnya pelestarian seni budaya serta Prestasi Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Seni Budaya Tradisi yang dilestarikan	Unit	N/A	3	3	3	3	3	15
		Prestasi Olah Raga di Tingkat Prov dan Nasional	Peringkat	Juara 2 POR Pemda	Juara 1 pd POR Prov dan Juara 1 pd POR Pemda	Juara 1 POR Pemda	Persentase kontribusi atlet dlm kontingen PON Jabar, Juara 1 POR Pemda	Juara 1 POR Pemda	Juara 1 POR Prov , Juara 1 POR Pemda	
Tujuan 5: Mewujudkan Toleransi dan Pembinaan Umat Beragama										
10	Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama	Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing	Nilai	NA	C	C	B	B	B	B
		Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama	Nilai	NA	C	C	B	B	B	B

Misi ke-3 Walikota Bandung merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat Kota Bandung yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. Tujuan pertama adalah mewujudkan pendidikan yang merata, unggul, terjangkau dan terbuka, dengan sasaran pertama untuk mewujudkan sistem pendidikan yang merata, berkeadilan dan berdaya saing yang ditandai dengan Indeks Pendidikan dengan capaian kinerja pada awal periode RPJMD sebesar 90,20, tahun 2018 Indeks tersebut ditargetkan akan ditingkatkan menjadi 93,34. Capaian RLS merupakan target RPJPD yang pada periode RPJMD sebelumnya belum tercapai, sehingga pada periode RPJMD yang ke-3 ini target 12 Tahun RLS harus dicapai tahun 2017. Sedangkan target penduduk yang berusia di atas 15 tahun yang tidak buta aksara adalah sebesar 99,95% tahun 2018. Ketiga indikator yang menggambarkan ketercapaian sasaran bidang pendidikan disesuaikan dengan peta kebutuhan SD, SMP, dan SMA/SMK di setiap wilayah Kecamatan/Kelurahan sesuai pertumbuhan penduduk serta ditunjang oleh pembangunan gedung sekolah yang diarahkan agar dibangun secara lengkap dan dilaksanakan secara utuh dan terpadu, tuntas dalam setiap satu tahun anggaran.

Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau menjadi sasaran urusan kesehatan yang dalam pencapaiannya ditandai dengan layanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak, remaja dan ibu dengan capaian tahun 2013 sebesar 75% dan target pada periode akhir RPJMD sebesar 95%. Indikator lain yang digunakan adalah penanganan penyakit menular, pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan capaian maupun targetnya telah mencapai 100%. Indikator yang berkaitan dengan persentase Rumah Sakit yang memenuhi standar pelayanan dengan capaian kinerja tahun 2013 sebesar 50% dan target tahun 2018 sebesar 80%. Pencapaian indikator layanan kesehatan, penanganan penyakit menular, dan pelayanan pasien miskin akan ditunjang dengan penyediaan, rehabilitasi, pengembangan, dan pembangunan Puskesmas.

Pembangunan Puskesmas baru akan disediakan paling sedikit 5 Puskesmas setiap tahunnya dengan memperhatikan jumlah penduduk, antara lain Puskesmas di Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari,

Kelurahan Jatisari Kecamatan Buah Batu, Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo, Kelurahan Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler, dan lain-lain.

Sasaran urusan kesehatan yang lainnya berkaitan dengan meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan dengan indikator jumlah RW siaga aktif yang direncanakan akan mencapai 1501 RW tahun 2018, kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat merupakan indikator selanjutnya dengan capaian kinerja sebesar 4% tahun 2013 dan akan ditingkatkan sampai dengan 35% Tahun 2018. Sarana air minum yang memenuhi syarat menjadi indikator lain yang berkaitan dengan sasaran meningkatnya kesadaran dalam penyehatan lingkungan capaian kinerja tahun 2013 adalah sebesar 71,8% sedangkan target tahun 2018 sebesar 78,3%. Terkendalnya kasus zoonosa yang dalam implementasinya merupakan kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ditargetkan jumlah maksimal kasus yang terjadi di seluruh wilayah Kota Bandung adalah sebanyak 8 kasus, target ini merupakan amanat RPJPD. Upaya untuk menekan terjadinya kasus zoonosa ini merupakan keberhasilan yang patut dicatat pada periode RPJMD sebelumnya dimana hanya ditemukan satu kasus zoonosa dan berhasil ditangani.

Pengendalian jumlah penduduk merupakan isu strategis yang memerlukan penanganan secara tepat, sehingga ditetapkan sebagai salah satu sasaran dengan indikator yang digunakan adalah jumlah penduduk maksimal sebesar 2.612.664 jiwa tahun 2018 serta menekan angka fertilitas sebesar 1,95 menurun dari kondisi awal RPJMD yaitu sebesar 2,01.

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditandai dengan indeks pembangunan gender dengan capaian kinerja tahun 2013 sebesar 66,25 serta target tahun 2018 sebesar 65,6. Indeks pemberdayaan gender menjadi indikator lain yang harus dicapai, target tahun 2018 adalah sebesar 70,25. Kota layak anak (KLA) merupakan indikator sebuah kota yang memiliki keberpihakan terhadap perkembangan masa depan anak bangsa. Kota Bandung merupakan

salah satu kota dengan pencapaian KLA terbaik di Jawa Barat dengan mentargetkan pencapaian 80% indikator kota layak anak telah terpenuhi tahun 2018.

Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Bandung. Target capaian pelayanan kepada PMKS yang harus diwujudkan sebesar 28%. Target ini selaras dengan target pemerintah pusat maupun target provinsi. Penanganan PMKS dilakukan melalui pemberian pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara baik dan wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial berarti mengentaskan mereka dari situasi tersebut sehingga diharapkan semakin lama jumlah mereka akan berkurang terutama untuk para PMKS jalanan.

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan merupakan sasaran yang diindikasikan dengan peran serta swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dengan target besaran swadaya masyarakat dalam bentuk kontribusi financial terhadap program tersebut sebesar Rp. 219.615.000.000,00. Swadaya masyarakat ini digali dalam penyelenggaraan program/kegiatan baik yang sifatnya fisik maupun non fisik. Indikator selanjutnya adalah penurunan angka kemiskinan dengan target sebanyak 289.994 jiwa tahun 2018 atau berkurang 1% setiap tahun dari sejumlah 304.939 jiwa tahun 2013. Salah satu strategi yang ditempuh untuk menurunkan angka kemiskinan dilakukan dengan memberikan Subsidi sembilan bahan pokok serta subsidi pembelian gas 3 kg, keduanya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Anggaran yang dialokasikan untuk subsidi sembako berada di Dinas KUKM Perindag serta Dinas Sosial, untuk teknis penyaluran subsidi dan besarannya terlebih dahulu dibuat kajian yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan pedoman umum dan payung hukum untuk menjaga kontinuitas pelaksanaan serta jaminan asas legalitasnya.

Indikator selanjutnya adalah Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan dengan indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kewilayahan adalah tingkat pelaksanaan inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dengan target kriteria baik tahun 2018. Indikator ini menggambarkan *political will* Walikota untuk meningkatkan pemberdayaan LKK sebagai bagian dari desentralisasi kewenangan dan percepatan pelaksanaan pembangunan kewilayahan. Target kinerja tahunan akan diukur dengan melakukan evaluasi keberhasilan penyelenggaraan program berbasis kewilayahan ini dengan menghubungkan kinerja 4 (empat) kelompok LKK dalam memberikan dukungan terhadap keberhasilan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta SPM bidang sosial.

Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bandung yang mengatur adanya pagu indikatif Kelurahan dan menetapkan skala prioritas pembangunan dan pemberdayaan dengan memperhatikan komposisi antara lain, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, kepadatan penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Kualitas Sarana Umum/infrastruktur, Tingkat Pengangguran, serta mempertimbangkan karakter dan potensi sosial-ekonomi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai dasar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan.

Pelestarian budaya lokal menjadi sasaran selanjutnya dengan indikator jumlah seni budaya tradisi yang dilestarikan dengan target sebesar 3 (tiga) jenis seni budaya tradisi setiap tahunnya sehingga tahun 2018 jumlah seni budaya yang dilestarikan mencapai 15 jenis. Prestasi olahraga ditingkat nasional dan provinsi menjadi indikator selanjutnya dengan target tahun 2018 menjadi juara pada POR Provinsi dan POR Pemda.

Terwujudnya kehidupan harmonis intern dan antar umat beragama menjadi sasaran berikutnya dengan target terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing

serta terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama, untuk kedua indikator tersebut pengukuran dilakukan dengan melakukan survey dan target yang ditetapkan adalah nilai B atau kategori baik tahun 2018.

Tabel 5-6
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung di Misi 4

Misi 4: Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja pada Awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN					Target Kinerja pada Akhir RPJMD
					2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan 1: Membangun perekonomian kota yang kokoh										
1	Terjaganya ketersediaan pangan dan stabilitas harga	Penguatan cadangan pangan ekuivalen beras	Ton	NA	24	60	60	60	60	60
		Tingkat inflasi umum	Persentase	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
2	Terjaganya pertumbuhan ekonomi	Laju Perumbuhan Ekonomi (LPE)	Persentase	8,98	9,25	9,52	9,79	10,06	10,33	10,33
3	Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri	Nilai Ekspor Kota Bandung	Juta US \$	601	603	606	609	612	614	614
4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Penerimaan Pajak Daerah	Milyar Rp	1.056.000	1.400.000	1.613.000	1.850.000	2.118.181,25	2.426.158,4	2.426.158,4
		Penerimaan Retribusi	juta Rp	78.649	138.000	140.000	142.000	144.000	146.000	146.000
5	Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik	insentif pajak daerah	Jumlah kelompok sasaran	12	-	1	1	1	-	15
6	Meningkatkan sinergitas pembiayaan pusat, provinsi, daerah	program/kegiatan yang pendanaannya melibatkan APBN, APBD Propinsi Jawa Barat dan APBD Kota Bandung	Jumlah	NA	-	-	1	-	1	2
7	Penggunaan instrumen pembiayaan non-konvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta)	Jumlah perusahaan swasta yang berkontribusi terhadap pembangunan kota setiap tahun	Jumlah	35	35	40	50	65	80	80
Tujuan 2: Membangun perekonomian kota yang maju										
8	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	3,594 Triliun	3,862 Triliun	4,059 Triliun	4,291 Triliun	4,523 Triliun	4,756 Triliun	4,756 Triliun

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja pada Awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN					Target Kinerja pada Akhir RPJMD
					2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Meningkatnya kontribusi perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap PAD	Terbentuknya perusahaan patungan untuk beberapa layanan jasa umum dan barang publik	Unit	Penyusunan Naskah Akademik	Draft Raperda	Perda Pembentukan Perusahaan patungan	Pendirian Akta Perusahaan	Terbentuknya perusahaan patungan	Operasional Perusahaan patungan	Operasional Perusahaan patungan
10	Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif	Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif	Kategori	NA	-	-	Cukup	baik	baik	baik
11	Berkembangnya koperasi dan UMKM	Pelaku usaha bernilai tambah dalam aspek HKI, paten, omzet, akses modal serti-fikasi halal, kuantitas, dan kualitas produksi koperasi aktif	Unit	274	155	420	450	475	500	1774
			Persentase	81,14	81,76	82,85	84,41	86,24	88,82	88,82
12	Optimalisasi Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	5.257.439	5.367.894	5.480.821	5.658.874	5.843.652	6.035.475	6.035.475
Tujuan 3: Membangun perekonomian kota yang berkeadilan										
13	Meningkatkan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	10,98	10,78	10,55	10,36	10,17	10,00	10,00
		Lapangan pekerjaan baru	Jumlah	6989	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	256.989
		Wirausaha baru	Orang	1000	10.000	15.000	25.000	25.000	25.000	101.000
14	Mendorong upaya peningkatan daya beli masyarakat	Indeks Daya Beli	Indeks	66,59	66,83	67,07	67,32	67,56	67,80	67,80
		PDRB/kapita	Rp	15.255.635	16.501.354	17.996.702	19.688.869	21.598.737	23.764.532	23.764.532

Mengembangkan perekonomian kota yang kokoh, maju, dan berkeadilan merupakan upaya untuk mewujudkan Visi Bandung yang sejahtera, melalui misi ini tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan perekonomian Kota Bandung yang kuat, bervisi kepada masa depan serta keberpihakan pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat golongan ekonomi terbawah.

Tujuan yang pertama adalah membangun perekonomian kota yang kokoh dengan sasaran pertama terjaganya ketersediaan pangan dan stabilitas harga, indikatornya adalah penguatan cadangan pangan ekuivalen beras dengan target penyediaan cadangan beras sebanyak 60 Ton per tahun dan pada tahun pertama sebanyak 24 Ton. Target ini merupakan target SPM ketahanan pangan. Tingkat inflasi umum merupakan indikator selanjutnya, targetnya sesuai dengan target RPJPD yaitu di bawah 10%, dalam pencapaiannya tingkat inflasi sangat dipengaruhi oleh faktor diluar upaya pemerintah sehingga membutuhkan kerjasama semua *stakeholders* ekonomi kotadalam pencapaiannya.

Sasaran yang kedua adalah terjaganya pertumbuhan ekonomi dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang merupakan indeks pendukung IPM yang perlu di akselerasi pencapaiannya, target LPE tahun 2018 adalah sebesar 10,33.

Sasaran yang ketiga dalam mewujudkan perekonomian kota yang kokoh adalah meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri dengan indikator Nilai Ekspor Kota Bandung yang ditargetkan sebesar 624 juta dollar Amerika tahun 2018.

Sasaran yang keempat adalah peningkatan pendapatan sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian Pemerintah Kota dalam pembiayaan pembangunan, target pendapatan terdiri dari pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak. Target penerimaan pajak adalah sebesar 2.4 Trilyun tahun 2018 dan target penerimaan bukan pajak sebesar 315 Milyar dengan pertumbuhan sebesar 17% sesuai dengan amanat RPJP.

Sasaran kelima adalah mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas

publik, merupakan target RPJPD yang pada periode sebelumnya belum berhasil diwujudkan, pada periode RPJMD ini ditargetkan untuk menyiapkan insentif fiskal sebanyak 3 jenis mata pajak selama periode RPJMD. Insentif pajak diberikan berupa perluasan kelompok sasaran penerima insentif maupun peningkatan besaran insentif yang diberikan. Kondisi eksisting insentif Pajak telah diberikan sebanyak 3 jenis yaitu pajak restoran dengan insentif untuk pengusaha yang omzetnya dibawah 10 juta, pajak rumah kost dengan insentif kepada pemilik kost kurang dari 10 kamar, serta insentif PBB kepada 10 kelompok sasaran berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1131 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis dan Tatacara Pemungutan PBB.

Sasaran yang keenam adalah meningkatkan sinergitas pembiayaan antara pusat, provinsi dan daerah, dimaksudkan untuk melakukan pembiayaan bersama untuk proyek pembangunan yang membutuhkan anggaran yang besar, sehingga target terutama untuk kegiatan pembangunan infrastruktur yang bersifat monumental dapat diwujudkan. Targetnya adalah 2 (dua) proyek selama periode RPJMD 2013-2018 yang dananya bersumber dari pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kota.

Sasaran ketujuh adalah Penggunaan instrumen pembiayaan non-konvensional dalam pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta) sasaran ini merupakan target RPJPD yang ditujukan untuk menggali sumber pembiayaan di luar anggaran pemerintah. Indikator yang digunakan adalah jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota setiap tahun. Target yang menjadi kejaran adalah sebanyak 270 Perusahaan swasta berkontribusi pembiayaan pembangunan di Kota Bandung selama periode lima tahun, target tahun pertama sebanyak 35 perusahaan dan diharapkan meningkat terus sampai dengan sebanyak 80 perusahaan pada tahun kelima. indikator ini sejalan dengan agenda walikota untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pembiayaan pembangunan.

Tujuan yang kedua dari misi keempat adalah membangun perekonomian kota yang maju, dengan sasaran kedelapan terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi. Indikatornya adalah nilai investasi

berskala nasional sebesar 4,576 Trilyun yang didukung dengan program peningkatan iklim usaha yang kondusif dan indeks kemudahan berusaha.

Sasaran kesembilan adalah meningkatnya kontribusi perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap PAD, indikatornya adalah terbentuknya perusahaan patungan untuk beberapa layanan jasa umum dan barang publik dengan target terbentuknya perusahaan patungan tahun 2017 dan operasionalisasi perusahaan tersebut tahun 2018. Kondisi awal tahun 2014 telah disusun naskah akademik dan draft Raperda pembentukan perusahaan patungan.

Sasaran kesepuluh adalah berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya tercapainya Bandung sebagai Kota kreatif. Indikatornya adalah Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; satuannya adalah kategori dengan target baik tahun 2016. Ekspektasi masyarakat global terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Bandung sangat tinggi sehingga menuntut agresivitas pemerintah dalam menggerakkan sektor perekonomian yang tengah berkembang ini. Tiga sektor utama industri ekonomi kreatif yakni kuliner, fashion, dan kerajinan secara nyata telah tersedia di Kota Bandung. Hal ini pada gilirannya membutuhkan campur tangan *stakeholders* perekonomian untuk terus mengelaborasi ide, pengetahuan, dan teknologi yang dibutuhkan untuk terus menumbuhkembangkan sektor-sektor ekonomi kreatif yang telah terwujud secara alamiah di Kota Bandung. Sektor ekonomi kreatif yang secara nasional telah menyerap 11,872 persen dari total keseluruhan serapan tenaga kerja nasional ini secara faktual merupakan lahan pekerjaan baru yang menjanjikan bagi para tenaga muda yang membutuhkan lahan kreasi untuk mengekspresikan karya nyata dalam proses pembangunan. Indikator kedua adalah Pelaku usaha kreatif bernilai tambah dalam aspek HKI, paten, omzet, akses modal sertifikasi halal, kuantitas, dan kualitas produksi, target yang dicapai adalah jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi untuk mendapatkan legalitas terhadap produknya. Tahun 2018 jumlah pelaku usaha yang di fasilitasi

sebanyak 1774 unit usaha. Kewirausahaan adalah jawaban dari tantangan zaman dimana tuntutan untuk memadukan keinginan, kemampuan dan kebutuhan semakin deras bila disandingkan dengan arus perubahan global. Untuk mencapai hal itu, secara bersama-sama perlu dikembangkan sinergitas antara pemerintah, akademisi, kalangan bisnis dan komunitas untuk membangun sebuah pemahaman dan konsep dasar pengembangan kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif. Keterlibatan keempat aktor utama ini adalah untuk memberikan fasilitasi yang memadai guna mengantarkan masyarakatnya kepada arena pencapaian kesejahteraan sebagaimana dicita-citakan bersama.

Sasaran kesebelas adalah berkembangnya koperasi dan UMKM dengan indikator koperasi aktif pada awal RPJMD tahun 2014 sebesar 81,14% dan target akhir RPJMD tahun 2018 sebesar 88,82%.

Sasaran kedua belas adalah optimalisasi Kota Bandung sebagai Kota tujuan wisata yang berdaya saing, indikatornya adalah jumlah kunjungan wisatawan dengan target pada akhir periode RPJMD sebanyak 6.035.475 wisatawan yang berkunjung baik yang menginap maupun tidak. Target ini merupakan target RPJPD yang dalam pencapaiannya membutuhkan kerjasama dari seluruh *stakeholders* kepariwisataan.

Tujuan Ketiga dari Misi Keempat membangun perekonomian kota yang berkeadilan, dengan sasaran ketigabelas adalah meningkatkan kesempatan kerja melalui pengurangan secara signifikan tingkat pengangguran terbuka dengan target 10% tahun 2018, penyediaan lapangan pekerjaan baru dengan target sebanyak 250.000 lapangan pekerjaan tersedia bagi masyarakat Kota Bandung sampai dengan tahun 2018. Penyediaan Lapangan pekerjaan baru ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa SKPD, target ini juga dihubungkan dengan pengembangan Bandung teknopolis yang akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak, sehingga janji kampanye untuk menyediakan lapangan pekerjaan dapat dipenuhi. Disamping itu, target penciptaan wirausaha baru, target yang ditetapkan sesuai dengan janji walikota sebanyak 100.000 wirausaha baru selama 5 (lima) Tahun, pencapaian target tersebut merupakan kinerja bersama antara beberapa

SKPD yaitu Dinas KUKM dan Perindag, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Sasaran kedua adalah mendorong upaya peningkatan daya beli masyarakat dengan indikator Indeks Daya Beli dan target yang direncanakan adalah 67,80 tahun 2018. Peningkatan Indeks Daya Beli merupakan target kinerja yang perlu di akselerasi oleh Pemerintah Kota Bandung untuk mencapai target IPM, mengingat 2 indikator IPM lainnya sulit untuk ditingkatkan. Indikator yang lain untuk mengukur peningkatan daya beli adalah Peningkatan PDRB/kapita dengan target sebesar Rp. 23.764.532 tahun 2018.

5.4. Pembangunan Kawasan Teknopolis Gedebage

Kawasan Pusat Kota pada umumnya merupakan lokasi strategis tempat berbagai kegiatan fungsional kota terkonsentrasi dengan intensitas tinggi, dengan berbagai fasilitas bagi pemenuhan kebutuhan penduduk yang berskala pelayanan tinggi. Demikian juga halnya dengan Kota Bandung yang berfungsi sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat dan Pusat Kegiatan Nasional, dimana berbagai kegiatan sebagian besar terkonsentrasi di kawasan pusat kota. Hal ini akan berdampak terhadap semakin menurunnya kemampuan daya dukung lingkungan dalam memenuhi kebutuhan fasilitas kehidupan penduduk, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Lokasi pusat pemerintahan Kota Bandung yang berada di kawasan pusat kota mengakibatkan tingginya orientasi pergerakan ke pusat kota dan semakin beratnya beban di kawasan pusat kota.

Kebijakan yang perlu segera dilakukan adalah melalui penyebaran pusat-pusat kegiatan agar tidak terkonsentrasi pada satu titik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031 pengembangan tata ruang kota diarahkan ke Wilayah Bandung Timur. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan orientasi pergerakan penduduk dapat disebar dan dapat mengurangi beban lalu lintas di kawasan pusat kota.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan membangun Kawasan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Gedebage dengan tema Bandung Teknopolis. Peluang untuk membangun teknopolis Gedebage sangat besar karena memiliki faktor-faktor pendukung, diantaranya: (1) masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). (2) Pusat Pelayanan Kota RTRW 2011-2031, dan (3) Kawasan Ekonomi Khusus.

Berkenaan dengan MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi disesuaikan dengan potensi demografi dan kekayaan sumber daya alam. Ada 6 koridor ekonomi sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Nusantara, dan salah satunya adalah koridor ekonomi Jawa dengan tema pembangunan yang diangkat: *“driver for national industry and services provision”*, dengan pusat ekonomi di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.

Bandung memiliki kampus berbasis IT, bio dan science, selain itu laju pertumbuhan ekonomi kota Bandung berada diatas rata-rata nasional, dengan *entrepreneur* sebagai modal keunggulan kota Bandung. *Entrepreneur* menciptakan ekonomi kreatif berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas.

Berkenaan dengan Pusat Pelayanan Kota (PPK), PPK alun-alun sebagai kota lama akan dijadikan sebagai pusat seni, budaya, dan jasa, sedangkan PPK Gedebage sebagai kota baru akan dijadikan sebagai kota pemerintahan.

Berkenaan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), merupakan suatu kawasan dengan keunggulan geo-ekonomi dan geo-strategi untuk kegiatan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Pada kawasan tersebut akan dikembangkan pusat aktivitas kota yang meliputi Kawasan Ekonomi Khusus, Pusat *Bussiness*, Pusat Pemerintahan, Pemukiman, serta Pusat Pengembangan Iptek. Pada Kawasan tersebut dibangun pula terminal terpadu, kolam retensi untuk pengendalian banjir, gerbang Tol Gedebage serta infrastruktur dasar.

Pemindahan pusat pemerintahan merupakan rencana dalam pengembangan Teknopolis Gedebage yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat, sebagai fungsi utama pemerintah.

Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 5-7
Rencana Pengembangan Teknopolis Gedebage

No.	Kegiatan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kajian/Studi Kelayakan	X				
2.	Perda RDTRK	X				
3.	Pengadaan Lahan		X	X		
4.	Perencanaan Teknis (DED)		X	X		
5.	Revisi Perda RTRW			X		
6.	Perijinan			X		
7.	Kajian Lingkungan (Amdal)			X		
8.	Pematangan Lahan			X		
9.	Pembangunan/Kontruksi				X	X
10.	Operasional					X

Sedangkan beberapa komponen kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Kawasan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Gedebage dengan tema Bandung Teknopolis antara lain:

1. Pengadaan Lahan
 - Pusat Pemerintahan
 - Jalan Tol Gedebage
 - Infrastruktur
 - Kolam Retensi
 - Sisa Pengembangan Lahan SUS Gedebage
 - RTH
2. Kontruksi/Pembangunan
 - Kawasan Ekonomi Khusus
 - Pusat Pemerintahan
 - Jalan Tol Gedebage
 - Terminal Terpadu
 - Infrastruktur Dasar
 - Kolam Retensi

5.5. Indikator, Kolaborasi, dan Inovasi

Indikator sasaran dan target capaian kinerja dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan indikator yang direncanakan untuk merealisasikan misi serta khususnya untuk mewujudkan Visi Kota Bandung sebagai Kota Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Dengan demikian, Indikator sasaran dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan indikator yang bersifat strategis dan skala kota, sedangkan indikator yang lebih rendah skalanya berada pada level SKPD yang dituangkan dalam Rencana strategis SKPD.

Di dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dijelaskan bahwa inti pelaksanaan pembangunan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*human welfare*). Salah satu indikator yang dapat merepresentasikannya adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 telah memfokuskan Indikator Pembangunan Manusia, yang salah satunya ditunjukkan dengan target capaian kinerja IPM pada akhir periode RPJMD (tahun 2018) sebesar 82,02. Perlu ditegaskan bahwa nilai IPM disini bukan merupakan hasil penghitungan BPS Pusat, akan tetapi hasil penghitungan BPS Kota Bandung. Sehingga akan sangat mungkin terjadi perbedaan nilai IPM antara BPS Pusat dan BPS Kota Bandung, karena teknis penghitungan sampling yang berbeda.

Nilai IPM Kota Bandung yang berbasis data pada BPS Kota Bandung tersebut memiliki makna penting untuk melihat disparitas antar Kecamatan di kota Bandung, sesuatu yang tidak akan didapat dari nilai IPM berbasis data BPS Pusat. Kendati demikian, nilai IPM berbasis data BPS Pusat tetap memiliki makna penting untuk melihat disparitas antar kabupaten/kota di Indonesia.

Selain capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM), RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebagai pedoman pembangunan lima tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kota Bandung dalam menyusun Rencana Strategis serta Rencana Kerja Tahunan, juga berkomitmen kuat untuk mendukung terwujudnya target pembangunan yang ditetapkan secara nasional, seperti MDGs, Standar Pelayanan

Minimum (SPM), Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, serta berbagai target capaian lainnya.

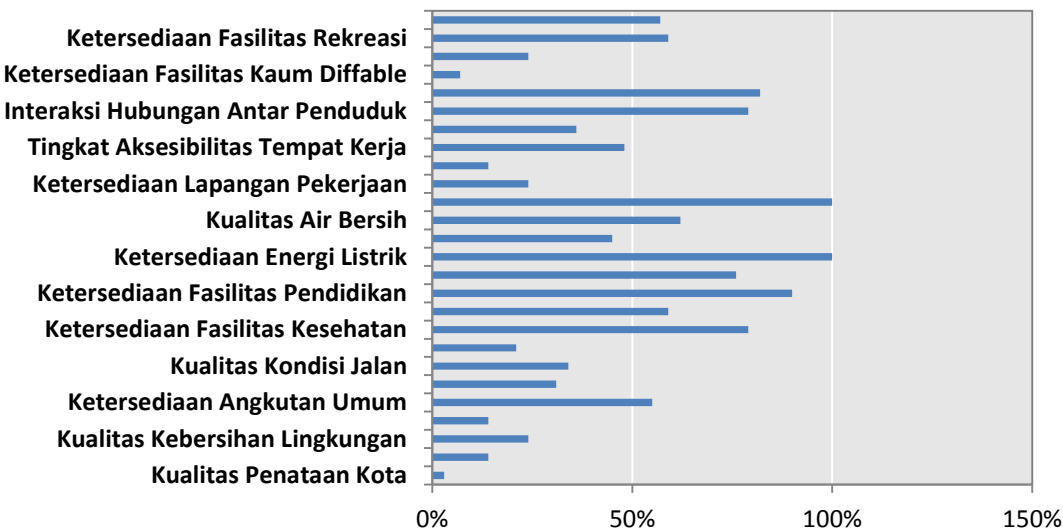
RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 berikut turunannya pada skala Rencana Strategis SKPD harus bersifat terbuka, adaptif dan atau dapat mewadahi berbagai indikator yang berimplikasi positif bagi kesejahteraan warga kota Bandung, sebagaimana direfleksikan pada Indikator Pembangunan Kota Masa Depan yang terdiri dari *Green City*, *liveable City*, serta *Smart City*, maupun indeks kebahagiaan.

Walikota Bandung memiliki harapan, yang dituangkan didalam dokumen RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, untuk mewujudkan kota Bandung yang nyaman atau *Liveable City*. Kota nyaman merupakan sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik maupun aspek non-fisik. Pertambahan penduduk kota yang semakin cepat, tingkat intensitas aktivitas warga kota yang semakin intensif memberikan tekanan yang semakin besar terhadap ruang dan pemenuhan kebutuhan berbagai macam infrastruktur dan fasilitas perkotaan. Ketidakseimbangan ini akan memicu berbagai permasalahan perkotaan mulai dari fisik kota sampai pada permasalahan yang pada akhirnya akan berdampak pada semakin berkurangnya tingkat kenyamanan hidup di kota. Pada kondisi ini, perkembangan kota berbanding terbalik dengan tingkat kenyamanan, padahal seharusnya semakin berkembang dan maju suatu kota, maka tingkat kenyamanan hidup di kota tersebut semakin meningkat. Kondisi inilah yang harus menjadi identitas kota masa depan Indonesia, menjadi kota yang berkembang, maju sejalan dengan tingkat *liveability* yang tinggi.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Perencana Indonesia, tahun 2011 kota Bandung berada urutan 10 *liveable city index*, diatas kota Palembang, Jakarta, dan Medan. Nilai tertinggi indeks kenyamanan kota diperoleh Yogyakarta, diikuti Denpasar, Makasar, Manado, Surabaya, dan Semarang. Adapun aspek yang dinilai serta hasil penilaian untuk kota Bandung dipandang belum baik (di bawah 50%):

(1) Kualitas Penataan Kota, (2) Jumlah Ruang Terbuka, (3) Kualitas Kebersihan Lingkungan, (4) Tingkat Pencemaran Lingkungan, (5) Kualitas Angkutan Umum, (6) Kualitas Kondisi Jalan, (7) Kualitas Fasilitas Pejalan Kaki, (8) Ketersediaan Air Bersih, (9) Ketersediaan Lapangan Pekerjaan, (11) Tingkat Biaya Hidup, (12) Tingkat Aksesibilitas Tempat Kerja, (13) Tingkat Kriminalitas, (14) Ketersediaan Fasilitas Kaum Difable, dan (15) Perlindungan Bangunan Bersejarah.

Sedangkan aspek yang dinilai telah diatas 50% adalah: (1) Ketersediaan Angkutan Umum, (2) Ketersediaan Fasilitas Kesehatan, (3) Kualitas Fasilitas Kesehatan, (4) Ketersediaan Fasilitas Pendidikan, (5) Kualitas Fasilitas Pendidikan, (6) Ketersediaan Energi Listrik, (7) Kualitas Air Bersih, (8) Kualitas Jaringan Telekomunikasi, (9) Interaksi Hubungan Antar Penduduk, (10) Informasi Pelayanan Publik, (11) Ketersediaan Fasilitas Rekreasi, serta (12) Kualitas Fasilitas Rekreasi. Indikator-indikator yang digunakan dalam Indeks Kenyamanan Kota tersebut sebagian besar telah diakomodir pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 namun demikian yang perlu diperkuat pada indikator dimaksud terletak pada pentingnya aspek kualitas, tidak hanya difokuskan pada ketersediaan atau aspek kuantitas saja.



Sumber: Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, 2011

Grafik 5-1
Indeks Kenyamanan Kota Bandung

Selain kota yang nyaman, pembangunan di kota Bandung selama lima tahun ke depan diharapkan akan dapat meningkatkan kebahagiaan warga kota yang pengukurannya dilakukan dengan Indeks Kebahagiaan. Setiap orang mempunyai persepsi dan ukuran berlainan terhadap kebahagiaan seperti perasaan selamat, kepuasan hidup, kecukupan dan kemudahan yang disediakan pemerintahan, daya dukung lingkungan, sosial dan sebagainya. Indeks Kebahagiaan merupakan pengukuran umum tahap kesejahteraan penduduk yang lebih menyeluruh meliputi kesehatan mental dan fisik, ekonomi, pendidikan, lingkungan dan sosial.

Data dari opini publik hasil penelitian bahwa Indonesia saat ini berada pada urutan ke-23 dunia indeks kebahagiaan sedangkan berdasarkan survey di 6 Kota besar di Indonesia, tercatat Kota Bandung menduduki peringkat ke-3 dengan urutan sebagai berikut: (1) Semarang 48,74%, (2) Makassar 47,95%, (3) Bandung 47,88%, (4) Surabaya 47,19%, (5) Jakarta 46,80 % serta (6) Medan 46,12 %.

Dengan capaian Indeks Kenyamanan kota pada tahun 2011 serta Indeks Kebahagiaan menunjukkan bahwa Kota Bandung harus terus memperbaiki diri serta meningkatkan kualitas kenyamanan kota. Namun patut dipahami bahwa mengelola Kota Bandung agar menjadi Kota Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera, bukanlah pekerjaan yang sederhana. Isu strategis serta kompleksitas permasalahan yang dihadapi Kota Bandung saat ini, serta tantangan dalam 5 (lima) tahun ke depan tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah kota saja, tetapi menuntut peran aktif dari para pemangku kepentingan.

Membangun kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera periode 2013-2018 merupakan tanggung jawab bersama, yang melibatkan masyarakat, perwakilan kelompok sosial, kelompok kepentingan dan swasta melalui pendekatan proses, jaringan dan kemitraan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, membangun kota Bandung mutlak harus mengedepankan pendekatan kolaborasi, dalam bentuk indikator kemitraan yang tidak berbentuk struktur hierarkis dan semua memiliki nilai yang sama, serta terjadinya berbagi sumber daya.

Mewujudkan Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera periode 2013-2018, tidak dapat hanya mengandalkan pada APBD Kota Bandung yang jumlahnya terbatas. Perlu keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dan lingkungan strategis, baik individu, komunitas, swasta maupun pemerintah sekitarnya. Kolaborasi yang dilakukan dengan memaksimalkan keterlibatan masyarakat sebagai pengguna layanan publik, serta mengembangkan hubungan antar lembaga dengan pihak swasta dalam pembangunan. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan mengembangkan kemandirian masyarakat, karena masyarakat diharapkan dapat mendefinisikan serta mencoba memenuhi kebutuhan mereka sendiri melalui proses kreatif dan kooperatif (kemandirian).

Ada tiga bentuk kolaborasi yang dilakukan: *pertama*, Individu secara swadaya membangun usaha pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat. *Kedua*, Komunitas atau sekelompok masyarakat bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokal serta *Ketiga*, Pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten baik dalam pendanaan maupun kegiatan bersama melakukan pembangunan sosial dengan lembaga di dalam organisasi pemerintah.



Gambar 5-3
Membangun Kolaborasi

Selain pendekatan kolaborasi, mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera juga akan mengedepankan pendekatan inovasi yang merupakan karakter unggul kota Bandung. Inovasi yang dilakukan mencakup seluruh misi dalam RPJMD, dan terkait dengan pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan ide kreatif teknologi atau cara baru dalam teknologi pelayanan atau memperbarui yang sudah ada atau menciptakan terobosan atau penyederhanaan di bidang aturan, pendekatan, prosedur, metode, maupun struktur organisasi pelayanan yang manfaatnya *outcome* mempunyai nilai tambah baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan.

Dengan demikian inovasi dalam pelayanan publik tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada. Pada akhirnya, inovasi pelayanan publik harus menjiwai perencanaan strategi di berbagai level, terutama dalam Renstra SKPD.

5.6. Janji Walikota dan Wakil Walikota

RPJMD Kota Bandung 2013-2018 merupakan Dokumen Strategis Kota Bandung untuk mengimplementasikan janji-janji Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang disampaikan pada saat kampanye. Janji-janji dimaksud menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan RPJMD, dan oleh karenanya menjadi contoh baik dalam tata kelola pemerintahan dan perencanaan pembangunan, bahwa janji-janji yang telah disampaikan mutlak harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan.

Sebagaimana halnya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih berpedoman pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025, maka janji-janji yang telah disampaikan pada saat kampanye patut diyakini merupakan substansi yang terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi. Janji-janji dimaksud yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung

Tahun 2013-2018, selanjutnya tentu akan menjadi pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berkenaan dengan janji-janji Walikota dan Wakil Walikota terpilih, tercatat ada 20 item janji politik yang terbagi atas aspek: Bandung Sehat (3 item), Bandung Resik (4 item), Bandung Nyaman (7 item) dan Bandung Sejahtera (6 item). Berikut janji-janji dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5-8
Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

No.	Aspek	Indikator
1	BANDUNG SEHAT	1. Asuransi Kesehatan 2. <i>Ambulance</i> gratis 3. Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam
2	BANDUNG RESIK	1. Bebas Sampah dalam 2 Tahun 2. Bebas Banjir dalam 3 Tahun 3. Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun 4. Bebas Macet dalam 4 Tahun
3	BANDUNG NYAMAN	1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW 2. Penyediaan sarana air bersih 3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni 4. Bantuan 100 juta/RW/tahun 5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun 6. Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun 7. Bantuan 100 juta untuk LPM Kelurahan/tahun
4	BANDUNG SEJAHTERA	1. Menciptakan 100.000 wirausahawan 2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru 3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun 4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah 5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg 6. Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa

Secara umum dapat dicermati bahwa janji-janji tersebut sangat positif dan bermanfaat bagi kesejahteraan warga kota. Ada keinginan yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan kota, terutama terkait bebas sampah, bebas banjir, bebas macet, serta persoalan infrastruktur. Selain itu, janji-janji tersebut juga secara implisit terkandung maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga kota.

Meskipun memiliki makna positif, namun perlu kiranya disadari bahwa janji-janji tersebut juga memiliki kecenderungan bersifat politis, sehingga dalam implementasinya mungkin sulit untuk diterapkan

manakala disandingkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan teknis praksis. Terhadap kesulitan dan atau kendala dalam implementasinya maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

Secara teknokratis, ikhtiar untuk mengimplementasikan janji-janji Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan dengan mengidentifikasi janji politik berdasarkan jenis komponen belanja, apakah merupakan komponen belanja langsung, ataukah belanja tidak langsung. Selanjutnya apabila berdasarkan jenis komponen belanja, maka perlu diidentifikasi skala cakupannya, apakah merupakan sasaran, program ataukah kegiatan, yang dalam prakteknya tentu akan dilakukan oleh SKPD terkait, yang secara khusus diakomodir dalam Renstra SKPD.

Berdasarkan pendekatan teknokratis, partisipatif, dan politis yang telah dilakukan, pada akhirnya menunjukkan bahwa janji-janji Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagian besar harus dilakukan dalam formulasi komponen belanja langsung. Pilihan kebijakan ini dilakukan karena belanja tidak langsung sesuai ketentuan yang berlaku, tidak dapat diberikan secara terus menerus. Sebagai catatan, dengan telah diakomodirnya janji-janji walikota dan wakil walikota terpilih dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, maka janji-janji dimaksud selanjutnya harus diakomodir dalam kegiatan di SKPD, dan oleh karenanya selain sumber pembiayaannya berasal dari APBD, janji-janji tersebut juga dapat didanai oleh APBD Provinsi, APBN maupun sumber pembiayaan dari masyarakat, baik dalam bentuk dana, material maupun SDM dan teknologi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan bentuk kolaborasi yang menjadi model pendekatan pembangunan dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Berkenaan dengan janji asuransi kesehatan, ambulance gratis, dan puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam, janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih merupakan hal yang sangat positif bagi warga kota dan secara teknis dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Berkenaan dengan janji bebas sampah, bebas banjir, bebas macet dan infrastruktur telah dituangkan dalam **cakupan skala sasaran**. Secara jelas dalam BAB 5 terlihat bahwa janji bebas sampah akan diselesaikan dalam waktu 2 tahun, janji bebas banjir akan dituntaskan dalam waktu 3 tahun, dan janji bebas macet akan dituntaskan dalam waktu 4 tahun. Ikhtiar untuk merealisasikan janji-janji tersebut selanjutnya melekat pada SKPD terkait dan menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

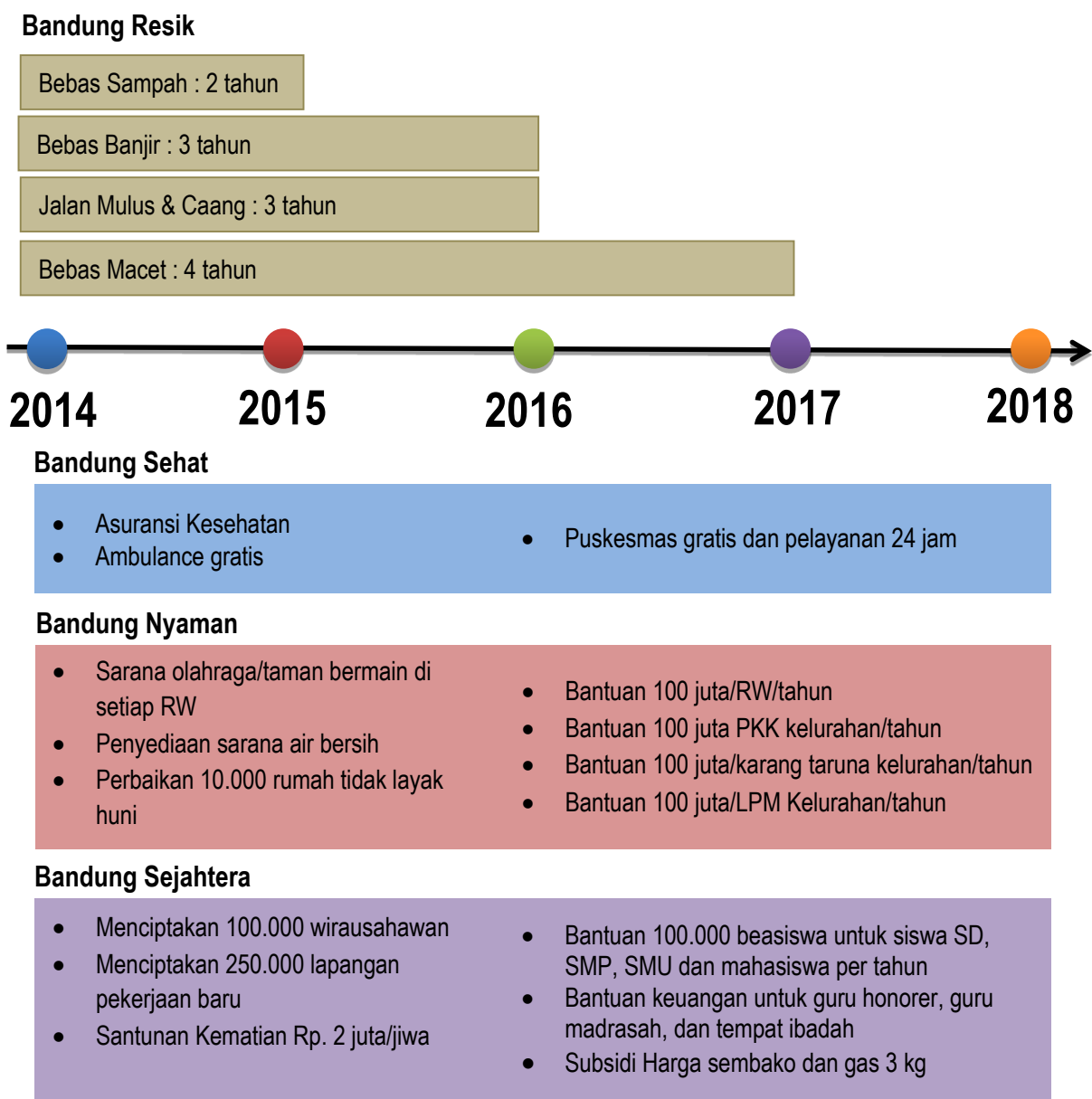
Janji menyediakan sarana olahraga/taman bermain di setiap RW merupakan jawaban terhadap minimnya sarana olahraga/taman bermain, sehingga kegiatan ini sangat positif untuk memberi ruang terbuka bagi warga kota, dan pada akhirnya akan meningkatkan indeks kebahagiaan kota. Pengadaan sarana olahraga/taman bermain di setiap RW berada pada **cakupan skala kegiatan** dan dilakukan secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/SKPD terkait, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, dan atau SKPD terkait.

Janji penyediaan sarana air bersih dan perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni merupakan ikhtiar untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota dalam kurun waktu satu periode RPJMD, dan kegiatan ini berada dalam **cakupan skala sasaran** dengan ranah utama terletak pada SKPD Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, serta didukung oleh SKPD terkait lainnya.

Berkenaan dengan janji pemberian bantuan pertahun kepada LPM, RW, PKK, dan Karang Taruna merupakan substansi yang mengalami penyesuaian. Meskipun janji dimaksud memiliki makna positif dalam pemberdayaan masyarakat, namun bantuan tunai pertahun apabila disandingkan dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dilakukan secara terus menerus atau berulang. Penyesuaian inilah yang kemudian dilakukan yaitu melalui mekanisme belanja langsung yang dialokasikan pada Renstra Kecamatan serta perlu dipahami bahwa komponen belanja tersebut merupakan cakupan dalam skala program atau kegiatan. Selain itu, penyesuaian yang dilakukan juga diformulasi dalam kebijakan

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Sebagai konsekwensi dari formulasi kebijakan ini merupakan wujud pilihan dan penguatan kebijakan desentralisasi yang akan dilakukan dalam periode RPJMD Kota Bandung 2013-2018.

Berkenaan dengan santunan kematian merupakan substansi yang mengalami penyesuaian melalui mekanisme belanja langsung pada Renstra SKPD. Komponen belanja tersebut merupakan cakupan skala kegiatan dengan ranah utama pada SKPD Dinas Pemakaman dan Pertamanan serta didukung oleh SKPD terkait lainnya.



Gambar 5-4
Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Strategi dan Arah Kebijakan

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

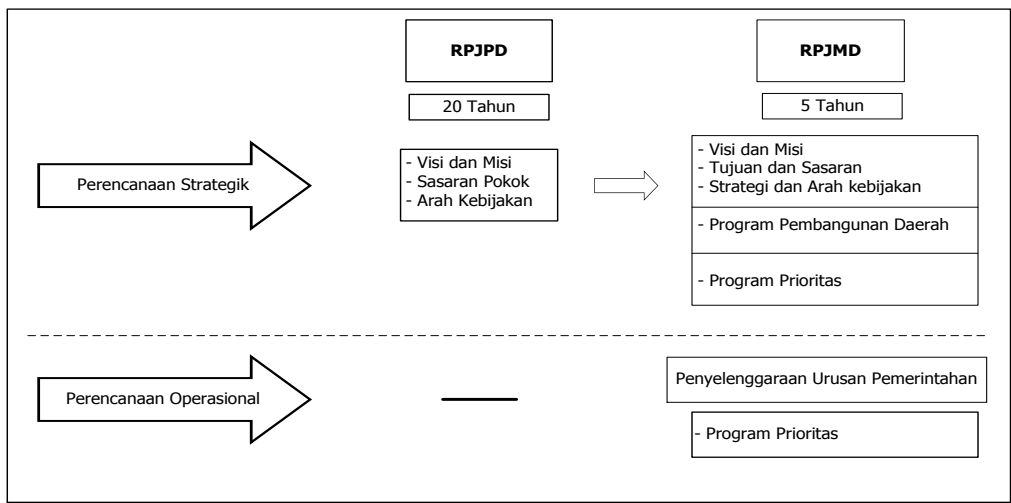
Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut ini:



Gambar 6-1
Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional

Disamping Strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Bandung melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Perencanaan Strategik pada bagian ini dituangkan secara lebih rinci ke dalam Misi 1 sampai dengan Misi 4 berdasarkan pendekatan urusan/bidang sebagai berikut :

MISI 1 : Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

- 1) **Urusan Penataan Ruang: strategi pertama, meningkatkan** proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten, dengan **arah kebijakan**, (1) penyusunan instrumen pengawasan dan pengendalian yang

mengacu kepada rencana tata ruang. (2) Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang sebagai instrument pengendalian. **Strategi kedua**, peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan penataan ruang, dengan **arah kebijakan** penyelenggaraan forum konsultasi publik dalam penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang. **Strategi ketiga** Pembangunan Kota Modern Percontohan di Gedebage dengan Tema Teknologi dengan **arah kebijakan** (1) Pengembangan PPK Gedebage melalui: 1) Pembangunan pusat pemerintahan, 2) pengembangan kawasan bisnis, dan 3) pengembangan pusat ilmu pengetahuan & teknologi terbaru.

- 2) **Urusan Pekerjaan Umum**, dengan **strategi pertama**, Meningkatkan Infrastruktur Jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata, dengan **arah kebijakan**, (1) mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. (2) pembangunan jalan baru dan pembangunan *fly-over* di titik rawan macet, dan (3) mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus dan universal. **Strategi kedua**, membangun sarana dan prasarana perkotaan bagi warga kota yang berkebutuhan khusus, dengan **arah kebijakan**, (1) Pembangunan trotoar, ruang tunggu terminal serta bangunan publik yang dilengkapi dengan fasilitas bagi kaum difabel; (2) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan. **Strategi Ketiga** Membangun titik PJU di jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kota dengan arah kebijakan Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU). **Strategi keempat** Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana sistem drainase dan pengendalian banjir dengan **arah kebijakan** (1) Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas saluran drainase melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran/drainase dan gorong-gorong; (2) Mengembangkan prasarana pengendali banjir dengan mengedepankan konsep *eco-drain*; (3) Mengembangkan dan memelihara bantaran tanggul

sungai; (4) Normalisasi sungai dan menata lingkungan sempadan sungai; (5) Pengembangan sungai yang hijau, bersih, memiliki kapasitas pengaliran yang memadai dan mejadi ruang publik yang nyaman. **Strategi kelima** meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman dengan **arah kebijakan** Penataan kawasan kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau.

3). Urusan Perumahan, dengan Strategi pertama, Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman, dengan **arah kebijakan pertama** Penataan kawasan kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau **arah kebijakan kedua** sinergitas pembiayaan dalam penyediaan rumah tidak layak huni dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. **Strategi kedua** peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan **arah kebijakan**, meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran dan bencana. **Strategi kedua**, penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana **arah kebijakan** Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana.

4). Urusan Lingkungan Hidup, dengan Strategi pertama, mendorong pengelolaan sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengu-rangan sampah dari sumber-nya, dengan **arah kebijakan**, (1) peningkatan daur ulang sampah dan mengkonversi sampah menjadi energi dengan teknologi yang ramah lingkungan; (2) Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; (3) Mengembangkan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam operasionalisasi tempat pembuangan akhir sampah; (4) Menerbitkan peraturan mengenai kawasan bebas sampah dan peraturan lain terkait pengelolaan sampah; (5) Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengurangi produksi sampah (6) Terbangunnya infrastruktur TPA berteknologi tinggi yang ramah lingkungan **Strategi kedua**, peningkatan akses layanan untuk sistem pengelolaan limbah terpusat dengan **arah kebijakan**,

meningkatkan akses layanan air limbah melalui sistem terpusat, komunal maupun individu untuk limbah domestik dan non-domestik. **Strategi ketiga**, mengembangkan dan memelihara sumber air baku untuk penyediaan air bersih dalam rangka meningkatkan cakupan dan kontinuitas pelayanan air bersih dengan **arah kebijakan**, mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum. **Strategi keempat** pengendalian pencemaran lingkungan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan **arah kebijakan** mendorong peningkatan kualitas udara perkotaan melalui penerapan berbagai instrument pengendalian dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau. **Strategi kelima**, Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dengan **arah kebijakan**, perluasan cakupan uji emisi kendaraan bermotor. **Strategi keenam** penataan, pengembangan dan pembangunan Babakan Siliwangi sebagai pusat ekologi kota dengan **arah kebijakan** mendorong terciptanya kawasan Babakan Siliwangi menjadi pusat ekologi kota. **Strategi ketujuh** peningkatan ruang terbuka hijau publik dan privat dengan **arah kebijakan** (1) menambah luasan RTH dan memelihara RTH yang sudah ada; (2) Pembangunan satu taman di setiap RW. **Strategi kedelapan** meningkatkan rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dengan **arah kebijakan** pengembangan prasarana pemakaman umum. **Strategi kesembilan** pembangunan makam tumpang dan makam cadangan dengan **arah kebijakan** pengembangan fasilitas pemakaman umum.

- 5). **Urusan Perhubungan dengan strategi pertama**, tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai dengan **arah kebijakan**, (1) Peningkatkan sarana dan prasarana dasar perhubungan (2) Menyediakan fasilitas terminal yang layak (3) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan (4) Meningkatkan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor (5) Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (Berdasarkan Rel dan Non-Rel) **Strategi kedua**, mengendalikan aspek-aspek kemacetan

dengan **arah kebijakan**, (1) Menyediakan fasilitas kelengkapan jalan (rambu, marka, traffic light, paku jalan, marka parkir, dll).

Tabel 6-1
Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 1

MISI 1: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

No.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
Tujuan 1: Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan				
1	Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten.	Penyusunan Instrumen Pengawasan & Pengendalian yang mengacu kepada rencana tata ruang	Program Perencanaan Tata Ruang
			Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang sebagai instrument pengendalian	Program Pengendalian & Pemanfaatan Ruang
		Peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan penataan ruang	Penyelenggaraan forum konsultasi publik dalam penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang.	Program Perencanaan Tata Ruang
		Pembangunan Kota Modern Percontohan di Gedebage dengan Tema Teknologi.	Pengembangan PPK Gedebage melalui: 1) Pembangunan pusat pemerintahan, 2) pengembangan kawasan bisnis, dan 3) pengembangan pusat ilmu pengetahuan & teknologi terbaru (4) Pembangunan Infrastruktur TPA berteknologi tinggi yang ramah lingkungan	Program Perencanaan Tata Ruang
				Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta Pembangunan Bangunan
				Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tujuan 2: Menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi				
2	Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata	Meningkatkan Infrastruktur Jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata	Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
			Pembangunan jalan baru dan pembangunan fly-over di titik rawan macet	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
			Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus dan universal	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
		Membangun Sarana dan Prasarana perkotaan bagi warga kota yang berkebutuhan khusus	Pembangunan trotoar, ruang tunggu terminal serta bangunan publik yang dilengkapi dengan fasilitas bagi kaum difabel	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
				Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
				Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta Pembangunan Bangunan
				Program Pengembangan lingkungan sehat perumahan

No.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
3	Terwujudnya Bandung caang Baranang	Membangun titik PJU di jalan yang menjadi kewenangan Pemkot	Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Program Penerangan Jalan Umum
4	Terselesaikannya Permasalahan banjir di Kota Bandung	Mengembangkan dan Meningkatkan sarana dan prasarana sistem drainase dan pengendalian banjir	Mengembangkan dan meningkat kan kapasitas& kualitas saluran drainase melalui pembangunan & rehabilitasi saluran/ drainase & gorong-gorong	Program Pembangunan Saluran/Drainase dan Gorong-gorong
			Mengembangkan prasarana pengendali banjir dengan mengedepankan konsep eco-drain	Program Pengendalian Banjir
			Mengembangkan dan memelihara bantaran tanggul sungai	Program Pengendalian Banjir
			Normalisasi sungai dan menata lingkungan sempadan sungai	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
			Pengembangan sungai yang hijau, bersih, memiliki kapasitas pengaliran yang memadai dan menjadi ruang publik yang nyaman	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
5	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan	Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Penataan Kawasan Kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau	Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan
			sinergitas pembiayaan dalam penyediaan rumah tidak layak huni dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
6	Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata	Mendorong pengelolaan sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah dari sumbernya,	peningkatan daur ulang sampah dan mengkonversi sampah menjadi energi dg teknologi yang ramah lingkungan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
			Peningkatan sarana dan pasaran pengelolaan sampah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
			Mengembangkan kerjasama dengan Kab./ Kota lain dalam operasi onalisasi Tempat Pembuangan Akhir sampah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
			Menerbitkan Peraturan mengenai kawasan bebas sampah dan peraturan lain terkait pengelolaan sampah	Program Penataan Produk Hukum
			Peningkatan peranserta masyarakat dalam mengurangi produksi sampah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
			Terbangunnya infrastruktur TPA berteknologi tinggi yang ramah lingkungan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		Peningkatan akses layanan untuk sistem pengolahan limbah terpusat	Meningkatkan akses layanan air limbah melalui sistem terpusat, komunal maupun individu untuk limbah domestik dan non domestik	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
		Mengembangkan dan memelihara Sumber air Baku untuk penyediaan air bersih dalam rangka meningkatkan cakupan dan kontinuitas pelayanan air bersih	Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

No.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Tujuan 3: Mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman, efisien, memadai, handal, dan ramah				
7	Terwujudnya sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan	Tersedia prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	Peningkatkan sarana dan prasarana dasar perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
			Menyediakan fasilitas terminal yang layak	Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
			Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
			Meningkatkan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
			Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (Berdasarkan rel dan non-rel)	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
		Mengendalikan aspek-aspek kemacetan	Menyediakan fasilitas ke lengkapan jalan (Rambu, Marka, Traffic light, paku jalan, marka)	Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas
Tujuan 4 : Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal				
8	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan Tertanggulangi-nya bencana secara dini komprehensif	Pengendalian pencemaran lingkungan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Mendorong peningkatan kualitas udara perkotaan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Program Peningkatan Pengendalian Polusi
		Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Perluasan cakupan uji emisi kendaraan bermotor	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		Penataan, pengembangan & pembangunan Babakan Siliwangi sebagai pusat ekologi kota	Mendorong terciptanya Kawasan Babakan siliwangi menjadi puast ekologi kota	Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
		Peningkatan ruang terbuka hijau publik dan privat	Menambah luasan RTH	Perencanaan Pengadaan Tanah
				Persiapan Pengadaan Tanah
				Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
			Memelihara RTH yang sudah ada	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
			Pembangunan 1 Taman di setiap RW	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
		Meningkatkan Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Pengembangan Prasarana Pema kaman Umum	Pengelolaan Areal Pemakaman
		Pembangunan Makam tumpang dan makam cadangan	Pengembangan fasilitas pemakaman umum	Pengelolaan Areal Pemakaman
		Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran dan bencana	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
		Penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana	Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana	

MISI 2: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani.

- 1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian,** melalui **Strategi Pertama**, SOTK dan Tupoksi yang mencerminkan visi,

misi, target dan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah, dengan **arah kebijakan** Mengkaji, merumuskan ulang dan melaksanakan perubahan SOTK dan Tupoksi Organisasi Pemerintah Daerah. **Strategi kedua** Penyempurnaan kebijakan dan implementasi kebijakan formasi dan sistem ketatalaksanaan di setiap SKPD dengan **arah kebijakan** Memperkuat pengawasan internal dan publik secara berkala atas implementasi kebijakan formasi dan sistem ketatalaksanaan di setiap SKPD. **Strategi Ketiga** Mengkaji, merumuskan, mengembangkan, dan mengimplementasikan merit sistem dalam rekrutmen/mutasi/promosi aparatur serta memperkuat pengawasan pelaksanaannya dengan **arah kebijakan** Pemantapan standar kompetensi, perencanaan pengembangan kompetensi serta merit sistem bagi aparatur. **Strategi Keempat**, Meningkatkan kerjasama pembangunan dengan **arah kebijakan** Peningkatan Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga dan apekti. **Strategi Kelima** Meningkatkan kinerja keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, dalam penyelenggaraan pembangunan dengan **arah kebijakan** Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan. **Strategi keenam** meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan **arah kebijakan** Mewujudkan Tertib pengelolaan asset. **Strategi ketujuh** Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan asset dengan **arah kebijakan** (1) mewujudkan opini BPK: WTP; (2) Peningkatan pengelolaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. **Strategi kedelapan** Menerapkan sistem pengawasan internal dengan **arah kebijakan** penerapan SPIP di SKPD. **Strategi Kesembilan** Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan **arah kebijakan** Meningkatkan standar kualitas pelayanan SKPD. **Strategi Kesepuluh** Desentralisasi urusan pemerintah daerah, dengan **arah kebijakan** Pelaksanaan pelimpahan Kewenangan SKPD ke Kecamatan/Kelurahan disertai dengan pendistribusian Personil, Peralatan, Penganggaran, dan Dokumen (P3D). **Strategi kesebelas** Meningkatnya kinerja pelayanan tugas dan fungsi DPRD Kota Bandung dengan **arah kebijakan** Terwujudnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara eksekutif dan legislatif. **Strategi Keduabelas** Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, dengan **arah kebijakan** (a) Menyediakan produk

hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan; (b) Penegakan Perda.

2. **Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri** melalui **Strategi pertama** Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara, dengan **arah kebijakan** Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara. **Strategi kedua** Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik, dengan **arah kebijakan** Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu.
3. **Urusan Komunikasi dan Informatika** melalui **strategi pertama** Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam diseminasi program pembangunan, dengan **arah kebijakan** Pelayanan jaringan dan peningkatan penggunaan teknologi informasi di area publik menuju *cyber city* dan tersedianya pasif infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika. **Strategi kedua** Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik dengan **arah kebijakan** Membuka layanan partisipasi, aspirasi dan pengaduan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
4. **Urusan Perencanaan Pembangunan** melalui **strategi pertama**, mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel dengan **arah kebijakan** (a) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsif. **Strategi kedua**, Mewujudkan integrasi/konektivitas data melalui pengelolaan satu data pembangunan, dengan **arah kebijakan** mewujudkan pengelolaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data SKPD untuk mendukung proses perencanaan pembangunan Kota Bandung.
5. **Urusan Kearsipan** melalui **Strategi** meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan **arah kebijakan** Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6. Urusan Kependudukan melalui **Strategi** meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan **arah kebijakan** Melaksanakan administrasi kependudukan yang berkualitas.

Tabel 6-2
Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 2

MISI 2: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani.

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
Tujuan 1: Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan				
1	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsif.	Program Perencanaan Pembangunan
Tujuan 2 : Terlaksananya Reformasi birokrasi				
2	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	Mewujudkan Opini BPK: WTP	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
			Peningkatan pengelolaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
		Menerapkan Sistem pengawasan Internal	Penerapan SPIP di SKPD	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
3	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan standar kualitas pelayanan SKPD	Program pengendalian kebijakan Kepala Daerah
		Desentralisasi urusan pemerintah daerah	Pelaksanaan pelimpahan Kewenangan SKPD ke Kecamatan/Kelurahan disertai dengan pendistribusian Personil, Peralatan, Penganggaran, dan dokumen (P3D)	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
		meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan	pelaksanaan <i>standard operating procedure</i> (SOP) pelayanan perijinan dan non-perijinan	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
		Meningkatnya kinerja pelayanan tugas dan fungsi DPRD Kota Bandung	Terwujudnya sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara eksekutif dan legislatif	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah
4	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kineja birokrasi	Mengkaji, merumuskan, mengembangkan dan mengimplementasikan merit sistem dalam rekrutmen/ mutasi/promosi aparatur serta memperkuat pengawasan pelaksanaannya	Pemantapan standar kompetensi, perencanaan pengembangan kompetensi serta merit sistem bagi aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
				Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center
		SOTK dan Tupoksi yang mencerminkan visi, misi, target dan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah	Mengkaji, merumuskan ulang dan melaksanakan perubahan SOTK dan Tupoksi Organisasi Pemerintah Daerah	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
		Penyempurnaan kebijakan dan implementasi kebijakan formasi dan sistem ketatalaksanaan di setiap OPD	Memperkuat pengawasan internal secara berkala atas implementasi kebijakan formasi & sistem ketatalaksanaan di setiap OPD	Program Penataan Peraturan perundang-undangan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
		Meningkatkan kinerja keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, dalam penyelenggaraan pembangunan	Peningkatan akuntabilitas pennyelenggaraan Pemerintahan	Evaluasi/Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Meningkatnya Kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Mewujudkan tertib pengelolaan asset	Evaluasi/Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
				Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
			Mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
				Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah
			Melaksanakan administrasi kependudukan yang berkualitas	Program Penataan Administrasi kependudukan
5	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam diseminasi program pembangunan dan penyediaan database profil wilayah	Pelayanan jaringan dan peningkatan penggunaan teknologi informasi di area publik menuju <i>cyber city</i> dan tersedianya pasif infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
			Pengembangan Kerjasama Daerah dengan Swasta dalam Pembangunan Basis Data Kewilayahan	Program Perencanaan Kerjasama Daerah
		Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik	Membuka layanan partisipasi, aspirasi dan pengaduan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
		Mewujudkan integrasi/konektivitas data melalui pengelolaan satu data pembangunan	Mewujudkan pengelolaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data SKPD untuk mendukung proses perencanaan pembangunan Kota Bandung	Program Pengembangan Data/Informasi
Tujuan 3: Meningkatkan Kesadaran masyarakat dan aparat terhadap hukum dan HAM				
6	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan Negara	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
7	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu	Program Pendidikan Politik Masyarakat
8	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum	Menata Produk Hukum daerah dan Meningkatkan budaya taat hukum	Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan	Program Pembangunan Produk Hukum Daerah
			Penegakan Perda	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

MISI 3: Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing

- (1) **Urusan Pendidikan** melalui **strategi pertama**, Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan dengan **arah kebijakan:** (a) Pengembangan Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan MA dalam rangka Penguatan Wajar Dikdas sembilan Tahun dan rintisan wajar Dikmen 12 Tahun tahun 2018; (b) pendidikan terjangkau bagi anak-anak dari golongan tidak mampu serta Bantuan Siswa Miskin (Siswa Miskin untuk Tingkat SMA/SMK/MA dan Warga Belajar); (c) Perluasan sekolah inklusif; (d) Penuntasan buta aksara; (e) Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini; (f) Pengembangan standar pelayanan pendidikan mengacu pada standar pendidikan nasional. **Strategi kedua**, Mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan dengan **arah kebijakan:** (a) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; (b) Pengembangan dan pengawasan kapasitas guru; (c) Pengembangan kurikulum serta kualitas materi dan metode pembelajaran; (d) Melaksanakan kemitraan Global; (e) Peningkatan kualitas pendidikan nonformal dan informal. **Strategi ketiga**, Pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja, dengan **arah kebijakan:** (a) Mewujudkan pendidikan kejuruan yang luwes dan fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja yang berubah; (b) Membangun sistem terpadu pendidikan kejuruan (STPK) yang mencakup semua program kejuruan yang diminati oleh pasar dan telah berkembang pada SMK, dan program program PNF kejuruan (lembaga kursus, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan kewirausahaan. **Strategi keempat**, Tata kelola pendidikan yang baik dan akuntabel, dengan **arah kebijakan:** (a) Mekanisme akuntabilitas publik dengan penajaman pada peran stakeholders dalam fungsi pengawasan; (b) sistem informasi berbasis ICT untuk menginformasikan kinerja satuan pendidikan serta partisipasi masyarakat dalam bentuk pengaduan, usulan dan informasi lainnya yang dapat diakses setiap waktu oleh publik dan semua stakeholders; (c) Peningkatan status dan kesejahteraan guru honorer dan guru yayasan.

- (2) **Urusan Perpustakaan melalui Strategi** meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan, dengan **arah kebijakan:** mewujudkan minat baca masyarakat.
- (3) **Urusan Kesehatan melalui Strategi pertama,** Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dengan **arah kebijakan** (a) meningkatkan pelayanan Puskesmas dengan fasilitas ambulance 24 jam; (b) Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. **Strategi kedua,** Peningkatan pelayanan kepada masyarakat miskin yang dirujuk, dengan **arah kebijakan** meningkatkan penataan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin. **Strategi ketiga,** Peningkatan standar pelayanan rumah sakit, dengan **arah kebijakan:** (a) meningkatkan sarana dan prasarana serta manajemen rumah sakit; (b) Pembangunan 2 (dua) Rumah Sakit berstandar Internasional. **Strategi keempat,** Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan melalui kampanye hidup sehat, dengan **arah kebijakan:** (a) Meningkatkan RW siaga dan aktif ; (b) Meningkatkan promosi kesehatan rumah sakit; (c) Meningkatkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- (4) **Urusan Pertanian melalui Strategi** meningkatkan pemeriksaan hewan dan ternak terutama penyakit zoonosa (penyakit yang menular dan membahayakan manusia) dengan **arah kebijakan** meningkatkan pengawasan penyakit zoonosa.
- (5) **Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui strategi pertama,** Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB, dengan **arah kebijakan** meningkatkan Kelestarian dan kemandirian peserta KB. **Strategi kedua,** Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dengan **arah kebijakan** Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Pusat Informasi Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR). **Strategi ketiga,** Peningkatan Ketahanan dan

pemberdayaan keluarga, dengan **arah kebijakan** Pembentukan, Pembinaan, dan Pengembangan Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS.

- (6) **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** melalui **strategi pertama**, Fasilitasi akses di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, hukum, politik dan teknologi bagi perempuan di daerah, dengan **arah kebijakan** Pembinaan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera. **Strategi kedua**, Penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dengan **arah kebijakan** Pemberian layanan (konseling, mediasi dan pendampingan) kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan. **Strategi ketiga**, Mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, dengan **arah kebijakan** Pengembangan *Focal Point Gender* di SKPD. **Strategi keempat**, Mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA), dengan **arah kebijakan** Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak.
- (7) **Urusan Sosial** melalui **strategi pertama**, mengurangi permasalahan sosial dan melalui pemberian pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara baik dan dan wajar dalam kehidupan bermasyarakat, dengan **arah kebijakan**: (a) meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; (b) Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial. **Strategi kedua** meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS, dengan **arah kebijakan** pendayagunaan dan pemberdayaan PSKS dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial.
- (8) **Urusan Pemberdayaan**, melalui **strategi pertama** Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi masyarakat dan

Peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, dengan **arah kebijakan:** (a) Desentralisasi urusan pemerintah daerah dan kolaborasi dengan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan; (b) Penguatan kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. (c) Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

Strategi kedua Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bandung, dengan **arah kebijakan:** (a) Terpantaunya jumlah masyarakat miskin secara akurat, komprehensif dan integral, (b) Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi terhadap upaya Penanggulangan Kemiskinan, (c) Pelayanan Pemulasaraan dan Pemakaman bagi Warga Miskin dan (d) Pemberian Bantuan/ Subsidi Bahan Pokok bagi masyarakat Miskin.

(9) **Urusan Perdagangan melalui Strategi**, Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bandung, dengan **arah kebijakan** Terlaksananya subsidi gas bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

(10) **Urusan Kebudayaan**, melalui **strategi pertama**, peningkatan apresiasi masyarakat serta pemerintah terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah, dengan **arah kebijakan** perlindungan budaya lokal. **Strategi kedua**, peningkatan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permuseuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya daerah, dengan **arah kebijakan** terwujudnya Kota Bandung sebagai pusat budaya. **Strategi ketiga**, peningkatan perlindungan dan pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Kota Bandung, dengan **arah kebijakan** mengembangkan Pusat Gelar Karya Seni dan Budaya Berkelas Dunia untuk Berbagai Pentas Karya Seni.

(11) **Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**, melalui **strategi pertama** meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan, dengan **arah kebijakan:** (a) peningkatan pembinaan olahragawan; (b) Pembangunan GOR Bulu Tangkis (GOR Bandung), Kolam Renang Caringin, GOR Pajajaran; (c)

Revitalisasi Sarana Olahraga Bola Volley, Tennis Meja, Futsal, dll; (d) Pemeliharaan SUS Gelora BLA yang profesional. **Strategi kedua** meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri, dengan **arah kebijakan** (a) Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan; (b) peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif; (c) Pembangunan Gedung Kepemudaan.

(12) **Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**, melalui **Strategi Pertama**, pembinaan keagamaan dengan **arah kebijakan** Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat. **Strategi Kedua**, Pengembangan pendidikan agama di sekolah dengan **arah kebijakan** Pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolah-sekolah.

Tabel 6-3
Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 3

MISI 3 : Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
Tujuan 1: Mewujudkan Pendidikan yang merata, unggul, terjangkau dan terbuka.				
1	Mewujudkan sistem pendidikan nasional di Kota Bandung yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global	Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan	Pengembangan Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan MA dalam rangka Penguatan Wajar Dikdas sembilan Tahun dan rintisan wajar Dikmen 12 Tahun pada tahun 2018	Pengembangan Sekolah Gratis
			pendidikan terjangkau bagi anak-anak dari golongan tidak mampu serta Bantu an Siswa Miskin (Siswa Miskin untuk Tingkat SMA/SMK/MA dan Warga Belajar)	Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun
				Pendidikan Menengah
				Program Pendidikan Menengah
				Program Pendidikan Non-formal
				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
				Program Pendidikan Non-formal
				Pendidikan Anak Usia Dini
		Mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan	pengembangan standar pelayanan pendidikan mengacu pada standar pendidikan nasional	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
				Program Pendidikan Anak Usia Dini
				Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
				Program Pendidikan Menengah
			pengembangan dan pengawasan kapasitas guru	Program Pendidikan Non-formal
				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
				Program Pendidikan Anak Usia Dini

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
			pengembangan kurikulum, kualitas materi dan metode pembelajaran	Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
				Program Pendidikan Menengah
				Program Pendidikan Non-formal
			Melaksanakan Kemitraan Global	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
			peningkatan kualitas pendidi kan non-formal dan informal	Program Pendidikan Non-formal
		Pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja	Mewujudkan pendidikan ke juruan yang luwes dan fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja yang berubah;	Program Pendidikan Menengah
			Membangun sistem terpadu pendidikan kejuruan (STPK) yang mencakup semua program kejuruan yang diminati oleh pasar dan telah berkembang pada SMK, dan program-program PNF kejuruan (lembaga kursus, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan kewirausahaan)	Program Pendidikan Menengah
		Tata kelola pendidikan yang baik dan akuntabel	Mekanisme akuntabilitas publik dengan penajaman pada peran stakeholders dalam fungsi pengawasan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
			sistem informasi berbasis ICT untuk menginformasikan kinerja satuan pendidikan serta partisipasi masyarakat dalam bentuk pengaduan, usulan dan informasi lainnya yang dapat diakses setiap waktu oleh publik dan semua stakeholders	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
			Peningkatan status dan kesejahteraan guru honorer dan guru yayasan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
		meningkatkan sarana dan prasarana perpusta kaan Daerah	Mewujudkan minat baca masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca
				Program Peningkatan Administrasi Perpustakaan
		Tujuan 2: Peningkatan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan		
2	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan pelayanan Puskesmas dengan fasilitas ambulance 24 jam	Pelayanan Kesehatan Dasar, dan pencegahan penyakit
			Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Program penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB
		Peningkatan pelayanan kepada masyarakat miskin yang dirujuk	Meningkatkan penataan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan
				Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
		Peningkatan standar pelayanan rumah sakit	Meningkatkan sarana dan prasarana serta manajemen rumah sakit	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
				Program Pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata
				Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
				Program standarisasi pelayanan kesehatan
				Program obat dan perbekalan kesehatan
				Program pemeliharaan sarana prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata
			Pembangunan Rumah Sakit standar Internasional	Program Pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata
3	Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan	Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan melalui kampanye hidup sehat	Meningkatkan RW siaga aktif	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
			Meningkatkan promosi kesehatan rumah sakit	
			Meningkatkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
4	Terkendalnya kasus penyakit zoonosa	Meningkatkan pemeriksaan hewan & ternak terutama penyakit zoonosa (penyakit yang menular dan membahayakan manusia)	Meningkatkan pengawasan penyakit zoonosa	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Tujuan 3: Peningkatan kualitas Hidup Masyarakat				
5	Terkendalnya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB	Meningkatkan Kelestarian dan kemandirian peserta KB	Program Keluarga Berencana
		Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan	Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Pusat Informasi Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)	Program pembinaan peran serta masyarakat pelayanan KB/KR mandiri
		Peningkatan Ketahanan dan pemberdayaan keluarga	Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
6	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	Fasilitasi akses dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, hukum, politik dan teknologi bagi Perempuan	Pembinaan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
		Penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Pemberian layanan (konseling, mediasi dan pendampingan) kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
		Mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Pengembangan <i>Focal Point Gender</i> di SKPD	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
		Mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA)	Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
7	Meningkatnya penanggulangan PMKS	Mengurangi permasalahan sosial dan melalui pemberian pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara baik dan wajar dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
				Program pembinaan anak terlantar
				Program pemberdayaan fakir miskin
		meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan	pendayagunaan dan pemberdayaan PSKS dalam penanganan PMKS dan	Program Pembinaan Eks-Penyandang Penyakit Sosial (Eks-Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)
				Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	
		sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS	pembangunan kesejahteraan sosial		
8	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan	Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi masyarakat dan Peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat	Desentralisasi urusan Pemerintah Daerah dan kolaborasi dengan kelembagaan kemasyarakatan kel.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	
			Penguatan Kelembagaan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	
			Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam pembangunan	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	
		Mnurunkan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bandung	Terpantaunya jumlah masyarakat miskin secara akurat, komprehensif dan integral	Program Penanggulangan Kemiskinan	
			Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi terhadap Penanggulangan Kemiskinan		
			Pelayanan Pemulasaraan dan Pemakaman bagi Warga Miskin		
			Pemberian Bantuan/Subsidi bahan pokok bagi masyarakat miskin		
			Terlaksananya subsidi gas bagi masyrakat berpenghasilan rendah	Program Perlindungan Konsumen & pengamanan perdagangan	
Tujuan 4: Meningkatkan pelestarian seni budaya peran pemuda prestasi olah raga					
9	Meningkatnya pelestarian seni budaya serta Prestasi Kepemudaan dan Olah raga	peningkatan apresiasi masyarakat serta pemerintah terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah	perlindungan budaya lokal	Pengembangan nilai budaya	
		peningkatan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permuseuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya daerah	terwujudnya Kota Bandung sebagai pusat budaya	Pengelolaan kekayaan budaya	
		peningkatan perlindungan dan pengelolaan keragaman & kekayaan budaya Kota Bandung	mengembangkan Pusat Gelar Karya Seni dan Budaya Berkelas Dunia untuk Berbagai Pentas Karya Seni	Pengelolaan keragaman budaya	
		meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan	peningkatan pembinaan olahragawan	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	
			Pembangunan GOR Bulu Tangkis (GOR Bandung), Kolam Renang Caringin, GOR Pajajaran	Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	
					Revitalisasi Sarana Olahraga Bola Volley, Tenis Meja, Futsal, dll.
					Pemeliharaan SUS Gelora BLA yang profesional
		meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri	1) Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan;	Peningkatan peran serta kepemudaan	
			peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif;		
			Pembangunan gedung kepemudaan		
Tujuan 5: Mewujudkan Toleransi dan Pembinaan Umat Beragama					
10	Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antarumat beragama	Pembinaan keagamaan	Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat	Program sosial keagamaan	
				Program pengembangan wawasan kebangsaan	
				Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	
				Pendidikan Anak Usia Dini	
		Pengembangan pendidikan agama di sekolah	Pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolah-sekolah	Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun	
				Pendidikan Menengah	

MISI 4: Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

1. **Urusan Ketenagakerjaan** melalui **strategi pertama** menciptakan wirausaha baru dengan **arah kebijakan:** pelatihan bagi calon wirausaha baru. **strategi kedua**, pemberian kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja produktivitas tenaga kerja, dengan **arah kebijakan**, peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja. **Strategi Ketiga**, mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja dengan **arah kebijakan**, peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. **Strategi Keempat** mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan **arah kebijakan** peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
2. **Urusan Penanaman Modal** melalui **strategi pertama**, meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder penanaman modal, dengan **arah kebijakan**, (1) fasilitasi dan mediasi antara pelaku usaha Kota Bandung dengan investor; (2) Pembentukan & penguatan *Task Force* atau representasi *Promotion Business Centre* (PBC) dlm menangani pangsa & peluang investasi di Kota Bandung. **Strategi kedua** optimalisasi kinerja pelayanan perijinan investasi dengan **arah kebijakan** penyederhanaan prosedur perijinan serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayanan perijinan.
3. **Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah** melalui **strategi pertama** mengembangkan produk-produk unggulan kota dengan **arah kebijakan** (1) menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan UMKM; (2) meningkatkan kontribusi swasta dalam pengembangan sektor usaha kecil dan menengah. **Strategi kedua** menciptakan wirausaha baru dengan **arah kebijakan** memfasilitasi wirausaha pemula. **Strategi ketiga** memberikan dukungan pembiayaan usaha dan formalisasi usaha bagi pelaku ekonomi dengan **arah kebijakan** fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, dan standarisasi internasional dalam produksi. **Strategi keempat** meningkatnya kontribusi dan

berkembangnya koperasi dan UMKM dengan **arah kebijakan** (1) peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM. **Strategi kelima** mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan **arah kebijakan** (1) penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan mengembangkan koperasi; (2) penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan pada sektor industri kecil dan menengah. **Strategi keenam**, mendorong investasi yang bersifat padat karya dengan **arah kebijakan** peningkatan akses teknologi SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi koperasi dan UMKM. **Strategi ketujuh**, fasilitasi dan intermediasi pengembangan KUMKM dengan **arah kebijakan** meningkatkan peran KUMKM dalam perekonomian. **Strategi kedelapan** penguatan KUMKM melalui peningkatan kompetensi dan kualitas SDM, jaringan usaha, perluasan aspek permodalan dan daya saing produk KUMKM dengan **arah kebijakan** fasilitasi dan intermediasi pengembangan KUMKM.

4. **Urusan Perindustrian** melalui **strategi kesatu**, mengembangkan produk-produk unggulan kota dengan **arah kebijakan** pembinaan dan fasilitasi sentra industri potensial melalui pengenalan produk dan promosi offline dan online. **Strategi kedua** peningkatan peran industri kecil menengah, sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan dengan **arah kebijakan** meningkatkan jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif dan pelaku usaha kreatif. **Strategi ketiga** memberikan dukungan pembiayaan usaha dan formalisasi usaha bagi pelaku ekonomi dengan **arah kebijakan** fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, dan standarisasi internasional dalam produksi.
5. **Urusan Pariwisata** melalui **strategi pertama**, optimalisasi daya dukung potensi pariwisata yang berdaya saing serta pengembangan promosi pariwisata yang efektif, kreatif, terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan **arah kebijakan** optimalisasi pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak maupun elektronik,

website, peningkatan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, pameran dan peningkatan kemitraan promosi wisata. **Strategi kedua**, penguatan dan pengembangan destinasi pariwisata dengan **arah kebijakan** pengembangan destinasi pariwisata. **strategi ketiga**, mengembangkan Kota Bandung sebagai Kota MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) dengan **arah kebijakan**, mengembangkan sarana prasarana utama dan pendukung bagi pengembangan MICE yang dapat secara signifikan menjadi faktor penarik wisatawan serta *trigger* bangkitan ekonomi lainnya.

6. **Urusan Perdagangan**, melalui **strategi pertama**, menjaga stabilitas ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok dengan **arah kebijakan** menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang. **Strategi kedua** mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor jasa serta perdagangan dalam dan luar negeri dengan **arah kebijakan** meningkatkan pendapatan sektor perdagangan. **Strategi ketiga**, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penataan peranan kelembagaan perdagangan, dengan **arah kebijakan** peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas dan citra produk ekspor.
7. **Urusan Ketahanan Pangan**, melalui **strategi**, memfasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat, dengan **arah kebijakan**, meningkatkan pola konsumsi pangan, beragam, bergizi, berimbang dan aman.
8. **Urusan Pertanian**, melalui **strategi pertama**, menciptakan wirausaha baru dengan **arah kebijakan** menciptakan wirausaha pertanian. **Strategi kedua**, meningkatkan usaha pertanian melalui pemilihan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, produktivitas tinggi, dan mempunyai peluang pasar dengan **arah kebijakan** mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing.

9. **Urusan Perikanan**, melalui **strategi**, mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing dengan **arah kebijakan** peningkatan produksi ikan hias.
10. **Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**, melalui **strategi pertama**, membangun sistem pengawasan pajak sebagai sistem pengendalian internal yang handal, **arah kebijakan**, meningkatkan kompetensi dan integritas petugas pelayanan pajak dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petugas pajak yang ramah, bersih dan berwibawa. **Strategi kedua**, membangun sistem pelayanan publik dalam manajemen pajak daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel, **arah kebijakan**, tersedianya sistem informasi pelayanan perpajakan yang terintegrasi dan mengembangkan sistem informasi manajemen pajak daerah online. **Strategi ketiga**, membangun kemudahan layanan sarana dan prasarana sebagai partisipasi layanan publik terhadap kebijakan pengawasan pajak daerah, dengan **arah kebijakan**, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang operasional pengelolaan pajak daerah. **Strategi keempat**, intensifikasi penerimaan retribusi daerah dengan **arah kebijakan** pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah. **Strategi kelima**, optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan **arah kebijakan** pembinaan BUMD. **Strategi keenam**, memberikan potongan/keringanan pajak daerah atau retribusi daerah dan kemudahan promosi di fasilitas publik yang disediakan dengan **arah kebijakan** memberikan insentif fiskal bagi swasta dan masyarakat yang memberikan layanan penyediaan fasilitas publik. **Strategi ketujuh**, mewujudkan prasyarat penerbitan obligasi daerah dengan **arah kebijakan** proyek yang pendanaannya melibatkan APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Bandung. **Strategi kedelapan**, membentuk perusahaan patungan untuk beberapa layanan jasa umum dan barang publik dengan **arah kebijakan** pengembangan usaha daerah yang sehat dan *profitable*.

11. **Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dan Perencanaan Pembangunan** melalui **strategi**, tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan: infrastruktur, aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif dengan **arah kebijakan** (1) fasilitasi kegiatan komunitas kreatif terkait aktivasi sub sector ekonomi kreatif; (2) mengembangkan sistem inovasi daerah (SIDa) melalui penguatan *Quadro Helix* untuk mendukung pencapaian Bandung Kota kreatif.
12. **Urusan Pendidikan dan kepemudaan dan Olah Raga** melalui **strategi pertama**, menciptakan wirausaha baru dengan **arah kebijakan** menumbuhkan calon wirausaha baru. **Strategi kedua**, tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan: infrastruktur, aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif dengan **arah kebijakan** menciptakan sistem pendukung kreatif melalui pendidikan dan pemberdayaan komunitas kreatif.
13. **Urusan Pekerjaan Umum** melalui **strategi** meningkatkan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan **arah kebijakan** pembiayaan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bandung dalam mendanai proyek infrastruktur berskala nasional.
14. **Urusan Penataan Ruang** melalui **strategi** tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan: infrastruktur, aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif dengan **arah kebijakan** menciptakan infrastruktur yang memadai baik fisik maupun sosial bagi pengembangan ekonomi kreatif.

Tabel 6-4
Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 4

MISI 4: Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
Tujuan 1: Membangun perekonomian kota yang kokoh				
1	Terjaganya ketersediaan pangan dan stabilitas harga	Memfasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat	Meningkatkan pola konsumsi pangan, beragam, bergizi, berimbang dan aman	Program Ketahanan Pangan
		Meningkatkan usaha pertanian melalui pemilihan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, produktivitas tinggi, dan mempunyai peluang pasar	Mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/Perkebunan)
		Mengembangkan sistem agribisnis yg berdaya saing	Peningkatan produksi Ikan Hias	Pengembangan Budidaya Perikanan
		Menjaga stabilitas ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok	Menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
			Monitoring dan Evaluasi ketersediaan komoditas barang yang beredar	Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi
			Menyediakan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2	Terjaganya pertumbuhan ekonomi	Mengembangkan produk-produk unggulan kota	Pembinaan dan fasilitasi sentra industri potensial melalui pengenalan produk & promosi offline & online	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
			Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan UMKM	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
			Meningkatkan kontribusi Swasta dalam pengembangan sektor usaha kecil dan menengah	Program Koordinasi, Perumusan dan Implementasi kebijakan ekonomi
		Mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor jasa serta perdagangan dalam dan luar negeri	Meningkatkan pendapatan sektor perdagangan	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
3	Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penataan peranan kelembagaan perdagangan.	Peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas dan citra produk ekspor	Program peningkatan dan pengembangan ekspor
4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Membangun Sistem Pengawasan Pajak Sebagai Sistem Pengendalian Internal Yang Handal	Meningkatkan kompetensi dan integritas petugas pelayanan pajak dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petugas pajak yang ramah, bersih dan berwibawa	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Membangun Sistem Pelayanan Publik Dalam Manajemen Pajak Daerah Yang Transparan, Partisipatif dan Akuntabel	tersedianya sistem informasi pelayanan perpajakan yang terintegrasi dan mengembangkan sistem informasi manajemen pajak daerah online	Program Pengawasan, Pemeriksaan berbasis IT
		Membangun Kemudahan Layanan Sarana dan Prasarana Sebagai Partisipasi Layanan Publik Terhadap Kebijakan Pengawasan Pajak Daerah	tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang operasional pengelolaan pajak daerah	Program pembangunan sarana dan prasarana perpajakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
		Intensifikasi Penerimaan retribusi Daerah	Pemanfaatan Teknologi Informasi dlm pencatatan dan pengelolaan Retribusi Daerah	Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi
		Optimisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Pembinaan BUMD	
5	Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik	Memberikan potongan/ keringanan pajak daerah atau retribusi daerah dan kemudahan promosi di fasilitas publik yang disediakan	Memberikan insentif fiskal bagi swasta dan masyarakat yang memberikan layanan penyediaan fasilitas publik.	Program Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah
6	Meningkatkan sinergitas pembiayaan pusat, provinsi, daerah	Meningkatkan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan pemerintah pusat dan PemProv. Jawa Barat	Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan PemProv. Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung dalam mendanai proyek infrastruktur berskala nasional	Program Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah
7	Penggunaan instrumen pembiayaan non-konvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta)	Mengembangkan Sistem dan prosedur kemitraan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur	Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pendanaan pembangunan	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Tujuan 2: Membangun perekonomian kota yang maju				
8	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan investasi	Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder penanaman modal	Fasilitasi dan mediasi antara pelaku usaha Kota Bandung dengan Investor	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
			Pembentukan & Penguatan <i>Task Force</i> atau Representasi Promotion Business Centre dlm menangani pangsa & peluang investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
		Optimalisasi kinerja pelayanan perijinan investasi	Penyederhanaan prosedur perijinan serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayanan perijinan.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
9	Meningkatnya kontribusi perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik thd PAD	Membentuk perusahaan patungan untuk beberapa layanan jasa umum dan barang publik	Pengembangan Usaha Daerah yang sehat dan Profitable	Program Pengembangan Usaha Daerah
				Program Penelitian dan Pengembangan
10	Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif	Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif	Menciptakan infrastruktur yang memadai baik fisik maupun sosial bagi pengembangan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Infrastruktur Kota Kreatif
			Fasilitasi kegiatan Komunitas kreatif terkait aktivasi subsektor ekonomi kreatif	Program pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis
			Mengembangkan Sistem Inovasi daerah (SIDa) melalui penguatan <i>Quadro Helix</i> untuk mendukung pencapaian Bandung Kota kreatif	Program Penelitian dan Pengembangan
			Menciptakan sistem pendukung kreatif melalui pendidikan&pemberdayaan komunitas kreatif	Program Peningkatan Peran serta kepemudaan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
		Peningkatan peran industri kecil menengah, sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif dan pelaku usaha kreatif	Program pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis
11	Berkembangnya koperasi dan UMKM	Memberikan dukungan pembiayaan usaha dan formalisasi usaha bagi pelaku ekonomi	Fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, dan standarisasi internasional dalam produksi	Program pengembangan Industri Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM
		Meningkatnya kontribusi dan berkembangnya Koperasi dan UMKM	peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
12	Optimalisasi Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing	Optimalisasi daya dukung potensi pariwisata yang berdaya saing serta pengembangan promosi pariwisata yang efektif, kreatif, terarah, terpadu dan berkelanjutan	Optimalisasi pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak maupun elektronik, website, peningkatan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, pameran dan peningkatan kemitraan promosi wisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
		Penguatan dan pengembangan destinasi Pariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
		Mengembangkan Kota Bandung sebagai Kota MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions)	Mengembangkan sarana prasarana utama dan pendukung bagi pengembangan MICE yg dapat secara signifikan menjadi factor penarik wisatawan serta <i>trigger</i> bangkitan ekonomi lainnya.	
			Mengembangkan kampung wisata kreatif	
Tujuan 3: Membangun perekonomian kota yang berkeadilan				
13	Meningkatkan kesempatan kerja	Pemberian kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja produktivitas tenaga kerja	peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
		Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja	Peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan
		Mengupayakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan Baru	Peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja	Program Peningkatan kesempatan kerja
			Penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan mengembangkan koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
		Penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan pada sektor industri kecil dan menengah		Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
		Menciptakan wirausaha baru	Memfasilitasi wirausaha pemula	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
				Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
			Menciptakan Wirausaha Pertanian	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
			Menumbuhkan calon wirausaha baru	Program Pendidikan Menengah
				Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
			Pelatihan bagi calon wirausaha baru	Program Peningkatan penempatan kerja
				Program Peningkatan kualits dan Produktivitas Tenaga Kerja
14	Mendorong upaya peningkatan daya beli masyarakat	Mendorong investasi yang bersifat padat karya	peningkatan akses teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM
		Fasilitasi dan intermediasi pengembangan KUMKM	Meningkatkan peran KUMKM dalam perekonomian	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM
		Penguatan KUMKM melalui peningkatan kompetensi dan kualitas SDM, jaringan usaha, perluasan aspek permodalan dan daya saing produk KUMKM.	Fasilitasi dan intermediasi pengembangan KUMKM	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam bab tujuh bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif dalam mencapai sasaran.

Sedangkan dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Bandung menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut.

- 1. Misi Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.**

Program untuk mendukung misi ini adalah:

- 1) Urusan Penataan Ruang**

- a. Program Perencanaan Tata Ruang;
- b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

2) Urusan Pekerjaan Umum

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- c. Program Pembangunan Saluran/Drainase dan Gorong-gorong;
- d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- e. Program Pengendalian Banjir;
- f. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya;
- g. Program Penerangan Jalan Umum
- h. Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta Pembangunan Bangunan;
- i. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.

3) Urusan Perumahan

- a. Program Pengembangan lingkungan sehat perumahan;
- b. Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan;
- c. Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;
- d. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.

4) Urusan Perhubungan

- a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- b. Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
- c. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ;
- d. Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor;
- e. Program Peningkatan pelayanan angkutan;
- f. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas.

5) Urusan Lingkungan Hidup

- a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam;
- b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
- d. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
- e. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- f. Program Perencanaan Pengadaan Tanah;
- g. Program Persiapan Pengadaan Tanah;
- h. Program Penyerahan Hasil Pengadaan Taah;
- i. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

2. Misi: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani.

Program untuk mendukung misi ini adalah:

1) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- a. Program Pembinaan dan pengembangan Sumberdaya Aparatur;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- c. Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center;
- d. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
- e. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- g. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
- h. Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
- i. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Program Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah;
- k. Program kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
- l. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan;
- m. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
- n. Program Pembangunan Produk Hukum Daerah.

2) Urusan Perencanaan Pembangunan

- a. Program Perencanaan Pembangunan;
- b. Program Pengembangan Data/Informasi;
- c. Program Perencanaan Kerjasama Daerah.

3) Urusan Kearsipan

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
- b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah.

4) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Penataan administrasi kependudukan.

5) Urusan Komunikasi dan Informatika

Program Pengembangan Komunikasi, informasi, dan media massa.

6) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a. Program Pendidikan politik masyarakat;
- b. Program pengembangan wawasan kebangsaan.

7) Urusan Penanaman Modal

Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

3. Misi: Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.

Program untuk mendukung misi ini adalah:

1) Urusan Pendidikan

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Program Pengembangan Sekolah Gratis;
- c. Program wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun;
- d. Program Pendidikan Menengah;
- e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Program Pendidikan Non formal;
- g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

2) Urusan Perpustakaan

- a. Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi perpustakaan dan budaya baca;
- b. Program Peningkatan Administrasi Perpustakaan.

3) Urusan Kesehatan

- a. Program Pelayanan Kesehatan Dasar;
- b. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- c. Program promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Program penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB;
- e. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- f. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak;
- g. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- h. Program Pengadaan Peningkatan Sarana, Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata;
- i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- j. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
- k. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- l. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru/Rumah Sakit Mata;

m. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

4) Urusan Pertanian

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;

5) Urusan Keluarga Berencana

- a. Program Keluarga Berencana;
- b. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;
- c. Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga.

6) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
- b. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- c. Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak.

7) Urusan Sosial

- a. Program Pembinaan Anak Terlantar;
- b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
- c. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya);
- d. Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo;
- e. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma;
- f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

8) Urusan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Program Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Program Inovasi Pembangunan & Pemberdayaan Kewilayahan.

9) Urusan Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;

10) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- a. Program percepatan pembangunan masyarakat kelurahan;
- b. Program Sosial Keagamaan;
- c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- d. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

11) Urusan Kebudayaan

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya;
- b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
- c. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

12) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
- b. Program Penyediaan Sarana dan prasarana Olah Raga;
- c. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga.

4. Misi: Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Program untuk mendukung misi ini adalah:

1) Urusan Ketenagakerjaan

- a. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- b. Peningkatan kesempatan kerja;
- c. Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan;
- d. Program Peningkatan Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

2) Urusan Penanaman Modal

- a. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi;
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
- c. Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

3) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
- b. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM;
- c. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM;
- d. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif;
- e. Program Koordinasi, Perumusan dan Implementasi Kebijakan ekonomi.

4) Urusan Perdagangan

- a. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
- b. Program peningkatan dan pengembangan ekspor;
- c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

5) Urusan Industri

- a. Program pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis;
- b. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial;
- c. Program penataan struktur industri;
- d. Program pengembangan industri kecil menengah;
- e. Program peningkatan kemampuan teknologi industri;
- f. Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi.

6) Urusan Pariwisata

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

7) Urusan Ketahanan Pangan

- a. Program Ketahanan Pangan;

8) Urusan Pertanian

- a. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
- b. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- d. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
- e. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

9) Urusan Kelautan dan Perikanan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan;

10) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan;
- b. Program Pembinaan, Pengendalian dan monitoring pajak daerah;
- c. Program Pemanfaatan teknologi Informasi;
- d. Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi;
- e. Program Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah;
- f. Program Pengembangan Usaha Daerah.

11) Urusan Perencanaan Pembangunan

- a. Program Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
- b. Program Penelitian dan Pengembangan.

12) Urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

- a. Program Pendidikan Menengah;
- b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

13) Urusan Penataan Ruang

Program Pengembangan Infrastruktur Kota Kreatif.

Rumusan kebijakan umum dan program prioritas pada program pembangunan daerah Kota Bandung selengkapnya dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7-1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Bandung di Misi 1

MISI 1: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							2013	2018		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan 1: Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan											
1	Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten.	Penyusunan Instrumen Pengawasan & Pengendalian yang mengacu kepada rencana tata ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya dokumen acuan penataan ruang	Dokumen	2	10	Penataan Ruang	Bappeda	Distracip
			Penyempurnaan tatacara perijinan penataan ruang sebagai instrumen pengendalian	Program Pengendalian & Pemanfaatan Ruang	Jumlah Pelanggaran pemanfaatan ruang dan lahan yang telah selesai diproses sesuai kewenangan	Persentase	56,27	75	Penataan Ruang	Distracip	BPPT
		Peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan penataan ruang	Penyelenggaraan forum konsultasi publik dalam penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang.	Program Perencanaan Tata Ruang	Terselenggaranya Forum konsultasi publik	event	2	10	Penataan Ruang	Distracip	
			Pembangunan Kota Modern Percontohan di Gedebage dengan Tema Teknologi.		Revisi RTRW	Dokumen	-	1	Penataan Ruang	Bappeda	Distarcip
		Pengembangan PPK Gedebage melalui: 1) Pembangunan pusat pemerintahan, 2) pengembangan kawasan bisnis, dan 3) pengembangan pusat ilmu pengetahuan & teknologi	Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta Pembangunan Bangunan	Tercapainya kualitas penataan dan pembangunan bangunan gedung dan bangun bangunan	Persentase	-	50	Pekerjaan Umum	Distarcip		
			Program Pengendalian & Pengamanan Lalulintas	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan	Persentase	-	100	Perhubungan	Dishub		
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan Baru (Gedebage)	KM	2,5	10	Pekerjaan Umum	DBMP		
Tujuan 2: Menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi											
2	Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata	Meningkatkan Infrastruktur Jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata	Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rasio panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Persentase	72,36	100	Pekerjaan Umum	DBMP	
			Pembangunan jalan baru & pembangunan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Flyover, underpass, dll	Unit	-	6	Pekerjaan Umum	DBMP	

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							2013	2018		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Membangun Sarana dan Prasarana perkotaan bagi warga kota yang berkebutuhan khusus	flyover di titik rawan macet								
			Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus dan universal	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Panjang Trotoar yang dibangun	meter	56,419.63	120,500	Pekerjaan Umum	DBMP	
			Pembangunan trotoar, ruang tunggu terminal serta bangunan publik yang dilengkapi dengan fasilitas bagi kaum difabel	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Median Trotoar yang dilengkapi fasilitas untuk kaum difabel	meter	NA	120,500	Pekerjaan Umum	DBMP	
				Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	jumlah prasarana dan fasilitas terminal yang dibangun untuk kaum difabel	Unit	-	4	Perhubungan	Dishub	Distarcip
3	Terwujudnya Bandung caang Baranang	Membangun Titik PJU di jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota	Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Program Penerangan Jalan Umum	Pembangunan PJU dan PJL	Titik	27,655	38.300	Pekerjaan Umum	DBMP	
					Pemeliharaan PJU selama periode RPJMD	Titik	26,550	20.500			
4	Terselesaikan-nya Permasalahan banjir di Kota Bandung	Mengembangkan dan Meningkatkan sarana dan prasarana sistem drainase dan pengendalian banjir	Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas saluran drainase melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran/drainase dan gorong-gorong	Program Pembangunan Saluran/Drainase dan Gorong-gorong	Panjang saluran drainase yang dibangun skala kota selama periode RPJMD	meter	537,114	190,000	Pekerjan Umum	DBMP	
			Mengembangkan prasarana pengendali banjir dengan mengedepankan konsep <i>eco-drain</i>	Program Pengendalian Banjir	Tertanganinnya lokasi banjir	lokasi	14	68	Pekerjan Umum	DBMP	
			Mengembangkan dan memelihara bantaran tanggul sungai	Program Pengendalian Banjir	Terpeliharanya TPT selama periode RPJMD	Meter	257,754	35,000	Pekerjan Umum	DBMP	
			Normalisasi sungai dan menata lingkungan sempadan sungai	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya	Panjang Normalisasi Saluran sungai selama periode RPJMD	Meter	255,429	86,200	Pekerjan Umum	DBMP	
			Pengembangan sungai yang hijau, bersih, memiliki kapasitas pengaliran yang memadai dan menjadi ruang publik yg nyaman	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Tertatanya kawasan sempadan sungai	Meter	N/A	10	Pekerjan Umum	DBMP	
5		Meningkatkan kondisi sarana dan	Penataan Kawasan Kumuh perkotaan		Luas kawasan permukiman kumuh	Persentase	11	9,79	Pekerjaan Umum	Distarcip	

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							2013	2018		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan	prasarana dasar permukiman	melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau	Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah Rumah susun yang terbangun	Unit	9	21			
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rumah Tangga Berakses air bersih	Persen	65	80			
					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	N/A	10000			
6	Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata	Mendorong pengelolaan sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah dari sumbernya,	peningkatan daur ulang sampah dan mengkonversi sampah menjadi energi dengan teknologi yang ramah lingkungan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah yang dikelola dengan mengkonversi menjadi energi (WTE)	Persentase	0%	35%	Lingkungan Hidup	BPLH	
			Peningkatan sarana dan pasarana pengelolaan sampah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah yang dikelola dengan sistem 3-R	Persentase	16%	30%	Lingkungan Hidup	BPLH	
			Mengembangkan kerjasama dengan Kab/Kota lain dalam operasionalisasi Tempat Pembuangan Akhir sampah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah yang dikelola dengan Sanitary Landfill (TPA Regional)	Persentase	68%	25%	Lingkungan Hidup	BPLH	
			Menerbitkan Peraturan mengenai kawasan bebas sampah dan peraturan lain terkait pengelolaan sampah	Program Penataan Peraturan perundang-undangan	Tersedianya Produk Hukum terkait lokasi kawasan bebas sampah	Jumlah	Perda Sampah Perda K3	Perwal:30 lokasi kawasan bebas sampah	Otonomi	Bag Hukum	PD kebersihan, BPLH
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengu rangi produksi sampah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Bank sampah	Bank Sampah	50	150	Lingkungan Hidup	BPLH	
			Terbangunnya infrastruktur TPA berteknologi tinggi yang ramah lingkungan		Terbangunnya infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	unit	0	1	Lingkungan Hidup	BPLH	PD Kebersihan
		Peningkatan akses layanan untuk sistem pengolahan limbah terpusat	Meningkatkan akses layanan air limbah melalui sistem terpusat, komunal maupun individu untuk limbah domestik dan nondomestik	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Prosentase tingkat pelayanan air limbah dengan sistem terpusat	persentase	64%	74%	Lingkungan Hidup	BPLH	
		Mengembangkan & memelihara sumber air baku untuk penyediaan air bersih dlm rangka meningkatkan cakupan dan kontinuitas pelayanan air bersih	Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Tersedianya sumber air baku (air permukaan) alternatif untuk penyediaan air minum yang terjaga kelestariannya	Liter/detik	2600	5750	PDAM	Bappeda, BPLH, Distarcip	

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							2013	2018		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pembuatan bendungan Sungai Cikapundung sebagai upaya pengamanan ketersediaan air baku			(kapasitas produksi sumber air baku)						
Tujuan 3: Mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman, efisien, memadai, handal dan ramah											
7	Terwujudnya sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan	Tersedia prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	Peningkatkan sarana dan prasarana dasar perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase halte yang terbangun di jalur yang telah dilayani angkutan umum bertrayek	persen	54	80	Perhubungan	Dishub	
			Menyediakan fasilitas terminal yang layak	Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	jumlah prasarana dan fasilitas terminal yang dibangun	Unit	2	10			
			Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Prosentase fasilitas prasarana LLAJ yg berfungsi dan kondisi baik	persen	50	80			
			Meningkatkan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Kendaraan angkutan umum laik jalan/lulus uji KIR	persen	95	97,5			
			Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (Berbasis Rel dan Non Rel)	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Peningkatan Jumlah koridor SAUM	Persentase	17	50			
		Mengendalikan aspek-aspek kemacetan	Menyediakan fasilitas kelengkapan jalan (rambu, marka, traffic light, paku jalan, marka)	Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas	Kecepatan tempuh rata-rata kendaraan	Km/jam	23	25			DPKAD, DBMP, Distarcip
		Tujuan 4: Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkelanjutan dan Penanggulangan bencana yang handal									
8	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan Tertanggulangnya bencana secara dini komprehensif	Pengendalian pencemaran lingkungan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Mendorong peningkatan kualitas udara perkotaan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Tingkat Mutu Kualitas Udara Ambien	Persen	25	50	Lingkungan Hidup	BPLH	
				Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Bertambahnya jumlah sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV golongan B (dari tercemar berat mjd tercemar ringan)	Persen	6,25	17	Lingkungan Hidup	BPLH	
		Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Perluasan cakupan uji emisi kendaraan bermotor	Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	tingkat emisi GRK 2, emisi CO2 2127,06Gg emisi CH4 7,44 Gg emisi N2O 0,07 Gg	Persen	NA	10	Lingkungan Hidup	Diskamtam	Dishub, BPLH

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							2013	2018		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penataan, pengembangan dan pembangunan Babakan Siliwangi sebagai pusat ekologi Kota	Mendorong terciptanya Kawasan Babakan Siliwangi menjadi puast ekologi kota	Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Terwujudnya Babakan Siliwangi sebagai pusat ekologi kota	Unit	Belum	Pusat ekologi Kota	Lingkungan Hidup	BPLH	Dishub, Diskamtam
		Peningkatan ruang terbuka hijau publik dan privat	Menambah luasan RTH dan Memelihara RTH yang sudah ada	Program Perencanaan Pengadaan Tanah	Luasan ruang terbuka hijau	Persen	12,14	23	Lingkungan Hidup	DPKAD	BPLH, Diskamtam, Distan KP
				Program Persiapan Pengadaan Tanah	Luasan ruang terbuka hijau	Persen	12,14	23	Lingkungan Hidup	DPKAD	
				Program Penyerahaan Hasil Pengadaan Tanah	Luasan ruang terbuka hijau	Persen	12,14	23	Lingkungan Hidup	DPKAD	
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luasan ruang terbuka hijau				Lingkungan Hidup	Diskamtam	BPLH, Distan-KP
			Pembangunan 1 Taman di setiap RW	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terbangunnya Taman RW	Unit	NA	1563	Lingkungan Hidup	Diskamtam	DPKAD, BPLH, Distan KP
		Meningkatkan rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Pengembangan Prasarana Pemakaman Umum	Pengelolaan Areal Pemakaman	TPU yang berwawasan lingkungan	TPU	8	10	Lingkungan Hidup	Diskamtam	
		Pembangunan Makam tumpang & makam cadangan	Pengembangan fasilitas pemakaman umum		Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		M2/orang	488.31	2855.11	Lingkungan Hidup	Diskamtam
		Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran dan bencana	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	NA	91,96	Perumahan	DPPK	
		Penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana	Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana			Response Time Rate	<22 mnt	<15 Mnt	Perumahan	DPPK	

Prinsip perencanaan tata ruang adalah integrasi dalam satu ekosistem. Integrasi semacam ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Perlu keterpaduan dalam rencana tata ruang yang konsisten bila mengabaikan prinsip tersebut bahkan akan mengakibatkan kerusakan di wilayah lainnya. Tidak hanya menggunakan logika infrastruktur dasar melainkan pula daya dukung dan daya tampung lingkungan disekitarnya.

Perhatian terhadap daya dukung dan daya tampung ini dimaksudkan agar pemanfaatan ruang tidak melampaui batas-batas kemampuan lingkungan hidup dalam menampung aktivitas manusia. Secara geografis penataan infrastruktur menjadi sangat penting karena keberdayaan ruang hidup semakin lama akan semakin terbatas seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia. Untuk itu diperlukan berbagai langkah yang tepat dan terencana untuk tetap membangun sebuah tata ruang yang memiliki daya ungkit ekonomi sebagai upaya pembangunan perekonomian masyarakat, dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Ketidak berpihakan pada kelestarian ekosistem akan berdampak luas pada kualitas hidup masyarakat.

Ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan cenderung menurun dan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Sebagai sebuah komponen penting dalam perwujudan ruang di kawasan perkotaan perlu dibuat agenda kegiatan untuk tetap mempertahankan ruang kehidupan yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dan tidak termarginalisasi oleh kegiatan-kegiatan budidaya yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomis secara instan.

Kondisi persampahan yang merupakan salah satu komponen utama dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu mendapatkan perhatian lebih mengingat produksi sampah dalam kesehariannya bersifat terus menerus dan tidak bias menunggu. Sehingga diperlukan sebuah gerakan untuk mereduksi sampah dari sumber sampah sehingga pengelolaan persampahan lebih efektif dan efisien. Permasalahan krusial lainnya yang mendesak untuk segera diselesaikan adalah permasalahan transportasi dan daya dukung. Upaya-upaya yang

terintegrasi dengan seluruh stakeholders pemerintahan perlu memiliki agenda tersendiri guna akselerasi pelaksanaan penataan infrastruktur jalan guna memberikan hasil guna dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Tabel 6-2
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Bandung di Misi 2

MISI 2: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani.

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							2013	2018		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan 1: Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan.											
1.	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsif.	Program Perencanaan Pembangunan	Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	Persen	≥ 30	≥ 30	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Kecamatan
Tujuan 2 : Terlaksananya Reformasi birokrasi											
2.	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	Mewujudkan Opini BPK: WTP	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Status Laporan	Dokumen	WDP	WTP	Otda, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian	DPKAD	Seluruh SKPD
			Peningkatan pengelolaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persen	100%	100%		Inspektorat	Seluruh SKPD
		Menerapkan Sistem pengawasan Internal	Penerapan SPIP di SKPD	Program Penataan & Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level berkembang	Persen	20%	100%		Inspektorat	Seluruh SKPD
3	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan standar kualitas pelayanan SKPD	Program pengendalian kebijakan Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu layanan	B	A		ORPAD	SKPD pelayanan publik
				Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah SKPD memiliki Sertifikasi ISO 9001:2008	SKPD	56	68		ORPAD	SKPD pelayanan publik
		Desentralisasi urusan pemerintah daerah	Pelaksanaan pelimpahan Kewenangan SKPD ke Kecamatan/ Kelurahan disertai dgn pendistribusian	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu layanan (Kategori)	B	A		Kecamatan	

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							2013	2018		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Personil, Peralatan, Penganggaran dan dokumen (P3D)								
		meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan	pelaksanaan Standard operating procedure (SOP) pelayanan perijinan dan non perijinan	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	12	5	Penanaman Modal	BPPT	Distarcip, DBMP.
		Meningkatnya kinerja pelayanan tugas dan fungsi DPRD Kota Bandung	Terwujudnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara eksekutif dan legislatif	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah	Persentase realisasi program legislasi daerah Kota Bandung	Persentase	5333.00%	100	Otda, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian	Sekretariat DPRD	Bag. Hukum & HAM
4	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kineja birokrasi	Mengkaji, merumuskan, mengembangkan & mengimplementasikan merit sistem dalam rekrutmen/ mutasi/Promosi aparatur serta memperkuat pengawasan pelaksanaannya	Pemantapan standar kompetensi, perencanaan pengembangan kompetensi serta merit sistem bagi aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara sesuai dengan standar	Persen	70	85		BKD	
				Program Fasilitasi Pindah/purnatugas PNS	Persentase PNS Pindah/purnatugas	Persen	100	100		BKD	
				Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center	Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi	Persen	70%	90%		BKD	
		SOTK dan Tupoksi yang mencerminkan visi, misi, target dan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah	Mengkaji, merumuskan ulang dan melaksanakan perubahan SOTK dan Tupoksi Organisasi Pemerintah Daerah	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK nya	SKPD	33	33		Bagian ORPAD	
				Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur	Jumlah Anjab dan ABK SKPD	SKPD	9	24		Bagian ORPAD	BKD
		Penyempurnaan kebijakan dan implementasi kebijakan formasi dan system ketatalaksanaan di setiap OPD	Memperkuat pengawasan internal secara berkala atas implementasi kebijakan formasi dan sistem ketatalaksanaan di setiap OPD	Program Penataan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Raperwal standard dan prosedur pelayanan SKPD/Unit Kerja	Dokumen	N/A	20	Otda, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian & Persandian	Bagian ORPAD	Semua SKPD
		Meningkatkan kinerja keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, dalam penyelenggaraan pembangunan	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan	Program Perencanaan Pembangunan	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Katagori	CC	A	Otda, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,	Bagian ORPAD	Semua SKPD
					Nilai dan Pemingkatan LPPD	Peringkat	10	1		Bagian ORPAD	Semua SKPD

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							2013	2018		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya Kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Mewujudkan tertib pengelolaan asset	Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Bandung	Bidang	453	1115	perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian	DPKAD	
			Mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Cakupan perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase	25%	100%	Kearsipan	Kapusarda	
				Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah	Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip SKPD dan BUMD	Jumlah SKPD	29	65	Kearsipan	Kapusarda	Seluruh SKPD
			Melaksanakan administrasi kependudukan yang berkualitas	Program Penataan Administrasi kependudukan	Persentase cakupan tertib Administrasi Kependudukan	Persen	100%	100%	Kependudukan	Disdukcapil	
5	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam diseminasi program pembangunan dan penyediaan database profil wilayah	Pelayanan jaringan dan peningkatan penggunaan teknologi informasi di area publik menuju <i>cybercity</i> & tersedianya pasif infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tingkat pelayanan publik berbasis content teknologi informasi dan pasif infrastruktur TIK	Persen	35%	100%	Komunikasi & Informatika	Diskominfo	
			Pengembangan Kerjasama Daerah dengan Swasta dalam Pembangunan Basis Data Kewilayahan	Program Perencanaan Kerjasama Daerah	tingkat ketersediaan data profil RW	persentase	20	100	Otonomi daerah, pemerintahan umum,	Bappeda	Diskominfo
										Bagian ORPAD	
		Mewujudkan integrasi/ konektivitas data melalui pengelolaan satu data pembangunan	Mewujudkan pengelolaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data SKPD untuk mendukung proses perencanaan pembangunan Kota Bandung	Program Pengembangan Data/Informasi	Integrasi data SKPD dalam Bandung satu data	SKPD	8	30	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							2013	2018		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatkan partisipasi dan kontrol publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Membuka layanan partisipasi, aspirasi dan pengaduan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa	LAPOR (Layanan Aspirasi Pengaduan On-Line Rakyat)	Persen	75%	100%	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	
Tujuan 4: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Aparat terhadap Hukum dan HAM											
6	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan Negara	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Toleransi, Kerukunan & Kerjasama antar-umat Beragama, Nilai Sosial dan Solidaritas di Kalangan Masy. serta Pelestarian Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Persen	70%	95%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	BKBPM	
7	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Bandung	Persen	55% Pilwalkot	65%	Kesatuan bangsa dan politik	BKBPM	
8	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum	Menata Produk Hukum daerah dan Meningkatkan budaya taat hukum	Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan	Program Pembangunan Produk Hukum Daerah	Cakupan Produk hukum daerah yang dihasilkan	Jumlah	12 Perda	90 Perda	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepeg. & Persandian	Setda (Bag Hukum dan HAM)	
			Penegakan Perda	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Cakupan penegakan Perda dan Perwal	persen	72 Perwal 182 kepwal	100 Perwal 625 Kepwal		Satpol PP	
							N/A	90%			

Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan adalah sebuah keniscayaan dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good clean governance*). Sebuah pemerintahan akan berjalan dengan baik dan aspiratif manakala ruang informasi dan aksesibilitas publik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dapat terbuka dengan luas dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan konteks transparansi pemerintahan yang merupakan salah satu elemen pembentuk konsep besar tentang tata kelola pemerintahan yang baik.

Berpijak dari teori tata kelola pemerintahan tersebut dan dikombinasikan dengan kondisi faktual yang terjadi di lingkup masyarakat yang menunjukkan fenomena bahwa masyarakat secara umum memiliki interest yang sama terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya di Kota Bandung. Perlu diprioritaskan sebuah agenda kegiatan yang dapat memberikan ruang komunikasi yang cukup dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Bandung. Hal ini dimaksudkan untuk memperluas fungsi masyarakat sebagai unsur pembangun kebijakan dalam memberikan aspirasi dan pengawasan secara aktif kepada pelaksanaan program-program pembangunan yang dicanangkan.

Komponen penting yang perlu diawasi bersama sama dengan para stakeholders pemerintahan guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani adalah sektor keuangan sebagai cerminan keberpihakan program, sektor aparatur daerah sebagai implementator kebijakan daerah, dan sektor aspirasi masyarakat sebagai komponen pembangun utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Target utama dari agenda Walikota Bandung pada misi ini adalah terciptanya sebuah pelayanan publik yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Tabel 7-3
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Bandung di Misi 3

MISI 3: Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							KONDISI AWAL (2013)	KONDISI AKHIR (2018)		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan 1: Mewujudkan Pendidikan yang merata, unggul, terjangkau dan terbuka.											
1	Mewujudkan sistem pendidikan nasional di Kota Bandung yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global	Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan	(1) Pengembangan Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan MA dalam rangka Penguatan Wajar Dikdas sembilan Tahun dan rintisan wajar Dikmen 12 Tahun pada tahun 2018;	Pengembangan Sekolah Gratis	Persentase siswa yang menyelesaikan wajar Dikmen 12 Tahun	Persen	96,96%	100%	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
				Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun	APK SD/MI/Paket A (termasuk siswa dari luar Bandung)	Persen	131.05%	131.05%	Pendidikan		
					APK SD/MI/Paket A (Khusus siswa dari Kota Bandung)	Persen	100%	100%	Pendidikan		
					APM SD/MI/Paket A (Termasuk siswa dari luar Kota Bandung)	Persen	123.13%	123.13%	Pendidikan		
					APM SD/MI/Paket A (khusus siswa dari Kota Bandung)	Persen	100%	100%	Pendidikan		
					APK SMP/MTs/ Paket B (termasuk siswa dari luar Kota Bandung)	Persen	116.16%	116.16%	Pendidikan		
					APK SMP/MTs/ Paket B (Khusus siswa dari Kota Bandung)	Persen	100%	100%	Pendidikan		
					APM SMP/MTs/ Paket B (termasuk siswa dari luar Bandung)	Persen	100%	100%	Pendidikan		
					APM SMP/MTs/ Paket B (Khusus siswa dari Kota Bandung)	Persen	100%	100%	Pendidikan		
				Pendidikan Menengah	APK SMA/MA/ SMK/Paket C (khusus Kota Bandung)	Persen	98.96%	99.00%	Pendidikan		

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							KONDISI AWAL (2013)	KONDISI AKHIR (2018)		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					APM SMA/MA/ SMK/Paket C (khusus Kota Bandung)	Persen	90.59%	99.00%	Pendidikan		
			(2) pendidikan terjangkau bagi anak-anak dari golongan tidak mampu serta Bantuan Siswa Miskin (Siswa Miskin untuk Tk. SMA/SMK/MA/dan Warga Belajar);*)	Program Pendidikan Menengah	Angka Putus Sekolah SMA/MA/ SMK	Persen	0.05%	0.02%	Pendidikan		
				Program Pendidikan Non formal	Peningkatan aksesibilitas pendidikan non formal (Kelompok Belajar Paket A, B, dan C)	Persen	65%	97%	Pendidikan		
				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah rintisan sekolah inklusif SD	Sekolah	24 Sekolah	36 sekolah	Pendidikan		
					Jumlah rintisan sekolah inklusif SMP	Sekolah	11 Sekolah	4 sekolah	Pendidikan		
					Jumlah rintisan sekolah inklusif SMA	Sekolah	8 Sekolah	6 sekolah	Pendidikan		
				Program Pendidikan Non formal	APK Pendidikan Non Formal	Persen	99,58%	100%	Pendidikan		
					APM Pendidikan Non Formal	Persen	50%	76%	Pendidikan		
				Pendidikan Anak Usia Dini	APK Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	55%	97%	Pendidikan		
					APM Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	N/a	82%	Pendidikan		
				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah sekolah yang telah mengacu pada standar pendidikan nasional	Sekolah	800 SD	107 SD	Pendidikan		
		Mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan	(1) peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan anak usia dini	Persentase	50%	80%	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
				Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SD/MI	Persentase	80%	90%	Pendidikan		

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							KONDISI AWAL (2013)	KONDISI AKHIR (2018)		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMP/MTs	Persentase	90%	100%	Pendidikan		
				Program Pendidikan Menengah	Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMA/MA/SMK	Persentase	95%	100%	Pendidikan		
				Program Pendidikan Non formal	Cakupan Peningkatan kualitas sarana & prasarana penunjang pendidikan Non-formal	Persentase	65%	80%	Pendidikan		
			(2) pengembangan dan pengawasan kapasitas guru	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	Tingkat kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Persentase	89%	100%	Pendidikan		
					Tingkat sertifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Persentase	89%	100%	Pendidikan		
			(3) pengembangan kurikulum, kualitas materi dan metode pembelajaran	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Implementasi kurikulum, kualitas materi dan metode pembelajaran yang berwawasan lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya nasional	Persentase	20%	50%	Pendidikan		
				Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Implementasi kurikulum, kualitas materi dan metode pembelajaran yang berwawasan lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya nasional	Persentase	100%	100%	Pendidikan		

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							KONDISI AWAL (2013)	KONDISI AKHIR (2018)		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Pendidikan Menengah	Implementasi kurikulum, kualitas materi dan metode pembelajaran yang berwawasan lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya nasional	Sekolah	SMA: 136 Sekolah, SMK:132 Sekolah	SMA: 143 Sekolah, SMK:139 Sekolah	Pendidikan		
				Program Pendidikan Non formal	Implementasi kurikulum, kualitas materi dan metode pembelajaran yang berwawasan lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya nasional	Unit	260 lembaga	316 lembaga	Pendidikan		
				(4) Melaksanakan Kemitraan Global	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Sekolah	4 sekolah	1 sekolah	Pendidikan		
				(5) Peningkatan kualitas pendidikan non-formal dan informal	Program Pendidikan Non formal	Unit	10 lembaga	35 lembaga	Pendidikan		
		Pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja		(1) Mewujudkan pendidikan kejuruan yang luwes dan fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja yang berubah;	Program Pendidikan Menengah	Persen	65%	100%	Pendidikan		
				(2) Membangun sistem terpadu pendidikan kejuruan (STPK) yang mencakup semua program kejuruan yang diminati oleh pasar dan telah berkembang pada SMK, dan program PNF kejuruan (lembaga kursus, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan kewirausahaan	Program Pendidikan Menengah	Persen	100%	100%	Pendidikan		

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							KONDISI AWAL (2013)	KONDISI AKHIR (2018)		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tata kelola pendidikan yang baik dan akuntabel	(1) Mekanisme akuntabilitas publik dengan penajaman pada peran stakeholders dalam fungsi pengawasan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Prosentase Satuan Pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip MBS	Persen	70%	100%	Pendidikan		
			(2) sistem informasi berbasis ICT untuk menginformasikan kinerja satuan pendidikan serta partisipasi masyarakat dalam bentuk pengaduan, usulan dan informasi lainnya yang dapat diakses setiap waktu oleh publik dan semua stakeholders	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Tersedianya sistem informasi berbasis ICT	sekolah	42 sekolah	205 sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
			(3) Peningkatan status dan kesejahteraan guru honorer dan guru yayasan;	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah guru honorer dan guru yayasan yang memperoleh bantuan	orang	20.000 orang	20.000 orang	Pendidikan		
			meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan daerah	Mewujudkan minat baca masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca	Persentase jumlah pemustaka	Persen	0.30%	0.43%	Perpustakaan	Pusarda
		Program Peningkatan Administrasi Perpustakaan			Cakupan sistem teknologi informasi perpustakaan	Persen	25%	100%	Perpustakaan		
		Tujuan 2: Peningkatan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan									
2	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau.	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan pelayanan Puskesmas dengan fasilitas ambulance 24 jam)*	Pelayanan Kesehatan Dasar, dan pencegahan penyakit	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100%	100%	Kesehatan	Dinkes	
					Cakupan Desa/ Kelurahan UCI	Persen	100%	100%			
				Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas	Puskesmas	73	84			
			Meningkatkan pengendalian penyakit	Program penyelidikan	Cakupan Desa/ Kelurahan	Persen	100%	100%			

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							KONDISI AWAL (2013)	KONDISI AKHIR (2018)		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			menular dan tidak menular	epidemiologi dan penanggulangan KLB	mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan <24jam						
		Peningkatan pelayanan kepada masyarakat miskin yang dirujuk	Meningkatkan penataan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	Persen	100%	100%			
					Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus ditangani sarana kesehatan (RS)	Persen	97%	100%			
				Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan & anak	Cakupan pertolongan persalinan ibu dari keluarga miskin	Persen	100%	100%		RSKIA	
		Peningkatan standar pelayanan rumah sakit	Meningkatkan sarana dan prasarana serta manajemen rumah sakit	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Cakupan pelayanan rumah sakit	Persen	100%	100%		RSKIA, RSUD, RSKGM	
				Program Pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit/RS Jiwa/ RS Paru/RS Mata	Cakupan ketersediaan sarana prasarana rumah sakit yang memadai	Persen	62%	100%		RSKIA	
					Cakupan ketersediaan sarana prasarana rumah sakit yang memadai	Persen	50%	100%		RSKGM	
					Cakupan ketersediaan sarana prasarana rumah sakit yang memadai	Persen	80%	100%		RSUD	
				Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase layanan kesehatan yang memenuhi standar	Persen	50%	80%		RSKIA, RSUD, RSKGM	
				Program obat dan perbekalan kesehatan	Cakupan layanan obat dan perbekalan kesehatan	Persen	100%	100%		RSKIA, RSUD, Dinkes	
				Program pemeliharaan sarana prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/RS Paru/ RS Mata	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	Persen	100%	100%		RSKIA	

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							KONDISI AWAL (2013)	KONDISI AKHIR (2018)		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembangunan 2 Rumah Sakit standar Internasional	Program Pengadaan, peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata	Terbangunnya Rumah Sakit yang baru	jumlah	3 RS	3 RS		RSKIA, RSUD	
3	Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan	Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan melalui kampanye hidup sehat	Meningkatkan RW siaga aktif;	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah RW siaga aktif	jumlah	597 RW	1501 RW		Dinkes	
			Meningkatkan promosi kesehatan rumah sakit		Tingkat pelaksanaan penyuluhan kepada pasien/pengunjung	Persen	100%	100%	Kesehatan	RSKIA, RSUD, RSKGM	
			Meningkatkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase keluhan yang melaksa nakan sanitasi total berbasis masyarakat	Persen	4%	35%	Kesehatan	Dinkes	
4	Terkendalnya kasus penyakit zoonosa	Meningkatkan pemeriksaan hewan dan ternak terutama penyakit zoonosa (penyakit yang menular dan membahayakan manusia)	Meningkatkan pengawasan penyakit zoonosa	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Kasus penyakit zoonosa	Kasus	1	8	Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
Tujuan 3: Peningkatan kualitas Hidup Masyarakat											
5	Terkendalnya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB	Meningkatkan Kelestarian & kemandirian peserta KB	Program Keluarga Berencana	TFR (Total Fertilitilite Rate)	Persentase	1.98%	1.95%	KB & KS	BPPKB	
		Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan	Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)	Program pembinaan peran serta masyarakat pelayanan KB/KR mandiri	Cakupan institusi masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase	47%	100%	KB & KS		
		Peningkata Ketahanan dan pemberdayaan keluarga	Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga (BKB,BKR,BKL) & UPPKS	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Presentase tenaga pendamping yang mampu menggerakan partisipasi	Persentase	40%	60%	KB & KS		
6	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	Fasilitasi akses di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, hukum, politik dan teknologi Perempuan	Pembinaan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera	Program peningkatan peran serta & kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persentase	62.25%	65.60%	PP & PA		

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							KONDISI AWAL (2013)	KONDISI AKHIR (2018)		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Pemberian layanan (konseling, mediasi dan pendampingan) kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan kasus dan pelatihan keterampilan untuk perempuan dan anak korban KDRT	Persentase	100%	100%	PP&PA		
		Pengarusutamaan Gender (PUG) & meningkatkan pemberdayaan perempuan dlm pembangunan	Pengembangan Focal Point Gender di SKPD	Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Persentase	70%	70.25%	PP&PA		
		Mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA)	Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Kelurahan Layak Anak	Kelurahan	7 Kelurahan	120 Kelurahan	PP&PA		
7	Meningkatnya penanggulangan PMKS	Mengurangi permasalahan sosial dan melalui pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara baik dan dan wajar dalam kehidupan bermasyarakat	1) meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/ jaminan sosial	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Jumlah penghuni panti yang ditangani	orang	3.554 orang	3.554 orang	Sosial	Dinas Sosial	
				Program pembinaan anak terlantar	Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan	Persentase	25.51%	23.83%			
				Program pemberdayaan fakir miskin	Persentase penanganan keluarga miskin	Persentase	2.93%	21.59%			
				Program Pembinaan Eks-Penyandang Penyakit Sosial	Persentase penanganan Gelandangan, Pengemis, WTS dan Korban Penyalahgunaan Napza	Persentase	18.11%	17.87%			
				Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma	Persentase penanganan penyandang cacat	Persentase	37.70%	13.05%			
		meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS	pendayagunaan dan pemberdayaan PSKS dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ikut serta dalam penanganan masalah sosial	orang	500 PSKS	2500 PSKS			

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							KONDISI AWAL (2013)	KONDISI AKHIR (2018)		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan	Penguatan Kelembagaan Masyarakat, Pengembangan Partisipasi masyarakat dan Peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat	1) Desentralisasi Urusan Pemerintah Daerah dan Kolaborasi dengan Kelembagaan Masyarakat, 2) Penguatan Kelembagaan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan 3) Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam pembangunan	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Peran Serta Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Rupiah	Rp. 173.678.709.134	Rp. 219.615.000.000	Pemberdayaan	BKPPM/ Dinas Sosial, Bagian Pemerintahan Umum, Kecamatan (Kelurahan)	BKPPM, Dinas Sosial, Bag. Pemum
				Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Skala	N/A	Tinggi	Pemberdayaan	BKPPM/ Dinas Sosial, Bag Pemerintahan Umum, BKPPM, Dinas Permukiman dan Pertamanan, Kewilayahan (Kelurahan), Diskoprintag, Distan Pangan, Bagian Kesra	
		Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bandung	1) Terpantaunya jumlah masyarakat miskin secara akurat, komprehensif dan integral, 2) Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi terhadap upaya Penanggulangan Kemiskinan, 3) Pelayanan Pemulasaraan dan Pemakaman bagi Warga Miskin 4) Pemberian Bantuan/Subsidi Bahan Pokok bagi masyarakat Miskin	Program Penanggulangan Kemiskinan	Angka kemiskinan	orang	304.939 jiwa	289.994 jiwa	Pemberdayaan		
			Terlaksananya subsidi gas bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah KK MBR yang mendapat subsidi	KK	-	62.255	Perdagangan	Dinas KUKM & Perindag	
Tujuan 4: Meningkatkan pelestarian seni budaya peran pemuda prestasi olah raga											
9	Meningkatnya pelestarian seni budaya serta prestasi kepemudaan dan olahraga	peningkatan apresiasi masyarakat serta pemerintah terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah	perlindungan budaya lokal	Pengembangan nilai budaya	Apresiasi pemerintah terhadap seniman dan budayawan Kota Bandung	orang	71 seniman budaya	50 seniman budaya	Kebudayaan	Disbudpar	
		peningkatan apresiasi masyarakat thd aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permuseuman, & kepurbakalaan bgi pengembangan budaya daerah	terwujudnya Kota Bandung sebagai pusat budaya	Pengelolaan kekayaan budaya	Perlindungan bangunan cagar budaya	Unit	100 BCB	537 BCB	Kebudayaan		

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							KONDISI AWAL (2013)	KONDISI AKHIR (2018)		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		peningkatan perlindungan dan pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Kota Bandung	mengembangkan pusat gelar karya seni dan budaya berkelas dunia untuk berbagai pentas karya seni)*	Pengelolaan keragaman budaya	pagelaran dan festival seni budaya	Even	65 pergelaran dan festival	300 pergelaran dan festival	Kebudayaan		
		meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan	(1) peningkatan Pembinaan olahragawan; (2) Pembangunan GOR Bulu Tangkis (GOR Bandung), Kolam Renang Caringin, GOR Pajajaran; (3) Revitalisasi Sarana Olahraga Bola Volley, Tenis Meja, Futsal, dll; (4) Pemeliharaan SUS Gelora BLA yang professional	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah kejuaraan atau perlombaan yang diikuti (olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olah raga rekreasi/ masyarakat)	Even/ kejuaraan perlombaan	8	8	Kepemudaan dan Olahraga	Dispora	
				Program peningkat an sarana dan prasarana olah raga	Jumlah sarana olahraga yang terbangun	Unit	14 SOR/GOR	15 SOR/GOR			
		meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri	1) Peningkatan peran serta organisasi kepe mudaan dalam pemba ngunan; 2) peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif; 3) Pembangunan Gedung Kepemudaan	Peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Pembinaan kepemudaan	Kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan			
Tujuan 5: Mewujudkan Toleransi dan Pembinaan Umat Beragama											
10	Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antarumat beragama	Pembinaan keagamaan	Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat	Program sosial keagamaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam safari Ramadhan	Persentase	N/A	100%	Otda, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian	Bagian Kesra	
				Program pengembangan wawasan kebangsaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Hari Besar Keagamaan	Persentase	N/A	75%			
				Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum keagamaan	Persentase	N/A	60%			

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							KONDISI AWAL (2013)	KONDISI AKHIR (2018)		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pengembangan pendidikan agama di sekolah	Pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolah-sekolah	Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan keagamaan di PAUD	Persentase	N/A	85%	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
				Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun	Kegiatan keagamaan di Pendidikan Dasar 9 Tahun	Persentase	N/A	85%			
				Pendidikan Menengah	Kegiatan Keagamaan di Pendidikan Menengah	Persentase	N/A	85%			

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep besar yang memuat peran utama pemerintah dalam memberikan hasil guna bagi masyarakat. Pemberdayaan tidak diartikan dengan memberikan langsung apa yang secara instan dikehendaki oleh masyarakat. Pemberdayaan adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang mampu menggiring pemahaman seluruh lapisan masyarakat tentang nilai-nilai kejuangan, cara mencapai tingkat kesejahteraan dalam skala tertentu dan mandiri. Kemandirian adalah lingkup independensi kelompok masyarakat. Semakin rendah tingkat ketergantungan kepada pihak lain, maka semakin berhasil pula program pembangunan yang dicanangkan.

Kesejahteraan hidup masyarakat sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip perjuangan dan kemandiriannya. Masyarakat yang terus bergantung pada kebijakan pemerintah adalah masyarakat yang belum mampu mengarungi arena persaingan. Tugas berat pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Bandung adalah untuk memberikan pemahaman tentang kuadran kesejahteraan masyarakat dari berbagai level aktivitas produktifnya. Kesehatan, kemiskinan, pengangguran adalah sebagian kecil dari masih banyak lagi permasalahan sosial yang fenomenal di penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menghadapi permasalahan dengan kompleksitas yang rumit semacam ini diperlukan agenda-agenda strategis guna memberikan akselerasi pencapaian pembangunan. Diharapkan dari agenda-agenda kebijakan ini dapat dihasilkan kelompok-kelompok masyarakat yang mampu menjadi inspirasi bagi kalangan lain di lingkungannya untuk menjadi sebuah masyarakat yang mandiri, memiliki mutu yang dapat diandalkan dan berdaya saing secara global.

Tabel 7-4
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Bandung di Misi 4

Misi 4: Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							2013	2018		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan 1: Membangun perekonomian kota yang kokoh											
1	Terjaganya ketersediaan pangan dan stabilitas harga	Meningkatkan usaha pertanian melalui pemilihan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, produktivitas tinggi, dan mempunyai peluang pasar	Mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing	Program Ketahanan Pangan	Score Pola Pangan Harapan (PPH)	Persentase	87.8	91.9	Ketahanan Pangan	DISTAN-KP	
					Penguatan cadangan pangan ekivalen beras	ton	N/A	60	Ketahanan Pangan	DISTAN-KP	
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ Perkebunan)	Tingkat produktivitas Padi	Kw/ha	63,09	70,00	Pertanian	DISTAN-KP	
					Tingkat produktivitas Tanaman Hias	Pot/tahun	186.5	195	Pertanian	DISTAN-KP	
		Mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing	Peningkatan produksi Ikan Hias	Pengembangan Budidaya Perikanan	Peningkatan produksi Ikan Konsumsi	Ton	2.51	2.55	Kelautan dan perikanan	DISTAN-KP	
					Peningkatan produksi Ikan Hias	Ekor	821.7	1.221.700	Kelautan dan perikanan	DISTAN-KP	
		Menjaga stabilitas ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok	Menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase komoditas barang yang peredarannya diawasi	Persentase	18.90%	100% (238 jenis barang	Perdagangan	Dinas KUKM perindag	Bag. Kesra, Bagian Perekonomian
			Menyediakan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah								
			Monitoring dan Evaluasi ketersediaan komoditas barang yang beredar	Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi	Persentase ketersediaan komoditas barang yang beredar	Persentase	100%	100%	Perdagangan	Bagian Perekonomian	Dinas KUKM & Perindag, Bag. Kesra,
2	Terjaganya pertumbuhan ekonomi	Mengembangkan produk-produk unggulan kota	Pembinaan dan fasilitasi sentra industri potensial melalui pengenalan produk & promosi offline dan online	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	tingkat konektivitas, promosi dan Integrasi Sistem Informasi Industri potensial	Sistem	1 website	Integrasi Sistem Informasi Industri potensial	Perindustrian	Dinas KUKM & Perindag	

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							2013	2018		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan UMKM	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Fasilitasi dan pembinaan UMKM	Jumlah UMKM	4.581 UMKM	6268 UMKM	KUKM	Dinas KUKM & Perindag	
			Meningkatkan kontribusi Swasta dalam pengembangan sektor Usaha Kecil dan menengah	Program Koordinasi, Perumusan dan Implementasi kebijakan ekonomi	Jumlah Perusahaan yang berkontribusi terhadap Pembangunan Kota	perusahaan	35	80	KUKM	Bagian Perekonomian	Dinas KUKM & Perindag
			Mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor jasa serta perdagangan dalam dan luar negeri	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pembinaan dan fasilitasi para pelaku usaha dibidang perdagangan dan jasa	Unit Usaha	14.831	22.945	Perdagangan	Dinas KUKM perindag	
3	Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penataan peranan kelembagaan perdagangan.	Peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas dan citra produk ekspor	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Nilai ekspor Kota Bandung	US \$	601 jt	614 jt	Perdagangan	Dinas KUKM perindag	
4.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Membangun Sistem Pengawasan Pajak Sebagai Sistem Pengendalian Internal yang Handal	Meningkatkan kompetensi dan integritas petugas pelayanan pajak dg meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petugas pajak yang ramah, bersih dan berwibawa	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pajak	Juta Rupiah	Rp. 1.612.500	Rp. 2.426.158.43	Otonomi	Disyank	
		Membangun sistem pelayanan publik dalam manajemen pajak daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel	tersedianya sistem informasi pelayanan perpajakan yang terintegrasi dan mengembangkan sistem informasi manajemen pajak daerah online	Program pembinaan, pengendalian dan monitoring pajak daerah	jenis pajak yang termonitor dan terevaluasi secara optimal	Jenis	N/A	9	Otonomi	Disyank	

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							2013	2018		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Intensifikasi Penerimaan retribusi daerah	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pencatatan dan pengelolaan Retribusi Daerah	Program Pemanfaatan teknologi Informasi	Penerimaan Bukan Pajak	Milyar Rp	78.649	315	Otonomi	BPPT, Dinkes, Dishub, DPPK, Diskamtam	
		Optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Pembinaan BUMD	Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi	Jumlah Pengembangan Usaha Daerah yang sehat dan Profitable	BUMD	0	4	Otonomi	Bagian Perekonomian	
5.	Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik	Memberikan potongan/ keringanan pajak daerah atau retribusi daerah dan kemudahan promosi di fasilitas publik yang disediakan	Memberikan insentif fiskal bagi swasta dan masyarakat yang memberikan layanan penyediaan fasilitas publik	Program Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah	Kelompok sasaran yang menerima insentif pajak	Kelompok sasaran	12	15	Otonomi	Disyajak	
6	Meningkatkan sinergitas pembiayaan pusat, provinsi, daerah	Meningkatkan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat	Pembiayaan bersama Pemerintah Pusat dan PemProv. Jawa Barat dan Pemkot Bandung dalam mendanai proyek infrastruktur skala nasional	Program Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Proyek yang pendanaannya melibatkan APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Bandung	Jumlah Proyek	NA	2	Pekerjaan Umum	Distarcip, DBM, Dishub	Bappeda, DPKAD
7	Penggunaan instrumen pembiayaan non-konvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta)	Mengembangkan Sistem dan prosedur kemitraan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur	Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pendanaan pembangunan	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah perusahaan swasta yang berkontribusi dalam pembangunan kota	Jumlah Perusahaan	35	270	Otonomi	Bagian Perekonomian	
Tujuan 2: Membangun perekonomian kota yang maju											
8	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi	Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder penanaman modal	Fasilitasi dan mediasi antara pelaku usaha Kota Bandung dengan Investor	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	tingkat realisasi kerjasama dan investasi	Jumlah	13	63	Penanaman Modal	Bappeda	

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							2013	2018		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembentukan & Penguatan <i>Task Force</i> atau Representasi <i>Promotion Business Centre</i> dlm menangani pangsa & peluang investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	3.594.506.701.725,17	4.756.196.839.426	Penanaman Modal	Bappeda	
		Optimalisasi kinerja pelayanan perijinan investasi	Penyederhanaan prosedur perijinan serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayanan perijinan	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	index	NA	3,4	Penanaman Modal	BPPT	
9	Meningkatnya kontribusi perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap PAD	Membentuk perusahaan patungan untuk beberapa layanan jasa umum dan barang publik	Pengembangan Usaha Daerah yang sehat dan Profitable	Program Pengembangan Usaha Daerah	Terwujudnya perusahaan milik daerah yang fungsional dan berdaya saing	Unit	NA	1 Perusaha-an milik daerah	Otonomi	BUMD	Bagian Perekonomi-an, Bappeda
				Program Penelitian dan Pengembangan	Bahan Kebijakan Pembentukan Perushan Patungan	Dokumen	1	2	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	
10	Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif	Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif	Menciptakan infrastruktur yang memadai baik fisik maupun sosial bagi pengembangan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Infrastruktur Kota Kreatif	Infrastruktur Penunjang Kota Kreatif	Kegiatan	0	15	penataan ruang, pekerjaan umum, lingkungan hidup	Distarcip	DBMP, Diskamtam, Dishub, Disbudpar, Diskominfo
			Fasilitasi kegiatan Komunitas kreatif terkait aktivasi subsektor ekonomi kreatif	Program pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis	Jumlah Aktivasi Pengembangan SubSektor Ekonomi Kreatif	Sub sektor	3	15	UKM, pemerintahan umum, perencanaan pembangunan	Bagian Perekonomian	Bappeda, Bagian Hukum, Dinas KUKM Indag
			Mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melalui penguatan Quadro Helix untuk mendukung pencapaian Bandung Kota kreatif	Program Penelitian dan Pengembangan	Dokumen kajian pengembangan sistem pendukung pencapaian Bandung Kota Kreatif	kegiatan	NA	5 kegiatan	pemerintahan umum, perencanaan pembangunan,	Bappeda	Bagian Perekonomi-an, Dinas KUKM Indag
			Menciptakan sistem pendukung kreatif melalui pendidikan dan pemberdayaan komunitas kreatif	Program Peningkatan peran serta kepemudaan		kegiatan	NA	5 kegiatan	pendidikan, kebudayaan, pemberdayaan, kepemudaan dan olah raga	Bagian Perekonomian	Disdik, Disbudpar, BKBPM, Dispora

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							2013	2018		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Peningkatan peran industri kecil menengah, sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif & pelaku usaha kreatif	Program pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis	Terwujudnya pengembangan industri kreatif	Unit usaha	100	750	Industri	Dinas KUKM & Perindag	
11	Berkembangnya koperasi dan UMKM	Memberikan dukungan pembiayaan usaha dan formalisasi usaha bagi pelaku ekonomi	Fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, dan standarisasi internasional dalam produksi	Program pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah IMKM yang di fasilitasi	Industri kecil menengah	120	1.045	Industri	Dinas KUKM & Perindag	
				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM	UMKM binaan	Unit usaha	150	1,087	UKM	Dinas KUKM & Perindag	
		Meningkatnya kontribusi dan berkembangnya Koperasi dan UMKM	peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase	81,14 %	88,82 %	koperasi	Dinas KUKM & Perindag	
12	Optimalisasi Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing	Optimalisasi daya dukung potensi pariwisata yang berdaya saing serta pengembangan promosi pariwisata yang efektif, kreatif, terarah, terpadu dan berkelanjutan	Optimalisasi pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak maupun elektronik, website, peningkatan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, pameran dan peningkatan kemitraan promosi wisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	5.257.439	6.035.475	Pariwisata	Disbudpar	
		Penguatan dan pengembangan destinasi pariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata	lokasi	5	30	Pariwisata	Disbudpar	
		Mengembangkan Kota Bandung sebagai Kota MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions)	Mengembangkan sarana prasarana utama dan pendukung bagi pengembangan MICE yang dapat secara signifikan menjadi faktor penarik wisatawan serta <i>trigger</i> bangkitan ekonomi lainnya.								

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							2013	2018		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan 3: Membangun perekonomian kota yang berkeadilan											
13	Meningkatkan kesempatan kerja	Pemberian kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja produktivitas tenaga kerja	peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Rasio Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	Persentase	39%	54%	Ketenagakerjaan	Disnaker	
		Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja	Peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, selesai melalui Perjanjian Bersama (PB)	Persentase	61,32%	58%	Ketenagakerjaan	Disnaker	
		Mengupayakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan Baru	Peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja	Program Peningkatan kesempatan kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah	0	250.000	Ketenagakerjaan	Disnaker	
			Penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan mengembangkan koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah lapangan pekerjaan	Jumlah	0	4210	KUKM	Dinas KUKM & Perindag	
			Penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan pada sektor industri kecil & menengah	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah lapangan pekerjaan				KUKM	Dinas KUKM & Perindag	
		Menciptakan wirausaha baru	Memfasilitasi wirausaha pemula	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Jumlah wirausaha	Orang	0	35.000	KUKM	Dinas KUKM & Perindag	
				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Jumlah wirausaha	Orang			KUKM	Dinas KUKM & Perindag	
				Program Peningkatan	Jumlah wirausaha	Orang			KUKM	Dinas KUKM & Perindag	

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PELAKSANA	
							2013	2018		SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri							
			Menciptakan Wirausaha Pertanian	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Olahan Hasil Pertanian	Orang	0	1000	Pertanian	Distan KP	
			Menumbuhkan calon wirausaha baru	Program Pendidikan Menengah	Siswa SMK yang disiapkan menjadi wirausaha baru	Orang	0	40.000	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
				Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Pemuda yang dilatih menjadi wirausaha	Orang	0	7.500	Pemuda dan Olahraga	Dispora	
			Pelatihan bagi calon wirausaha baru	Program Peningkatan penempatan kerja	Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja dan mandiri	Orang	0	7.500	Ketenagakerjaan	Disnaker	
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang	0	2,452	Ketenagakerjaan	Disnaker	
					Jumlah lowongan kerja	Orang	0	6,989	Ketenagakerjaan	Disnaker	
14	Mendorong upaya peningkatan daya beli masyarakat	Mendorong investasi yang bersifat padat karya	peningkatan akses teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi Koperasi & UMKM	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	Bertambahnya UMKM Binaan	Unit	150	1.087	UKM	Dinas KUKM & Perindag	
		Fasilitasi dan intermediasi pengembangan KUMKM	Meningkatkan peran KUMKM dalam perekonomian	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	Bertambahnya UMKM Binaan	Unit	150	1087	UKM	Dinas KUKM & Perindag	
		Penguatan KUM KM melalui peningkatan kompetensi dan kualitas SDM, jaringan usaha, perluasan aspek permodalan dan daya saing produk KUMKM.	Fasilitasi dan intermediasi pengembangan KUMKM	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Meningkatnya UMKM yang berdaya saing, meningkatnya daya tawar, daya tarik produk UMKM	Unit	4.581	6.268	UKM	Dinas KUKM & Perindag	

Laju pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia terus menunjukkan geliat yang menggembirakan. Berdasarkan data statistik ekonomi kreatif yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan ekonomi kreatif tahun 2013 mencapai 5,76 persen dan laju pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5,74 persen. Sektor kreatif ini mampu menyedot tenaga kerja 11,872 persen dari total serapan tenaga kerja nasional.

Ada tiga sektor unggulan di bidang industri kreatif yakni kuliner, fashion dan kerajinan yang menjadi penyumbang PDRB terbesar. Ketiga sektor unggulan tersebut diatas secara faktual dimiliki oleh Kota Bandung yang begitu ramai dikenal masyarakat luas sebagai pusat kuliner, fashion bahkan memiliki sentra-sentra kerajinan unggulan. Ekonomi kreatif akan dapat berkembang dengan pesat bilamana interaksi *triple helix* yang terdiri dari intelektual, bisnis dan pemerintah sebagai para aktor utama penggerak roda perekonomian dapat terus membangun sinergi dalam melahirkan kreativitas, ide ilmu pengetahuan dan teknologi yang vital bagi bertumbuhnya industri kreatif. Hubungan yang erat, saling menunjang, berkolaborasi dan simbiosis mutualisme antara ketiga aktor diatas, akan menentukan pengembangan ekonomi kreatif yang kokoh dan berkesinambungan. Tentunya dalam kerangka landasan dan pilar-pilar model ekonomi kreatif.

Sejalan dengan kebijakan nasional, Kota Bandung memiliki hasrat yang sama untuk mengembangkan industri-industri ekonomi kreatif yang dikembangkan di basis masyarakat secara mandiri dan tidak selalu tergantung pada anggaran pemerintah daerah. Sinergitas antara tiga pilar utama intelektual, bisnis, dan pemerintah diharapkan pada gilirannya dapat menumbuhkan sebuah ruang kreasi bersama sesuai dengan perannya masing-masing dalam memberikan sumbangsih nyata bagi pemberdayaan masyarakat. Sehingga peningkatan kesejahteraan warga kota secara bertahap akan dapat diwujudkan.

Indikasi Rencana Program Prioritas

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.

Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode atau sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada

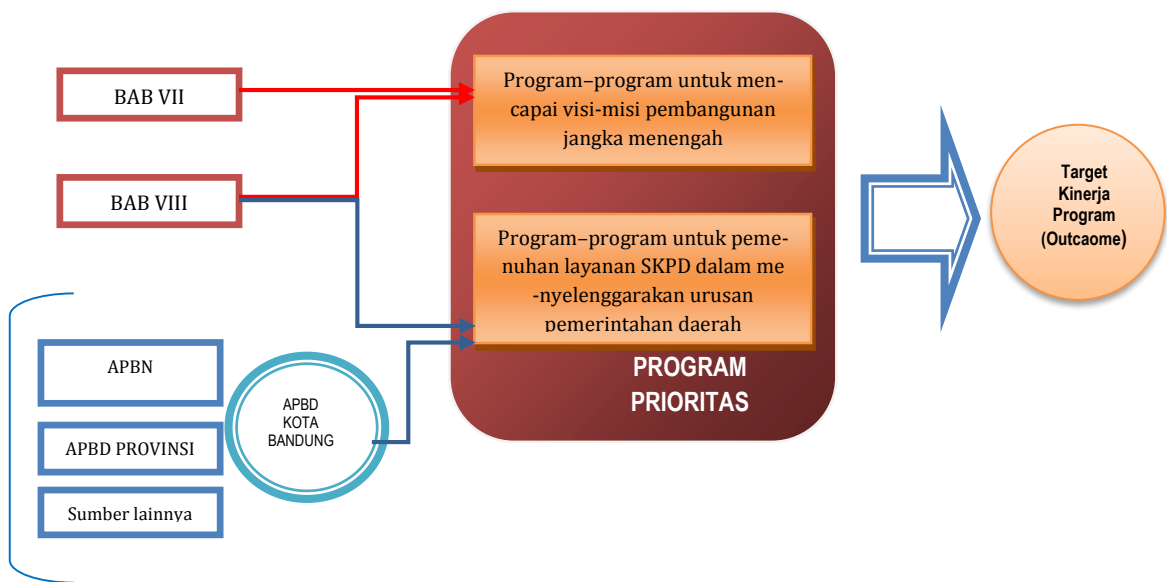
tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek atrategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Bandung berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kota Bandung, APBD Propinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat secara khusus diatur dalam Pasal 99

ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun SDM dan teknologi.



Gambar 8-1
Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra SKPD. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8-1
Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
1	DINAS PENDIDIKAN												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	3.091.984.900	100%	3.301.183.390	100%	3.426.143.474	100%	3.789.273.647	100%	4.188.716.837
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	1.804.229.000	100%	1.984.651.900	100%	2.109.611.984	100%	2.327.923.693	100%	2.568.066.573
	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Pegawai yang di Lantik dan setijab yang terfasilitasi	100%	100%	75.000.000	100%	82.500.000	100%	90.750.000	100%	99.825.000	100%	109.807.500
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase Sumber Daya Aparatur Memiliki kompetensi Sesuai Bidanganya	55%	65%	1.569.265.000	68%	1.726.191.500	72%	1.851.151.584	76%	2.041.032.649	80%	2.249.901.821
	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	NA	100%	887.850.000	100%	976.635.000	100%	1.101.595.084	100%	1.181.728.350	100%	1.299.901.185
		Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	NA	100%		100%		100%		100%		100%	
		Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	CC	CC		CC		B		B		A	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	55%	65%	3.876.750.000	70%	4.264.425.000	87%	4.485.709.245	97%	4.954.795.995	97%	5.470.791.420
		APM PAUD	N/A	37%		58%		65%		72%		78%	
		Kegiatan keagamaan di PAUD	N/A	65%		69%		76%		80%		85%	
		Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang PAUD	50%	55%		62%		68%		76%		80%	
		implementasi Kurikulum, Materi dan Metode Pembelajaran yang Berwawasan Lingkungan dan Warisan budaya Daerah sebagai Perekat budaya Nasional	N/A	20%		28%		35%		40%		50%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun	APK SD/MI/Paket A (Termasuk siswa dari luar kota Bandung)	131,05%	131,05 %	78,760,047,547	131,05%	86,636,053,184 (17,968,260,000 dari banprov)	131,05%	172.959.413.093 (23,981,385,000 dari banprov)	131,05%	190.286.623.730 (28,731,916,250 dari banprov)	131,05%	209.346.555.431 (21,095,399,062 dari banprov)
		APK SD/MI/Paket A (khusus siswa dari kota Bandung)	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		APM SD/MI/Paket A (Termasuk siswa dari luar kota Bandung)	123,13%	123,13 %		123,13%		123,13%		123,13%		123,13%	
		APM SD/MI/Paket A (khusus siswa dari kota Bandung)	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		APK SMP/MTs/ Paket B (Termasuk siswa dari Luar Kota Bandung)	116,16%	116,16 %		116,16%		116,16%		116,16%		116,16%	
		APK SMP/MTs/ Paket B (Termasuk siswa dari Luar Kota Bandung)	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		APM SMP/MTs/ Paket B (Termasuk siswa dari Luar Kota Bandung)	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		APM SMP/MTs/ Paket B (Termasuk siswa dari Luar Kota Bandung)	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Kegiatan Keagamaan di Pendidikan Dasar 9 Tahun	N/A	65%		69%		76%		80%		85%	
		Rehabiltas Berat SD/SMP	0/66	100/8		102/8		106/8		105/8		105/9	
		Rehabilitasi Sedang SD/SMP	215/167	56/31		56/31		56/31		58/31		60/32	
		Pembangunan unit sekolah baru SMP Negeri	-1	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit	
		Pembangunan unit sekolah baru SMP Negeri (kegiatan lanjutan)	2 Unit	2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit	
		Cakupan Peningkatan kualitas sarana & Prasarana penunjang pendidikan SD/MI	80%	82%		84%		86%		88%		90%	
		Cakupan Peningkatan kualitas sarana & prasarana penunjang pendidikan SMP/MTs	90%	92%		94%		96%		98%		100%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
		implementasi kurikulum, materi dan metode pembelajaran yg berwawasan lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya Nasional	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang, Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	SD: 85,2%	SD: 86,2%		SD: 87,22%		SD: 89,25%		SD: 90,00%		SD: 92,00%	
			SMP: 97,01%	SMP: 97,2%		SMP: 97,4%		SMP: 97,60%		SMP: 98,00%		SMP: 99,00%	
		Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik,	56,28%	58,30%		60,50%		65,00%		70,00%		75,50%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA		Target Kinerja RPJMD	DANA		Target Kinerja RPJMD	DANA		Target Kinerja RPJMD	DANA	
				2014			2015			2016			2017		
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9			
		Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	SD: 98,54%	SD: 98,6%		SD: 87,22%		SD: 99,00%		SD: 99,50%		SD: 100%			
			SMP: 97,01%	SMP: 97,2%		SMP: 97,4%		SMP: 97,60%		SMP: 98,00%		SMP: 99,00%			
		Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	97,93%	98,00%		98,30%		98,60%		99,00%		100,00%			
		Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	97,17%	97,25%		97,60%		98,50%		99,00%		100,00%			
		Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	99,27%	99,30%		99,50%		99,70%		99,80%		100,00%			

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35%) dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikasi pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	80,57%	80,70%		80,90%		90,00%		90,60%		90,90%	
		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1/D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris	97,57%	97,80%		97,90%		98,00%		98,40%		99,00%	
		Di setiap Kab/ Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik	99,15%	99,25%		99,45%		99,60%		99,75%		99,85%	
		Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 / D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik	99,20%	99,30%		99,45%		99,60%		99,80%		99,90%	
		Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik	100%	100%		100%		100%		100%		100%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
		Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	SD: 98,54%	SD: 99,8%		SD: 87,22%		SD: 99,90%		SD: 99,95%		SD: 99,95%	
			SMP: 97,01%	SMP: 97,2%		SMP: 97,4%		SMP: 98,80%		SMP: 98,90%		SMP: 99,30%	
		Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	93,16%	93,60%		94,00%		94,70%		95,00%		95,60%	
		Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	95,55%	95,75%		96,00%		96,60%		97,00%		97,55%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
		Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA	97,69%	97,80%		98,00%		98,60%		99,80%		99,90%	
		Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi	SD: 98,54%	SD: 100%		SD: 87,22%		SD: 100%		SD: 100%		SD: 100%	
			SMP: 97,01%	SMP: 97,2%		SMP: 97,4%		SMP: 100%		SMP: 100%		SMP: 100%	
		Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan	SD: 98,54%	SD: 99,25%		SD: 87,22%		SD: 99,35%		SD: 99,40%		SD: 99,60%	
			SMP: 97,01%	SMP: 97,2%		SMP: 97,4%		SMP: 90,45%		SMP: 95,45%		SMP:99, 45%	
		Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut: a) Kelas I-II: 18 jam per minggu; b) Kelas III: 24 jam per minggu; c) Kelas IV-VI: 27 jam per minggu; d) Kelas VII-IX:27 jam per minggu;	100%	100%		100%		100%		100%		100%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
		Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	SD: 98,54%	SD: 98,92%		SD: 98,94%		SD: 98,96%		SD: 98,98%		SD: 99,00%	
			SMP: 86,23%	SMP: 88,00%		SMP: 89,00%		SMP: 90,00%		SMP: 95,00%		SMP: 99,00%	
		Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	SD:99,51%	SD: 99,60%		SD: 99,70%		SD: 99,80%		SD: 99,90%		SD: 99,99%	
			SMP: 97,01%	SMP: 97,2%		SMP: 98,5%		SMP: 99,00%		SMP: 99,45%		SMP: 99,90%	
		Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	100%	100%		100%		100%		100%		100%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
		Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kab./kota setiap akhir semester	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	SD: 98,54%	SD: 98,70%		SD: 98,94%		SD: 98,90%		SD: 99,00%		SD: 99,25%	
			SMP: 97,33%	SMP: 97,50%		SMP: 98,5%		SMP: 98,00%		SMP: 99,00%		SMP: 99,90%	
	Program Pendidikan Menengah	APK SMA/MA/SMK/Paket C (Khusus Kota Bandung)	98,96%	99,08%	31,640,933,751	99,50%	34,805,027,126	99,6%	38.080.371.584	97,62%	41.908.924.568	99,00%	46.120.332.850
		APM SMA/MA/SMK/Paket C (Khusus Kota Bandung)	90,59%	92,65%		93,50%		95,6%		97,62%		99,00%	
		Jumlah rintisan sekolah inklusif SMA	8 sekolah	4 sekolah		4 sekolah		4 sekolah		4 sekolah		6 sekolah	
		Rehabilitasi Berat SMA/SMK	264	4		5		5		5		4	
		Rehabilitasi sedang SMA/SMK	5	6		7		8		9		10	
		Ruang Kelas baru SMA/SMK	23	25		26		27		28		28	
		Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA/SMK (kegiatan lanjutan)						SMA:1, SMK:1					
		Jumlah SMK yang bekerjasama dgn dunia industri & dunia usaha	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Peningkatan pendidikan kewiraswastaan yang berbasis industri kreatif	65%	77%		82%		89%		95%		100%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA		Target Kinerja RPJMD	DANA		Target Kinerja RPJMD	DANA		Target Kinerja RPJMD	DANA	
				2014			2015			2016			2017		
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9			
		Kegiatan keagamaan di pendidikan menengah	N/A	65%			69%			76%			80%		
		Cakupan peningkatan kualitas sarana & prasarana penunjang pendidikan SMA/MA/SMK	95%	96%			98%			99%			100%		
		Implementasi kurikulum, materi dan metode pembelajaran yang berwawasan lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya nasional	SMA: 136 sekolah, SMK: 132 sekolah	SMA: 138 sekolah, SMK: 134 sekolah			SMA: 140 sekolah, SMK: 136 sekolah			SMA: 142 sekolah, SMK: 137 sekolah			SMA: 143 sekolah, SMK: 138 sekolah		
	Pendidikan Non Formal	APK pendidikan non formal	99,58%	99,70%	4,483,200,000		99,80%	4,931,520,000		99,9%	5.219.513.745		100%	5.761.980.945	
		APM Pendidikan Non formal	50%	54%			60%			67%			72%		
		Sertifikasi pendidikan non formal & informal	10 lembaga	15 lembaga			20 lembaga			25 lembaga			30 lembaga		
		Peningkatan aksesibilitas pendidikan nonformal)	65%	70%			78%			84%			90%		
		Cakupan peningkatan kualitas sarana & prasarana penunjang pendidikan nonformal	65%	69%			73%			78%			80%		
		Implementasi kurikulum, materi dan metode pembelajaran yang berwawasan lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya nasional	260 lembaga	270 lembaga			280 lembaga			290 lembaga			300 lembaga		
	Program Peningkatan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tingkat kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan	89%	93%	3,285,700,000		95%	3,614,270,000		98%	3.770.538.745		100%	4.168.108.445	
		Tingkat sertifikasi tenaga pendidik	89%	92%			94%			96%			99%		
	Program Manajemen pelayanan Pendidikan	Tersedianya sistem informasi berbasis ICT di Dikdas	42 sekolah	205 sekolah	1,126,387,500		205 sekolah	1,239,026,250		206 sekolah	1.362.928.875		205 sekolah	1.499.221.763	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
		Jumlah guru honorer dan guru yayaan yang memperoleh bantuan	20,000 orang	20,000 orang		20,000 orang		20,000 orang		20,000 orang		20,000 orang	
		Jumlah rintisan sekolah inklusif SMP	11 sekolah	3 sekolah		4 sekolah		4 sekolah		4 sekolah		4 sekolah	
		Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip MBS	70%	76%		80%		87%		92%		100%	
		Jumlah sekolah yang melaksanakan kemitraan global	4	-		1		1		1		1	
		Jumlah sekolah yang telah mengacu pada standar pendidikan nasional	800 sekolah	107 sekolah		107 sekolah		107 sekolah		107 sekolah		107 sekolah	
	Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis	Persentase angka putus sekolah SD/MI	0,01%	0,01%	65,938,350,100	0,01%	72,532,185,110	0,01%	79.654.831.955	0,01%	87.633.372.317	0,01%	96.409.766.715
		Persentase angka putus sekolah SMP/MTs	0,02%	0,01%		0,01%		0,01%		0,01%		0,01%	
		Persentase angka putus sekolah SMA/SMK/MA	0,05%	0,02%		0,02%		0,02%		0,02%		0,02%	
		Persentase siswa yg menyelesaikan wajar Dikmen 12 Tahun	96,96%	97,48%		97,80%		98,8%		100,00%		100,00%	
		Jumlah			196,539,697,798		216,093,668,460		314.112.559.365		345.652.811.099		380.377.114.248
2	DINAS KESEHATAN												
	Program pelayanan administrasi perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	24,138,406,210	100%	23,041,927,430	100%	25.248.202.707	100%	27.782.814.724	100%	30.561.096.197
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	12,870,471,800	100%	6,755,371,220	100%	8.961.646.497	100%	9.704.737.331	100%	10.675.211.064
	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase Tingkat disiplin pegawai	NA	90%	568,075,000	90%	556,253,720	90%	611.879.092	90%	673.067.001	90%	740.373.701
	program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD	persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	967,983,045	100%	771,753,420	100%	848.928.762	100%	933.821.638	100%	1.027.203.802

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	NA	100%	704,221,725	100%	530,015,120	100%	583.016.632	100%	641.318.295	100%	705.450.125
		Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	NA	100%		100%		100%		100%		100%	
		Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	CC	CC		CC		B		B		A	0
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	100%	100%	19,320,553,370	100%	20,286,581,040	100%	22.217.321.678	100%	24.448.845.592	100%	26.893.730.151
	program upaya kesehatan masyarakat	persentase indikator pelayanan kesehatan yang mencapai target	100%	100%	19,852,623,575	100%	20,348,939,170	100%	22.279.679.808	100%	24.518.063.117	100%	26.969.869.429
		cakupan pelayanan anak sekolah	40%	40%		41%		43%		44%		45%	0
	program pengawasan obat dan makanan	Industri rumah tangga Pangan yang memiliki sertifikat P-IRT	75%	100%	250,000,000	100%	275,000,000	100%	302.500.000	100%	332.750.000	100%	366.025.000
		sarana pelayanan kefarmasian yang dibina	30%	30%		32%		33%		34%		35%	0
	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah RW Siaga Aktif	597RW	778 RW	1,662,344,125	959 RW	1,745,461,300	1140 RW	1.822.089.964	1321 RW	2.014.090.707	1501 RW	2.215.499.778
	Program pengembangan lingkungan sehat	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	63%	63%	1,990,175,000	70%	2,061,492,235	75%	2.138.120.899	80%	2.364.885.045	85%	2.601.373.550
		Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat	55%	55%		60%		65%		70%		75%	
		Persentase penduduk yang menggunakan Jamban sehat	60%	60%		65%		70%		75%		80%	
		Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	13 Kel	13 Kel		30 kel		50 kel		75 Kel		100 Kel	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program pencegahan & penanggulangan penyakit menular	orang yang berumur 15 Th atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV	0,40%	1%	1,257,361,250	1,50%	1,320,229,320	2%	1.354.334.786	2,50%	1.499.560.011	3%	1.649.516.012
		Kecamatan yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi pencegahan dan penularan	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Penderita penyakit menular lainnya yang ditangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikat ijin	100%	100%	390,182,300	100%	897,000,000	100%	921.414.167	100%	1.020.084.167	100%	1.122.092.584
		Fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat ijin	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Puskesmas terakreditasi	4	8		24		40		56		73	
	program pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu & jaringannya	Jumlah puskesmas	73	74	14,728,908,895	77	16,201,799,700	80	17.724.062.204	82	19.506.260.171	84	21.456.886.188
	program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang ditangani sarana kesehatan (RS) di kab/kota	97%	100%	569,175,000	100%	626,092,500	100%	688.701.750	100%	757.571.925	100%	833.329.118
	program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	cakupan pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia	54%	54%	265,694,150	56%	292,263,565	58%	321.489.922	60%	353.638.914	62%	389.002.805
	program pengawasan & pengendalian kesehatan masyarakat	Tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	15%	15%	517,000,000	25%	568,700,000	35%	625.570.000	45%	688.127.000	55%	756.939.700
	program pelayanan kesehatan dasar				7,606,787,250		8,124,757,164		9.647.019.668		10.540.742.956		11.594.817.252
		Cakupan Ibu Hamil K4	95%	95%		95%	95%			95%		95%	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	80%		80%		80%		80%		80%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%	90%		90%		90%		90%		90%	
		Cakupan pelayanan nifas	80%	90%		90%		90%		90%		90%	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	5 UPT	5 UPT		6 UPT		7 UPT		8 UPT		9 UPT	
		Cakupan kunjungan bayi	90%	90%		90%		90%		90%		90%	
		Cakupan pelayanan anak balita	90%	90%		90%		90%		95%		95%	
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase balita ditimbang berat badannya D/S	75%	75%		80%		85%		90%		90%	
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Cakupan pnjaringan kesehatan siswa kelas 1 SD & sederajat	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Cakupan Desa/Kelurahan UCI	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Cakupan peserta KB aktif	67,80%	67,80%		68,80%		69,30%		69,80%		70,30%	
		Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
		Cakupan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100,000 penduduk < 15 th	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program pelayanan kesehatan rujukan	Cakupan Penderita DBD yang ditangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Cakupan Penemuan Penderita Diare	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100%	100%	111,963,500,000	100%	93,963,500,000	100%	103.261.932.534	100%	113.597.917.534	100%	124.957.709.288
	program perencanaan, pengembangan dan evaluasi pembangunan kesehatan				2,652,000,000		3,775,000,000		4.054.582.534		4.469.832.534		4.916.815.788
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase dokumen evaluasi pembangunan kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase dokumen data dan informasi pemb, Kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program Penyelidikan epidemiologi & penanggulangan KLB,	Cakupan desa/ kelur, mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan <24 jam	100%	100%	510,492,500	100%	545,253,529	100%	599.778.882	100%	659.756.770	100%	725.732.447
		Jumlah			222,785,955,195		202,687,390,433		224.212.272.487		246.507.885.433		271.158.673.976
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UJUNG BERUNG												
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,328,000,000	100%	1,570,800,000	100%	1.727.880.000	100%	1.900.668.000	100%	2.090.734.800
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	100%	100%	1,000,000,000	100%	2,500,000,000	100%	2.563.469.048	100%	2.819.815.953	100%	3.101.797.548

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program peningkatan pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan pelayanan RS	100%	100%	40,000,000,000	100%	44,000,000,000	100%	47.952.415.987	100%	52.747.657.585	100%	58.022.423.344
	Program Standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan memenuhi standar	100%	100%	100,000,000	100%	150,000,000	100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pelanggaran disiplin pegawai	0%	0%	251,300,000	0%	276,430,000	0%	304.073.000	0%	334.480.300	0%	367.928.330
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD	Persentase sumber daya aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	850,000,000	100%	750,000,000	100%	825.000.000	100%	907.500.000	100%	998.250.000
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur			-	100%	125,000,000	100%	137.500.000	100%	151.250.000	100%	166.375.000
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan akibat dampak asap rokok	100%	100%	1,346,000,000	100%	1,346,000,000	100%	1.480.600.000	100%	1.628.660.000	100%	1.791.526.000
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata	Cakupan ketersediaan sarana prasarana rumah sakit yang memadai	100%	3 Paket, 100%	21,442,300,000	1 unit, 100%	28,000,000,000	1 unit, 100%	30.352.415.987	1 unit, 100%	33.387.657.585	1 unit, 100%	36.726.423.344
	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tingkat promosi kesehatan rumah sakit	100%	100%	50,000,000	100%	55,000,000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	73.205.000
		Jumlah			66,367,600,000		78,773,230,000		85.568.854.022		94.125.739.424		103.538.313.366
4	RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK												
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan kompetensi dan pengetahuan pegawai	15%	20%	200,000,000	30%	220,000,000	40%	242.000.000	50%	266.200.000	60%	292.820.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,578,370,000	100%	2,318,000,000	100%	2.363.269.048	100%	2.599.595.953	100%	2.859.555.548
	Program peningkatan sarana & prasarana aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	103,200,000	100%	113,520,000	100%	124.872.000	100%	137.359.200	100%	151.095.120
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin Pegawai Negeri Sipil	-	-	0	100%	430,000,000	-	473.000.000	-	520.300.000	100	572.330.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD	Persentase sumber daya aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	242.000.000	100%	266.200.000	100%	292.820.000
	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase layanan kesehatan yang memenuhi Std	terakredita si 5 pelayanan	100%	250,000,000	100%	50,000,000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/RS Paru/RS Mata	Cakupan layanan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit	100%	100%	700,000,000	100%	65,000,000,000	100%	71.052.415.987	100%	78.157.657.585	100%	85.973.423.344
		Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	100%	100%	2,600,000,000	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0
	Program obat & Perbekalan kesehatan	Cakupan layanan obat & perbekalan kesehatan	100%	100%	3,000,000,000	100%	3,300,000,000	100%	3.443.469.048	100%	3.787.815.953	100%	4.166.597.548
	Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD	Cakupan Kesehatan ibu dan anak	100%	100%	20,806,117,000	100%	21,155,278,956	100%	22.823.222.838	100%	25.105.545.122	100%	27.616.099.634
	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase layanan kesehatan yang memenuhi standar	0%	-	0	100%	700,000,000	-	770.000.000	-	847.000.000	-	931.700.000
	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Penerapan promosi kesehatan di rumah sakit	100%	100%	50,000,000	100%	55,000,000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	73.205.000
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	100%	100%	2,068,515,500	100%	2,300,000,000	100%	2.343.469.048	100%	2.577.815.953	100%	2.835.597.548
		Jumlah			32,556,202,500		95,861,798,956		103.993.217.969		114.392.539.766		125.831.793.743
5	RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT												
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Kenaikan jumlah kunjungan pasien pertahun	1,80%	3-5%	3,850,000,000	3-5%	4,235,000,000	3-5%	4.658.500.000	3-5%	5.124.350.000	3-5%	5.636.785.000
	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Tersedianya sarana dan prasarana Rumah Sakit	50%	60%	8,500,000,000	70%	8,420,000,000	80%	8.565.708.051	90%	9.422.278.856	100%	10.364.506.742
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	70%	85%	300,000,000	85%	-	100%	0	100%	0	100%	0

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan	Terstandarnya pelayanan Rumah Sakit	40%	60%	400,000,000	80%	250,000,000	85%	275.000.000	95%	302.500.000	100%	332.750.000
	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	300,000,000	100%	700,000,000	100%	1.299.725.107	100%	1.429.697.618	100%	1.572.667.380
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Persentase pegawai mendapatkan pelatihan 20 jam pertahun	63%	64%	-	64%	150,000,000	64%	165.000.000	66%	181.500.000	67%	199.650.000
		Jumlah			13,350,000,000		13,755,000,000		14.963.933.158		16.460.326.474		18.106.359.121
6	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU												
	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	3 (Baik)	3,225,250,000	3,1 (Baik)	3,300,000,000	3,2 (Baik)	3.465.000.000	3,3 (Sangat Baik)	3.811.500.000	3,4 (Sangat Baik)	4.192.650.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,163,105,000	100%	2,400,000,000	100%	2.581.208.000	100%	2.839.329.000	100%	3.123.262.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	12,742,045,000	100%	2,692,765,000	100%	3.362.208.000	100%	3.698.429.000	100%	4.068.272.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100%	100%	256,400,000	100%	285,000,000	100%	254.708.000	100%	280.179.000	100%	308.197.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	418,200,000	100%	590,000,000	100%	590.208.000	100%	649.229.000	100%	714.152.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	NA	100%	170,000,000	100%	190,000,000	100%	150.208.000	100%	165.229.000	100%	181.752.000
		Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah		100%		100%		100%		100%		100%	
		Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	CC	CC		CC		B		B		A	
	Program Pengembangan data Informasi	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT	100%	100%	104,000,000	100%	115,000,000	100%	126.500.000	100%	139.150.000	100%	153.065.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100%	100%	71,000,000	100%	80,000,000	100%	88.000.000	100%	96.800.000	100%	106.480.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan BPPT	2 dok	2 dok	50,000,000	1 dok	55,000,000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	73.205.000
		Jumlah			19,200,000,000		9,707,765,000		10.678.541.000		11.746.395.000		12.921.035.000
7	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,691,069,800	100%	3.523.132.300	100%	2.591.907.875	100%	2.851.098.663	100%	3.136.208.529
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	3,520,823,200	100%	4.780.000.000	100%	3.595.909.489	100%	3.955.500.438	100%	4.351.050.482
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	0%	100%	218,400,000	0%	200.000.000	0%	264.264.000	0%	290.690.400	0%	319.759.440
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Persentase sumber daya aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	327,100,000	100%	550.000.000	100%	395.791.000	100%	435.370.100	100%	478.907.110
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	N/A	100%	200,000,000	100%	250.000.000	100%	242.000.000	100%	266.200.000	100%	292.820.000
		Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
		Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	CC	CC		CC		B		B		A	
	Program: Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Produktivitas tanaman padi	62,02	63,09 kw/ha	14,989,766,000	65,05 kw/ha	13.750.000.000	68,04 kw/ha	16.199.679.294	69,05 kw/ha	17.819.647.224	70 kw/ha	19.601.611.946
		Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Olahan Hasil Pertanian	N/A	100		150		200	0	250		300	
		Menurunnya komoditas produk pertanian yang tercemar	41 kasus	50 kasus		50 kasus		40 kasus	0	40 kasus		35 kasus	
		Produksi tanaman hias	185,500 pot/thn	186,500 pot/thn		188,500 pot/ tahun		190,000 pot/ tahun	0	192,000 pot/ tahun		195,000 pot/ tahun	
		Pohon Produktif	N/A	25,000 pohon		25,000 pohon		25,000 pohon	0	25,000 pohon		25,000 pohon	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Pameran Produk Pertanian	6 kali	7 kali	832,000,000	8 kali	1.500.000.000	8 kali	1.320.000.000	9 kali	1.452.000.000	9 kali	1.597.200.000
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Peningkatan produksi Ikan Konsumsi	2,500 ton	2,600 ton	1,067,500,000	2,630 ton	1.200.000.000	2,665 ton	1.650.000.000	2,705 ton	1.815.000.000	2,750 ton	1.996.500.000
		Peningkatan produksi ikan hias	721,700 ekor	821,700 ekor		921,700 ekor		1,021,700 ekor		1,121,700 ekor		1,121,700 ekor	
	Program Pencegahan & penanggulangan penyakit ternak	Kasus Penyakit Zoonosa di Kota Bandung	N/A	8 kasus	1,578,700,000	8 kasus	2.200.000.000	8 kasus	2.421.785.417	8 kasus	2.663.963.959	8 kasus	2.930.360.355
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi ternak Sapi	N/A	1,417 ekor	1,000,000,000	1,488 ekor	1,100,000,000	1,562 ekor	1.320.000.000	1,640 ekor	1.452.000.000	1,722 ekor	1.597.200.000
		Populasi ternak Domba	N/A	29,365 ekor		30,833 ekor		32,375 ekor	0	33,994 ekor		35,693 ekor	
	Program Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dalam %	87,8	89,60%	1,681,000,000	90,00%	2.050.000.000	90,30%	1.871.785.417	91,00%	2.058.963.959	91,90%	2.264.860.355
		Penguatan cadangan pangan ekuivalen beras	24 Ton	24 Ton		60 Ton		60 Ton	660.000.000	60 Ton	726.000.000	60 Ton	798.600.000
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	mutu tembakau (DBHCT)	100%	100%	318,641,000	100%	318,641,000	100%	350.505.100	100%	385.555.610	100%	424.111.171
									342.144.000		376.358.400		413.994.240
		Jumlah			30,825,000,000		31,421,773,300		33.225.771.593		36.548.348.752		40.203.183.627
8	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	5,071,480,000	100%	5,478,628,000	100%	5.602.223.156	100%	6.162.445.471	100%	6.778.690.018
	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2,219,920,000	100%	1,618,952,000	100%	1.780.847.200	100%	1.958.931.920	100%	2.154.825.112
	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	0%	100%	106,500,000	100%	117,150,000	0%	128.865.000	0%	141.751.500	0%	155.926.650
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	498,500,000	100%	548,350,000	100%	603.185.000	100%	663.503.500	100%	729.853.850

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	N/A	100%	220,000,000	100%	242,000,000	100%	266.200.000	100%	292.820.000	100%	322.102.000
		Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
		Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	CC	CC		CC		B		B		A	
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Apresiasi pemerintah terhadap seniman dan budayawan	61 Orang	10	1,985,470,000	10 Orang	2,184,017,000	10 Orang	2.239.204.117	10 Orang	2.463.124.529	10 Orang	2.709.436.982
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Perlindungan bangunan cagar budaya	100 BCB	137	1,566,780,000	100	1,723,458,000	100	1.732.589.217	100	1.905.848.139	100	2.096.432.953
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pagelaran dan festival seni budaya	65	60	5,516,925,000	60	6,068,617,500	60	6.251.211.606	60	6.876.332.766	60	7.563.966.043
	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Misi seni budaya	18	2	775,825,000	3	853,407,500	3	938.748.250	3	1.032.623.075	3	1.135.885.383
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan: Wisnus & Wisman	5,257,439	5,367,894	4,500,000,000	5,480,821	5,044,806,000	5.658.874	5.125.018.956	5.843.652	5.637.520.851	6.035.475	6.201.272.936
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata	5 ODTW	5 ODTW	3,200,100,000	5 ODTW	3,820,110,000	5 ODTW	4.038.906.417	5 ODTW	4.442.797.059	5 ODTW	4.887.076.765
					-		(750,000,000 dari banprov)				(750,000,000 dari banprov)		(750,000,000 dari banprov)
	Program Pengembangan Kemitraan	jumlah usaha pariwisata Non Hiburan	N/A	20	2,338,500,000	20	2,572,350,000	20	2.666.370.417	20	2.933.007.459	20	3.226.308.205
		Jumlah			28,000,000,000		30,271,846,000		31.373.369.336		34.510.706.269		37.961.776.896
9	DINAS TENAGA KERJA												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	936,736,380	100%	1,030,410,000	100%	1.133.451.000	100%	1.246.796.100	100%	1.371.475.710
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1,304,740,440	100%	1,435,214,000	100%	1.578.735.400	100%	1.736.608.940	100%	1.910.269.834
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	189,074,350	100%	207,981,000	100%	228.779.100	100%	251.657.010	100%	276.822.711

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Persentase sumber daya aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	544,630,000	100%	599,093,000	100%	659.002.300	100%	724.902.530	100%	797.392.783
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	N/A	100%	236,000,000	100%	286,000,000	100%	314.600.000	100%	346.060.000	100%	380.666.000
		Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
		Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	CC	CC		CC		B		B	0	A	0
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah orang yg dilatih mandiri	860	1120	1,521,800,000	1,34	5,629,690,313	1,52	5.670.462.950	1,68	6.237.509.245	1,84	6.861.260.170
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	2,452	2,532	6,511,227,830	2,615	4,189,026,201	2.697	4.346.785.488	2.743	4.781.464.037	2.786	5.259.610.441
		Jumlah lowongan kerja	6,989	3000		10		11		12		14	0
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	65 kasus	60 kasus	4,027,791,000	56 Kasus	4,503,950,000	57 Kasus	4.693.201.667	58 Kasus	5.162.521.834	58 Kasus	5.678.774.017
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Penempatan Transmigran	3KK	8 KK	615,500,000	10 KK	715,000,000	10 KK	786.500.000	11 KK	865.150.000	12 KK	951.665.000
	Program Transmigrasi Regional	Jumlah penyuluhan transmigrasi	100 Orang	180 Orang	112,500,000	180 Orang	123,750,000	180 Orang	136.125.000	180 Orang	149.737.500	180 Orang	164.711.250
		Jumlah			16,000,000,000		18,720,114,514		19.547.642.906		21.502.407.197		23.652.647.916
10	BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.711.375.000	100%	3.347.000.000	100%	1.826.000.000	100%	2.008.600.000	100%	2.209.460.000
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.595.000.000	100%	3.410.000.000	100%	1.094.000.000	100%	1.203.400.000	100%	1.323.740.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	140.000.000	100%	235.000.000	0%	296.800.000	100%	326.480.000	0%	359.128.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	230.000.000	100%	500.000.000	100%	509.000.000	100%	559.900.000	100%	615.890.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	N/A	100%	500.000.000	100%	865.000.000	100%	467.500.000	100%	514.250.000	100%	565.675.000
		Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
		Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	CC	CC		CC		B		B		A	
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi Udara	Tingkat kualitas udara perkotaan memenuhi baku mutu udara ambien	25%	30%	300.000.000	35%	350.000.000	60%	385.000.000	65%	423.500.000	70%	465.850.000
		Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca	2%	2%		2%		95%		95%		100%	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penanganan pengaduan kasus lingkungan	100%	100%	8.049.480.000	100%	9.050.000.000	1 Dokumen Laporan	9.246.362.925	1 Dokumen Laporan	10.170.999.218	1 Dokumen Laporan	11.188.099.140
		Kegiatan & atau usaha memenuhi tertib administrasi & teknis pengelolaan lingkungan	50%	70%		75%							
	Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH	Informasi lingkungan hidup Kota Bandung mudah diakses		3 dok	1.918.000.000	3 dok	2.450.000.000	3 Media	1.430.000.000	3 Media	1.573.000.000	3 Media	1.730.300.000
	Program pembinaan & pengembangan bidang energi& ketenagalistrikan	Persentase tindak lanjut hasil audit energi, masterplan rencana pengelolaan bidang energi, persentase basis data bidang energi	100%	100%	2.357.125.000	100%	2.315.000.000	100%	2.040.969.048	100%	2.245.065.953	100%	2.469.572.548
	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Tingkat Pengelolaan Sampah Kota	85%	88%		89%		6 Kec	7.689.762.925	6 Kec	8.458.739.218	6 Kec	9.304.613.140
		1) Persentase pemrosesan sampah di Landfill (tingkat pengangkutan ke TPA)	69%	69%		65%			(60,000,000 dari banprov)		(60,000,000 dari banprov)		(60,000,000 dari banprov)
		2) Persentase Pengolahan dan Pengurangan Sampah di Sumber	16%	19%		24%							

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
		2.a. Persentase sampah yang dikelola dengan sistem 3R	16%	18%		20%							
		2.b. Persentase sampah yang dikelola dengan mengkonversi menjadi WTE	0,10%	1%		4%							
	Program pengelolaan air tanah	Tersedianya sumur pantau	2 Unit	2 Unit	3,150,000,000	2 Unit	7,415,000,000	2 Unit	7.708.915.987	2 Unit	8.479.807.585	2 Unit	9.327.788.344
		sumur resapan dalam, Tersedianya sumur resapan dangkal	Unit	20 Unit		20 Unit		20 Unit		20 Unit		20 Unit	
		Terpeliharanya mata air	5 Titik	5 Titik		5 Titik		5 Titik		5 Titik		5 Titik	
	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah mata air yang terlindungi	5 Titik	5 Titik	6.398.000.000	5 Titik	6.715.000.000	5 Titik,	3.058.469.048	5 Titik	3.364.315.953	5 Titik	3.700.747.548
		Jumlah sungai dan anak sungai yang terlindungi	1 Sungai	1 Sungai		1 Sungai		1 Sungai		1 Sungai		1 Sungai	
		Jjumlah sumur resapan dangkal	30 unit	30 unit		30 unit		40 Unit		45 Unit		50 Unit	
		Jumlah lubang biopori	264.000	200.000		200.000		200,000 Unit		200,000 Unit		200,000 Unit	
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol.B (Dari tercemar berat mjd tercemar ringan)	6,25%	12,50%	1.500.000.000	17%	1.700.000.000	17%	1.870.000.000	17%	2.057.000.000	17%	2.262.700.000
		Jumlah mata air yang telah dipulihkan akibat pencemaran air	5 Titik	5 Titik		5 Titik		5 titik		5 titik		5 titik	
		Jumlah			29,062,500,000		36,237,000,000		35.752.779.934		39.328.057.927		43.260.863.720
11	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3,290,900,000	100%	3,020,000,000	100%	3.191.428.334	100%	3.510.571.167	100%	3.861.628.284
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	7,479,237,500	100%	7,170,000,000	100%	7.234.322.211	100%	7.957.754.432	100%	8.753.529.875
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	275.000.000	100%	302.500.000	100%	332.750.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	537,010,000	100%	560,000,000	100%	616.000.000	100%	677.600.000	100%	745.360.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	N/A	100%	655,152,500	100%	643,925,000	100%	708.317.500	100%	779.149.250	100%	857.064.175
		Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
		Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	60	62		64		66		68		70	
	Program Perencanaan Pembangunan	Dokumen Renja dan renstra SKPD	NA	2 Dokumen	200,000,000 (masuk perubahan)	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	181.500.000	2 Dokumen	199.650.000
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio panjang jalan dalam kondisi baik	72,36%	80%	320,828,640,000	90.00%	278,400,000,000	100%	306.109.428.334	100%	336.720.371.167	100%	370.392.408.284
	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Panjang saluran drainase dan trotoar yg dibangun skala kota	60%	75%	135,770,950,000	90%	114,400,000,000	100%	119.444.154.862	100%	131.388.570.348	100%	144.527.427.383
	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jalan dan jembatan fungsional - (panjang)	72,36%	80%	30,000,000,000	90%	24,020,000,000	100%	25.769.322.211	100%	28.346.254.432	100%	31.180.879.875
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kbinamargaan	Ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	55 Unit	8 unit	21,200,000,000	5 unit	6,900,000,000	5 unit	7.459.428.334	5 unit	8.205.371.167	5 unit	9.025.908.284
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya	Panjang jaringan pengairan dalam kondisi baik	40%	60%	20,282,050,000	80%	17,350,000,000	100%	18.432.322.211	100%	20.275.554.432	100%	22.303.109.875
	Program Pengembangan Pengelolaan, & Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Lingkungan sungai yang tertata	0, 14 Lokasi	2 Lokasi, 32 Lokasi	23,802,164,000	2 Lokasi, 50 Lokasi	25,300,000,000	2 Lokasi, 68 Lokasi	27.177.322.211	2 Lokasi, 68 Lokasi	29.895.054.432	2 Lokasi, 68 Lokasi	32.884.559.875
	Program Pengendalian Banjir	Berkurangnya titik banjir di Kota Bandung	14 Lokasi	32 Lokasi	56,327,496,000	50 Lokasi	49,500,000,000	68 Lokasi	50.142.579.352	68 Lokasi	55.156.837.288	68 Lokasi	60.672.521.016
	Program Penerangan Jalan Umum	Persentase Wilayah Kota Bandung terang pada malam hari	47%	50%	45,076,400,000	75%	149,893,602,980	100%	164.752.391.612	100%	181.227.630.773	100%	199.350.393.850
		Jumlah			665,700,000,000		677,657,527,980		731.477.017.171		804.624.718.888		885.087.190.777

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
12	DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA												
	Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan dan Bangun Bangunan	Terwujudnya kualitas tata bangunan dan keandalan bangunan		Semua SWK di Kota Bandun g	25,458,336,173	Semua SWK di Kota Bandung	52,502,100,000	Semua SWK di Kota Bandung	57.114.792.658		62.826.271.923		69.108.899.116
	Program Pengembangan Perumahan	Perbaikan rumah tidak layak huni	N/A	80	42,660,300,000	2480	18,870,000,000	2480	20.611.920.371		22.673.112.408		24.940.423.649
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh	11	10,75	19,980,015,000	10,5	17,046,625,000	10,27	18.606.207.871		20.466.828.658		22.513.511.524
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman	100%	100%	496,200,000	100%	500,000,000	100%	550.000.000	100%	605.000.000	100%	665.500.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	4,613,700,000	100%	4,098,790,000	100%	4.217.069.371	100%	4.638.776.308	100%	5.102.653.939
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	25,754,387,827	100%	6,377,887,900	100%	6.870.597.061	100%	7.557.656.767	100%	8.313.422.443
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	658,500,000	100%	724,350,000	100%	796.785.000	100%	876.463.500	100%	964.109.850
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	459,000,000	100%	504,900,000	100%	555.390.000	100%	610.929.000	100%	672.021.900
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	N/A	100%	300,000,000	100%	330,000,000	100%	363.000.000	100%	399.300.000	100%	439.230.000
		Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
		Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	CC	CC		CC		B		B		A	0
	Program Perencanaan Tata Ruang	Dokumen Perencanaan Tata Ruang		4 Dok RTBL	7,638,445,331	2 Dok RTBL	7,850,000,000	2 Dok RTBL	8.489.920.371		9.338.912.408		10.272.803.649

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program Pemanfaatan Ruang	Terwujudnya tertib pemanfaatan ruang	100%	100%	2,207,025,000	100%	1,405,000,000	100%	1.545.500.000		1.700.050.000		1.870.055.000
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang	56,27%	60%	1,100,000,000		1,350,000,000		1.485.000.000		1.633.500.000		1.796.850.000
	Program Pembinaan & Pengembangan Aparatur	Pembangunan Database kepegawaian		1 paket	75,000,000	1 paket	82,500,000	1 paket	90.750.000		99.825.000		109.807.500
	Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana & prasarana kearsipan	Peningkatan kualitas arsip	1 Gedung Arsip	1 Gedung Arsip	150,000,000	1 Gedung Arsip	300,000,000	1 Gedung Arsip	330.000.000		363.000.000		399.300.000
	Program Pembinaan PKL dan Asongan	Tersedianya lokasi berdagang untuk pedagang kaki lima		1 Lokasi	2,169,700,000	1 Lokasi	2,500,000,000	1 Lokasi	2.604.920.371		2.865.412.408		3.151.953.649
	Program Pembinaan Lingkungan Hidup	Terbangunnya tempat khusus merokok		13 Tempat khusus meroko k	570,651,000	15 Tempat khusus merokok	660,000,000	15 Tempat khusus merokok	726.000.000		798.600.000		878.460.000
		Jumlah			134,291,260,331		114,968,952,900		124.957.853.072		137.453.638.379		151.199.002.217
13	DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN (DPPK)												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,035,313,800	100%	2,289,845,180	100%	2.518.829.698	100%	2.770.712.668	100%	3.047.783.935
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	2,864,286,000	100%	3,611,555,000	100%	3.972.710.500	100%	4.369.981.550	100%	4.806.979.705
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	100%	880,550,000	100%	971,605,000	100%	1.068.765.500	100%	1.175.642.050	100%	1.293.206.255
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	464,100,000	100%	511,510,000	100%	562.661.000	100%	618.927.100	100%	680.819.810
	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Response Time Rate	22 Menit	< 20 Menit	14,754,441,500	< 18 Menit	16,300,237,750	< 16 Menit	17.495.022.637	< 15 Menit	19.244.524.901	< 15 Menit	21.168.977.391
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	N/A	100%	61,308,700	100%	67,439,570	100%	74.183.527	100%	81.601.880	100%	89.762.068

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
		Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
		Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	CC	CC		CC		B		B		A	
		Jumlah			21,060,000,000		23,752,192,500		25.692.172.862		28.261.390.148		31.087.529.163
14	DINAS PERHUBUNGAN												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3,370,000,000	100%	3,607,000,000	100%	3.804.485.417	100%	4.184.933.959	100%	4.603.427.355
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	13,820,000,000	100%	14,202,000,000	100%	15.458.985.417	100%	17.004.883.959	100%	18.705.372.355
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	1,425,000,000	100%	1,567,500,000	100%	1.724.250.000	100%	1.896.675.000	100%	2.086.342.500
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	300,000,000	100%	330,000,000	100%	363.000.000	100%	399.300.000	100%	439.230.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	N/A	100%	250,000,000	100%	275,000,000	100%	302.500.000	100%	332.750.000	100%	366.025.000
		Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
		Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	CC	CC		CC		B	0	B	0	A	0
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	jumlah prasarana dan fasilitas terminal yang dibangun	18 unit	2	4,195,000,000	2	4,614,500,000	2	4.912.735.417	2	5.404.008.959	2	5.944.409.855
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	jumlah fasilitas yg berfungsi dan kondisi baik	3	3	2,200,000,000	3	2,420,000,000	3	2.498.785.417	3	2.748.663.959	3	3.023.530.355
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase tersedianya fasilitas sarana dan prasarana SAUM sesuai dengan Rencana Induk Transportasi Kota	17%	23%	27,252,600,000	29%	33,317,860,000 (500,000,000 dari banprov)	35%	35.993.993.704 (500,000,000 dari banprov)	42%	39.593.393.074 (500,000,000 dari banprov)	50%	43.552.732.382 (500,000,000 dari banprov)

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase halte yang terbangun di jalur yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	55%	60%	5,650,000,000	65%	6,215,000,000	70%	6.673.285.417	75%	7.340.613.959	80%	8.074.675.355
	Program Pengendalian& Pengamanan Lalu Lintas	Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan	23 km/jam	23 km/jam	68,660,000,000	23,5 km/jam	70,606,648,111	24 km/jam	77.011.660.626	24,5 km/jam	84.712.826.689	25 km/jam	93.184.109.358
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	95%	95,50%	8,150,000,000	96%	8,965,000,000	96,5%	9.698.285.417	97%	10.668.113.959	97,5%	11.734.925.355
		Jumlah			135,272,600,000		146,120,508,111		158.441.966.832		174.286.163.516		191.714.779.867
15	DINAS PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,549,000,000	100%	3,154,900,000	100%	3.209.246.667	100%	3.530.171.334	100%	3.883.188.467
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	16,294,785,000	100%	27,110,000,000	100%	29.559.856.667	100%	32.515.842.334	100%	35.767.426.567
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	504,800,000	100%	502,000,000	100%	552.200.000	100%	607.420.000	100%	668.162.000
	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Jumlah PNS pindah/purna tugas yang terfasilitasi	100%	100%	2,000,000	100%	5,000,000	100%	5.500.000	100%	6.050.000	100%	6.655.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya apratur yg mmiliki kompetensi sesuai bidangnya	20%	40%	241,600,000	60%	252,000,000	80%	277.200.000	90%	304.920.000	90%	335.412.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	N/A	100%	428,500,000	100%	520,000,000	100%	572.000.000	100%	629.200.000	100%	692.120.000
		Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
		Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	CC	CC		CC		B	0	B	0	A	0
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Cakupan pengelolaan areal pemakaman	100%	100%	7,048,515,000	100%	18,220,000,000	20%	10.870.856.667	15%	11.957.942.334	15%	13.153.736.567

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program Perencanaan Pembangunan daerah	Dokumen Perencanaan	2	2	60,000,000	1	25,000,000	1	27.500.000	1	30.250.000	2	33.275.000
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tertata dan Terpeliharanya Taman dan RTH di Kota Bandung	100%	100%	30,603,550,000	100%	99.177.625.000 (12,700,000,000 dari banprov)	Penataan 25 taman, Pemeliharaan 100 taman, 20 Lokasi penataan RTH, 388 taman RW, 4 taman Tematik, pemeliharaan 11 taman tematik	117.744.244.167 (12,700,000,000 dari banprov)	Penataan 25 taman, Pemeliharaan 130 taman, 20 Lokasi penataan RTH, 388 taman RW, 4 taman tematik pemeliharaan 15	129.518.668.584 (12,700,000,000 dari banprov)	Penataan 25 taman, Pemeliharaan 200 taman, 20 Lokasi penataan RTH, 388 taman RW, 3 taman Tematik, pemeliharaan 18	142.470.535.442 (12,700,000,000 dari banprov)
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Cakupan Sarana Prasarana Pembibitan RTH	10%	10%	3,967,250,000	15%	3,020,000,000	20%	3.060.856.667	25%	3.366.942.334	30%	3.703.636.567
		Jumlah			61,700,000,000		151,986,525,000		165.879.460.837		182.467.406.920		200.714.147.612
17	SEKRETARIAT DAERAH												
	Bagian Pemerintahan Umum												
	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	411,000,000	100%	452,100,000	100%	497.310.000	100%	547.041.000	100%	601.745.100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	228,500,000	100%	251,350,000	100%	276.485.000	100%	304.133.500	100%	334.546.850
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	97,000,000	100%	106,700,000	100%	117.370.000	100%	129.107.000	100%	142.017.700

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Nilai dan Pemingkatan LPPD	5	1	155,725,000	1	171,297,500	1	188.427.250	1	207.269.975	1	227.996.973
	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase terlaksananya dukungan terhadap penyelenggaraan Pilleg, Pilpres,dan Pilkada	100%	100%	173,500,000	-	0	-	0	-	0	100%	0
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah titik koordinat patok batas daerah	19	4	152,000,000	4	167,200,000	4	183.920.000	4	202.312.000	4	222.543.200
	Program Pemantapan Penyelenggaraan OTDA, Pemerintahan Daerah &Pemerintahan Wilayah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kewilayahan		82%	2,182,275,000	84%	2,400,502,500	86%	2.547.287.274	88%	2.802.016.001	90%	3.082.217.602
		Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	N/A	0		sedang		sedang		tinggi		tinggi	
	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	235,946,500	100%	259,541,150	100%	285.495.265	100%	314.044.792	100%	345.449.271
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	310,800,000	100%	341,880,000	100%	376.068.000	100%	413.674.800	100%	455.042.280
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	75,239,000	100%	82,762,900	0%	91.039.190	0%	100.143.109	0%	110.157.420
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah SKPD di lingkungan Pemkot Bandung terfasilitasi surveillance SMM ISO 9001:2008 (Non Akumulasi)	56	68	640,166,250	68	704,182,875	68	774.601.163	68	852.061.279	68	937.267.407
		Jumlah SKPD yang dilakukan pengukuran IKM	60	17	200,000,000	15	220,000,000	10	242.000.000	15	266.200.000	11	292.820.000
		Jumlah dokumen reviu Road Map Reformasi Birokrasi dan evaluasi Reformasi Birokrasi	N/A	2	250,000,000	2	275,000,000	2	302.500.000	2	332.750.000	2	366.025.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya (Jumlah) Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Kota dan SKPD serta Kinerja Pelayanan Publik	25	9	1,125,000,000	7	1,237,500,000	7	1.267.984.524	7	1.394.782.976	7	1.534.261.274
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK -nya (non Akumulasi)	20	33	852,584,000	33	937,842,400	33	1.031.626.640	33	1.134.789.304	33	1.248.268.234
		Jumlah SKPD yang menerapkan Standar Prosedur dan Pelayanan	N/A	10	975,898,000	10	1,073,487,800	12	1.180.836.580	14	1.298.920.238	16	1.428.812.262
	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah Anjab dan ABK SKPD (non Akumulasi)	ANJAB 20 ABK 32	6	630,000,000	9	693,000,000	9	762.300.000	9	838.530.000	7	922.383.000
	Program Pembangunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Raperwal/Rakepwal Ketatalaksanaan	14	10	889,366,250	10	978,302,875	12	1.076.133.163	14	1.183.746.479	16	1.302.121.127
Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	99%	99%	682,700,000	99%	750,970,000	99%	826.067.000	99%	908.673.700	99%	999.541.070
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	99%	99%	438,850,000	99%	482,735,000	99%	531.008.500	99%	584.109.350	99%	642.520.285
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	99%	100%	74,050,000	99%	81,455,000	1%	89.600.500	1%	98.560.550		108.416.605
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Persentase Sumber Daya Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	99%	99%	437,000,000	99%	480,700,000	99%	528.770.000	99%	581.647.000	99%	639.811.700
	Program peningkatan sistem pengawasan internal & pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Dokumen Progress Pelaksanaan Kebijakan Ruang Lingkup SDA	11	11	501,400,000	11	551,540,000	11	606.694.000	11	667.363.400	11	734.099.740
	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik	Persentase SKPD/Unit Kerja yang dikendalikan (Dalprog)	100%	100%	1,166,000,000	100%	1,282,600,000	64 SKPD	1.317.594.524	64 SKPD	1.449.353.976	64 SKPD	1.594.289.374
		Persentase fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%		100%		100%		100%		100%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Bagian Tata Usaha												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	853,700,000	100%	938,250,000	100%	1.032.075.000	100%	1.135.282.500	100%	1.248.810.750
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	115,900,000	100%	127,000,000	100%	139.700.000	100%	153.670.000	100%	169.037.000
	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	210,000,000	100%	231,000,000	0%	254.100.000	0%	279.510.000	0%	307.461.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	150,400,000	100%	136,700,000	100%	150.370.000	100%	165.407.000	100%	181.947.700
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Aplikasi Pengarsipan digital (Disposis, Daftar SuratBaru, FormSurat)	NA	7 Unit Kerja / Bagian	75,000,000	8 Unit Kerja / Bagian	100,000,000	20 SKPD	110.000.000	20 SKPD	121.000.000	20 SKPD	133.100.000
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tercapainya Komunikasi yang Harmonis Antar unsur-unsur Masyarakat & Pemerintah Demi Terlaksananya Program Pembangunan di Kota Bandung		-5 Org, - 36 Item	400,000,000	- 30 SKPD - 5 Org, - 36 Item	430,000,000	- 10 SKPD - 5 Orang, - 69 Item	473.000.000	-10 SKPD - 4 Orang, - 61 Item	520.300.000	-10 SKPD - 5 Orang - 49 Item	572.330.000
	Program pembinaan & pengembangan aparatur	Mewujudkan pengelolaan Adm, kepegawaian yg tertib, akurat & valid di lingkungan Setda		12 Unit Kerja (500 Orang)	195,000,000	12 Dokumen (500 Orang)	235,000,000	12 Dokumen (500 Orang)	258.500.000	12 Dokumen (500 Orang)	284.350.000	12 Dokumen (500 Orang)	312.785.000
	Bagian Umum dan Perlengkapan												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	85%	100%	12,086,250,000	100%	13,281,502,975	100%	14.516.387.797	100%	15.968.026.576	100%	17.564.829.234
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana kerja aparatur	80%	100%	37,049,344,000	100%	37,748,778,400	100%	41.542.953.051	100%	45.697.248.356	100%	50.266.973.192
	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	495.000.000	100%	550.000.000						
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	603,356,000	100%	663,691,600	100%	730.060.760	100%	803.066.836	100%	883.373.520

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya Jaringan Komputer dan Sistem Informasi di lingkungan Bagumpal	100%	100%	247,050,000	100%	271,755,000	100%	298.930.500	100%	328.823.550	100%	361.705.905
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Terlayannya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ LPND/luar negeri,	100%	100%	2,119,000,000	100%	2,330,900,000	100%	2.470.724.524	100%	2.717.796.976	100%	2.989.576.674
	Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	550,392,000	100%	605,431,200	100%	665.974.320	100%	732.571.752	100%	805.828.927
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	204,700,000	100%	225,170,000	100%	247.687.000	100%	272.455.700	100%	299.701.270
	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	27,300,000	100%	30,030,000	0%	33.033.000	0%	36.336.300	0%	39.969.930
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	95,000,000	100%	104,500,000	100%	114.950.000	100%	126.445.000	100%	139.089.500
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya penataan Peraturan Perundang-undangan		20%	522,295,500	40%	613,825,050	60%	571.477.555	80%	628.625.311	100%	691.487.842
	Program Pembangunan Produk hukum Daerah	Tersusunnya Rancangan Produk Hukum		20%	2,900,312,500	40%	3,190,343,750	60%	3.416.112.649	80%	3.757.723.914	100%	4.133.496.305
	Bagian Perekonomian												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	370,000,000	100%	407,000,000	100%	447.700.000	100%	492.470.000	100%	541.717.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	51,000,000	100%	56,100,000	100%	61.710.000	100%	67.881.000	100%	74.669.100
	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	52,500,000	100%	57,750,000	0%	63.525.000	0%	69.877.500	0%	76.865.250
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	100%	111,500,000	100%	122,650,000	100%	134.915.000	100%	148.406.500	100%	163.247.150

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pengembangan Usaha Daerah dan BUMD yang sehat dan Profitable		BUMD	350,000,000	BUMD	385,000,000		423.500.000		465.850.000	1 Dok Laporan Evaliasi	512.435.000
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Tersedianya bahan penyusunan kebijakan pengembangan UMKM		1 Kajian	650,000,000	1 Kajian	715,000,000	1 Kajian	786.500.000	1 Kajian	865.150.000	1 Kajian	951.665.000
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis	Jumlah Aktivasi Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	NA	3	399,790,000	6	439,769,000	9	483.745.900	12	532.120.490	15	585.332.539
	Program Koordinasi Perumusan & Implementasi Kebijakan Ekonomi	Terakomodirnya Kebijakan Ekonomi Makro (LPE, Tingkat Inflasi Umum, Indeks Daya Beli, PDRB/Kapita)		1 dokum	1,815,210,000	1 dokum	4,966,731,000	1 dokum	5.370.138.624	1 dokum	5.907.152.486	1 dokum	6.497.867.735
		Jumlah Perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota setiap tahun	35	35		40							
	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan												
	Program Pelayanan Administrasi & Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	307,300,000	100%	338,030,000	100%	371.833.000	100%	409.016.300	100%	449.917.930
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	170,000,000	100%	187,000,000	100%	205.700.000	100%	226.270.000	100%	248.897.000
	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	84,824,000	100%	93,306,400	0%	102.637.040	0%	112.900.744	0%	124.190.818
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Dengan Bidanganya	100%	100%	115,050,000	100%	126,555,000	100%	139.210.500	100%	153.131.550	100%	168.444.705
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Menigkatnya Patriotisme heroisme dan nasionalisme warga Kota Bandung		5 keg	925,000,000	5 keg	1,017,500,000	5 keg	968.000.000	5 keg	1.064.800.000	5 keg	1.171.280.000
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah		90 UKS	800,000,000	90 UKS	880,000,000	90 UKS	1.025.984.524	90 UKS	1.128.582.976	90 UKS	1.241.441.274

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Rancangan Kebijakan bidang kesejahteraan sosial yang diimplementasikan	N/A	60 %	892,076,000	65 %	981,283,600	70 %	1.079.411.960	75%	1.187.353.156	80%	1.306.088.472
	Program sosial keagamaan	Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama	Nilai	C	750,000,000	C	825,000,000	B	907.500.000	B	998.250.000	B	1.098.075.000
		Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing	Nilai	C	836,600,000	C	920,260,000	B	1.012.286.000	B	1.113.514.600	B	1.224.866.060
		Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan di Kota Bandung	Persentase	100%	519,150,000	100%	571,065,000	100%	628.171.500	100%	690.988.650	100%	760.087.515
	Asisten Pemerintahan												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	650,250,000	100%	750.975.000	100%	936.072.500	100%	1.029.679.750	100%	1.132.647.725
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana & Prasarana Aparatur	100%	100%	109,750,000	100%	120,725,000	100%	132.797.500	100%	146.077.250	100%	160.684.975
	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	53,000,000	100%	58,300,000	100%	64.130.000	100%	70.543.000	100%	77.597.300
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Terlaksanankan Kegiatan Pembinaan Aparatur	100%	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	77.000.000	100%	84.700.000	100%	93.170.000
	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan												
	Program Pelayanan Adm, Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm, Perkantoran	100%	100%	792,695,000	100%	871,964,500	100%	959.160.950	100%	1.055.077.045	100%	1.160.584.750
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aprt	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	82,250,000	100%	90,475,000	100%	99.522.500	100%	109.474.750	100%	120.422.225
	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	52,205,000	100%	57,425,500	100%	63.168.050	100%	69.484.855	100%	76.433.341
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yg memiliki Kompetensi Sesuai dengan Bidangny	100%	100%	72,850,000	100%	80,135,000	100%	88.148.500	100%	96.963.350	100%	106.659.685

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Asisten Administrasi Umum												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	761,000,000	100%	837,100,000	100%	920.810.000	100%	1.012.891.000	100%	1.114.180.100
	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	55,000,000	100%	60,500,000	100%	66.550.000	100%	73.205.000	100%	80.525.500
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai dengan Bidanganya	100%	100%	184,000,000	100%	202,400,000	100%	222.640.000	100%	244.904.000	100%	269.394.400
	Sekretaris Daerah (Non Bagian)												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	43,037,604,607	100%	47,924,737,092	100%	52.131.507.612	100%	57.344.658.373	100%	63.079.124.211
	Program Peningkatan Sarana & Prasr Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	727,600,000	100%	800,360,000	100%	880.396.000	100%	968.435.600	100%	1.065.279.160
	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	1,398,050,000	100%	1,537,855,000	100%	1.598.375.024	100%	1.758.212.526	100%	1.934.033.779
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Dengan Bidanganya	100%	100%	750,400,000	100%	825,440,000	100%	907.984.000	100%	998.782.400	100%	1.098.660.640
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Ketepatan Menyerahkan Laporan kinerja dan Keuangan	100%	100%	571,100,000	100%	628,210,000	100%	691.031.000	100%	760.134.100	100%	836.147.510
	Program peningkatan sistem pengawasan internal & pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Cakupan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100%	100%	3,293,000,000	100%	3,622,300,000	100%	3.891.264.524	100%	4.280.390.976	100%	4.708.430.074
	Bagian Kerja Sama Daerah												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	676,050,000	100%	743,655,000	100%	818.020.500	100%	899.822.550	100%	989.804.805
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	260,250,000	100%	286,275,000	100%	314.902.500	100%	346.392.750	100%	381.032.025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	84,000,000	100%	92,400,000	0%	101.640.000	0%	111.804.000	0%	122.984.400
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Dengan Bidanganya	100%	100%	148,000,000	100%	162,800,000	100%	179.080.000	100%	196.988.000	100%	216.686.800
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti menjadi MoU setiap tahun	N/A	30%	3,831,700,000	30%	4,214,870,000		4.543.091.524		4.997.400.676		5.497.140.744
		Jumlah			141,040,879,107		152,835,430,067		165.921.646.460		182.513.811.106		200.765.192.216
17	SEKRETARIAT DPRD												
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terwujudnya lembaga perwakilan rakyat yang handal	75%	80%	59,321,540,460	85%	53,787,617,483	90%	58.730.000.000	95%	66.419.254.378	100%	73.061.179.816
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	80%	80%	14,368,510,000	85%	6,383,004,250	90%	7.105.000.000	95%	7.244.672.366	100%	7.969.139.602
	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur (PNS)	80%	80%	1,044,785,000	85%	1,097,024,250	90%	1.145.000.000	95%	1.327.399.343	100%	1.460.139.277
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%	80%	880,291,000	85%	924,305,550	90%	950.000.000	95%	1.118.409.716	100%	1.230.250.687
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	N/A	100%	881,359,000	100%	925,426,950	100%	950.000.000	100%	1.119.766.610	100%	1.231.743.270
		Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
		Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	CC	CC		CC		B		B		A	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	80%	80%	9,465,670,500	85%	10,438,954,025	90%	10.726.249.095	95%	10.337.371.594	100%	11.371.108.753
		Jumlah			85,962,155,960		73,556,332,508		79.606.249.095		87.566.874.005		96.323.561.405

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
18	INSPEKTORAT												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	901,420,000	100%	986,239,095	100%	1.084.863.005	100%	1.193.349.305	100%	1.312.684.235
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	796,400,000	100%	1,398,400,000	100%	1.538.240.000	100%	1.692.064.000	100%	1.861.270.400
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat pencapaian disiplin aparatur	100%	100%	26,450,000	100%	72,000,000	100%	79.200.000	100%	87.120.000	100%	95.832.000
	Program Peningatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh BPK yang ditindaklanjuti	N/A	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	550.000.000	100%	605.000.000	100%	665.500.000
		Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
		Skor hasil LAKIP Inspektorat oleh Kemenpan	CC	CC		CC		B		B		A	
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tingkat ketersediaan dokumen hasil pengawasan secara optimal	0%	100%	-	100%	75,000,000	100%	82.500.000	100%	90.750.000	100%	99.825.000
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase SKPD yang mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material	31%	26%	12,007,340,000	23%	14,151,652,500	20%	14.913.959.418	16%	16.405.355.360	13%	18.045.890.896
		Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang	20%	33%		50%		65%		80%		100%	
		Persentase SKPD memiliki nilai Evaluasi AKIP Minimal B	N/A	26,23%		44,26%		70,49%		91,80%		100%	
	Program Peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase SDM APIP yang mendapatkan sertifikat Diklat Pengembangan Profesi	100%	100%	970,000,000	100%	1,130,000,000	100%	1.243.000.000	100%	1.367.300.000	100%	1.504.030.000
	Program Penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tingkat tercapainya penyelenggaraan kegiatan pengawasan	100%	100%	110,600,000	100%	300,000,000	100%	330.000.000	100%	363.000.000	100%	399.300.000
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan yg	100%	100%	300,000,000	100%	330,000,000	100%	363.000.000	100%	399.300.000	100%	439.230.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
		diterima inspektorat setiap tahun											
		Jumlah			15.612.210.000		18.943.291.595		20.184.762.423		22.203.238.665		24.423.562.532
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1,159,065,000	100%	2,274,972,000	100%	2,100,000,000	100%	2,300,000,000	100%	2,500,000,000
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	1,354,850,000	100%	2,322,138,000	100%	2,150,000,000	100%	2,350,000,000	100%	2,550,000,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	125,000,000	100%	337,500,000	0%	350,000,000	0%	385,000,000	0%	423,500,000
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang tercakup dalam dokumen penganggaran	≥ 30%	≥ 30%	3,575,675,000	> 30%	2,364,000,000	> 30%	2,504,000,000	> 30%	2,646,000,000	> 30%	3,094,000,000
		Dokumen Perencanaan Pembangunan	3 dok	5 dok		3 dok		3 dok	0	3 dok	0	3 dok	0
		Dokumen hasil evaluasi kebijakan pembangunan daerah		2 dok		2 dok		2 dok	0	2 dok	0	2 dok	0
	Program Pembangunan Produk Hukum Daerah	Dokumen Revisi Perwal Perenc,Pembangunan	-	1 dok	100,000,000	-	-	-	0	-	0	-	0
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	-	>30%	1,710,000,000	>30%	2,325,000,000	>30%	2,525,000,000	>30%	2.700.000.000	>30%	2,900,000,000
	Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemda & Pemerintahan Wilayah	Dokumen kompetisi dan inovasi antar kecamatan	-	1 dok	400,000,000		-		0		0		0
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang ditindaklanjuti	N/A	20%	1,599,000,000	25%	1,200,000,000	30%	1,959,000,000	35%	2,155,000,000	40%	2,371,000,000
	Program Pemanfaatan Ruang	Dokumen Konsep Desain Ruang Pamer	N/A	1 dok	550,000,000	-	-	-	0	-	0	-	0

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik & Tata Ruang	Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik & Tata Ruang	N/A	1 dok	222,000,000	1 dok	250,000,000	1 dok	275,000,000	1 dok	302,500,000	1 dok	332,750,000
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang ditindaklanjuti	N/A	20%	365,000,000	25%	350,000,000	30%	385,000,000	35%	423,500,000	40%	465,850,000
	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Persentase Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota Bandung yg ditindaklanjuti	N/A	20%	824,000,000	25%	1,350,000,000	30%	1,376,000,000	35%	1,513,809,000	40%	1,665,190,000
	Program pengembangan lingkungan hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Pengembangan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	N/A	20%	560,000,000								
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	N/A	-	-	25%	500,537,000	30%	550,000,000	35%	605,000,000	40%	665,500,000
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti	N/A	20%	1,951,000,000	25%	2,200,000,000	30%	2,311,000,000	35%	2,542,000,000	40%	2,796,000,000
	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase Dokumen Perencanaan Sosial Budaya yg ditindaklanjuti	N/A	20%	3,200,000,000	25%	2,700,000,000	30%	2,900,000,000	35%	3,147,000,000	40%	3,462,000,000
	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan Pemerintahan yg ditindaklanjuti	N/A	20%	1,853,500,000	25%	2,015,537,000	30%	2,108,000,000	35%	2,319,000,000	40%	2,551,000,000
	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Dokumen Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti	N/A	20%	513,800,000	25%	866,500,000	30%	953,150,000	35%	1,048,465,000	40%	1,153,311,000
	Program Pengembangan Data & Informasi	Tingkat Integrasi Data SKPD dalam Bandung Satu Data	8 SKPD	4 SKPD	1,610,000,000	4 SKPD	1,370,537,000	4 SKPD	1,475,780,000	5 SKPD	1,623,359,000	5 SKPD	1,785,694,000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Tingkat Pengelolaan perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan penilaian yang terintegrasi	N/A	20%	3,588,110,000	40%	2,550,000,000	60%	2.846,190,000	80%	3,065,809,000	100%	3,362,390,000
	Program Peningkatan Promosi Investasi	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	3,594 Triliun	3,862 Triliun	845,000,000	4,059 Triliun	1,100,000,000	4,291 Triliun	1,374,147,000	4,523 Triliun	1,698,292,000	4,756 Triliun	1,782,823,000
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	3,594 Triliun	3,862 Triliun	675,000,000	4,059 Triliun	1,080,537,000	4,291 Triliun	1,250,000,000	4,523 Triliun	1,507,449,000	4,756 Triliun	1,704,194,000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	759,000,000	100%	810,000,000	100%	891,000,000	100%	980,100,000	100%	1,078,110,000
	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	N/A	100%	180,000,000	100%	189,000,000	100%	207,900,000	100%	228,000,000	100%	251,000,000
		Persentase tertib administrasi barang/aset daerah		100%		100%		100%		100%		100%	
		Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/Kemenpan	CC	CC		CC		B		B		A	
		Jumlah			27,720,000,000		28,656,258,000		30,491,167,000		33,540,283,000		36,894,312,000
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Cakupan wilayah untuk Pelayanan informasi pembangunan	35%	50%	32,200,000,000	75%	11,798,500,000	85%	9.793.111.112	100%	10.772.422.223	100%	11.849.664.446
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Cakupan pengembangan & pemberdayaan kelompok informasi masyarakat		30 Paket	300,000,000	30 Paket	330,000,000	30 Paket	363.000.000	30 Paket	399.300.000	30 Paket	439.230.000
	Program Kerjasama Informasi dg Mass Media	Pelaksanaan desiminasi & pendistribusian Informasi		12 Kali	3,175,000,000	14 kali	3,135,000,000	16 kali	3.448.500.000	18 kali	3.793.350.000	20 kali	4.172.685.000
	Program Peningkatan Sistem Pelaporan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan	N/A	100%	-	100%	300,000,000	100%	330.000.000	100%	363.000.000	100%	399.300.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Capaian Kinerja dan Keuangan	oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti											
		Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
		Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	C	CC		CC		B		B		A	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	3,920,000,000	100%	4,604,000,000	100%	7.379.161.112	100%	8.117.077.223	100%	8.928.784.946
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	1,350,000,000	100%	725,000,000	100%	797.500.000	100%	877.250.000	100%	964.975.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	100%	90,000,000	100%	82,500,000	100%	90.750.000	100%	99.825.000	100%	109.807.500
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kompetensi SDM Aparatur/Pegawai	100%	100%	245,000,000	100%	200,000,000	100%	220.000.000	100%	242.000.000	100%	266.200.000
		Jumlah			40,955,000,000		21,175,000,000		22.422.022.224		24.664.224.447		27.130.646.891
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,261,825,000	100%	1,388,000,000	100%	1.526.800.000	100%	1.679.480.000	100%	1.847.428.000
	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana & prasarana aparatur	100%	100%	1,205,475,000	100%	1,927,050,000	100%	1.956.540.417	100%	2.152.194.459	100%	2.367.413.905
	Program Peningkatan Disiplin Pegawai	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	100%	171,900,000	100%	189,100,000	100%	208.010.000	100%	228.811.000	100%	251.692.100
	Program Fasilitas/ Pindah Purna Tugas PNS	Persentase PNS pindah/purna tugas yang terfasilitasi	100%	100%	300,000,000	100%	330,000,000	100%	363.000.000	100%	399.300.000	100%	439.230.000
	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya standar diklat SDM Aparatur Sipil Negara	12% (984 orang)	6%	4,880,000,000	30%	11,040,000,000	15%	11.980.785.417	16%	13.178.863.959	17%	14.496.750.355
	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70%	75%	233,150,000	80%	256,500,000	85%	282.150.000	90%	310.365.000	100%	341.401.500
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	N/A	100%	137,000,000	100%	150,700,000	100%	165.770.000	100%	182.347.000	100%	200.581.700

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
		Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
		Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	CC	CC		CC		B		B		A	0
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan Renstra dan Renja SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	100,050,000	1 Dokumen	110,100,000	1 Dokumen	121.110.000	1 Dokumen	133.221.000	1 Dokumen	146.543.100
	Program Pembinaan & Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yg telah memenuhi target SKP	0	0	980,600,000	75%	1,475,000,000	80%	1.622.500.000	85%	1.784.750.000	90%	1.963.225.000
Terpenuhinya kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara sesuai standar		70%	70%	1,961,930,000	75%	3,540,000,000	80%	4.005.785.417	80%	4.406.363.959	90%	4.847.000.355	
Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS		100%	100%	809,400,000	100%	1,222,300,000	100%	1.344.530.000	100%	1.478.983.000	100%	1.626.881.300	
		Pelayanan Administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	100%	1,793,000,000	100%	2,085,000,000	100%	2.130.285.417	100%	2.343.313.959	100%	2.577.645.355
		Persentase SKPD yang sudah online data kepegawain	0%	7%	840,600,000	50%	820,600,000	100%	902.660.000	100%	992.926.000	100%	1.092.218.600
	Program pmbangunan& Pengembangan Assessment Center	Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi	70%	74%	865,000,000	78%	1,625,000,000	82%	1.512.500.000	86%	1.663.750.000	90%	1.830.125.000
		Jumlah			15,539,930,000		26,159,350,000		28.122.426.668		30.934.669.335		34.028.136.269
22	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tingkat Pemahaman terhadap Wawasan Kebangsaan, Ideologi Negara, Toleransi Antar Umat Beragama dan Antar Etnis di Kota Bandung	N/A	Baik	225,000,000	Baik	247,500,000	Baik	272.250.000	Baik	299.475.000	Baik	329.422.500

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tingkat pemahaman rasa persatuan & kesatuan bangsa dan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika), & terciptanya suasana kondusivitas, rasa aman di masyarakat		70%	950,000,000	75%	1,045,000,000	80%	1.149.500.000	85%	1.264.450.000	85%	1.390.895.000
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Bandung	55%	57%	1,360,000,000	-	1,496,000,000	-	1.645.600.000	-	1.810.160.000	58%	1.991.176.000
		Indeks Demokrasi		-		66,50 – 67,00		-	0	-	0	68,50 – 69,00	0
	Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kondusifitas Kota melalui BNK dan KOMINDA		58%	1,103,500,000	60%	1,213,850,000	65%	1.335.235.000	70%	1.468.758.500	75%	1.615.634.350
	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Swadaya Masyarakat dalam bentuk partisipasi keuangan,		150M	4,319,055,000	165M	4,750,960,500 (93,000,000 dari banprov)	181500 M	4.964.913.217 93,000,000 dari banprov	199650 M	5.461.404.539 (93,000,000 dari banprov)	219615 M	6.007.544.993 (93,000,000 dari banprov)
	Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	304.939	301.890	2.307.000.000	298.871	2.537.700.000	Penurunan Masy, Miskin 685379	2.791.470.000	Penurunan Masy, Miskin 678526	3.070.617.000	Penurunan Masy, Miskin 671740	3.377.678.700
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1,695,534,790	100%	1,188,593,790	100%	2.051.597.096	100%	2.256.756.805	100%	2.482.432.486
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	649,995,000	100%	714,994,500	100%	786.493.950	100%	865.143.345	100%	951.657.680
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	100%	140,000,000	100%	154,000,000	100%	169.400.000	100%	186.340.000	100%	204.974.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Kompetensi SDM Aparatur/Pegawai	100%	100%	309,975,210	100%	340,972,731	100%	375.070.004	100%	412.577.005	100%	453.834.705
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	N/A	100%	71,440,000	100%	78,584,000	100%	86.442.400	100%	95.086.640	100%	104.595.304
		Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
		Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	CC	CC		CC		B		B		A	
		Jumlah			13,131,500,000		14,444,650,000		15.627.971.667		17.190.768.834		18.909.845.717
23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA												
	Pemeliharaan ketentraman & ketertiban masyarakat & pencegahan tindak kriminal	jumlah operasi gabungan	N/A	200 kali	750,000,000	220 kali	881,890,625	250 kali	970.079.688	250 kali	1.067.087.656	270 kali	1.173.796.422
	Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum	cakupan penanganan gangguan trantibum	N/A	100%	7,738,820,000	100%	8,512,702,000	100%	9.177.441.248	100%	10.095.185.373	100%	11.104.703.910
	Penegakan Perda, Perwal dan Kepwal	cakupan penegakan Perda	N/A	70%	14,259,000,000	75%	15,684,900,000	80%	17.066.859.048	85%	18.773.544.953	90%	20.650.899.448
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	tingkat pemahaman masyarakat terhadap pekat	N/A	60%	569,400,000	65%	628,340,000	65%	751.553.688	70%	826.709.056	70%	909.379.962
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Petugas Linmas	1,2	1	12,704,875,000	1	13,975,362,500	1	15.186.367.798	1	16.705.004.578	1	18.375.505.036
		Jumlah LINMAS terlatih		120 orang		550 orang		580 orang		600 orang		650 orang	
	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah LINMAS terlatih	N/A	120 orang	103,427,500	-	-	-	0	-	0	-	0
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	5,046,080,000	100%	5,231,318,000	100%	5.567.918.848	100%	6.124.710.733	100%	6.737.181.806
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	3,415,567,500	100%	3,300,000,000	100%	3.443.469.048	100%	3.787.815.953	100%	4.166.597.548
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS	100%	100%	1,048,400,000	100%	1,212,500,000		1.333.750.000		1.467.125.000	-	1.613.837.500
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	persentase Sumber Daya Aparatur yg mmiliki kompetensi sesuai bidangnya	N/A	50%	1,768,520,000	55%	1,945,372,000	60%	2.139.909.200	65%	2.353.900.120	70%	2.589.290.132
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan	N/A	0%	179,200,000	0%	197,120,000	100%	216.832.000	0%	238.515.200	0%	262.366.720

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti											
		Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
		Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	CC	CC		CC		B		B		B	
	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan PEMILU	jml linmas siaga dlm pengamanan pilkada		2591 orang	2,745,695,000		-		-		-	-	-
		Jumlah			50,328,985,000		51,624,395,750		55.854.180.565		61.439.598.622		67.583.558.484
24	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA												
	Program Keluarga Berencana	Tingkat penurunan TFR	2,10%	1,99%	1,675,000,000	1,98%	1,840,000,000	1,97%	2.024.000.000	1,96%	2.226.400.000	1,95%	2.449.040.000
		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif (CU/PUS)	67,80%	68,30%		68,80%		69,30%		69,80%		70,30%	
		Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	5,20%	4,75%		4,55%		4,37%		4,00%		3,5%	
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan keluarga miskin	30%	30%	575,000,000	30%	747,500,000	20%	822.250.000	25%	904.475.000	30%	994.922.500
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	11%	9%		7%		6%		5%		5%	
	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan institusi masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	45%	47%	2,447,500,000	59%	2,625,000,000	71% & 75%	2.887.500.000	83% & 100%	3.176.250.000	100% & 100%	3.493.875.000
		Rasio petugas lapangan KB/ penyuluh KB per kelurahan	1:3	1:3		1:3		1:3		1:2		1:2	
		Rasio Pembantu Pembina KB per kelurahan	1;1	1;1		1;1		1;1		1;1		1;1	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Persentase Ibu, bayi dan anak yg memperoleh KIE & Pembinaan melalui kelompok kegiatan	48%	50%	250,000,000	60%	285,000,000	70%	313.500.000	80%	344.850.000	90%	379.335.000
	Program pengembangan pusat pelayanan infrmasi&konseling KRR	Rata-rata usia kawin pertama (PUP)	19,89 thn	20 tahun	350,000,000	20 tahun	380,000,000	20,11 thn	418.000.000	20,22thn	459.800.000	20,33thn	505.780.000
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan	99,80%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase tenaga pendamping kelompok bina keluarga yg mampu menggerakkan partisipasi masyarakat	40%	42%&	1,830,000,000	45% &	2,104,500,000	50% &	2.314.950.000	55% &	2.546.445.000	60%	2.801.089.500
		Persentase keluarga pra sejahtera dibandingkan jumlah total keluarga &	35%	36,87%		36,08%		35,98%		34,51%		34,29	
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	70%	72%		75%		78%		80%		80%	
		Cakupan Pasangan Usia Subur anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB	70%	72%		73%		75%		77%		80%	
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak & Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	70,05	70,1	230,200,000	70,15	264,730,000	70,20	291.203.000	70,25	320.323.300	70,5	352.355.630
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga politik& jabatan politik	15%	18%		18%		21%		25%		30% &	
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	57%	58%		59%		60%		62%		65%	
		Rasio angka melek huruf perempuan dibanding laki-laki usia 15 – 24 thn	1: 1	1: 1		1: 1		1: 1		1: 1		1: 1	
	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Persentase Kelurahan Ramah Anak	5%	10%	2,182,688,454	20%	2,510,091,722	40%	2.761.100.894	60%	3.037.210.984	80%	3.340.932.082

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	825,000,000	100%	948,750,000	100%	1.043.625.000	100%	1.147.987.500	100%	1.262.786.250
		Cakupan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Cakupan perencanaan SKPD responsive gender dalam upaya pemberdayaan perempuan melalui dukungan ARG	40%	50%		75%		100%		100%		100%	
	Program peningkatan peran serta & kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) &	65,3	65,35	520,900,000	65,4	651,125,000	65,55	716.237.500	65,6	787.861.250	65,65	866.647.375
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1,250,000,000	100%	1,375,000,000	100%	1.512.500.000	100%	1.663.750.000	100%	1.830.125.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Cakupan Pelayanan sarana dan Prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program Peningkatan Disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	900,000,000	100%	990,000,000	0%	1.089.000.000	0%	1.197.900.000	0%	1.317.690.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur SKPD	Persentase Sumber daya Aparatur yang Memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	N/A	100%	150,000,000	100%	165,000,000	100%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	219.615.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
		Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
		Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	CC	CC		CC		B		B		A	
		Jumlah			13,186,288,454		14,886,696,722		16.375.366.394		18.012.903.034		19.814.193.337
25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	3,225,000,000	100%	3,447,500,000	100%	3.792.250.000	100%	4.171.475.000	100%	4.588.622.500
	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	N/A	100%	300,000,000	100%	330,000,000	100%	363.000.000	100%	399.300.000	100%	439.230.000
		Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
		Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	CC	CC		CC		CC		B		B	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan sarana dan Prasarana aparatur	100%	100%	750,000,000	100%	825,000,000	100%	907.500.000	100%	998.250.000	100%	1.098.075.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur (PNS)	100%	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Persentase Sumber daya Aparatur yang Memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70%	75%	175,000,000	80%	192,500,000	90%	211.750.000	100%	232.925.000	100%	256.217.500
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran & Akta Kematian	65%	70%	6,450,000,000	78%	4,645,000,000	80%	4.946.853.111	83%	5.441.538.422	85%	5.985.692.264
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Terpeliharanya Arsip Kependudukan & Pencatatan Sipil	99,605,000	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	242.000.000	100%	266.200.000	100%	292.820.000
		Jumlah			11,200,000,000		9,770,000,000		10.584.353.111		11.642.788.422		12.807.067.264

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
26	DINAS SOSIAL												
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Persentase penanganan keluarga miskin	2,93%	19,05%	1,320,000,000	19,68%	1,452,000,000	20,32%	1.564.557.083	20,95%	1.721.012.792	21,59%	1.893.114.071
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase cakupan penanganan korban trafficking, korban bencana & orang terlantar dalam perjalanan yang ditangani	100%	100%	2,129,691,000	100%	2,892,660,100	100%	3.018.711.527	100%	3.320.582.680	100%	3.652.640.948
	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan	25,51%	4,77%	2,560,000,000	4,77%	2,816,000,000	4,77%	2.934.385.417	4,77%	3.227.823.959	4,77%	3.550.606.355
	Program Pembinaan para penyandang cacat & eks-trauma	Persentase penanganan penyandang cacat	37,70%	6,53%	1,014,125,000	8,16%	874,500,000	9,79%	961.950.000	11,42%	1.058.145.000	13,05%	1.163.959.500
	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Jumlah Penghuni Panti yang ditangani	3554 orang	3554 orang	2,211,010,000	3554 orang	1,562,000,000	3554 orang	1.741.516.369	3554 orang	1.915.668.006	3554 orang	2.107.234.806
	Program Pembinaan Eks-Penyandang Penyakit Sosial (Eks-narapidana, PSK, narkoba, & penyakit sosial lainnya)	Persentase penanganan Gelandangan, Pengemis, WTS dan Korban Penyalahgunaan Napza	18,11%	9,93%	9,060,532,000	11,91%	20,002,009,119	13,90%	21.838.995.448	15,88%	24.022.894.993	17,87%	26.425.184.492
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yg ikut serta dalam penanganan masalah sosial	500 PSKS	998 PSKS	1,820,000,000	1,387 PSKS	2,002,000,000	1,387 PSKS	2.038.985.417	1,392 PSKS	2.242.883.959	1,392 PSKS	2.467.172.355
	Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia	Persentase penanganan Lanjut Usia Terlantar	77,32%	15,42% / 100org	100,000,000	18,03% / 100org	125,000,000	20 / 87% / 100 orang	137.500.000	23,96% / 150 orang	151.250.000	27,28% 200 orang	166.375.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan administrtasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	1,182,794,000	12 bulan	1,301,073,400	12 bulan	1.454.497.109	12 bulan	1.599.946.820	12 bulan	1.759.941.502
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1,797,770,000	100%	1,531,277,000	100%	2.174.028.449	100%	2.391.431.294	100%	2.630.574.423

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pelanggaran Pegawai Negeri Sipil	0%	0%	121,310,000	0%	133,441,000	0%	146.785.100	0%	161.463.610	0%	177.609.971
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	165,000,000	100%	181,500,000	100%	199.650.000	100%	219.615.000	100%	241.576.500
	Program Peningkatan & Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	N/A	100%	217,768,000	100%	239,544,800	100%	263.499.280	100%	289.849.208	100%	318.834.129
		Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
		Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	NA	CC		CC		CC		B		B	
		Jumlah			23,700,000,000		35,113,005,419		38.475.061.199		42.322.567.319		46.554.824.051
27	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	970,475,000	100%	870,100,000	100%	957.110.000	100%	1.052.821.000	100%	1.158.103.100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	1,084,450,000	100%	4,100,000,000	100%	4.510.000.000	100%	4.961.000.000	100%	5.457.100.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Disiplin Aparatur	100%	100%	56,000,000	100%	165,000,000	100%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	219.615.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	243,050,000	100%	250,000,000	100%	275.000.000	100%	302.500.000	100%	332.750.000
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	NA	100%	60,000,000	100%	77,000,000	100%	84.700.000	100%	93.170.000	100%	102.487.000
		Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah		100%		100%		100%		100%		100%	
		Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	CC	CC		CC		B		B		A	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Cakupan Sistem TI Kearsipan	1 Database	1 Database	56,650,000	1 Database	660,000,000	1 Database	726.000.000	1 Database	798.600.000	1 Database	878.460.000
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku Daerah	29 SKPD	7 SKPD	62,350,000	7 SKPD	534,000,000	7 SKPD	587.400.000	7 SKPD	646.140.000	7 SKPD	710.754.000
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana Kearsipan	100%	100%	47,750,000	100%	80,000,000	100%	88.000.000	100%	96.800.000	100%	106.480.000
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi bagi SKPD tentang Kearsipan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	85,000,000	1 Kegiatan	125,000,000	1 Kegiatan	137.500.000	1 Kegiatan	151.250.000	1 Kegiatan	166.375.000
	Program peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan	Cakupan sistem Perpustakaan TI	1 Database	1 Database	73,200,000	1 Database	370,000,000	1 Database	407.000.000	1 Database	447.700.000	1 Database	492.470.000
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana Perpustakaan	100%	100%	20,900,000	100%	35,000,000	100%	38.500.000	100%	42.350.000	100%	46.585.000
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Prpustakaan & Budaya Baca	Jumlah Pemustaka (orang)	4500	4600 Pemustaka	1,091,070,000	4896 Pemustaka	4,210,000,000	5184 Pemustaka	4.141.356.251	5472 Pemustaka	4.555.491.876	5760 Pemustaka	5.011.041.064
		Jumlah			3,850,895,000		11,476,100,000		12.134.066.251		13.347.472.876		14.682.220.164
28	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA												
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	7,588,550,000	100%	10.900.500.000	100%	11.729.406.667	100%	12.902.347.334	100%	14.192.582.067
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	3,810,000,000	100%	2,723,000,000	100%	2.734.156.667	100%	3.007.572.334	100%	3.308.329.567
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	100%	315,000,000	100%	246,500,000	100%	271.150.000	100%	298.265.000	100%	328.091.500
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	500,000,000	100%	350,000,000	100%	385.000.000	100%	423.500.000	100%	465.850.000
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	N/A	100%	300,000,000	100%	880,000,000	100%	968.000.000	100%	1.064.800.000	100%	1.171.280.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
		Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
		Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	CC	CC		CC		B		B		A	
	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Cakupan Komunitas pemuda/ OKP yang dibina	69 OKP	80%	550,000,000	90%	110,000,000	90%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000
	Peningkatan Peran Pemuda	Jumlah Pembinaan kegiatan Kepemudaan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	2,350,000,000	7 Kegiatan	2,835,000,000	7 Kegiatan	2.857.356.667	7 Kegiatan	3.143.092.334	7 Kegiatan	3.457.401.567
	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	40 orang	40 orang	300,000,000	40 orang	580,000,000	40 orang	638.000.000	45 orang	701.800.000	45 orang	771.980.000
	Upaya Pemberian Penyuluhan Ttg Bahaya Narkoba bagi Pemuda	Penyuluhan Pencegahan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda			-		250,000,000		275.000.000		302.500.000		332.750.000
	Pengembangan Kebijakan dan Managemen Olahraga	Jumlah Dokumen Bidang Olahraga	4 Dok	3 Dok	1,265,000,000	4 Dok	1,491,500,000	4 Dok	1.640.650.000	4 Dok	1.804.715.000	4 Dok	1.985.186.500
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah kejuaraan atau perlombaan yang diikuti (olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olah raga rekreasi/masyarakat)	8 kejuaraan / perlombaan	8 kejuaraan /perlombaan	24,278,500,000	8 kejuaraan/ perlombaan	19,056,350,000	8 kejuaraan/ perlombaan	20.700.841.667 (15,000,000,000 dari banprov)	8 kejuaraan/ perlombaan	22.770.925.834 15,000,000,000 dari banprov)	8 kejuaraan/ perlombaan	25.048.018.417 (15,000,000,000 dari banprov)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga yang Terbangun	14 SOR/GOR	14 SOR/GOR	63,795,450,000	14 SOR/GOR	53,324,995,000 (35,000,000,000 dari banprov)	14 SOR/GOR	58.396.351.167 (35,000,000,000 dari banprov)	14 SOR/GOR	64.235.986.284 (35,000,000,000 dari banprov)	14 SOR/GOR	70.659.584.912 (35,000,000,000 dari banprov)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Jumlah Gelanggang Pemuda dan Sarana Pendukung	3 Gelanggang	3 Gelanggang	950,000,000	3 Gelanggang	1,045,000,000	3 Gelanggang	1.149.500.000	3 Gelanggang	1.264.450.000	3 Gelanggang	1.390.895.000
		Jumlah			93,488,950,000		93,792,845,000		101.866.412.837		112.053.054.120		123.258.359.532
29	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	3,028,912,336	100%	3,231,803,570	100%	3.368.452.975	100%	3.705.298.273	100%	4.075.828.100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	2,587,175,000	100%	2,910,242,500	100%	3.177.950.381	100%	3.495.745.419	100%	3.845.319.961

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	100%	424,625,000	100%	467,087,500	100%	513.796.250	100%	565.175.875	100%	621.693.463
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Prosentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	825,250,000	100%	907,775,000	100%	998.552.500	100%	1.098.407.750	100%	1.208.248.525
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah	WDP	WDP	10,530,750,000	WTP	9,900,325,000	WTP	10.703.826.548	WTP	11.774.209.203	WTP	12.951.630.123
	Program Pembinaan & fasilitasi pengelolaan keuangan kab/ kota	Terwujudnya Akuntabilitas APBD	100%	100%	1,170,987,664	100%	1,288,086,430	100%	1.416.895.073	100%	1.558.584.580	100%	1.714.443.038
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya penganggaran berbasis kinerja	100%	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	persentase data DPKAD yang dapat diarsipkan	50%	70%	821,258,000	80%	903,383,800	90%	993.722.180	100%	1.093.094.398	100%	1.202.403.838
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Kepatuhan daerah dalam pengelolaan keuangan/aset	100%	100%	350,000,000	100%	385,000,000	100%	423.500.000	100%	465.850.000	100%	512.435.000
	Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan & Pemanfaatan Tanah	persentase pemanfaatan dan pengadaan lahan oleh Pemerintah Kota Bandung	75%	80%	253,012,555,000	85%	262,701,094,700 (50,000,000,000 dari banprov)	90%	288.784.673.218 (50,000,000,000 dari banprov)	95%	317.663.140.540 (50,000,000,000 dari banprov)	100%	349.429.454.594 (50,000,000,000 dari banprov)
	Program Perencanaan Pengadaan Tanah	Dokumen feasibility study pembelian asset/tanah	N/A	150 dok	2,562,850,000	150 dok	8,561,055,800	150 dok	9.230.630.428	150 dok	10.153.693.471	150 dok	11.169.062.818
	Program Persiapan Pengadaan Tanah	Sosialisasi, penilaian musyawarah	N/A	150 kali		150 kali	8,244,445,000	150 kali	8.882.358.548	150 kali	9.770.594.403	150 kali	10.747.653.843
	Program Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota	N/A	150 dok		150 dok	1,626,350,000	150 dok	1.765.668.631	150 dok	1.942.235.494	150 dok	2.136.459.044
	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	persentase konflik pertanahan yang terfasilitasi	100%	100%	750,000,000	100%	825,000,000	100%	907.500.000	100%	998.250.000	100%	1.098.075.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	75%	75%	455,637,000	80%	501,200,700	80%	551.320.770	80%	606.452.847	80%	667.098.132

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
		Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
		Penilaian Lakip SKPD oleh inspektorat/ kementerian	CC	CC		CC		B		B		A	
	Program pengembangan data /informasi	Persentase data tersampaikan		100%	700,000,000	100%	770,000,000	100%	847.000.000	100%	931.700.000	100%	1.024.870.000
		Jumlah			277,320,000,000		303,332,850,000		322.038.820.323		354.242.702.356		389.666.972.591
30	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDAG												
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1,740,434,400	100%	1,824,431,250	100%	1.656.302.709	100%	1.821.932.980	100%	2.004.126.277
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	1,339,650,000	100%	620,000,000	100%	682.000.000	100%	750.200.000	100%	825.220.000
	Program Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	100%	105,700,000	100%	121,555,000	100%	133.710.500	100%	147.081.550	100%	161.789.705
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	380,875,000	100%	430,585,000	100%	473.643.500	100%	521.007.850	100%	573.108.635
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	N/A	100%	484,000,000	100%	689.280,00	100%	484.000.000	100%	532.400.000	100%	585.640.000
		Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
		Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	CC	CC		CC		B		B		A	
	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Jumlah UKM yang berdaya saing.	4,581 UMKM	4,336	930,131,200	4,594	945,000,000	4.897	1.039.500.000	5.246	1.143.450.000	5.641	1.257.795.000
	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Jumlah SDM koperasi dan UKM yg dilatih serta tersedianya sarana pemasaran produk KUKM	1,069	400	750,000,000	600	12.407.220.000	680	15.127.000.000	760	15.761.000.000	840	16.479.000.000
		Wirausaha baru	N/A	-	0	4,514		4,621		4,783		4,973	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	Jumlah UMKM binaan	93 UMKM	135	711,571,200	194 UMKM	1.682.000.000	189 UMKM	970.200.000	275 UMKM	1.067.220.000	270 UMKM	1.173.942.000
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi	Terpromosikannya produk Kota Bandung di kegiatan CSS						-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	81,14%	81,76%	2,225,000,000	82,85%	3,551,250,000	84,41%	3.225.803.334	86,24%	3.548.383.667	88,82%	3.903.222.034
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase komoditas peredaran barang yang diawasi	22 jenis barang	18,90%	1,314,133,000	18,90%	5,099,280,000	18,9%	5.368.636.334	18,9%	5.905.499.967	58,4%	6.496.049.964
		Fasilitasi penyaluran subsidi gas 3 kg	-	0%	-	62.255 KK (RTM)		62.255 KK (RTM)		62.255 KK (RTM)		62.255 KK (RTM)	
	Program peningkatan & pengembangan ekspor	Meningkatnya nilai ekspor	US\$ 601 jt	US\$ 603 jt	1,273,805,200	US\$ 606 jt	1,839,864,000	US\$ 609 jt	1.343.278.734	US\$ 612 jt	1.477.606.607	US\$ 614 jt	1.625.367.268
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pelaku usaha formal yang mendapatkan izin usaha	14,831 unit usaha	1,329 unit usaha	1,205,000,000	1,462 unit usaha	1,250,000,000	1,608 unit usaha	1.407.642.917	1,769 unit usaha	1.548.407.208	1,946 unit usaha	1.703.247.929
	Program pembinaan pedagang kaki lima & asongan	Jumlah PKL mendapat pembinaan tentang manajemen usaha, organisasi dan permodalan	1,310 PKL	1,800 PKL	1,675,000,000	1,500 PKL	1.250.000.000	1,750 PKL	825.000.000	2,250 PKL	907.500.000	2,750 PKL	998.250.000
	Program persaingan usaha	Jumlah cakupan binaan pedagang formal	N/A	100 pelaku usaha	228,000,000	150 pelaku usaha	325,000,000	200 pelaku usaha	357.500.000	250 pelaku usaha	393.250.000	300 pelaku usaha	432.575.000
	Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Persentase industri berbasis teknologi	6,828 industri kecil	2,94%	435,000,000	3,20%	280,000,000	4,4%	308.000.000	5,44%	338.800.000	6%	372.680.000
	Program pengembangan industri kecil menengah	Jumlah unit usaha dan sentra yang dibina	120 pelaku usaha IKM	125 pelaku usaha IKM	970,700,000	180 pelaku usaha IKM	1,898,802,500	180 pelaku usaha IKM	1.628.111.084	180 pelaku usaha IKM	1.790.922.192	180 pelaku usaha IKM	1.970.014.411
	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi dalam proses produksi	553 IKM	10,60%	485,000,000	17,80%	585,000,000	21,2%	643.500.000	23,8%	707.850.000	26,5%	778.635.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program penataan struktur industri	Terpenuhinya sarana dan prasarana Gedung UPT Cigondewah	1 unit gedung UPT Cigondewah	60%	5,735,882,000	100%	5,285,615,263	-	5.683.605.123	-	6.251.965.635	-	6.877.162.199
	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sosialisasi Bandung Kota Kreatif	1 buku sentra, 1 website sentra, 2 multimedia informasi sentra	2 kali	200,000,000	2 kali	460,750,000	3 kali	506.825.000	3 kali	557.507.500	3 kali	613.258.250
	Program pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis	Jumlah unit usaha industri kreatif yang dibina (pelaku industri kreatif)	274	125 pelaku	400,000,000	190 pelaku	2,282,250,000 (1.000.000.000 dari banprov)	220 pelaku industri kreatif	1.389.903.334 (1.000.000.000 dari banprov)	260 pelaku industri kreatif	1.528.893.667 (1.000.000.000 dari banprov)	270 pelaku industri kreatif	1.681.783.034 (1.000.000.000 dari banprov)
		Jumlah			22,789,882,000		42,827,883,013		45.968.169.234		50.564.986.157		55.621.484.773
31	DINAS PELAYANAN PAJAK												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	12,355,200,000	100%	10.900.000.000	100%	11.728.856.667	100%	12.901.742.334	100%	14.191.916.567
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah sesuai standar	100%	100%	11,261,400,000	100%	8.000.000.000	100%	8.538.856.667	100%	9.392.742.334	100%	10.332.016.567
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat pelanggaran PNS	0%	0%	608,000,000	0%	600.000.000	0%	660.000.000	0%	726.000.000	0%	798.600.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Tingkat Pemahaman peraturan/UU		100%	2,000,000,000	100%	16.000.000.000	100%	1.718.856.667	100%	1.890.742.334	100%	2.079.816.567
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	NA	100%	500,000,000	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	302.500.000	100%	332.750.000
		Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
		Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/Kemenpan	CC	CC		CC		B		B		A	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat pelaksanaan anggaran	1 dok	2 dok	250,000,000	1 dok	250.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah kelompok sasaran sasaran/jenis yang mendapatkan insentif pajak	12	0	0	1	4,400.000.0000	1	3.203.856.667	1	3.524.242.334	1	3.876.666.567
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase data Dinas Pelayanan Pajak yang dapat diarsipkan	N/A	0	0	50%	500.000.000	60%	550.000.000	80%	605.000.000	100%	665.500.000
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penerimaan Pajak Daerah	1.056 Triliun Rp	1.400 Triliun Rp	16.000.000.000	1.613. Triliun Rp	12.580.618.772	1.850 Triliun Rp	14.732.537.317	2,118. Triliun Rp	16.205.791.048	2,426. Triliun Rp	17.826.370.153
		IKM Bidang Pembayaran Pajak Daerah	B	B		B		B		A		A	
		Jumlah			39,483,000,000		39,080,618,772		41.682.963.986		45.851.260.384		50.436.386.423

No	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
1	KECAMATAN SUKASARI												
	Program Pelayanan Admisnistrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	766,277,338	100%	582,905,017	100%	641,195,519	100%	705,315,071	100%	775,846,578
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	3,223,878,162	100%	887,261,033	100%	975,987,136	100%	1,073,585,850	100%	1,180,944,435
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	62,400,000	100%	158,640,000	100%	174,504,000	100%	191,954,400	100%	211,149,840
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	150,000,000	100%	165,000,000	100%	181,500,000	100%	199,650,000	100%	219,615,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian LAKIP SKPD Oleh Inspektorat/ Kemenpan	CC	CC	34,100,000	CC	30,510,000	B	33,561,000	B	36,917,100	A	40,608,810
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat		IKM= 70,86	2,951,744,500	IKM= 71,95	2,875,683,950	IKM= 75,15	3,163,252,345	IKM= 78,25	3,479,577,580	IKM= 81,50	3,827,535,337
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-		4,400,000,000		4,840,000,000		5,324,000,000		5,856,400,000
		Jumlah			7,658,400,000		9,100,000,000		10,010,000,000		11,011,000,000		12,112,100,000
2	KECAMATAN CIDADAP												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	98%	100	782,349,978	100	560,585,460	100	616,644,006	100	678,308,407	100	746,139,247
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	N/A	35%	4,870,231,000	20%	962,974,540	20%	1,059,271,994	20%	1,165,199,193	5%	1,281,719,113

No	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	N/A	100%	50,400,000	100%	55,440,000	100%	60,984,000	100%	67,082,400	100%	73,790,640
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	N/A	100	110,000,000	100	121,000,000	100	133,100,000	100	146,410,000	100	161,051,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian LAKIP SKPD Oleh Inspektorat/ Kemenpan	CC	CC	-	CC	41.500.000	B	45.650.000	B	50.215.000	A	55.236.500
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	76,69	78	2,236,831,400	80	2,500,000,000	82	2,750,000,000	83	3,025,000,000	85	3,327,500,000
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	3,800,000,000	Sedang	4,180,000,000	Tinggi	4,598,000,000	Tinggi	5,057,800,000
		Jumlah			8,087,461,478		8,041,500,000		8,845,650,000		9,730,215,000		10,703,236,500
3	KECAMATAN SUKAJADI												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100%	100%	692,967,615	100%	605,825,830	100%	666,408,413	100%	733,049,254	100%	806,354,180
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1,805,744,700	100%	1,986,319,170	100%	2,184,951,087	100%	2,403,446,196	100%	2,643,790,815
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	75	75	98,050,000	80	107,855,000	85	118,640,500	90	130,504,550	95	143,555,005
	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	2,68	2,85	3,236,687,685	2,90	2,500,000,000	3,10	2,750,000,000	3,20	3,025,000,000	3,30	3,327,500,000
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	6,400,000,000	Sedang	7,040,000,000	Tinggi	7,744,000,000	Tinggi	8,518,400,000
		Jumlah			5,899,000,000		11,600,000,000		12,760,000,000		14,036,000,000		15,439,600,000
4	KECAMATAN CICENDO												
	Program Pelayanan Adm, Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	908.817.000	100%	699.698.700	100%	769.668.570	100%	846.635.427	100%	931.298.970
	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2.255.678.000	100%	1.549.811.800	100%	1.704.792.980	100%	1.875.272.278	100%	2.062.799.506

No	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	100%	63.000.000	100%	69.300.000	100%	76.230.000	100%	83.853.000	100%	92.238.300
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	88.000.000	100%	96.800.000	100%	106.480.000	100%	117.128.000	100%	128.840.800
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian LAKIP SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	CC	CC	24.450.000	CC	26.895.000	CC	29.584.500	B	32.542.950	A	35.797.245
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat		IKM = 68	3,328,655,000	IKM = 68,5	3,257,494,500	IKM = 69	3,583,243,950	IKM = 69,5	3,941,568,345	IKM = 70	4,335,725,180
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	7,400,000,000	Sedang	8,140,000,000	Tinggi	8,954,000,000	Tinggi	9,849,400,000
		Jumlah			3,441,105,000		13,100,000,000		14,410,000,000		15,851,000,000		17,436,100,000
5	KECAMATAN ANDIR												
	Program : 1.Pelayanan Adm, Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	938,880,000	100%	919,768,000	100%	1,011,744,800	100%	1,112,919,280	100%	1,224,211,208
	Program : 2.Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	5,017,458,986	100%	1,095,758,986	100%	1,205,334,885	100%	1,325,868,373	100%	1,458,455,210
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	24,500,000	100%	26,950,000	100%	29,645,000	100%	32,609,500	100%	35,870,450
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	36,000,000	100%	39,600,000	100%	43,560,000	100%	47,916,000	100%	52,707,600
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian LAKIP SKPD Oleh Inspektorat atau Kemenpan	CC	CC	35,000,000	CC	38,500,000	CC	42,350,000	B	46,585,000	A	51,243,500
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program : Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat		IKM = 68	4,103,961,014	IKM = 68,5	3,579,423,014	IKM = 69	3,937,365,315	IKM = 69,5	4,331,101,847	IKM = 70	4,764,212,032
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	7,200,000,000	Sedang	7,920,000,000	Tinggi	8,712,000,000	Tinggi	9,583,200,000

No	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah			10,325,800,000		12,900,000,000		14,190,000,000		15,609,000,000		17,169,900,000
6	KECAMATAN COBLONG												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran		100%	1,077,200,000	100%	884,920,000	100%	973,412,000	100%	1,070,753,200	100%	1,177,828,520
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur		100%	3,760,000,000	100%	2,046,680,000	100%	2,251,348,000	100%	2,476,482,800	100%	2,724,131,080
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil		100%	114,000,000	100%	125,400,000	100%	137,940,000	100%	151,734,000	100%	166,907,400
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	90,000,000	100%	99,000,000	100%	108,900,000	100%	119,790,000	100%	131,769,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian LAKIP SKPD Oleh Inspektorat atau Kemenpan	CC	CC	40,000,000	CC	44,000,000	CC	48,400,000	B	53,240,000	A	58,564,000
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program Peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan	Indek Kepuasan Masyarakat		2,94 68,4 WDP	3,970,800,000	2,95 6,9 WDP	2,500,000,000	2,97 70 WTP	2,750,000,000	2,98 70 WTP	3,025,000,000	2,99 70 WTP	3,327,500,000
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	9.300.000.000	Sedang	10,230,000,000	Tinggi	11,253,000,000	Tinggi	12,378,300,000
		Jumlah			9,052,000,000		15,000,000,000		16,500,000,000		18,150,000,000		19,965,000,000
7	KECAMATAN BANDUNG WETAN												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	647.147.000	100%	411.861.700	100%	485.589.995	100%	534.148.995	100%	587.563.894
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.329.545.000	100%	931.599.550	100%	1.024.759.505	100%	1.127.235.456	100%	1.239.959.001
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100%	100%	73.650.000	100%	81.015.000	100%	89.116.500	100%	98.028.150	100%	107.830.965
	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penilaian LAKIP SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	cc	CC	20.400.000	CC	22.440.000	CC	24.684.000	B	27.152.400	A	29.867.640
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur	Jumlah aparatur yang terbina	100%	100%	40,000,000	100%	44,000,000	100%	48,400,000	100%	53,240,000	100%	58,564,000

No	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya			330,000,000		179.500.000		197.450.000		217.195.000		238.914.500
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyerahan laporan kinerja dan keuangan	100%	100%	25,725,000	100%	29.583.750	100%	32,542,125	100%	35,796,338	100%	39,375,971
	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indek Kepuasan Masyarakat			3.230.058.000		2.500.000.000		2.750.000.000		3.025.000.000		3.327.500.000
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	4.500.000.000	Sedang	4.950.000.000	Tinggi	5.445.000.000	Tinggi	5.989.500.000
		Jumlah			4,506,000,000		8,700,000,000		9,570,000,000		10,527,000,000		11,579,700,000
8	KECAMATAN SUMUR BANDUNG												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	N/A	75%	1,022,700,000	85%	706,557,250	90%	777,212,975	95%	854,934,273	100%	940,427,700
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	N/A	80%	10,782,000,000	85%	632,002,250	90%	695,202,475	95%	764,722,723	100%	841,194,995
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	100%	140,000,000	100%	391,452,250	100%	430,597,475	100%	473,657,223	100%	521,022,945
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	N/A	50%	330,000,000	60%	209,952,250	70%	230,947,475	80%	254,042,223	90%	279,446,445
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian LAKIP SKPD Oleh Inspektorat atau Kemenpan	CC	CC	25,725,000	CC	260,036,000	CC	286,039,600	B	314,643,560	A	346,107,916
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	50%	1,645,100,000	60%	2,500,000,000	70%	2,750,000,000	80%	3,025,000,000	90%	3,327,500,000
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	4,800,000,000	Sedang	5,280,000,000	Tinggi	5,808,000,000	Tinggi	6,388,800,000
		Jumlah			19,920,500,000		9,500,000,000		10,450,000,000		11,495,000,000		12,644,500,000
9	KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL												

No	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	609.751.000	100%	642.501.000	100%	706.751.100	100%	777.426.210	100%	855.168.831
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1,495,838,000	100%	1,178,268,000	100%	1,296,094,800	100%	1,425,704,280	100%	1,568,274,708
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin aparatur	100%	100%	72,500,000	100%	51.400.000	100%	56.540.000	100%	62.194.000	100%	68.413.400
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian LAKIP SKPD Oleh Inspektorat atau Kemenpan	CC	CC	17,040,000	CC	22.000.000	CC	24.200.000	B	26,620,000	A	29.282.000
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program: Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	83,625,000	100%	85.000.000	100%	93.500.000	100%	102.850.000	100%	113.135.000
	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat		2,68	4,250,246,000	2,85	3,970,831,000	2,90	4.367.914.100	3,10	4.804.705.810	3,25	5.285.176.061
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	10,500,000,000	Sedang	11,550,000,000	Tinggi	12,705,000,000	Tinggi	13,975,500,000
		Jumlah			6,704,000,000		16.450.000.000		18,095,000,000		19,904,500,000		21,894,950,000
10	KECAMATAN CIBEUNYING KALER												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,275,927,000	100%	1.253.502.800	100%	1.378.853.080	100%	1.516.738.388	100%	1.668.412.227
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	4,189,831,000	100%	921,832,200	100%	1,014,015,420	100%	1,115,416,962	100%	1,226,958,658
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	135,675,000	100%	143,585,000	100%	157,943,500	100%	173,737,850	100%	191,111,635
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	62%	62%	55,000,000	63%	60,500,000	65%	66,550,000	66%	73,205,000	67%	80,525,500
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian LAKIP SKPD Oleh Inspektorat atau Kemenpan	CC	CC	99,580,000	CC	99,580,000	CC	109,538,000	B	120,491,800	A	132,540,980
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%	21,000,000	100%	21,000,000	100%	23,100,000	100%	25,410,000	100%	27,951,000
	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat			2,638,987,000		2,200,000,000		2,420,000,000		2.662.000.000		2.928.500.000

No	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	5,800,000,000	Sedang	6,380,000,000	Tinggi	7,018,000,000	Tinggi	7,719,800,000
		Jumlah			8,446,000,000		10,500,000,000		11,550,000,000		12,705,000,000		13,975,500,000
11	KECAMATAN ASTANAANYAR												
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian LAKIP SKPD Oleh Inspektorat atau Kemenpan	CC	CC	34,910,000	CC	41,892,000	CC	46,081,200	B	50,689,320	A	55,758,252
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	82,000,000	100%	98,400,000	100%	108,240,000	100%	119,064,000	100%	130,970,400
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	55,000,000	100%	182,000,000	100%	200,200,000	100%	220,220,000	100%	242,242,000
	Program Pelayanan Adm, Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	688,890,000	100%	974,386,000	100%	1,071,824,600	100%	1,179,007,060	100%	1,296,907,766
	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan asarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2,763,400,000	100%	1,537,600,000	100%	1,691,360,000	100%	1,860,496,000	100%	2,046,545,600
	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat		2,68	3,329,000,000	2,85	2,865,722,000	2,90	3,152,294,200	3,1	3,467,523,620	3,2	3,814,275,982
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	6,500,000,000	Sedang	7,150,000,000	Tinggi	7,865,000,000	Tinggi	8,651,500,000
		Jumlah			6,953,200,000		12,200,000,000		13,420,000,000		14,762,000,000		16,238,200,000
12	KECAMATAN BOJONGLOA KALER												
	Program Pelayanan Adm, Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	879,558,300	100%	667,514,130	100%	734,265,543	100%	807,692,097	100%	888,461,307
	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan asarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2,622,600,000	100%	1,234,860,000	100%	1,358,346,000	100%	1,494,180,600	100%	1,643,598,660
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	142,300,000	100%	156,530,000	100%	172,183,000	100%	189,401,300	100%	208,341,430
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	355,100,000	100%	390,610,000	100%	429,671,000	100%	472,638,100	100%	519,901,910

No	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian LAKIP SKPD Oleh Inspektorat atau Kemenpan	CC	CC	42,725,000	CC	46,997,500	CC	51,697,250	B	56,866,975	A	62,553,673
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program: Peningkatan Peran Kec. dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat		IKM = 68	3,163,221,000	IKM = 68,5	2,703,488,370	IKM = 69	2,973,837,207	IKM = 69,5	3,271,220,928	IKM = 70	3,598,343,020
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	6,200,000,000	Sedang	6,820,000,000	Tinggi	7,502,000,000	Tinggi	8,252,200,000
		Jumlah			7,205,504,300		11,400,000,000		12,540,000,000		13,794,000,000		15,173,400,000
13	KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	75	80	200,785,000	85	700,063,000	90	770,069,300	95	847,076,230	100	931,783,853
	Program Peningkatan sarana dan prasarana	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur				100%	600,000,000	100%	660,000,000	100%	726,000,000	100%	798,600,000
	Program Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil				100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	121,000,000	100%	133,100,000
	Program Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penilaian LAKIP SKPD Oleh Inspektorat atau Kemenpan	CC	CC	130,000,000	CC	33,000,000	CC	36,300,000	B	39,930,000	A	43,923,000
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program Peningkatan Pembinaan Kinerja aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Cukup/65	Cukup/70	250,000,000	Cukup/75	65,000,000	Baik/80	71,500,000	Baik/85	78,650,000	Sangat Baik/91	86,515,000
	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	2,2	2,5	5,575,000,000	2,7	4,201,937,000	3	4,622,130,700	3,2	5,084,343,770	3,5	5,592,778,147
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	6,200,000,000	Sedang	6,820,000,000	Tinggi	7,502,000,000	Tinggi	8,252,200,000
		Jumlah			7,119,785,000		11,900,000,000		13,090,000,000		14,399,000,000		15,838,900,000
14	KECAMATAN BABAKAN CIPARAY												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	788,880,000	100%	748,756,000	100%	823,631,600	100%	905,994,760	100%	996,594,236
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	3,001,120,000	100%	2,196,244,000	100%	2,415,868,400	100%	2,657,455,240	100%	2,923,200,764

No	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin pegawai negeri sipil	100%	100%	140,000,000	100%	155,000,000	100%	170,500,000	100%	187,550,000	100%	206,305,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60	70	-	70	50,000,000	70	55,000,000	70	60,500,000	70	66,550,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian LAKIP SKPD Oleh Inspektorat atau Kemenpan	CC	CC	-	CC	50,000,000	CC	55,000,000	B	60,500,000	A	66,550,000
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	73,94%	74,44%	3,503,200,000	74,94%	2,500,000,000	75,44%	2,750,000,000	75,94%	3,025,000,000	76,44%	3,327,500,000
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	7,500,000,000	Sedang	8,250,000,000	Tinggi	9,075,000,000	Tinggi	9,982,500,000
		Jumlah			7,433,200,000		13,200,000,000		14,520,000,000		15,972,000,000		17,569,200,000
15	KECAMATAN BANDUNG KULON												
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	880,400,000	100%	668,440,000	100%	735,284,000	100%	808,812,400	100%	889,693,640
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	4,108,900,000	100%	1,500,950,000	100%	1,651,045,000	100%	1,816,149,500	100%	1,997,764,450
	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	184,000,000	100%	202,400,000	100%	222,640,000	100%	244,904,000	100%	269,394,400
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	169,200,000	100%	186,120,000	100%	204,732,000	100%	225,205,200	100%	247,725,720
	Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat		IKM = 65	3,248,300,000	IKM = 67,5	4,142,090,000	IKM = 70	4,556,299,000	IKM = 72,5	5,011,928,900	IKM = 75	5,513,121,790
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	9,600,000,000	Sedang	10,560,000,000	Tinggi	11,616,000,000	Tinggi	12,777,600,000
		Jumlah			8,590,800,000		16,300,000,000		17,930,000,000		19,723,000,000		21,695,300,000
16	KECAMATAN REGOL												
	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	981,160,000	100%	819,393,000	100%	901,332,300	100%	991,465,530	100%	1,090,612,083

No	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1,847,920,000	100%	2,072,829,000	100%	2,280,111,900	100%	2,508,123,090	100%	2,758,935,399
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	70%	70%	44,850,000	75%	89,452,000	80%	98,397,200	85%	108,236,920	90%	119,060,612
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan keterampilan teknologi informasi;	65%	65%	24,000,000	70%	66,517,000	75%	73,168,700	80%	80,485,570	86%	88,534,127
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian LAKIP SKPD oleh Inspektorat atau Kemenpan	CC	CC	28,950,000	CC	71,962,000	CC	79,158,200	B	87,074,020	A	95,781,422
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,86%	2,68	3,409,410,000	2,85	3,079,847,000	2,90	3,387,831,700	3,10	3,726,614,870	3,20	4,099,276,357
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	8,100,000,000	Sedang	8,910,000,000	Tinggi	9,801,000,000	Tinggi	10,781,100,000
		Jumlah			6,518,640,000		14,300,000,000		15,730,000,000		17,303,000,000		19,033,300,000
17	KECAMATAN LENGKONG												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	981,824,449	100%	972,506,893	100%	1,069,757,582	100%	1,176,733,341	100%	1,294,406,675
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1,734,390,551	100%	1,907,829,606	100%	2,098,612,567	100%	2,308,473,823	100%	2,539,321,206
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	75%	75%	104,300,000	80%	114,730,000	85%	126,203,000	90%	138,823,300	95%	152,705,630
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70%	70%	108,119,554	75%	118,931,509	80%	130,824,660	85%	143,907,126	90%	158,297,838
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian LAKIP SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan	CC	CC	66,780,000	CC	73,458,000	CC	80,803,800	B	88,884,180	A	97,772,598
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat			3,135,385,446		3,012,543,992		3,313,798,391		3,645,178,230		4,009,696,053
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	8,600,000,000	Sedang	9,460,000,000	Tinggi	10,406,000,000	Tinggi	11,446,600,000

No	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah			6.130.800,000		14,800,000,000		16,280,000,000		17,908,000,000		19,698,800,000
18	KECAMATAN BATUNUNGGAL												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,275,412,000	100%	1,102,953,200	100%	1,213,248,520	100%	1,334,573,372	100%	1,468,030,709
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	4,020,218,000	100%	2799309800	100%	3,079,240,780	100%	3,387,164,858	100%	3,725,881,344
	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	107,045,000	100%	117,749,500	100%	129,524,450	100%	142,476,895	100%	156,724,585
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	151,500,000	100%	166,650,000	100%	183,315,000	100%	201,646,500	100%	221,811,150
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penilaian LAKIP SKPD Oleh Inspektorat atau Kemenpan	CC	CC	12,125,000	CC	13,337,500	CC	14,671,250	B	16,138,375	A	17,752,213
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
	Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat		3	3,729,350,000	3,2	2,500,000,000	3,3	2,750,000,000	3,4	3,025,000,000	3,5	3,327,500,000
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	10,700,000,000	Sedang	11,770,000,000	Tinggi	12,947,000,000	Tinggi	14,241,700,000
		Jumlah			9,465,400,000		17,400,000,000		19,140,000,000		21,054,000,000		23,159,400,000
19	KECAMATAN KIARACONDONG												
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,506,628,000	100%	1,357,290,800	100%	1,493,019,880	100%	1,642,321,868	100%	1,806,554,055
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2,337,250,000	100%	1,518,383,000	100%	1,670,221,300	100%	1,837,243,430	100%	2,020,967,773
	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	75%	75%	92,850,000	80%	102,135,000	85%	112,348,500	90%	123,583,350	95%	135,941,685
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70%	70%	201,992,000	80%	222,191,200	85%	244,410,320	90%	268,851,352	95%	295,736,487
	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat		2,85	6,965,174,500	2,90	2,500,000,000	2,92	2,750,000,000	2,95	3,025,000,000	2,97	3,327,500,000

No	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	10,300,000,000	Sedang	11,330,000,000	Tinggi	12,463,000,000	Tinggi	13,709,300,000
					11,103,894,500		16,000,000,000		17,600,000,000		19,360,000,000		21,296,000,000
20	KECAMATAN UJUNGBERUNG												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,130,832,850	100%	947,909,062	100%	1,042,699,968	100%	1,146,969,965	100%	1,261,666,962
	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1,313,717,811	100%	1,449,082,519	100%	1,593,990,771	100%	1,753,389,848	100%	1,928,728,833
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin pegawai negeri sipil	80%	80%	74,722,400	85%	86,187,567	88%	94,806,324	90%	104,286,956	95%	114,715,652
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	75%	75%	120,600,000	80%	136,652,927	85%	150,318,220	90%	165,350,042	95%	181,885,046
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian LAKIP SKPD Oleh Inspektorat atau Kemenpan	CC	CC	69,250,000	CC	80,167,927	CC	88,184,720	B	97,003,192	A	106,703,511
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program Peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat			2,615,076,939		2,500,000,000		2,750,000,000		3,025,000,000		3,327,500,000
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	7,000,000,000	Sedang	7,700,000,000	Tinggi	8,470,000,000	Tinggi	9,317,000,000
		Jumlah			5,324,200,000		12,200,000,002		13,420,000,002		14,762,000,002		16,238,200,003
21	KECAMATAN ARCAMANIK												
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	75%	75%	90,000,000	80%	100,000,000	85%	110,000,000	90%	121,000,000	95%	133,100,000
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penilaian LAKIP SKPD Oleh Inspektorat atau Kemenpan	CC	CC	30,000,000	CC	45,000,000	CC	49,500,000	B	54,450,000	A	59,895,000
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,200,000,000	100%	1,117,822,500	100%	1,229,604,750	100%	1,352,565,225	100%	1,487,821,748

No	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	4,313,675,000	100%	887677500	100%	976,445,250	100%	1,074,089,775	100%	1,181,498,753
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin Pegawai Negeri Sipil	80%	80%	45,000,000	85%	49,500,000	90%	54,450,000	90%	59,895,000	95%	65,884,500
	Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat					2,500,000,000		2,750,000,000		3,025,000,000		3,327,500,000
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	6,300,000,000	Sedang	6,930,000,000	Tinggi	7,623,000,000	Tinggi	8,385,300,000
		Jumlah			6,549,200,000		11,000,000,000		12,100,000,000		13,310,000,000		14,641,000,000
22	KECAMATAN CIBIRU												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,091,368,000	100%	900,504,800	100%	990,555,280	100%	1,089,610,808	100%	1,198,571,889
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	5,277,055,000	100%	987,710,700	100%	1,086,481,770	100%	1,195,129,947	100%	1,314,642,942
	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat disiplin Pegawai Negeri Sipil	75%	75%	84,250,000	80%	95,212,500	85%	104,733,750	90%	115,207,125	95%	126,727,838
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%	80%	141,980,000	85%	163,277,000	89%	179,604,700	90%	197,565,170	95%	217,321,687
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penilaian LAKIP SKPD Oleh Inspektorat atau Kemenpan	CC	CC	25,500,000	CC	28,050,000	CC	30,855,000	B	33,940,500	A	37,334,550
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%	22,950,000	100%	25,245,000	100%	27,769,500	100%	30,546,450	100%	33,601,095
	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat		2,61	2,722,097,000	2,80	2,500,000,000	2,90	2,750,000,000	3,00	3,025,000,000	3,1	3,327,500,000
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	6,500,000,000	Sedang	7,150,000,000	Tinggi	7,865,000,000	Tinggi	8,651,500,000
		Jumlah			9,452,200,800		11,200,000,000		12,320,000,000		13,552,000,000		14,907,200,000
23	KECAMATAN ANTAPANI												
	Program: 1. Pelayanan Adm, Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	875,158,300	100%	662,674,130	100%	728,941,543	100%	801,835,697	100%	882,019,267
	Program: 2. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2,897,800,700	100%	1,228,600,870	100%	1,351,460,957	100%	1,486,607,053	100%	1,635,267,758

No	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program: Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	111,300,000	100%	122,430,000	100%	134,673,000	100%	148,140,300	100%	162,954,330
	Program: Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	66,000,000	100%	72,600,000	100%	79,860,000	100%	87,846,000	100%	96,630,600
	Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian LAKIP SKPD oleh Inspektorat atau Kemenpan	CC	CC	12,450,000	CC	13,695,000	CC	15,064,500	B	16,570,950	A	18,228,045
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program : Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat		IKM = 68	2,932,341,000	IKM = 68,5	2,500,000,000	IKM = 69	2,750,000,000	IKM = 69,5	3,025,000,000	IKM = 70	3,327,500,000
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	7,100,000,000	Sedang	7,810,000,000	Tinggi	8,591,000,000	Tinggi	9,450,100,000
		Jumlah			6,895,050,000		11,700,000,000		12,870,000,000		14,157,000,000		15,572,700,000
24	KECAMATAN RANCASARI												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	780,400,000	100%	558,440,000	100%	614,284,000	100%	675,712,400	100%	743,283,640
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	3,515,850,000	100%	1,473,810,000	100%	1,621,191,000	100%	1,783,310,100	100%	1,961,641,110
	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Displin Pegawai Negeri Sipil	80%	80%	50,000,000	85%	55,000,000	90%	60,500,000	100%	66,550,000	100%	73,205,000
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70%	70%	54,500,000	75%	59,950,000	80%	65,945,000	85%	72,539,500	90%	79,793,450
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penilaian LAKIP SKPD Oleh Inspektorat atau Kemenpan	CC	CC	48,000,000	CC	52,800,000	CC	58,080,000	B	63,888,000	A	70,276,800
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
	Peningkatan Peran kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat		2,85	2,646,050,000	2,9	2,500,000,000	3,1	2,750,000,000	3,1	3,025,000,000	3,25	3,327,500,000
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	6,000,000,000	Sedang	6,600,000,000	Tinggi	7,260,000,000	Tinggi	7,986,000,000
		Jumlah			7,171,400,000		10,700,000,000		11,770,000,000		12,947,000,000		14,241,700,000

No	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
25	KECAMATAN BUAH BATU												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	780,400,000	100%	558,440,000	100%	614,284,000	100%	675,712,400	100%	743,283,640
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	3,515,850,000	100%	1,473,810,000	100%	1,621,191,000	100%	1,783,310,100	100%	1,961,641,110
	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat disiplin Pegawai Negeri Sipil	80%	80	50,000,000	85	55,000,000	90	60,500,000	95	66,550,000	100	73,205,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	54,500,000	100%	59,950,000	100%	65,945,000	100%	72,539,500	100%	79,793,450
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penilaian LAKIP SKPD Oleh Inspektorat atau Kemenpan	CC	CC	48,000,000	CC	52,800,000	CC	58,080,000	B	63,888,000	A	70,276,800
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
	Peningkatan Peran kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat		2,85	2,646,050,000	2,9	2,500,000,000	3,1	2,750,000,000	3,1	3,025,000,000	3,25	3,327,500,000
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	6,700,000,000	Sedang	7,370,000,000	Tinggi	8,107,000,000	Tinggi	8,917,700,000
		Jumlah			7,282,800,000		11,400,000,000		12,540,000,000		13,794,000,000		15,173,400,000
26	KECAMATAN BANDUNG KIDUL												
	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	589,510,000	100%	548,461,000	100%	603,307,100	100%	663,637,810	100%	730,001,591
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana	100%	100%	1,174,250,000	100%	1,291,675,000	100%	1,420,842,500	100%	1,562,926,750	100%	1,719,219,425
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	90%	90%	73,500,000	95%	80,850,000	100%	88,935,000	100%	97,828,500	100%	107,611,350
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70%	70	74,000,000	75	81,400,000	80	89,540,000	85	98,494,000	91	108,343,400
	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penilaian LAKIP SKPD Oleh Inspektorat atau Kemenpan	CC	CC	20,000,000	CC	22,000,000	CC	24,200,000	B	26,620,000	A	29,282,000
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program : Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat		2,68	3,088,340,000	2,85	2,875,614,000	2,90	3,163,175,400	3,10	3,479,492,940	3,20	3,827,442,234

No	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	4,600,000,000	Sedang	5,060,000,000	Tinggi	5,566,000,000	Tinggi	6,122,600,000
		Jumlah			5,019,600,000		9,500,000,000		10,450,000,000		11,495,000,000		12,644,500,000
27	KECAMATAN GEDEBAGE												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm. perkantoran	100%	100%	1,899,515,000	100%	1,194,560,400	100%	1,314,016,440	100%	1,445,418,084	100%	1,589,959,892
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	3,866,032,500	100%	829,389,600	100%	912,328,560	100%	1,003,561,416	100%	1,103,917,558
	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat disiplin pegawai negeri sipil	100%	100%	100,700,000	100%	41,050,000	100%	45,155,000	100%	49,670,500	100%	54,637,550
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70%	70	79,900,000	75	95,000,000	80	104,500,000	85	114,950,000	95	126,445,000
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penilaian LAKIP SKPD oleh Inspektorat atau Kemenpan	CC	CC	12,500,000	CC	40,000,000	CC	44,000,000	B	48,400,000	A	53,240,000
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	3 (Baik)	2,500,000,000	3,1 (Baik)	2,500,000,000	3,2 (Baik)	2,750,000,000	3,3 (Sangat Baik)	3,025,000,000	3,4 (Sangat Baik)	3,327,500,000
		Persentase Jumlah Pengaduan		≤ 2%		≤ 2%		≤ 2%	0	≤ 2%	0	≤ 2%	0
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	4,900,000,000	Sedang	5,390,000,000	Tinggi	5,929,000,000	Tinggi	6,521,900,000
		Jumlah			9,779,420,000		9,600,000,000		10,560,000,000		11,616,000,000		12,777,600,000
28	KECAMATAN PANYILEUKAN												
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan adm. perkantoran	100%	100%	1,179,566,000	100%	997,522,600	100%	1,097,274,860	100%	1,207,002,346	100%	1,327,702,581
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	3,103,239,000	100%	1,000,307,400	100%	1,100,338,140	100%	1,210,371,954	100%	1,331,409,149
	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	95%	95%	85,000,000	99%	93,500,000	100%	102,850,000	100%	113,135,000	100%	124,448,500

No	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	89,700,000	100%	98,670,000	100%	108,537,000	100%	119,390,700	100%	131,329,770
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian LAKIP SKPD oleh Inspektorat atau Kemenpan	CC	CC	5,000,000	CC	10,000,000	CC	11,000,000	CC	12,100,000	CC	13,310,000
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program peningkatan peran kecamatan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat		100%	2,308,495,000	100%	2,500,000,000	100%	2,750,000,000	100%	3,025,000,000	100%	3,327,500,000
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	4,800,000,000	Sedang	5,280,000,000	Tinggi	5,808,000,000	Tinggi	6,388,800,000
		Jumlah			6,776,000,000		9,500,000,000		10,450,000,000		11,495,000,000		12,644,500,000
29	KECAMATAN CINAMBO												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	1,733,035,775	100%	1,608,160,000	100%	1,768,976,000	100%	1,945,873,600	100%	2,140,460,960
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	550,500,000	100%	413,392,500	100%	454,731,750	100%	500,204,925	100%	550,225,418
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil	95%	95%	34,600,000	95%	38,060,000	100%	41,866,000	100%	46,052,600	100%	50,657,860
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70%	70%	70,000,000	75%	77,000,000	80%	84,700,000	85%	93,170,000	90%	102,487,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian LAKIP SKPD oleh Inspektorat atau Kemenpan	CC	CC	57,625,000	CC	63,387,500	CC	69,726,250	B	76,698,875	A	84,368,763
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat			930,974,000		2,500,000,000		2,750,000,000		3,025,000,000		3,327,500,000
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	3,700,000,000	Sedang	4,070,000,000	Tinggi	4,477,000,000	Tinggi	4,924,700,000
		Jumlah			4,560,125,875		8,400,000,000		9,240,000,000		10,164,000,000		11,180,400,000
30	KECAMATAN MANDALAJATI												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm. perkantoran	100%	100%	1.426.067.023	100%	500,000,000	100%	550,000,000	100%	605,000,000	100%	665,500,000

No	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
				2014		2015		2016		2017		2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	927.512.444	100%	1,359,721,009	100%	1,495,693,110	100%	1,645,262,421	100%	1,809,788,663
	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat disiplin pegawai negeri sipil	70%	75%	123,950,000	80%	136,345,000	85%	149,979,500	90%	164,977,450	95%	181,475,195
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70%	70%	164,050,000	75%	180,455,000	80%	198,500,500	90%	218,350,550	95%	240,185,605
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penilaian LAKIP SKPD Oleh Inspektorat atau Kemenpan	CC	CC	21,344,537	CC	23,478,991	CC	25,826,890	B	28,409,579	A	31,250,537
		Tingkat Kewajaran Laporan SKPD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%	
	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat			2,722,381,000		2,500,000,000		2,750,000,000		3,025,000,000		3,327,500,000
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	N/A	-	-	Sedang	6,300,000,000	Sedang	6,930,000,000	Tinggi	7,623,000,000	Tinggi	8,385,300,000
		Jumlah			3,132,220,533		11,000,000,000		12,100,000,000		13,310,000,000		14,641,000,000



RPJMD

BAB 9

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Skenario dan asumsi perencanaan pembangunan daerah tahun 2014-2018 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2018. Indeks Pembangunan Manusia merupakan tolok ukur pembangunan daerah yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah.

Dalam hal perubahan indikator kinerja daerah, dilakukan penyesuaian dengan mengacu kepada:

1. Sasaran Pembangunan Kota Bandung berdasarkan RPJMN 2010-2014; meliputi indikator pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan angka pendapatan per kapita;
2. Tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs)
3. Penyelarasan IPM berdasarkan capaian kurun waktu tahun 2009 s.d. 2013, untuk proyeksi 2005-2025.

Tabel 9-1
Perkembangan IPM dan Komponennya
di Kota Bandung Tahun 2006-2013

Tahun	IPM	Indeks Pendidikan	Indeks Kesehatan	Indeks Daya Beli
2006	77,51	89,26	79,28	63,99
2007	78,09	89,56	80,65	64,04
2008	78,33	89,71	80,97	64,27
2009	78,71	89,83	81,08	65,22
2010	78,99	90,09	81,22	65,66
2011	79,12	90,14	81,32	65,90
2012	79,32	90,25	81,35	66,35
2013	79,43	90,32	81,37	66,59
Pertumbuhan	0,39%	0,18%	0,43%	0,61%

Sumber: BPS Kota Bandung

Pertumbuhan IPM di Kota Bandung menunjukkan *trend* yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai angka 5,8% di tahun 2013. Komponen pembangun laju pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan perkembangan berarti terutama setelah dicapai kesepakatan APEC-CEO *Summit* di Bali beberapa waktu yang lalu. Pada gilirannya turut mendongkrak iklim investasi dalam negeri sehingga membuka ruang kemungkinan yang lebih besar pada pertumbuhan iklim usaha, investasi dan serapan tenaga kerja.

Dengan asumsi pencapaian pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan peningkatan pendapatan perkapita yang dalam implementasinya sangat tergantung kepada kebijakan nasional, menyangkut kebijakan fiskal maupun moneter serta investasi, maka penetapan angka indikator turunan IPM harus mengakomodasikan target RPJMNasional dan RPJM Provinsi Jawa Barat selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Pertimbangan aspek-aspek regional dan permasalahan otonomi daerah layak dikemukakan sebagai materi bahasan dalam upaya pencapaian optimum IPM. Meskipun demikian, mengingat kemampuan realisasi pencapaian target indikator turunan IPM sangat dipengaruhi kemampuan fiskal daerah dan program pembangunan yang berorientasi IPM, serta ketersediaan ruang fiskal daerah, dengan demikian indikator turunan IPM ditetapkan dengan kisaran skala antara target RPJMN dan target berdasarkan rekomendasi BPS yang mempertimbangkan aspek-aspek tersebut di atas.

Penguatan peran pemerintah daerah dalam menyusun tata kelola pemerintahan di daerahnya adalah salah satu pemetaan potensi dan pendalaman peran (*role position*) pemerintahan daerah sebagai pihak yang memiliki nilai strategis dalam menjalankan pembangunan manusia. Otonomi Daerah adalah sebuah konsep besar yang memberikan ruang inovasi bagi daerah otonom (kabupaten/kota) untuk mengenali, menggali dan memberikan ciri unik pada potensi daerah nya masing-masing. Bertitik tolak dari peran dasar pemerintah daerah tersebut, maka perlu dirumuskan langkah-langkah strategis yang mampu mengusung isu-isu sentral daerah kedalam sebuah langkah kebijakan daerah. Isu sentral sektoral yang diusung instansi pusat harus mampu diterjemahkan secara menyeluruh dengan tidak meninggalkan isu-isu lokal.

Sebagai sebuah daerah otonom, Kota Bandung diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah kota dengan para pemangku kepentingan di Kota Bandung. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik.

Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9-2
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan
Kota Bandung Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
1.	IPM	skala	79,43	79,55	79,66	79,78	79,90	80,02
2.	Indeks Pendidikan	skala	90,20	90,77	91,45	92,08	92,71	93,34
3.	Indeks Kesehatan	skala	81,37	81,47	81,57	81,67	81,77	81,87
4.	Indeks Daya Beli	skala	66,59	66,83	67,07	67,32	67,56	67,80
5.	Angka Harapan Hidup (AHH)	skala	73,82	73,65	73,73	73,79	73,81	74,45
6.	Angka Melek Hurup (AMH)	skala	99,62	99,66	99,75	99,84	99,93	99,75
7.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	skala	10,77	11,07	11,37	11,67	12	12
8.	LPE	%	8,98*	9,25	9,52	9,79	10,06	10,33
9.	PDRB (Berlaku)	(Juta Rp)	129.389.930	150.661.630	175.430.410	204.271.172	237.853.353	276.956.445
10.	PDRB per Kapita (Berlaku)	Rupiah	45.069.872	53.499.558	60.216.083	60.589.118	70.254.924	81.516.220
11.	PDRB (Konstan)	(Juta Rp)	40.957.348	41.032.464	44.938.755.	49.338.259	54.301.687	59.911.052
12.	PDRB per Kapita (Riil)	Rupiah	15,255,635	16,501,354	17,996,702	19,688,869	21,598,737	23,764,532
13.	Inflasi	%	< 10,00	< 10,00	< 10,00	< 10,00	< 10,00	< 10,00
14.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,98	10,78	10,55	10,36	10,17	10,00

Tabel 9-3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan di Kota Bandung

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
	Laju inflasi	< 10,00	< 10,00	< 10,00	< 10,00	< 10,00	< 10,00	< 10,00
	PDRB per kapita (riil)	15,255,635	16,501,354	17,996,702	19,688,869	21,598,737	23,764,532	23,764,532
	Jumlah penduduk di atas garis kemiskinan	304.939 jiwa	301.890 jiwa	298.871 jiwa	295.882 jiwa	292.923 jiwa	289.994 jiwa	289.994 jiwa
	Indeks Daya Beli	66,59	66,83	67,07	67,32	67,56	67,80	67,80
	Laju Perumbuhan Ekonomi (LPE)	8,98%*	9,25	9,52	9,79	10,06	10,33	10,33
	Fokus Kesejahteraan Masyarakat							
	Indeks Pendidikan	90,44	90,90	91,32	91,98	92,62	93,72	93,72
	Angka melek huruf	99,62%	99,70%	99,75%	99,82%	99,90%	99,95%	99,95%
	Angka rata-rata lama sekolah	10,77 Tahun	11,07	11,37	11,67	12	12	12 Tahun
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	131,05%	131,05%	131,05%	131,05%	131,05%	131,05%	131,05%
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/Paket B	116,16%	116,16%	116,16%	116,16%	116,16%	116,16%	116,16%
	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	98,96%	99,08%	99,50%	99,60%	99,80%	100%	100%
	Angka pendidikan yang ditamatkan	99,98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	123,13%	123,13%	123,13%	123,13%	123,13%	123,13%	123,13%
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/ Paket C	90,59 %	92,65%	93,50%	95,60%	97,62%	99,00%	99,00%
	KESEHATAN							
	Angka harapan hidup	73,82	73,83	73,84	74,04	74,24	74,45	74,45

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase balita gizi buruk	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
	KETENAGAKERJAAN							
	Rasio penduduk yang bekerja	89,02%	89,22%	89,45%	89,64%	89,83%	90%	90%
	FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA							
	Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian							
	a. cakupan kajian seni	10	2	2	2	2	2	20
	b. cakupan gelar seni	65 pagelaran dan festival	60	60	60	60	60	365
	c. cakupan misi kesenian	18 misi seni budaya	2	3	3	3	3	32
	cakupan sumber daya manusia kesenian	61 seniman/ budayawan	10	10	10	10	10	111
	Pemuda dan Olahraga							
	a. Jumlah gedung olahraga	14 SOR/GOR	15 SOR/GOR	15 SOR/GOR	15 SOR/GOR	15 SOR/GOR	15 SOR/GOR	15 SOR/GOR
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB							
	PENDIDIKAN							
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%
	Pendidikan Dasar							
	Angka partisipasi sekolah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1:227	1:220	1:215	1:210	1:205	1:200	1:195
	Rasio guru/murid	1:44	1:42	1:40	1:38	1:37	1:36	1:36
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1:41	1:40	1:39	1:38	1:37	1:36	1:36
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan menengah:							
	Angka partisipasi sekolah	98,88%	98,89	98,90%	98,91%	98,92%	98,93%	100%
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	98,92%	98,94%	98,96%	98,98%	99,00%	99,02%	99,02%
	Rasio guru terhadap murid	1:42	1:40	1:39	1:38	1:37	1:36	1:36
	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	1:41	1:40	1:39	1:38	1:37	1:36	1:36
	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,55	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Fasilitas Pendidikan:							
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	80%	85%	88%	90%	95%	100%	100%
	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	98,14%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Angka Putus Sekolah:							
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,1%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Angka kelulusan							
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	98,14%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata (SPM)	1:42	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (SPM)	1:227	1:220	1:215	1:210	1:205	1:200	1:195
	Rasio guru terhadap murid (SPM)	1:41	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36
	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata (SPM)	1:41	1:40	1:39	1:38	1:37	1:36	1:36
	KESEHATAN							
	Rasio posyandu per satuan penduduk	1959	1966	1973	1980	1987	1994	1994
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	281	281	282	285	288	291	291
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0.0124	0.0126	0.0133	0.0132	0.0131	0.131	0.131
	Rasio dokter per satuan penduduk	76	77	78	79	80	81	81
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk Perawat & bidan)	49	50	51	51	52	53	53
	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	73	74	77	80	82	84	84
	Pelayanan Kesehatan Dasar							
	- Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	Cakupan pelayanan nifas	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan kunjungan bayi	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan pelayanan anak balita	90%	90%	90%	90%	95%	95%	95%
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan peserta KB aktif	67.80%	68.30%	68.80%	69.80%	69.30%	70.30%	70.30%
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular:	-	-	-	-	-		
	Cakupan <i>Acute Flacid Paralysis</i> (AFP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Penemuan Penderita pneumonia Balita	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan penderita DBD yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Penemuan Penderita Diare	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-	Jumlah puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	5 UPT	5 UPT	6 UPT	7 UPT	8 UPT	9 UPT	9 UPT
-	Persentase balita ditimbang berat badan D/S	75%	75%	80%	85%	90%	90%	90%
-	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-	Pelayanan Kesehatan Rujukan							
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-	cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Cakupan Desa Siaga Aktif	1 00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	63%	63%	70%	75%	80%	85%	85%
	Persentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	4%	7%	14%	20%	27%	35%	35%
	Persentase orang yang berumur 15 Th atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV	0,4%	1%	1,5%	2%	2,5%	3%	3%
	Persentase Kecamatan yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi pencegahan dan penularan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Penderita penyakit menular lainnya yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PEKERJAAN UMUM							
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	54 %	75%	85%	100%	100%	100%	100%
	Panjang jalan kota dalam kondisi baik (> 20 Km/Jam)	54%	75%	85%	100%	100%	100%	100%
	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	616,63 m	60.000m	60.000m	60.000m	50.000m	50.000m	280.000 m
	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	606,12 km2	1 km2	1 km2	1 km2	1 km2	1 km2	5 km2
	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	524,114 m	30.000m	30.000m	30.000m	20.000m	20.000m	130.000m
	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	3 km	1 km	1 km	1 km	1 km	1 km	5 km
	PERUMAHAN							
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	64 %	66 %	68%	70%	72%	74%	74%
	Kawasan Kumuh	11%	10.76%	10.5%	10.27%	10.03%	9.79%	9.79%
	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	488,31m2/org	488,31m2/org	478,09m2/org	473,12m2/org	468,39m2/org	463,89m2/org	463,89m2/org
	Luas kawasan permukiman kumuh	11%	10.76%	10.5%	10.27%	10.03%	9.79%	9.79%
	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	12,14%	14%	16%	18%	20%	23%	23%
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PERHUBUNGAN							
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	6.156.085 orang	6,217,646	6,341,999	6,468,839	6,598,216	6,730,180	6.730.180 orang
	Rasio ijin trayek	6.955/Jml Pddk	6.955/Jml Pddk	6.965/Jml Pddk	6.965/Jml Pddk	6.965/Jml Pddk	6.975/Jml Pddk	6.975/Jml Pddk
	Jumlah uji kir angkutan umum	9.413 kendaraan	9,601	9,793	9,989	10,189	10,393	10.393 kendaraan
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	2 unit terminal bis	2	2	2	2	2	2 unit terminal bis
	Kepemilikan KIR angkutan umum	5% angkutan umum tidak memiliki/tidak lulus uji KIR	< 4,5%	< 4,0%	< 3,5%	< 3,0%	< 2,5%	< 2,5%
	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	50 menit	50 menit	50 menit	50 menit	50 menit	50 menit	50 menit
	Pemasangan Rambu-rambu	8.15%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
	LINGKUNGAN HIDUP							
	Prosentase Penanganan sampah	76%	77%	82%	88%	89%	90%	90%
	Tingkat kualitas udara perkotaan memenuhi baku mutu udara ambien	25%	30%	35%	40%	45%	50%	50%
	Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol.B (Dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)	6,25%	12,50%	17%	17%	17%	17%	17%
	KEPENDUDUKAN							
	Kepemilikan KTP	89,9%	94,23%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 PDDK	706	751	795	839	883	926	926
	Ketersediaan database kependudukan skala kota Bandung	Tesedia	Tesedia	Tesedia	Tesedia	Tesedia	Tesedia	Tesedia
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	1;0.8	1;09	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
	SOSIAL							
	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	55 Buah	46 Buah	48 Buah	60 Buah	60 Buah	60 Buah	60 Buah
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	16,93 %	19%	21%	23%	25%	27%	27%
	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	17,84%	20%	22%	24%	26%	28%	28%

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KETENAGAKERJAAN							
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	63,61%	64,00%	64,40%	64,80%	65,10%	65,50%	65,50%
	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (Rasio Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama)	61,32%	55,00%	56,00%	57,00%	58,00%	58,00%	58,00%
	Rasio Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	39%	50%	51%	52%	53%	54%	54%
	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	14,05%	14,27%	14,60%	14,97%	15,09%	15,29%	15,29%
	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	61,32%	55,00%	56,00%	57,00%	58,00%	58,00%	58,00%
	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	27,68%	27,45%	27,49%	27,53%	28,01%	28,13%	28,13%
	Pelayanan Pengawasan ketenagakerjaan							
	- Besaran Pemeriksaan perusahaan	16,05%	16,29%	16,05%	15,82%	15,59%	15,38%	15,38%
	- Besaran Pengujian peralatan di perusahaan	57,14%	57,80%	58,00%	58,10%	58,30%	58,50%	58,50%
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
	Persentase Koperasi aktif	81,14 %	81,76 %	82,85%	84,41%	86,24%	88,82%	88,82%
	Usaha Mikro dan Kecil	99,42%	99,42%	99,43%	99,43%	99,42%	99,41%	99,41%
	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	21/28	21/28	21/28	21/28	21/28	21/28	21/28
	Jumlah BPR/LKM	28/21	28/21	28/21	28/21	28/21	28/21	28/21
	KEBUDAYAAN							
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	300	60	60	60	60	60	60
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	537	137	100	100	100	100	100
	PEMUDA DAN OLAHRAGA							
	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	0,00121	0,00119	0,00118	0,00117	0,00115	0,00114	0,00114
	Lapangan olahraga .	0,00564	0,00597	0,00590	0,00584	0,00577	0,00570	0,00570
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI							
	Jumlah organisasi pemuda	69 OKP	69 OKP	69 OKP	69 OKP	69 OKP	69 OKP	69OKP
	Jumlah organisasi olahraga	80	80	80	80	80	80	80

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah kegiatan kepemudaan	7 kegiatan	9 kegiatan	10 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan
	Jumlah kegiatan olahraga	10 kegiatan	8 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	12 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan
	Kegiatan pembinaan politik daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	10 Kegiatan
	Kegiatan pembinaan LSM, Ormas dan OKP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	Jumlah demo	297 kali	329 kali	320 kali	264 kali	215 kali	215 kali	215 kali
	PKK aktif	30 151	30 151	30 151	30 151	30 151	30 151	30 151
	Posyandu aktif	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	151	151	151	151	151	151	151
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	26.896 151 126	26.896 151 126	26.896 151 126	26.896 151 126	26.896 151 126	26.896 151 126	26.896 151 126
	LPM Berprestasi	6	6	6	6	6	6	6
	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Rp. 173.288.321.806,	Rp. 150.000.000.000	Rp. 165.000.000.000	Rp. 181.500.000.000	Rp. 199.650.000.000	Rp. 219.615.000.000	Rp. 219.615.000.000
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	NA	45.98%	45.98%	68.57%	91.96%	91.96%	91.96%
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	<22	<20	<18	<16	<15	<15	<15
	Kemiskinan	706.359 jiwa	699.295 jiwa	692.303 jiwa	685.379 jiwa	678.526 jiwa	671.740 jiwa	671.740 jiwa
	KETAHANAN PANGAN							
	Score Pola Pangan Harapan	87.8	89.6	90	90.3	91	91.9	91.9
	Regulasi ketahanan pangan	Belum ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	KEARSIPAN							
	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	29 Depo	7 Depo	7 Depo	7 Depo	7 Depo	8 Depo	36 Depo
	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
	Web site milik pemerintah daerah	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Pameran/expo	1 kali	1 Kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
	Jumlah jaringan komunikasi	10 operator	10 operator	10 operator	10 operator	10 operator	10 operator	10 operator
	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	00.6	00,5	00,4	00,3	00,3	00,3	00,3
	Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk daerah	134 media	140 media	140 media	140 media	140 media	140 media	140 media

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah penyiaran radio/TV lokal yang masuk daerah	52 stasiun	52 stasiun	52 stasiun	52 stasiun	52 stasiun	52 stasiun	52 stasiun
	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional melalui:							
	a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi	12 kali	12 kali	14 kali	16 kali	18 kali	20 kali	12
	b. Media baru seperti website (media online)	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	365
	c. Media interpersonal seperti saresehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	12 kali	12 kali	14 kali	16 kali	18 kali	20 kali	12
	d. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	12 kali	12 kali	14 kali	16 kali	18 kali	20 kali	20 kali
	PERPUSTAKAAN							
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	52.078 eks	5000 eks	5000 eks	5000 eks	5000 eks	5000 eks	25000 eks
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	4532 Pemustaka	4600 Pemustaka	4896 Pemustaka	5184 Pemustaka	5472 Pemustaka	5760 Pemustaka	5760 Pemustaka
	Jumlah perpustakaan	79 perpustakaan	5 perpustakaan	5 perpustakaan	5 perpustakaan	5 perpustakaan	5 perpustakaan	25 Perpustakaan
	PERTANIAN							
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	62,95 kw/ha	63,05 kw/ha	65,05 kw/ha	68,04 kw/ha	69,05 kw/ha	70,00 kw/ha	70,00 kw/ha
	Produksi perikanan	2.575 ton	2.600 ton	2.630 ton	2.665 ton	2.705 ton	2.750 ton	2.750 ton
	PERDAGANGAN							
	Nilai Ekspor Kota Bandung (US\$)	601 juta (US\$)	603 juta (US\$)	606 juta (US\$)	609 juta (US\$)	612 juta (US\$)	614 juta (US\$)	614 juta (US\$)
	INDUSTRI							
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	0.91%	1.36%	1.82%	2.27%	2.73%	3.18%	3.18%
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	22.72%	21.93%	21.14%	20.35%	19.56%	18.77%	18.77%
	Pertumbuhan Industri	13.34%	13.34%	13.34%	13.34%	13.34%	13.34%	13.34%
	Kontribusi industri rumah tangga thd PDRB sektor Industri	1.42%	1.42%	1.42%	1.42%	1.42%	1.42%	1.42%
	Cakupan bina kelompok pengrajin	8.16%	9.53%	10.90%	12.28%	13.65%	15.01%	15.01%



RPJMD

BAB 10

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah Kota Bandung untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Walikota/Wakil Walikota Bandung periode 2013-2018, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat, dan RPJM Nasional.

Selain itu, RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 harus memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi.

10.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya;
- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang

belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih;

- 3) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh SKPD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya; Setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra-SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
2. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2013-2018 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kota Bandung yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
3. Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dimaksud, seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi

daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2013-2018 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
5. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2018 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Walikota terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survey yang dilakukan oleh Bappeda Kota Bandung serta melaporkan hasilnya kepada Walikota;
6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kota Bandung yang dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
7. Penyusunan RKPD Kota Bandung dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota;
8. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kota Bandung merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
9. Terhadap SOTK baru yang dibentuk setelah RPJMD ditetapkan, dapat diusulkan program/kegiatan baru di luar yang ada dalam dokumen RPJMD.



RPJMD

BAB 11

Penutup

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018, sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Walikota/Wakil Walikota, disusun selain dengan pendekatan teknokratik yaitu proses persiapan penyusunan yang dilaksanakan oleh aparaturnya Pemerintah Kota Bandung, *top-down bottom-up* yaitu metode penyusunan yang saling berkaitan antara rancangan RPJMD dengan rancangan Rencana Strategis SKPD, pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* yaitu melalui proses Konsultasi Publik, *Focus Group Discussion* (FGD), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta pendekatan politis, yaitu proses penetapan di dalam kerangka penetapan RPJMD sebagai Peraturan Daerah.

Untuk menjamin pencapaian visi, misi, program yang telah disusun, pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 menjadi tanggung jawab bersama di antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dengan menekankan kepada INOVASI pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung. Keberhasilan pencapaian RPJMD ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas mewujudkan masyarakat Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera.

WALIKOTA BANDUNG

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL, ST., M.UD.